



**PERUBAHAN RPJMD
KOTA BANDUNG
TAHUN 2018-2023**



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

19. Peraturan ...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3);

22. Peraturan ...

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07);
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18);
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3);

28. Peraturan ...

28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Sistematika Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 meliputi:

BAB I	:	PENDAHULUAN;
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
BAB III	:	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
BAB IV	:	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
BAB V	:	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN;
BAB VI	:	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB VII	:	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
BAB VIII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
BAB IX	:	PENUTUP.

- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 November 2021
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 11 NOMOR 2021
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT
(9 /241/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP.19760604 200604 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 3 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2025 serta dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya di tingkat Kota Bandung. Selain visi dan misi, RPJMD Tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program beserta pagu indikatifnya yang disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota. RPJMD selanjutnya digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Beberapa hal yang mendasari perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, antara lain:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dalam rangka untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat.
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada prinsipnya bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
 - e. Surat Edaran Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dalam rangka percepatan implementasi dan terwujudnya integrasi proses Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
2. Evaluasi Hasil RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 menunjukkan bahwa:
 - a. Terdapat substansi dalam RPJMD yang dirumuskan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Substansi yang dimaksud antara lain:
 - 1) Penghitungan dan analisis kapasitas riil keuangan daerah pada Bab III Gambaran Keuangan Daerah belum sesuai dengan Pasal 157 Ayat (3) dan Pasal 158.

- 2) Tabel 7.2 Tabel Program dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah di Bab VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah belum menyajikan perangkat daerah penanggung jawab dari masing-masing program. Selain itu, Tabel 7.2 belum mencantumkan total pagu program setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Total pagu tersebut harus sama dengan belanja langsung pada Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2018–2023, dan nilai Kapasitas riil kemampuan keuangan pada Tabel 3.30 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- 3) Berdasarkan hasil penelaahan terhadap indikator lain yang tepat untuk mengukur sasaran pada Misi 2 yaitu Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, maka ditemukan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indikator yang tepat untuk menggantikan Level Kematangan Smart City. Untuk itu Pemerintah Daerah Kota Bandung mempertimbangkan untuk mengganti indikator Level Kematangan Smart City Kota Bandung menjadi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- 4) Sehubungan dengan angka 3) diatas, maka indikator kinerja Level Kematangan Smart City Kota Bandung akan menjadi indikator untuk mengukur tujuan: Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien. Dengan demikian, terdapat 2 (dua) indikator tujuan tersebut, yaitu:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi; dan
 - b. Level Kematangan Smart City Kota Bandung.
- 5) Beberapa pernyataan Strategi pada Bab VI RPJMD tidak sama (tidak konsisten) antar tabel.
- 6) Penyajian urutan sasaran di Misi 2 tidak sama antara Tabel 6.1 dan Tabel 6.10 yaitu sasaran Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin dan sasaran Meningkatkan Kesempatan Kerja.
- 7) Pada Tabel 6.10, sasaran Meningkatnya Layanan Air Bersih di Misi 3, tidak dicantumkan. Strategi pada sasaran ini (sebagaimana dimuat pada Tabel 6.1) menjadi strategi pada sasaran Meningkatkan Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas.
- 8) Perlu adanya penjelasan yang lebih rinci untuk setiap program prioritas kepala daerah sebagaimana dimuat dalam bab VI RPJMD, sehingga dapat diimplementasikan dengan tepat sasaran, efektif dan efisien serta transparan dan akuntabel. Janji politik Kepala Daerah perlu dijabarkan lebih rinci dan terukur. Keterukuran antara lain berupa target, lokasi, dan kelompok sasaran per tahun, sehingga memberikan panduan yang jelas dalam pelaksanaannya.

- b. Pemetaan kinerja/kerangka logis yang menjadi bagian dari RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 belum disusun dengan pola yang sama untuk masing-masing misi khususnya pada bagian Intermediate Outcome/Indikasi Sasaran PD. Selain itu, konsep kerangka logis yang dirancang untuk menjabarkan setiap misi belum sepenuhnya dipedomani untuk menyusun alur/pemetaan kinerja pada Bab 5 dan 6 RPJMD.
3. Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Bandung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Hasil evaluasi Tahun 2019 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung memperoleh nilai 78,00 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Bandung mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2018 hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kota Bandung adalah 80,05 atau predikat A.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 11

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufik, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan RPJMD diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RPJMD 2018-2023 terdiri atas Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Gambaran Umum Keuangan Daerah, Permasalahan dan Isu-isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Pembangunan, Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Penutup. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kota Bandung.

Bandung, 30 November 2021

WALI KOTA BANDUNG,

TTD

ODED MOHAMAD DANIAL

Daftar Isi

Kata Pengantar – xvi

Daftar Isi – xvii

Bab
I



PENDAHULUAN	I – 2
1.1 Latar Belakang	I – 4
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I – 8
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I – 11
1.3.1 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Bandung dengan RPJMN	I – 11
1.3.2 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Bandung dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat	I – 12
1.3.3 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Bandung dengan RPJPD Kota Bandung	I – 12
1.3.4 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Bandung dengan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah Kota Bandung	I – 12
1.3.5 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Bandung dengan RTRW Kota Bandung	I – 13
1.4 Maksud dan Tujuan	I – 14
1.4.1 Maksud	I – 14
1.4.2 Tujuan	I – 14
1.5 Sistematika Penulisan	I – 15

Bab
II



GAMBARAN UMUM KOTA BANDUNG	II – 2
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II – 4
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kota Bandung	II – 4
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II – 10
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana	II – 13
2.1.4 Demografi	II – 14
2.1.5 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II – 20
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II – 33
2.2.1 Pertumbuhan dan Distribusi PDRB	II – 33
2.2.2 PDRB Per Kapita	II – 36
2.2.3 Pengeluaran Per Kapita	II – 38
2.2.4 Laju Inflasi	II – 39
2.2.5 Gini Ratio	II – 40
2.2.6 Tingkat Kemiskinan	II – 41
2.2.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	II – 44
2.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	II – 45
2.2.9 Indeks Pembangunan Manusia	II – 46
2.2.10 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	II – 48
2.2.11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	II – 50
2.2.12 Skor Pola Pangan Harapan	II – 50

2.3	Aspek Pelayanan Umum	II – 51
2.3.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II – 51
2.3.2	Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar	II – 73
2.3.3	Urusan Pilihan	II – 110
2.3.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	II – 114
2.3.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	II – 121
2.3.6	Unsur Pengawasan	II – 127
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II – 128
2.5	Capaian Kinerja RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018	II – 176
2.6	Capaian Kinerja RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 sampai dengan Tahun 2020	II – 186
2.7	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	II – 189
2.7.1	Indikator Target TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target (SS)	II – 190
2.7.2	Indikator Target TPB yang Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target (BB)	II – 193
2.7.3	Indikator Target TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (TT)	II – 196
2.7.4	Indikator Target TPB yang Belum Memiliki Data (NA)	II – 199
2.7.5	Indikator Capaian TPB Berdasarkan Pilar Pembangunan	II – 203
2.8	Kondisi Pandemi COVID-19	II – 205
2.9	Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kesehatan, Sosial, dan Ekonomi	II – 208
2.10	Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	II – 212
2.11	Kerjasama Daerah	II – 213
2.12	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II – 215



GAMBARAN KEUANGAN DAERAH		III – 2
3.1	Kinerja Keuangan Tahun 2016-2020	III – 4
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2016 - 2020	III – 5
3.1.2	Neraca Daerah	III – 19
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III – 27
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	III – 31
3.2.2	Analisis Pembiayaan	III – 33
3.3	Kerangka Pendanaan	III – 36
3.3.1	Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan	III – 37
3.3.2	Perhitungan Kerangka Pendanaan	III – 41



Bab
IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

VI - 2

4.1	Permasalahan Pembangunan	VI - 4
4.1.1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	VI - 6
4.1.2	Aspek Daya Saing	VI - 14
4.1.3	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	VI - 19
4.1.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	VI - 24
4.1.5	Urusan Pemerintahan Pilihan	VI - 34
4.1.6	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	VI - 35
4.1.7	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	VI - 36
4.2	Isu Strategis	VI - 37
4.2.1	Pertimbangan Penentuan Isu Strategis	VI - 38
4.2.2	Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung	VI - 79



Bab
V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

V - 2

5.1	Visi	V - 4
5.2	Misi	V - 5
5.3	Tujuan dan Sasaran	V - 6



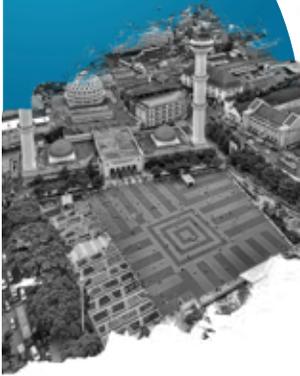
Bab
VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

VI - 2

6.1	Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik dan Integratif	VI - 4
6.2	Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial	VI - 14
6.2.1	Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang	VI - 14
6.3	Program Pembangunan Daerah	VI - 22

Bab
VII



**KERANGKA PENDANAAN
DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

VII - 2

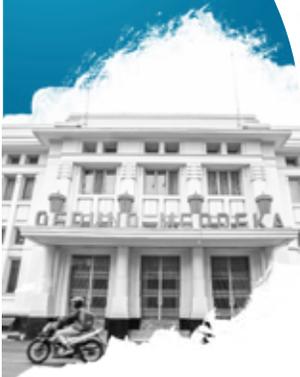
Bab
VIII



**KINERJA PENYELENGGARAAN
Pemerintahan Daerah**

VIII - 2

Bab
IX



PENUTUP

- 9.1 Kaidah Pelaksanaan
- 9.2 Pedoman Transisi

IX - 2

IX - 4

IX - 5

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Rata-Rata Curah Hujan, Hari Hujan, dan Lama Penyinaran Matahari di Kota Bandung Tahun 2016-2020	II-6
Tabel 2.2	Temperatur Rata-Rata Kota Bandung Tahun 2016-2020	II-6
Tabel 2.3	Kelembapan Rata-Rata Kota Bandung Tahun 2016-2020	II-7
Tabel 2.4	Luas Tutupan Lahan Kota Bandung Tahun 2016	II-7
Tabel 2.5	Luas Lahan Berdasarkan Pemanfaatan di Kota Bandung Tahun 2018	II-8
Tabel 2.6	Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-15
Tabel 2.7	Distribusi Penduduk Per Kecamatan dan Kepadatan Penduduk di Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-16
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk berdasarkan Umur di Kota Bandung Tahun 2020	II-18
Tabel 2.9	Daya Dukung Lahan Pertanian Terhadap Konsumsi Beras di Kota Bandung	II-23
Tabel 2.10	Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	II-27
Tabel 2.11	Koefisien Lindung Lahan Berdasarkan Jenis Guna Lahan	II-27
Tabel 2.12	Daya Dukung Lahan Lindung Kota Bandung	II-28
Tabel 2.13	Daya Tampung Penduduk Kota Bandung	II-30
Tabel 2.14	PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2015-2020	II-33
Tabel 2.15	PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2015-2020	II-34
Tabel 2.16	Perbandingan PDRB Per Kapita Harga Konstan Kota Bandung, Wilayah Bandung Raya dan Provinsi Jawa Barat Periode 2016-2020 (Dalam Juta Rupiah)	II-38
Tabel 2.17	Pengeluaran Perkapita Penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019 dan 2020 (Juta Rupiah)	II-39
Tabel 2.18	Perkembangan Inflasi Tahunan Tingkat Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Periode 2016-2020	II-40
Tabel 2.19	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Garis Kemiskinan di Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-42
Tabel 2.20	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2017-2020	II-43
Tabel 2.21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Bandung dan Jawa Barat Tahun 2015-2020	II-44
Tabel 2.22	Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bandung Tahun 2018-2020	II-46
Tabel 2.23	IPM dan Komponen Pembentuk IPM Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-46
Tabel 2.24	Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah Pada Jenjang Dikdas dan Dikmen di Kota Bandung Tahun 2016-2019	II-51
Tabel 2.25	Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Bandung Tahun 2016 - 2020	II-52
Tabel 2.26	Persentase Guru Berpendidikan > S1 di Kota Bandung Tahun 2016 - 2020	II-53

Tabel 2.27	Angka Partisipasi Kasar Kota Bandung Tahun 2016-2020	II-53
Tabel 2.28	Angka Partisipasi Murni Kota Bandung Tahun 2016-2019	II-53
Tabel 2.29	Indikator Capaian Kinerja Pada Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2016-2020	II-54
Tabel 2.30	Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Bandung Tahun 2015- 2020	II-56
Tabel 2.31	Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita di Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-57
Tabel 2.32	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk di Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-58
Tabel 2.33	Profil Tenaga Kesehatan Tahun 2015-2020	II-58
Tabel 2.34	Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-59
Tabel 2.35	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap di Kota Bandung Tahun 2016-2020	II-62
Tabel 2.36	Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-62
Tabel 2.37	Persentase Cakupan Pelayanan Air Limbah di Kota Bandung Tahun 2015-2019	II-63
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Tahun 2015-2020	II-63
Tabel 2.39	Indikator Kinerja Utama Urusan Pekerjaan Umum di Kota Bandung Tahun 2018-2020	II-64
Tabel 2.40	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-66
Tabel 2.41	Indikator Kinerja Utama Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Bandung Tahun 2016-2020	II-66
Tabel 2.42	Penyelesaian Penegakan Perda di Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-67
Tabel 2.43	Indikator Kinerja Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2020	II-69
Tabel 2.44	Sarana Sosial di Kota Bandung Tahun 2015-2019	II-70
Tabel 2.45	Indikator Kinerja Utama Urusan Sosial Kota Bandung Tahun 2018-2020	II-70
Tabel 2.46	Indikator Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-73
Tabel 2.47	Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-75
Tabel 2.48	Indikator Pangan di Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-76
Tabel 2.49	Indikator Pertanahan Kota Bandung Tahun 2015-2019	II-77
Tabel 2.50	Perkembangan Status Mutu Sungai Tahun 2015-2019	II-78
Tabel 2.51	Perkembangan Indeks Kualitas Air Tahun 2016-2020	II-78
Tabel 2.52	Indeks Kualitas Udara	II-79
Tabel 2.53	Hasil Pengukuran Kualitas Udara Ambien Kota Bandung Tahun 2020	II-80
Tabel 2.54	Penambahan Luas Taman/RTH di Kota Bandung	II-83
Tabel 2.55	Persentase Penanganan Sampah di Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-84
Tabel 2.56	Wilayah Operasional Cakupan Pelayanan Sampah Kota Bandung	II-84
Tabel 2.57	Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup	II-85
Tabel 2.58	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2016-2020	II-87
Tabel 2.59	Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2016-2020	II-87
Tabel 2.60	PKK Aktif di Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-88
Tabel 2.61	Posyandu Aktif di Kota Bandung Tahun 2015-2019	II-89
Tabel 2.62	Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2016-2020	II-89

Tabel 2.63	Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kota Bandung Tahun 2016-2020	II-91
Tabel 2.64	Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kota Bandung Tahun 2016-2020	II-92
Tabel 2.65	Sarana/Prasarana Komunikasi dan Informatika di Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-94
Tabel 2.66	Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020	II-95
Tabel 2.67	Persentase Koperasi Aktif dan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-97
Tabel 2.68	Indikator Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2018-2020	II-98
Tabel 2.69	Jumlah Investor PMDN/PMA di Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-101
Tabel 2.70	Jumlah Investasi PMDN/PMA (Miliar) di Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-102
Tabel 2.71	Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kota Bandung Tahun 2018-2020	II-102
Tabel 2.72	Presentasi Olahraga Kota Bandung	II-103
Tabel 2.73	Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kota Bandung Tahun 2016-2020	II-103
Tabel 2.74	Indikator Statistik Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-105
Tabel 2.75	Indikator Persandian Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-105
Tabel 2.76	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan di Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-106
Tabel 2.77	Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan di Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-107
Tabel 2.78	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-108
Tabel 2.79	Indikator Kearsipan di Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-109
Tabel 2.80	Indikator Kinerja Perikanan Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-111
Tabel 2.81	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata di Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-111
Tabel 2.82	Produktivitas Padi Per Hektar Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-112
Tabel 2.83	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-112
Tabel 2.84	Indikator Kinerja Urusan Pertanian di Kota Bandung Tahun 2019-2020	II-112
Tabel 2.85	Ekspor Bersih Perdagangan Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-113
Tabel 2.86	Indikator Kinerja Urusan Perdagangan di Kota Bandung Tahun 2018-2020	II-113
Tabel 2.87	Potensi Sektor Industri di Kota Bandung Tahun 2020	II-114
Tabel 2.88	Potensi Sektor Industri di Kota Bandung Tahun 2020	II-114
Tabel 2.89	Indikator Kinerja Urusan Industri di Kota Bandung Tahun 2020	II-114
Tabel 2.90	Daftar Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020	II-115
Tabel 2.91	Capaian Realisasi AKIP Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-117
Tabel 2.92	Capaian Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2016-2020	II-118
Tabel 2.93	Capaian Indikator Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2016-2020	II-121
Tabel 2.94	Capaian Indikator Kinerja Unsur Penunjang Perencanaan Tahun 2015-2020	II-121
Tabel 2.95	Indikator Keuangan Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-122
Tabel 2.96	Capaian Indikator Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2020	II-125
Tabel 2.97	Perkembangan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2020	II-126
Tabel 2.98	Perkembangan Indikator Pengawasan Tahun 2016-2020	II-127

Tabel 2.99	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bandung Periode 2016-2020	II-129
Tabel 2.100	Kinerja Penanganan Banjir dan Genangan Tahun 2016-2020	II-130
Tabel 2.101	Data Kejadian Genangan/Cileuncang Kota Bandung Tahun 2020	II-130
Tabel 2.102	Jumlah Restoran dan Katering di Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-132
Tabel 2.103	Jumlah Penginapan/Hotel di Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-132
Tabel 2.104	Liveable City Index Tahun 2017-2019	II-133
Tabel 2.105	Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)	II-135
Tabel 2.106	Perincian Pendapatan Retribusi Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)	II-136
Tabel 2.107	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Bandung Periode 2015-2019	II-137
Tabel 2.108	Rasio Ketergantungan di Kota Bandung Periode 2015-2020	II-137
Tabel 2.109	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-138
Tabel 2.110	Capaian Kinerja Misi 1 RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018	II-177
Tabel 2.111	Capaian Kinerja Misi 2 RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018	II-179
Tabel 2.112	Capaian Kinerja Misi 3 RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018	II-181
Tabel 2.113	Capaian Kinerja Misi 4 RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018	II-183
Tabel 2.114	Capaian Kinerja RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023	II-186
Tabel 2.115	Capaian KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023	II-190
Tabel 2.116	Capaian KLHS Revisi RPJMD Tahun 2018-2023	II-194
Tabel 2.117	Indikator Target yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai target	II-196
Tabel 2.118	Indikator Target yang Belum Memiliki Data (NA)	II-200
Tabel 2.119	Perbandingan Capaian KLHS RPJMD Tahun 2018 dan KLHS Revisi RPJMD Tahun 2020	II-202
Tabel 2.120	Capaian Pilar Sosial dan OPD Pemangku	II-203
Tabel 2.121	Capaian Pilar Ekonomi dan OPD Pemangku	II-204
Tabel 2.122	Capaian Pilar Lingkungan dan OPD Pemangku	II-204
Tabel 2.123	Capaian Pilar Hukum dan Tata Kelola dan OPD Pemangku	II-205
Tabel 2.124	Peraturan Pandemi Covid-19 yang Berlaku di Kota Bandung	II-208
Tabel 2.125	Realisasi Bansos Covid-19 Tahun 2020 di Kota Bandung	II-211
Tabel 2.126	Realisasi Bansos Covid-19 Tahun 2021 di Kota Bandung	II-211
Tabel 2.127	Jumlah Kerjasam Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-214
Tabel 2.128	Realisasi Bidang Pendidikan Tahun 2020	II-215
Tabel 2.129	Alokasi Anggaran Bidang Pendidikan Tahun 2020	II-215
Tabel 2.130	Realisasi Bidang Kesehatan Tahun 2020	II-216
Tabel 2.131	Alokasi Anggaran Bidang Kesehatan Tahun 2020	II-217
Tabel 2.132	Realisasi Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020	II-217
Tabel 2.133	Alokasi Anggaran Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020	II-217
Tabel 2.134	Realisasi Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020	II-218
Tabel 2.135	Alokasi Anggaran Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020	II-218
Tabel 2.136	Realisasi Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2020	II-218
Tabel 2.137	Realisasi Sub Urusan Bencana dan Kebakaran Tahun 2020	II-219
Tabel 2.138	Layanan Penunjang Operasi darurat Non Kebakaran	II-219

Tabel 2.139	Alokasi Anggaran Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	II-220
Tabel 2.140	Alokasi Anggaran Sub Urusan Bencana dan Kebakaran	II-222
Tabel 2.141	Realisasi Bidang Urusan Sosial Tahun 2020	II-223
Tabel 2.142	Alokasi Anggaran Bidang Urusan Sosial	II-224
Tabel 3.1	Realisasi Target Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2016 s/d 2020 (Dalam Miliar Rupiah)	III-5
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2016 s/d 2020 (Dalam Miliar Rupiah)	III-6
Tabel 3.3	Realisasi Target Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2016 s/d 2020 (Dalam Miliar Rupiah)	III-7
Tabel 3.4	Realisasi Target Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2016 s/d 2020 (Dalam Miliar Rupiah)	III-7
Tabel 3.5	Realisasi Target Retribusi Daerah Kota Bandung Tahun 2016 s/d 2020 (Dalam Miliar Rupiah)	III-9
Tabel 3.6	Realisasi Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Bandung Tahun 2016 s/d 2020 (Dalam Miliar Rupiah)	III-9
Tabel 3.7	Realisasi Target Lain-lain PAD Yang Sah Kota Bandung Tahun 2016 s/d 2020 (Dalam Miliar Rupiah)	III-10
Tabel 3.8	Realisasi Target Dana Perimbangan Kota Bandung Tahun 2016 s/d 2020 (Dalam Miliar Rupiah)	III-11
Tabel 3.9	Persentase Realisasi Terhadap Target Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Bandung Tahun 2016 s/d 2020 (Dalam Miliar Rupiah)	III-12
Tabel 3.10	Persentase Realisasi Terhadap Target Dana Alokasi Umum Kota Bandung Tahun 2016 s/d 2020 (Dalam Miliar Rupiah)	III-13
Tabel 3.11	Persentase Realisasi Terhadap Target Dana Alokasi Khusus Kota Bandung Tahun 2016 s/d 2020 (Dalam Miliar Rupiah)	III-13
Tabel 3.12	Persentase Realisasi Terhadap Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Bandung Tahun 2016 s/d 2020 (Dalam Miliar Rupiah)	III-14
Tabel 3.13	Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2016 s/d 2020 (Dalam Miliar Rupiah)	III-15
Tabel 3.14	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Bandung Tahun 2016 s/d 2020 (Dalam Miliar Rupiah)	III-16
Tabel 3.15	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2016 s/d 2020 (Dalam Miliar Rupiah)	III-17
Tabel 3.16	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Bandung Tahun 2016 s/d 2020 (Dalam Miliar Rupiah)	III-18
Tabel 3.17	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Bandung Tahun 2016 s/d 2020 (Dalam Miliar Rupiah)	III-20
Tabel 3.18	Analisis Rasio Keuangan Kota Bandung Tahun 2016 s/d 2020	III-26
Tabel 3.19	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bandung Tahun 2016 s/d 2020 (Dalam Miliar Rupiah)	III-31
Tabel 3.20	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bandung (Dalam Miliar Rupiah)	III-32
Tabel 3.21	Defisit Riil Anggaran Kota Bandung (Dalam Miliar Rupiah)	III-33
Tabel 3.22	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Bandung (Dalam Miliar Rupiah)	III-33

Tabel 3.23	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Dalam Miliar Rupiah)	III-34
Tabel 3.24	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Bandung (Dalam Miliar Rupiah)	III-34
Tabel 3.25	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Kota Bandung Tahun 2016-2020 (Dalam Miliar Rupiah)	III-35
Tabel 3.26	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2020 (Struktur Menggunakan PP No.58 Tahun 2005)	III-38
Tabel 3.27	Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2021-2023 (Struktur Menggunakan PP No.12 Tahun 2019)	III-38
Tabel 3.28	Realisasi Belanja Kota Bandung Tahun 2018-2020 (Struktur Menggunakan PP No.58 Tahun 2005)	III-40
Tabel 3.29	Proyeksi Belanja Kota Bandung Tahun 2021-2023 (Struktur Menggunakan PP No.12 Tahun 2019)	III-41
Tabel 3.30	Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Bandung	III-42
Tabel 3.31	Tabel Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2023	III-42
Tabel 3.32	Realisasi Belanja Wajib dan Mengikat Kota Bandung	III-43
Tabel 3.33	Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat	III-43
Tabel 3.34	Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bandung	III-44
Tabel 3.35	Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah	III-45
Tabel 3.36	Proyeksi Penggunaan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah	III-46
Tabel 4.1	Hasil Telaahan RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 Periode Perencanaan Tahun 2018-2023	IV-49
Tabel 4.2	Identifikasi RPJMD Daerah Lain	IV-58
Tabel 4.3	Sinergi Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Barat, KLHS dan Kota Bandung Mutu Air Sungai Kota Bandung	IV-61
Tabel 4.4	Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 1 - Mengentaskan Kemiskinan	IV-65
Tabel 4.5	Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 6 - Menjamin Air Bersih Berkelanjutan	IV-70
Tabel 4.6	Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 8 - Pertumbuhan Ekonomi	IV-73
Tabel 4.7	Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 5 - Kesetaraan Gender	IV-77
Tabel 4.8	Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 11 - Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	IV-78
Tabel 4.9	Sinergi Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Barat, KLHS dan Kota Bandung	IV-84
Tabel 5.1	Keselarasn Misi Pada RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 dengan Misi Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023	V-6
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023	V-7
Tabel 5.3	Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023	V-11
Tabel 6.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi Setiap Misi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023	VI- 6
Tabel 6.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Setiap Misi Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023	VI- 9
Tabel 6.3	Capaian Kinerja Misi 1	VI- 18

Tabel 6.4	Capaian Kinerja Misi 2	VI- 19
Tabel 6.5	Capaian Kinerja Misi 3	VI- 19
Tabel 6.6	Capaian Kinerja Misi 4	VI- 20
Tabel 6.7	Capaian Kinerja Misi 5	VI- 20
Tabel 6.8	Fokus Pembangunan Kota Bandung	VI- 21
Tabel 6.9	Tema Pembangunan Kota Bandung	VI- 22
Tabel 6.10	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2021-2023	VI- 23
Tabel 6.11	Program Prioritas Kepala Daerah Tahun 2018-2023	VI- 26
Tabel 6.12	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kota Bandung	VI- 41
Tabel 6.13	Rencana Proyek Strategis Kota Bandung	VI-138
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2018 - 2023	VII- 4
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Bandung Tahun 2018-2023	VII- 6
Tabel 8.1	Proyeksi Indikator Makro Kota Bandung Tahun 2021-2023	VIII- 4
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Daerah/Tujuan Pembangunan Kota Bandung Tahun 2018-2023	VIII- 5
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2019-2023	VIII-11
Tabel 8.4	Penetapan Infikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bandung	VIII-22
Tabel 8.5	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/Outcome Kota Bandung Tahun 2021-2023	VIII-37

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Proses Penyusunan RPJMD Kota Bandung	I-7
Gambar 1.2	Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah	I-11
Gambar 1.3	Keterkaitan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah	I-13
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Bandung	II-4
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya	II-10
Gambar 2.3	Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung Tahun 2016 – 2020	II-15
Gambar 2.4	Kepadatan Penduduk di Kota Bandung Tahun 2016-2020 (Jiwa/km ²)	II-17
Gambar 2.5	Komposisi Penduduk Kota Bandung Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 – 2020	II-18
Gambar 2.6	Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Bandung Tahun 2015 dan 2017 - 2020	II-19
Gambar 2.7	Perkembangan Komposisi Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016 – 2020 (%)	II-20
Gambar 2.8	Peta Ketersediaan Air Kota Bandung	II-21
Gambar 2.9	Peta Kebutuhan Air Kota Bandung	II-22
Gambar 2.10	Peta Daya Dukung Air Kota Bandung	II-22
Gambar 2.11	Peta Sebaran Ketersediaan Beras di Kota Bandung	II-24
Gambar 2.12	Peta Sebaran Kebutuhan Pangan di Kota Bandung	II-25
Gambar 2.13	Peta Daya Dukung Pangan Kota Bandung	II-25
Gambar 2.14	Peta Ketersediaan Lahan Permukiman di Kota Bandung	II-31
Gambar 2.15	Peta Sebaran Penduduk Tahun 2023	II-32
Gambar 2.16	Peta Daya Tampung Penduduk Kota Bandung Tahun 2023	II-32
Gambar 2.17	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020	II-35
Gambar 2.18	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2015–2020 dan Perbandingannya dengan Jawa Barat dan Nasional (Metode Tahun Dasar 2010)	II-36
Gambar 2.19	PDRB Per Kapita Kota Bandung Tahun 2013-2017	II-37
Gambar 2.20	Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kota Bandung Tahun 2015-2020 (dalam ribu rupiah)	II-38
Gambar 2.21	Perbandingan Gini Ratio Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016 –2020	II-41
Gambar 2.22	Persentase Penduduk Miskin Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015-2020	II-42
Gambar 2.23	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015-2020	II-45

Gambar 2.24	IPM Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015-2020	II-47
Gambar 2.25	Perbandingan IKM Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020	II-48
Gambar 2.26	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015-2019	II-49
Gambar 2.27	Indeks Pemberdayaan Gender (IGD) Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015-2019	II-49
Gambar 2.28	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Bandung Tahun 2018-2020	II-50
Gambar 2.29	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018	II-51
Gambar 2.30	Perkembangan Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 2015-2020	II-55
Gambar 2.31	Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kota Bandung Tahun 2015-2020	II-55
Gambar 2.32	Jumlah Kematian Ibu Secara Absolut di Kota Bandung Tahun 2015-2019	II-56
Gambar 2.33	Jumlah Kematian Bayi di Kota Bandung Tahun 2015-2019	II-57
Gambar 2.36	Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Bandung (IKTL) Tahun 2017-2020	II-82
Gambar 2.37	Kepemilikan Kendaraan di Kota Bandung	II-91
Gambar 2.38	Jumlah Pelanggan yang Menggunakan Listrik PLN Tahun 2015-2019	II-133
Gambar 2.39	Indikator Target yang Sudah dilaksanakan dan mencapai Target (SS)	II-190
Gambar 2.40	Indikator Target yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (BB)	II-194
Gambar 2.41	Indikator Target yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (TT)	II-196
Gambar 2.42	Indikator Target yang Belum Memiliki Data (NA)	II-200
Gambar 2.43	Gambaran Kasus Covid-19 di Kota Bandung	II-205
Gambar 2.44	Perkembangan Bed Occupancy Ratio (BOR) di Kota Bandung	II-206
Gambar 2.45	Status Kependudukan Pasien Rawat Inap Covid-19	II-207
Gambar 2.46	Alokasi dan Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 Kota Bandung	II-210
Gambar 3.1	Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2016-2020	III-8
Gambar 3.2	Grafik Pertumbuhan Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2016-2020	III-9
Gambar 3.3	Grafik Pertumbuhan Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2016-2020	III-10
Gambar 3.4	Grafik Pertumbuhan Target dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2016-2020	III-11
Gambar 3.5	Pertumbuhan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2016-2020	III-12
Gambar 3.6	Pertumbuhan Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2016-2020	III-13
Gambar 3.7	Pertumbuhan Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2016-2020	III-14
Gambar 3.8	Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019	III-36
Gambar 3.9	Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah	III-37
Gambar 3.10	Analisis Proyeksi Belanja Daerah	III-39
Gambar 3.11	Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah	III-42

Gambar 4.1	Visi,Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024	IV-41
Gambar 4.2	Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2020-2024	IV-42
Gambar 4.3	Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung	IV-46
Gambar 4.4	Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung	IV-47
Gambar 4.5	Isu Strategis Jangka Menengah Kota Bandung	IV-79
Gambar 6.1	Basic Logic Model	VI- 5
Gambar 6.2	Pohon Kinerja	VI- 5



PENDAHULUAN



BAB

I



1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjangka meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahunan, (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan, dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahunan.

Setelah terpilihnya H. Oded Mohamad Danial, S.A.P. sebagai Wali Kota Bandung dan H. Yana Mulyana, S.E. sebagai Wakil Wali Kota Bandung masa bakti periode 2018-2023 yang dilantik pada tanggal 20 September 2018, maka melekat kewajiban untuk menyusun RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023. RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 pada tanggal 20 Maret 2019.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN. RPJMD sebagai kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah memiliki nilai strategis yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Media untuk mengimplementasikan janji kepala daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
3. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun mulai 2019 sampai dengan 2023;
4. Pedoman bagi kota dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang selaras dengan provinsi dan nasional;
5. Pedoman pengambilan kebijakan percepatan penanganan dan pemulihan pasca pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
6. Instrumen untuk mengukur kinerja kepala daerah dan kinerja kepala perangkat daerah; dan
7. Instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang).

Pada tahun kedua (tahun 2020) pelaksanaan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018–2023, dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD. Evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD sebab memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Pada Pasal 264 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pada Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. Terjadi perubahan mendasar yang mencakup: bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa selain adanya perkembangan keadaan akibat pandemi Covid-19 yang membawa perubahan mendasar bagi Indonesia dan seluruh negara di dunia, dan terdapat substansi RPJMD yang belum sepenuhnya dirumuskan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta adanya perubahan kebijakan nasional.

Kebijakan nasional yang dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat, DPRD maupun masyarakat.
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan di perencanaan, serta pengelolaan keuangan daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Selanjutnya, yang mendasari Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah terjadinya kejadian luar biasa pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia, Provinsi Jawa Barat maupun di Kota Bandung memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dalam menghadapi pandemi Covid-19. Kebijakan ini terutama diperuntukkan bagi penanganan dan peningkatan sistem kesehatan dan penanggulangan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta berbagai kebijakan lainnya.

Selain hal-hal yang diuraikan tersebut, pertimbangan yang mendasari perubahan RPJMD Kota Bandung adalah hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Bandung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi Tahun 2019 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung memperoleh nilai 78,00 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Bandung mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kota Bandung adalah 80,05 atau predikat A. Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, Kementerian PAN dan RB merekomendasikan melakukan perbaikan atas manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya;

Substansi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi Covid-19; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuktahirannya yang disertai indikator kinerjanya; IKU pemerintah daerah dan target kinerjanya, serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Indikator Kinerja Kunci (IKK).

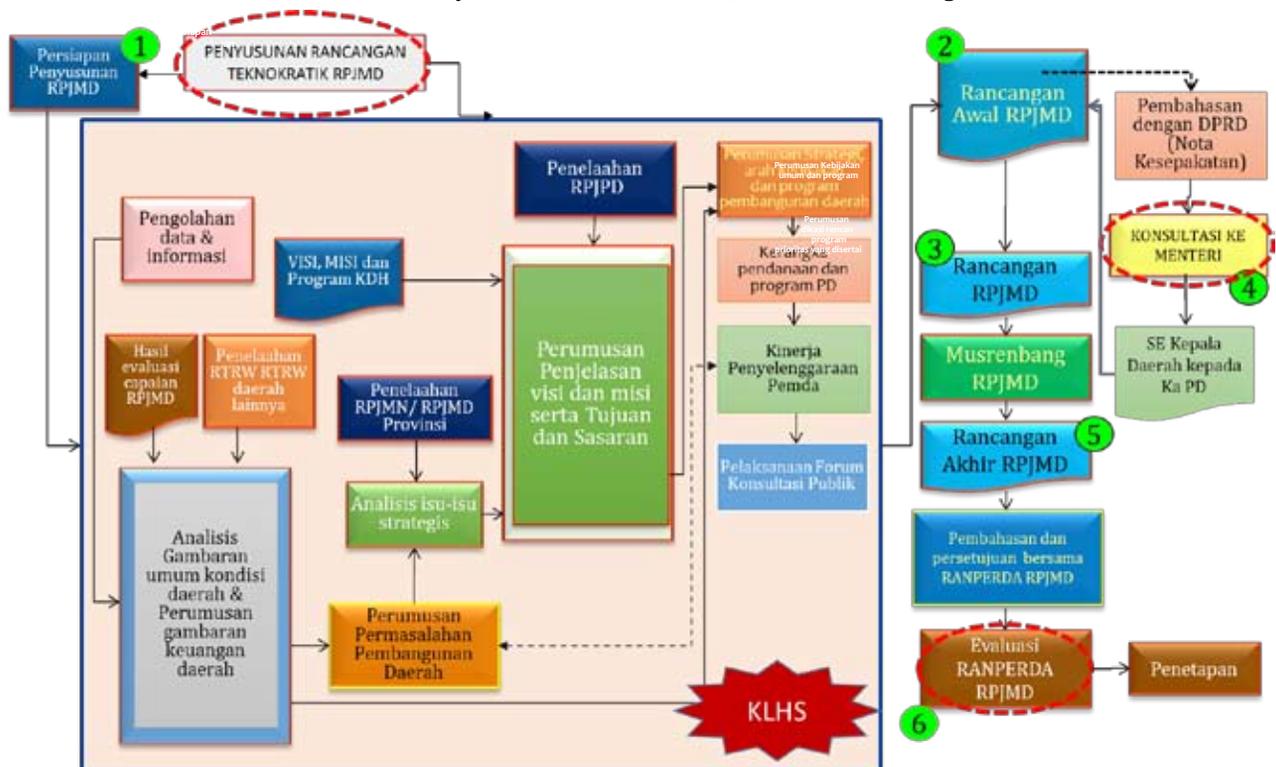
Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan beberapa pendekatan, meliputi pendekatan politik; pendekatan teknokratik; pendekatan partisipatif; dan pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Selain itu, Perubahan RPJMD juga dirumuskan dengan menggunakan pendekatan substansi, yaitu: holistik-tematik; integratif; dan spasial. Pendekatan-pendekatan ini bertujuan agar dokumen rencana yang dihasilkan mempertimbangkan keseluruhan unsur pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Selain itu, perencanaan dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah, serta mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pendekatan-pendekatan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan telah dilaksanakan secara konsisten. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sedangkan pendekatan partisipatif dilakukan melalui forum konsultasi publik. Terakhir, pendekatan politik dilakukan melalui pembahasan di DPRD Kota Bandung, yang mengacu pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 melalui berbagai tahapan dan pendekatan yang melibatkan pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, juga diintegrasikan dengan rencana tata ruang. Penyusunan RPJMD Kota Bandung dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, serta mempertimbangkan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Adapun proses penyusunan RPJMD Kota Bandung disajikan pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1

Proses Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
36. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
37. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18); dan
38. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3).

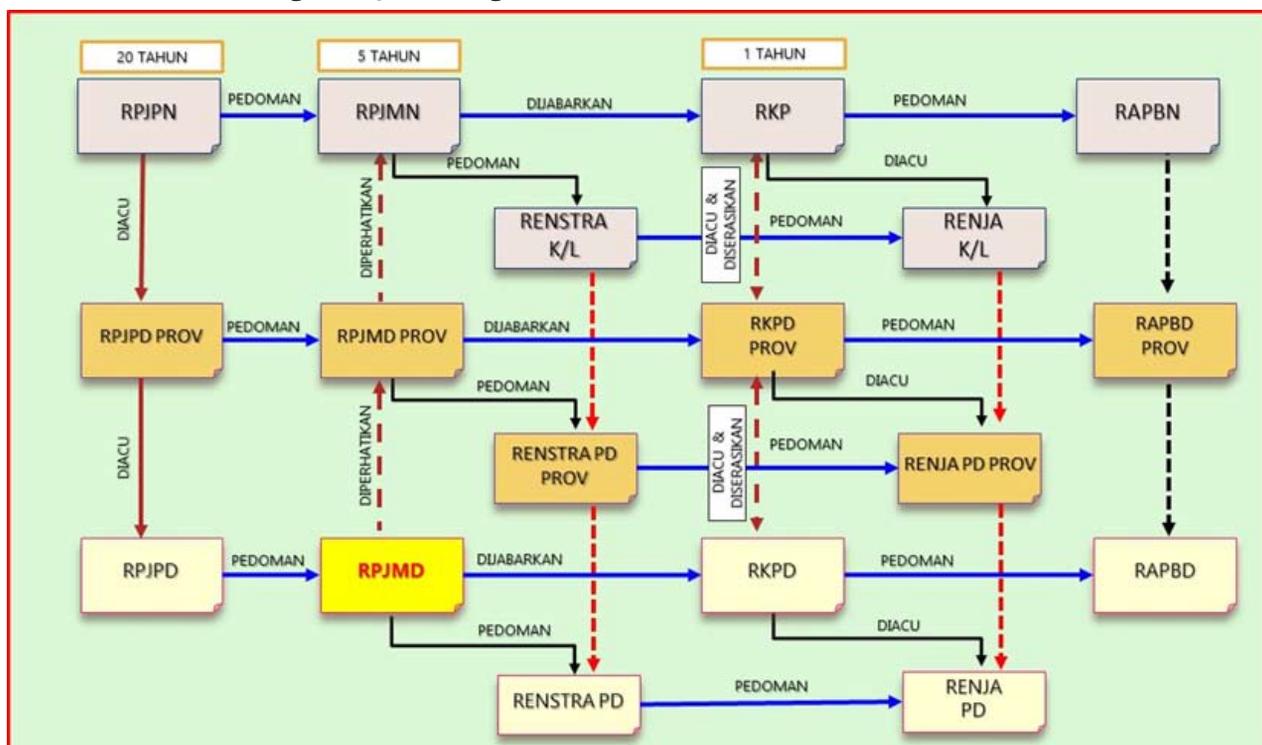
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat. Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020- 2024, RTRW Nasional Tahun 2008-2028, Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031. Agar Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 selaras dan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaah terhadap pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan dan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaah juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan nasional/daerah dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2

Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah



Sumber: Bappenas, diolah

Secara lebih terperinci hubungan antara Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1.3.1. HUBUNGAN PERUBAHAN RPJMD KOTA BANDUNG DENGAN RPJMN

Jika sebelumnya penyusunan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, maka Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 disusun dengan memperhatikan RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Pada RPJMN Tahun 2020-2024, pembangunan Provinsi Jawa Barat diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Dengan demikian, telah ditetapkan lokasi prioritas pembangunan wilayah dan beberapa Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat. Agenda pembangunan yang menjadi prioritas nasional dalam perencanaan tahunan rencana kerja pemerintah (RKP) harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah. Sinergi pusat dan daerah sangat dibutuhkan dalam melaksanakan setiap prioritas nasional tersebut. Hal ini tercantum dalam Pasal 159 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah.

1.3.2. HUBUNGAN PERUBAHAN RPJMD KOTA BANDUNG DENGAN PERUBAHAN RPJMD PROVINSI JAWA BARAT

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung mempedomani Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan tujuan untuk mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan antar tingkatan pemerintahan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan konkuren. Mempedomani Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah kota dengan arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah provinsi, sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

1.3.3. HUBUNGAN PERUBAHAN RPJMD KOTA BANDUNG DENGAN RPJPD KOTA BANDUNG

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025. Mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan RPJPD Kota Bandung 2005-2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun merupakan pedoman bagi penyusunan Perubahan RPJMD. Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap IV RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025.

1.3.4. HUBUNGAN PERUBAHAN RPJMD KOTA BANDUNG DENGAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH, RKP, DAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra perangkat daerah disusun sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada Perubahan RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Keterkaitan

RPJMD/Perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah disajikan pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3

Keterkaitan RPJMD/Perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah

Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis Perubahan RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

Selanjutnya, Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Kota Bandung Tahun 2022 dan Tahun 2023. Sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Bandung, RKP memuat memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Rancangan RKP merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Bandung yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.

Sasaran dan prioritas pembangunan pada RKP harus berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Bandung. Harus berpedoman pada Perubahan RPJMD mengandung makna bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD.

1.3.5. HUBUNGAN PERUBAHAN RPJMD KOTA BANDUNG DENGAN RTRW KOTA BANDUNG

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung berpedoman pada RTRW Kota Bandung yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/

kota. Penyusunan Perubahan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Penyusunan RPJMD ini berpedoman pada RTRW daerah sendiri, yang juga memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. MAKSUD

Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi terutama untuk merespon perubahan kebijakan nasional, percepatan penanganan Covid-19 dan kebutuhan perubahan internal Pemerintah Kota Bandung, sehingga RPJMD dapat dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Bandung sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah Kota Bandung, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, kolaboratif, koordinatif, dan integratif.

1.4.2. TUJUAN

Tujuan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta yang berbatasan;
3. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan akhir periode RPJMD;
4. Menerjemahkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018-2023, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing perangkat daerah tahun 2018-2023, dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025;

5. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2018- 2023; dan
6. Menetapkan indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Bandung periode 2018-2023.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 terdiri atas 9 (sembilan) bab, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kota Bandung.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Bandung secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya adalah: (1) geografi dan demografi, (2) kesejahteraan masyarakat, (3) pelayanan umum, serta (4) daya saing daerah.

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: (1) kinerja keuangan masa lalu, (2) kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta (3) kerangka pendanaan.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sarannya.

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Bandung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai program pembangunan daerah Kota Bandung dalam jangka menengah.

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX. PENUTUP

Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD untuk menjamin pelaksanaan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.



GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB

II



WALID RAYA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT



BANDUNG JUARA

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

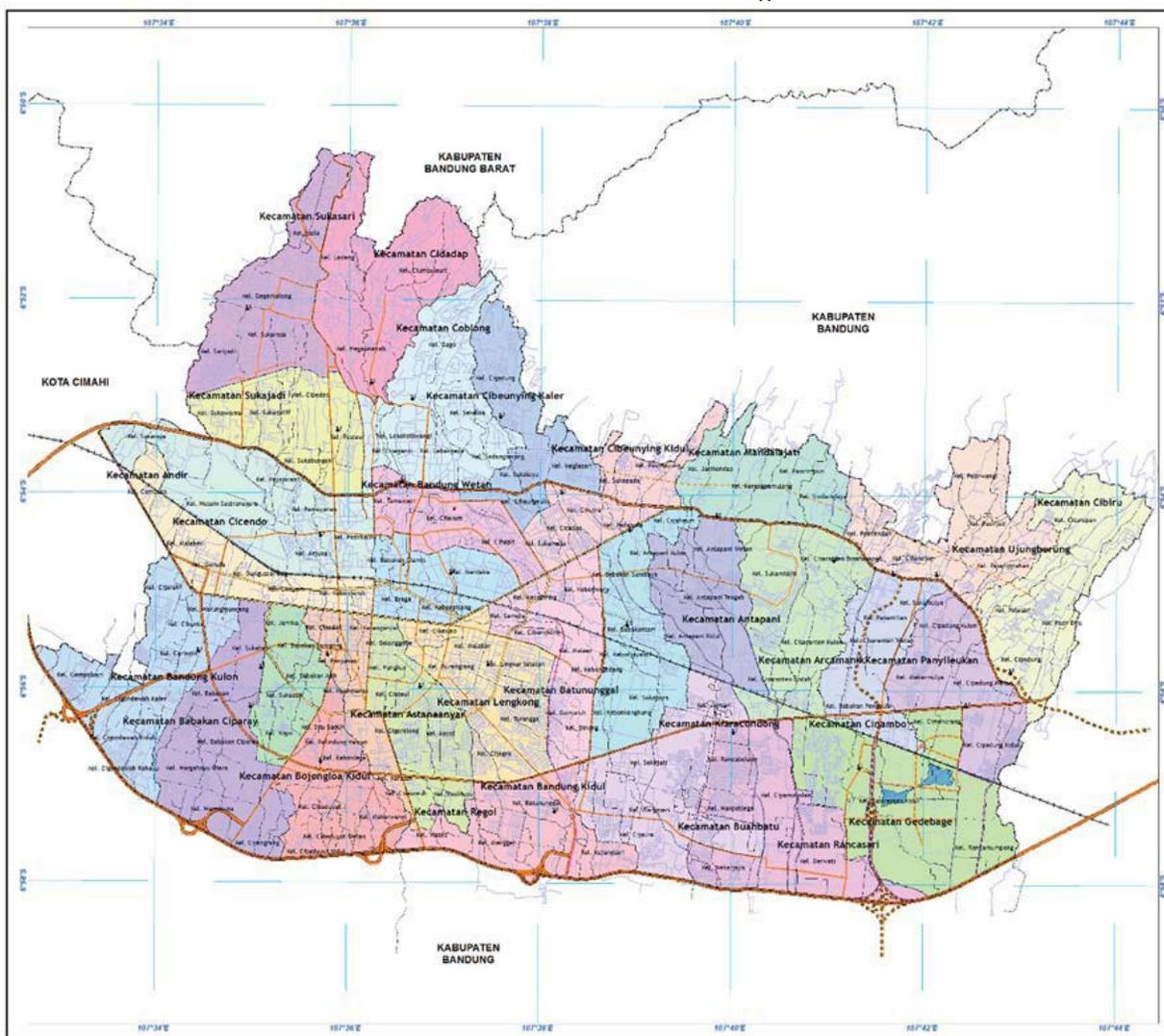
Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, luas wilayah Kota Bandung adalah 16.729,65 ha. Secara administratif berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya, yaitu:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat;
2. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi;
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung.

Wilayah administrasi Kota Bandung terbagi menjadi 30 kecamatan dan 151 kelurahan, dibantu oleh masyarakat dalam bentuk organisasi Rukun Warga sebanyak 1.584 Rukun Warga (RW) dan 9.873 Rukun Tetangga (RT). Adapun Peta Administrasi Kota Bandung dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kota Bandung



Sumber: Pemerintah Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kota Bandung berada pada 107°36' Bujur Timur dan 6°55' Lintang Selatan. Secara geografis, Kota Bandung terletak di bagian tengah "Cekungan Bandung" dengan dimensi luas 233.000 Ha. Cekungan ini terletak di lima daerah administrasi kabupaten/kota, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan 5 (lima) kecamatan yang termasuk Kabupaten Sumedang.

1) Kondisi Topografi

Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 m di atas permukaan laut (dpl), dengan titik tertinggi di daerah utara dengan ketinggian 1.050 m dan titik terendah di sebelah selatan dengan ketinggian 675 m di atas permukaan laut. Wilayah Kota Bandung bagian selatan sampai lajur lintasan kereta api memiliki permukaan tanah relatif datar, sedangkan wilayah kota bagian utara memiliki topografi berbukit.

Secara topografis dan morfologis regional, Kota Bandung terletak pada Cekungan Bandung (*basin*) yang dikelilingi oleh gunung api dengan ketinggian 650 m sampai lebih dari 2.000 m. Pada dasar cekungan mengalir Sungai Citarum yang berhulu di Gunung Wayang, Kabupaten Bandung (1.700 m dpl), mengalir ke Waduk Saguling dan bermuara di Pantai Utara Jawa. Sebagian besar wilayah cekungan Bandung merupakan daerah datar (kemiringan 0 – 8%), 21% merupakan daerah landai (kemiringan 8% – 15%), 20% bergelombang (kemiringan lereng 15% - 25%), 12% merupakan daerah curam (kemiringan lereng 25% - 40%), dan 5% merupakan daerah sangat curam (kemiringan lereng > 40%).

2) Kondisi Geologi

Keadaan geologis Kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada jaman kwarter dan mempunyai lapisan tanah alluvial yang merupakan hasil letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol, sedangkan di bagian selatan serta timur terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan liat. Pada bagian tengah dan barat tersebar jenis tanah andosol. Secara geologis, Kota Bandung berada pada Cekungan Bandung yang dikelilingi oleh gunung berapi yang masih aktif dan berada di antara 3 (tiga) daerah sumber gempa bumi yang saling melingkup, yaitu (i) sumber gempa bumi Sukabumi-Padalarang-Bandung, (ii) sumber gempa bumi Bogor-Puncak-Cianjur, serta (iii) sumber gempa bumi Garut- Tasikmalaya-Ciamis. Daerah-daerah tersebut berada di sepanjang sesar-sesar aktif, sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi gempa tektonik.

3) Kondisi Hidrologi

Wilayah Kota Bandung dilewati oleh 11 sungai sepanjang 252,55 km, yaitu Sungai Cikapundung, Sungai Cipamokolan, Sungai Cidurian, Sungai Cinambo, Sungai Citepus, Sungai Cisaranten, Sungai Cikapundung Kolot, Sungai Citarum, Sungai Cikeruh, Sungai Palasari, dan Sungai Cibeureum. Sungai-sungai tersebut selain dipergunakan sebagai saluran induk dalam pengaliran air hujan, juga oleh sebagian kecil penduduk masih dipergunakan untuk keperluan mandi cuci kakus (MCK).

Kota Bandung termasuk dalam Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Citarum bagian hulu. Secara nasional, DPS ini sangat strategis karena merupakan pemasok utama ke Waduk Saguling dan Waduk Cirata yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, pertanian, dan lainnya. Saat ini, kondisi sebagian besar sungai di Kota Bandung telah mengalami pencemaran. Regulasi yang tidak tegas terhadap pengelolaan limbah pabrik menjadi salah satu penyebab tercemarnya sungai yang ada.

Selain itu, penurunan kualitas sungai disebabkan oleh pembuangan air kotor oleh warga. Sungai Cikapundung merupakan salah satu sungai penting yang membelah Kota Bandung dan saat ini telah banyak kehilangan fungsi ekologisnya.

4) Kondisi Klimatologi

Iklim asal Kota Bandung dipengaruhi oleh pegunungan di sekitarnya, sehingga cuaca yang terbentuk sejuk dan lembap. Pada beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan suhu, serta musim hujan yang lebih panjang dari biasanya.

a) Curah Hujan

Pada tahun 2020, hujan relatif terjadi sepanjang tahun dengan intensitas yang berbeda-beda setiap bulannya. Curah hujan tertinggi terjadi di bulan Februari yaitu sebesar 336,60 mm. Sementara curah hujan terendah terdapat di bulan Juni di mana curah hujan hanya mencapai 30,30 mm. Kondisi rata-rata curah hujan, hari hujan, dan lama penyinaran matahari Kota Bandung pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rata-Rata Curah Hujan, Hari Hujan, dan Lama Penyinaran Matahari di Kota Bandung Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Curah Hujan (mm)	295,8	191,54	182,39	169,29	201,53
Hari Hujan (hari)	25	19,75	17,5	11,54	18,92
LPM (%)	52	56,25	64,08	68,92	60,81

Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

b) Suhu

Selama tahun 2020, suhu rata-rata Kota Bandung adalah 25,86°C. Suhu tertinggi Kota Bandung tahun 2020 mencapai 33,00°C di bulan September dan suhu minimum 15,90°C di bulan September tahun 2020. Kondisi temperatur rata-rata Kota Bandung dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Temperatur Rata-rata Kota Bandung Tahun 2016-2020

Temperatur (0C)	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata	23,8	23,48	23,6	23,71	25,86
Maksimum	24,4	29,17	33,4	30,25	31,87
Minimum	23,1	20,07	15,8	19,6	18,41

Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

c) Kelembapan Udara

Kelembapan udara rata-rata di Kota Bandung selama periode 2016-2020 mengalami fluktuasi. Kelembapan udara rata-rata tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 80%, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 56,25%. Kondisi kelembapan udara rata-rata Kota Bandung dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Kelembapan Rata-Rata Kota Bandung Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kelembapan Rata-rata (%)	80	56,25	75,09	74,25	69,92

Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

5) Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Bandung didominasi oleh bangunan permukiman, yaitu sebesar 7.620,063 Ha, sedangkan penggunaan lahan untuk industri, perdagangan dan perkantoran mencapai 1.062,493 Ha. Luas Tutupan Lahan Kota Bandung Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4

Luas Tutupan Lahan Kota Bandung Tahun 2016

Tutupan Lahan	Luas (ha)
Area Parkir	457.528
Bangunan Industri, Perdagangan, dan Perkantoran	1062.493
Bangunan Non-Permukiman Lain	877.903
Bangunan Permukiman Kota	7620.063
Danau / Telaga Alami	1.907
Danau Buatan Lainnya	64.854
Embung	6.038
Hutan Lahan Rendah Sekunder Kerapatan Rendah	66.762
Hutan, Jalur Hijau, dan Taman Kota	651.949
Jaringan Jalan Aspal / Beton / Tanah	1521.351
Kolam Ikan Air Tawar	11.376
Lapangan Diperkeras	2.921
Padang Golf	25.020
Perkebunan Lain	1753.958
Saluran Air	30.140
Sawah Dengan Padi Terus Menerus	1055.805
Semak Belukar	1241.455
Stadion dan Sarana Olahraga	48.896
Stasiun	6.012
Sungai	126.418
Tempat Penimbunan dan Pembuangan Sampah	1.926
Terminal Bandara	41.446
Terminal Bus	4.818
Total	16.681.037

Sumber: Dinas Penataan Ruang yang dikelola dalam SIPD, 2016

Lebih lanjut, di dalam KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 diuraikan data pemanfaatan lahan yaitu lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Lahan pertanian antara lain berupa lahan sawah dan lahan bukan sawah (tegal, ladang, hutan, perkebunan, kolam dan lain-lain), sedangkan lahan bukan pertanian terdiri dari rumah (bangunan dan halaman sekitarnya), hutan negara, rawa-rata (tidak ditanami), dan lainnya.

Pada tahun 2018, luasan lahan sawah, lahan bukan sawah, dan lahan bukan pertanian Kota Bandung masing-masingnya adalah 637 ha, 901,0 ha, dan 15.191,65 ha. Luas lahan berdasarkan pemanfaatan di Kota Bandung Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Luas Lahan Berdasarkan Pemanfaatan di Kota Bandung tahun 2018

Kecamatan	Lahan Pertanian (Ha)		Lahan Non Pertanian (Ha)	Total
	Sawah	Bukan Sawah		
Bandung Kulon	4,0	2,0	640,0	646,0
Babakan Ciparay	11,0	2,0	732,0	745,0
Bojongloa Kaler	0,0	0,0	303,0	303,0
Bojongloa Kidul	7,0	3,0	616,0	626,0
Astana Anyar	0,0	0,0	289,0	289,0
Regol	3,0	0,0	427,0	430,0
Lengkong	0,0	0,0	590,0	590,0
Bandung Kidul	10,0	8,0	588,0	606,0
Buahbatu	45,0	9,0	739,0	793,0
Rancasari	60,0	0,0	673,0	733,0
Gedebage	200,0	78,0	680,0	958,0
Cibiru	60,0	92,0	480,0	632,0
Panyileukan	27,0	8,0	475,0	510,0
Ujungberung	68,0	76,0	496,0	640,0
Cinambo	68,0	12,0	288,0	368,0
Arcamanik	27,0	10,0	550,0	587,0
Antapani	7,0	35,0	337,0	379,0
Mandalajati	8,0	61,0	598,0	667,0
Kiaracondong	13,0	1,0	598,0	612,0
Batununggal	1,0	4,0	498,0	503,0
Sumur Bandung	0,0	1,0	339,0	340,0
Andir	0,0	4,0	367,0	371,0
Cicendo	0,0	0,0	686,0	686,0
Bandung wetan	0,0	0,0	339,0	339,0
Cibeunteung kidul	0,0	101,0	424,0	525,0
Cibeunying kaler	4,0	0,0	446,0	450,0
Coblong	0,0	12,0	723,0	735,0
Sukajadi	0,0	154,0	276,0	430,0
Sukasari	0,0	130,0	497,0	627,0
Cicadap	0,0	98,0	513,0	611,0
Kota Bandung	637	901,0	15.191,65	16.729,65

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

Penggunaan lahan Kawasan Perkotaan Bandung ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya yaitu sebagai kawasan lindung dan kawasan budi daya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

a) Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kota Bandung berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031, terdiri atas:

- a. kawasan perumahan;
- b. kawasan perdagangan dan jasa;
- c. kawasan perkantoran;
- d. kawasan industri dan pergudangan;
- e. kawasan wisata buatan;
- f. kawasan ruang terbuka non hijau;
- g. ruang sektor informal;
- h. ruang evakuasi bencana; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Rencana pengembangan kawasan budidaya diarahkan pada kegiatan sebagai berikut:

- a. penanganan dan pengendalian alih fungsi bangunan dan guna lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya khususnya di kawasan yang berfungsi lindung;
- b. intensifikasi bangunan dan guna lahan yang masih memungkinkan khususnya di pusat kota; dan
- c. peremajaan kawasan yang menurun kualitas fisiknya di kawasan kumuh.

b) Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung di Kota Bandung berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031, terdiri atas:

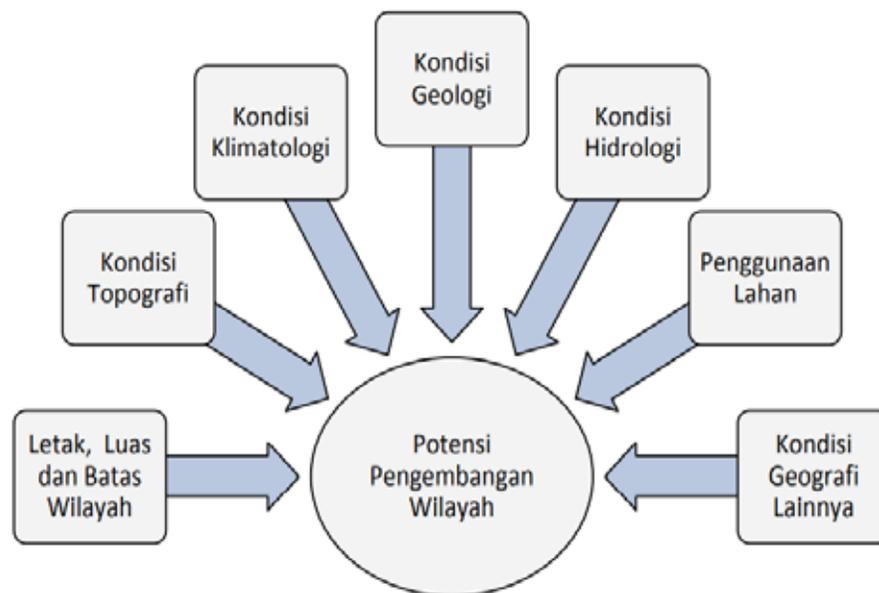
- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan RTH;
- d. Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. Kawasan rawan bencana; dan
- f. Kawasan lindung lainnya.

Luasan kawasan RTH di Kota Bandung terdiri atas RTH privat dan RTH publik. Data RTH Kota Bandung pada tahun 2020 sesuai LKPJ Wali Kota Bandung Tahun 2020 adalah sebesar 12,25% dari luas total wilayah Kota Bandung. RTH publik, terdiri atas: taman kota, kebun bibit, RTH pemakaman, sempadan tegangan tinggi/sutet, sempadan sungai, jalur hijau jalan, sempadan kereta api, serta RTH yang merupakan PSU perumahan formal yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Bandung. RTH privat, terdiri atas: RTH kawasan permukiman, RTH sarana pelayanan umum pendidikan, RTH sarana pelayanan umum kesehatan, RTH kawasan militer, RTH kawasan perdagangan dan industri, dan RTH perkantoran dan perdagangan.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dan kerangka pemikiran potensi pengembangan budidaya pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Maka dapat diidentifikasi potensi yang dapat dikembangkan di Kota Bandung, antara lain: kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya.

a. Pengembangan Kawasan Perumahan

Pengembangan perumahan diklasifikasikan menjadi perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah. Perumahan dengan kepadatan tinggi, direncanakan di Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir, Bandung Kulon, Bojongloa Kidul, Regol, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Astana Anyar, Lengkong, Sumur Bandung, Buahbatu, Batununggal, Kiaracondong, Antapani, dan Cibeunying Kidul.

Perumahan kepadatan sedang, yaitu di Kecamatan Bandung Wetan, Bandung Kidul, Cibeunying Kaler, Mandalajati, Arcamanik, Rancasari, dan Cibiru. Perumahan kepadatan rendah, yaitu di Kecamatan Cidadap, Ujungberung, Gedebage, Cinambo, dan Panyileukan. Kepadatan perumahan yang direncanakan ini untuk rata-rata per wilayah dan kecamatan dengan pengembangan secara horizontal yang disesuaikan dengan ketersediaan ruang untuk pengembangan perumahan.

Selain itu, kebijakan pembangunan perumahan secara vertikal diterapkan untuk perencanaan perumahan di kawasan sekitar inti pusat kota, yang saat ini merupakan kawasan sangat padat yang sebagian besar merupakan *slum area* (daerah kumuh) dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang mendekati 80% - 90%, sementara nilai lahannya sangat strategis dan bernilai ekonomi tinggi. Pada daerah kumuh ini akan dilakukan *urban renewal* dan revitalisasi sehingga tercapai kualitas lingkungan yang baik, dengan cara optimalisasi aset Pemerintah Kota Bandung pada zona perumahan, pembangunan rumah susun, kampung wisata, kampung kreatif, dan perbaikan infrastruktur pemukiman. *Urban renewal* dan *redevelopment* direncanakan pada beberapa daerah kumuh, antara lain di Kelurahan Taman Sari, Andir, Braga, Cigondewah, Cicadas, dan Kiaracondong di atas tanah milik pemerintah daerah.

b. Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa

Berdasarkan Ranperda Perubahan RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031, rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:

- a) Pengembangan sektor jasa;
- b) Pengembangan sektor perdagangan; dan
- c) Sektor informal.

Pengembangan kegiatan jasa meliputi:

- a) Pengembangan baru kegiatan jasa di wilayah Bandung Timur;
- b) Pembatasan dan pengendalian pengembangan kegiatan jasa di wilayah Bandung Barat.

Pengembangan sektor perdagangan terdiri atas:

- a) Pasar tradisional, pasar tradisional yang dapat dikembangkan menjadi pasar modern;
- b) Pusat perbelanjaan berupa grosir, eceran aglomerasi, dan eceran tunggal/toko.

Untuk kawasan perdagangan di Kota Bandung terdiri atas pasar tradisional dan pusat perbelanjaan, berupa grosir, eceran aglomerasi, dan eceran tunggal/toko. Pengembangan kawasan pasar tradisional akan dilakukan di pusat kegiatan yang akan dijadikan sebagai pusat sekunder. Bentuk pasar ini dapat berupa pasar modern (*shopping mall*), ataupun pasar tradisional namun dengan penataan dan pengaturan yang ketat agar terjaga lingkungannya (sebaiknya berupa pasar tertutup/dalam gedung). Rencana pengembangan fasilitas pasar tradisional adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pasar Induk Gedebage yang terpadu dengan pengembangan PPK Gedebage;
2. Pembangunan kembali (*redevelopment*) kawasan Pasar Andir, Pasar Kiaracondong, Pasar Ciroyom, Pasar Ujungberung, dan pasar-pasar khusus lainnya;
3. Pengaturan dan penataan pasar yang masih sesuai dengan peruntukannya dan relokasi pasar lingkungan kelurahan/kecamatan dan sekitarnya yang sudah tidak sesuai lagi peruntukannya di 30 kecamatan;
4. Pengaturan kegiatan perdagangan grosir di Jalan Soekarno-Hatta, termasuk Pasar Induk Caringin dan Gedebage.

Arahan pengembangan kawasan pusat perbelanjaan adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian pusat belanja di wilayah Bandung Barat;
2. Pengembangan pusat belanja ke wilayah Bandung Timur; dan
3. Pengendalian perkembangan pusat belanja dan pertokoan yang cenderung linier sepanjang jalan arteri dan kolektor.

c. Pengembangan Kawasan Perkantoran

Konteks pengembangan kawasan perkantoran yang dimaksud adalah pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan. Pengembangan kawasan perkantoran Kota Bandung dilaksanakan dengan mempertahankan perkantoran pemerintah berskala nasional, provinsi, dan kota pada lokasi yang sudah berkembang dan mengembangkan perkantoran pemerintahan baru di PPK Gedebage.

d. Pengembangan Kawasan Industri Kecil Menengah serta Pergudangan

Rencana pengembangan kawasan industri non polutan dan pergudangan adalah sebagai berikut:

1. Relokasi industri yang tidak ramah lingkungan dan menimbulkan dampak terhadap lalu lintas dan jaringan jalan ke wilayah luar kota secara bertahap;

2. Mempertahankan industri kecil dan rumah tangga ramah lingkungan yang ada di lingkungan perumahan;
3. Pengalihfungsian industri yang tidak ramah lingkungan menjadi kegiatan jasa dan perumahan;
4. Pembatasan kawasan pergudangan di wilayah Bandung Barat dan diarahkan untuk dikembangkan ke wilayah Bandung Timur.

Rencana pengembangan kawasan industri kecil adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan industri kecil yang ada di lingkungan perumahan pada kawasan strategis ekonomi Kota Bandung;
2. Mengembangkan industri kecil dan menengah ke Kecamatan Ujungberung, Cibiru, dan Gedebage; dan
3. Kawasan pergudangan diarahkan ke pinggiran kota yang ditunjang oleh akses yang memadai akan dikembangkan ke lokasi yang memiliki akses jalan arteri primer dan/atau akses peti kemas Gedebage.

Sedangkan pengembangan kawasan industri rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan dan mengembangkan kawasan industri rumah tangga, yang terdiri atas: sentra kaos Surapati, sentra tekstil dan konveksi Cigondewah, sentra boneka Sukamulya (dihapus), sentra rajutan Binongjati, sentra sepatu dan olahan kulit Cibaduyut; serta sentra industri potensial lainnya yang dikembangkan;
2. Pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan industri rumah tangga; dan
3. Revitalisasi bangunan tua/bersejarah menjadi bagian dari industri rumah tangga.

e. Pengembangan Kawasan Wisata Buatan

Rencana pengembangan kawasan wisata buatan adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah;
2. Pengembangan obyek wisata di wilayah Bandung Timur;
3. Mempertahankan obyek wisata pendidikan dan wisata budaya kota;
4. Pengembangan sarana konferensi ke arah wilayah Bandung Timur;
5. Pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan di lokasi sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan, dan perumahan; dan
6. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif untuk mendorong pariwisata.

f. Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Rencana pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau, terdiri atas RTNH Publik dan RTNH Privat. RTNH publik meliputi lapangan terbuka non hijau yang dapat diakses oleh masyarakat secara bebas. RTNH privat adalah plaza milik swasta atau perorangan yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan.

g. Pengembangan Ruang Kegiatan Sektor Informal

Rencana pengembangan ruang kegiatan sektor informal di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan ruang publik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan sektor informal;
2. Kewajiban dan insentif bagi sektor formal dalam penyediaan ruang paling kurang 10% untuk kegiatan sektor informal;

3. Pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan PKL hanya diperbolehkan pada lokasi dan waktu sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan; dan
4. Ketentuan lainnya yang harus diatur adalah batas gangguan yang diijinkan, ketentuan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota, perlindungan terhadap fungsi utama ruang publik, serta keamanan dan keselamatan pengguna ruang publik.

h. Pengembangan Ruang Evakuasi Bencana

Rencana pengembangan ruang evakuasi bencana yang termuat dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031, terdiri atas:

- a. Pengembangan ruang evakuasi bencana banjir diarahkan di Taman Tegalega di Kecamatan Regol dan Stadion Utama Sepakbola di Kecamatan Gedebage;
- b. Pengembangan ruang evakuasi bencana longsor diarahkan di Taman Gasibu dan Sasana Budaya Ganesha di Kecamatan Bandung Wetan dan Taman Pacuan Kuda di Kecamatan Arcamanik;
- c. Pengembangan taman-taman lingkungan berupa taman skala Rukun Tetangga (RT), taman skala Rukun Warga (RW), lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik lainnya menjadi titik atau pos evakuasi skala lingkungan di kawasan perumahan;
- d. Pengembangan evakuasi bencana gempa bumi diarahkan pemanfaatan ruang terbuka publik yang cukup besar seperti di alun-alun kota, di lapangan-lapangan olahraga, halaman/gedung sekolah, dan lain-lain sebagai ruang evakuasi skala kota;
- e. Pengembangan evakuasi bencana kebakaran diarahkan di taman-taman lingkungan skala rukun warga dan skala rukun tetangga, lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik.

i. Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Lainnya

Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya di Kota Bandung, terdiri atas kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian dan pelayanan umum pendidikan, kesehatan, dan peribadatan.

1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kondisi eksisting dari kawasan kegiatan militer adalah terkonsentrasi di Kota Bandung bagian barat, yaitu berada di SWP Cibeunying dan SWP Karees. Pengembangan kawasan kegiatan militer ini direncanakan sebagai berikut:

- Mempertahankan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan, meliputi Kawasan Pangkalan Angkatan Udara (LANUD) Husein Sastranagara dan Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Bandung; dan
- Pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pertahanan keamanan.

2) Kawasan Pertanian

Rencana mempertahankan kawasan pertanian yaitu mempertahankan kawasan pertanian tanaman pangan melalui intensifikasi lahan pertanian di Kecamatan Mandalajati, Ujungberung, dan Cibiru.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kota Bandung berada di Cekungan Bandung yang dikelilingi oleh gunung berapi yang masih aktif dan berada di antara 3 (tiga) daerah sumber gempa bumi yang saling melingkup, yaitu (i) sumber gempa bumi Sukabumi-Padalarang-Bandung, (ii) sumber gempa bumi Bogor-Puncak-Cianjur, serta (iii) sumber gempa bumi Garut-Tasikmalaya-Ciamis. Daerah-daerah tersebut berada

di sepanjang sesar-sesar aktif, sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi gempa tektonik. Selain itu, Kota Bandung memiliki jumlah penduduk dan kepadatan yang cukup serta kerapatan bangunan yang cukup tinggi pula sehingga berisiko tinggi pada berbagai bencana yang terjadi.

Ancaman bencana geologis bagi Kota Bandung sangat besar karena dikelilingi patahan (sesar/*fault*) dari 3 (tiga) penjuru, setiap sesar menyimpan potensi kegempaan. Di utara Sesar Lembang, di barat patahan Cimandiri, dan di selatan patahan dengan jalur Baleendah dan Ciparay hingga Tanjung Sari. Selain itu, dasar Cekungan Bandung memiliki tingkat sedimentasi yang tinggi sehingga akan memberikan efek yang lebih besar apabila terkena rambat gelombang gempa. Sedimentasi tertinggi terdapat di Kawasan Cibiru, Gedebage, Soekarno-Hatta, dan Tol Purbaleunyi. Beberapa wilayah rawan bencana di Kota Bandung yang teridentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Daerah rawan banjir, diantaranya: di utara jalan tol Purbaleunyi dan 68 (enam puluh delapan) lokasi; terutama daerah-daerah yang dilewati oleh 5 (lima) aliran sungai, yaitu aliran Sungai Cipaku, Cikapundung, Cibeunying, Cipamokolan, dan Cipadung.
2. Daerah rawan bencana gempa bumi, diantaranya: Bandung Kulon, Bandung Wetan, Batununggal, Bojongloa Kaler, Cicendo, Cinambo, Coblong, Kiaracandong, Lengkong, Regol, Sukajadi, Sukasari dan Sumur Bandung.
3. Daerah rawan longsor, diantaranya: Cibiru, Mandalajati, Ujungberung, Cibeunying Kaler, Cidadap, dan Coblong.
4. Daerah rawan kebakaran di permukiman padat, diantaranya: Kecamatan Cibeunying Kidul dan Babakan Ciparay merupakan kecamatan dengan jumlah kejadian yang terbanyak, kemudian disusul Kecamatan Batununggal, Cicendo, Lengkong, Coblong, Andir, Bandung Kulon, Sukajadi, dan Astana Anyar.
5. Daerah rawan bencana letusan gunung berapi, diantaranya: Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cidadap, Coblong, dan Cibeunying Kaler.

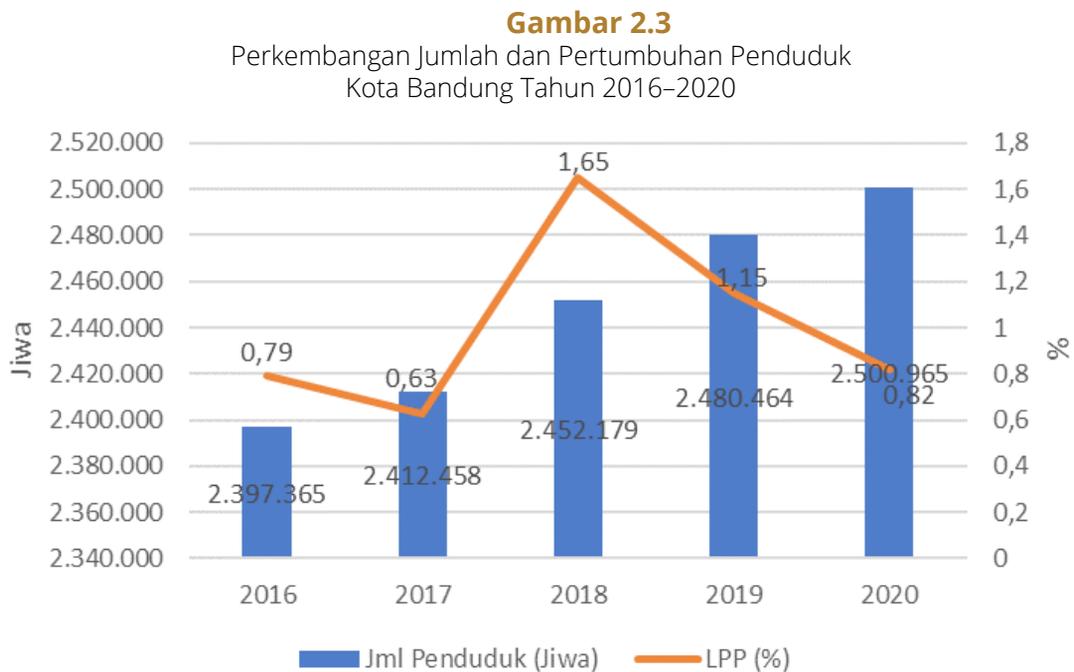
2.1.4. Demografi

Perubahan demografis merupakan salah satu tantangan utama pembangunan daerah saat ini. Salah satu modal pembangunan, selain sumber daya alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi adalah jumlah penduduk dan sumber daya manusia (SDM). Dengan kata lain, penduduk merupakan modal dasar yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Hanya dengan adanya penduduk yang berkualitas, keberadaan potensi sumber daya yang beraneka ragam dapat dimanfaatkan secara tepat, efisien, dan berkesinambungan. Keberadaan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan bermoral adalah jaminan masa depan suatu daerah.

Penduduk atau masyarakat merupakan titik sentral dalam pembangunan (*people-centered development*). Hal tersebut menjadi penting karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan. Besaran, komposisi, kualitas, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial, serta kebijakan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, akan tetapi memiliki kualitas yang rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

Selain akibat pertumbuhan penduduk secara alami (fertilitas), adanya migrasi masuk yang lebih besar dari migrasi keluar (migrasi neto positif) inilah yang menyebabkan jumlah penduduk Kota Bandung terus bertambah setiap tahunnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa geliat perkembangan aspek sosial ekonomi Kota Bandung yang terus meningkat hingga saat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk daerah lain untuk mengadu nasib. Ditambah lagi peran Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat yang menjadikan magnet penarik bagi penduduk dari daerah lain untuk datang ke Kota Bandung, baik yang bertujuan untuk menetap ataupun komuter. Penduduk yang semakin besar ini mendorong perubahan tatanan aspek-aspek kehidupan Kota Bandung yang meliputi aspek sosial, ekonomi, spasial, pola demografis, dan sebagainya yang semakin kompleks. Dinamika ini perlu diantisipasi oleh Pemerintah Kota Bandung dalam penyediaan pelayanan publik (*public services*) secara layak dan menyeluruh bagi masyarakat.

Jumlah penduduk Kota Bandung selama periode 2016-2020, terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota Bandung sebanyak 2.397.365 jiwa, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 2.500.965 jiwa. Dalam hal ini rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kota Bandung periode 2016-2020 mencapai 1,01%. Perkembangan jumlah dan pertumbuhan penduduk Kota Bandung tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.3, sedangkan jumlah dan komposisi penduduk Kota Bandung Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.6



Sumber: Disdukcapil Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2021

Tabel 2.6
Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Bandung Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.397.365	2.412.458	2.452.179	2.480.464	2.500.965
Rata-rata Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	14.330	14.420	14.765	14.549,88	14.948
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,79	0,63	1,65	1,15	0,82

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Komposisi Penduduk, menurut:					
a. Jenis Kelamin					
– Laki - Laki (orang)	1.211.803	1.218.143	1.233.357	1.246.951	1.256.205
– Perempuan (orang)	1.185.562	1.194.315	1.218.822	1.233.513	1.244.760
b. Angkatan Kerja (orang)	N/A	1.219.398	1.204.451	1.288.260	1.314.930*
– Jumlah yang Bekerja (orang)	N/A	1.116.529	1.107.986	1.183.193	1.167.849*
– Jumlah Pengangguran (orang)	N/A	102.869	96.465	105.067	147.081*
– Tingkat Pengangguran (%)	N/A	8,44	8,01	8,16	11,19*
c. Pendidikan (penduduk usia >10 tahun dan ijazah tertinggi).					
– Tidak Mempunyai Ijazah (%)	12,11	11,70	12,36	3,58	11,76
– SD/MI/Sederajat (%)	15,56	15,46	14,96	17,49	14,10
– SMP/MTs/Sederajat (%)	16,64	16,72	16,04	21,68	16,49
– SLTA/Sederajat (%)	37,57	37,70	37,51	40,31	38,38
– Perguruan Tinggi (%)	18,11	18,41	19,13	16,95	19,29

Sumber: *BPS Kota Bandung dan Disdukcapil Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2021

a. Distribusi Jumlah Penduduk

Distribusi jumlah penduduk dan kepadatan per kecamatan di Kota Bandung pada tahun 2016-2020 dapat dilihat dari Tabel 2.7.

Tabel 2.7

Distribusi Penduduk Per Kecamatan dan Kepadatan Penduduk di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020	Kepadatan 2020
1	Sukasari	72.456	74.029	76.256	76.942	77.384	12.342
2	Coblong	110.803	111.247	112.337	114.163	114.318	15.553
3	Babakan Ciparay	130.470	132.497	137.077	138.788	141.196	18.952
4	Bojongloa Kaler	121.107	120.851	122.927	123.467	123.761	40.845
5	Andir	101.975	99.085	98.790	99.132	99.288	26.762
6	Cicendo	93.745	94.048	94.998	96.008	95.826	13.969
7	Sukajadi	98.998	99.672	100.784	101.315	102.352	23.803
8	Cidadap	52.092	52.044	53.011	53.622	53.992	8.837
9	Bandung Wetan	30.957	29.774	28.793	28.917	28.686	8.462
10	Astana Anyar	73.643	73.236	73.696	74.078	73.495	25.431
11	Regol	81.753	80.314	79.470	80.141	80.548	18.732
12	Batununggal	116.707	117.515	119.959	120.900	120.741	24.004
13	Lengkong	71.575	70.943	70.504	71.295	71.082	12.048
14	Cibeunying Kidul	109.045	109.149	111.140	112.903	112.583	21.444
15	Bandung Kulon	130.562	130.831	131.842	132.811	135.114	20.915
16	Kiaracondong	122.312	124.255	128.574	130.075	130.396	21.307
17	Bojongloa Kidul	83.289	84.079	84.836	85.639	86.851	13.874

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020	Kepadatan 2020
18	Cibeunying Kaler	67.913	68.316	69.077	69.783	70.261	15.614
19	Sumur Bandung	35.538	35.919	36.233	37.061	37.469	11.020
20	Antapani	74.008	75.209	77.490	78.564	79.496	20.975
21	Bandung Kidul	56.909	57.732	58.967	59.698	60.596	9.999
22	Buahbatu	96.696	97.857	99.461	101.022	102.529	12.929
23	Rancasari	79.229	80.701	82.029	83.428	84.765	11.564
24	Arcamanik	70.667	72.424	74.780	76.239	77.750	13.245
25	Cibiru	70.200	71.612	72.010	72.791	74.157	11.734
26	Ujungberung	79.600	81.271	84.552	86.225	87.977	13.746
27	Gedebage	37.504	38.169	39.640	40.121	40.886	4.268
28	Panyileukan	37.401	37.882	38.633	39.277	40.035	7.850
29	Cinambo	23.871	24.145	24.812	25.101	25.324	6.882
30	Mandalajati	66.340	67.652	69.501	70.958	72.107	10.811
JUMLAH		2.397.365	2.412.458	2.452.179	2.480.464	2.500.965	14.948

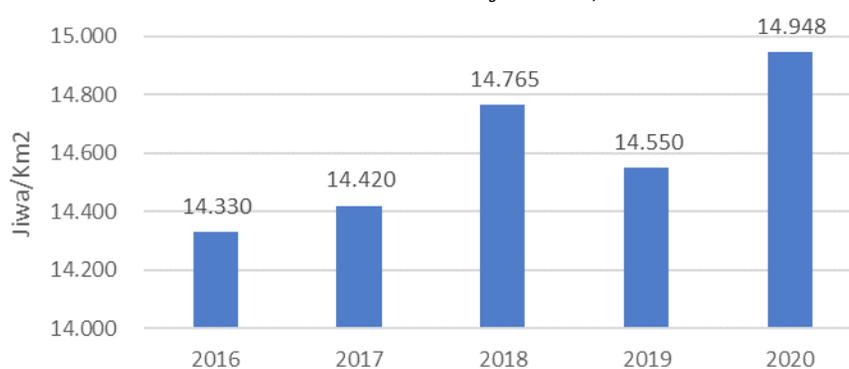
Sumber: Disdukcapil Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2021

Tantangan Kota Bandung dalam pembangunan ke depan menjadi lebih besar akibat semakin bertambahnya jumlah penduduk tiap tahunnya. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat sehingga tekanan penduduk yang semakin besar tidak memunculkan konflik sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi lingkungan, dan kurangnya tingkat dukungan ketersediaan infrastruktur yang layak.

Dalam tataran regional Jawa Barat ataupun nasional, tingkat kepadatan penduduk Kota Bandung merupakan salah satu yang tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Dengan besaran jumlah penduduk yang mendiami wilayah seluas 167,31 km², sehingga rata-rata kepadatan penduduk Kota Bandung pada tahun 2020 adalah 14.948 jiwa per km². Dari grafik berikut terlihat bahwa kepadatan penduduk Kota Bandung terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Peningkatan kepadatan dan aktivitas penduduk ini juga berimplikasi pada makin terbatasnya pemanfaatan lahan di Kota Bandung. Kepadatan penduduk di Kota Bandung tahun 2016-2020 (jiwa/km²) dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4

Kepadatan Penduduk di Kota Bandung
Tahun 2016-2020 (jiwa/km²)



Sumber: Disdukcapil Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2021

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan kategori usia, komposisi penduduk didominasi oleh masyarakat usia produktif. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk usia produktif (15-64) pada tahun 2020 yang mencapai 69,24% (1.717.596 jiwa) dari total jumlah penduduk. Kondisi ini merupakan bonus demografi yang dimaknai sebagai keuntungan ekonomi yang disebabkan besarnya jumlah penduduk produktif

sehingga dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi yang sering disebut dengan jendela kesempatan. Pada Tabel 2.8 menunjukkan secara rinci jumlah dan persentase penduduk kelompok umur pada tahun 2020.

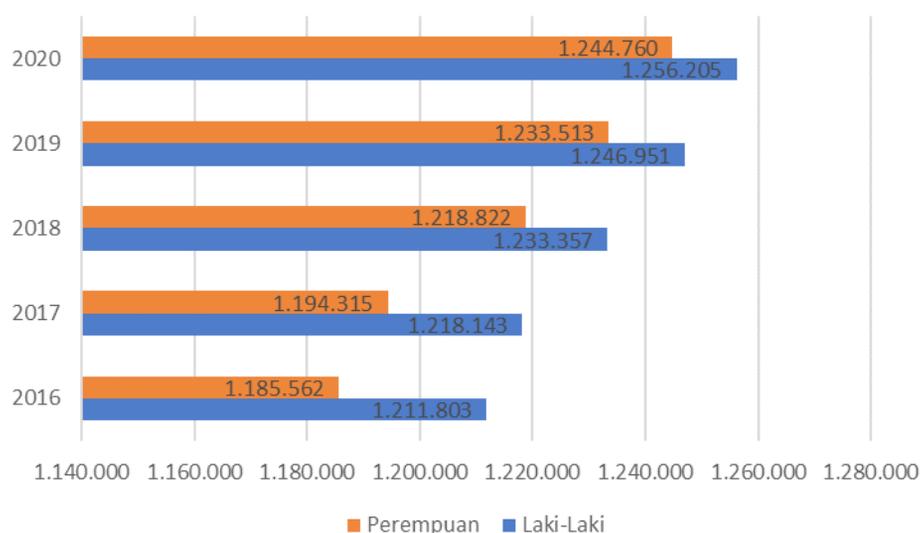
Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur di Kota Bandung
Tahun 2020

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
0-4	90.742	84.767	175.509	7,02
5-9	109.103	102.280	211.383	8,45
10-14	108.794	10.246	211.290	8,45
15-19	101.540	97.206	198.746	7,95
20-24	100.183	96.786	196.969	7,88
25-29	98.170	99.015	197.185	7,88
30-34	92.313	91.074	183.387	7,33
35-39	104.384	101.374	205.758	8,23
40-44	100.913	99.454	200.367	8,01
45-49	89.500	90.044	179.544	7,18
50-54	77.435	78.827	156.262	6,25
55-59	61.379	65.430	126.809	5,07
60-64	49.115	52.271	101.386	4,05
65-69	34.260	35.726	69.986	2,80
70-74	18.196	20.653	38.849	1,55
75+	20.178	27.357	47.535	1,90
JML	1.256.205	1.244.760	2.500.965	100,00%

Sumber: Disdukcapil Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2021

Potensi tersebut harus dioptimalkan oleh pemerintah kota melalui peningkatan kualitas dan investasi sumber daya manusia (*human capital investment*) mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi, keterampilan, serta penguasaan teknologi. Bonus demografi tidak akan memberikan dampak yang signifikan jika pemerintah tidak melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Apabila mayoritas penduduk yang berusia produktif memiliki kualitas yang rendah, justru akan memicu gelombang pengangguran massal dan semakin menambah beban daerah. Komposisi penduduk Kota Bandung menurut jenis kelamin tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5
Komposisi Penduduk Kota Bandung Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2016-2020

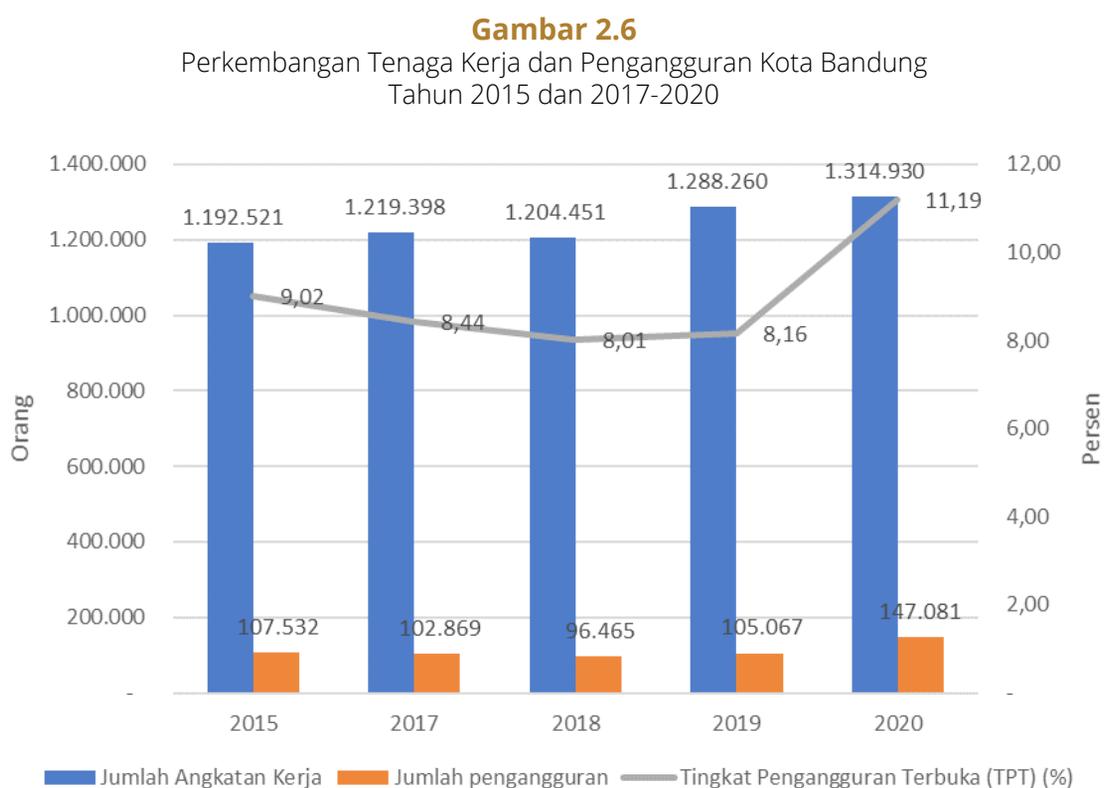


Sumber: Disdukcapil Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2021

Komposisi penduduk Kota Bandung menurut jenis kelamin selama periode tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki cenderung lebih banyak daripada penduduk perempuan, namun rata-rata peningkatan jumlah penduduk perempuan sebesar 1,61% atau lebih besar daripada penduduk laki-laki sebesar 1,06%.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja

Berdasarkan data ketenagakerjaan dapat diketahui bahwa jumlah angkatan kerja Kota Bandung pada tahun 2015 angkatan kerja yang berada di Kota Bandung tercatat sebanyak 1.192.521 tenaga kerja dan meningkat menjadi 1.314.930 tenaga kerja di tahun 2020. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung selama periode 2015 dan 2017-2020 mengalami fluktuasi, pada tahun 2015 tingkat pengangguran mencapai 9,02%, kemudian mengalami penurunan menjadi masing 8,44% dan 8,01% pada tahun 2017 dan Tahun 2018, serta mengalami peningkatan kembali terjadi di tahun 2019 sebesar 8,16% dan tahun 2020 sebesar 11,19%, sebagaimana dapat terlihat pada Gambar 2.6.



Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD 2020

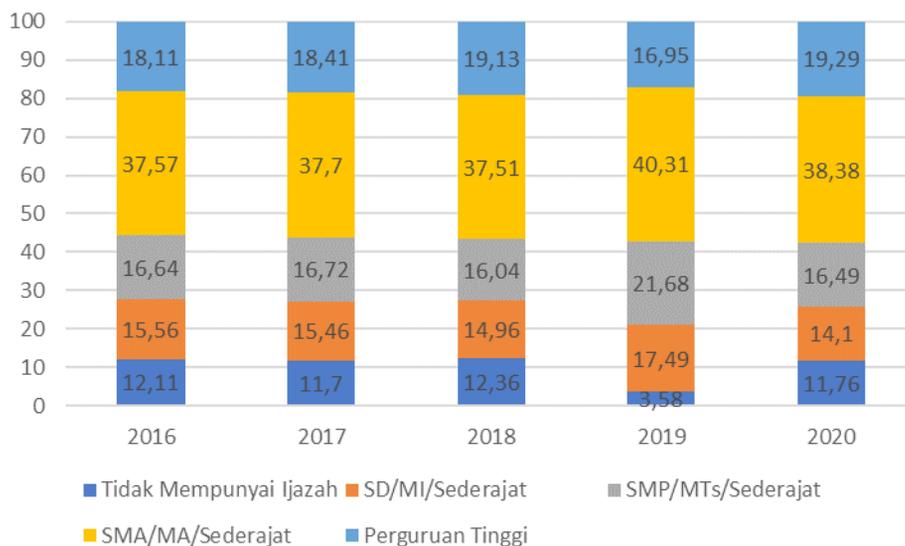
d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk mencerminkan kualitas sumber daya manusia dan potensi kekuatan pembangunan daerah. Aspek pendidikan yang baik sangat memegang peranan strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan yang merupakan proses yang berkesinambungan membutuhkan lembaga pendidikan formal sistem persekolahan yang merupakan lembaga utama dalam mengembangkan pengetahuan, serta melatih kemampuan, keahlian, dan menanamkan sikap modern para individu yang diperlukan dalam proses pembangunan. Selain itu, proses pencerdasan SDM melalui peningkatan pendidikan merupakan elemen penting agar dapat menjaga tingkat daya saing dan keberlanjutan pembangunan di Kota Bandung dalam jangka panjang.

Pada tahun 2016, penduduk usia di atas 10 tahun yang tidak memiliki ijazah SD sebesar 12,11% dan kemudian mengalami penurunan menjadi 11,76%, pada tahun 2020. Di sisi lain, penduduk usia di atas 10 tahun yang memiliki ijazah tertinggi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat, dan Perguruan Tinggi mengalami fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Bandung setiap tahunnya telah cukup mengalami peningkatan kesadaran (*awareness*) atas arti penting pendidikan bagi peningkatan kualitas kehidupan di masa yang akan datang. Hal ini juga ditunjang dengan adanya kebijakan pemerintah yang terus menggalakkan urusan wajib di bidang pendidikan secara masif. Perkembangan komposisi penduduk Kota Bandung berdasarkan tingkat Pendidikan tahun 2016-2020 (%) dapat dilihat pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7

Perkembangan Komposisi Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016-2020 (%)



Sumber: Disdukcapil Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD 2021

2.1.5. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

a. Daya Dukung Air

Daya dukung sumber daya air dihitung berdasarkan konsep neraca air, meliputi air permukaan dan air tanah. Air permukaan yang dihitung merupakan air hujan yang jatuh ke permukaan tanah dikurangi dengan air yang mengalami evapotranspirasi dan air yang meresap ke dalam zona jenuh air (air tanah). Air permukaan atau *run off* tersebut merupakan gabungan dari air limpasan secara langsung maupun aliran dasar (*base flow*) dari sebagian air tanah yang merembes pada dinding sungai. Air permukaan tersebut pada alur sungai bergabung dengan air yang berasal dari daerah tangkapan air yang lebih jauh untuk kemudian menjadi air sungai. Air tanah yang dihitung merupakan air hujan yang jatuh ke permukaan tanah dikurangi dengan air yang mengalami evapotranspirasi dan air yang melimpas di permukaan (air permukaan).

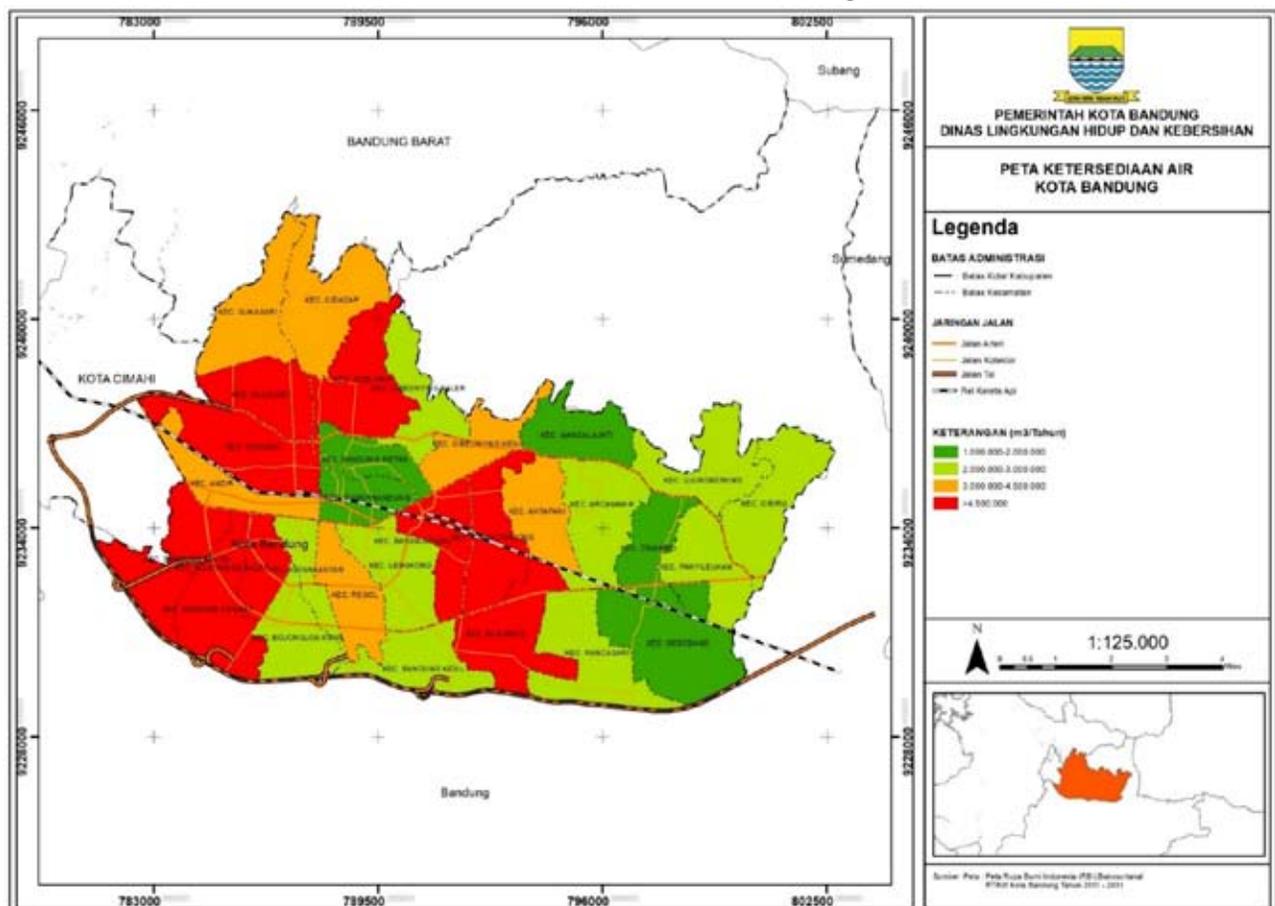
Hal tersebut menunjukkan bahwa air tanah yang dihitung merupakan air tanah yang berpotensi meresap pada zona jenuh pada akuifer bebas (tidak tertekan), dengan kata lain air tanah di sini adalah bagian dari air hujan yang berpotensi meresap ke dalam zona jenuh menjadi air tanah. Besaran sumber daya air baik air permukaan maupun air tanah dihitung berdasarkan air

hujan yang jatuh pada luasan wilayah administrasi kecamatan. Estimasi kebutuhan sumber daya air penduduk dan untuk lahan pertanian (sawah) dihitung berdasarkan atas klasifikasi menurut SNI 19-6728.1-2002 tentang Penyusunan Neraca Sumber Daya Air Spasial.

Dengan mengacu kriteria tersebut, maka kebutuhan air bersih penduduk rata-rata perkotaan diasumsikan 120 l/orang/hari. Asumsi kebutuhan air tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk pada setiap kecamatan. Untuk kebutuhan lahan pertanian (sawah), kebutuhan tanaman pertanian sawah membutuhkan sekitar 1 l/detik/Ha. Asumsi kebutuhan lahan pertanian dihitung dengan mengalikan luas lahan pertanian sawah dengan angka kebutuhan air tersebut. Rasio kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat (domestik) dihitung berdasarkan atas rata – rata penggunaan air bersih setiap penduduk terhadap potensi air tanah, sedangkan rasio kebutuhan air untuk sawah dihitung berdasarkan kebutuhan air untuk mengairi sawah terhadap potensi air permukaan.

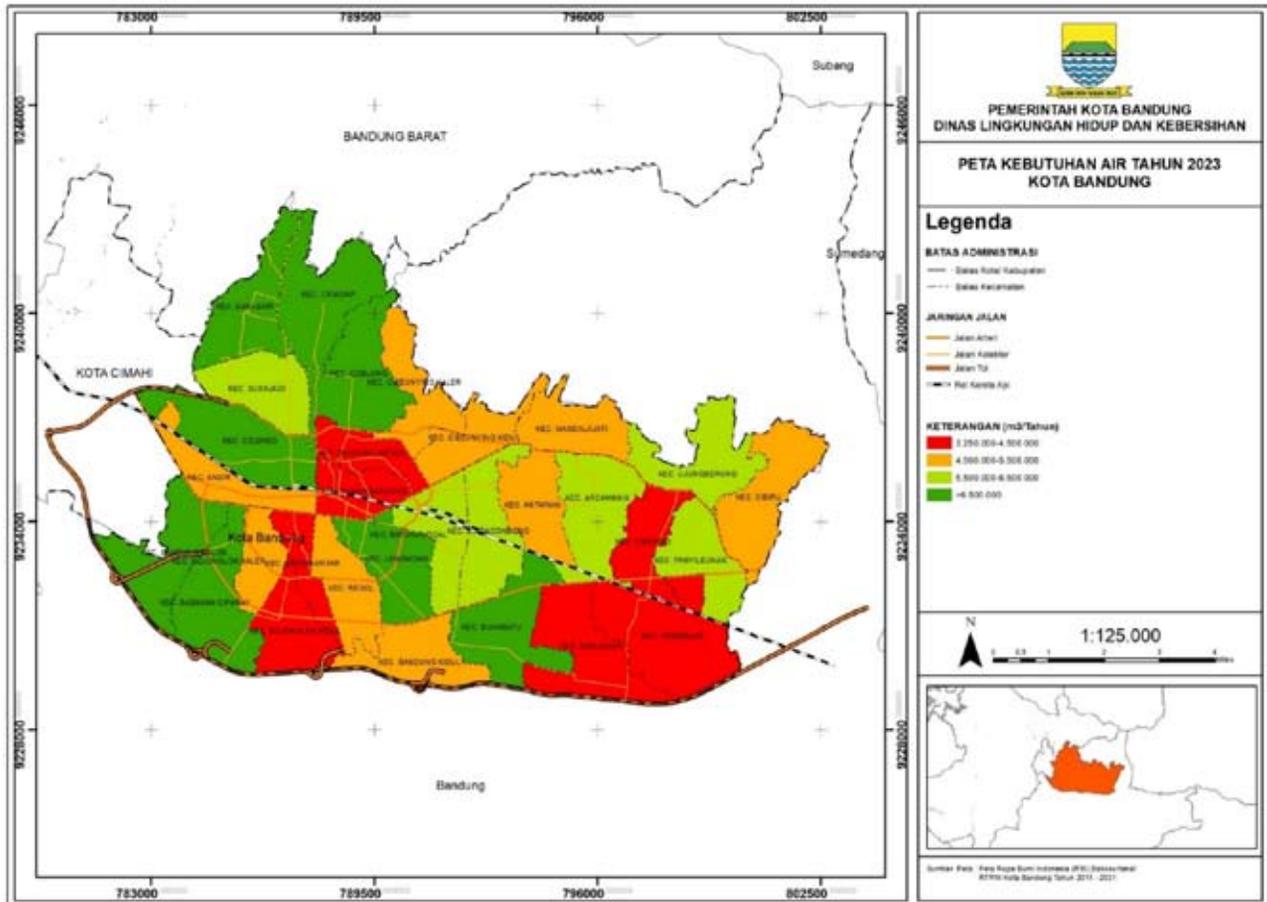
Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui bahwa pada tahun 2018 kebutuhan air di Kota Bandung sudah tercukupi, sedangkan untuk tahun 2023 terdapat kecamatan yang belum mampu memenuhi kebutuhan airnya, yaitu di Kecamatan Bojongloa Kaler, , sesuai dengan peta ketersediaan air Kota Bandung yang dapat terlihat pada Gambar 2.8 dan peta kebutuhan air Kota Bandung pada Gambar 2.9, serta peta daya dukung air Kota Bandung yang terlihat pada Gambar 2.10.

Gambar 2.8
Peta Ketersediaan Air Kota Bandung



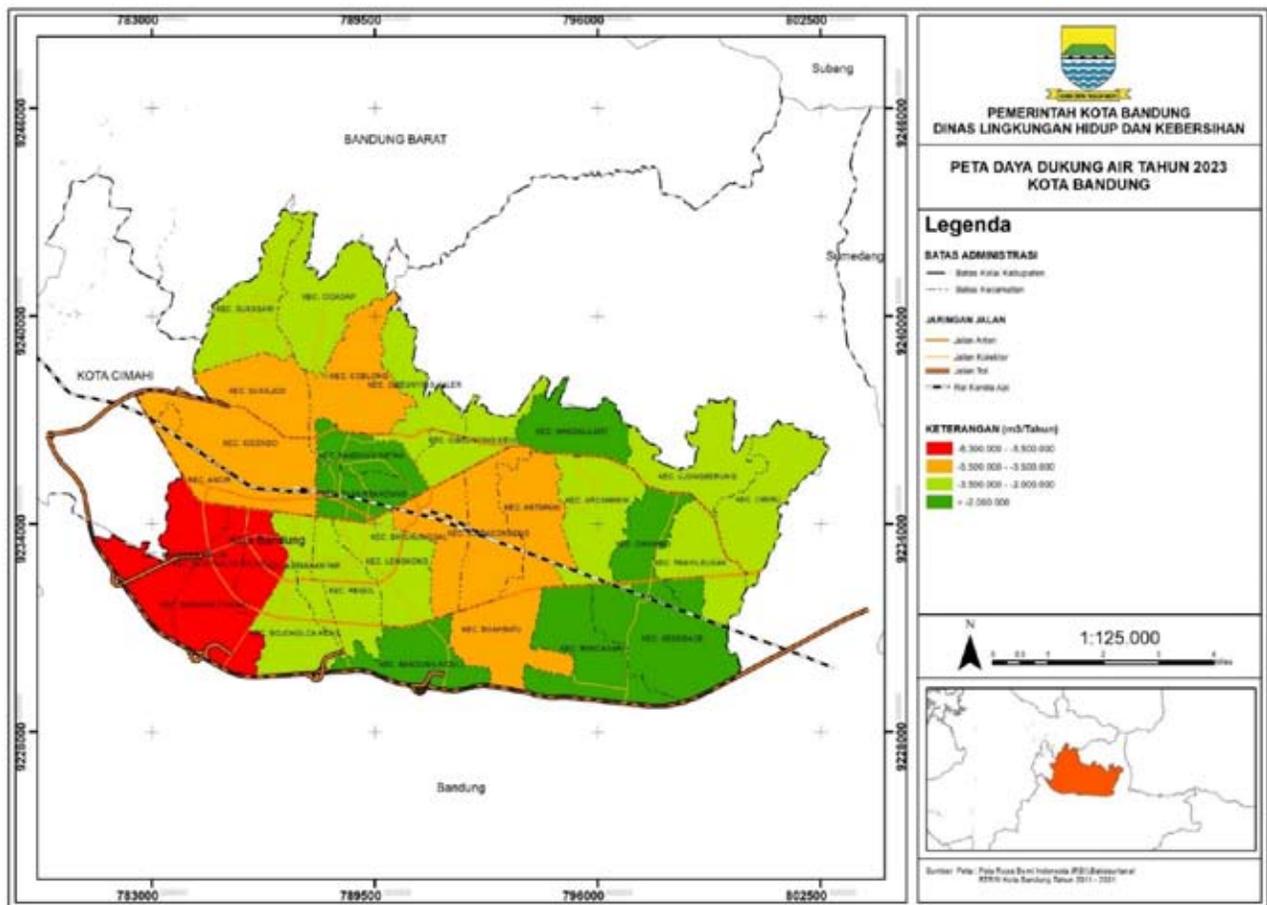
Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

Gambar 2.9
Peta Kebutuhan Air Kota Bandung



Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

Gambar 2.10
Peta Daya Dukung Air Kota Bandung



Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

b. Daya Dukung Pangan

Daya dukung lahan sawah menunjukkan kemampuan produksi padi sawah yang dapat memenuhi kebutuhan bahan makanan bagi penduduk di wilayahnya. Oleh karena itu perhitungan daya dukung lahan pangan memerlukan data luas sawah dan data produksi sawah. Produksi beras berasal dari sawah dan ladang, namun di Kota Bandung, padi hanya ditanam di sawah.

Daya dukung pangan dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras di Kota Bandung, yaitu:

$$\frac{(\text{Jumlah Produksi Beras Per Tahun})}{(\text{Jumlah Konsumsi Beras Per Tahun})}$$

Konsumsi beras rata-rata penduduk Kota Bandung sebesar 97 kg/orang/tahun (sumber: Badan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung), maka dapat dihitung jumlah konsumsi beras pada saat ini dan akan meningkat sesuai dengan proyeksi atau peningkatan jumlah penduduk di Kota Bandung.

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui ketersediaan beras Kota Bandung dalam waktu satu tahun adalah sebesar 7.188.000 Ha, sementara itu kebutuhan beras penduduk Kota Bandung pada tahun 2018 adalah sebesar 242.859.870 Kg/ tahun dan pada tahun 2023 sebesar 303.294.278 Kg/ Tahun. Berdasarkan hasil ketersediaan dan kebutuhan diketahui bahwa daya dukung pangan Kota Bandung pada tahun 2018 sebesar 0,03 dan pada tahun 2023 menurun menjadi 0,02. Hal ini berarti produksi pangan yang ada di Kota Bandung belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk di Kota Bandung, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk diperlukan dukungan produksi dari kawasan penyangga Kota Bandung seperti Kab. Bandung, Kab Sumedang dan Kab. Bandung Barat. Daya dukung lahan pertanian terhadap konsumsi beras di Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.9 serta peta sebaran ketersediaan beras Kota Bandung yang dapat terlihat pada Gambar 2.11, peta sebaran kebutuhan pangan yang dapat terlihat pada Gambar 2.12 dan peta daya dukung pangan Kota Bandung yang dapat dilihat pada Gambar 2.13.

Tabel 2.9

Daya Dukung Lahan Pertanian Terhadap Konsumsi Beras di Kota Bandung

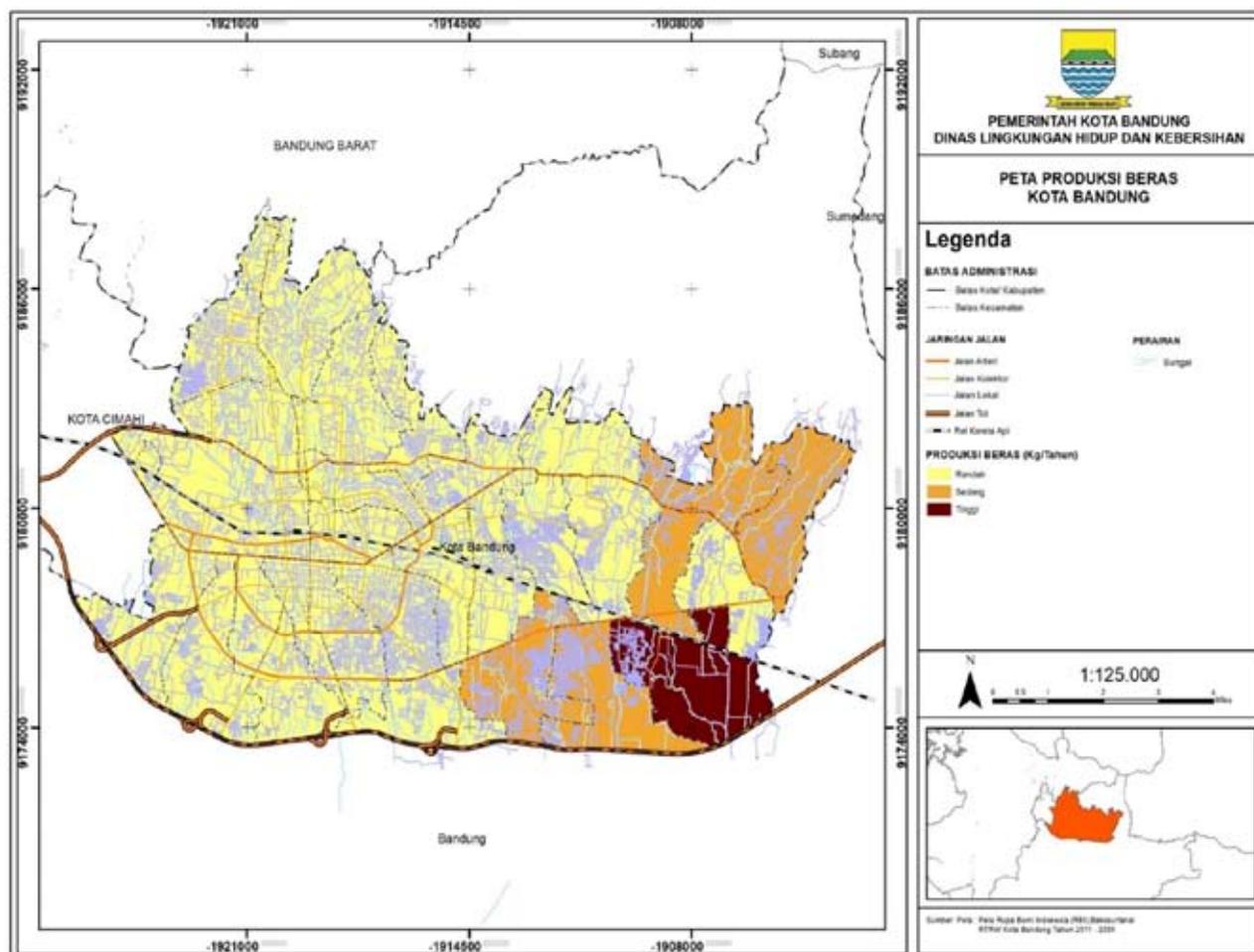
Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah Produksi Beras (Kg/ Tahun)	Kebutuhan Beras (Kg/ Tahun)		Daya Dukung	
	2018	2023		2018	2023	2018	2023
Bandung Kulon	144.890	180.559	69.000	14.054.330	17.514.252	0,005	0,0039
Babakan Ciparay	149.610	186.174	30.000	14.512.170	18.058.860	0,002	0,0017
Bojongloa Kaler	122.390	151.865	-	11.871.830	14.730.862	0,000	0,0000
Bojongloa Kidul	87.570	110.440	-	8.494.290	10.712.658	0,000	0,0000
Astanaanyar	69.750	87.505	-	6.765.750	8.487.985	0,000	0,0000
Regol	82.980	104.003	30.000	8.049.060	10.088.318	0,004	0,0030
Lengkong	72.580	91.448	-	7.040.260	8.870.421	0,000	0,0000
Bandung Kidul	60.230	76.615	99.000	5.842.310	7.431.611	0,017	0,0133
Buahbatu	96.290	120.052	483.000	9.340.130	11.645.072	0,052	0,0415
Rancasari	75.700	94.517	592.000	7.342.900	9.168.116	0,081	0,0646
Gedebage	35.830	44.587	2.721.000	3.475.510	4.324.904	0,783	0,6291
Cibiru	70.380	87.329	592.000	6.826.860	8.470.937	0,087	0,0699
Panyileukan	39.380	49.028	266.000	3.819.860	4.755.687	0,070	0,0559
Ujungberung	75.570	93.545	966.000	7.330.290	9.073.848	0,132	0,1065

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah Produksi Beras (Kg/ Tahun)	Kebutuhan Beras (Kg/ Tahun)		Daya Dukung	
	2018	2023		2018	2023	2018	2023
Cinambo	24.830	30.913	690.000	2.408.510	2.998.571	0,286	0,2301
Arcamanik	68.550	85.344	296.000	6.649.350	8.278.373	0,045	0,0358
Antapani	75.460	95.394	69.000	7.319.620	9.253.264	0,009	0,0075
Mandalajati	63.500	78.755	108.000	6.159.500	7.639.201	0,018	0,0141
Kiaracondong	133.470	167.045	128.000	12.946.590	16.203.402	0,010	0,0079
Batununggal	122.190	152.198	10.000	11.852.430	14.763.218	0,001	0,0007
Sumur Bandung	35.980	44.752	-	3.490.060	4.340.932	0,000	0,0000
Andir	98.710	123.659	-	9.574.870	11.994.963	0,000	0,0000
Cicendo	100.770	125.158	-	9.774.690	12.140.299	0,000	0,0000
Bandung Wetan	31.240	39.493	-	3.030.280	3.830.797	0,000	0,0000
Cibeunying Kidul	109.280	136.183	-	10.600.160	13.209.728	0,000	0,0000
Cibeunying Kaler	71.950	89.920	39.000	6.979.150	8.722.288	0,006	0,0045
Coblong	133.340	166.245	-	12.933.980	16.125.806	0,000	0,0000
Sukajadi	109.510	136.404	-	10.622.470	13.231.198	0,000	0,0000
Sukasari	82.860	103.803	-	8.037.420	10.068.915	0,000	0,0000
Cidadap	58.920	73.812	-	5.715.240	7.159.793	0,000	0,0000
Total	2.503.710	3.126.745	7.188.000	242.859.870	303.294.278	0,03	0,02

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

Gambar 2.11

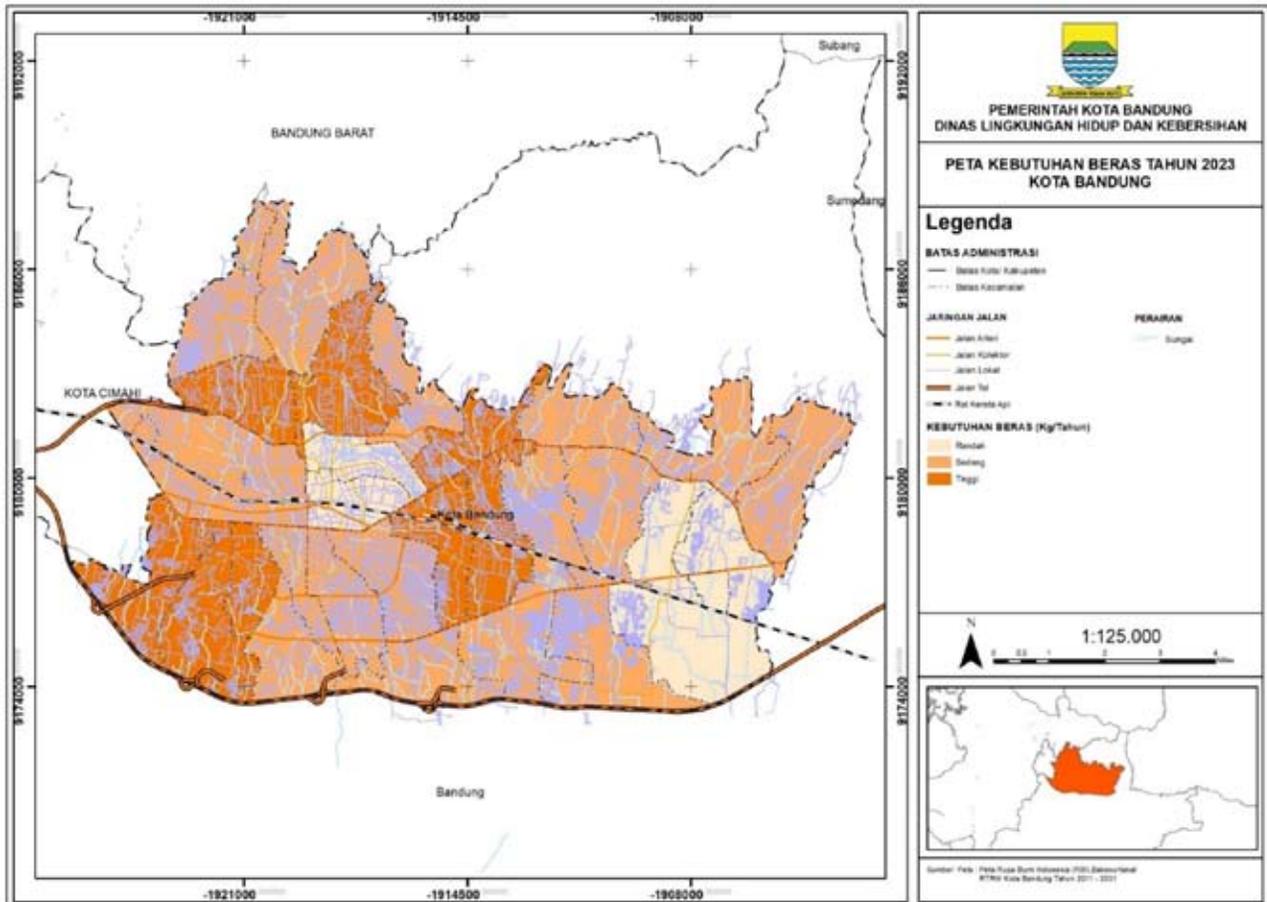
Peta Sebaran Ketersediaan Beras di Kota Bandung



Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

Gambar 2.12

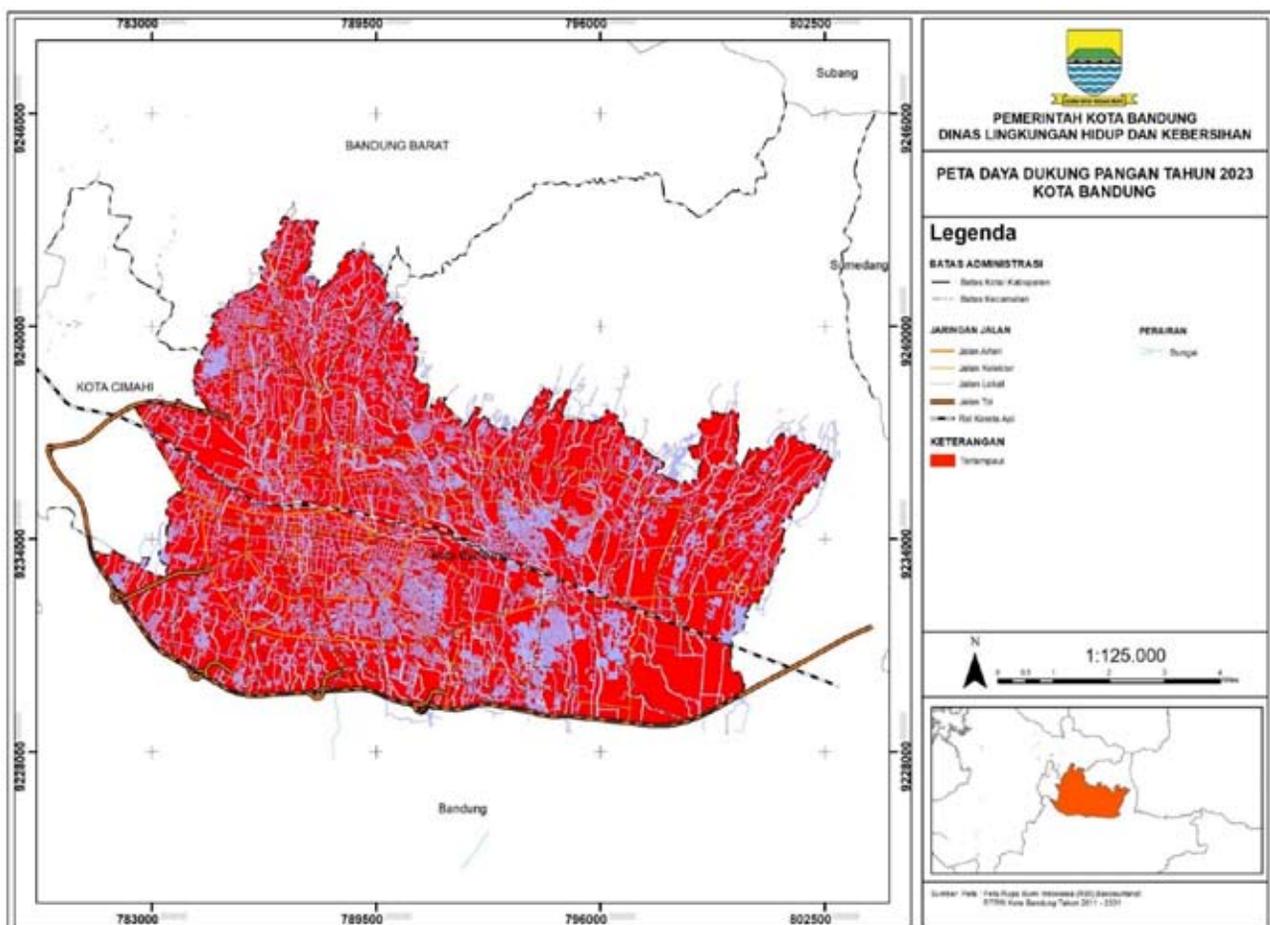
Peta Sebaran Kebutuhan Pangan di Kota Bandung



Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

Gambar 2.13

Peta Daya Dukung Pangan Kota Bandung



Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

c. Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan Lindung di Kota Bandung terdiri dari:

- **Kawasan yang memberikan perlindungan**

Yaitu kawasan yang dapat melindungi kawasan bawahannya seperti kawasan Bandung Utara dengan ketinggian 750 mdpl dan berfungsi sebagai kawasan resapan air.

- **Kawasan perlindungan setempat**

Kawasan perlindungan setempat terdiri dari :

- Sempadan Sungai Cikapundung, Sungai Cipamokolan, Sungai Cidurian, Sungai Cicadas, Sungai Cinambo, Sungai Ciwastra dan Sungai Citepus beserta anak-anak sungainya;
- Sempadan rel KA;
- Sempadan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi;
- Sempadan jalan dan jalan bebas hambatan;
- Kawasan sekitar mata air dengan lokasi tersebar.

- **Kawasan RTH**

Kawasan RTH di Kota Bandung seluas 2.043,52 Ha (12,22%) yang terdiri dari RTH publik seluas 1.085,05 (6,49%) dan RTH privat seluas 958,47 (5,73%).

- **Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya**

Kawasan pelestarian alam di Kota Bandung adalah Kawasan Taman Hutan Raya Juanda, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong dengan luas 2,96 Ha. Kawasan cagar budaya di Kota Bandung meliputi:

- Kawasan Pusat Kota;
- Kawasan Pecinan/Perdagangan;
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan/Militer;
- Kawasan Etnik Sunda;
- Kawasan Perumahan Villa dan Non-villa;
- Kawasan Eks Industri.

- **Kawasan rawan bencana**

Kawasan rawan bencana di Kota Bandung terdiri dari:

- Rawan Kebakaran (Pemukiman Padat)
- Rawan Longsor (Bandung Utara)
- Rawan Genangan Banjir (68 titik genangan)

- **Kawasan lindung lainnya**

Kawasan lindung lainnya adalah kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Kebun Binatang Bandung.

Daya dukung fungsi lindung (DDL) dilihat dari luas guna lahan yang memiliki fungsi lindung, koefisien lindung untuk guna lahan, dan luasan wilayah. Perhitungan daya dukung fungsi lindung dilakukan dengan rumus sebagai berikut.

$$DDL = \frac{\sum Lgl_1 \cdot \alpha_1 + Lgl_2 \cdot \alpha_2 + Lgl_3 \cdot \alpha_3 + \dots + Lgl_n \cdot \alpha_n}{LW} \quad (5.2)$$

Keterangan:

DDL = Daya dukung fungsi lindung

Lgl_n = luas guna lahan jenis n (Ha)

α_n = koefisien lindung untuk guna lahan n

LW = luasan wilayah (Ha)

Daya dukung fungsi lindung memiliki kisaran nilai antara 0 hingga 1. Jika nilainya semakin mendekati angka 1, maka semakin baik fungsi lindung yang ada di wilayah tersebut, demikian pula sebaliknya. Adapun tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung dapat dilihat pada Tabel 2.10 dan koefisien lindung lahan berdasarkan jenis guna lahan dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.10
Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung

Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	Rentang Nilai DDL
Sangat rendah	0-0,2
Rendah	0,2-0,4
Sedang	0,4-0,6
Baik	0,6-0,8
Sangat Baik	0,8-1

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

Tabel 2.11
Koefisien Lindung Lahan berdasarkan Jenis Guna Lahan

Jenis Tata Guna Lahan	Koefisien Lindung
Cagar alam	1,00
Suaka margasatwa	1,00
Taman wisata	1,00
Taman buru	0,82
Hutan Lindung	1,00
Hutan Cadangan	0,61
Hutan Produksi	0,68
Perkebunan besar	0,54
Perkebunan rakyat	0,42
Persawahan	0,46
Ladang/tegalan	0,21
Padang rumput	0,28
Danau/tambak	0,98
Tanaman kayu	0,37
Permukiman	0,18
Tanah kosong	0,01

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

Dalam perhitungan daya dukung fungsi lahan, seluruh penggunaan lahan memiliki fungsi lindung dengan koefisien yang berbeda. Tabel 2.12 merupakan hasil perhitungan luas guna lahan fungsi lindung Kota Bandung dengan data yang diperoleh dari Peta Guna Lahan Kota Bandung.

Tabel 2.12
Daya Dukung Lahan Lindung Kota Bandung

No.	Guna Lahan	Luas (Ha)	Koefisien	Luas Lahan/Lgl (Ha)
1.	Perkebunan rakyat	27,6	0,42	11,59
2.	Perumahan	9.624,47	0,18	1.732,40
3.	Sawah	784,21	0,46	360,74
4.	Sungai	106,24	1,00	106,24
5.	Taman/rumput	110,6	0,28	30,97
6.	Tanah Kosong	369,41	0,01	3,69
7.	Tanah Kosong Sudah Diperuntukan	214,47	0,48	102,95
8.	Tegalan/ladang	807,11	0,21	169,49
Total		12.044,11		2.518,07

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dihitung DDL Kota Bandung sebagai berikut.

$$DDL = \frac{(2.518,07)}{(12.044,11)} = 0,20$$

Dari hasil perhitungan di atas, didapatkan nilai DDL Kota Bandung sebesar 0,20 atau masuk ke dalam kategori rendah.

d. Daya Dukung Lahan Terbangun

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Salah satu persoalan yang dominan pada kawasan budidaya adalah alih fungsi lahan perkotaan yang tidak terkendali dan terjadi penggunaan campuran dalam pemanfaatan ruang. Kawasan budidaya di Kota Bandung terdiri dari:

- **Kawasan permukiman**

Sebagai salah satu kota yang penting dan berpenduduk relatif padat, maka sebagian besar lahan di Kota Bandung (51,05%) digunakan sebagai lahan permukiman. Hingga kini persentase tersebut diyakini meningkat cepat, dengan pertumbuhan daerah perumahan di bagian timur dan utara Kota Bandung.

- **Kawasan pertanian**

Persentase luas lahan pertanian pada tahun terakhir sekitar 20,1%, sedangkan tahun sebelumnya sudah mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi 17,33% (pertanian lahan basah sebesar 11,91% dan lahan kering sebesar 5,42%). Luasan sawah ini terus berkurang seiring dengan pertumbuhan perumahan dan permukiman.

- **Kawasan perdagangan dan jasa**

Kawasan perdagangan dan jasa di Kota Bandung mencapai 3,84%. Di masa datang seiring dengan fungsi kota sebagai kota jasa, maka perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Bandung akan semakin meningkat pesat.

- **Kawasan industri**

Kawasan industri di Kota Bandung mencapai sekitar 4,58%. Secara bertahap pengembangan industri khususnya industri yang bersifat polutan akan direlokasi keluar Kota Bandung.

- **Kawasan perkantoran**

Kawasan perkantoran dan pemerintahan di Kota Bandung mencapai sekitar 2,28%. Saat ini kawasan perkantoran pemerintah berskala nasional, provinsi dan kota terdistribusi di lokasi khususnya di pusat Kota Bandung.

Daya Dukung Lahan Terbangun (DDLB) ditinjau dari koefisien luas lahan terbangun, luas wilayah, dan luas lahan terbangun. Nilai daya dukung lahan terbangun dapat dihitung menggunakan persamaan berikut.

$$DDLB = \frac{(\alpha \times LW)}{LTb} \quad (2.3)$$

Dimana,

$$LTb = LB + LTp \quad (2.4)$$

Keterangan:

DLBB = Daya dukung lahan terbangun

LW = Luas wilayah (Ha)

α = Koefisien luas lahan terbangun

LTb = Luas lahan terbangun (Ha)

LB = Luas lahan bangunan (Ha)

LTp = Luas lahan untuk infrastruktur, diasumsikan 20% dari luas bangunan

Hasil perhitungan:

DDLB < 1 = Daya dukung lahan permukiman terlampaui atau buruk

DDLB 1-3 = Daya dukung lahan permukiman bersyarat atau sedang

DDLB >3 = Daya dukung lahan permukiman baik

Berdasarkan Peta Penggunaan Lahan Kota Bandung yang diterbitkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2011 – 2030, luas terbangun di Kota Bandung pada tahun 2019 adalah 11.711,7 Ha atau 71% dari wilayah administrasi. Diasumsikan luas lahan untuk infrasturktur adalah 20% dari luas bangunan maka luasnya adalah 2.342,34 Ha dan rata-rata lahan terbangun adalah 60% (rata-rata perkotaan dan pedesaan), maka perhitungan daya dukung lahan terbangun adalah sebagai berikut.

$$DDLB = \frac{(60\% \times 16.729,65)}{(11.711,7+2.342,34)} = 0.714$$

DDLB Kota Bandung secara keseluruhan 0,714 yang termasuk dalam daya dukung lahan permukiman terlampaui atau buruk. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandung tidak memiliki daya tampung bangunan yang cukup untuk pengembangan pembangunan.

e. Daya Tampung Penduduk

Penghitungan kebutuhan lahan mencakup kebutuhan lahan untuk permukiman dan fasilitas pendukungnya. Kebutuhan lahan untuk permukiman dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penghitungan berdasarkan standar kebutuhan lahan untuk permukiman. Kementerian Pekerjaan Umum telah menetapkan Norma, Standar; Peraturan, Menteri (NSPM) Kriteria Teknis

Kawasan Budidaya yang antara lain mengatur standar kebutuhan lahan untuk permukiman dan fasilitas pendukungnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, kebutuhan lahan untuk permukiman/kapita adalah sebesar 50m²/jiwa atau 50 unit rumah/ha, dengan asumsi 1 KK terdiri dari 4 jiwa.

$$\text{Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)}: 0,005 \text{ Ha/jiwa} \times \text{Jumlah Penduduk (Jiwa)}$$

Sumber: Pedoman Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Wilayah Perkotaan

Daya dukung sumber daya Lahan dapat diketahui dengan membandingkan hasil perhitungan ketersediaan lahan (S) dengan kebutuhan lahan (D). Apabila:

- $S > D$ maka daya dukung lahan belum terlampaui; dan
- $S < D$ maka daya dukung lahan sudah terlampaui.

Berdasarkan tabel Daya Tampung Penduduk, pada tahun 2023 Kecamatan yang sudah terlampaui kebutuhan lahan permukimannya berjumlah 24 kecamatan, yaitu Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astanaanyar, Regol, Lengkong, Bandung Kidul, Buahbatu, Cibiru, Ujungberung, Cinambo, Antapani, Mandalajati, Kiaracondong, Batununggal, Sumur Bandung, Andir Cicendo, Bandung Wetan, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler, Coblong dan Sukasari. Sedangkan kecamatan yang masih belum terlampaui kebutuhan lahan permukimannya berjumlah 6, yaitu Kecamatan Rancasari, Gedebage, Panyileukan, Arcamanik, Sukajadi dan Cidapad. Daya tampung penduduk Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.13, untuk peta ketersediaan lahan permukiman di Kota Bandung dapat dilihat pada Gambar 2.14. Peta sebaran penduduk Kota Bandung tahun 2023 dapat terlihat pada Gambar 2.15 serta peta daya tampung penduduk Kota Bandung tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.16.

Tabel 2.13
Daya Tampung Penduduk Kota Bandung

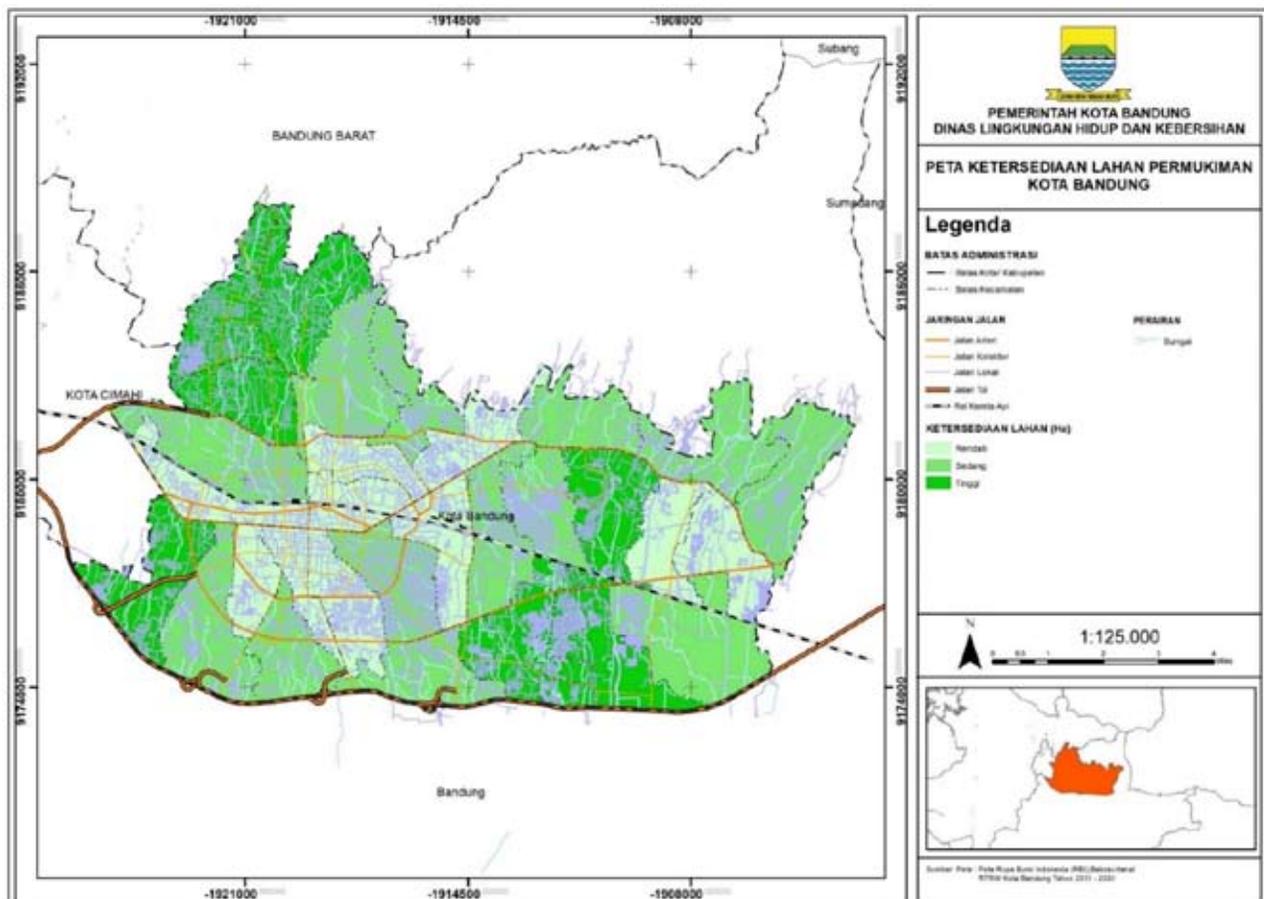
No	Kecamatan	Proyeksi Penduduk (2023)	Kawasan Lindung (Ha)	Kawasan Budidaya (Ha)	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)	
						2023	Keterangan
1	Bandung Kulon	180.559,30	62,24	623,24	453,31	902,80	Terlampaui
2	Babakan Ciparay	186.173,81	71,89	650,31	419,15	930,87	Terlampaui
3	Bojongloa Kaler	151.864,55	0	307,06	198,08	759,32	Terlampaui
4	Bojongloa Kidul	110.439,77	70,22	418,04	312,06	552,20	Terlampaui
5	Astanaanyar	87.505,00	8,31	256,21	104,33	437,52	Terlampaui
6	Regol	104.003,27	40,25	435,63	239,00	520,02	Terlampaui
7	Lengkong	91.447,64	0,897	552,66	280,77	457,24	Terlampaui
8	Bandung Kidul	76.614,55	99,01	424,43	358,26	383,07	Terlampaui
9	Buahbatu	120.052,28	57,19	655,41	522,63	600,26	Terlampaui
10	Rancasari	94.516,66	65,53	680,52	508,41	472,58	Belum
11	Gedebage	44.586,64	142,73	777,35	380,84	222,93	Belum
12	Cibiru	87.329,25	223,37	461,02	415,18	436,65	Terlampaui
13	Panyileukan	49.027,70	27,65	479,27	251,07	245,14	Belum
14	Ujungberung	93.544,83	162,82	449,89	397,83	467,72	Terlampaui
15	Cinambo	30.913,10	53,12	366,46	129,73	154,57	Terlampaui
16	Arcamanik	85.344,06	97,26	588,79	489,60	426,72	Belum
17	Antapani	95.394,47	15,59	465,44	384,53	476,97	Terlampaui

No	Kecamatan	Proyeksi Penduduk (2023)	Kawasan Lindung (Ha)	Kawasan Budidaya (Ha)	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)	
						2023	Keterangan
18	Mandalajati	78.754,65	154,1	319,86	288,62	393,77	Terlampai
19	Kiaracondong	167.045,38	13,49	554,84	356,52	835,23	Terlampai
20	Batununggal	152.198,13	33,53	451,56	242,45	760,99	Terlampai
21	Sumur Bandung	44.751,88	36,85	307,65	43,62	223,76	Terlampai
22	Andir	123.659,41	0,359	412,06	184,64	618,30	Terlampai
23	Cicendo	125.157,72	76,14	691,59	405,30	625,79	Terlampai
24	Bandung Wetan	39.492,76	41,13	291,19	173,06	197,46	Terlampai
25	Cibeunying Kidul	136.182,76	32,28	376,51	255,31	680,91	Terlampai
26	Cibeunying Kaler	89.920,49	100,28	360,04	291,54	449,60	Terlampai
27	Coblong	166.245,42	84,75	627,66	409,96	831,23	Terlampai
28	Sukajadi	136.404,10	34,87	459,25	837,30	682,02	Belum
29	Sukasari	103.803,25	24,05	569,23	452,30	519,02	Terlampai
30	Cidadap	73.812,30	219,16	546,72	461,93	369,06	Belum
TOTAL		3.126.745,14	2.049,07	14.559,89	10.247,31	15.633,73	

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

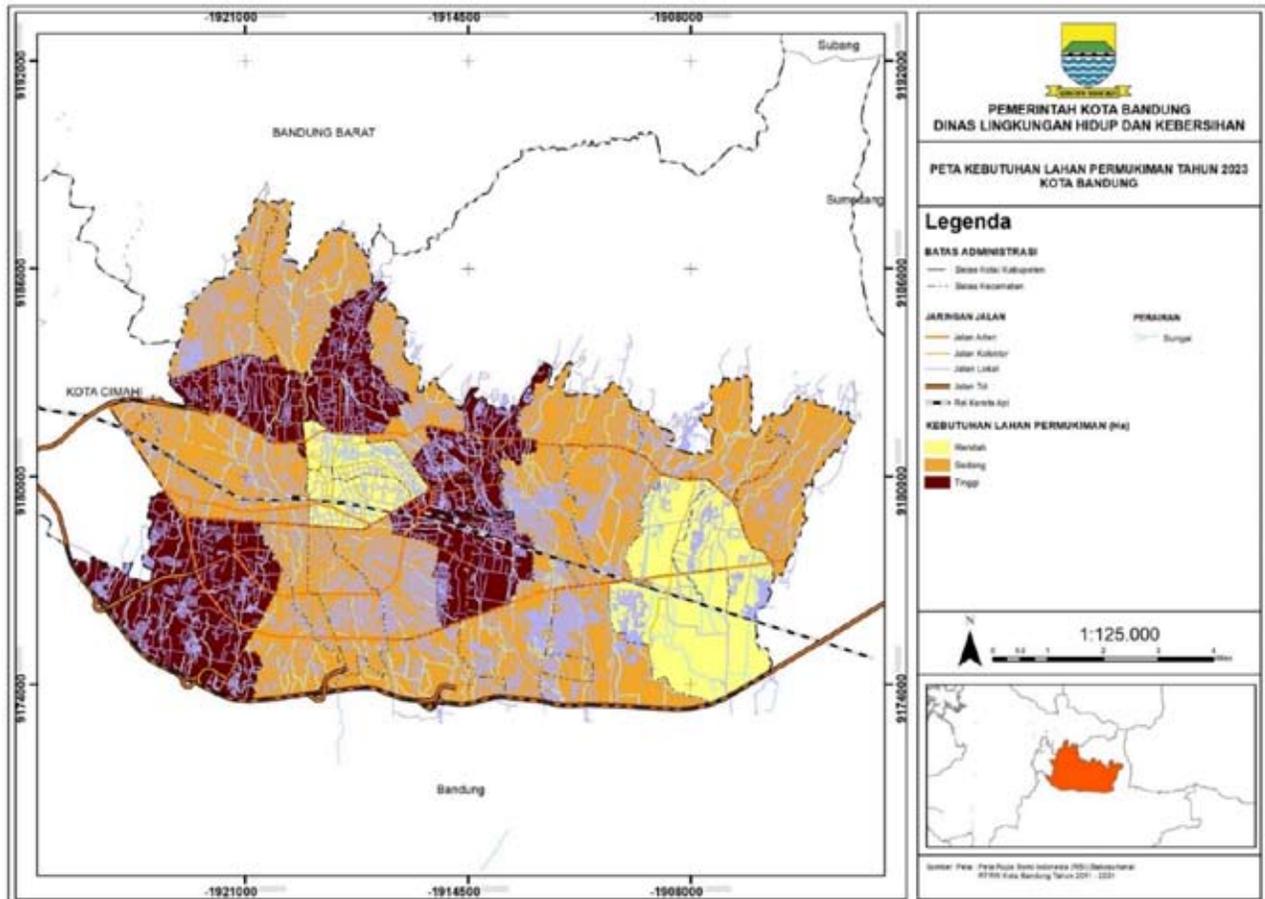
Gambar 2.14

Peta Ketersediaan Lahan Permukiman di Kota Bandung



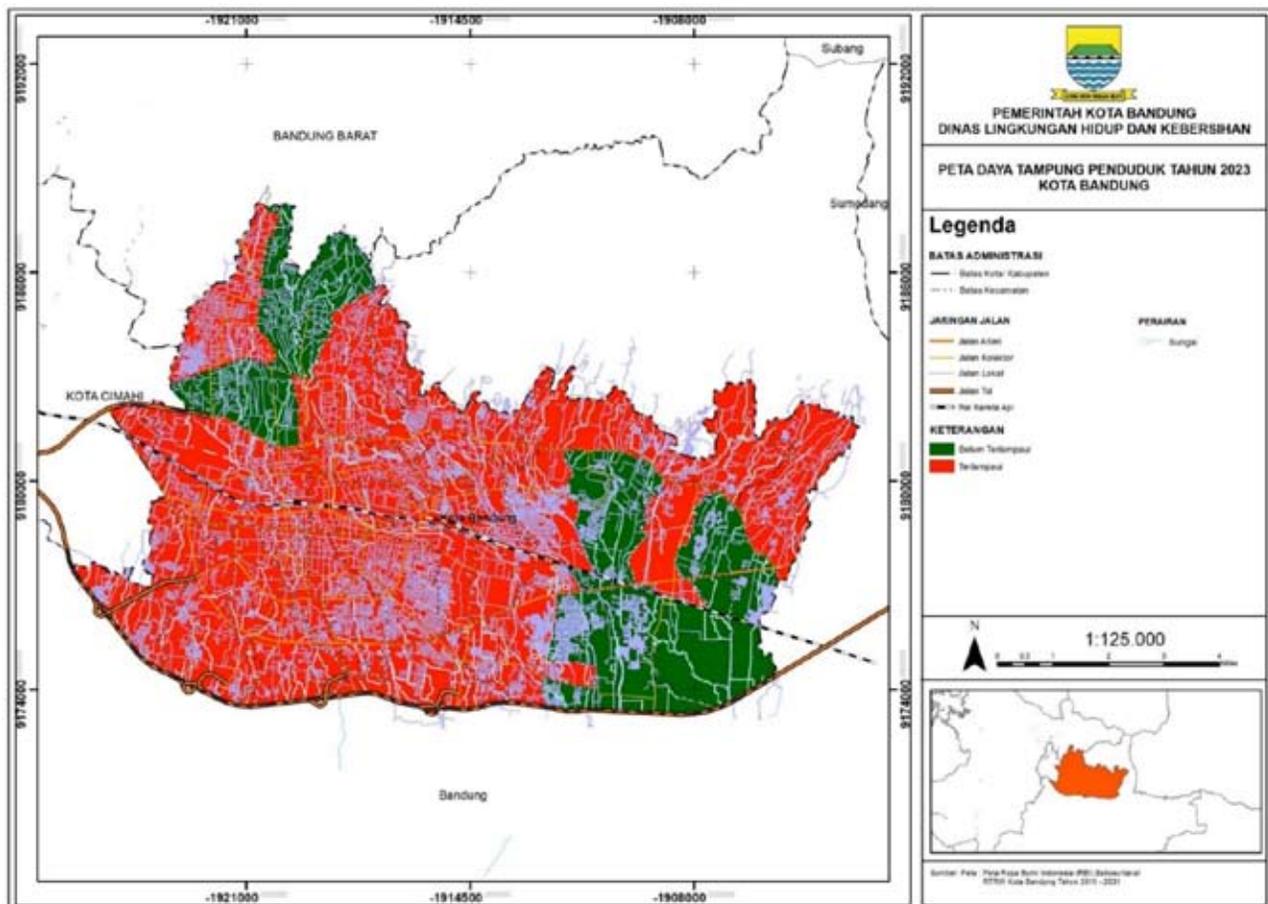
Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

Gambar 2.15
Peta Sebaran Penduduk Tahun 2023



Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

Gambar 2.16
Peta Daya Tampung Penduduk Kota Bandung Tahun 2023



Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Pertumbuhan dan Distribusi PDRB

Dalam tata kelola pembangunan, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi berkualitas menjadi *ultimate goal* yang dikedepankan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan. Pemerataan menjamin pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu daerah agar dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin golongan masyarakat, tidak hanya terakumulasi di tangan segelintir golongan. Hal ini kelak akan turut menimbulkan kestabilan dalam upaya membangun atau menumbuhkan kesejahteraan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Nilai dan kontribusi sektoral (lapangan usaha) PDRB Kota Bandung tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14

PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2016–2020

KBLI	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	176.341,00	188.927,66	189.933,7	186.176,0	173.708,0
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	33.249.092,63	34.753.930,16	36.488.799,3	38.122.860,4	38.204.352,6
D	Pengadaan Listrik dan Gas	160.823,06	165.363,98	170.814,9	173.324,5	159.088,1
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	279.883,24	278.409,85	278.938,8	272.351,7	293.363,0
F	Konstruksi	14.141.570,29	15.238.956,14	16.435.135,8	17.476.154,1	15.959.041,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	46.451.124,92	49.410.000,07	52.177.950,2	55.965.697,7	50.409.940,6
H	Transportasi dan Pergudangan	12.618.047,71	13.331.526,27	14.444.749,8	14.384.045,6	10.987.442,0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.900.173,63	8.715.422,04	9.483.982,5	9.889.467,2	8.084.902,0
J	Informasi dan Komunikasi	18.774.381,73	21.245.090,37	23.719.568,4	26.766.239,9	35.402.321,0
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.429.764,67	8.994.224,74	9.657.407,5	10.317.703,0	10.551.962,5
L	Real Estate	2.041.429,60	2.188.004,24	2.323.879,3	2.483.529,8	2.513.828,8
M,N	Jasa Perusahaan	1.217.219,57	1.334.194,37	1.460.368,7	1.615.605,9	1.442.418,8
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.103.285,65	4.135.291,28	4.196.100,2	4.401.289,5	4.267.386,8
P	Jasa Pendidikan	4.734.861,96	5.157.685,13	5.572.299,3	6.126.376,4	6.399.912,2

KBLI	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.564.364,77	1.707.983,97	1.871.861,6	2.076.925,6	1.957.087,0
R,S, T,U	Jasa Lainnya	5.385.467,54	6.006.950,49	6.612.385,9	7.385.140,6	6.338.198,6
	PDRB	161.227.831,96	172.851.960,77	185.084.175,8	197.642.887,9	193.144.954,0

Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan Tabel 2.14 terlihat bahwa selama lima tahun terakhir (2016-2020), perekonomian Kota Bandung selalu mengalami kenaikan sebagaimana ditunjukkan nilai PDRB yang terus bertambah, namun demikian apabila dilihat dari pertumbuhannya perekonomian ekonomi Kota Bandung justru mengalami perlambatan setiap tahunnya. Hal ini dapat terlihat dari nilai LPE yang terus mengalami penurunan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. PDRB Kota Bandung atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha (juta rupiah) tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15
PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2016-2020

KBLI	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	258.769,06	286.222,02	296.754,6	300.036,9	287.420,0
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	43.335.237,91	46.404.982,69	50.274.344,1	53.848.450,4	55.095.637,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	201.844,34	237.643,91	254.031,3	263.757,9	243.706,1
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	409.965,23	448.010,00	479.909,4	494.397,4	542.691,0
F	Konstruksi	19.244.245,34	21.275.805,33	23.719.087,6	26.123.039,4	23.988.716,0
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	58.434.424,88	63.777.426,91	69.809.379,9	76.468.582,5	71.852.505,0
H	Transportasi dan Pergudangan	24.390.912,95	27.395.577,91	30.568.259,9	31.237.794,1	21.124.540,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.282.633,55	11.761.828,92	13.181.714,0	14.253.875,4	12.466.036,5
J	Informasi dan Komunikasi	21.064.357,80	24.270.353,06	26.688.471,8	29.167.724,0	40.322.793,4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	12.613.090,39	14.145.708,63	15.614.849,4	17.230.021,6	18.158.071,2
L	Real Estate	2.410.798,87	2.639.101,52	2.897.630,2	3.185.907,9	3.329.273,7
M,N	Jasa Perusahaan	1.636.892,02	1.830.372,66	2.060.850,5	2.537.193,4	2.414.318,2
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.806.555,43	6.426.695,55	6.976.563,1	7.750.702,5	7.845.261,1
P	Jasa Pendidikan	6.973.897,03	7.964.887,80	9.025.825,7	10.846.334,7	12.223.039,2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.322.079,53	2.590.047,51	2.896.942,6	3.292.954,7	3.303.347,4
R, S, T, U	Jasa Lainnya	7.477.935,29	8.654.962,31	9.807.288,4	11.460.103,3	10.419.283,8
	PDRB	216.863.639,62	240.109.626,72	264.551.902,5	288.460.876,0	283.616.640,2

Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Pembentukan PDRB Kota Bandung selama periode 2016-2019 didominasi oleh dua lapangan usaha, yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta industri pengolahan. Akan tetapi meskipun peranannya tinggi, selama tahun 2016-2019 kedua lapangan usaha tersebut cenderung menunjukkan peranan yang menurun. Sebaliknya, lapangan usaha transportasi dan pergudangan peranannya berangsur-angsur meningkat. Sementara lapangan

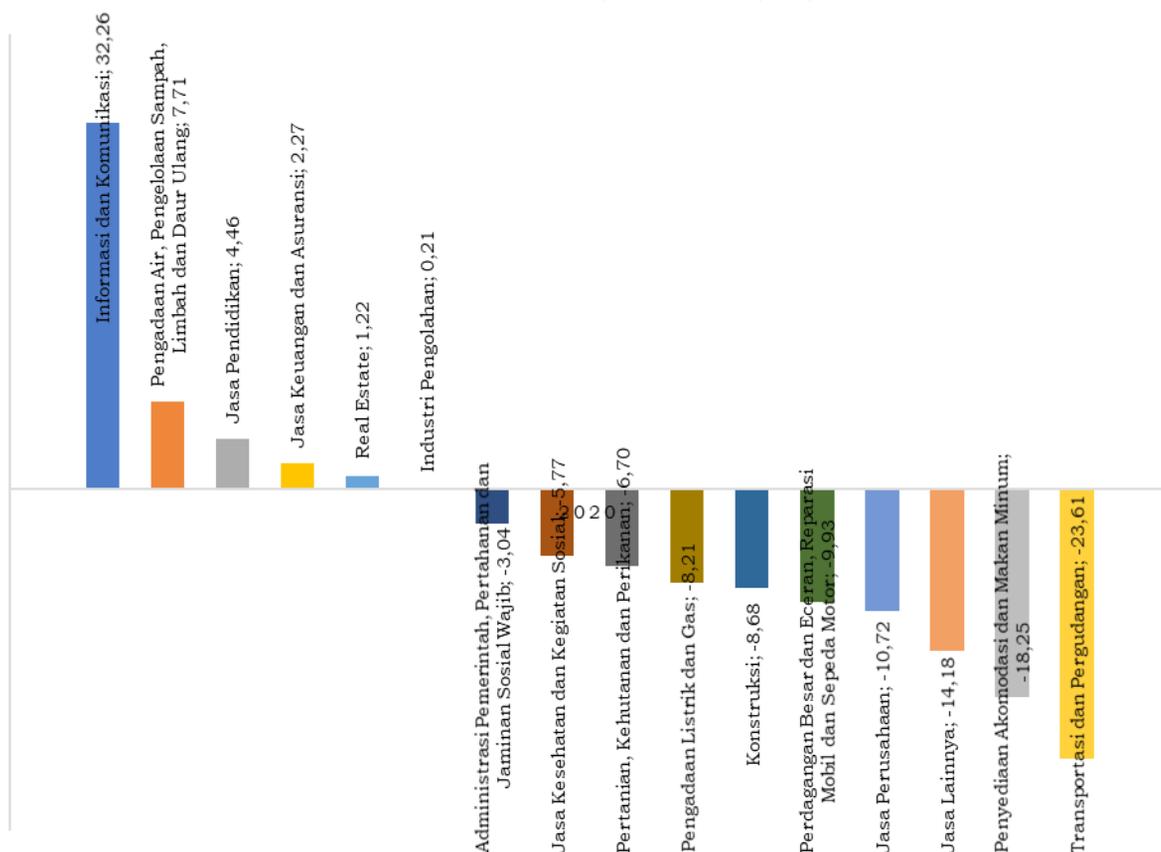
usaha konstruksi, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan dan asuransi peranannya berfluktuasi namun cenderung meningkat. Hal tersebut dapat menggambarkan terjadinya pergeseran struktur ekonomi di Kota Bandung ke kategori jasa-jasa. Pada tahun 2020, 10 lapangan usaha lapangan usaha di Kota Bandung mengalami kontraksi, 6 lapangan usaha lapangan usaha mengalami pertumbuhan, dan 1 lapangan usaha lapangan usaha, yaitu pertambangan dan penggalian, tidak ada aktivitas ekonominya di Kota Bandung.

Lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami penurunan kinerja ekonomi terbesar. Pada tahun 2020 lapangan usaha ini menurun 23,61% dibandingkan tahun 2019. Tiga lapangan usaha lainnya juga mengalami penurunan lebih dari 10% adalah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa lainnya, dan jasa perusahaan di mana masing-masing turun sebesar 18,25%, 14,18%, dan 10,72%. lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang merupakan lapangan usaha terbesar dalam PDRB Kota Bandung menurun sebesar 9,93%. Sedangkan lapangan usaha industri yang merupakan lapangan usaha terbesar kedua di Kota Bandung tumbuh melambat sebesar 0,21%.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terbesar pada tahun 2020 adalah lapangan usaha informasi dan komunikasi. Lapangan usaha ini tumbuh 32,26% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kegiatan masyarakat dilakukan secara daring untuk mencegah penyebaran Covid-19. Lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang meningkat 7,71%. Lapangan usaha lain yang mengalami pertumbuhan meski melambat pada tahun 2020 adalah lapangan usaha jasa pendidikan, jasa keuangan, dan *real estate* yang masing-masing tumbuh sebesar 4,46%, 2,27%, dan 1,22%. Gambar 2.17 memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung menurut lapangan usaha tahun 2020.

Gambar 2.17

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020



Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

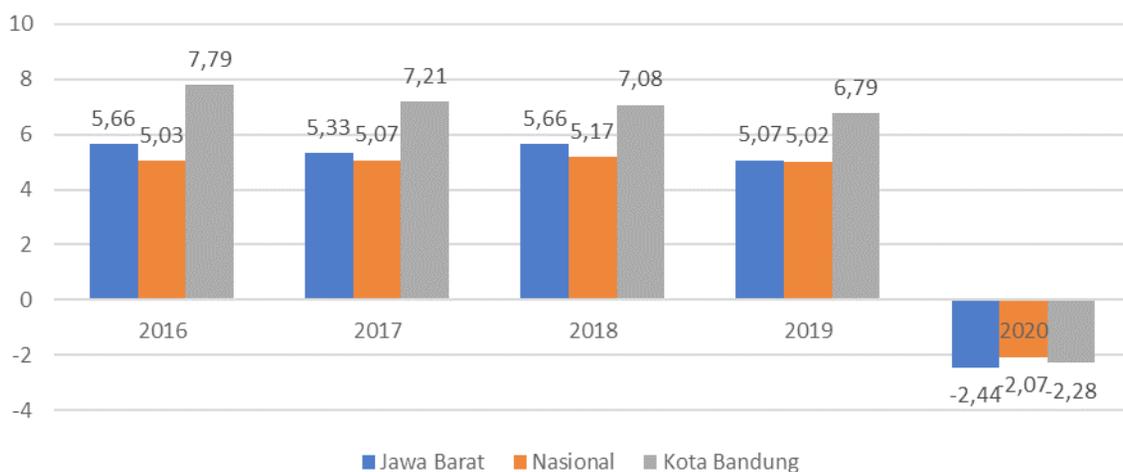
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung pada periode 2016-2019 memperlihatkan adanya fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2016, perekonomian Kota Bandung yang dihitung berdasarkan tahun dasar 2010 mengalami pertumbuhan mencapai 7,79%, kemudian mengalami perlambatan pada tahun-tahun berikutnya. Data menunjukkan pada tahun 2019 perekonomian Bandung tumbuh 6,79%, lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 7,08%.

Selanjutnya, ekonomi Kota Bandung tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,28%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi Covid-19. PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2020 adalah sebesar 283.616.640,2 juta rupiah. Secara nominal, pada tahun PDRB Kota Bandung tahun 2020 atas dasar harga berlaku berkurang sebesar 4.844.235,8 juta rupiah dibanding PDRB Kota Bandung tahun 2019 yang sebesar 288.460.876 juta rupiah. Sedangkan bila berdasarkan harga konstan, PDRB Kota Bandung tahun 2020 adalah sebesar 193.144.954 juta rupiah, berkurang 4.497.933,9 juta rupiah dibanding nilai PDRB atas harga konstan tahun 2019 yang sebesar 197.642.887,9 juta rupiah. Dengan demikian ekonomi Kota Bandung tahun 2020 menurun 2,28% dibandingkan tahun 2019.

Walaupun mengalami kecenderungan penurunan, namun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Bandung selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan Indonesia. Akan tetapi, pada tahun 2020 baik Kota Bandung, Jawa Barat dan Indonesia mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Kontraksi Kota Bandung tahun 2020 sedikit lebih dalam dari kondisi nasional yang sebesar -2,07%, namun berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang sebesar -2,44%, sebagaimana Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung tahun 2016-2020 dan perbandingannya dengan Jawa Barat dan Nasional dengan Metode Tahun Dasar 2010 dapat terlihat pada Gambar 2.18.

Gambar 2.18

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2016–2020 dan Perbandingannya dengan Jawa Barat dan Nasional (Metode Tahun Dasar 2010)



Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD dan BPS Jawa Barat, 2021
- BPS Pusat, 2021

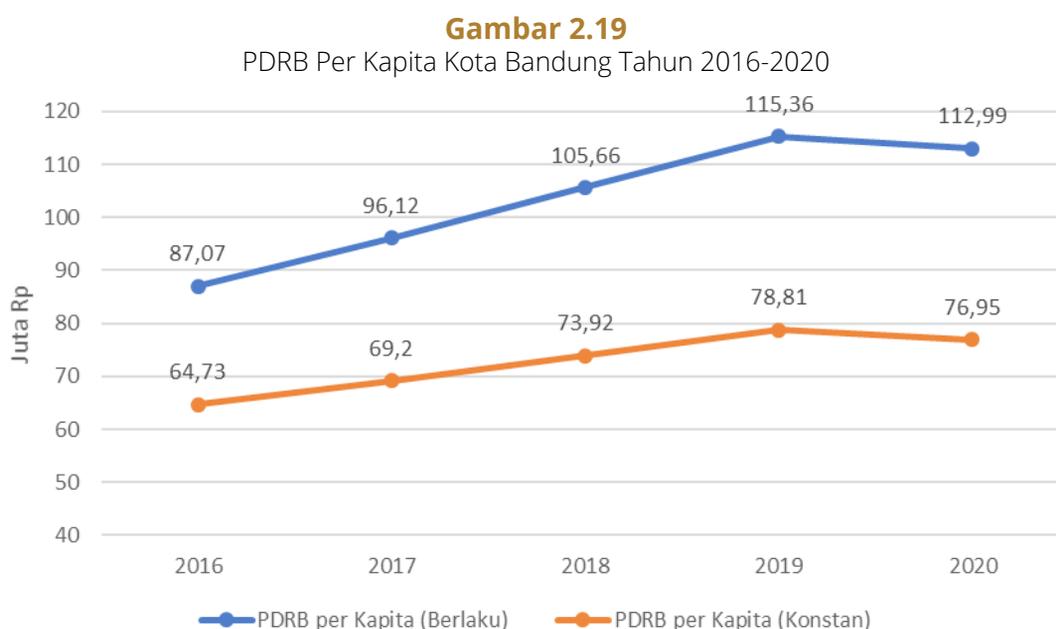
2.2.2. PDRB Per Kapita

Indikator lain untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah

penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kota Bandung atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016, PDRB per kapita tercatat sebesar 87,07 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 115,36 juta rupiah dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 112,99 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan di Kota Bandung juga mengalami kenaikan sejak tahun 2016 hingga 2019, masing-masing sebesar 64,73 juta rupiah dan 78,81 juta rupiah dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 76,95 juta rupiah. Namun tidak setinggi kenaikan yang terjadi pada PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku, karena sudah tidak ada pengaruh inflasi. Selengkapnya, Gambar 2.19 memperlihatkan PDRB Per Kapita Kota Bandung Tahun 2016-2020.



Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2021

Pada tahun 2020, seluruh kabupaten/kota di wilayah Bandung Raya mengalami pelambatan PDRB per kapita dibandingkan tahun 2019. Jika dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat yang mencapai 41,81 juta rupiah pada tahun 2020, hal ini menunjukkan PDRB per kapita Kota Bandung lebih tinggi. Berdasarkan analisis *Klassen Typology*, Kota Bandung termasuk ke dalam kategori Daerah Maju dan Tumbuh Cepat (*Rapid Growth Region*) yaitu daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita provinsi.

Berdasarkan Tabel 2.16, dapat diketahui bahwa Kota Bandung dan Kota Cimahi merupakan daerah yang memiliki nilai PDRB per kapita lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Barat, sementara Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung Barat masih di bawah PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.16

Perbandingan PDRB Per Kapita Harga Konstan Kota Bandung, Wilayah Bandung Raya dan Provinsi Jawa Barat Periode 2016-2020 (Dalam Juta Rupiah)

Kabupaten / Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Bandung	87,07	96,12	105,66	115,36	112,99
Kabupaten Bandung	26,23	28,12	30,39	32,71	32,12
Kabupaten Sumedang	23,65	25,85	28,29	30,75	30,74
Kabupaten Bandung Barat	22,47	24,12	26,02	27,75	27,10
Kota Cimahi	41,35	44,22	48,11	53,13	51,92
Provinsi Jawa Barat	34,89	37,22	40,27	43,07	41,81

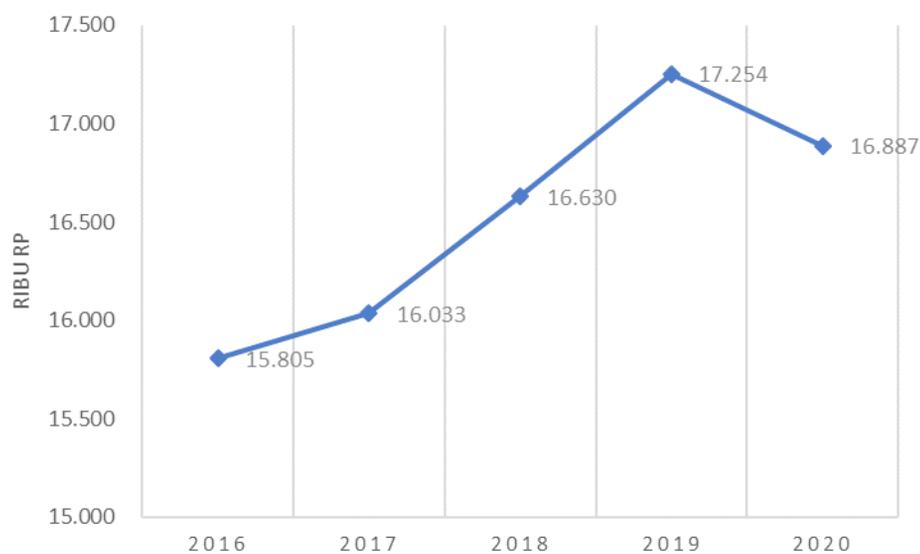
Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2021

2.2.3. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita merupakan indikator yang merepresentasikan dimensi standar hidup layak. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Sebagai salah satu indikator pembentuk IPM yang mengalami kenaikan yang cukup besar, pengeluaran per kapita sebagai representasi dimensi standar hidup layak setiap tahunnya senantiasa mengalami tren peningkatan dengan rata-rata sebesar 2,54% dan pada tahun 2019 mencapai sebesar Rp17.254.000,00. Pengeluaran per kapita yang terus meningkat dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa semakin membaiknya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kecuali tahun 2020 menurun menjadi Rp16.887.000,00 karena mewabahnya pandemi Covid-19, yang menghambat kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan pengeluaran per kapita Kota Bandung dapat dilihat pada Gambar 2.20.

Gambar 2.20

Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kota Bandung Tahun 2016-2020 (Dalam Ribu Rupiah)



Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD (diolah), 2020

Kota Bandung menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan pengeluaran per kapita tertinggi di Jawa Barat yaitu sebesar 17,25 juta rupiah, disusul oleh Kota Bekasi sebesar 16,16 juta rupiah, dan Kota Cimahi sebesar 12,45 juta rupiah. Sedangkan pengeluaran per kapita terendah di Jawa Barat ditempati oleh Kabupaten Tasikmalaya, yaitu 8,09 juta rupiah, hal ini menunjukkan kurangnya pemerataan pengeluaran di Jawa Barat. Tabel 2.17 merupakan tabel capaian kinerja pengeluaran per kapita kabupaten/kota di Jawa Barat.

Tabel 2.17

Pengeluaran Per Kapita Penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019 dan 2020 (Juta Rupiah)

No	Kabupaten/ Kota	Pengeluaran per Kapita (2019)	Peringkat (2019)	Pengeluaran per Kapita (2020)	Peringkat (2020)
1	Bogor	10,68	13	10,31	14
2	Sukabumi	8,97	23	8,82	23
3	Cianjur	8,29	25	7,98	25
4	Bandung	10,50	15	10,20	17
5	Garut	8,10	26	7,87	26
6	Tasikmalaya	8,09	27	7,85	27
7	Ciamis	9,56	21	9,28	21
8	Kuningan	9,67	20	9,45	20
9	Cirebon	10,67	14	10,34	13
10	Majalengka	9,82	19	9,52	19
11	Sumedang	10,41	17	10,21	16
12	Indramayu	10,09	18	9,85	18
13	Subang	11,01	11	10,79	11
14	Purwakarta	11,82	8	11,61	6
15	Karawang	11,86	6	11,31	8
16	Bekasi	11,61	9	11,24	9
17	Bandung Barat	8,68	24	8,45	24
18	Pangandaran	9,42	22	9,08	22
19	Kota Bogor	11,83	7	11,56	7
20	Kota Sukabumi	11,20	10	10,99	10
21	Kota Bandung	17,25	1	16,88	1
22	Kota Cirebon	11,93	5	11,80	5
23	Kota Bekasi	16,16	2	15,77	2
24	Kota Depok	15,70	3	15,28	3
25	Kota Cimahi	12,45	4	12,02	4
26	Kota Tasikmalaya	10,41	16	10,26	15
27	Kota Banjar	10,71	12	10,53	12
	JAWA BARAT	11.15		10,84	

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat yang dikelola dalam SIPD, 2021

Pengeluaran per kapita penduduk Kota Bandung yang sebesar 17,25 juta rupiah lebih tinggi sebesar 1,09 juta rupiah jika dibandingkan dengan pengeluaran per kapita penduduk Kota Bekasi yang sebesar 16,16 juta rupiah. Ini menggambarkan bahwa rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga di Kota Bandung sebesar 17,25 juta rupiah per bulannya. Pengeluaran per kapita Jawa Barat adalah sebesar 11,15 juta rupiah, apabila dibandingkan dengan Kota Bandung terdapat selisih, Kota Bandung lebih tinggi sebesar 6,10 juta rupiah.

2.2.4. Laju Inflasi

Inflasi menjadi salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan mempengaruhi kemampuan terhadap daya beli masyarakat. Tingkat daya beli masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor perkembangan harga barang dan jasa. Laju inflasi Kota Bandung selama periode 2015-2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, tingkat inflasi Kota Bandung pada posisi 3,93% serta mengalami penurunan menjadi 2,93% pada tahun 2016 dan mengalami kenaikan menjadi 3,46% pada tahun 2017 dan 3,76% pada tahun 2018 serta mengalami penurunan menjadi 2,78% pada tahun 2019. Peningkatan inflasi pada tahun 2019 disebabkan oleh adanya beberapa komoditas

yang mengalami kenaikan harga, seperti telur ayam ras, daging ayam ras, beras, tarif kereta api, bahan bakar rumah tangga, cabe merah, angkutan udara, tomat sayur, cabe rawit, dan wortel. Untuk perkembangan inflasi tahunan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional periode 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18

Perkembangan Inflasi Tahunan Tingkat Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Periode 2016-2020

No	Cakupan	Inflasi (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kota Bandung	2,93	3,46	3,76	2,78	1,75
2	Provinsi Jawa Barat	2,75	3,63	3,54	3,21	2,18
3	Nasional	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68

Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Pusat, 2020

Melihat perbandingan tingkat inflasi di level nasional dan regional Jawa Barat, pada tahun 2020 Kota Bandung memiliki nilai inflasi yang lebih tinggi daripada nasional tetapi lebih rendah daripada Provinsi Jawa Barat. Inflasi Kota Bandung pada tahun 2019 sebesar 1,75% merupakan yang terendah selama enam tahun terakhir. Dan apabila dibandingkan dengan target inflasi sebesar <10% pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, maka realisasi indikator kinerja inflasi telah mencapai target yang ditetapkan karena realisasinya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 bernilai di bawah 10%.

2.2.5. Gini Ratio

Tujuan pembangunan adalah peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Jika peningkatan tidak diiringi dengan pemerataan, akan menimbulkan fenomena ketimpangan wilayah. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Gini Ratio, Indeks Williamson, dan Kriteria Bank Dunia.

Koefisien gini (gini ratio) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien gini didasarkan pada kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Ukuran kesenjangan indeks gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna. Semakin besar nilai indeks gini, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara indeks gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan gini ratio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- $GR < 0,4$ dikategorikan sebagai ketimpangan rendah,
- $0,4 < GR < 0,5$ dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (moderat),
- $GR > 0,5$ dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi.

Perbandingan gini ratio Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.21.

Gambar 2.21

Perbandingan Gini Ratio Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016–2020



Sumber: BPS yang dikelola dalam SIPD, 2020

Pada tahun 2020, gini ratio Kota Bandung memiliki nilai sama dengan Provinsi Jawa Barat dan lebih besar dari pada nasional. Namun demikian, gini ratio Kota Bandung menunjukkan tren penurunan dari 0,44 pada tahun 2016 menjadi 0,40 pada tahun 2020. Angka gini ratio Kota Bandung pada tahun 2020 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat tergolong 'rendah'.

2.2.6. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial-psikologis. Permasalahan kemiskinan terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Adapun penyebab terjadinya kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan penduduk, dimana jumlah penduduk semakin bertambah namun tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan.
2. Angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran, dimana sebagian besar penduduk yang bekerja memiliki penghasilan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Tingkat pendidikan yang rendah, dimana hal ini berpengaruh pada kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh penduduk dalam dunia kerja.
4. Distribusi yang tidak merata, dimana secara makro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan menjadi timpang.

Sebagai kota metropolitan, Kota Bandung tak lepas dari masalah kemiskinan. Pemerintah Kota Bandung dari tahun ke tahun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dengan tren penurunan jumlah penduduk miskin selama kurun waktu 2015-2019. Jumlah penduduk miskin di Kota Bandung pada tahun 2019 mencapai 84.670 jiwa atau mencapai 3,38% dari jumlah warga Kota Bandung. Namun kondisi tersebut berbalik di tahun 2020, dimana jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 100.020 jiwa atau mencapai 3,99%. Peningkatan ini merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19. Secara rinci perkembangan variabel kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Garis Kemiskinan di Kota Bandung Tahun 2016-2020

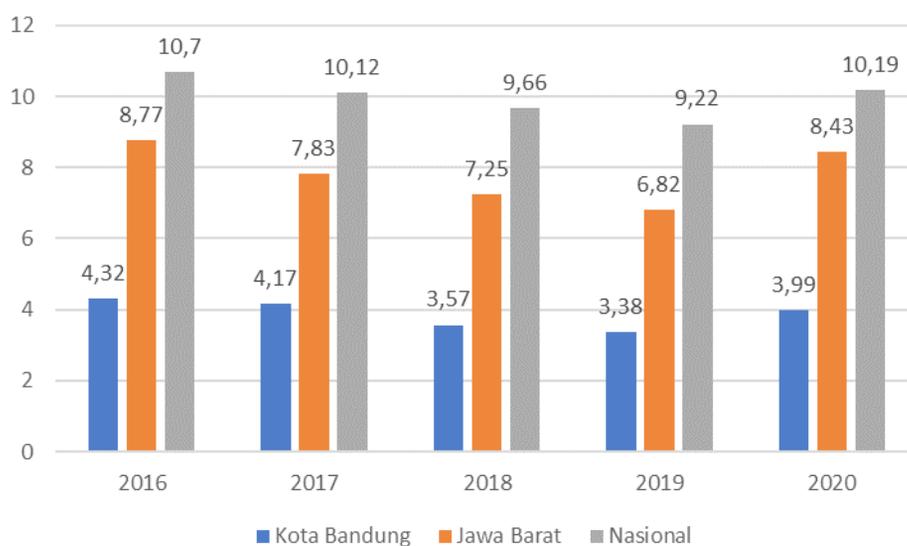
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Dalam 000)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
2016	107,58	4,32	0,55	0,12	400.541
2017	103,98	4,17	0,68	0,18	420.579
2018	89,38	3,57	0,48	0,11	448.902
2019	84,67	3,38	0,53	0,14	474.448
2020	100,02	3,99	0,61	0,13	500.452

Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Pada periode tahun 2016-2020, persentase penduduk miskin Kota Bandung selalu berada di bawah Provinsi Jawa Barat dan nasional. Selama enam tahun terakhir, baik Kota Bandung maupun Jawa Barat dan nasional memiliki kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan. Tahun 2020, persentase penduduk miskin Jawa Barat sebesar 8,43% dan nasional sebesar 9,22% (2019), sementara Kota Bandung berada jauh di bawah yaitu 3,99%. Lebih rinci mengenai tingkat kemiskinan per tahun pada periode tersebut diperlihatkan pada Gambar 2.22.

Gambar 2.22

Persentase Penduduk Miskin Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat yang dikelola dalam SIPD, 2020

Selanjutnya, sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per kecamatan di Kota Bandung pada tahun 2020, menunjukkan bahwa Kecamatan Bojongloa Kaler merupakan wilayah dengan jumlah rumah tangga miskin terbesar yaitu sebanyak 11.758 Kepala Keluarga (KK) atau 8,42% dari jumlah rumah tangga miskin di Kota Bandung yang mencapai 139.721 KK. Wilayah tersebut merupakan wilayah yang berada di pusat kota dan padat penduduk. Sementara Kecamatan Bandung Wetan merupakan kecamatan di Kota Bandung dengan jumlah rumah tangga miskin terendah yaitu sebanyak 1.014 KK atau 0,73%. Adapun penyajian data selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Kecamatan
di Kota Bandung Tahun 2017–2020

No	Kecamatan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		2020	
		Jumlah KK	%						
1	Andir	5.452	3,93%	5.244	3,86%	5.342	3,82%	5.458	3,91%
2	Antapani	2.785	2,01%	2.768	2,04%	2.744	1,96%	2.747	1,97%
3	Arcamanik	3.887	2,80%	3.831	2,82%	3.813	2,73%	3.830	2,74%
4	Astanaanyar	3.823	2,76%	3.638	2,67%	3.634	2,60%	3.614	2,59%
5	Babakan Ciparay	9.811	7,07%	9.707	7,14%	9.635	6,89%	9.760	6,99%
6	Bandung Kidul	3.857	2,78%	3.755	2,76%	3.787	2,71%	3.778	2,70%
7	Bandung Kulon	8.344	6,01%	8.231	6,05%	8.192	5,85%	8.499	6,08%
8	Bandung Wetan	1.044	0,75%	1.020	0,75%	1.015	0,73%	1.014	0,73%
9	Batununggal	8.672	6,25%	8.578	6,31%	8.851	6,33%	8.683	6,21%
10	Bojongloa Kaler	11.405	8,22%	11.340	8,34%	11.704	8,36%	11.758	8,42%
11	Bojongloa Kidul	6.031	4,35%	5.927	4,36%	5.822	4,16%	5.900	4,22%
12	Buahbatu	5.653	4,07%	5.453	4,01%	5.807	4,15%	5.785	4,14%
13	Cibeunying Kaler	2.924	2,11%	2.851	2,10%	2.957	2,11%	2.881	2,06%
14	Cibeunying Kidul	6.094	4,39%	5.743	4,22%	5.725	4,09%	5.727	4,10%
15	Cibiru	4.491	3,24%	4.479	3,29%	4.457	3,19%	4.433	3,17%
16	Cicendo	3.968	2,86%	3.960	2,91%	4.105	2,93%	4.007	2,87%
17	Cidadap	1.903	1,37%	1.883	1,38%	2.459	1,76%	2.307	1,65%
18	Cinambo	1.560	1,12%	1.509	1,11%	1.578	1,13%	1.551	1,11%
19	Coblong	6.265	4,52%	6.096	4,48%	6.351	4,54%	6.306	4,51%
20	Gedebage	1.936	1,40%	1.909	1,40%	1.740	1,24%	1.819	1,30%
21	Kiaracondong	8.589	6,19%	8.408	6,18%	8.937	6,39%	8.851	6,33%
22	Lengkong	2.658	1,92%	2.612	1,92%	2.755	1,97%	2.697	1,93%
23	Mandalajati	3.853	2,78%	3.799	2,79%	3.989	2,85%	3.931	2,81%
24	Panyileukan	1.651	1,19%	1.610	1,18%	1.709	1,22%	1.631	1,17%
25	Rancasari	3.138	2,26%	3.096	2,28%	3.119	2,23%	3.124	2,24%
26	Regol	4.264	3,07%	4.170	3,07%	4.723	3,38%	4.764	3,41%
27	Sukajadi	5.469	3,94%	5.376	3,95%	5.570	3,98%	5.543	3,97%
28	Sukasari	2.596	1,87%	2.560	1,88%	2.552	1,82%	2.533	1,81%
29	Sumur Bandung	1.046	0,75%	987	0,73%	1.291	0,92%	1.209	0,87%
30	Ujungberung	5.564	4,01%	5.479	4,03%	5.554	3,97%	5.581	3,99%
	Jumlah	138.733	100,00%	136.019	100,00%	139.917	100,00%	139.721	100,00%

Sumber: Dinas Sosial Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin indikator yang dapat dijadikan parameter kemiskinan sebuah wilayah yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* = P1) dan Indeks Kedalaman Keparahan (*Poverty Severity Index* = P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Selama periode 2016-2017 terjadi kenaikan menjadi 0,68, ini artinya bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan. Dan nilai indeks kembali mengalami penurunan menjadi 0,48 pada periode 2017-2018 serta mengalami kenaikan pada periode 2018-2019 menjadi 0,53. Pada periode 2019 – 2020 terjadi peningkatan menjadi 0,61.

Penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin dapat digambarkan melalui Indeks Keparahan Kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bandung mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Indeks Keparahan Kemiskinan mencapai 0,12 pada tahun 2016 kemudian mengalami kenaikan menjadi 0,18 pada tahun 2017 dan kembali menurun menjadi 0,11 pada tahun 2018 serta mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 menjadi 0,14 dan pada tahun 2020 turun menjadi 0,13. Keadaan tersebut menunjukkan tren menurunnya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Bandung.

2.2.7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pada kelompok umur muda (15-24 tahun), TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (di atas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun). Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai TPAK di Kota Bandung selama kurun waktu 2016-2020. Tabel 2.21 adalah gambaran secara lengkap mengenai TPAK di Kota Bandung dan Jawa Barat selama kurun waktu 2016-2020.

Tabel 2.21
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Bandung dan Jawa Barat
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016*	2017	2018	2019	2020
1	Kota Bandung	N/A	63,11	61,98	65,98	64,71
2	Provinsi Jawa Barat	60,65	63,34	62,92	65,07	64,53

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat yang dikelola dalam SIPD, 2020
Catatan: * tahun 2016 tidak ada publikasi BPS untuk Kota Bandung

Selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020, TPAK Kota Bandung mengalami kecenderungan meningkat kecuali pada tahun 2018 dan 2020 sempat mengalami penurunan. Pada tahun 2020 TPAK Kota Bandung sebesar 64,71%. Artinya sebesar 64,71% penduduk Kota Bandung merupakan angkatan kerja dibandingkan jumlah keseluruhan penduduk usia kerja. Pada tahun 2020 angkatan kerja di Kota Bandung menurun sebesar 1,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini merupakan dampak terjadinya pandemi Covid-19.

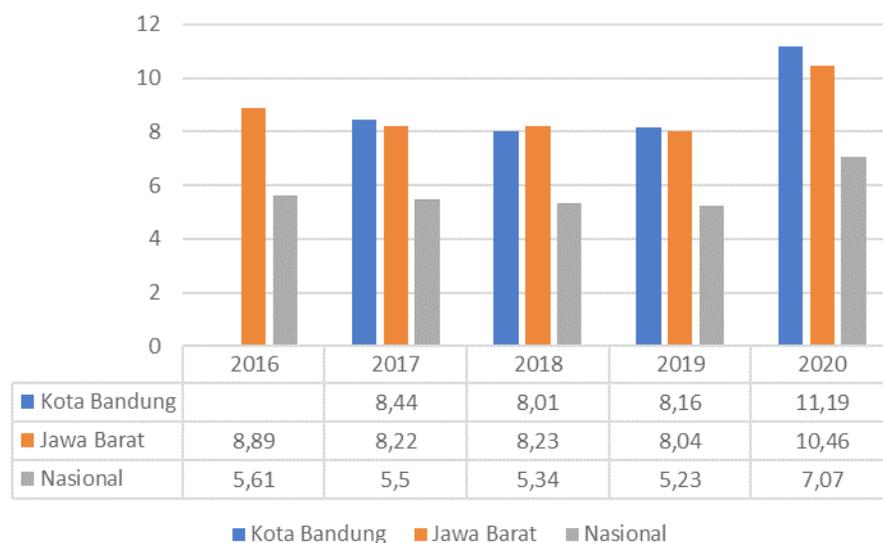
2.2.8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan.

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung pada rentang tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dan meningkat tajam di tahun 2020. TPT Kota Bandung pada bulan Agustus 2020 adalah sebesar 11,19%. Artinya dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 11 orang penganggur. Peningkatan tingkat pengangguran di Kota Bandung menunjukkan bahwa lapangan kerja yang tersedia di Kota Bandung belum mampu menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sedangkan di sisi lain, jumlah angkatan kerja selalu meningkat, baik laki-laki dan perempuan setiap tahunnya. Gambar 2.23 merupakan gambaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional tahun 2016-2020.

Gambar 2.23

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat yang dikelola dalam SIPD, 2020

Catatan: * tahun 2016 tidak ada publikasi TPT Kota Bandung dari BPS

Pada kurun waktu 2016-2020 bila dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Barat dan nasional, maka TPT Kota Bandung pada umumnya lebih tinggi. TPT Kota Bandung tahun 2020 sebesar 11,19% sementara TPT Jawa Barat sebesar 10,46% dan nasional mencapai 7,07%. Tingkat pengangguran terbuka Agustus 2019 Kota Bandung sebesar 8,16%, naik 0,15% dibanding tahun 2018 yang sebesar 8,01%. Ini berarti 8,16% angkatan kerja Kota Bandung dalam keadaan tidak bekerja atau pengangguran. Jumlah angkatan kerja yang berstatus pengangguran adalah 105.067 orang. Jika dibanding tahun 2018 maka jumlah pengangguran di Kota Bandung tahun 2019 bertambah 8.602 orang. Sedangkan menurut jenis kelamin, TPT laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan. TPT laki-laki Kota Bandung tahun 2019 sebesar 6,88%, turun 0,28 poin dari 7,16% di tahun 2018.

Selanjutnya, pada tahun 2020 terjadi lonjakan jumlah pengangguran di Kota Bandung menjadi 147.081 orang atau sebesar 11,19%, sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Pembatasan aktivitas

dan interaksi antarmanusia guna mencegah penularan Covid-19 telah menyebabkan banyak lapangan usaha yang tutup atau mengurangi aktivitas dan tenaga kerjanya. Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bandung Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22
Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bandung
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016*	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengangguran (orang)	N/A	102.869	96.465	105.067	147.081
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	N/A	8,44	8,01	8,16	11,19

Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2021

*Catatan: * tahun 2016 tidak ada publikasi BPS*

Tingkat pengangguran merupakan fenomena multi-dimensional terutama fenomena ekonomi dan sekaligus fenomena sosial. Dampak dari tingkat pengangguran akan sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Diharapkan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Bandung setiap tahunnya ke depan, maka secara simultan dapat memperluas kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meminimalisasi tingkat pengangguran yang ada. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Kota Bandung yang tinggi perlu diupayakan agar mampu menciptakan perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran, penciptaan lapangan kerja, dan mengurangi kesulitan-kesulitan lain dalam masyarakat.

2.2.9. Indeks Pembangunan Manusia

a. Tingkat dan Perkembangan IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian kesejahteraan penduduk secara umum, berbasis komponen dasar kualitas hidup seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, antara lain: 1) mencakup umur panjang dan sehat; 2) pengetahuan, dan 3) kehidupan yang layak. Pengukuran dimensi kesehatan menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH). Untuk dimensi pengetahuan, digunakan gabungan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Pandemi Covid-19 yang berlangsung selama tahun 2020 telah mempengaruhi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020. Pandemi ini telah mempengaruhi pola kehidupan di masyarakat yang ternyata berpengaruh pula pada komponen pembangunan manusia. Angka IPM Kota Bandung tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang merupakan penurunan pertama dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Penurunan ini tidak hanya terjadi di Kota Bandung namun terjadi pula di beberapa kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat. IPM dan komponen Pembentuk IPM Kota Bandung Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23
IPM dan Komponen Pembentuk IPM Kota Bandung
Tahun 2016-2020

Indikator Satuan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,89	13,90	14,18	14,19	14,20
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,58	10,59	10,63	10,74	10,75
Umur Harapan Hidup	Tahun	73,84	73,86	74	74,14	74,28

Indikator Satuan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Per Kapita	Ribu rupiah/ Orang/Tahun	15.805	16.033	16.630	17.254	16.887
Indeks Pembangunan Manusia		80,13	80,31	81,06	81,62	81,51

Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

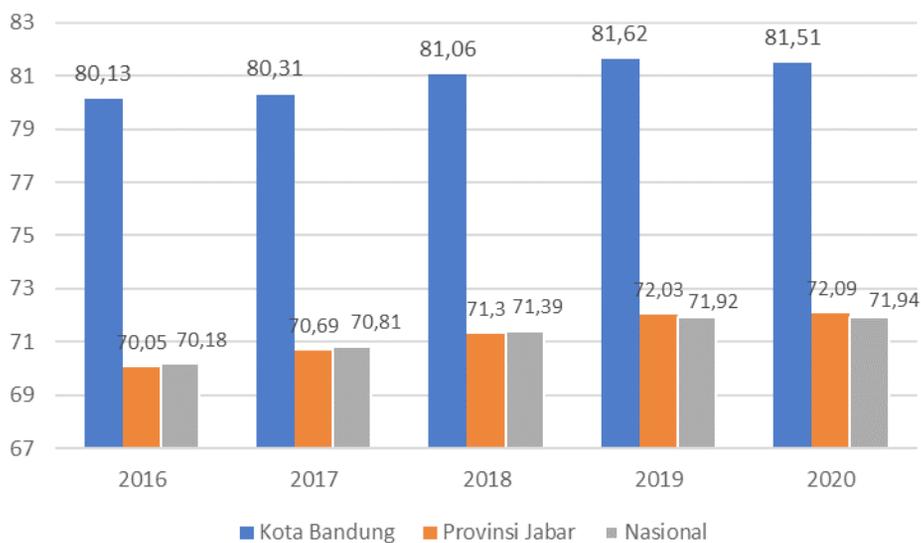
Angka IPM Kota Bandung tahun 2020 adalah 81,51, turun 0,11 poin atau melambat 0,13% dibanding dengan IPM tahun 2019 yang mencapai 81,62. Dari tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa komponen kesehatan dan pendidikan meningkat di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Umur Harapan Hidup naik 0,14 poin dibanding tahun 2019. Sedangkan komponen Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah juga naik masing-masing sebesar 0,01 poin. Sedangkan komponen pengeluaran per kapita turun sebesar 367 ribu rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2019.

b. Perbandingan IPM Kota Bandung

Indeks pembangunan manusia sebagai indikator makro pembangunan selain memiliki makna yang positif untuk mengukur seberapa besar kinerja pembangunan daerah, juga memiliki makna penting untuk melihat disparitas wilayah. Penelaahan komparatif atas disparitas dapat dilihat dengan perbandingan antar kabupaten/kota di Jawa Barat, maupun dengan kabupaten/kota secara nasional. Penelaahan komparatif atas disparitas dapat dilihat dengan perbandingan antar kabupaten/kota di Jawa Barat, maupun dengan kabupaten/kota secara nasional, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.24.

Gambar 2.24

IPM Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2016-2020



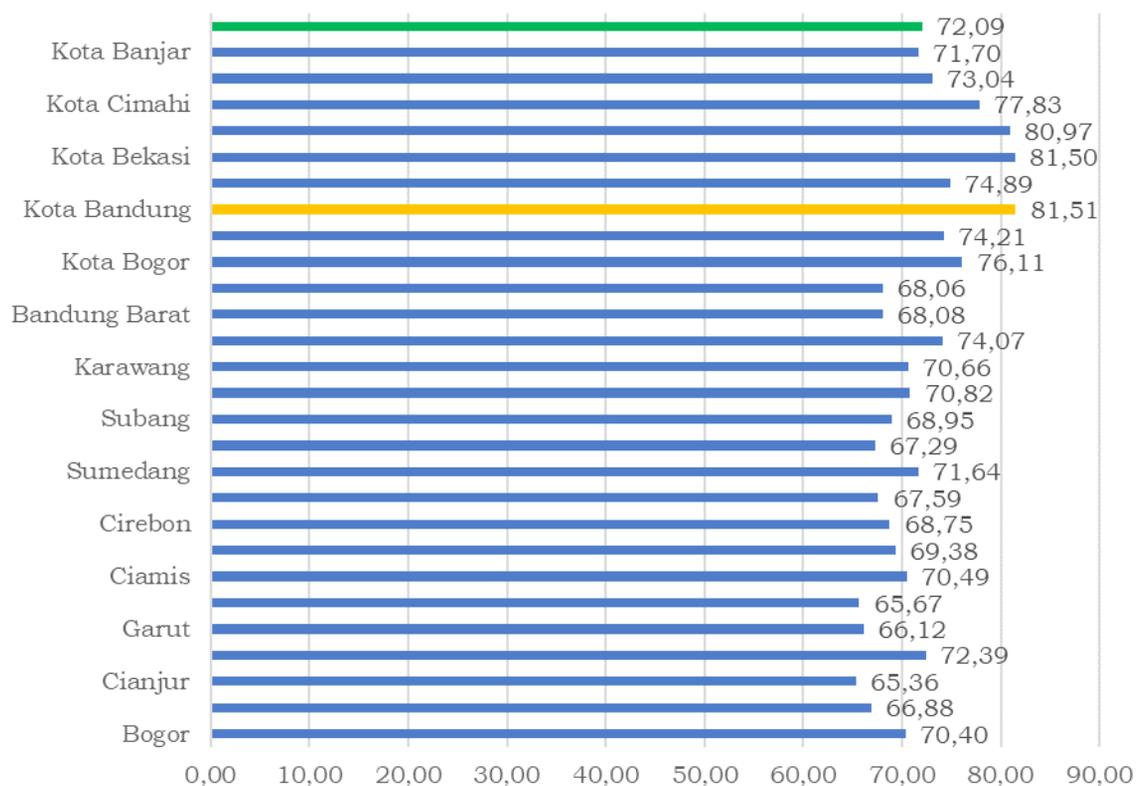
Sumber : IPM Kota Bandung (Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2021)
IPM Nasional dan Provinsi Jawa Barat (Sumber: BPS Pusat, 2021)

Analisis komparasi dengan tingkat nasional dan Provinsi Jawa Barat, menunjukkan bahwa perkembangan IPM Kota Bandung mengalami peningkatan dengan nilai yang lebih tinggi dari IPM tingkat nasional dan Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bandung relatif lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan nasional. Sebagai kota metropolitan, maka sudah selayaknya IPM Kota Bandung berada di atas level provinsi dan nasional.

Berdasarkan analisis komparasi sebagaimana ditunjukkan pada gambar di atas, diidentifikasi bahwa IPM Kota Bandung lebih tinggi dari IPM tingkat nasional, Jawa Barat, maupun dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hal ini juga menandakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bandung relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat dan nasional.

IPM Kota Bandung merupakan IPM yang paling tinggi di antara kabupaten/kota di Jawa Barat. Disusul oleh Kota Bekasi dengan IPM 81,50 di tempat kedua dan Kota Depok di tempat ketiga dengan IPM 80,97. Penurunan angka IPM di Kota Bandung yang sebesar 0,11 merupakan penurunan terbesar ketiga di wilayah Bandung Raya, setelah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, yang turun masing-masing sebesar 0,28 dan 0,19 poin, sebagaimana perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 terlihat pada Gambar 2.25.

Gambar 2.25
Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020



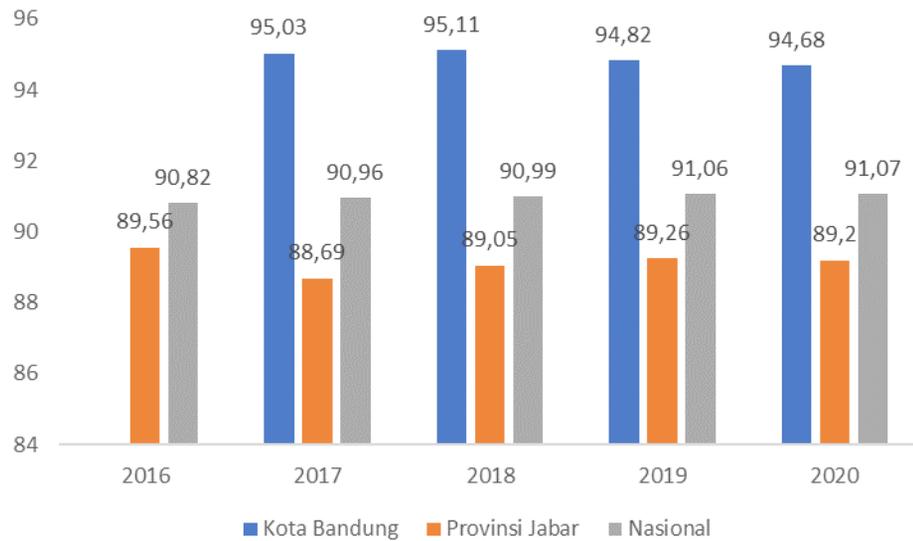
Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD dan BPS Jawa Barat, 2020

2.2.10. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bandung, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2016-2020 terlihat pada Gambar 2.26.

Gambar 2.26

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bandung, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: BPS RI yang dikelola dalam SIPD, 2020

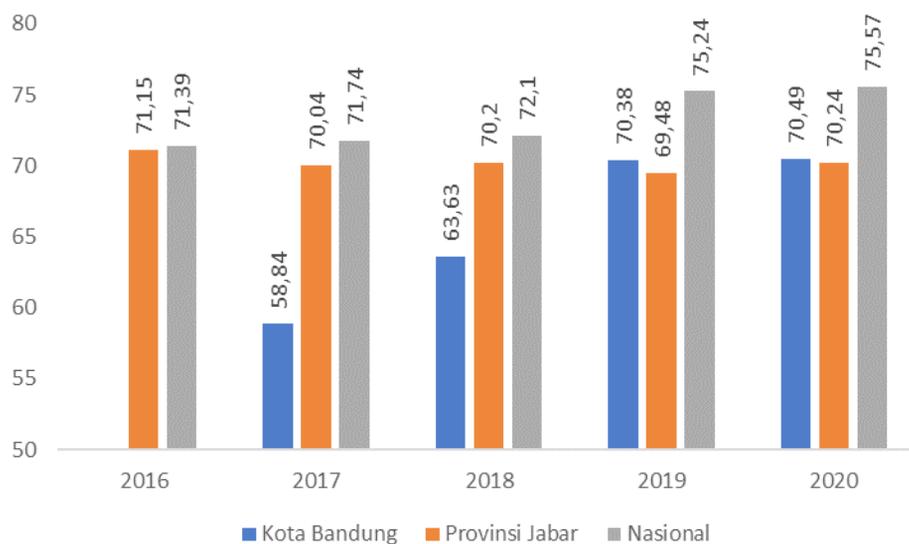
Catatan: Tahun 2016 tidak ada publikasi IPG kabupaten/kota oleh BPS.

Gambar 2.26 menyajikan capaian IPG Kota Bandung, Jawa Barat, dan Nasional pada tahun 2016-2020. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020, IPG Kota Bandung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan. IPG Kota Bandung tahun 2019 mencapai 94,82 yang berarti lebih rendah 0,29 poin dibanding tahun sebelumnya dan tahun 2020 mencapai 94,68 yang berarti lebih rendah 0,14 poin dibanding tahun sebelumnya. Penurunan nilai IPG ini mengindikasikan pembangunan gender di Kota Bandung mengalami peningkatan ketimpangan antar jenis kelamin. Walau demikian, capaian IPG Kota Bandung selalu lebih tinggi selama kurun waktu 2016-2020 jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan nasional.

Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender di Indonesia, digunakan sebuah indeks komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pemberdayaan Gender menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bandung, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.27.

Gambar 2.27

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bandung, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2016-2020



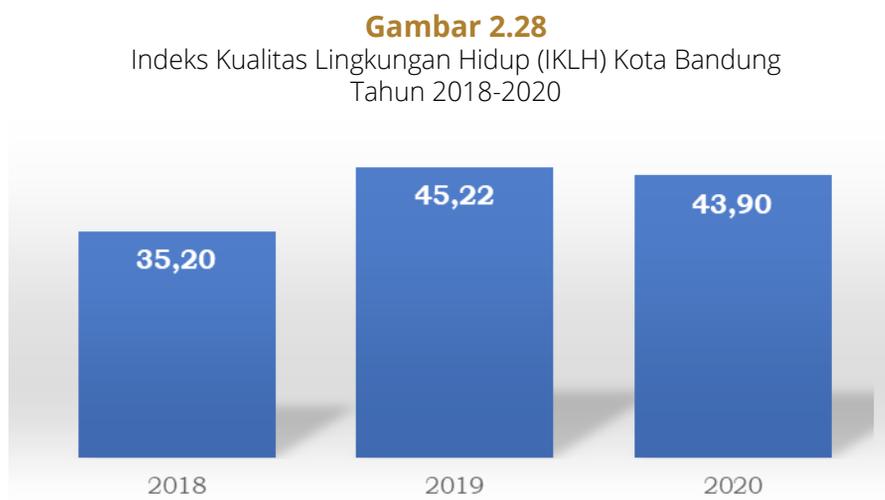
Sumber: BPS RI yang dikelola dalam SIPD, 2020

Catatan: Tahun 2016 tidak ada publikasi IDG kabupaten/kota oleh BPS.

Gambar 2.27 menyajikan capaian IDG Kota Bandung, Jawa Barat, dan Nasional pada tahun 2016-2020. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020), capaian IDG Kota Bandung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, IDG Kota Bandung mencapai 58,84 dan tahun 2020 mencapai 70,49. IDG Kota Bandung tahun 2019 meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya dan pada tahun 2020 meningkat sekitar 0,11 bahkan mampu melampaui IDG Provinsi Jawa Barat yang mencapai 70,24, namun masih berada di bawah IDG nasional (75,57).

2.2.11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup, yang terdiri atas 3 (tiga) indikator yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas tutupan lahan. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, IKLH Kota Bandung menunjukkan fluktuasi, dengan kondisi tahun 2018 adalah 35,20 dan pada tahun 2020 mencapai 43,90. Namun bila dibandingkan dengan IKLH tahun 2019, maka capaian 2020 sedikit lebih rendah, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.28.



Sumber: LKPJ Kota Bandung Tahun 2020 dan 2021 yang dikelola dalam SIPD, diolah

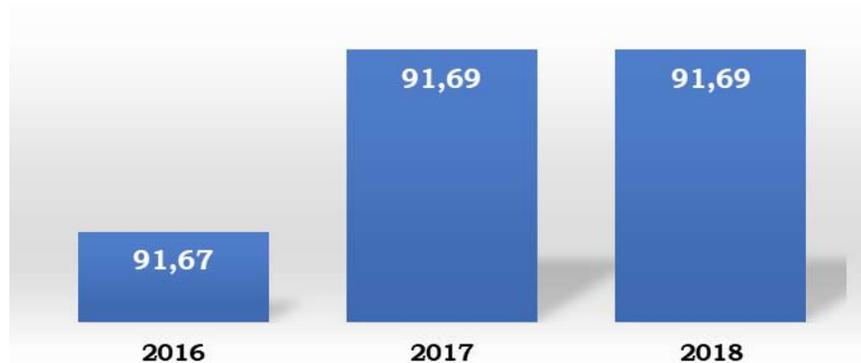
Nilai IKLH mengalami peningkatan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 karena pada tahun 2018 basis data parameter pengukuran kualitas air tidak memadai sehingga perhitungan didasarkan hanya pada 5 parameter saja sehingga nilai perhitungan menjadi rendah. Pengukuran yang lebih baik didapat pada tahun 2019 dan 2020 dimana perhitungan dilakukan dari 128 data pemantauan air. Pada tahun 2020 kualitas lingkungan lebih buruk daripada tahun 2019, karena pada saat pandemi Covid-19, aktifitas masyarakat berpindah dari perkantoran atau sekolah ke rumah. Begitu pula dengan konsumsi, karena aktivitas masyarakat berpusat di rumah, maka terjadi peningkatan pencemaran dari sektor domestik.

2.2.12. Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) merupakan instrumen sederhana untuk mengetahui situasi konsumsi atau ketersediaan pangan penduduk, baik jenis maupun komposisi/keragaman pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat

digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH Ketersediaan menggunakan data dasar dari Neraca Bahan Makanan (NBM), sedangkan PPH Konsumsi menggunakan data dasar hasil Susenas BPS, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.29.

Gambar 2.29
Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan di Kota Bandung
Tahun 2016-2018



Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Fokus layanan urusan wajib dilakukan melalui analisis kinerja atas indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang menjadi pelayanan dasar masyarakat, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

a. Pendidikan

Urusan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan, karena melalui sektor pendidikan inilah modal sumber daya manusia berkualitas, mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator berikut:

1) Rasio Ketersediaan Sekolah

Indikator rasio ketersediaan sekolah menunjukkan perbandingan antara jumlah sekolah dengan jumlah penduduk per masing-masing jenjang pendidikan. Mengacu pada data periode 2016-2020, secara umum rasio ketersediaan sekolah pada semua tingkatan menunjukkan masih jauh dari rasio ideal atau kurang memadai, artinya jumlah siswa di semua level sekolah dan rasio jumlah siswa dengan ruang kelas berlebihan. Data rasio ketersediaan sekolah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.24

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
	Jumlah SD/MI	889	823	536	544	542
	Jumlah Penduduk Usia 7-12	231.174	229.718	256.200	254.710	252.931
	Rasio Ideal	52	52	52	52	52
	Rasio Ketersediaan Sekolah	38,46	35,83	20,92	21,36	21,43

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	SMP/MTs					
	Jumlah SMP/MTs	234	236	285	296	293
	Jumlah Penduduk Usia 13-15	110.218	107.890	124.594	124.896	125.386
	Rasio Ideal	52	52	52	52	52
	Rasio Ketersediaan Sekolah	21,23	21,87	22,87	23,70	23,37
3	SMA/SMK					
	Jumlah SMP/MTs	274	262	286	290	N/A
	Jumlah Penduduk Usia 13-15	119.264	124.642	N/A	183.369	N/A
	Rasio Ideal	52	52	52	52	N/A
	Rasio Ketersediaan Sekolah	22,97	21,02	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung (Diolah) yang dikelola dalam SIPD

Data yang tersedia menunjukkan rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pada jenjang sekolah dasar di Kota Bandung mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 disebabkan oleh adanya penggabungan sekolah dasar negeri dari 647 sekolah dasar negeri menjadi 274 sekolah dasar negeri. Adapun pada tahun 2019 dan 2020 rasio ketersediaan sekolah kembali meningkat disebabkan adanya penambahan unit sekolah baru pada jenjang sekolah dasar baik sekolah swasta maupun sekolah negeri.

2) Angka Putus Sekolah

Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam menilai berhasil atau tidaknya pembangunan di bidang pendidikan adalah angka putus sekolah, yaitu indikator yang mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu, data angka putus sekolah di Kota Bandung sebagaimana Tabel 2.25.

Tabel 2.25

Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
2	SMP/MTs	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%
3	SMA/MA/SMK	0,02%	0,02%	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Data yang tersedia menunjukkan bahwa angka putus sekolah untuk jenjang SD dan SMP di Kota Bandung pada periode 2016 sampai dengan 2020 termasuk kategori rendah (< 1%). Kecilnya angka putus sekolah tersebut diantaranya dikarenakan oleh adanya peningkatan fasilitas pendidikan, peningkatan kemampuan dan pendidik, serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun pusat.

3) Persentase Guru Berpendidikan > S1

Tenaga pendidik/guru mulai jenjang pendidikan PAUD sampai SMA/MA/SMK sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 Ayat 1-6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, harus mempunyai kualifikasi pendidikan minimal Diploma IV atau Sarjana (S1). Persentase Guru Berpendidikan > S1 di Kota Bandung Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26

Persentase Guru Berpendidikan > S1 di Kota Bandung
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	96,00%	98,00%	95,03%	91,88%	93,75%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD

Data yang tersedia menunjukkan Persentase Guru Berpendidikan minimal S1 di Kota Bandung periode 2016 sampai dengan 2020 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2018 sampai 2020 persentase guru berpendidikan minimal S1 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh pengurangan pendidik yang pensiun namun tidak ada penambahan ASN pendidik baru.

4) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27

Angka Partisipasi Kasar Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	%	103,96	104,56	106,89	102,93	103,06
2	SMP/MTs	%	98,07	89,61	86,68	86,26	87,13
3	SMA/SMK/MA (khusus Kota Bandung)	%	77,94	85,38	93,33	94,90	95,41

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung, yang dikelola dalam SIPD, 2021

Capaian tingkat APK Kota Bandung pada tahun 2020 untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk APK tingkat SD/MI melampaui 100%, yaitu 103,06% dan untuk APK SMP/MTs 87,13%. Meski APK untuk jenjang sekolah menengah belum mencapai seperti halnya APK pada jenjang sekolah dasar, hal ini menjadi perhatian khusus agar siswa yang bersekolah terus dapat ditingkatkan.

5) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28

Angka Partisipasi Murni Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI/Paket A	95,63	97,22	98,88	98,73	99,06
2	SMP/MTs/Paket B	86,57	83,53	79,58	80,00	80,66
3	SMA/SMK/MA/Paket C	70,37	65,78	67,34	68,00	68,25

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD

Capaian tingkat APM Kota Bandung pada tahun 2020 untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Meski data menunjukkan angka yang fluktuatif, masih menjadi tugas dari pemerintah daerah bersama – sama seluruh *stakeholder* untuk dapat meningkatkan capaian APM. Indikator capaian kinerja lainnya yang ada pada Dinas Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29

Indikator Capaian Kinerja Dinas Pendidikan
Kota Bandung Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Capaian Kinerja Dinas Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Kasar Paud	N/A	79,54%	79,56%	87,72%	89,89%
2	Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan	N/A	N/A	100%	100%	100%
3	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Disertifikasi	N/A	N/A	N/A	51,77%	58,44%
4	Persentase Sekolah yang Difasilitasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	N/A	N/A	100%	100%	100%
5	Persentase Sekolah SD yang Melaporkan Penggunaan Dana BOS	N/A	N/A	100%	100%	100%
6	Persentase Sekolah SMP yang Melaporkan Penggunaan Dana BOS	N/A	N/A	100%	100%	100%
7	Presentasi Inovasi Pendidikan yang Dimanfaatkan untuk Pelayanan Pendidikan	N/A	N/A	100%	100%	100%
8	Tingkat Ketepatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	N/A	N/A	100%	100%	100%
9	Persentase Siswa Miskin SD yang Mendapat Bantuan Pendidikan	N/A	N/A	N/A	100%	100%
10	Persentase Siswa Miskin SMP yang Mendapat Bantuan Pendidikan	N/A	N/A	N/A	100%	100%
12	Persentase Peserta Didik dan Mahasiswa Beprestasi yang Mendapat Bantuan Pendidikan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
13	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapat Bantuan Pendidikan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Data yang tersedia menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung pada periode 2016 sampai dengan 2020 telah mencapai target dan peningkatan setiap tahunnya.

b. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bahkan untuk mendapatkan penghidupan yang layak di bidang kesehatan, amandemen kedua UUD 1945, Pasal 28 F ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada Pasal 34 ayat (3) tercantum bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Di era otonomi daerah amanat amandemen dimaksud, mempunyai makna penting bagi tanggung jawab pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang layak, tanpa ada diskriminasi sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu lingkungan sehat, perilaku sehat, pelayanan kesehatan serta genetik. Berdasarkan teori H. L. Bloom (1974), dari keempat faktor tersebut, yang sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat adalah lingkungan sehat dan perilaku sehat. Salah satu parameter derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah pada periode tertentu diukur melalui Usia Harapan Hidup. Semakin lama harapan hidup yang

mampu dicapai, merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya. Usia Harapan Hidup (UHH) menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan lamanya hidup dan hidup sehat suatu masyarakat. Tren perkembangan UHH di Kota Bandung selama kurun waktu tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.30.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2021

Capaian ini menggambarkan bahwa penduduk Kota Bandung rata-rata memiliki harapan hidup sampai dengan usia 74,28 tahun.

1) Angka Kematian Ibu (AKI)

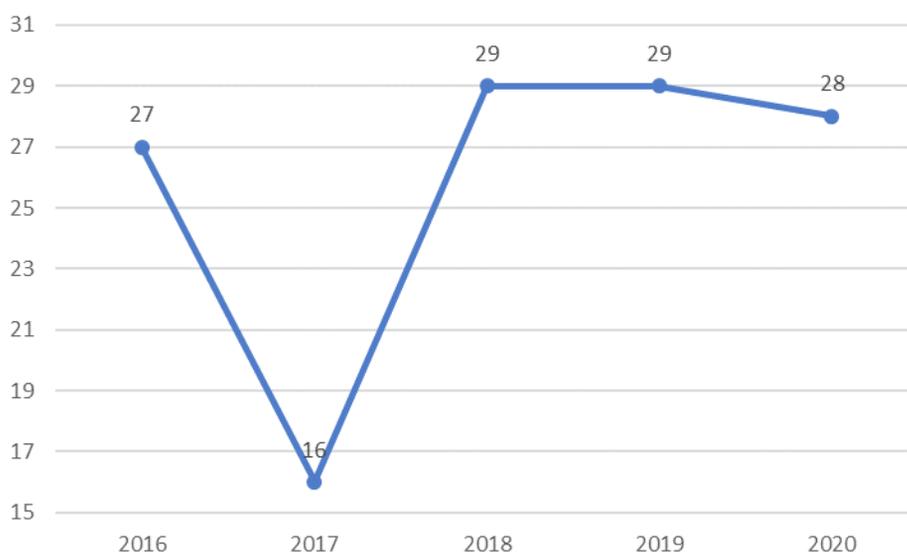
Angka Kematian Ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, per 100.000 kelahiran hidup. Perkembangan AKI di Kota Bandung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dengan perhitungan secara konversi, karena jumlah lahir hidup di Kota Bandung tidak mencapai 100.000 per tahun, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.31.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2021

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa untuk kematian ibu ada trend yang menurun dari tahun 2018-2020. Untuk melihat berapa jumlah kematian ibu secara absolut dapat dilihat pada Gambar 2.32.

Gambar 2.32
Jumlah Kematian Ibu Secara Absolut di Kota Bandung
Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2021

Berdasarkan Gambar 2.32, dapat diketahui bahwa AKI di Kota Bandung selama rentang tahun 2016-2020 berfluktuasi, dengan AKI tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 75,3 dan yang terendah pada tahun 2017 sebesar 52,57. Kenaikan AKI disebabkan adanya penataan sistem pencatatan dan pelaporan diseluruh sarana fasilitas kesehatan yang ada di Kota Bandung baik sarana swasta maupun milik pemerintah sehingga intervensi untuk pemantau kesehatan ibu di tahun berikutnya dapat tepat sasaran.

2) Angka Kematian Bayi (AKB)

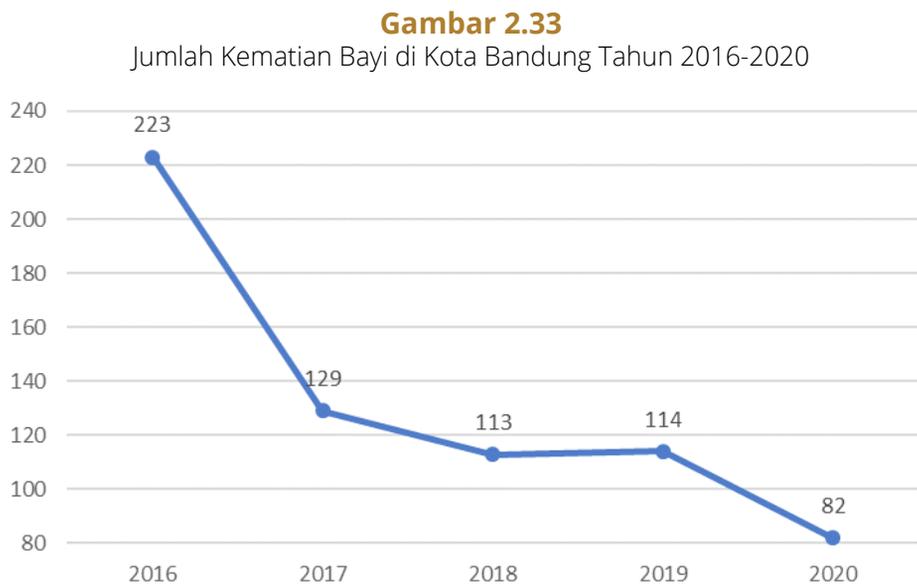
Angka Kematian Bayi adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian bayi di bawah usia satu tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu, atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang sensitif terhadap ketersediaan kualitas dan pemanfaatan pelayanan kesehatan terutama yang berhubungan dengan perinatal yang mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan kesehatan ibu, lingkungan, perilaku dan status sosial orang tua bayi. Kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang optimal akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian, angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Perkembangan AKB di Kota Bandung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30
Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Bandung
Tahun 2016-2020

TAHUN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
2016	29,13	29,23	-
2017	28,87	28,91	-
2018	27,75	23,80	-
2019	2,80	2,80	Data menggunakan formulasi perhitungan baru dari Dinas Kesehatan
2020	2,75	1,95	

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2021

Untuk melihat jumlah kematian bayi secara absolut dapat dilihat pada Gambar 2.33.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2021

Berdasarkan Gambar 2.33, dapat diketahui bahwa AKB di Kota Bandung selama rentang tahun 2016-2020 secara tren mengalami penurunan dengan jumlah kematian terendah pada tahun 2020 sebanyak 82 bayi dan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebanyak 223 bayi.

3) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar dengan fokus pada ibu dan anak yang meliputi: peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak, secara pengalaman empirik di beberapa tempat dapat dilakukan pada tingkatan posyandu. Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan puskesmas agar pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih terjangkau. Tabel 2.31 adalah gambaran lengkap mengenai ketersediaan posyandu selama kurun waktu 2016-2020.

Tabel 2.31
Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Posyandu	1.978	1.978	1.983	1.987	1.988
2	Rasio Posyandu per Satuan Balita	0,92	0,98	0,99	1,01	1,03

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2021

4) Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk

Puskesmas dan klinik pratama merupakan sarana penunjang kesehatan di garda terdepan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Secara lengkap mengenai rasio puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk di Kota Bandung selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk di Kota Bandung
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas	75	75	80	80	80
2	Jumlah Penduduk	2.490.622	2.497.938	2.503.708	2.507.888	2.510.103
3	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk	1:33.086	1:33.306	1:31.296	1:31.349	1:31.376

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2021

Tabel tersebut menggambarkan rasio Puskesmas per 30.000 penduduk di Kota Bandung pada tahun 2015-2020. Rasio puskesmas terhadap 30.000 penduduk meningkat setiap tahunnya, hal ini disebabkan laju pertumbuhan jumlah puskesmas lebih meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk. Akan tetapi peningkatan jumlah puskesmas tidak secara langsung menggambarkan pemenuhan pelayanan kesehatan, ada banyak faktor dan indikator yang bisa menunjukkan tinggi rendahnya tingkat pemenuhan layanan kesehatan.

Puskesmas mempunyai fungsi mengutamakan preventif dan promotif tanpa mengesampingkan fungsi *kuratif* dan *rehabilitatif*. Dalam memberikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif, puskesmas bekerjasama dengan klinik pratama yang ada di wilayah kerjanya.

Situasi dan kondisi kesehatan di Kota Bandung, berkaitan pula dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bandung, lembaga masyarakat, swasta, termasuk lembaga pelayanan yang dikelola provinsi dan pemerintah pusat. Pada layanan kesehatan oleh Pemerintah Kota Bandung, beberapa situasi dan kondisinya, diantaranya adalah: (1) sebaran puskesmas yang belum merata; (2) belum semua puskesmas terakreditasi untuk dapat memberikan layanan sesuai standar; (3) masih terbatasnya jumlah tenaga kesehatan dan non kesehatan; serta (4) kondisi fisik alam dan sosial masyarakat yang belum maksimal mendukung derajat kesehatan masyarakat.

5) Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan masih terbatas, dimana hal ini dapat terlihat dari sumber daya manusia bidang kesehatan di Kota Bandung sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 yang dapat dilihat -pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33

Profil Tenaga Kesehatan Tahun 2016–2020

TAHUN	2016	2017	2018	2019	2020
Dokter Spesialis	999	833	1.681	1.781	1.498
Dokter Umum	487	605	694	741	2.589
Dokter Gigi	192	176	275	221	476
Dokter Gigi Spesialis	42	80	217	122	197
Bidan	550	558	1208	1.246	1.425
Perawat	2.941	3.991	6.754	6.502	8.405
Perawat Gigi	118	161	242	207	181
Tenaga Teknis Kefarmasian	372	807	1.119	980	952
Apoteker	121	275	349	357	543
Kesmas	43	216	176	200	247
Kesling	83	94	37	136	184
Nutrisisionis	117	107	189	200	332
Dietisien	30	53	78	N/A	28
Fisioterapis	64	109	167	N/A	217
Okupasi Terapis	15	22	27	N/A	21

TAHUN	2016	2017	2018	2019	2020
Terapis Wicara	16	34	31	N/A	25
Akupunktur	1	5	0	N/A	0
Radiographer	77	5	239	N/A	318
Radioterapis	0	32	19	N/A	8
Teknisi Elektromedis	17	14	40	N/A	42
Teknisi Gigi	0	16	35	N/A	36
Analisis Kesehatan	195	345	611	N/A	807
Refraksionis Optisien	19	10	26	N/A	27
Ortetik Prostetik	0	0	4	N/A	3
Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	249	352	674	N/A	760
Teknisi Transfusi Darah	5	4	7	N/A	48
Teknisi Kardiovaskuler	11	2	4	N/A	1

Sumber: Dinas Kesehatan yang dikelola dalam SIPD, 2021

Data tenaga kesehatan yang tercatat adalah data dari seluruh rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kota Bandung, terlihat pada tahun 2019 masih banyak data yang belum tercatat hal ini terjadi karena hanya didapatkan data jumlah tenaga kesehatan yang ada di puskesmas saja.

Tenaga dokter spesialis, dokter dan dokter gigi lebih banyak memberikan pelayanan pada upaya kesehatan perorangan. Pada upaya kesehatan masyarakat, peran tenaga kesehatan masyarakat, ahli gizi, bidan, perawat dan sanitarian sangatlah besar. Pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sistem rujukan harus diberlakukan secara terstruktur dan berjenjang mulai dari tingkat pertama dan lanjutan.

Pada pelayanan tingkat pertama, upaya kesehatan yang utama adalah upaya promotif dan preventif tanpa meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Upaya promotif dan preventif merupakan bagian dari upaya kesehatan masyarakat dengan tenaga utamanya adalah ahli kesehatan masyarakat, ahli gizi, sanitarian, bidan, dan perawat.

Pada Tabel 2.33 dapat dilihat jumlah tenaga tersebut belum memadai. Untuk itu perlu upaya-upaya khusus dari Pemerintah Kota Bandung agar kebutuhan tenaga tersebut dapat terpenuhi. Ditinjau dari sudut pembiayaan kesehatan, upaya kesehatan perorangan akan memberikan dampak pembiayaan kesehatan yang jauh lebih besar daripada upaya kesehatan masyarakat. Dengan pembiayaan yang terbatas, seharusnya upaya kesehatan masyarakat harus lebih menjadi prioritas. Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandung
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kematian Ibu (AKI)/ konversi	Per 100 ribu kelahiran hidup	59,18	53,55	75,33	71,49	69,03
2	Angka Kematian Bayi (AKB) / konversi	Per 100 ribu kelahiran hidup	29,23	28,91	23,80	2,8	1,95
3	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	73,84	73,86	74	74,14	74,28
4	Persentase Gizi Buruk	Persen	0,57	0,39	0,38	0,360	0,305
5	Meningkatnya Rumah Sehat	Persen	N/A	N/A	N/A	68,38	72,03
6	Indeks Keluarga Sehat	Angka	N/A	0,23	0,21	0,21	0,17
7	Cakupan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	persen	N/A	N/A	100	100	100
8	Peningkatan Persentase pengelolaan sumber daya kesehatan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	77,40

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
9	Cakupan Rumah Tangga Dengan Air Minum yang Memenuhi Syarat - Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Berkualitas (Layak)	Persen	75,57	76,54	77,18	78,58	82
10	Cakupan Sanitasi Dasar yang Layak - Penduduk dengan Akses Sanitasi Layak	Persen	59,41	56,24	74,80	63,89	68,02
11	Cakupan Fasilitas Umum yang Memenuhi Syarat - Tempat-Tempat Umum Memenuhi Syarat	Persen	75,85	76,25	76,37	74,64	69,20
12	Cakupan Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi	Persen	4,1	41,0	84,9	90,4	90,4
13	Jumlah Puskesmas	unit	73	78	78	80	80
14	Persentase Masyarakat Miskin Mandapatkan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100
15	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	66,59
16	Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan yang Memenuhi Syarat	Persen	32,86	40,69	26,42	52,90	44,54
17	Meningkatnya Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri	Persen	N/A	N/A	N/A	23,18	50,33
18	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	101,26	85,02	85,04	80,89	84,19
19	Persentase Temuan BPK dan Inspektorat yang Diselesaikan	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100

Sumber: - Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2019-2020 yang dikelola dalam SIPD LKPI Kota Bandung Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD, 2020

Angka kematian ibu di Kota Bandung pada tahun terakhir (2020) menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 2,67 per 100.000 kelahiran hidup. Beberapa faktor yang mendukung penurunan AKI di Kota Bandung adalah adanya peningkatan pelayanan di fasilitas kesehatan melalui kapasitas dokter umum, perluasan distribusi buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) hingga mencakup semua sasaran ibu hamil, dan kepemilikan jaminan kesehatan bagi ibu hamil.

Angka kematian bayi (AKB) di Kota Bandung pada tahun 2020 menurun sebesar 0,78 per 1.000 kelahiran hidup dibandingkan tahun 2019. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan kematian bayi di Kota Bandung dilakukan dengan meningkatkan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bandung berupa penambahan sarana dan prasana kegawatdaruratan perinatal. Upaya lain yang telah dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi adalah dengan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, khususnya yang melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Kota Bandung memberikan jaminan kesehatan bagi warganya, termasuk untuk ibu hamil dan bayi sehingga pelayanan kesehatan ibu dan bayi dapat lebih luas dirasakan. Perbaikan sistem pelaporan kematian di tingkat rumah sakit dan klinik, sehingga sumber data dari fasilitas kesehatan yang melaporkan jumlah kematian bayi sudah baik.

Cakupan persentase gizi buruk di Kota Bandung menunjukkan tren yang menurun dari tahun ketahun (2016–2020). Di tahun 2020 sendiri terdapat penurunan sebesar 0,055% cakupan penderita kondisi gizi buruk balita dibandingkan tahun 2019. Beberapa faktor pendukung menurunnya gizi buruk, antara lain terintegrasinya sistem surveilans gizi dengan aplikasi e-PPGBM yang dapat secara langsung menemukan gizi buruk sehingga lebih cepat diberikan terapi penanganan sesuai standar.

Hal lain yang mendorong upaya penurunan gizi buruk di Kota Bandung adalah keberadaan kader aktif posyandu dalam wadah Forkagi (Forum Komunikasi Kader Gizi). Kader Forkagi ini merupakan kader khusus yang telah dilatih untuk membantu tenaga kesehatan dalam melakukan pemantauan serta penemuan kasus masalah gizi di wilayahnya.

Bersumber dari data aplikasi Keluarga Sehat Kementerian Kesehatan, nilai Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Bandung tahun 2020 berada pada nilai 0,17. Nilai ini selain menurun dibandingkan tahun 2019, juga terkategori tidak sehat. Jumlah Kepala Keluarga (KK) sehat 66.490 KK dengan sasaran jumlah KK yang sudah di input ke aplikasi sebanyak 397.862 KK. Angka IKS Kota Bandung masih berada di atas angka Provinsi Jawa Barat yaitu 0,14 dimana jumlah Kepala Keluarga (KK) sehat 1.176.967 KK dengan sasaran jumlah KK yang sudah di input ke aplikasi sebanyak 8.126.802 KK.

Beberapa faktor penghambat pengupayaan pencapaian indikator IKS antara lain adalah sebagaimana sifat program yang baru masih terdapat penolakan dari masyarakat saat kunjungan tenaga kesehatan dilakukan yang berakibat belum maksimalnya pendataan keluarga. Situasi pandemi Covid-19 memperberat tugas pendataan keluarga sehat dikarenakan penurunan intensitas fisik antara petugas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang semakin berkurang, memperlambat cakupan pendataan keluarga sehat di daerah. Permasalahan teknis aplikasi yang lambat/gagal dalam memproses data input keluarga sehat oleh puskesmas. Hal ini tentu saja mempengaruhi hasil akhir jumlah keluarga sehat sebagai penentu IKS di suatu wilayah. Model/standar penilaian keluarga sehat yang ketat melalui penetapan suatu keluarga sehat harus dengan melibatkan seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, apabila ada satu saja anggota keluarga yang tak memenuhi syarat, maka penilaian keluarga sehat pada keluarga tersebut terkategori keluarga tak sehat.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Kondisi Sarana Prasarana Jalan

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan jaringan jalan yang baik. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, maka semakin baik kondisi infrastruktur jalan, maka semakin baik pula roda perekonomiannya.

Secara umum jalan dibangun sebagai prasarana untuk memudahkan mobilitas dan aksesibilitas kegiatan sosial ekonomi dalam masyarakat. Keberadaan jalan raya sangatlah diperlukan untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi, perdagangan serta sektor lainnya. Prasarana yang terbebani oleh volume lalu lintas yang tinggi dan berulang-ulang, akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas jalan sebagaimana indikatornya dapat diketahui dari kondisi permukaan jalan, baik kondisi struktural maupun fungsionalnya yang mengalami kerusakan.

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan, terbagi ke dalam beberapa tingkatan, yaitu: baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Jalan harus memiliki kondisi mantap untuk memberikan pelayanan yang maksimum terhadap pengguna jalan. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Tabel 2.35 merupakan persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di Kota Bandung dalam kurun waktu tahun 2016-2020.

Tabel 2.35

Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap di Kota Bandung
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap (%)	90,74%	91,86%	92,34%	92,38%	91,87%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2021

Pelayanan yang diberikan oleh suatu ruas jalan dikategorikan mantap atau tidak mantap sesuai dengan suatu kondisi perkerasan jalan yang ditunjukkan oleh suatu standar kekasaran permukaan jalan yang dikenal dengan IRI (*International Roughness Index*), lebar perkerasan jalan (atau lebar jalur lalu lintas) berikut bahu jalannya yang melayani volume lalu lintas tertentu. Berdasarkan Tabel 2.35, kondisi kemantapan jalan di Kota Bandung sejak tahun 2016 cenderung meningkat, akan tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi sebesar 91,87% dari total panjang jalan yang ada sebesar 959.689 km disebabkan dampak pandemi Covid-19 yang mengurangi mobilitas kinerja pemeliharaan jalan.

2) Akses Air Minum dan Pelayanan Air Limbah

Persentase penduduk berakses air minum dapat dilihat pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36

Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Bandung
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penduduk berakses air minum (%)	72,15	75,75	78,88	80,24	79,38

Sumber: PDAM Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Cakupan layanan air bersih meliputi pelayanan perpipaan dan pelayanan non perpipaan. Pelayanan perpipaan oleh PDAM mencakup layanan saat ini yang sudah diaudit BPKP Jawa Barat sebesar 75,80% atau sebanyak 176.943 sambungan langganan, sedangkan pelayanan non perpipaan dihitung berdasarkan jumlah sambungan rumah yang terlayani oleh DPKP3 dikalikan 4 jiwa penduduk dan dibagi jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2020 dan sambungan non perpipaan sebesar 3,58%, dengan realisasi penambahan sebanyak 1.468 sambungan baru terdiri atas sambungan baru perpipaan sebanyak 1.278 sambungan dan non perpipaan sebanyak 190 sambungan. Indikator cakupan layanan air bersih dihitung dengan menjumlahkan pelayanan air bersih perpipaan dan non perpipaan. Pelayanan perpipaan PDAM sebesar 75,80% terlayani dan pelayanan non perpipaan DPKP3 3,58%. Capaian ini menggambarkan total cakupan layanan air bersih sebesar 79,38% dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bandung, melalui pelayanan perpipaan oleh PDAM sebanyak 176.943 langganan (sambungan rumah) dan pelayanan non perpipaan DPKP3 sebanyak 4.710 sambungan rumah. Saat ini produksi air baku yang sudah ada sebanyak 2.800 liter/detik di 7 lokasi, yaitu:

1. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Badak Singa, kapasitas 1.800 liter/detik;
2. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pakar, 600 liter/detik;
3. Mata Air Pakar, 60 liter/detik;
4. Sumur Bor tersebar, 100 liter/detik;
5. Mata Air Cibeureum, 100 liter/detik;
6. Mata Air Tersebar, 120 liter/detik;
7. Mata Air Cipanjal, 20 liter/detik.

Adapun persentase cakupan pelayanan air limbah dapat dilihat pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37

Persentase Cakupan Pelayanan Air Limbah di Kota Bandung
Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Cakupan Pelayanan Air Limbah	70,77%	72,07%	79,09%	80,77%	N/A

Sumber: PDAM Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Untuk mencapai terwujudnya sasaran infrastruktur jalan yang berkualitas, dan merata dibutuhkan strategi peningkatan akses layanan untuk sistem pengolahan limbah *off site* dan *on site* dengan arah kebijakan meningkatkan akses layanan air limbah melalui sistem terpusat, dan *on site* (komunal maupun individu) untuk limbah domestik dan non domestik. Indikator untuk mengukur sasaran tersebut adalah indikator persentase cakupan pelayanan air limbah dengan formulasi pengukuran:

$$\text{(Jumlah Sambungan Langganan : Jumlah Penduduk) x 100 \%}$$

Indikator persentase cakupan pelayanan air limbah di Kota Bandung sudah dipenuhi tahun 2015-2018 yang merupakan kolaborasi pelayanan dari PDAM dan DPKP3 melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. Data terakhir indikator persentase cakupan pelayanan air limbah yang didapatkan pada tahun 2018 adalah sebesar 80,77%.

Tingkat pelayanan air limbah dengan sistem terpusat adalah dengan dilakukannya kolaborasi dengan PDAM. Adapun capaian pelayanan air limbah dengan sistem *off site* sebesar 53,78% dan *on site* sebesar 26,99%. Layanan air limbah *on site* mengalami penurunan dikarenakan adanya penyambungan dari *septic tank* komunal milik warga ke layanan *off site* milik PDAM sebesar 9,25%.

3) Penataan Ruang

Adapun dalam hal tertib pemanfaatan ruang, terealisasi 100%. Penyiapan perangkat untuk perwujudan tertib pemanfaatan ruang telah terlaksana pada tahun 2015 dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) Kota Bandung, sebagai acuan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang terutama sebagai acuan dalam perizinan. Faktor pendorong pencapaian target adalah komitmen bersama untuk mewujudkan tertib pemanfaatan ruang, melalui penyusunan dan penetapan Perda RDTR dan PZ, serta kegiatan sosialisasi RDTR dan PZ yang telah dilaksanakan pula pada tahun 2015 untuk meningkatkan pemahaman aparat Pemerintah Kota Bandung.

Terkait pelanggaran tata ruang dan bangunan yang diproses untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai ketentuan, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mencapai target karena pada tahun 2016 target 67% dan realisasi sampai dengan tahun 2020 adalah 77,59% artinya persentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melebihi target, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.38.

Tabel 2.38

Capaian Kinerja Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan yang Diproses untuk Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Sesuai Ketentuan (%)	67,00	72,65	78,19	77,14	77,59

Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Dinas Penataan Ruang dalam menjalankan fungsinya berkaitan erat dengan implementasi penegakan peraturan di bidang penataan ruang terutama Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011 – 2031 serta Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ) Kota Bandung Tahun 2015-2035.

Terkait pelanggaran tata ruang dan bangunan yang diproses untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai ketentuan, secara umum kinerjanya meningkat sebesar 77,59% pada tahun 2020. Berdasarkan dari laporan hasil pengawasan tata ruang dan bangunan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan laporan hasil pengawasan tata ruang dan bangunan. Adapun faktor pendukung ketercapaian tersebut adalah:

1. Dinas Penataan Ruang Kota Bandung memiliki 6 kantor wilayah untuk mewakili setiap wilayah yang ada di Kota Bandung sehingga memudahkan para petugas pengawasan dan penertiban untuk melaksanakan cek langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti pelanggaran bangunan di Kota Bandung.
2. Dinas Penataan Ruang Kota Bandung memiliki sistem Informasi berbasis internet untuk mendapatkan informasi dan pengaduan mengenai pelayanan perizinan mendirikan bangunan seperti Keterangan Rencana Kota (KRK), VHU, RTBG.

Pentingnya pengawasan dan pengendalian tata ruang dan bangunan ini agar implementasi pembangunan di Kota Bandung sesuai ketentuan peruntukannya dan intensitas izin yang diterbitkan sesuai dengan undang-undang bangunan gedung guna menjamin ketersediaan ruang yang cukup di Kota Bandung serta upaya pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan kualitas RTH dan mempertahankan keberadaan RTH sebagai salah satu aspek *liveable city* dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah pemerintah Kota Bandung tahun 2018-2023 yang mendukung Misi 4 RPJMD Kota Bandung.

Indikator kinerja urusan pekerjaan umum dapat dilihat pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39

Indikator Kinerja Utama Urusan Pekerjaan Umum
di Kota Bandung Tahun 2018-2020

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	79,55	80,64	N/A
2	Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan	Menit	120	63,3	60,76

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Identifikasi kawasan permukiman kumuh mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti kesesuaian peruntukan lokasi dengan rencana tata ruang, status (kepemilikan) tanah, letak/ kedudukan lokasi, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal. Selain itu perlu juga adanya pertimbangan lain untuk menentukan kawasan sebagai kawasan penyangga kota metropolitan, seperti kawasan permukiman kumuh teridentifikasi yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan kawasan yang menjadi bagian dari kota metropolitan.

Wilayah kumuh di Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 648/KEP.286 DISTARCIP/2015 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh di Kota Bandung menyebutkan bahwa terdapat sebaran kawasan permukiman kumuh di 454 kawasan pada 121 kelurahan dengan total luas 1.457,45 ha. Ada tiga kategori permukiman yang bisa disebut kumuh, yaitu kumuh berat, kumuh ringan, dan kumuh sedang. Di Kota Bandung sudah tidak terdapat wilayah yang dikategorikan sebagai kategori kumuh berat, yang ada hanya kumuh sedang dan kumuh ringan.

Berdasarkan uraian tersebut maka untuk menilai suatu kawasan termasuk kumuh atau tidak adalah dengan memakai kriteria kawasan kumuh sebagai berikut:

- a) Tersedianya proteksi kebakaran/bencana, bobot 10%:
 - Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran;
 - Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran.
- b) Terpenuhinya kuantitas dan kualitas bangunan, bobot 15%:
 - Ketidakteraturan bangunan;
 - Tingkat kepadatan bangunan;
 - Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- c) Terpenuhinya kualitas jalan lingkungan, bobot 10%:
 - Cakupan pelayanan jalan lingkungan;
 - Kualitas permukaan jalan lingkungan.
- d) Terpenuhinya kualitas drainase lingkungan, bobot 25%:
 - Ketidakmampuan drainase mengalirkan limpasan air;
 - Ketidaktersediaan drainase;
 - Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan;
 - Tidak terpeliharanya drainase;
 - Kualitas konstruksi drainase.
- e) Tersedianya pengolahan air limbah rumah tangga, bobot 10%:
 - Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis;
 - Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- f) Tersedianya cakupan layanan air minum, bobot 10%:
 - Ketidaktersediaan akses aman air minum;
 - Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum.
- g) Terlaksananya pengelolaan sampah, bobot 15%:
 - Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
 - Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis;
 - Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.

Data eksisting jumlah rumah layak huni sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 80.455 unit, sedangkan capaian realisasi perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) pada tahun 2020 adalah sebanyak 969 unit, sehingga diperoleh total jumlah rumah layak huni sebanyak 81.424 unit. Beberapa permasalahan yang terjadi terkait rutilahu karena pemohon tidak dapat menunjukkan

bukti kepemilikan lahan pribadi yang sah sehingga tidak dapat diberikan bantuan oleh Pemerintah Kota Bandung. Selain itu terdapat rumah yang telah diperbaiki secara swadaya saat verifikasi ke lapangan. Adapun perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Bandung berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Bandung
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Akumulasi)	2.993	4.978	8.266	11.386	12.355

Sumber: DPKP3 Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Indikator kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman dapat dilihat pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41
Indikator Kinerja Utama Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase RTH yang Berkualitas	37,44	44,32	44,77	47,33	47,89
2	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang Menempati Hunian yang Layak.	N/A	63,16	65,97	68,63	80,73
3	Persentase Ruang Terbuka Hijau	12,17	12,20	12,20	12,22	12,248
4	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	9,93	9,76	5,16	4,28	2,94
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	77,85	82,53	83,48	84,4
6	Tercapainya Kualitas Penataan Bangunan dan Bangun Bangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	1
7	Ketersediaan Dokumen Rencana Rinci pada Pusat-Pusat Pelayanan Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	2
8	Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan yang Ditindaklanjuti Sesuai dengan Ketentuan	N/A	N/A	N/A	77,14	77,59
9	Persentase Minimal Ruas Jalan dan Saluran dalam Kondisi Terpelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	100
10	Persentase Sarana Prasarana Kelurahan Terbangun	N/A	N/A	N/A	N/A	100
11	Tertatanya Areal Pemakaman	N/A	N/A	N/A	31,28	32,14

Sumber: DPKP Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1) Penegakan Perda

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Tidak hanya itu, Polisi Pamong Praja juga harus menegakkan keputusan dari kepala daerah. Pembangunan kawasan perkotaan tak terlepas dari K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang publik, privat dan lainnya. Kemudian, laju urbanisasi dan pertumbuhan kawasan perkotaan yang tinggi, menjadikannya sebagai kondisi potensial terhadap ketertiban. Penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan, dan lain-lain.

Pertumbuhan penduduk, tingkat konsumsi, industrialisasi dan keterbatasan ruang menjadi konsekuensi logis dari perkembangan kota. Di sisi lain, hal ini akan berdampak negatif jika kebersihan lingkungan tidak dikelola secara baik. Tingginya produksi sampah di kawasan perkotaan menjadi sebuah ancaman yang serius terhadap kebersihan kawasan perkotaan. Keindahan adalah hasil dari sinergi antara ketertiban dan kebersihan, dimana kawasan perkotaan bisa menjadi tempat yang tertata dan terkelola secara baik. Setiap pelanggaran ketertiban, ketenteraman, dan keindahan harus ditindak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Hal ini, bertujuan untuk memelihara ketertiban, ketenteraman, serta keindahan. Hal ini menjadi tugas Polisi Pamong Praja sebagai aparatur daerah untuk melaksanakan tugas penegakan Perda, termasuk Perda tentang ketertiban, ketenteraman, dan keindahan. Penyelesaian penegakan Perda di Kota Bandung Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42

Penyelesaian Penegakan Perda di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda (%)	90,35	100	100	100	100
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) (%)	100	100	100	100	-
3	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (%)	128,6	119	118,71	117,65	-
4	Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif (%)	N/A	N/A	63,76	67,04	67,99
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai) Satpol PP	N/A	N/A	79,29	80,15	83,31
6	Cakupan Pengembangan Kemampuan dan Pengetahuan Pol PP dan Masyarakat	N/A	N/A	N/A	73	76,77
7	Cakupan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A	N/A	N/A	100	100
8	Indeks kepuasan masyarakat (Nilai) Kesbangpol	N/A	83,75	83,89	84,06	87,47
9	Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja yang dikelola dalam SIPD, 2020

Penyelesaian penegakan Perda adalah respon atas laporan, pengecekan atas validitas laporan, dan tindak lanjut di lapangan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau PPNS serta instansi vertikal atau horizontal lain yang mengampu tugas penyelesaian penegakan Perda. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, dapat terealisasi Perda sebesar 100%, dengan menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran perda dan/atau perkara.

Indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) pada tahun 2016-2019 terealisasi 100% tetapi pada tahun 2020, Satpol PP Kota Bandung tidak lagi menggunakan indikator ini dikarenakan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan digantikan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat. Indikator ini juga terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang kemudian digantikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sehingga pada tahun 2020 tidak lagi dilakukan pengukuran karena sudah mencakup di indikator penyelesaian penegakan Perda.

Pada indikator cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten/kota yang ditetapkan bernilai 1 (satu) orang setiap RT atau sebutan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal, sampai dengan tahun 2019 terealisasi 117,65% dan pada tahun 2020 sudah tidak digunakan lagi karena sudah diganti dengan indikator persentase siskamling tingkat RW yang aktif dengan realisasi pada tahun 2017 sebesar 63,13% dan pada tahun 2020 sebesar 67,99% cenderung meningkat. Secara konsisten target IKM Satpol PP Kota Bandung meningkat setiap tahunnya, dimana pada tahun 2018 sebesar 79,29% dan pada tahun 2020 sebesar 83,31%, hal ini berdasarkan hasil survei IKM pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang menunjukkan kategori baik.

Indikator Cakupan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban umum pada Tahun 2020 realisasi 100%, ini merupakan indikator kinerja utama Satpol PP dalam rangka pelaksanaan penanganan pelanggaran Perda dan/atau Perkada di Wilayah Kota Bandung yang dilakukan oleh pedagang kaki lima yang kemudian diikuti oleh pelanggaran reklame. Satpol PP tidak dapat bekerja sendiri namun harus bekerjasama dengan Dinas terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelanggaran-pelanggaran Perda dan/atau Perkada di Kota Bandung.

Pada tahun 2016, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum melakukan pengukuran IKM. Nilai IKM dari tahun 2017 sebesar 83,75 dan Tahun 2020 sebesar 87,47 terlihat meningkat. Hal ini karena selain melakukan perbaikan sarana dan prasarana, terdapat perubahan target waktu pelayanan yang semula satu orang/pengunjung dilayani 60 menit sekarang menjadi 30 menit.

Persentase konflik tidak menjadi konflik setiap tahun targetnya 100% yang berarti tidak mentolerir adanya konflik di Kota Bandung. Dari tahun 2017-2020 tercapai 100% yang berarti setiap tahun bisa tertangani.

2) Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran

Proteksi terhadap bencana kebakaran, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 20/ PRT/M/2009 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK. Manajemen penanggulangan kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu *public service* dalam suatu WMK. Dapat dijelaskan bahwa peran serta masyarakat diberikan wadah sebagai Satuan Relawan Kebakaran (Satwankar). Satwankar merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka mengatasi ancaman bahaya kebakaran dan bagian dari pelayanan pemadaman kebakaran pada lingkungan padat hunian, rumah susun dan pasar. Fungsi utama Satwankar adalah memberikan informasi kejadian kebakaran kepada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana serta melakukan pemadaman dini sebelum petugas datang ke tempat terjadinya kebakaran.

Tingkat waktu maksimum tanggap (*response time rate*) 15 menit oleh dinas adalah waktu tanggap terdiri atas waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran (*dispatch time*), waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran, dan waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melaksanakan pemadaman. Dari hasil capaian kinerja untuk tingkat waktu maksimum *response time rate* untuk tahun 2019 adalah 14 menit 17 detik atau tercapai 106%. Kesadaran masyarakat/khususnya pengguna jalan meningkat dalam memberikan akses yang seluas-luasnya di ruas jalan tertentu ketika terjadi 64 kejadian kebakaran maupun ketika tiba di lokasi kebakaran. Untuk mencapai SRT<15 menit, perlu didukung oleh penyediaan SDM, sarana prasarana (mobil pemadam kebakaran dan motor unit reaksi cepat), pos kewilayahan, *hydrant*, dan peran serta masyarakat/satwankar. Tabel 2.43 merupakan tabel indikator kinerja Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

Tabel 2.43

Indikator Kinerja Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kelurahan yang Memiliki Sarana Pengamanan Kebakaran	13 Kelurahan	15 Kelurahan	20 Kelurahan	15 Kelurahan	21 Kelurahan
2	Mewujudkan Respon Waktu Tanggap Darurat Kebakaran	14 menit 07 detik	14 menit 26 detik	14 menit 33 detik	14 menit 17 detik	14 menit 10 detik
3	Tingkat Waktu Maksimum <i>Assesment</i> Tanggap Darurat Bencana	N/A	N/A	N/A	100%	100%
4	Persentase Kelurahan Siaga Kebakaran dan Bencana	20,22%	23,18%	30,46%	9,93%	24,50%
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	72,86	75,09	81,29	81,34	84,16
6	Persentase Temuan BPK yang Diselesaikan	N/A	N/A	N/A	100%	100%

Sumber: DKPB Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Indikator kinerja jumlah kelurahan di kawasan kumuh yang memiliki sarana pengamanan kebakaran merupakan indikator yang termasuk ke dalam 2 (dua) periode RPJMD yaitu periode 2013-2018 dengan periode 2019-2023. Periode RPJMD pertama capaian indikator ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, demikian pula periode kedua indikator ini mengalami peningkatan realisasi kinerja.

Indikator mewujudkan respon waktu tanggap darurat kebakaran capaiannya fluktuatif sejak tahun 2016 – 2020 akan tetapi selalu melebihi target yang ditetapkan yaitu 15 menit dengan realisasi paling baik di Tahun 2016, yaitu 14 menit 07 detik. Indikator tingkat waktu maksimum *assessment* tanggap darurat bencana baru ditetapkan di tahun 2019 dengan capaian kinerja konstan sebesar 100%.

Indikator persentase kelurahan siaga aktif kebakaran dan bencana sama dengan Indikator pertama merupakan indikator yang masuk ke dalam dua periode RPJMD. Pada periode pertama capaian kinerja meningkat dari tahun ke tahun demikian pula capaian pada periode kedua RPJMD. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga masuk ke dalam dua periode RPJMD dengan capaian kinerja meningkat setiap tahunnya. Indikator persentase temuan BPK yang diselesaikan ditetapkan di tahun 2019 dengan capaian kinerja konstan sebesar 100%.

f. Sosial

Sarana sosial merupakan suatu tempat yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dimana di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, seperti rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial, contoh dari sarana sosial tersebut yakni panti sosial, rumah singgah, pusat rehabilitasi sosial, dan sebagainya. Di Kota Bandung terdapat cukup banyak sarana sosial baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta/masyarakat. Tabel 2.44 merupakan tabel jumlah sarana sosial di Kota Bandung pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2.44

Sarana Sosial di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Sarana Sosial (buah)	84	86	84	84	257

Sumber: Dinas Sosial Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Pada tabel tersebut, jumlah sarana sosial pada tahun 2016 - 2020 meliputi Pusat Rehabilitasi Sosial Penanganan Napza sebanyak 1 lembaga, Pusat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebanyak 1 lembaga, Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia atau Panti Sosial Tresna Wredha sebanyak 7 lembaga, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Sosial Asuhan Anak sebanyak 67 lembaga, dan beberapa sarana sosial lainnya seperti Rumah Singgah dan Rumah Perlindungan Sosial Anak. Adapun pada tahun 2020, sarana sosial di Kota Bandung meningkat signifikan setelah dibentuknya Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di seluruh kelurahan di Kota Bandung yaitu sebanyak 151 lembaga serta keberadaan Rumah Perlindungan Anak sebanyak 30 lembaga. Indikator kinerja urusan sosial dapat dilihat pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45

Indikator Kinerja Program Urusan Sosial
Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial yang Terpenuhi Sebagian Kebutuhannya	%	39,22	47,41	48,85	84,61	93,45
2	Persentase Fakir Miskin yang Terpenuhi Sebagian Kebutuhannya	%	19,68	54,25	77,56	78,16	100
3	Persentase PSKS yang Berperan Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	92,46	72,56	76,66	80,77	86,37
4	Cakupan Korban Bencana yang Terlayani Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
5	Cakupan Warga Miskin yang Memperoleh Akses terhadap Program Pemerintah	%	N/A	100	100	100	100
6	Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi PPKS yang Terlayani	%	39,22	47,41	44,77	100	100
7	Jumlah PPKS yang Meningkatkan Pendapatannya	Orang	N/A	N/A	231	347	420

Sumber: Dinas Sosial Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Selama periode tahun 2016 sampai dengan 2020 terbagi menjadi 2 (dua) periode RPJMD yaitu RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, sehingga hal tersebut tercermin dalam data capaian kinerja dimana terdapat beberapa indikator yang tidak memiliki nilai capaian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sebagaimana dapat dilihat pada indikator ke-5 dan ke-7 pada Tabel 2.45. Hal lain yang mempengaruhi terhadap tingkat capaian kinerja ialah dengan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial pada tahun 2018 melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota, dimana ketentuan tersebut mewajibkan pemenuhan 100% untuk penanganan korban bencana dan PPKS terlantar. Pemenuhan SPM bidang sosial di Kota Bandung dapat terlihat pada indikator ke-4 dan ke-6 dimana pada tahun 2018 sampai dengan 2020 yang mencapai 100% untuk kedua indikator tersebut.

Indikator ke-1 menjelaskan tentang para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri atas 26 kriteria sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar bagi para PPKS meliputi pemenuhan kebutuhan pangan, pemenuhan layanan rehabilitasi sosial, layanan perlindungan sosial, layanan pemberdayaan sosial, serta layanan pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan, pencapaian indikator ini mengalami kenaikan setiap tahunnya namun pada Tahun 2019 dan 2020 terjadi kenaikan yang sangat signifikan, hal ini dikarenakan pada Tahun 2019 terdapat perluasan program perlindungan sosial bagi keluarga miskin yang bersumber dari APBN dan pada tahun 2020 dimana seluruh keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) memperoleh bantuan sosial tunai yang variatif dari berbagai sumber, baik itu APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Republik Indonesia.

Pada indikator ke-2 menjelaskan secara spesifik tentang keluarga miskin yang memperoleh program perlindungan sosial melalui pemenuhan sebagian kebutuhan dasar (pangan, kesehatan, dan pendidikan). Beberapa program unggulan pemerintah pusat dalam penanganan kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikhususkan bagi keluarga miskin yang terdaftar pada desil 1, 2 dan sebagian desil 3 pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kedua program tersebut setiap tahunnya mengalami perluasan penerima sehingga jumlah penerimanya terus bertambah setiap tahunnya dimana penambahan secara signifikan terjadi pada tahun 2018. Pada saat ini tercatat sebanyak 139.721 KK atau 473.282 jiwa.

Pada indikator ke-3 menjelaskan tentang partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meliputi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Organisasi Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Pekerja Sosial Profesional, Taruna Siaga Bencana, dan dunia usaha. Seluruh PSKS yang ada di Kota Bandung merupakan mitra kerja Pemerintah Kota Bandung dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di Kota Bandung. Guna mendorong partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial maka terdapat program yang secara khusus diperuntukan guna mendorong peran serta PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Capaian program tersebut telah menghasilkan capaian sebagaimana diperlihatkan pada realisasi indikator ke-3 pada Tabel 2.45. Pada saat ini tercatat sebanyak kurang lebih 2.000 PSKS yang ikut berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung.

Pada indikator ke-4 yaitu cakupan korban bencana yang terlayani tepat waktu, memiliki pengertian yaitu persentase korban bencana baik alam maupun sosial yang memperoleh bantuan tanggap darurat sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku pada Dinas Sosial Kota Bandung yaitu paling lama 3 (tiga) hari setelah kejadian bencana. Adapun bantuan kedaruratan meliputi layanan evakuasi dan bantuan logistik bagi korban bencana selama masa tanggap darurat. Untuk membantu penanganan kebencanaan di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung dibantu oleh para relawan kebencanaan yang tergabung dalam Taruna Siaga Bencana yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Sosial.

Pada indikator ke-5 menjelaskan tentang aksesibilitas warga miskin terhadap program-program penanganan kemiskinan yang digulirkan oleh pemerintah. Pada indikator ini baru dapat tercapai secara optimal pada tahun 2017 setelah adanya restrukturisasi pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, dimana pada tahun tersebut terbentuk seksi pelayanan sosial yang berada di bawah bidang penanggulangan kemiskinan pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Unit kerja ini dibentuk untuk melayani dan memberikan rujukan terhadap setiap pengaduan yang disampaikan oleh warga miskin di Kota Bandung. Guna mendekatkan pelayanan atau mempermudah warga miskin untuk memperoleh layanan rujukan di Kota Bandung maka pada tahun 2019 dibentuklah Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang berkedudukan di tingkat kelurahan.

Indikator ke-6 sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa indikator ini berkaitan erat dengan pemenuhan SPM bidang sosial sehingga pencapaiannya harus 100% dimana pemerintah Kota Bandung harus memberikan layanan secara minimal kepada setiap PPKS dengan kriteria sebagai berikut:

1. anak terlantar;
2. lanjut usia terlantar;
3. penyandang disabilitas terlantar; dan
4. gelandangan pengemis.

Dalam rangka optimalisasi pemenuhan SPM bidang sosial, Pemerintah Kota Bandung juga telah memiliki rumah singgah yang berfungsi sebagai Pusat Layanan Rehabilitasi Sosial Terpadu yang mampu menampung PPKS terlantar dalam jumlah yang cukup besar serta dilengkapi dengan sumber daya pekerja sosial profesional yang memadai.

Pada indikator ke-7 yaitu jumlah PPKS yang meningkat pendapatannya, ditargetkan pada PPKS yang telah memperoleh program pemberdayaan sosial berupa pelatihan keterampilan dan bantuan stimulan baik yang bersifat Kelompok Usaha Bersama (KUBE) maupun Usaha Ekonomi Produktif (UEP) perseorangan. Diharapkan dengan telah diperolehnya pelatihan keterampilan dan bantuan stimulan ekonomi mampu meningkatkan pendapatannya sehingga dapat menjadi mandiri. Indikator ini baru dipergunakan mulai dari tahun 2018 sehubungan dengan adanya Perubahan RPJMD Tahun 2013-2018 dan berlanjut sampai dengan saat ini.

2.3.2. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

Layanan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar meliputi bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.

a. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan sumber daya utama dalam perputaran roda perekonomian. Gambaran kondisi ketenagakerjaan di Kota Bandung beberapa tahun terakhir masih diwarnai dengan berbagai permasalahan. Capaian kinerja ketenagakerjaan Kota Bandung Tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.46.

Tabel 2.46
Indikator Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) (Orang)	1.084.956	1.084.956	1.083.637	1.952.633	2.032.099
2	Jumlah Angkatan Kerja (Orang)	1.192.521	1.219.936	1.219.398	1.288.260	1.314.930
3	Jumlah Bekerja (orang)	1.084.956	1.084.956	1.116.529	1.183.193	1.167.849
4	Jumlah Penganggur (orang)	107.532	102.532	102.869	105.067	147.081
5	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja (Orang)	4.241	4.203	4.009	4.204	2.701
6	Tingkat Penempatan Pencari Kerja (%)	53,16	44,68	50,96	45,54	58,44
7	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	90,98	90,98	88,86	91,84	88,81
8	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar (Orang)	7.977	9.406	8.512	9.230	4.622
9	Jumlah Lowongan Kerja (Loker)	11.216	13.491	13.617	12.793	5.556
10	Jumlah Tenaga Kerja Asing (Orang)	132	177	89	-	119
11	Jumlah Pelatihan Keterampilan Kerja (Pelatihan)	1.520	1.060	1.122	860	540
12	Jumlah Kasus yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (kasus)	57,00	58,00	58,00	58,46	62,28
13	Jumlah Kasus tercatat (kasus)	124	100	117	130	114
14	Tingkat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (%)	66,00	58,00	58,11	58,46	62,28
15	Persentase Pekerja/Buruh yang Masuk Jamsostek (%)	76,90	79,19	82,97	339.830	361.944

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
16	Tingkat Pengangguran Terbuka	N/A	8,44	8,01	8,16	11,19
17	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,92	67,50	80,29	82,19	86,25
18	Temuan BPK/Inspektorat Diselesaikan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	360	148	265	262	626 orang
20	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	53,17	44,68	50,96	45,54	58,44

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, 2020

Berdasarkan Tabel 2.47, Tingkat Penempatan Kerja dari Tahun 2016 – 2020 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dimana capaian kinerja pada Tahun 2020 yaitu 58,44% mengalami kenaikan dibanding Tahun 2019 yaitu 45,56%. Sementara itu Jumlah Lowongan Pekerjaan selama tahun 2016-2020 mengalami kecenderungan naik turun, dimana pada Tahun 2020 hanya tercapai 56,12% dari yaitu 5.556 lowongan dari target sebanyak 9.900 lowongan pekerjaan. Ketidaktercapaian target lowongan kerja disebabkan karena banyak perusahaan yang tidak membuka lowongan kerja sebagai dampak dari pandemi Covid-19, selain itu adanya kebijakan Pemerintah Kota Bandung melalui Perwal Kota Bandung Nomor 443/SE.30-Dinkes tanggal 14 Maret 2020 dimana kegiatan yang melibatkan massa diberhentikan, sehingga pelaksanaan bursa kerja tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Sebelum masa pandemi kegiatan pameran bursa kerja/Job Fair dilaksanakan secara konvensional diikuti oleh 40 perusahaan. Namun dimasa pandemi ini *job fair online/Daring* hanya diikuti oleh 21 perusahaan. Hal ini dikarena banyak perusahaan yang merumahkan pegawai sampai di PHK, disamping itu ada perusahaan yang tidak melaporkan lowongan kerja kepada Dinas Tenaga Kerja.

Selain itu, berdasarkan data tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari tahun 2016 – 2020, angka kasus perselisihan hubungan industrial terus meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh kompleksitas permasalahan yang terjadi di perusahaan. Selama dua tahun terakhir, permasalahannya adalah isu demonstrasi pekerja/buruh berkaitan dengan tidak adanya kesepakatan dalam penetapan upah minimum. Realisasi kasus yang dapat diselesaikan melalui perjanjian bersama pada Tahun 2020 meningkat menjadi 62,28%. Hal ini dampak dari adanya pandemi Covid-19, dimana banyak perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan dan melakukan PHK terhadap pekerjanya, dengan alasan perusahaan tidak bisa mengaji buruh/karyawannya. Besaran gaji dan pesangon itu yang menjadi permasalahan sehingga menimbulkan kasus perselisihan antara buruh/karyawan dengan perusahaan. Mediasi yang dilaksanakan tidak mudah untuk mendapatkan kesepakatan karena antara pihak berselisih yaitu perusahaan dan pekerja tetap pada pendirian masing-masing maka tidak tercapai suatu kesepakatan, sementara jumlah mediator yang ada tidak sebanding dengan jumlah kasus yang masuk.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan diperlukan dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender. Indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47

Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Proporsi kursi yang diduduki Perempuan di DPR	6%	6%	6%	16%	16%
	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	3	3	3	8	8
	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	50	50	50	50	50
2	Rasio KDRT (%)	0,010%	0,006%	0,0136%	0,0151%	N/A
	Jumlah KDRT	53	33	91	138	149
	Jumlah Rumah Tangga	531.111	532.433	811.685	945.704	N/A
3	Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	442.803	504.779	531.256	741.664	N/A
4	Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	97,2%	97,4%	96,95%	98,61%	92,56%
	Jumlah laporan ditindaklanjuti	105	147	287	357	299
5	Jumlah laporan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	108	151	296	362	323
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga terlatih di puskesmas mampu tata laksana KTP/A dan PPT/ PKT di rumah sakit	25%	23,2%	N/A	2,2%	2,78%
	Jumlah korban KTPA yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas	27	35	N/A	8	9
	Jumlah seluruh korban KTPA yang terdata datang ke psukesmas maupun tatalaksana kasus KTPA dan RS di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu	108	151	N/A	8	9
6	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	N/A	N/A	45,57%	50,93%	49,82%
7	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	N/A	N/A	N/A	16,95%	30,50%
8	Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Kelurahan Layak Anak	N/A	N/A	47,68%	52,98%	68,87%
10	Persentase Ketercapaian Kriteria Kota Layak Lansia	N/A	N/A	N/A	18,75%	25%
11	Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	N/A	N/A	N/A	41,72%	56,29%
12	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	N/A	N/A	N/A	2	2
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	N/A	N/A	80,25	80,25

Sumber: DP3APM dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Hal yang menarik adalah adanya perbedaan persentase yang cukup besar, dimana persentase perempuan yang bekerja hanya sebesar 46,73% sedangkan laki-laki sebesar 63,11%. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki yang bekerja lebih dominan dibanding perempuan, penduduk laki-laki umumnya merupakan tulang punggung keluarga sehingga mereka yang seharusnya bekerja, sedangkan kaum perempuan lebih dominan bekerja mengurus rumah tangga.

c. Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Ketahanan pangan (*food security*) merupakan isu yang penting khususnya dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kota Bandung. Keamanan pangan dan kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di Kota Bandung.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pemerintah berkewajiban untuk menjamin keamanan pangan masyarakat. Hal ini sesuai dengan deklarasi internasional dalam *International Conference on Nutrition* di Roma tahun 1992 yang menyatakan bahwa keamanan pangan merupakan hak asasi setiap manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah diamanatkan untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan serta diwajibkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasannya. Pangan segar yang aman dan layak untuk dikonsumsi adalah pangan yang bebas dari berbagai cemaran, baik itu cemaran secara fisik, zat kimia berbahaya, cemaran mikroba dan cemaran residu antibiotik, residu hormon, residu pestisida dan juga logam berbahaya (logam berat). Untuk mengetahui adanya cemaran pada produk pangan segar perlu dilakukan pemeriksaan, baik secara Organoleptik (untuk pemeriksaan fisik PH, suhu, dan adanya pembusukan/kualitas produk), pemeriksaan cepat dengan menggunakan *screening* tes antara lain untuk pemeriksaan zat pengawet (formalin boraks dll), pemutih (klorin, hydrogen peroksida/H₂O₂) dan pemeriksaan laboratorium untuk memeriksa cemaran mikroba, residu antibiotik, residu hormon, residu pestisida dan logam berat. Secara lebih lengkap mengenai indikator pangan Kota Bandung selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48

Indikator Pangan di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan pangan utama	197,42 kg/ kapita/ thn	197,05 kg/ kapita/ thn	N/A	N/A	N/A
2	Ketersediaan pangan/ kapita/ hari X kandungan kalori	2312,19	2048,23	N/A	N/A	N/A
3	Ketersediaan pangan/ kapita/ hari X kandungan protein	88,02	83,67	N/A	N/A	N/A
4	Jumlah maksimum pangan segar yang tercemar	13	0	N/A	N/A	N/A
5	Jumlah target kasus pangan segar yang tercemar	45	40	N/A	N/A	N/A
6	Persentase Pangan Segar Yang Aman Dikonsumsi	N/A	N/A	N/A	99,77%	99,93%
7	Jumlah Cadangan Pangan Ekuivalen Beras	N/A	N/A	89.057 ton	103.045 ton	122,27 ton
8	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	N/A	N/A	N/A	85,08	90,50
9	Jumlah kelompok masyarakat di bidang pangan, pertanian dan perikanan diberdayakan	N/A	N/A	N/A	47 Kelompok	48 Kelompok

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sampel pangan segar di beberapa lokasi yaitu pasar tradisional, pasar modern, distributor dan Rumah Potong Hewan (RPH) maka persentase pangan segar yang aman dikonsumsi pada Tahun 2020 sebesar 99,93%. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,16% dibandingkan capaian pada tahun 2019 yakni 99,77%.

Untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan, pemerintah menetapkan Cadangan Pangan yang disebut Cadangan Pangan Nasional yang terdiri dari : 1) Cadangan Pangan Pemerintah (CPP); 2) Cadangan Pangan pemerintah daerah (CPPD), 3) Cadangan Pangan Masyarakat (CPM). Dalam hal pengadaannya semua CP harus berasal dari produksi pangan dalam negeri. Pemerintah Kota menetapkan jenis dan jumlah cadangan pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat. Penyaluran cadangan pangan dilakukan untuk menanggulangi; 1) kekurangan pangan, 2) gejolak harga pangan, 3) bencana alam, 4) bencana sosial, dan/atau 5) menghadapi keadaan darurat. Berdasarkan Tabel 2.48, capaian Jumlah Cadangan Pangan Ekuivalen Beras dari tahun 2018 – 2020 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 jumlahnya sebesar 122,27 ton meningkat 18,66% dibanding pada tahun 2019 yaitu 103,045 ton.

d. Pertanian

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada pasal 8 poin (2) huruf (e) disebutkan bahwa Pengguna Barang Milik Negara/Daerah berwenang dan bertanggung jawab mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya. Memperhatikan Peraturan Pemerintah tersebut pengamanan aset daerah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, adanya kejelasan status kepemilikan, pemanfaatan aset daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah wajib melakukan pengamanan terhadap aset milik daerah meliputi pengamanan fisik; pengamanan administratif; dan pengamanan hukum. Dalam hal ini, indikator urusan pertanahan difokuskan pada persentase luas lahan bersertifikat dan penyelesaian kasus tanah negara yang dapat dilihat pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49

Indikator Pertanian Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase luas lahan bersertifikat	10,81%	14,75%	17,64%	20%	22,78%
	Luas lahan bersertifikat	2.046.278	2.797.263	3.336.655	3.797.510	4.308.537
	Jumlah luas wilayah	18.937.462	18.961.096	18.913.686	19.374.541	18.913.686
2	Penyelesaian kasus tanah negara	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah kasus yang terfasilitasi	10 Kasus terfasilitasi	25 Kasus terfasilitasi	15 Kasus terfasilitasi	10 Kasus terfasilitasi	N/A
	Jumlah kasus yang terdaftar	10 Kasus terdaftar	45 Kasus terdaftar	30 Kasus terdaftar	10 Kasus terdaftar	N/A

Sumber: BPKA Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Persentase aset tanah milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat masih sangat kecil dari seluruh aset tanah. Adapun capaian persentase luas lahan bersertifikat mengalami kenaikan dari tahun 2015 hingga 2020, dimana pada tahun 2020 sebesar 22,78% naik sebesar 2,78% dari capaian tahun 2019 yaitu 20%. Sampai dengan tahun 2020, luas lahan yang telah bersertifikat dari BPN seluas 4.308.537 m² atau 22,78% dari luas lahan milik Pemerintah Kota Bandung seluruhnya yakni 18.913.686 m².

e. Lingkungan Hidup

1) Kondisi Daya Dukung Ketersediaan Air

Air adalah kebutuhan vital bagi masyarakat. Keadaan hidrologi di wilayah Kota Bandung meliputi sistem air tanah dan air permukaan. Secara umum baik air tanah maupun air permukaan di Kota Bandung tersedia cukup memadai. Hal ini disebabkan sebagian besar wilayah Kota Bandung berada di dataran rendah yang dilewati oleh 15 sungai sepanjang 265,05 km, dimana sungai utamanya yaitu Sungai Cikapundung beserta anak-anak sungainya pada umumnya mengalir ke arah selatan dan bermuara ke Sungai Citarum.

Indikator sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV golongan B (dari tercemar berat menjadi tercemar ringan) setiap tahun realisasinya tidak sesuai target kecuali pada tahun 2016, yaitu sebesar 17,00%. Pada tahun 2014 tidak terealisasi dari target 12,50%, sedangkan realisasi pada tahun 2015 adalah sebesar 12,50% dari target sebesar 17,00%. Indikator sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV golongan B menunjukkan kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu air kelas IV pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dan dalam penentuan status mutu air dengan metode STORET memiliki skor yang berada pada rentang nilai kelas B, yaitu -1 sampai dengan -10 dan dikategorikan sebagai cemar ringan. Pada tahun 2019 dan tahun 2020, DLHK melaksanakan Pemantauan Kualitas Air Sungai di 24 sungai dengan 2 kali periode pemantauan. Untuk 16 sungai prioritas dilaksanakan pemantauan di Hulu, Tengah dan Hilir sungai, sedangkan 8 sungai lainnya dilaksanakan di Hulu dan Hilir sungai. Total jumlah titik pantau dalam 1 tahun sebanyak 128 sampel. Apabila dikonversi ke dalam Indeks Kualitas Air, didapat nilai Indeks sekitar 40-45 poin yang menunjukkan tingkat waspada yang harus segera ditindaklanjuti. Hal yang sama ditunjukkan di dunia nyata, yaitu penuhnya sampah di sungai dan air sungai yang masih sering terlihat menghitam. Perkembangan status mutu sungai tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50

Perkembangan Status Mutu Sungai Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sungai yang memenuhi baku mutu Kelas IV Gol. B (dari tercemar berat menjadi tercemar ringan)	12,00%	17,00%	2 sungai utama	5 sungai	N/A

Sumber: DLHK Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Perkembangan baku mutu sungai pada tahun 2019 disempurnakan dengan perhitungan Indikator Kinerja Air yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Lingkungan Hidup. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.263/P3EJw/10/2015, tanggal 9 Oktober 2015, Perihal: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk menetapkan IKLH menjadi salah satu program strategis Badan/Dinas/Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan provinsi/kabupaten/kota. Perkembangan Indeks Kualitas Air Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51

Perkembangan Indeks Kualitas Air Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Air	N/A	N/A	N/A	45,78 poin	45,94 poin

Sumber: DLHK Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kualitas air meningkat dari sejak tahun 2019 hingga tahun 2020 yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya nilai Indeks Kualitas Air. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung di dalam menangani

penyebab masalah pencemaran, menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hasil ini sejalan dengan upaya-upaya penanganan yang telah dilakukan, diantaranya adalah penanganan *Open Defecation Free (ODF)* oleh Dinas Kesehatan dan DPKP3 yang telah berhasil meningkatkan jumlah wilayah ODF dan pengawasan pelaku usaha oleh DLHK pun telah meningkatkan cakupan perlindungan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Upaya penanganan sampah pun mengalami peningkatan sehingga jumlah sampah yang dibuang ke sungai mengalami penurunan.

2) Kondisi Kualitas Udara

Tingkat kualitas udara perkotaan harus memenuhi baku mutu udara ambien. Indikator tingkat kualitas udara Kota Bandung yang dinyatakan dengan dengan indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana. Semakin tinggi nilai Indeks Kualitas Udara maka semakin baik kualitasnya dan semakin kecil nilainya maka semakin buruk kualitasnya. Pengukuran kualitas udara ambien dengan parameter NO_2 dan SO_2 , dilakukan sebanyak dua-empat kali per tahun dengan metode *passive sampler*, dengan hasil dapat dilihat pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52
Indeks Kualitas Udara

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	NO_2 rata-rata tahunan	N/A	13,65 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	20,79 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	33,88 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	17,71 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
2.	SO_2 rata-rata tahunan	N/A	9,51 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	15,36 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14,75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11,33 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
3.	Indeks Kualitas Udara	N/A	82,87 poin	69,79 poin	61,55 poin	77,04 poin

Sumber: DLHK Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Kualitas udara Kota Bandung mengalami penurunan kualitas pada periode tahun 2017-2019 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020. Peningkatan pada tahun 2020 ini, tidak lepas dari adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sehingga menurunkan pergerakan masyarakat yang berimplikasi pada menurunnya penggunaan bahan bakar dari sektor transportasi.

Transportasi, industri, rumah tangga, dan pembakaran sampah (TPA) merupakan sumber-sumber pencemaran udara kota, dan sektor transportasi merupakan penyebab utama pencemaran udara di berbagai kota termasuk Kota Bandung. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung akan berdampak terhadap penurunan kualitas udara ambien. Indeks Kualitas Udara Kota Bandung tahun 2018 adalah sebagai berikut : Indeks terendah berada di terminal Ledeng dan indeks kualitas udara paling tinggi pada event CFD Buahbatu. Berikut ditampilkan tabel dan gambar hasil perhitungan indeks kualitas udara Kota Bandung tahun 2018. Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan dengan parameter NO_2 dan SO_2 , sebanyak dua - empat kali per tahun dengan metode *passive sampler*. Selain parameter NO_2 dan SO_2 dari setiap pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik), diukur juga $\text{PM}_{2,5}$ dan PM_{10} sehingga didapat data rerata untuk area yang dianggap *sample* yang memadai seperti area transportasi, area industri, perumahan dan perkantoran/perdagangan, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.53 mengenai hasil pengukuran kualitas udara ambien Kota Bandung tahun 2020.

Tabel 2.53

Hasil Pengukuran Kualitas Udara Ambien Kota Bandung Tahun 2020

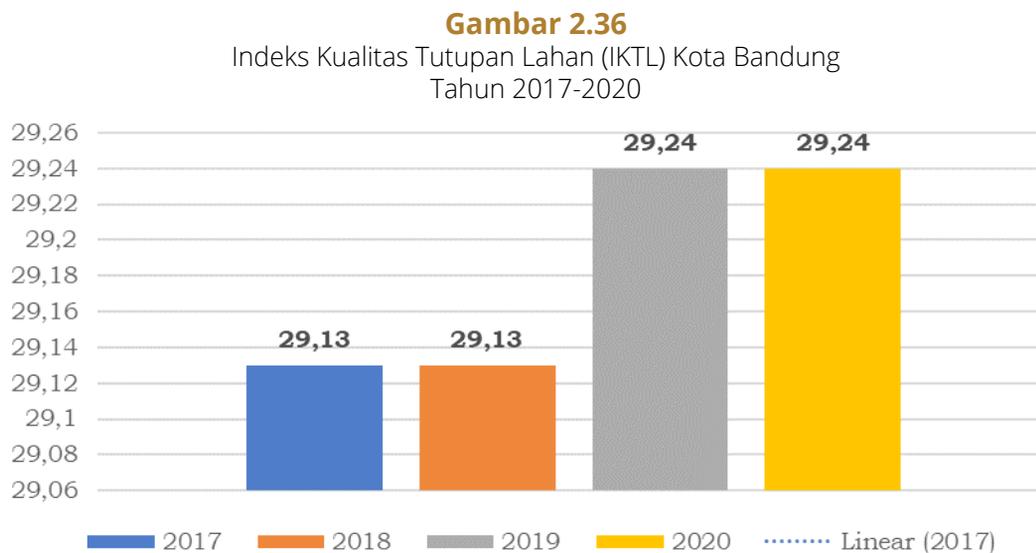
No	LOKASI	PARAMETER																	
		PM10			PM2,5			DEBU			SO2			CO			NO2		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
	BAKU MUTU	ug/Nm			ug/Nm			ug/Nm			ug/nm			ug/Nm			ug/Nm		
		150			66			230			900			30000			400		
1	Jl. BKR (Depan Alifa)	118,6	77,6	98,25	64,3	29,56	26,26	160,01	116,79	168,92	39,9	26,28	<29,24	<1,145	5152	3435	18,18	11,93	23,17
2	Jl. Tegalega (Depan Pendopo)	62,3	135,76	44,21	22,7	115,32	26,18	94,47	157,5	58,26	34,52	21,8	<29,24	<1,145	1912	2290	15,09	10,94	15,24
3	Bunderan Cibiru	165,53	145,6	123,5	58,68	112,66	59,2	226,18	215,65	196	34,52	42,78	37,34	<1,145	5347	8015	15,09	15,04	39,37
4	Jalan Rumah Sakit	86,28	121,21	102,4	27,75	82,13	32,28	131,94	171,3	150,8	54,15	35,58	36,59	<1,145	4202	3435	21	13,05	24,06
5	Jl. Buahbatu saat tidak CFD	53,94	97,5	76,58	28,94	65,2	58,66	97,11	152	92,61	45,18	30,22	<29,24	<1,145	4008	3057	15,7	14,18	29,15
6	Jl. Buahbatu saat CFD	24,6	63,5		13,48	28,5		52,48	86,54		7,99	10,9		<1,145	<1,145		<8,10	<8,10	
7	Jl. Ciganitri			64,27			27,88			81,65			<29,24		3240				15,22
8	Jl. Soekarno-Hatta (Depan Aria Graha)	80,11	160,21	106,22	25,03	125,36	52,88	122,74	265,78	124,22	44,83	36,15	30,01	<1,145	3240	4580	18,22	11,52	28,34
9	Jl. Buahbatu (Depan STSI/ISBI)	102,68	109,52	106,52	24,95	46,41	60,12	176,7	158,37	192,66	45,56	10,9	42,09	<1,145	6103	7820	11,14	16,56	36,08
10	Jl. Margahayu Raya (Bunderan Metro)	53,3	135,5	110,26	19,32	115,3	56,28	116,82	185,6	132,81	47,84	24,73	<29,24	2862	3813	6675	14,32	<8,10	20,86
11	Terminal Cicaheum	44,99	157,23	143,83	23,57	113,4	63,82	141,77	210,85	202,67	51,91	51,26	48,81	4580	5725	8164	15	17,1	67,52
12	Jl. Arcamanik			74,26			31,22			94,26			<29,24		4008				19
13	Jl. Pajajaran (Depan Wiyata Guna)	45,81	73,69	87,14	19,65	42,72	56,82	103,72	116	101,26	37,25	30,9	34,15	1912	4202	5343	12,79	10,92	37,03
14	Terminal Ledeng	57,6	128,53	115,67	27,2	100,29	59,81	206,21	177,65	210,66	58,66	35,32	42,7	3435	6298	7626	19,26	15,23	46,95
15	Jl. Siliwangi	46,89	50,11	42,26	19,89	35,23	30,68	103,12	79,12	70,28	42,66	26,69	<29,24	1718	4958	2977	10,45	11,2	20,1
16	Jl. Ahmad Yani (Depan Stadion Siliwangi)	103,28	72,65	72,6	24,42	21,9	21,9	141,26	145,12	145,1	44,23	27,53	<29,24	7065	5152	3630	13	14,22	18,53

No	LOKASI	PARAMETER																	
		PM10			PM2,5			DEBU			SO2			CO			NO2		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
		ug/Nm			ug/Nm			ug/Nm			ug/nm			ug/Nm			ug/Nm		
BAKU MUTU		150			66			230			900			30000			400		
17	Balaikota Bandung (Depan Taman Vanda)	129,75	66,5	58,26	25,42	20,54	36,88	183,69	98,35	82,52	43,24	22,68	<29,24	4580	5152	7626	14,78	19,17	23,97
18	Depan Patung Panda	81,45			22,62			155,35			52,89			6870			20,34		
19	Jl. Pasteur	140,26	142,66			117,94	64,24	221,2	218,26	82,52	43,24	22,68	<29,24	4580	5152	7626	14,78	19,17	23,97
20	Perumahan Pasir Impun	87	33,6	82,1	41,32	22,5	26,8	69	95,22	34,1	19	<29,24	1523	2862	1145	8,34	<8,10	12,92	
21	Terminal Leuwipanjang	136,28	164,2	112,81	45	120,4	50,62	216,68	215,66	172,84	62,2	37,1	31,34	3630	6298	7820	19	21,46	35,16
22	Alun-alun Kota Bandung	116,24	137,53	128,32	45,58	98,46	56,87	180,98	208,82	189,26	60,03	35,95	<29,24	3630	5725	4385	15,55	19,17	26,62
23	Jl. Puncut	77,59	57,1	54,62	41,3	40,19	38,22	109,16	81,73	77,12	35,87	14,98	<29,24	3240	2862	2095	8,58	<8,10	5,82
24	Jl. Soekarno-Hatta (Depan Astra Bizz)	144,6	140,51	126,5	52,1	105,32	36,68	225,01	143,61	142,8	48,23	27,96	<29,24	3435	5152	6675	13,89	12,1	22,82
25	Jl. Suci (Perempatan Cimuncang)	108,16	88,23	40,28	35,22	35,21	35,11	159,5	110,6	62,62	41,21	33,56	29,55	3057	4008	4958	14,44	13,51	33,04
26	Jl. Diponegoro	87,16	72,6	65,18	39,02	22,51	20,66	151,23	107,74	82,52	46,42	26,78	35,72	3435	4202	5920	15,05	12,22	37,8
27	Dago saat CFD	66,75	55,8		30,22	31,5		96,13	66,5		37,51	13,57		2290	<1.145		10,89	<8,10	
28	Dago saat tidak CFD	91,51	98,54	79,86	42,02	67,22	60,26	160,94	165	158,26	44,05	37,05	51,21	2668	2485	6103	12,98	20,05	57,42
29	Jl. Elang	88,89	112,5	61,22	40,11	56,22	48,26	166,39	167,31	186,28	57,74	28,45	36,21	3630	4202	7065	16,77	15,12	44,42
30	KPAD Sarjadi	75,62	66,11	60,6	36,18	42,35	36,5	101,06	82,58	81,6	23,1	21,38	<29,24	1145	3813	2095	10,59	10,77	12,07

Keterangan : : Melebihi Baku Mutu Sumber data : Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Roadside Sumber : DLHK Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan IKTL dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratif. IKTL Kota Bandung 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019, IKTL Kota Bandung mencapai 29,24, meningkat sebesar 0,11 poin dibanding tahun sebelumnya. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kota Bandung Tahun 2017-2020 disajikan pada Tabel 2.36.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup yang dikelola dalam SIPD, 2020

Indeks Kualitas Tutupan Lahan ini dihitung dari data luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung dan adanya penambahan Taman Keanekaragaman hayati sehingga peningkatan nilai IKTL terjadi pada tahun 2019, dimana luasan RTH mengalami sedikit peningkatan yang berasal dari pembelian lahan oleh DPKP3 dan terjadinya pembangunan taman keanekaragaman hayati. Lokasi taman keanekaragaman hayati ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Nomor: 670/Kep.828-DLHK/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 tentang Penetapan Lokasi Taman Kehati yang terletak di Kelurahan Palasari, Cibiru RT 01 RW 04 seluas 4,6 Ha.

4) Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kondisi RTH Eksisting

Dinamika pembangunan yang berlangsung di Kota Bandung menyebabkan tekanan terhadap 'infrastruktur hijau perkotaan' yang lazim disebut sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh berkurangnya ruang terbuka hijau privat seperti pekarangan dan taman-taman lingkungan yang terdapat di kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan industri, serta kawasan permukiman. Meskipun peraturan perundangan yang ditujukan untuk mengendalikan konversi ruang terbuka hijau privat telah tersedia, namun dalam kenyataannya konversi RTH untuk berbagai kepentingan pembangunan tidak dapat dihindarkan.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kota Bandung menjadi sebab akibat terjadinya alih fungsi lahan di Kota Bandung, sehingga mengakibatkan kebutuhan RTH di Kota Bandung terganggu oleh adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi lahan tersebut. Berdasarkan data dari DPKP3 Kota Bandung, penambahan luas RTH pada tahun 2017 seluas 48.177 m² (4,8 Ha) dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi Taman RW di 40 lokasi dengan luas 4.519 m²;
- Pengadaan lahan untuk RTH dengan luas 6.591 m²; dan
- Serah terima PSU Perumahan Batununggal seluas 37.067 m².

Persentase luasan RTH Kota Bandung tahun 2017 sebesar 2.040,70/16.729,65 adalah 12,20%. Hal tersebut masih jauh dari target RTH Publik yaitu sebesar 20%, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur jumlah RTH minimal seluas 30% dari total luas kota. Minimnya RTH di Kota Bandung berdampak besar terhadap lingkungan. Satu di antaranya adalah suhu udara di Kota Bandung yang mulai terasa panas, akan tetapi potensi perluasan RTH di masa yang akan datang sangat memungkinkan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54
Penambahan Luas Taman/RTH di Kota Bandung

Taman Per Kecamatan	Luas (M²) Lama	Hasil Up dating RTH
WILAYAH BOJONEGARA		
I. Kecamatan Sukasari	44.939	48.506
II. Kecamatan Sukajadi	43.404	57.760
III. Kecamatan Cicendo	42.436	53.416
IV. Kecamatan Andir	44.368	44.818
WILAYAH CIBEUNYING		
I. Kecamatan Cidadap	10.666	10.666
II. Kecamatan Coblong	246.232	255.670
III. Kecamatan Bandung Wetan	312.742	314.089
IV. Kecamatan Sumur Bandung	62.329	62.329
V. Kecamatan Cibeunying Kidul	8.527	13.517
VI. Kecamatan Cibeunying Kaler	9.654	32.593
WILAYAH Tegalega		
WILAYAH BOJONEGARA		
I. Kecamatan Astana Anyar	8.874	9.394
II. Kecamatan Babakan Ciparay	2.973	3.997
III. Kecamatan Bandung Kulon	300	7.089
IV. Kecamatan Bojongloa Kidul	549	896
V. Kecamatan Bojongloa Kaler	8.848	9.579
WILAYAH KAREES		
I. Kecamatan Kiaracondong	7.553	8.867
II. Kecamatan Batununggal	28.702	29.174
III. Kecamatan Lengkong	60.127	60.127
IV. Kecamatan Regol	209.375	209.675
WILAYAH UJUNGBERUNG		
I. Kecamatan Antapani	39.769	712.855
II. Kecamatan Arcamanik	19.177	687.416
III. Kecamatan Mandalajati	85.000	92.603
IV. Kecamatan Ujungberung	7.067	7.407
V. Kecamatan Panyileukan	22.714	48.452
VI. Kecamatan Cibiru	8.409	8.669
WILAYAH GEDEBAGE		
I. Kecamatan Buahbatu	27.629	29.914
II. Kecamatan Rancasari	32.450	32.769
III. Kecamatan Bandung Kidul	20.983	25.844
IV. Kecamatan Cinambo	5.745	6.460
IV. Kecamatan Gedebage	-	1.430
Jumlah	1.402.362	2.199.344

Sumber: KLHS RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031, 2018

Luas ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung setiap tahun semakin berkurang, disebabkan terjadinya perubahan fungsi yang semula berupa lahan RTH menjadi area terbangun untuk berbagai keperluan seperti perumahan, industri, pertokoan, kantor, dan lain-lain. Hal tersebut lambat laun

dapat menimbulkan berbagai masalah, baik dari segi ekologi, sosial, hingga ekonomi, sekaligus juga menurunkan kualitas ruang kota. Semakin berkurangnya RTH, khususnya taman dapat menimbulkan munculnya kerawanan dan penyakit sosial sifat individualistik dan ketidakpedulian terhadap lingkungan yang sering ditemukan di masyarakat perkotaan.

Secara ekologis, terbatasnya RTH juga berpengaruh terhadap peningkatan temperatur udara dan perubahan kualitas mikroklimat, pencemaran udara, terjadinya banjir dan berbagai dampak negatif lingkungan lainnya. Sebagai akibatnya, berbagai penyakit mulai dari infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), penyakit sanitasi kulit, dan penyakit sosial juga dapat timbul pada warga kota. Menurunnya kualitas lingkungan hidup kota dan berkurangnya kualitas hubungan sosial karena minimnya ruang terbuka publik lambat laun juga menurunkan kualitas ruang kota. Hal ini akan berdampak pada penurunan nilai ekonomi ruang kota dan pada akhirnya juga akan berpengaruh pada iklim investasi ekonomi dan kegiatan pembangunan kota di masa depan.

5) Kondisi Kapasitas Daya Tampung Sampah

a) Persentase Penanganan Sampah

Salah satu permasalahan perkotaan yang dihadapi saat ini adalah timbunan sampah yang besar. Dengan jumlah penduduk sebesar 2.500.965 jiwa pada tahun 2020 (Disdukcapil Kota Bandung) dan timbulan sampah per kapita sebanyak 0,63 kg/orang/hari (Kajian Timbulan Sampah Kota Bandung Tahun 2019, DLHK), maka setiap harinya Kota Bandung menghasilkan sampah sebanyak ±1.601,25 ton per hari. Dari jumlah timbulan sampah harian tersebut, sampah yang dikirim ke TPA rata-rata adalah sebesar ton/taun atau 98,32%, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.55 mengenai persentase penanganan sampah di Kota Bandung.

Tabel 2.55
Persentase Penanganan Sampah di Kota Bandung
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pananganan Sampah (%)	90,4	97,47	97,97	97,99	98,32

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Sampah merupakan persoalan serius yang dihadapi wilayah Bandung Raya, termasuk juga Kota Bandung di dalamnya. Produktivitas sampah di kota metropolitan seperti Bandung yang merupakan ibukota dari Jawa Barat sangat tinggi. Sampah tersebut bersumber dari sampah yang diproduksi perumahan, pasar, kantor daerah komersil, fasilitas publik, dan lain sebagainya. Secara umum, 65% sampah masih didominasi oleh sampah domestik. Dari jumlah itu, baru sekitar 300 ton per hari yang bisa diolah menjadi bahan kerajinan, kompos, bahan bakar gas, dan listrik.

b) Cakupan Pelayanan Sampah

Luas cakupan pelayanan sampah Kota Bandung kurang lebih 90% dari luas area Kota Bandung dan dibagi ke dalam empat wilayah operasional kerja yaitu operasional wilayah Bandung Barat, Bandung Timur, Bandung Utara, dan Bandung Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56
Wilayah Operasional Cakupan Pelayanan Sampah Kota Bandung

No	Operasional Wilayah	Lingkup Operasional
1.	Bandung Utara	Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Coblong, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Cibeunying Kaler, dan Kecamatan Bandung Wetan

No	Operasional Wilayah	Lingkup Operasional
2.	Bandung Barat	Kecamatan Cicendo, Kecamatan Andir, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Babakan Ciparay, dan Kecamatan Astana Anyar.
3.	Bandung Selatan	Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Kiaracondong, dan Kecamatan Bandung Kidul
4.	Bandung Timur	Kecamatan Antapani, Kecamatan Cicadas, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Ujungberung, Kecamatan Cibiru, Kecamatan Rancasari, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Gedebage, dan Kecamatan Buahbatu

Sumber: DLHK Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018

Berdasarkan tabel tersebut, sarana persampahan di Kota Bandung tersebar di wilayah sebanyak 160 unit TPS, diantaranya 10 lokasi TPS kegiatan 3R dan 1 lokasi pengomposan di eks TPA Jelekong, kontainer ukuran 6 m³ dan 10 m³ sebanyak 170 unit, 82 unit tong komposter, 742 tempat sampah terpilah, dan 11 unit mesin pencacah, sedangkan 1 unit TPA berlokasi di Desa Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat. Pemanfaatan TPA Sarimukti hanya bisa dilaksanakan sampai dengan tahun 2023. Setelah itu, sedang direncanakan pemanfaatan TPA Legok Nangka skala regional.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, paradigma pengelolaan sampah harus diubah dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan di sumber dan daur ulang melalui prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*). Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung berupaya melakukan pengurangan sampah di TPS 3R dan ex-TPA. Kegiatan pengurangan sampah dilakukan melalui pengolahan sampah organik yaitu dengan pengomposan dan teknologi biodigester.

Kegiatan 3R yang efektif dilaksanakan masih di 4 (empat) TPS dan 1 (satu) eks TPA dari 10 TPS 3R yang ada, yaitu TPS Tegalega, TPS Ciroyom, TPS Indramayu, TPS Gedebage, dan ex-TPA Jelekong. Upaya tersebut menghasilkan pengurangan sampah pada tahun 2018 adalah sebesar 13% dari jumlah sampah total yang masuk ke TPS dengan jumlah pengurangan sampah organik yang dijadikan kompos sebesar 2.905,17 ton/tahun atau sebesar 8 ton per hari, sedangkan dengan upaya biodigester jumlah pengurangan sampah organik sebesar 53.460 ton/hari atau 146,5 ton per hari. Indikator lainnya pada Urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57

Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah sampah yang dimanfaatkan dan di daur ulang di sumber sampah	Ton	N/A	N/A	N/A	85.110,7	95.640,95
2.	Persentase kawasan konservasi terpelihara	Persen	N/A	N/A	8,80	10,56	28,99
3.	Persentase Limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang terkelola	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	0,001
4.	Cakupan perlindungan kualitas lingkungan	Persen	N/A	N/A	33,38	33,41	33,43

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
5	Cakupan pencegahan dampak lingkungan akibat kebijakan dan usaha/ kegiatan	Persen	N/A	N/A	100	100	100
6	Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran “cemar ringan”	Persen	N/A	N/A	N/A	77,91%	78,13%
7	Indeks SO ₂	Poin	N/A	0,24	0,77	0,74	0,91

Sumber: DLHK Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pengukuran jumlah sampah yang termanfaatkan dan didaur ulang di sumber sampah secara detail baru dilakukan pada tahun 2019 dan jumlahnya pada tahun 2020 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah sampah organik yang dapat dikurangi di kawasan bebas sampah yang diantaranya diolah menggunakan metode komposter bata terawang dan magot BSF, serta bertambahnya jumlah sampah yang diolah di sektor komersil yaitu di pasar dan mall.

Untuk persentase kawasan konservasi terpelihara, pengukuran mulai dilakukan pada tahun 2018 yaitu dari data kawasan mata air yang dipelihara. Persentase kawasan konservasi terpelihara memiliki kecenderungan meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Hal tersebut terjadi karena setiap tahunnya dilakukan penataan mata air di 5 lokasi. Pada tahun 2019 telah tertata sebanyak 30 lokasi mata air dari 142 mata air yang teridentifikasi. Pada tahun 2020 telah ditetapkan Taman Keanekaragaman hayati dan dilakukan penataan meliputi penanaman pohon-pohon pelindung dan pohon produktif sehingga terjadi peningkatan persentase pemeliharaan kawasan konservasi.

Untuk persentase limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang terkelola, pengukuran baru dilakukan pada tahun 2020 setelah dilakukan pembangunan TPS Limbah B3 untuk UMKM Sablon di daerah Cibeunying. Tetapi, TPS belum dapat dijalankan secara optimal karena kelembagaan pengelolaan yang seharusnya dilakukan oleh asosiasi pelaku UMKM di daerah tersebut belum bisa dijalankan secara efektif karena belum adanya kajian perhitungan biaya operasional TPS.

Untuk cakupan perlindungan kualitas lingkungan, pengukuran mulai dilakukan pada tahun 2019 dan capaiannya meningkat sejak tahun 2018 hingga ke tahun 2020. Hal ini terjadi karena proses pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup oleh pelaku usaha/ kegiatan terus dilakukan sehingga jumlah pelaku usaha/kegiatan yang telah memenuhi aturan pengelolaan lingkungan hidup pun semakin bertambah.

Untuk cakupan pencegahan dampak lingkungan akibat kebijakan dan usaha/kegiatan, capaiannya adalah 100 persen sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 karena seluruh permohonan rekomendasi dokumen lingkungan telah diberi rekomendasi dan seluruh dokumen perencanaan pembangunan (RTRW, RPJMD dan RDTR) telah dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Untuk persentase Sungai dengan status indeks pencemaran cemar ringan, pengukuran dilakukan sejak tahun 2019 dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 mengenai Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, status mutu air sungai dihitung dengan metode Indeks Pencemaran yang membandingkan hasil pengukuran kualitas dengan baku mutu air permukaan kelas 2. Berdasarkan hasil pengukuran ini didapat bahwa jumlah titik pantau sungai yang memiliki status cemar ringan terus meningkat jumlahnya sejak tahun 2019

hingga tahun 2020. Sebanyak 101 dari 128 titik pantau sungai di tahun 2016 berada pada status cemar ringan dan jumlahnya meningkat menjadi 102 titik dengan status cemar ringan dari 128 titik yang dipantau.

Untuk Indeks SO₂, pengukuran mulai dilakukan pada tahun 2017. Indeks ini menunjukkan jumlah SO₂ yang diemisikan ke udara setiap tahunnya, semakin besar nilainya maka semakin banyak pencemar yang dilepas ke udara. Pada tahun 2017 Indeks Kualitas Udara Kota Bandung berada pada nilai 82,87 poin. Pada tahun 2021, Indeks SO₂ mengalami peningkatan hingga mencapai angka 0,91 poin dari angka 0,24 poin di tahun 2017.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator kepemilikan dokumen kependudukan menjadi salah satu indikator tertib administrasi kependudukan. Hal ini terlihat dari cakupan layanan dokumen kependudukan yaitu cakupan kepemilikan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian yang dimiliki penduduk. Peningkatan cakupan layanan dokumen kependudukan menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan. Berikut merupakan gambaran mengenai cakupan pelayanan administrasi kependudukan selama kurun waktu 2016-2020, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.58.

Tabel 2.58

Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan layanan administrasi kependudukan	73,41	83,77	93,34	95,48	97,08

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan mengalami peningkatan yang cukup signifikan terutama pada tahun 2017 sebesar 10,36% dan 2018 sebesar 9,57%. Peningkatan ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan semakin meningkat serta menunjukkan peran pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan identitas diri bagi setiap penduduknya. Indikator lainnya pada Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada Tabel 2.59.

Tabel 2.59

Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Utama	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,5	80,67	82,89	82,92	89,80
2	Cakupan layanan administrasi kependudukan	73,41	83,77	93,34	95,48	97,08
3	Tingkat keserasian <i>data base</i> kependudukan	N/A	97,66	98,44	N/A	N/A
4	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	N/A	N/A	N/A	60	60

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tolak ukur penilaian masyarakat atas kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Disdukcapil. IKM Disdukcapil meningkat setiap tahunnya yang menunjukkan kinerja Disdukcapil dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. IKM diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat dengan responden masyarakat yang menerima pelayanan dari Disdukcapil. Survei yang dilakukan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Cakupan layanan administrasi kependudukan menunjukkan kinerja Disdukcapil dalam memenuhi kewajiban memberikan Identitas bagi warganya. Cakupan layanan administrasi kependudukan terdiri dari 4 (empat) jenis layanan yaitu layanan Kartu Keluarga, layanan KTP-Elektronik, layanan Akta Kelahiran dan layanan Akta Kematian yang meningkat setiap tahunnya dengan peningkatan yang signifikan pada tahun 2017 dan 2018.

Pada Tahun 2016, Indikator Tingkat Keserasian *Data base* belum dilakukan pengukuran. Indikator Tingkat Keserasian *data base* membandingkan antara *data base* hasil konsolidasi bersih dengan data layanan dengan tujuan diperolehnya *data base* skala Kota/Kabupaten dengan tingkat akurasi pada tahun 2017 sebesar 97,66% dan tahun 2018 sebesar 98,44% dan pada tahun 2019 dan 2020 indikator tingkat keserasian *data base* diubah menjadi Cakupan Pemanfaatan Data untuk dapat mengukur besar pemanfaatan dari *data base* yang tersedia.

Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan menunjukkan seberapa besar data kependudukan dimanfaatkan oleh Instansi/Lembaga/Badan Hukum melalui mekanisme perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan. Indikator ini membandingkan jumlah Instansi/Lembaga/Badan Hukum yang sudah melakukan perjanjian Kerjasama dan aktif memanfaatkan data kependudukan dengan jumlah Instansi/Lembaga/Badan Hukum yang melakukan perjanjian kerjasama. Pada tahun 2020 tidak terjadi peningkatan dan realisasi kinerja tetap 60% tetapi apabila dilihat dari hasil perhitungan, terjadi peningkatan yang semula ada 18 lembaga yang aktif dari 30 lembaga yang sudah melakukan kerjasama pada tahun 2020 meningkat menjadi 27 lembaga yang aktif dari 45 lembaga yang melakukan kerja sama.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) PKK Aktif

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah serta pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan, dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, maka dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK. Adapun perkembangan PKK Kota Bandung dalam kurun waktu 2016-2020 dapat terlihat pada Tabel 2.60.

Tabel 2.60

PKK Aktif di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: DP3APM Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

2) Posyandu Aktif

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari keluarga berencana dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Tujuan penyelenggaraan posyandu, yaitu:

- a) Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) hamil, melahirkan, dan nifas.
- b) Membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS).
- c) Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
- d) Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga, dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Adapun perkembangan Posyandu Kota Bandung dalam kurun waktu 2016-2020 dapat terlihat pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61
Posyandu Aktif di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Posyandu Aktif	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator keberhasilan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ada 4, yaitu Cakupan Data dan Informasi Keluarga yang Akurat dan Tepat Waktu, Jumlah Kampung KB Aktif, Persentase peserta KB aktif, dan Persentase Kelompok Tribina Aktif. Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.62.

Tabel 2.62
Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Data dan Informasi Keluarga yang Akurat dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100
2	Jumlah Kampung KB Aktif	Kampung KB	1	14	15	20	31
3	Persentase Peserta KB Aktif	%	75,07	73,35	75,28	76,00	76,24
4	Persentase Kelompok Tribina Aktif	%	68,25	69,00	70,00	71,06	74,73

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Data dan informasi keluarga adalah data hasil pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta penyebarluasan data berdasarkan Pendataan Keluarga yang dilaksanakan tiap lima tahun dan *diupdate* secara rutin oleh Petugas Lini Lapangan Keluarga Berencana melalui Aplikasi Statistik Rutin (SR) atau Sistem Informasi Keluarga (SIGA). Sedangkan Cakupan Data dan Informasi Keluarga yang akurat dan tepat waktu adalah, persentase jumlah laporan yang dilaporkan petugas lapangan KB tingkat kecamatan yang akurat dan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah seluruh kecamatan. Selama kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2020 pencapaian indikator ini sudah maksimal (100%).

Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) adalah satuan wilayah setingkat kelurahan yang memenuhi kriteria dimana terdapat keterpaduan Program Bangga Kencana dan pembangunan sector terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Syarat pembentukan kampung KB adalah tersedianya data kependudukan yang akurat, dukungan komitmen pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat yang aktif. Kriteria pemilihan Kampung KB di Kota Bandung terdiri dari kriteria utama, kriteria wilayah dan kriteria khusus. Kriteria utama terkait pada jumlah penduduk miskin dan kepesertaan ber-KB. Kriteria wilayah terkait pada kondisi wilayah yang kumuh, Daerah Aliran Sungai (DAS), bantaran kereta api, kawasan industri, kawasan wisata dan padat penduduk. Sementara kriteria khusus terkait dengan ketersediaan data dan peta keluarga, partisipasi masyarakat, dan kepesertaan ber-KB.

Yang dimaksud dengan Kampung KB Aktif adalah Kampung KB yang telah dibentuk dari SK Lurah/Camat dengan kriteria adanya kepengurusan kelompok di Kampung KB seperti Pembantu pembina Keluarga Desa (PPKBD/Sub-PPKBD) maupun kader serta adanya partisipasi aktif masyarakat dalam Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Di Kota Bandung Kampung KB pertama kali dibentuk pada tahun 2016, yang kemudian secara aktif terus bertambah. Dalam 5 tahun, sudah terbentuk Kampung KB aktif sebanyak 31 buah yang tersebar di 31 Kelurahan dan 30 Kecamatan.

Cakupan Peserta KB Aktif adalah perbandingan antara jumlah peserta KB aktif dengan Pasangan Usia Subur (PUS). Cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara PUS. Capaian cakupan dalam 5 tahun terakhir terjadi fluktuatif, namun dalam 3 tahun terakhir terdapat peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dan upaya Pemerintah Kota Bandung dalam urusan Pengendalian Penduduk melalui Program Keluarga Berencana semakin baik.

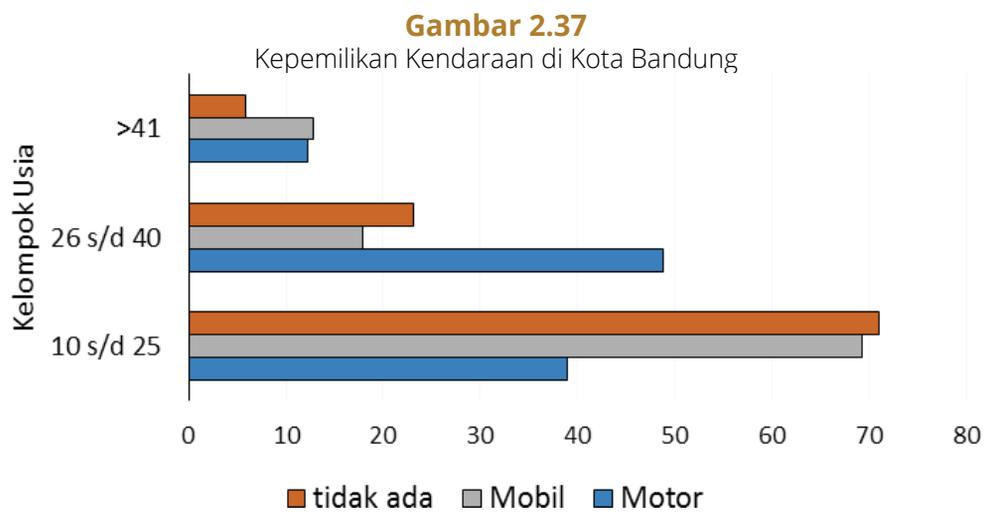
Kelompok Tribina terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Yang dimaksud dengan Kelompok Tribina aktif adalah kelompok tribina yang melakukan berbagai kegiatan diantaranya adalah membuat rencana kerja/kegiatan Tribina tahunan, membuat jadwal kegiatan/pembagian tugas pengurus Tribina, memberikan pembinaan kepada kader Tribina yang belum mengikuti pelatihan kegiatan Tribina, menyampaikan KIE dalam kegiatan Tribina, melaporkan kegiatan Tribina setelah kegiatan dilaksanakan, Kader Tribina Terlatih melakukan penyuluhan Program Bangga Kencana seperti misalnya tentang 8 fungsi keluarga, kunjungan rumah oleh kader atau petugas ke anggota Poktan, membuat rujukan ke tingkat yang lebih tinggi apabila ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pengurus Kelompok Tribina, serta melakukan pencatatan dan pelaporan.

Indikator Persentase Kelompok Tribina Aktif adalah perbandingan antara jumlah Kelompok Keluarga Tribina yang aktif melakukan serangkaian kegiatan dengan semua jumlah Kelompok Keluarga Tribina yang terdaftar. Dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2020, capaian indikator ini sudah tinggi, meskipun pada tahun 2019 capaian indikator ini sedikit menurun bila dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19, namun demikian pada tahun 2020 capaian indikator ini dapat dicapai maksimal (100%).

i. Perhubungan

Berdasarkan hasil survei preferensi masyarakat, kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Bandung dapat diukur menurut kelompok usia, pada gambar berikut menunjukkan kepemilikan kendaraan terdapat pada usia 10-25 tahun didominasi oleh kendaraan pribadi dengan jenis mobil,

dan pada usia 26-40 tahun kepemilikan kendaraan pribadi didominasi oleh kendaraan pribadi dengan jenis motor. Ledakan jumlah kendaraan bermotor itu menjadi pemicu berbagai permasalahan transportasi karena penambahan ruas jalan hanya berkisar 1,29% per tahun tidak sebanding dengan penambahan jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 9,34% per tahun (*Bandung Urban Mobility Project* (BUMP), 2015). Kepemilikan Kendaraan di Kota Bandung disajikan pada Gambar 2.37.



Implikasi yang jelas dari fenomena tersebut adalah peningkatan volume lalu lintas yang signifikan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Dari survei yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, ada tiga temuan yang terkait dengan kemacetan lalu lintas di Kota Bandung.

- Pertama, volume lalu lintas tertinggi ditemukan antara pukul 07.00 - 09.00 dan 17.00 - 19.00 WIB.
- Kedua, kecepatan rata-rata di Bandung sekitar 16 km/jam.
- Ketiga, *Volume Capacity Ratio* (VCR) pada beberapa ruas jalan sudah mendekati atau lebih dari 1. VCR adalah indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi kualitas lalu lintas, di mana $VCR < 1$ berarti bahwa koridor belum mencapai titik jenuh dan $VCR \geq 1$ berarti koridor telah melampaui kapasitasnya. Karena nilai VCR di banyak jalan di Bandung sekitar 1, dapat disimpulkan bahwa pengguna transportasi mengalami kemacetan lalu lintas dan hanya bisa mengendarai dengan kecepatan rendah.

Dalam situasi ini, isu yang terjadi di Kota Bandung adalah penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat masih sangat dominan, sehingga pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung perlu menyediakan sistem angkutan publik yang aman, nyaman dan terjangkau untuk masyarakat. Yang perlu diperhatikan adalah penyediaan akses bagi pejalan kaki untuk menuju dan dari tempat penyediaan angkutan umum serta keterjangkauan pelayanan angkutan umum yang dapat diakses oleh masyarakat. Jumlah arus penumpang umum (bis/kereta api/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah Kota Bandung selama 1 (satu) tahun, dalam kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.63.

Tabel 2.63
Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kota Bandung
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	6.496.803	5.419.322	5.954.927	5.632.465	2.506.871

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah arus penumpang umum yang keluar masuk ke Kota Bandung mengalami penurunan selama kurun waktu 2016–2020. Hal ini disebabkan berbagai hal, diantaranya semakin banyak orang menggunakan kendaraan pribadi sebagai sarana transportasinya, penggunaan transportasi online yang tidak bisa diketahui secara pasti jumlah penumpangnya, serta faktor persepsi orang ketika akan menggunakan angkutan umum terkait faktor keamanan dan keselamatan cenderung rendah ketika menggunakan angkutan umum. Pada tahun 2018 terdapat lonjakan penumpang sehingga mencapai 5.954.927, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 sebanyak 5.632.465. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya persaingan antara angkutan umum AKAP/AKDP dan semakin banyaknya pilihan angkutan umum lainnya, seperti layanan travel antar kota maupun kereta api.

Penurunan jumlah arus penumpang umum yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2020, yakni hanya sebesar 2.506.871. Hal ini sebagai dampak adanya kebijakan pengendalian penyebaran pandemi virus Covid-19 melalui pembatasan pergerakan orang melalui moda transportasi umum yang berimbas pada penutupan operasional terminal selama beberapa minggu dan juga adanya pembatasan kapasitas penumpang angkutan umum sebesar 50%. Indikator lainnya pada Urusan Perhubungan dapat dilihat pada Tabel 2.64.

Tabel 2.64
Indikator Kinerja Urusan Perhubungan
Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	72,98	82,96	77,76	82,02	80,05
2	Persentase Simpang tertib lalu lintas yang tertangani	%	-	-	-	20	40
3	Rasio Pengguna kendaraan umum v s kendaraan pribadi	%	-	-	19,85:81,75	20.16:79.84	18,25-81,75
4	Persentase Sarana prasarana transportasi yang tersedia	%	-	-	-	25,19	43,7
5	Cakupan mobilitas penduduk kota dan keselamatan angkutan	%	-	-	-	24,02	41,59
6	Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan yang terbangun	%	-	-	-	27,4	42,74
7	Persentase jumlah kendaraan angkutan umum yg lulus uji KIR	%	99,06	96,35	97,93%	95,08	96,22
8	Persentase Simpang tertib lalu lintas yang tertangani	%	-	-	-	20	40
9	Persentase dokumen perencanaan	%	100	100	100	97,44	88,89
10	Persentase pengguna transportasi ramah lingkungan	%	-	-	-	1,03	1,29
11	Persentase kinerja APILL dan parkir	%	-	-	-	89,09	85,33

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
12	Cakupan pelayanan transportasi angkutan	%	-	-	-	100	56,25
13	Cakupan pelayanan transportasi	%	-	-	-	-	70,65

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan Tabel 2.64 terlihat bahwa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2019-2020 berfluktuatif, hal ini terjadi karena adanya ketidakkonsistenan mutu pelayanan terhadap masyarakat, adapun pelayanan publik yang dijadikan bahan penilaian adalah : pelayanan parkir *on street* (di tepi jalan), pelayanan angkutan (Bus Trans Metro Bandung / TMB), pelayanan terminal angkutan orang (Leuwi Panjang dan Cicaheum) dan terakhir pelayanan uji KIR kendaraan wajib uji (angkutan umum dan barang).

Untuk simpang tertib lalu lintas yang tertangani baru dilakukan pengukurannya di tahun 2019 seiring penyusunan Renstra Dishub. Dari tahun 2019 ke tahun 2020 ada kenaikan sebesar 20% atau sebanyak 5 persimpangan.

Untuk rasio pengguna kendaraan umum vs kendaraan pribadi baru dilakukan pengukuran pada tahun 2018 dimana pada 2019 ada kenaikan persentase pengguna kendaraan umum seiring bertambahnya koridor Trans Metro Bandung. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemi yang membatasi mobilitas orang melalui sarana transportasi umum.

Untuk sarana prasarana transportasi yang tersedia baru dilakukan pengukuran pada tahun 2019 dimana pada tahun 2020 ada peningkatan seiring bertambahnya jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di tahun tersebut. Adapun sarana prasarana transportasi yang menjadi tolok ukur adalah : terminal angkutan orang, shelter angkutan umum, *bike sharing*, jembatan penyeberangan orang, *signage* angkutan umum.

Untuk cakupan mobilitas penduduk kota dan keselamatan angkutan baru dilakukan pengukurannya pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 ada peningkatan. Cakupan mobilitas penduduk mempunyai 3 unsur tolok ukur yang menjadi acuan perhitungannya yaitu: pengguna *eco transport*, kelaikan kendaraan umum/ barang dan *Level of Service*.

Untuk persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terbangun baru dilakukan pengukurannya pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 terdapat peningkatan. Peningkatan tersebut seiring bertambahnya jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang dibangun setiap tahunnya yang terdiri dari : rambu – rambu lalu lintas, marka jalan, *guard rail*, paku jalan, *warning light*, dan cermin tikungan.

Untuk persentase jumlah angkutan umum yang lulus uji KIR telah dilakukan pengukuran setiap tahun, dan terlihat dalam tabel bahwa nilainya terjadi fluktuatif/kadang naik kadang turun, hal ini sangat tergantung kepada tingkat kesadaran dan kedisiplinan operator angkutan umum untuk secara rutin melakukan pemeliharaan kendaraannya agar tetap laik jalan.

Untuk persentase dokumen perencanaan sudah dilakukan pengukuran setiap tahun dan pada tahun 2016-2018 konsisten di angka 100% namun terjadi penurunan di tahun 2019 dan 2020. Hal ini terjadi karena ada beberapa kajian yang tidak dapat dilaksanakan baik karena faktor ketersediaan waktu maupun karena adanya pandemi Covid-19.

Untuk persentase pengguna transportasi ramah lingkungan baru dilakukan pengukurannya pada tahun 2019 dan terjadi kenaikan di tahun 2020 seiring makin banyaknya pengguna sarana transportasi yang ramah lingkungan seperti sepeda, sepeda listrik dan semakin bertambahnya komunitas sepeda.

Untuk persentase kinerja Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan parkir baru dilakukan pengukurannya pada tahun 2019 seiring mulai efektifnya pengoperasian mesin parkir. Tahun 2020 terjadi penurunan karena berkurangnya mesin parkir yang dapat dioperasikan karena adanya beberapa kerusakan sebagai akibat tindakan vandalisme maupun kecelakaan lalu lintas. Untuk kinerja APILL sendiri dari 137 titik masih bisa beroperasi meskipun secara umum *spare part* yang digunakan sudah banyak yang uzur.

Untuk cakupan pelayanan transportasi angkutan baru dilakukan pengukurannya pada tahun 2019 untuk beberapa moda angkutan massal yaitu Trans Metro Bandung (TMB) dan Bus Sekolah yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Angkutan. Tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis seiring terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap pembatasan pergerakan masyarakat khususnya lewat angkutan umum.

Untuk cakupan pelayanan transportasi baru dilakukan pengukurannya pada tahun 2020 seiring mulai beroperasinya BLUD Parkir yang bertanggung jawab atas pengelolaan parkir di badan jalan/*on street* baik yang masih manual maupun yang sudah memakai mesin parkir yang berjumlah total sebanyak 445 unit yang tersebar di kota Bandung.

j. Komunikasi dan Informatika

Sarana/prasarana komunikasi dan informatika saat ini mengalami perkembangan yang pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia, baik mengenai cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis, maupun hal lainnya. Melalui teknologi komunikasi dan informasi segala aktivitas manusia dilakukan dengan cara yang baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, dan efektif. Kemudian, semua proses pelaksanaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan statis menjadi digital, mobile, virtual serta personal, dengan demikian kecepatan kinerja akan meningkat.

Teknologi informasi bisa digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, serta dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Gambaran mengenai sarana/prasarana komunikasi dan informatika yang tersedia di Kota Bandung selama kurun waktu 2016-2020 dapat terlihat pada Tabel 2.65.

Tabel 2.65

Sarana/Prasarana Komunikasi dan Informatika di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Website Milik Pemerintah Kota Bandung	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, maka Pemerintah Daerah berkewenangan dalam memberikan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi dan Dokumentasi Publik, kecuali Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia. Informasi dan Dokumentasi Publik Daerah dapat diperoleh oleh Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik dengan cepat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah.

Keterbukaan Informasi Publik dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung selaku PPID Utama Kota Bandung untuk mengawal penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan keterbukaan informasi pada umumnya maka dari itu Kota Bandung menetapkan kebijakan daerah dengan Peraturan Wali Kota No. 1340 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung serta menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 480/Kep.021-DiskomInfo/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Adapun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimaksud pada Kepwal tersebut adalah:

- a) PPID Utama: Kepala Diskominfo Kota Bandung
- b) PPID Pembantu: Sekretaris pada Perangkat Daerah, Sekretaris Kecamatan, Sekretariat DPRD, Kepala Bagian di Lingkungan Setda, Dirut RSUD, Dirut RSKIA, Dirut RSKGM, Dirut BUMD Kota Bandung, dan Kasubag Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Hukum pada Setda Kota Bandung, Kepala Sub Data dan Informasi pada Bagian Prokopim pada Setda Kota Bandung di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Serta PPID Utama dan Pembantu sesuai Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 480/Kep.021-DiskomInfo/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan dan mengonsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu, yang meliputi:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi dan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentas; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Indikator lainnya pada Urusan Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Tabel 2.66.

Tabel 2.66

Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Bandung Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	N/A	N/A	2,9	3,11	3,78
2	Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka	N/A	N/A	25,00	38,16	45,23
3	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan persandian yang terkendali	N/A	N/A	33,33	46,87	62,50
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	N/A	73	79,94	84,72
5	Persentase interkoneksi pengembangan infrastruktur TIK yang berfungsi	N/A	N/A	100	100	100
6	Persentase layanan informasi melalui media kepada masyarakat	N/A	N/A	100	100	100
7	Cakupan layanan informasi masyarakat	N/A	N/A	60,00	61,04	70,13

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
8	Persentase dokumen hasil kajian yang digunakan dalam rumusan kebijakan yang diimplementasikan	N/A	N/A	50	50	57,90

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Bandung cenderung mengalami peningkatan, dimulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang merupakan awal dari RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023. Pada Indikator Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan penilaian hasil penilaian tahunan dari Kementerian PAN RI cenderung meningkat setiap tahunnya, hal ini didukung dan dipahami oleh perangkat daerah untuk mendukung SPBE di Kota Bandung dengan memberikan evident-evident yang sesuai dengan indikator yang diinginkan.

Pelaksanaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hasil evaluasi yang diberikan oleh Kementerian PANRB ini menjadi indikator sejauhmana pelaksanaan SPBE yang ada pada instansi pemerintah pusat maupun daerah, dari hasil evaluasi dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, aparatur sipil negara dan instansi pemerintah. Seluruh hal tersebut berdampak pada kelancaran pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika di Kota Bandung karena dukungan oleh perangkat daerah.

k. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan, dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyak jumlah koperasi yang aktif, maka diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan, menurunkan kemiskinan, serta menurunkan jumlah pengangguran. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi, koperasi aktif adalah koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), definisi Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut :

- Usaha Mikro memiliki memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Data Persentase koperasi aktif dan usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Bandung Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.67.

Tabel 2.67

Persentase Koperasi Aktif dan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Koperasi Aktif (%)	84,67	86,2	88,85	29,05	29,93
2	Jumlah Anggota Koperasi Aktif (orang)	553.593	553.593	555.094	119.947	142.411
3	Persentase Usaha Mikro dan kecil (%)	94,76	94,48	94,98	99,63	99,78
4	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	5.365	5.362	5.840	6.238	6.377
5	Jumlah Total Koperasi (Kop)	2.565	2.574	2.521	2.530	2.456
6	Jumlah Koperasi Aktif (Kop)	2.172	2.212	2.240	735	735
7	Jumlah Usaha Mikro	4.603	4.582	5.062	5.816	5.926

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Revitalisasi koperasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan dalam mengupayakan agar koperasi yang tidak aktif dapat menjadi koperasi aktif dan koperasi aktif menjadi koperasi yang lebih besar. Berdasarkan tabel tersebut diatas, diketahui bahwa persentase koperasi aktif selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan dari semula 84,67% (2016), naik menjadi 88,85% (2018). Namun persentasenya turun drastis di tahun 2019 hingga mencapai 29,05%. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah anggota koperasi, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan signifikan, hal tersebut karena menindaklanjuti program reformasi total koperasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, dimana salah satu strateginya adalah berorientasi pada peningkatan kualitas koperasi bukan pada peningkatan jumlah koperasi sehingga dinas melaksanakan pendataan ulang koperasi secara intensif dan diperoleh data Koperasi seperti tersebut di atas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lampiran huruf Q tentang Pemerintahan Daerah bahwa banyak Koperasi di Kota Bandung beralih kewenangan pembinaan pengawasan dan pemeriksaannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan atau pemerintah pusat.

Sama halnya dengan koperasi aktif, persentase Usaha Mikro dan kecil yang terdaftar di Kota Bandung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan hingga menjadi 99,78%. Hal ini karena adanya program penciptaan Wirausaha Baru (WUB) mulai tahun 2015. Adapun tahun 2020 banyak UMKM yang terdampak Covid-19 mengalami penurunan penjualan. Selanjutnya, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 1.012 UMKM.

Indikator kinerja pada Urusan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat dilihat pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68

Indikator Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020	
			Target	Realisasi								
1	Jumlah wirausaha baru	orang	8.362	2.162	1.000	1.000	600	600	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya	UMKM	N/A	N/A	100	100	270	270	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Jumlah PKL yang meningkat kemampuan usahanya	orang	N/A	N/A	200	252	200	277	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Persentase koperasi aktif	%	84.41	84.67	86.24	86.2	88.82	88.85	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Persentase koperasi sehat	%	25.20	25.40	26.23	26,65	27.14	27.22	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Jumlah lapangan kerja baru per koperasi	orang	980	N/A	730	730	750	750	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Jumlah Koperasi berkualitas	Koperasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30	30	11	11
8	Jumlah Koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian	Koperasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	150	150	95	95
9	Persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat	Persen	42.64	43.99	55.59	N/A	69.80	N/A	60	60	60	60
10	Jumlah Usaha Mikro yang usahanya meningkat	Mikro Usaha	N/A	N/A	100	100	270	270	240	240	200	200
11	Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat	%	37.76	33.86	51.49	N/A	65.88	N/A	60	60	60	60
12	Jumlah Usaha Non Formal yang kemampuan usahanya meningkat	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	200	365	100	147
13	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020	
			Target	Realisasi								
14	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80	78.60	85	86.94	85	85,09	82	82,08	82,25	87,25

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Perubahan indikator kinerja di lingkungan Dinas Koperasi UKM karena adanya perubahan kebijakan mencakup perubahan tupoksi, yaitu Perubahan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung menjadi Peraturan Wali Kota Nomor 1394 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung, adanya pemisahan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan menjadi Dinas Koperasi UKM dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan penyusunan Renstra tahun 2018 – 2023 yang mengacu pada RPJMD Kota Bandung tahun 2018 - 2023 disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan Kepala Daerah terpilih periode 2018 - 2023

Jumlah Wirausaha Baru merupakan salah satu indikator kinerja utama pada Renstra Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan tahun 2013-2018 yang dilaksanakan mulai tahun 2015 dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas usaha mikro kecil dan menengah yang berdaya saing. Indikator kinerja jumlah wirausaha baru mengacu pada Peraturan Walikota Bandung Nomor: 1090 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Percepatan Penciptaan WUB yang terbit pada tanggal 12 November 2015, terdapat delapan tahapan untuk penciptaan wirausaha baru di Kota Bandung sebagai berikut : a. Tahap sosialisasi; b. Tahap pendaftaran; c. Tahap seleksi penetapan peserta; d. *launching*; e. pelatihan; f. pendampingan; g. magang; dan h. gelar produk (pameran). Tahap sosialisasi WUB dimulai pada bulan Januari 2018 yang diselenggarakan di tingkat kelurahan di 30 Kecamatan. Sosialisasi dilaksanakan melalui media pamflet, spanduk, surat kabar dan radio. Ada 3 (tiga) bidang pelatihan dan pendampingan yang disesuaikan dengan keinginan calon wirausahawan yaitu kuliner, fesyen, dan kerajinan. Untuk kelanjutan program wirausaha baru dilakukan pembinaan dan fasilitasi kepada peserta yang sudah mendapatkan pelatihan dan menjadi wirausaha baru dengan pengembangan usaha para pelaku usaha yang baru memulai usahanya (*start up*) maupun para pelaku usaha yang sudah berjalan antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sehingga dapat meningkatkan kemampuan usahanya.

Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya merupakan salah satu indikator untuk mencapai sasaran meningkatnya Kualitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berdaya saing. Indikator jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya mengacu pada pasal 5 butir b Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Formulasi pengukuran indikator ini dengan mengukur peningkatan omzet dan asset. Indikator jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya berubah menjadi jumlah usaha mikro yang usahanya meningkat disesuaikan dengan kewenangan Dinas Koperasi UMKM yang fokus di pembinaan usaha mikro.

Indikator jumlah PKL yang meningkat kemampuan usahanya dengan formulasi pengukuran sesuai kriteria PKL yang sudah direlokasi dan atau diverifikasi usaha dan atau penataan setempat dan atau pengelolaan keuangan dan atau meningkatnya pendapatan dan atau pemasaran *online* PKL dan atau pembentukan organisasi (Perda Kota Bandung Nomor 4 tahun 2011 tentang

Penataan dan Pembinaan PKL). Pada tahun 2019, adanya perubahan menjadi Jumlah Usaha Non Formal yang Kemampuan Usahanya Meningkatkan sesuai dengan kewenangan Dinas Koperasi UMKM, dimana sasaran garapan dinas adalah Usaha Non Formal termasuk PKL sehingga indikator ini lebih menggambarkan kinerja dinas.

Persentase Koperasi aktif mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 25 Tahun 2015 tentang Revitalisasi Koperasi. Dengan adanya program Reformasi Total Koperasi yang salah satu strateginya lebih mengedepankan kualitas maka indikator kinerja menjadi koperasi berkualitas. Indikator Jumlah Koperasi Berkualitas mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Peningkatan Koperasi. Koperasi Berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Koperasi yang meningkat kualitasnya kriterianya adalah berdasarkan Koperasi yang sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan mengalami peningkatan volume (omzet) usaha dan asset.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Koperasi pada Pasal 5 disebutkan bahwa Ruang lingkup pengawasan koperasi salah satunya adalah Aspek penilaian kesehatan usaha simpan pinjam, dimana aspek ini meliputi: a. permodalan; b. kualitas aktiva produktif; c. manajemen; d. efisiensi; e. likuiditas; f. jati diri Koperasi; g. pertumbuhan dan kemandirian; dan h. kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk usaha simpan pinjam pola syariah. Indikator kinerja Persentase Koperasi Sehat mengalami perubahan tahun 2019 menjadi jumlah Koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian yang lebih menggambarkan kinerja tupoksi Pengawasan Koperasi sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi.

Indikator kinerja untuk jumlah koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi. Pada tahun 2019 memiliki target sebanyak 150 koperasi dan realisasi 150 koperasi dengan capaian kinerja 100%. Pada tahun 2020, indikator tersebut mengalami penurunan target indikator kinerja menjadi 95 koperasi dan realisasi 95 koperasi dengan capaian kinerja 100% penurunan ini dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 dengan diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Dengan terbitnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi maka indikator kinerja jumlah koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian akan di sesuaikan dengan peraturan tersebut.

Lapangan Kerja Baru perkoperasian memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pengelola koperasi/SDM serta meningkatkan usaha koperasi sehingga koperasi memiliki kualitas, kemandirian dan daya saing melalui penjangkaran diklat penciptaan lapangan pekerjaan baru. Pada tahun 2017, indikator ini memiliki target 730 orang dan realisasi 730 orang dengan capaian kinerja 100%. Pada tahun 2018, indikator ini memiliki target sebanyak 750 orang dan realisasi 750 orang.

Persentase SDM Koperasi yang Kualitasnya Meningkatkan dan persentase SDM Usaha Mikro adalah salah satu indikator kinerja urusan Koperasi UKM yang mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian serta Peraturan Menteri Koperasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan

bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Target tahun 2019 dan 2020 sebesar 60% dan terealisasi 60%. Hal tersebut berarti dari jumlah pengurus, pengawas dan pengelola koperasi serta pelaku usaha (UMKM) yang dilatih dapat meningkatkan kualitas SDM minimal 60% sehingga diharapkan dapat mendorong terhadap kinerja pengelolaan koperasi dan UMKM dalam aktivitas usahanya.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Perhitungan survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan dengan terbitnya peraturan baru mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2010, menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima, berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima dengan dilampiri dokumen bukti pendukung. Formulasi pengukuran indikator kinerja persentase temuan BPK/inspektorat yang diselesaikan adalah dengan membagi jumlah temuan yang diselesaikan dengan jumlah total temuan.

Target kinerja jumlah koperasi berkualitas, jumlah koperasi yang mentaati peraturan, jumlah pelaku usaha mikro yang meningkat usahanya, jumlah usaha non formal yang meningkat kemampuan usahanya, serta jumlah peserta diklat tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya hal ini karena adanya pandemi Covid-19 serta adanya upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19 dengan membatasi mobilitas masyarakat melalui PSBB dan PPKM sehingga berdampak pada penurunan kegiatan semua sektor usaha serta adanya *refocusing* anggaran. Secara umum capaian realisasi indikator kinerja Koperasi dan UMKM sama dan atau diatas target, hal ini tidak terlepas dari peran aktif Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan kualitas Koperasi dan kemampuan usaha bagi UMKM dalam menghadapi era digitalisasi.

I. Penanaman Modal

1) Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian di tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Kebijakan mengundang investor, terutama investor asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, juga agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia, khususnya di Kota Bandung. Gambaran mengenai jumlah investor PMDN/PMA di Kota Bandung selama kurun waktu 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.69.

Tabel 2.69

Jumlah Investor PMDN/PMA di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Investor PMDN/PMA	1172	2476	2057	539	721

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

2) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Semakin banyak realisasi proyek maka akan semakin menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan. Jumlah realisasi investasi PMDN/PMA di Kota Bandung kurun waktu 2016-2020 mengalami fluktuasi sesuai Tabel 2.70.

Tabel 2.70

Jumlah Investasi PMDN/PMA (Miliar) di Kota Bandung
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Investasi PMDN/PMA	13.640,8	12.700,4	14.349,4	8.436,1	18.263,47

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Pada Tahun 2020, jumlah investasi PMDN/PMA (Miliar) di Kota Bandung mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebanyak 216,49% yaitu Rp 18.263,47 miliar dari tahun 2019 sebesar Rp 8.436,1 miliar. Indikator lainnya pada Urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada Tabel 2.71.

Tabel 2.71

Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal
Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM	Poin	N/A	79,38	80,15	80,30	80,43
2	Rata-rata Waktu layanan Izin	Hari Kerja	N/A	10	8,2	5	3
3	Rata-rata Waktu Respon Pengaduan	Jam	N/A	4	4,75	2,43	1,55

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang dikelola dalam SIPD, 2020

m. Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat kota Bandung yang berkualitas. Pemuda merupakan generasi penerus, penanggung jawab dan pelaku pembangunan masa depan. Kekuatan bangsa di masa mendatang mencerminkan kualitas pemuda saat ini. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat dari jumlah, aktivitas pemuda dan organisasi pemuda yang aktif serta kegiatan keolahragaan dan jumlah organisasi olahraga. Banyaknya jumlah organisasi kepemudaan yang aktif menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan yang harus didukung dengan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintah dalam memberdayakan pemuda. Sampai dengan tahun 2019, terdapat 97 organisasi kepemudaan aktif dan 135 komunitas yang sering terlibat kemitraan kegiatan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Kota Bandung menjadi sangat layak disebut kota pemuda karena dari total jumlah penduduk Kota Bandung 2,4 juta jiwa lebih dari 45 persennya berusia 16 sampai 30 tahun, hal itu juga mendorong Kota Bandung merupakan kota pertama yang mempunyai peraturan daerah tentang kepemudaan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2016. Lebih dari itu, dengan keberpihakan kebijakan program Pemerintah Kota Bandung terhadap kepemudaan diwujudkan dengan dibangunnya berbagai fasilitas publik seperti *Bandung Creative Center* sebagai wadah komunitas-komunitas kreatif, *skate park*, taman film, taman musik dan taman-taman lainnya sebagai wadah penunjang kepemudaan.

Kondisi dan potensi keolahragaan di Kota Bandung menjadi kontributor terbesar baik atlet, pelatih maupun ofisial bagi prestasi olahraga Provinsi Jawa Barat. Prestasi olahraga Kota Bandung tergambar dalam raihan medali pada event olahraga prestisius, yaitu Porda, PON, Sea Games dan Asian Games seperti terlihat pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72

Prestasi Olahraga Kota Bandung

Uraian	Porda XIII 2018			Pon XIX 2016			Sea Games 2019			Asian Games 2018		
	Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu
Prestasi	131	149	139	63	50	56	2	5	14	3	1	2
Jumlah Atlet	949 Orang			307 Orang			52 Orang			52 Orang		
Jumlah Ofisial	462 Orang			131 Orang			8 Orang			43 Orang		
Jumlah Cabor	58 Cabor			44 Cabor			28 Cabor			26 Cabor		

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Khusus pembinaan olahraga prestasi terhadap bibit unggul, Kota Bandung selalu ikut serta dalam kegiatan pekan olahraga pelajar yang dilaksanakan setiap 2 tahun. Kota Bandung selalu menjadi juara umum dalam kegiatan tersebut. Indikator lainnya pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada Tabel 2.73.

Tabel 2.73

Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Wirausahawan baru kepemudaan yang berkembang	Orang	558	1.730	800	600	600
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan	Nilai	77.64	N/A	80	80,97	81,517
3	Jumlah Pemuda yang Mendapatkan Pembinaan	Orang	N/A	300	5.512	4.944	N/A
4	Jumlah Organisasi Pemuda yang Mendapatkan Pembinaan	OKP	N/A	N/A	N/A	9	N/A
5	Jumlah Medali Emas yang Diperoleh Dalam Kompetisi Tingkat Provinsi Jawa Barat	Medali	N/A	N/A	131	35	N/A
6	Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan Olahraga Masyarakat Secara Aktif	Kecamatan	N/A	N/A	15	30	N/A
7	Persentase Tempat Kegiatan Olahraga Masyarakat	Persen	N/A	N/A	N/A	100	90
8	Persentase Rata-rata Organisasi Pemuda dan Pemuda Yang Aktif Positif	Persen	N/A	N/A	N/A	0,029	0,003
9	Persentase Rata-rata Pembinaan Keolahragaan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	90
10	Persentase Infrastruktur Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berfungsi Baik	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	40

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang dikelola dalam SIPD, 2020

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2018 – 2023, maka terdapat perubahan nomenklatur pada program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dibandingkan dengan program kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Perubahan ini termasuk didalamnya perubahan pada indikator program dan kegiatan.

Penciptaan Wirausaha Baru (WUB) merupakan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014 hingga 2018 dengan realisasi sebanyak 3.463 wirausaha baru yang kemudian sejak tahun 2019 lebih difokuskan pada peningkatan kapasitas wirausahawan baru pada kelompok usia pemuda yang memiliki potensi dan peluang usaha berkembang lebih baik dengan realisasi sebanyak 600 orang.

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan di kota Bandung dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2016 – 2020 dengan rata-rata nilai 80,00 untuk Pelayanan Publik dan Profesionalitas Pemeliharaan pada Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan sehingga secara keseluruhan masuk dalam kategori Baik. Pada tahun 2017 dengan adanya perubahan SOTK baru berimbang dengan ditiadakannya nomenklatur program kegiatan yang mendukung pengukuran IKM.

Keterlibatan pemuda tidak hanya menjadi obyek, namun juga menjadi penggerak dan mitra yang setara dalam berbagai proses perencanaan kebijakan serta terlibat dalam pembangunan yang berdampak bagi kota Bandung. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan pembinaan terhadap pemuda dan organisasi kepemudaan secara berkelanjutan. Jumlah pemuda yang dibina melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas yang beragam pada tahun 2017 sebanyak 300 orang dan meningkat tajam sejak tahun 2018 sebanyak 5.512 orang dan 4.944 orang pada tahun 2019. Jumlah organisasi pemuda yang dibina sejak tahun 2019-2020 mencapai 14 organisasi kepemudaan. Sejak tahun 2020 pengukurannya menggunakan indikator baru yaitu Persentase Rata-rata Organisasi Pemuda dan Pemuda Yang Aktif Positif dengan realisasi 0,029 pada tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020 menjadi 0,003.

Pembangunan olahraga pada dasarnya merupakan suatu pelaksanaan perpaduan dari berbagai aspek dalam sistem keolahragaan dimana tingkat keberhasilan pembangunan olahraga sangat tergantung pada kualitas yang dihasilkan baik olahraga prestasi, pendidikan dan olahraga tradisional dengan dukungan pembinaan dan infrastruktur keolahragaan. Persentase kegiatan keolahragaan dimasyarakat pada tahun 2019 mencapai 100% yang tersebar di 30 kecamatan di Kota Bandung. Sementara untuk olahraga prestasi, perolehan medali emas yang diraih Kota Bandung dalam kompetisi tingkat provinsi Jawa Barat yaitu 131 Medali Emas dalam Ajang PORDA ke-XIII 2018 dan 35 Medali Emas dalam Ajang POPWILDA 2019, Try Out PPLPD Tingkat Jawa Barat, Liga Pendidikan Indonesia (LPI) 2019. Infrastruktur Kepemudaan dan Keolahragaan yang berfungsi baik pada tahun 2020 sebesar 40% pada tahun 2020, persentase ini didapat dari jumlah 14 SOR/GOR dan 3 Gelanggang Taruna (GT) yang terpelihara di kota Bandung.

n. Statistik

Instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan data/informasi statistik (dokumen statistik). Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan

evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Tabel 2.74 adalah ketersediaan dokumen statistik di Kota Bandung selama kurun waktu 2016-2020.

Tabel 2.74

Indikator Statistik Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Persentase data informasi yang berkualitas	N/A	N/A	35%	38,16%	45,23%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Indikator statistik Kota Bandung didukung oleh ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi data yang disampaikan melalui portal data yang dipublikasikan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 cenderung meningkat yang dimulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 karena adanya dukungan data-data informasi yang disampaikan oleh perangkat daerah sesuai dengan Permen tersebut.

o. Persandian

Indikator persandian dapat dilihat melalui persentase tingkat keamanan informasi/ data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2019 terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan dilakukannya pemeliharaan peralatan komunikasi untuk lingkup pimpinan, pemeliharaan sarana komunikasi dan dilakukannya pengamanan data sistem informasi berupa pengamanan data sandi dan keamanan sistem aplikasi. Pengukuran target dengan terpeliharanya peralatan komunikasi di lingkup pimpinan dan keamanan sistem informasi, tersedianya dukungan peralatan yang tersedia, sehingga memudahkan pengelola jaringan dan adanya tenaga ahli *security*, sehingga data dan informasi aman dan valid. Indikator persandian Kota Bandung tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.75.

Tabel 2.75

Indikator Persandian Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis e-government	N/A	N/A	36,00%	36,65%	40,20%
2	Cakupan persentase pengelolaan persandian dan aplikasi yang terkendali dan aman	N/A	N/A	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Indikator persandian Kota Bandung, terlihat dari indikator Cakupan aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis *e-government* yang dimulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 cenderung meningkat. Aplikasi yang dimiliki oleh perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik yang berbasis *e-governement* kepada masyarakat dan dapat diakses secara mudah. Sampai saat ini aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung jumlah total sebanyak 271 aplikasi, terdiri dari aplikasi perangkat daerah sebanyak 201 aplikasi dan perusahaan daerah sebanyak 70 aplikasi.

Aplikasi di Kota Bandung ada yang sudah terintegrasi, dan ada yang belum terintegrasi. Untuk aplikasi yang belum terintegrasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Ada aplikasi yang tidak memungkinkan untuk di integrasikan, hal ini disebabkan karena *data base* yang dimiliki aplikasi tersebut bersifat berdiri sendiri tidak membutuhkan data dari aplikasi lain, atau sebaliknya data aplikasi tersebut juga tidak dibutuhkan oleh aplikasi lain.

- b. Ada aplikasi yang masih dalam proses perencanaan untuk diintegrasikan, karena masih perlu dilakukan analisa data pada aplikasi-aplikasi yang akan diintegrasikan.

Adapun aplikasi yang sudah terintegrasi adalah sebanyak 88 (delapan puluh delapan) aplikasi, yang dibagi ke dalam 2 (dua) bidang layanan yaitu bidang layanan administrasi dan bidang layanan publik, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada Bidang Layanan Administrasi, aplikasi yang telah terintegrasi berjumlah 66 (Enam Puluh Enam) Aplikasi;
- 2) Pada Bidang Layanan Publik aplikasi yang telah terintegrasi berjumlah 22 (Dua puluh dua) Aplikasi.

Demikian pula dengan Jumlah perangkat daerah yang menggunakan persandian yang terkendali, hal ini terlihat cenderung meningkat karena sistem informasi yang dimiliki perangkat daerah atau website perangkat daerah selalu diaudit atau dianalisis tingkat keamanan (*vulnerability*) pada aplikasi, sehingga setelah dilakukan tindak lanjut perbaikan temuan celah keamanan, tingkat resiko keamanan pada aplikasi menjadi tidak ditemukan masalah keamanan.

p. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Tabel 2.76 merupakan gambaran indikator kinerja kebudayaan di Kota Bandung selama kurun waktu 2016-2020.

Tabel 2.76

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	26 buah	26 buah	N/A	N/A	N/A
2	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	160 kali	176 kali	N/A	N/A	N/A
3	Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	11,49%	11,49%	N/A	N/A	N/A
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	99	370	N/A	N/A	N/A
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	N/A	N/A	N/A	51,83	50,74
6	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	N/A	N/A	N/A	N/A	1,57%
7	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	N/A	N/A	N/A	N/A	1,31
8	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan dimanfaatkan	N/A	N/A	N/A	N/A	2,36
9	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	N/A	N/A	N/A	N/A	93,22

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Indikator sasaran strategis meningkatnya pemajuan kebudayaan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi direpresentasikan dengan indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indikator ini perlu diukur karena kebudayaan merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dimana saat ini menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terjadi kesenjangan perkembangan kebudayaan antar daerah di Indonesia. Indeks Pembangunan Kebudayaan adalah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan (Bappenas). Indeks Pembangunan Kebudayaan juga dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan pembangunan kebudayaan yang *knowledge-based*, dan menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor pembangunan kebudayaan.

Berdasarkan Tabel 2.80, capaian nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2020 mencapai 50,74 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu 51,83. Hal ini terjadi karena pandemi Covid-19 berdampak sangat berat terhadap banyak sektor kehidupan termasuk pada sektor budaya dimana terdapat banyak aktivitas yang membutuhkan mobilitas manusia dan aktivitas yang mengundang kerumunan. Dimensi ekonomi budaya mengalami penurunan cukup signifikan, hal ini karena pandemi berdampak pada industri budaya yang masih tidak dapat berjalan seperti biasa serta terdapat beberapa sektor budaya yang mengurangi jumlah SDM. Pandemi juga berdampak pada faktor ketahanan sosial budaya yang menyebabkan rasa aman berkurang karena makin maraknya kriminalitas. Hal ini diperparah dengan kondisi jejaring sosial yang semakin luntur di tengah masyarakat.

q. Perpustakaan

1) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Indikator efektivitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca di daerah. Pada tahun 2020 jumlah pengunjung perpustakaan daerah Kota Bandung tercatat sebanyak 2.646 orang. Indikator kinerja urusan perpustakaan Kota Bandung tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.77.

Tabel 2.77
Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Bandung
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengunjung Perpustakaan per Tahun (Orang)	54.181	91.287	112.743	151.119	2.646
2	Jumlah pustakawan (orang)	2	2	2	9	9
3	Persentase Pemustaka Pertahun	N/A	N/A	N/A	6,02%	2,65%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	N/A	N/A	82,61	83,30	83,61

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung perpustakaan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung tersebut diperoleh dari hasil perhitungan data jumlah pemustaka yang bersumber dari layanan Mobil Unit Perpustakaan Keliling (MUPK), layanan *Car Free Day*, layanan sekolah-sekolah, layanan event/pameran, layanan hari sabtu di Gedung Disarpus, dan yang paling utama adalah layanan setiap jam kerja di Disarpus Kota Bandung.

Peningkatan jumlah pengunjung tersebut tentunya karena didukung oleh sarana dan prasarana perpustakaan yang cukup memadai, dan juga peningkatan jumlah pustakawan yang berjumlah 9 orang pada tahun 2020. Selama Pandemi Covid-19 tahun 2020, layanan perpustakaan hanya diprioritaskan ke layanan digital e-pustaka, sehingga jumlah pengunjung perpustakaan pun mengalami penurunan dengan capaian 2.646 orang dan besaran persentase pemustaka pertahun sebesar 2,65% . Besaran persentase pemustaka tersebut tentunya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian jumlah pemustaka tahun 2019 sebanyak 151.119 orang dan besaran persentase sebesar 6,02% . Perhitungan persentase tersebut diperoleh melalui formulasi pengukuran jumlah pemustaka pada tahun berjalan dibagi jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun berjalan dikali 100%. Jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 126.500 , dan tahun 2020 sebanyak 138.400.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik layanan perpustakaan dan layanan kearsipan tentunya perlu dilaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan pelayanan pada pemustaka. Evaluasi tersebut dilaksanakan melalui pengukuran survei kepuasan masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, yang menghasilkan nilai indeks kepuasan masyarakat layanan perpustakaan dan kearsipan. Pada tahun 2018 sampai 2020, nilai indeks kepuasan masyarakat terus meningkat. Tahun 2020 nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 83,61 tergolong dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung dipersepsikan sangat baik oleh masyarakat penggunaanya khususnya dalam pencarian informasi yang dibutuhkannya.

2) Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Banyaknya koleksi buku yang tersedia pada perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Selain itu juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan. Secara terperinci mengenai koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah selama kurun waktu 2016-2020 dapat terlihat pada Tabel 2.78.

Tabel 2.78

Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	65.578	70.578	79.628	105.446	110.487

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Jumlah koleksi buku yang tersedia di Dinas Arsip dan Perpustakaan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berjumlah 506.083 buku, dengan berbagai jenis koleksi yaitu koleksi monograf, yang terdiri dari koleksi buku matematika dan ilmu pengetahuan alam, koleksi buku ilmu praktis, dan koleksi buku ilmu pengetahuan umum. Serta koleksi digital e-Pustaka yang bersumber dari pengadaan bahan pustaka rutin tahunan. Untuk koleksi monograf selain bersumber dari pengadaan rutin, juga bersumber dari hibah instansi maupun perorangan.

r. Kearsipan

Kearsipan (*filing*) adalah sesuatu proses pengaturan dan penyimpanan bahan-bahan secara sistematis, sehingga bahan-bahan tersebut dengan cepat dapat dicari atau diketahui tempatnya setiap kali diperlukan. Pengertian arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pelaksanaan penyimpanan arsip, pada pokoknya dikenal 4 (empat) macam sistem penyimpanan arsip yaitu:

- a) Penyimpanan arsip menurut abjad
- b) Penyimpanan menurut wilayah
- c) Penyimpanan menurut nomor
- d) Penyimpanan menurut tanggal

Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku, pada tahun 2020 target yang ditetapkan adalah sebesar 10% (6 OPD) dan terealisasi sebesar 11,66% (7 OPD). Adapun 7 Perangkat Daerah yang dimaksud, adalah:

1. Kecamatan Babakan Ciparay;
2. Kecamatan Bandung Wetan;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
4. DPPKB;
5. DPMPTSP;
6. Kecamatan Buahbatu; dan
7. Kecamatan Mandalajati.

Untuk menunjang pengelolaan arsip secara baku perlu ditunjang oleh SDM Arsiparis. Adapun data indikator kearsipan di Kota Bandung dalam kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.79.

Tabel 2.79
Indikator Kearsipan di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Arsiparis	4	3	3	4	14
2	Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Kearsipan Secara Baku	N/A	N/A	N/A	21,67%	11,66%
3	Cakupan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Perpustakaan dan Kearsipan	N/A	N/A	N/A	100%	100%
4	Cakupan Sistem Informasi Perpustakaan dan Kearsipan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Dalam upaya mendorong para pengelola arsip perangkat daerah untuk dapat mengelola arsip yang diciptakan sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan, maka dilakukan pembinaan kearsipan kepada 60 Perangkat Daerah di Kota Bandung. Pada tahun 2019, persentase perangkat daerah yang menyelenggarakan kearsipan secara baku sebesar 21,67% dengan jumlah perangkat daerah yang telah dibina berjumlah 13 perangkat daerah. Dibandingkan dengan tahun 2020, terdapat perbedaan capaian kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Kearsipan Secara Baku. Pada tahun 2020, persentase perangkat daerah yang menyelenggarakan kearsipan secara baku sebesar 11,66% dengan jumlah perangkat daerah yang telah dibina berjumlah 7 perangkat daerah.

Hasil persentase tersebut diperoleh melalui formulasi pengukuran Jumlah Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Kearsipan Secara Baku dibagi Jumlah Perangkat Daerah se-Kota Bandung sebanyak 60 Perangkat Daerah dikali 100%. Pengukuran terhadap Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Kearsipan Secara Baku, berdasarkan pada Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, dengan kriteria :

1. Pengelolaan Arsip Dinamis di OPD;
2. Terdapat SDM dalam pengelolaan kearsipan; dan
3. Terdapat Sarana dan Prasarana Kearsipan.

Kegiatan pengelolaan kearsipan dilaksanakan oleh tenaga pengelola kearsipan dan arsiparis yang berkompeten di bidang kearsipan. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terdapat peningkatan jumlah arsiparis Dinas Arsip dan Perpustakaan pada tahun 2020 sebanyak 14 orang.

Dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat dan pengelolaan arsip yang baik menurut kaidah kearsipan yang berlaku, perlu dilaksanakan pengembangan kualitas sumber daya perpustakaan dan kearsipan. Kegiatan pengembangan tersebut berfokus pada sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan, sumber daya manusia perpustakaan dan kearsipan dalam hal ini tenaga pengelola perpustakaan dan kearsipan, serta menjalin kerjasama dengan berbagai *stakeholders*, yaitu Perangkat Daerah, Organisasi, Instansi/Lembaga terkait, dan masyarakat. Adapun kegiatan pengembangan yang dilaksanakan yaitu berupa kajian peraturan perundangan tentang kearsipan, kegiatan festival dan jambore budaya baca, kegiatan kajian Indeks Baca Kota Bandung, dan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia perpustakaan dan kearsipan melalui bimbingan teknis dan *workshop*.

Pada tahun 2020 capaian kinerja Pengembangan Kualitas Sumber Daya Perpustakaan dan Kearsipan sebesar 100%. Capaian tersebut diukur melalui jumlah kegiatan pengembangan yang dilaksanakan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 3 kegiatan yang terdiri dari festival dan jambore budaya baca, kajian indeks baca Kota Bandung, dan kajian peraturan perundangan tentang kearsipan.

Perkembangan teknologi informasi Dinas Arsip dan Perpustakaan sudah mulai dilaksanakan dengan membuat beberapa sistem informasi perpustakaan dan kearsipan yang bertujuan untuk mempermudah layanan perpustakaan dan kearsipan baik kepada masyarakat maupun pada pengelolaan pustaka dan arsip. Sistem informasi perpustakaan dan kearsipan tersebut yaitu :

- Urusan perpustakaan
 1. INLIS Lite (*Integrated Library System*)
 2. SI INTAN (Sistem Informasi Integrasi Perpustakaan dan Taman Bacaan)
 3. e-Pustaka Bandung
- Urusan kearsipan
 1. SIKS (Sistem Informasi Kearsipan Statis)
 2. SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis)
 3. Aplikasi Depo Arsip (Arsip Vital)

2.3.3. Urusan Pilihan

Fokus layanan urusan pilihan dilakukan melalui analisis kinerja atas indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi urusan kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; perdagangan, dan perindustrian.

a. Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan di Kota Bandung, terbagi ke dalam dua jenis, yaitu budidaya ikan konsumsi dan budidaya ikan hias. Keterbatasan lahan dan lingkungan padat penduduk menjadi tantangan dalam pengembangan perikanan ikan tawar, sehingga jenis perikanan ini sebagian besar hanya dilakukan dalam pembudidayaan skala kecil. Tabel 2.80 merupakan tabel perkembangan indikator kinerja perikanan Kota Bandung Tahun 2016-2020.

Tabel 2.80

Indikator Kinerja Perikanan Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Perikanan	101,16%	100,02%	100,02%	100,38%	100,00%
2	Konsumsi ikan	102,53%	106,08%	103,11%	106,02%	105,98%
3	Produksi Ikan Konsumsi	2.965 ton	2.970,7 ton	2.970,63 ton	2.981,27 ton	1.921,09 Ton
4	Bertambahnya jumlah pelaku usaha bidang perikanan	N/A	N/A	N/A	85 orang	30 orang

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Pada tahun 2015-2020, nilai capaian produksi perikanan dan konsumsi ikan selalu melebihi dari target yang ditetapkan. Namun demikian, pada tahun 2020 peningkatan produksi ikan konsumsi (1.921,09 ton) mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun sebelumnya yaitu 2.981,27 ton. Hal tersebut terjadi karena dampak pandemik Covid-19 yang mempengaruhi aktivitas produksi sehingga produktivitas berkurang.

b. Pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara ke Kota Bandung semakin mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan antara lain oleh semakin meningkatnya infrastruktur kota dan peningkatan promosi pariwisata. Adapun kinerja urusan pariwisata kurun waktu 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.81.

Tabel 2.81Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata di Kota Bandung
Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan wisata (%)	122	102	108,98	113,14	38%
2	Lama kunjungan Wisata (hari)	N/A	N/A	2,21	2,21	1,7
3	PAD sektor pariwisata (%)	30	26	27,80	35,80	24%
4	Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	100
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	N/A	N/A	N/A	83,75
6	Indeks Brand Awareness	N/A	N/A	N/A	3,52	3,2
7	Persentase daya tarik wisata dikembangkan	N/A	N/A	N/A	25	25%
8	Persentase jasa usaha pariwisata berstandar baik	N/A	N/A	N/A	46,09	12,80
9	Persentase lembaga dan SDM Pariwisata meningkat kompetensinya (kriteria kompetensi sertifikasi)	N/A	N/A	N/A	2,58	3,4
10	Persentase rancangan kebijakan berbasis riset (<i>evidence based policy</i>)	N/A	N/A	N/A	N/A	80
11	Persentase rumah / kampung kreatif / inkubasi / berkembang	N/A	N/A	N/A	3,33	43,33
12	Persentase industri usaha jasa pariwisata mendapat stimulus	N/A	N/A	N/A	N/A	9,77

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Persentase kunjungan wisata di Kota Bandung dari tahun 2016-2019 selalu mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan, pada tahun 2019 mencapai 113,14%. Rata-rata lama kunjungan wisata di Kota Bandung dari tahun 2016-2019 mencapai 2 hari. Namun demikian, pada tahun 2020 terjadi perlambatan dalam capaian kunjungan wisata dan lama kunjungan wisata serta penerimaan PAD terkait sektor kepariwisataan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena Kota Bandung sebagai salah satu tujuan kota wisata terdampak akibat pandemik Covid-19 yang sampai saat ini masih terjadi dan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku.

c. Pertanian

1) Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produktivitas tanaman pangan adalah kemampuan suatu tanah untuk menghasilkan tanaman pangan yang sedang diusahakan dengan sistem pengelolaan tertentu, termasuk didalamnya proses produksi. Walaupun Kota Bandung bukan merupakan daerah sentra produksi pertanian akan tetapi masih berpotensi untuk menghasilkan produk pertanian, seperti padi dan palawija. Dari data di lapangan, diketahui bahwa sentra produksi padi di Kota Bandung adalah Kecamatan Ujungberung, Rancasari, Cibiru, Cinambo, Gedebage, Buahbatu, dan Arcamanik. Untuk produktivitas padi per hektar Kota Bandung tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.82.

Tabel 2.82
Produktivitas Padi Per Hektar Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produktivitas padi per hektar (ton/ha)	6.805	6.808	6.808	6.808	6.823

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa produktivitas tanaman padi cenderung meningkat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dimana pada tahun 2020 sebanyak 6.823 ton/Ha.

2) Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Mengingat Kota Bandung bukan merupakan daerah sentra produksi pertanian, kehutanan, dan perikanan, maka kontribusi sektor tersebut terhadap pencapaian PDRB Kota Bandung pun nilainya cukup kecil. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Bandung dalam kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.83.

Tabel 2.83
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Bandung
Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	0,12%	0,12%	0,11%	0,10%	0,10%

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Kota Bandung dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 senilai 0,12% namun pada tahun 2020 menjadi 0,10%. Hal tersebut disebabkan karena luas lahan produksi sektor pertanian dari tahun ke tahun mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi areal fungsi lainnya yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi sesuai karakteristik kebutuhan di wilayah perkotaan misalkan areal komersial, hunian, perkantoran, dll. Indikator lainnya pada Urusan Pertanian dapat dilihat pada Tabel 2.84.

Tabel 2.84
Indikator Kinerja Urusan Pertanian
Di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Pertanian	Orang	N/A	N/A	N/A	102	45
2	Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Peternakan	Orang	N/A	N/A	N/A	81	32
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	N/A	N/A	N/A	84	90,03
6	Produksi Tanaman Sayuran	Pohon	N/A	N/A	N/A	813.880	767.340
7	Produksi Tanaman Hias	Pohon	N/A	N/A	198.959	412.144	163.895

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
8	Jumlah Penanaman Pohon Buah-buahan	Pohon	N/A	N/A	N/A	53.869	20.717
9	Persentase Kualitas bahan baku tembakau	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100
10	Populasi Ternak Domba	Ekor	N/A	34.684	35.702	36.793	37.844
11	Produksi Ikan Hias	Ekor	N/A	N/A	1.222.000	1.823.200	1.282.278
12	Produksi Ikan Konsumsi	Ton	2.965	N/A	2.970	2.981,27	1.921,05
13	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kapita/tahun	N/A	N/A	37,95	40,23	40,24

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

d. Perdagangan

Nilai ekspor perdagangan Kota Bandung pada tahun 2020 adalah sebesar US\$ 321,26 juta, dihitung berdasarkan atas penerbitan surat keterangan asal komoditi yang merupakan rekomendasi yang menyatakan barang tersebut diproduksi di Kota Bandung. Tabel 2.85 merupakan gambaran mengenai ekspor perdagangan Kota Bandung selama kurun waktu 2016-2020.

Tabel 2.85

Ekspor Bersih Perdagangan Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ekspor perdagangan (\$ juta)	609	465	465	466	321,26

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Indikator lainnya pada Urusan Perdagangan dapat dilihat pada Tabel 2.86.

Tabel 2.86

Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	N/A	N/A	81,05	82,55	83,46
2	Nilai Ekspor	Juta US\$	609	465	465	466,159	321,26
3	Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	N/A	0,27	13,74	9,22	8,49
4	Cakupan pembinaan e-commerce	Pelaku Usaha	N/A	100	150	150	N/A
5	Meningkatnya kualitas pelaku perdagangan dalam negeri	Pelaku Usaha	N/A	385	300	255	N/A
6	Meningkatnya Alat UTTP yang ditera dan ditera ulang	Alat UTTP	N/A	N/A	N/A	124.646	190.063
7	Informasi mengenai barang kena cukai ilegal	Merk Rokok	N/A	N/A	10	15	16
8	Nilai daya saing perdagangan e-commerce	Poin	N/A	N/A	N/A	361,44	401,60
9	Nilai daya saing perdagangan	Poin	N/A	N/A	N/A	360,59	460,59

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

e. Perindustrian

Kota Bandung memiliki potensi industri, baik industri skala menengah atau kecil. Pada tahun 2020, berdasarkan unit usaha terdapat 1.433 industri menengah dan 2.561 industri kecil formal di Kota Bandung. Adapun berdasarkan tenaga kerja, pada industri menengah terdapat 82.073 orang dan industri kecil formal sebanyak 21.389 orang, sebagaimana potensi sektor industri di Kota Bandung tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.87.

Tabel 2.87

Potensi Sektor Industri di Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Unit Usaha	Tenaga Kerja								
1	Industri Menengah	N/A	N/A	835	27.263	321	35.063	334	35.507	1.433	82.073
2	Industri Kecil Formal	N/A	N/A	2.932	46.540	3.722	70.285	3.723	70.287	2.561	21.398

Sumber: Disdagin Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa untuk industri besar tidak terdapat data unit usaha dan tenaga kerja karena pembinaannya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, sedangkan industri kecil dan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2015. Industri kecil formal dan non formal di Kota Bandung merupakan sektor industri terbesar dalam jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja. Adapun data rinci sektor industri kecil dapat dilihat pada Tabel 2.88.

Tabel 2.88

Potensi Sektor Industri Kecil di Kota Bandung Tahun 2016- 2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Unit Usaha	Tenaga Kerja								
1	Industri Kecil Pangan	518	2.214	516	2.210	423	3.227	425	3.258	425	3.258
2	Industri Kecil Sandang	1.237	6.253	1.273	6.253	814	8.770	814	8.770	814	8.770
3	Industri Kecil Kimia dan Bahan Bangunan	36	124	36	124	99	700	100	702	101	708
4	Industri Kecil Logam dan Elektronika	222	451	222	451	165	1.224	165	1.224	165	1.224
5	Industri Kecil Kerajinan	711	3.762	711	3.762	11	75	11	75	11	75

Sumber: Disdagin Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Indikator lainnya pada Urusan Industri dapat dilihat pada Tabel 2.89.

Tabel 2.89

Indikator Kinerja Urusan Industri di Kota Bandung Tahun 2016- 2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Industri Kecil Menengah Tersertifikasi	IKM	N/A	600	410	350	476
2	Jumlah industri Kecil Menengah yang meningkat daya saingnya	IKM	N/A	N/A	N/A	280	283
3	Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang meningkat kemampuannya dalam proses produksi	Pelaku Usaha	N/A	N/A	N/A	250	150
4	Jumlah Sentra Industri yang meningkat daya saingnya	Sentra	N/A	N/A	N/A	1	4

2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sekretariat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat yang berupa angka. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan

masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menjelaskan definisi dan beberapa unsur penilaian SKM kategori baik dengan nilai interval 76,61-88,30. Adapun kriteria IKM Baik dalam Perencanaan Strategis Kota Bandung adalah minimal 83,00. Pada tahun 2020 Perangkat Daerah dengan Nilai IKM “Baik” (minimal 83) terdapat 58 Perangkat Daerah atau 96,67% dari target 70,00%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 138,10%. Realisasi ini meningkat 56,67% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 40% pada 24 Perangkat Daerah. Secara riil jumlah SKPD yang memperoleh nilai IKM diatas 83 meningkat sebanyak 34 Perangkat Daerah dibanding tahun 2019.

3 - 38 LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2020 Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Bandung telah pula mengamanatkan pelayanan publik yang berorientasi pada Kepuasan masyarakat dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yang hasilnya diperoleh melalui melalui pengukuran kepuasan pelayanan masyarakat kota pada seluruh unit layanan SKPD. Survei pelayanan publik pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung, mencakup pelayanan langsung dan tidak langsung kepada masyarakat, terdiri dari 9 (sembilan) unsur meliputi persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan serta tindak lanjut, sarana dan prasarana. Atas dasar Rekomendasi DPRD Kota Bandung dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan langkah-langkah konkrit berupa:

- a. Fasilitasi Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk melakukan SKM setiap semester, bahwa survei dilakukan oleh pemberi layanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan), atau 6 (enam) bulan (semester) atau minimal 1 (tahun) sekali.
- b. Melakukan upaya penyeragaman metode survei melalui 9 Unsur Pelayanan;
- c. Pengumpulan data SKM melalui aplikasi e-SKM (skm.bandung.go.id).

Data capaian kinerja pelayanan publik pada perangkat daerah di Kota Bandung, sebagaimana Tabel 2.90.

Tabel 2.90
Daftar Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	IKM
1	Sekretariat Daerah	87,818
2	Dinas Tenaga Kerja	85,833
3	Dinas Pemuda dan Olah Raga	81,517
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	84,722
5	Satuan Polisi Pamong Praja	83,092
6	Dinas Pangan dan Pertanian	90,028
7	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	87,246
8	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	84,160
9	Dinas Pekerjaan Umum	83,007
10	Dinas Penataan Ruang	85,002
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	83,755
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,800
13	Dinas Perhubungan	91,846
14	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	86,370
15	Dinas Kesehatan	83,611
16	Dinas Pendidikan	83,882
17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	85,139
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	84,865

NO	PERANGKAT DAERAH	IKM
19	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan	91,166
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	83,611
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	83,462
22	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan	84,444
23	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	87,103
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	85,260
25	BPPD	90,789
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90,417
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	91,770
28	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	84,412
29	Kec. Bbk. Ciparay	82,937
30	Kec. Cidadap	84,074
31	Kec. Bojongloa Kidul	83,278
32	Kec. Bandung Kulon	83,167
33	Kec. Antapani	86,019
34	Kec. Mandalajati	83,696
35	Kec. Arcamanik	84,333
36	Kec. Ujungberung	85,963
37	Kec. Cibiru	84,665
38	Kec. Panyileukan	88,074
39	Kec. Rancasari	89,757
40	Kec. Buahbatu	84,584
41	Kec. Bandung Kidul	90,972
42	Kec. Cinambo	86,426
43	Kec. Gedebage	86,296
44	Kec. Astanaanyar	86,111
45	Kec. Sukasari	91,996
46	Kec. Sukajadi	83,177
47	Kec. Cicendo	86,618
48	Kec. Andir	84,314
49	Kec. Coblong	87,889
50	Kec. Bdg Wetan	83,088
51	Kec. Smr Bandung	83,824
52	Kec. Cbny Kaler	84,778
53	Kec. Cbny Kidul	84,375
54	Kec. Kiaracondong	83,230
55	Kec. Batununggal	86,325
56	Kec. Lengkong	83,016
57	Kec. Regol	86,303
58	Kec. Bjl Kaler	89,756
59	Inspektorat Kota	85,470
60	Sekretariat DPRD	83,750

Sumber: LKPJ Kota Bandun yang dikelola dalam SIPD, 2020

Hasil pengukuran kinerja Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik (minimal 83,00) pada tahun 2020 terealisasi sebesar 96,67% atau sebanyak 58 dari 60 Perangkat Daerah dengan jumlah responden sebanyak 5.776 orang. Bila diukur dari target tahun 2020 sebesar 70% maka capaian kinerjanya melebihi dari target sebesar 26,67%. Capaian kinerja ini meningkat 50,67% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 dimana persentase Perangkat daerah yang memiliki nilai minimal 83,00 adalah sebesar 40,00% atau 24 dari 60 Perangkat Daerah. Survei pelayanan publik pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung, mencakup pelayanan langsung dan tidak langsung kepada masyarakat, terdiri dari 9 unsur meliputi persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah

tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan serta tindak lanjut, sarana dan prasarana.

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Hasil evaluasi AKIP menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil. Capaian kinerja AKIP Kota Bandung pada tahun 2020 berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/293/AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar 78,97 atau kategori BB sedangkan target kinerjanya adalah kategori A (minimal 80,01) dengan capaian kinerja kualitatif dikuantifikasi sebesar 98,70% dan meningkat sebesar 0,97 poin bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 78,00. Untuk capaian realisasi AKIP Kota Bandung tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.91.

Tabel 2.91

Capaian Realisasi AKIP Kota Bandung Tahun 2016-2020

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	2016	2017	Nilai 2018	2019	2020
1	Perencanaan Kinerja	30	24,82	25,41	25,57	25,35	25,39
2	Pengukuran Kinerja	25	20,67	19,96	20,01	18,48	18,60
3	Pelaporan Kinerja	15	11,89	12,60	12,61	11,34	11,78
4	Evaluasi Kinerja	10	7,47	7,00	7,02	7,60	7,74
5	Capaian Kinerja	20	15,76	15,40	14,84	15,23	15,45
	Nilai Hasil Evaluasi	100	80,61	80,37	80,05	78,00	78,97
	Kategori Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A	A	BB	BB

Sumber: Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KEMENPANRB Tahun 2021

Hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. EKPPD 2019 terhadap LPPD Tahun 2018 yang dituangkan dalam Piagam Penghargaan tanggal 25 April 2020 adalah sebesar 3,4013 dengan Kategori Sangat Tinggi, capaian ini sesuai dengan target Tahun 2020 atau capaian kinerja sebesar 100,00%, dan sama kategori Sangat Tinggi bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 dengan nilai 3,3019. Dari data tersebut capaian LPPD pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,0994 poin, sebagaimana bahwa capaian indikator kinerja urusan Sekretariat Daerah Tahun 2016-2020 dapat terlihat pada Tabel 2.92.

Tabel 2.92

Capaian Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Daerah
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai LPPD	Nilai	2,9919	3,3040	3,4144	3,3019	3,4013
2	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	100	100	100	128	147
3	Rata-rata IKM Kota Bandung	Angka	80	82,02	82,88	N/A	N/A
	Nilai IKM "Baik" (minimal 83)	%	N/A	N/A	N/A	40,00	96,67
4	Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Komponen Pelaporan Kinerja	Angka	11,89	12,60	12,61	11,34	11,78
5	Rasio Berita Baik dan Berita Buruk	%	N/A	86,14	82,18	82,96:17,04	97,70:2.30
6	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	N/A	N/A	80,05	78,00	78,97
7	Terlaksananya Penerimaan Tamu Negara, Pemerintah/ Departemen /Lembaga	%	100	100	100	100	100
8	Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi serta kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100
9	Persentase Penataan Batas Daerah dan Batas Wilayah	%	100	100	100	100	100
10	Persentase Kecamatan Berkinerja Baik	%	N/A	N/A	N/A	N/A	63,33
11	Persentase pengendalian kualitas pembangunan daerah		N/A	100	100	100	100
12	Cakupan kegiatan Bidang Sosial Keagamaan yang terfasilitasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100
13	Persentase Implementasi kerja sama lingkup dalam dan luar negeri	%	N/A	N/A	N/A	N/A	111,8
14	Persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari TJSJ dan Sumbangan Pihak Ketiga	%	N/A	N/A	N/A	100	100

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
15	Persentase BUMD yang tercapai kinerjanya (keterangan: masing masing bumd diberikan taget kinerja sesuai dengan tujuan dibentuknya)	%	N/A	N/A	N/A	N/A	40
16	Persentase permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Perekonomian yang diselesaikan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100
17	Persentase Rancangan Kebijakan bidang Sosial kemasyarakatan yang ditindaklanjuti dan Cakupan kegiatan Bidang Kesra yang terfasilitasi	%	N/A	N/A	N/A	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Capaian kinerja indikator Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mencapai target sesuai dengan yang ditentukan. Pada tahun 2019 dan 2020, kinerjanya melebihi target yang telah ditentukan. Produk hukum tersebut diantaranya Raperda, Raperwal, Rakepwal dan jumlah penanganan perkara.

Analisa rasio berita baik dan buruk dapat menandai bagaimana kinerja suatu instansi dalam mengambil langkah ketika dihadapkan pada media krisis dimana Pemerintah Kota dituntut untuk menjaga citra baik Kota. Rasio memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Bandung dalam menyampaikan atau mensosialisasikan program pembangunan Kota kepada Masyarakat. Ada pun Rasio berita baik berbanding dari rasio berita buruk tahun 2020 yaitu 97,70:2.30.

Pada tahun 2019 capaian indikator kinerja Persentase Penataan Batas Daerah dan Batas Wilayah terealisasi sebesar 100% dengan output kegiatan 1 dokumen penataan batas daerah dan batas wilayah. Pada tahun 2020 capaian persentase penataan batas terealisasi sebesar 100% dengan output dokumen kegiatan dalam pelaksanaan pemasangan patok sebanyak 51 titik terdiri dari:

- a. Kota Bandung – Kab. Bandung 42 titik
- b. Kota Bandung – Kab. Bandung Barat 3 titik
- c. Kota Bandung – Kota Cimahi 6 titik

Indikator kinerja persentase Kecamatan Berkinerja Baik dilaksanakan melalui penilaian Evaluasi Kinerja (Evkin) Camat dan Lurah. Periode pelaksanaan penilaian Evkin Camat dan Lurah tahun 2020 dimulai 1 November 2019 s.d. 31 Oktober 2020. Hasil penilaian Evkin Camat tahun 2020 berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 138/Kep.236-Pem/2021 tentang Penetapan Peringkat Hasil Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah Tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Kategori Berkinerja Baik: 19 Kecamatan (63,33%);
- b. Kategori Berkinerja Sedang: 11 Kecamatan (36,67%); dan
- c. Kategori Berkinerja Rendah: 0 Kecamatan (0%).

Indikator Persentase Pengendalian Kualitas Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui monitoring terhadap pekerjaan infrastruktur Perangkat Daerah yang strategis dan prioritas terealisasi sebesar 100% mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Adapun yang dimaksud dengan realisasi 100% diindikasikan melalui terkendalinya pembangunan infrastruktur strategis dan prioritas melalui monitoring dan evaluasi pekerjaan infrastruktur perangkat daerah berdasarkan rencana dengan pelaksanaan pekerjaannya sebagai bahan kebijakan.

Indikator cakupan kegiatan bidang sosial keagamaan yang terfasilitasi diupayakan melalui Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, pada tahun 2020 terealisasi sebesar 100% yang terdiri dari:

- a. Kegiatan Safari Minggu, safari Jum'at dan Safari Ramadhan;
- b. Kegiatan Pembinaan Guru Keagamaan;
- c. Kegiatan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Masjid Agung Al-Ukhuwah;
- d. Kegiatan Kajian tentang Monitoring dan Evaluasi kegiatan Sosial Keagamaan; dan
- e. Kegiatan Pelaksanaan hibah (laporan Hibah).

Kerjasama luar negeri yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Bandung menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan 2018 tetapi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan tren penurunan, dan sampai dengan tahun 2020 telah terlaksana sebanyak 41 kerjasama.

Sasaran persentase realisasi program/agenda 7 bidang prioritas pembangunan yang dibiayai dari Program TJSJ dan Sumbangan Pihak Ketiga, pada tahun 2019 dan 2020 terealisasi sebesar 100%, diukur dari terpenuhinya 7 bidang prioritas pembangunan oleh kegiatan program/kegiatan TJSJ Perusahaan sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Jumlah Perusahaan yang Memberikan Sumbangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sumbangan Pihak Ketiga.

Pembinaan teknis BUMD meliputi organisasi, manajemen, keuangan, kepengurusan, pendayagunaan asset, pengembangan bisnis dan melakukan Monev Kinerja BUMD. Adapun target indikator Persentase BUMD yang Tercapai Kinerjanya adalah melakukan pembinaan teknis kepada BUMD untuk meningkatkan profitnya dimana target tersebut adalah 40% BUMD yang profitnya meningkat setiap tahun dari jumlah BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung saat ini yaitu 5 BUMD (PDAM Tirtawening Kota Bandung, PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung, PD. Kebersihan Kota Bandung, Perumda BPR Kota Bandung, dan PT. Bandung Infra Investama Kota Bandung).

Persentase Permasalahan Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Perekonomian yang diselesaikan di bidang pengadaan barang/jasa pada tahun 2020 sebesar 100%, dengan rincian program pengadaan barang dan jasa daerah 100%, Kegiatan Pengelolaan Barang/Jasa 100%, Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 70 Paket Pekerjaan, Penyelenggaraan Elektronik *Procurement* di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung 97 Paket, Bandung *Integrated Resources Management System* (BIRMS) sebanyak 6002 paket, kegiatan fasilitasi pembinaan pengadaan barang dan jasa 4 dokumen.

b. Sekretariat DPRD

Indikator kinerja dari unsur Sekretariat DPRD selama tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.93.

Tabel 2.93
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sekretariat DPRD
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung kepada Sekretariat DPRD Kota Bandung terhadap Fasilitasi Kebutuhan Kerja DPRD	%	80	80	80	81,5	85
2	Rata-rata waktu Fasilitasi Penyampaian Aspirasi Masyarakat ke Anggota DPRD melalui Komisi-komisi	Menit	100	90	120	90	85

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan tabel di atas, untuk target Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD pada periode Tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami stagnansi. Hal ini dikarenakan masih terkendalanya mekanisme dalam peningkatan pencapaian nilai Indeks Kepuasan serta kompleksnya karakter dari masing-masing para Anggota DPRD. Pada tahun 2019, mulai dicoba pelaksanaan pencapaian target yang dilakukan melalui peningkatan secara bertahap. Pada Indikator yang kedua, pelaksanaan fasilitasi terhadap penyampaian aspirasi masyarakat kepada dewan masih fluktuatif dikarenakan kendala sarana pendukung dalam fasilitasi.

2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Perencanaan

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah, diantaranya: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tabel 2.94 merupakan gambaran capaian kinerja unsur penunjang perencanaan tahun 2016-2020.

Tabel 2.94
Capaian Indikator Kinerja Unsur Penunjang Perencanaan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	1 dok				
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	1 dok				
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	1 dok				
4	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%	100%	100%	100%	100%
5	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	24,82	25,41	25,41	25,57	25,35
6	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	20,67	19,96	19,96	20,01	18,48
7	Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	79%	66%	68%	80%	76,19%
8	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	75,13	77,18	77,92	79,72	84,41

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
10	Jumlah Rancangan RKPD Tingkat Kota	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
11	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dok	2 Dok	2 Dok	3 Dok	2 Dok
12	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumberdaya Keuangan dan Sumber Daya Alam	9 Dok	7 Dok	17 Dok	4 Dok	4 Dok
13	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	6 Dok	3 Dok	7 Dok	3 Dok	3 Dok
14	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkun Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	7 Dok	4 Dok	14 Dok	3 Dok	3 Dok
15	Persentase Rekomendasi hasil Monev yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	100%	100%	100%
16	Persentase Dokumen Pelaporan Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
17	Capaian Penggunaan DBHCHT di Kota Bandung sesuai aturan	100 %	100 %	100 %	100%	100%

Sumber: Bappelitbang Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan Tabel 2.94, dapat dilihat bahwa nilai SAKIP komponen perencanaan dan pengukuran kinerja cenderung menurun. Berdasarkan hasil evaluasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/293/AA.05/2021 tentang Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020, penurunan tersebut disebabkan antara lain karena target kinerja RPJMD belum seluruhnya dikawal oleh Perangkat Daerah pengampu kinerja. Selain itu faktor lain yang berpengaruh terhadap penurunan pencapaian kinerja perencanaan adalah bahwa hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya digunakan untuk upaya perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

Indikator kinerja lainnya yang sangat menunjang kepada pencapaian kinerja RPJMD adalah Indeks Kepuasan Masyarakat yang pencapaian kerjanya terus meningkat. Peningkatan nilai IKM Bappelitbang ini ditunjang oleh peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan, prosedur serta SDM pelayanan.

b. Keuangan

Indikator Keuangan Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.95.

Tabel 2.95

Indikator Keuangan Kota Bandung Tahun 2016–2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan (Realisasi)	37,87%	44,96%	43,29	40%	37%
	PAD (Realisasi) Rp M	2.1528	2.578,5	2.571,6	2.548,2	2.063,4
	Jumlah Pendapatan Daerah (realisasi)	5.685,1	5.735,0	5.939,9	6.381,8	5.643,6
2	Hasil Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
3	Persentase SILPA	9,13%	10,86%	3,82	4%	4%
	Total SILPA Rp.M	532,1	601,8	233,8	231,20	236,35
	Total APBD (realisasi) Rp M	5.830,4	5.541,7	6.114,4	6.310,6	5.407,3
4	Persentase Belanja Pendidikan (20%) (Realisasi)	28,93%	21,53%	23,69	29%	26%
	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan (Realisasi) Rp M	1.686,6	1.193,1	1.448,6	1.837,80	1.383,86
	Total APBD (Realisasi) Rp M	5.830,4	5.541,7	6.114,4	6.310,6	5.407,3
5	Persentase belanja kesehatan (Realisasi)	10,82%	16,10%	18,93	19%	21%
	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan (Realisasi) Rp M	630,8	892,1	1.157,6	1.188,40	1.117,66
	Total APBD (Realisasi) Rp M	5.830,4	5.541,7	6.114,4	6.310,6	5.407,3
6	Perbandingan antara belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung (Realisasi)	56,16%	51,48%	50,09	55%	49%
		43,84%	48,16%	49,91	45%	51%
	Jumlah Belanja Langsung (Realisasi) Rp M	3.274,3	2.852,9	3.063,0	3.473,9	2.643,24
	Total APBD (Realisasi) Rp M	5.830,4	5.541,7	6.114,4	6.310,6	5.407,3
	Jumlah Belanja Tidak Langsung (Realisasi) Rp M	2.556,1	2.668,9	3.051,4	2.838,1	2.764,05
	Total APBD (Realisasi) Rp M	5.830,4	5.541,7	6.114,4	6.310,6	5.407,3
7	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
8	Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RAPBP	(42 HK untuk RAPBD dan 15 HK untuk RAPBDP)	(8 HK untuk RAPBD dan 15 HK untuk RAPBDP)	(26 HK untuk RAPBD dan 2 HK untuk RAPBDP)	46 Hari Kerja RAPBD dan 6 Hari Kerja	
9	Rata rata Penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai Perundang undangan	2HK	2HK	2HK	2HK	2HK
10	Laporan Keuangan Kota Bandung tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan	-	-	14 Dok	14 Dok	14 Dok

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
11	Laporan BMD Kota Bandung tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang - undangan	-	-	2 Dok	2	2 Dok
12	Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang undangan	-	-	30 Lok/Bidang	30	30 Lokasi
13	Persentase tanah milik pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN	-	29%	20%	22,78%	22,78%
14	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	84,19	85,260
15	Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah	-	89,26	91,39	91,84	91,84
16	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	-	2.160.181.714.001	2.154.648.077.249	1.629.188.481.446	1.629.188.481.446
17	Nilai SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah	-	-	-	-	98,99

Sumber: BPKA Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Opini BPK terhadap laporan kinerja pemerintah daerah Kota Bandung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 – 2018 termasuk predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), akan tetapi pada tahun 2019 – 2020 mengalami peningkatan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam hal penetapan APBD, hanya tahun 2015 yang termasuk kategori tidak tepat waktu, namun seiring dengan adanya perbaikan dan perubahan sistem pendukung penganggaran maka mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan kategori menjadi tepat waktu. Selain itu, dalam hal penyelesaian SP2D tepat waktu yang merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007. Capaian Penyelesaian SP2D tepat waktu dari tahun 2016 – 2020 rata-rata diterbitkan maksimal 2 Hari Kerja.

c. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung sebagai unsur penunjang urusan yang menyelenggarakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang kepegawaian harus mampu mewujudkan pengelolaan manajemen kepegawaian secara optimal dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) aparatur sebagai motor penggerak sistem organisasi pemerintahan Kota Bandung. Pengelolaan pegawai yang optimal dikuantifikasikan ke dalam indikator-indikator kinerja kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, dengan hasil capaian kinerja disajikan pada Tabel 2.96.

Tabel 2.96

Capaian Indikator Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	N/A	N/A	N/A	100%	100%
2	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun	N/A	N/A	N/A	81,00%	61%
3	Persentase pemenuhan ASN masing-masing PD sesuai kompetensi dan beban kerja	N/A	N/A	N/A	74,17%	80,59%
4	Persentase PD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin sedang dan berat.	86,11%	73,97%	80,8%	91,67%	90%
5	Persentase akurasi data kepegawaian	99,92%	93,89%	96,38%	98,06%	98,45%
6	Persentase penempatan dan pengembangan kompetensi sesuai hasil assessment	N/A	N/A	N/A	69,77%	79,89%
7	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	92,59%	92,38%	93,5%	89%	89,09
8	Persentase Perangkat Daerah yang pegawainya Disiplin dan Berkinerja dengan Kategori Baik	N/A	N/A	N/A	95,83%	95
9	Indeks Survei Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	79,04%	81,64%	81,97%	82,38%	92,42

Sumber: BKPP Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Persentase pelayanan administrasi kepegawaian pada Tahun 2019 dan 2020 dapat dilaksanakan 100% secara tepat waktu sesuai dengan kewenangan dan standar operasional prosedur pada BKPP. Perhitungannya didasarkan pada jumlah pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu dibagi jumlah pelayanan administrasi kepegawaian. Sedangkan untuk persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun mengalami penurunan dari Tahun 2019, capaian tersebut didasarkan pada perhitungan jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi 20 JP per tahun dibagi dengan jumlah seluruh ASN, dimana jumlah ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi 20 JP sebanyak 8.708 orang, jumlah seluruh ASN sebanyak 14.276 orang.

Capaian kinerja untuk persentase pemenuhan ASN masing-masing Perangkat Daerah sesuai kompetensi dan beban kerja mengalami peningkatan dari tahun 2019. Capaian tersebut didasarkan pada perhitungan pemenuhan kompetensi PNS terhadap kualifikasi yang dipersyaratkan untuk masing-masing jabatan mencapai 98,63 % dan pemenuhan PNS sesuai dengan beban kerja masing-masing perangkat daerah sebesar 63 %, maka didapat rata-rata persentase pemenuhan ASN yang sesuai dengan kompetensi dan beban kerja. Persentase Perangkat Daerah yang tidak terdapat pelanggaran disiplin sedang dan berat cenderung naik dan turun dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Capaian tersebut didasarkan pada banyaknya Perangkat Daerah yang pegawainya melakukan pelanggaran disiplin sedang/berat.

Persentase akurasi data kepegawaian cenderung mengalami peningkatan dari Tahun 2017 s/d 2020 namun pada Tahun 2017 mengalami penurunan disebabkan oleh banyaknya data pegawai yang tidak akurat, baik datanya tidak lengkap atau tidak benar.

Persentase penempatan dan pengembangan kompetensi sesuai hasil assessment mengalami peningkatan dari Tahun 2019, capaian tersebut didasarkan pada jumlah ASN yang telah diketahui profil kompetensinya sebanyak 2.355 orang dan telah di tempatkan sesuai dengan hasil uji kompetensi dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sebanyak 1.726 orang, maka didapatkan rata-rata persentase ASN yang ditempatkan dan di kembangkan sesuai hasil uji kompetensinya sebesar 79,89%. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi cenderung mengalami penurunan dari Tahun 2016 s/d 2020, perhitungannya didasarkan pada jumlah ASN yang memenuhi standar kompetensi dibagi jumlah ASN. Adapun yang dimaksud kompeten adalah yang memenuhi standar pendidikan, golongan dan diklat.

Sedangkan untuk persentase Perangkat Daerah yang Pegawainya Disiplin dan Berkinerja dengan Kategori Baik mengalami penurunan dari Tahun 2019, perhitungannya didasarkan pada rata-rata persentase dari perangkat daerah yang tidak terdapat pelanggaran disiplin dan persentase perangkat daerah yang penilaian kinerja dengan kategori baik.

Survei Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dari tahun 2016 smpai dengan 2020 cenderung mengalami peningkatan. BKPP Kota Bandung melaksanakan survei kepuasan pelayanan yang dilakukan secara elektronik melalui skm.bandung.go.id. Survei Kepuasan Masyarakat ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang dilakukan melalui 9 unsur pelayanan dengan sasaran penerima layanan kepegawaian yaitu Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

d. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan memiliki peranan yang penting sebagai pendukung dalam membangun suatu daerah. Indikator Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti telah mencapai 100% pada tahun 2019 dan 2020. Perkembangan penelitian dan pengembangan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.97.

Tabel 2.97

Perkembangan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016–2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan (%)	100	100	100	100	100
2	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti (%)	50	70	75	100	100
3	Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah	9	11	16	12	N/A

Sumber: Bappelitbang Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terus mengalami peningkatan. Namun demikian diperlukan perumusan tata kelola pemanfaatannya secara berkala untuk mendapatkan hasil monitoring dan evaluasi bertahap terhadap pelaksanaan hasil kelitbangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renja Perangkat Daerah diharapkan memperhatikan dan mempertimbangkan hasil-hasil kajian kelitbangan. Peran litbang dalam melakukan scanning lingkungan internal dan eksternal sebagai dasar perencanaan (*planning by research*), fungsi formulasi kebijakan (*formulating policy*), dan fungsi kontrol (*controlling*)

menghasilkan berbagai *proxy*, model, dan pilihan kebijakan yang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan, baik itu untuk perencanaan, perumusan kebijakan, serta pembinaan dan pengawasan pembangunan. Oleh sebab itu, penatakelolaan kelitbangan dan inovasi membutuhkan komitmen bersama dalam rangka membangun budaya perumusan kebijakan dengan landasan utama berupa hasil kajian ilmiah berbasis kelitbangan tematik dan terapan, serta pendayagunaan hasil – hasil penelitian sebagai panduan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

2.3.6. Unsur Pengawasan

Unsur pengawasan merupakan alat evaluasi terhadap program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Indikator pengawasan di Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.98.

Tabel 2.98
Perkembangan Indikator Pengawasan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material	80,33%	83,61%	78,62%	N/A	N/A
2	Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP	65%	80%	73,53%	N/A	N/A
3	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	21,93%	76,32%	51,78%	5,24%	2,21%
4	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	19,91%	39,95%	51,78%	11,31%	3,21%
5	Persentase SKPD yang Tertib administrasi barang / aset daerah	60%	70%	N/A	N/A	N/A
6	Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal B	70,49%	91,80%	N/A	96,83%	90%
7	Persentase Aduan masyarakat atas Pelayanan publik yang ditindaklanjuti	100%	100%	N/A	N/A	90%
8	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	N/A	N/A	N/A	Nilai 3,00	Nilai 3,00
9	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Yang Memiliki Standar Kompetensi	80%	N/A	N/A	80%	N/A
10	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Perangkat Daerah yang Menyatakan Puas Atas Layanan Inspektorat Kota Bandung	72%	76%	70%	82%	84%
11	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	N/A	Nilai 68	Nilai 85

Sumber: Inspektorat Kota Bandung, yang dikelola dalam SIPD

Pada indikator Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material, tahun 2016 terdapat 54 Perangkat Daerah yang tidak mendapat temuan berindikasi korupsi dari 67 Perangkat Daerah yang diperiksa, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 80,33%. Tahun 2017 terdapat 56 Perangkat Daerah yang tidak mendapat temuan berindikasi korupsi dari 67 Perangkat Daerah yang diperiksa, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 83,61%. Tahun 2018 terdapat 50 Perangkat Daerah yang tidak mendapat temuan berindikasi korupsi dari 63 Perangkat Daerah yang diperiksa, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 78,62%. Tahun 2019 dan seterusnya indikator ini dan Persentase SKPD yang Tertib administrasi barang/aset daerah, tidak menjadi Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Bandung, karena menjadi bagian dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK RI.

Indikator Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP, pada tahun 2016 terdapat 39 Perangkat Daerah yang telah menyusun dan mengimplementasikan SPIP dari 60 Perangkat Daerah, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 65%, namun pada tahun 2019 dan seterusnya indikator ini berubah nama menjadi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dengan capaian kinerja setiap tahun minimal nilai 3,00.

Indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti, tercapai kinerja sebesar 21,93% dan 19,91% pada tahun 2016, meningkat di tahun 2017 sebesar 76,32% dan 39,95%. Pada tahun 2019 dan seterusnya formula penghitungan mengalami peningkatan menjadi Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti dan berstatus selesai, sehingga tahun 2019 yang merupakan tahun ke 1 renstra, capaian kinerja akhir tahun mencapai 5,24%, dimana realisasi 4.082 rekomendasi yang ditindaklanjuti dari target 4.513 rekomendasi, 236 rekomendasi sudah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai.

Indikator Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal B, mulai tahun 2016 mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 96,83% dari 64 Perangkat Daerah. Mulai tahun 2020 target ditingkatkan menjadi minimal BB, sehingga mencapai 90% atau 58 Perangkat Daerah yang mendapat nilai AKIP "BB".

Indikator Persentase aduan masyarakat atas pelayanan publik yang ditindaklanjuti, pada tahun 2020 mencapai 90%, dengan rentang 10% aduan masyarakat yang tidak sesuai kriteria dan tidak dapat ditindaklanjuti seperti identitas yang tidak jelas, atau permasalahan yang tidak jelas.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Perangkat Daerah yang Menyatakan Puas Atas Layanan Inspektorat Kota Bandung, setiap tahun mengalami kenaikan hingga tahun 2020 mencapai 84% (Baik) dari 60 koresponden perangkat daerah.

Indikator persentase capaian pelaksanaan dari target PMPRB sebesar 85 point, hasil evaluasi Kemenpan RB Tahun 2019 hanya mencapai 68 poin atau 80%. Indikator persentase capaian sistem pengawasan/pengendalian intern yaitu sudah dibangunnya aplikasi simWaster (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Terpadu). Indikator tingkat pemenuhan kapabilitas aparat pengawas realisasi level 2 karena belum selarasnya perencanaan pengawasan dengan laporan hasil pengawasan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Secara total, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki tren yang meningkat setiap tahunnya seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian di Kota Bandung. Perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kota Bandung tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.99.

Tabel 2.99

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku
Kota Bandung Periode 2016-2020

No	Harga Berlaku (Rp Juta)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	127.374,24	141.574,75	155.559,48	171.096,86	172.169,64
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.184,50	1.287,86	1.578,26	1.771,20	1.751,87
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	25.013,80	27.716,33	29.498,18	31.646,33	31.969,27
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	61.595,85	67.447,86	73.778,14	80.043,53	76.415,67
5	Perubahan Inventori	8.696,91	9.031,19	9.902,56	10.097,82	4.737,34
6	Ekspor Barang dan Jasa	(7.001,66)	(6.948,37)	(5.933,53)	(6.194,86)	(3.427,15)
	Produk Domestik Regional Bruto	216.863,64	240.109,63	264.393,08	288.460,88	283.616,64

Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2021

b. Titik Banjir/Genangan

Limpasan air di badan jalan akibat air hujan atau seringkali disebut banjir Cileuncang. Penyebab terjadinya banjir Cileuncang adalah karena tertutupnya *street inlet* oleh beberapa aktivitas sehingga air hujan tidak bisa masuk ke dalam saluran drainase, adanya pendangkalan di beberapa bagian saluran, konstruksi drainase yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, serta pengalihfungsian lahan dari kondisi alami menjadi lahan dengan fungsi komersil seperti pertokoan, mall, jalan, perumahan, dan lain-lain sehingga tutupan lahan pun berubah yang meningkatkan debit limpasan. Tingginya air larian menyebabkan menurunnya air yang meresap ke dalam tanah, sehingga di musim kemarau mengalami kekeringan. Sebaliknya, tingginya air larian tersebut menimbulkan banjir/genangan di musim hujan. Banjir Cileuncang yang merugikan masyarakat dapat direduksi bahkan bisa diarahkan menjadi asupan bagi air tanah dengan teknik biopori dan sumur resapan. Genangan terjadi karena air hujan yang tidak terserap tanah kemudian menggenang, terkumpul di suatu tempat dan tidak mengalir karena elevasi lebih rendah dari sekitarnya.

Kinerja penanganan banjir/genangan berdasarkan karakteristik genangan yang diantaranya didasarkan pada lama genangan, tinggi genangan dan lokasi genangan. Di Kota Bandung telah teridentifikasi 68 titik genangan yang masih berpotensi terjadi genangan. Selama periode tahun 2106 hingga tahun 2020, indikator kinerja penanganan banjir/genangan mengalami beberapa perubahan indikator kinerja. Tabel 2.100 merupakan tabel kinerja penanganan banjir/genangan di Kota Bandung selama kurun waktu tahun 2016 -2020. Kinerja penanganan banjir dan genangan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.100.

Tabel 2.100
Kinerja Penanganan Banjir dan Genangan Tahun 2016 - 2020

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam	%	85,29	97,06	100	N/A	N/A
Persentase minimal banjir terselesaikan	%	40	90	100	N/A	N/A
Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	menit	N/A	N/A	N/A	63,30	60,76

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung, yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja penanganan banjir/genangan mengalami beberapa perubahan indikator kinerja. Capaian kinerja penanganan banjir/genangan selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sesuai dengan parameter pengukuran lama genangan selama 120 menit dan tinggi genangan 30 cm, terus mengalami peningkatan dari yang semula persentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam sebesar 85,29% (2016), naik menjadi 100% (2018), begitu pula dengan persentase minimal banjir terselesaikan dari semula sebesar 40% (2016), naik menjadi 100% (2018). Namun pada tahun 2019 terdapat perubahan indikator kinerja menjadi lama genangan yang tertangani pada titik genangan, dari hasil pengukuran diperoleh rata-rata lama genangan adalah selama 63,30 menit (2019) dan 60,76 menit (2020), dengan rata-rata ketinggian genangan mencapai 31,36 cm. Dengan demikian titik genangan telah dapat tertangani dengan menurunnya waktu genangan menjadi rata-rata di bawah 2 jam.

Berdasarkan karakteristik genangan, pada tahun 2020 kinerja penanganan banjir/genangan mengalami perubahan indikator kinerja menjadi persentase penurunan titik genangan, dengan parameter pengukuran banjir/genangan yang digunakan adalah ketinggian 30 cm dengan waktu surut 60 menit. Tabel 2.101 merupakan data kejadian genangan/Cileuncang Kota Bandung Tahun 2020.

Tabel 2.101
Data Kejadian Genangan/Cileuncang Kota Bandung Tahun 2020

No.	Lokasi Genangan/Cileuncang	Tinggi	Durasi	Status
		(cm)	(menit)	
1	Jl.Cikutra Barat - Jl. Pahlawan (sal. Cikutrabarat)	30,00	45,00	Selesai
2	PerumahanBumiPanyileukan(Sal. Cisalatri)	30,00	40,00	Selesai
3	Jl. Raya Sudirman (Sal. IrigasiLeuwilimus I & Sal. Pembuang)	25,00	45,00	Selesai
4	Persimpangan Jl. Soekarno Hatta - Jl. Pasir Koja kearah Gerbang Tol	30,00	60,00	Selesai
5	S. Cicendo Jl. KebonKawung	20,00	30,00	Selesai
6	Sal. Cikapayang - Jl. Supratman - Cisokan	20,00	30,00	Selesai
7	Jl. Sukamulya - S. Cipedes	10,00	20,00	Selesai
8	Jl. Sukahaji - Jl. Gegerkalong	20,00	30,00	Selesai
9	Jl.Moch. Toha - Sal. Cipalasari / Sal. Ciateul	30,00	60,00	Selesai
10	S. Cirangrang	30,00	45,00	Selesai
11	Jl. A.H. Nasution S. Cikiley	30,00	60,00	Selesai
12	Jl. Caringin Sal. LeuwiLimus I	30,00	30,00	Selesai
13	Jl. Sukamaju / Jl. Cikaso S. Cibeunying	20,00	30,00	Selesai
14	Jl. Cilengkrang II Sal. Cipalasari	10,00	20,00	Selesai
15	Jl. Purwakarta Sal. Ciparungpung	20,00	30,00	Selesai
16	Sal. Babakan Dese Antara Jl. A. Yani - Jl. Jakarta	20,00	30,00	Selesai
17	Sal. Cikudapateuh - Jl. Kacapiring, Jl. Gudang Utara	30,00	45,00	Selesai
18	S. Ciroyom Jl. Kopo	30,00	60,00	Selesai
19	Sal. Mercuri Jl. Tata Surya & Jl. Mercuri	20,00	30,00	Selesai

No.	Lokasi Genangan/Cileuncang	Tinggi	Durasi	Status
		(cm)	(menit)	
20	Sal. Drainase Jl. Komplek Santosa Asih	25,00	30,00	Selesai
21	Sal. Ciganitri Jl. Ciwastra	20,00	30,00	Selesai
22	Perumahan Riung Bandung Jl. Braga	30,00	45,00	Selesai
23	Terminal Leuwipanjang	30,00	90,00	Belum Selesai
24	Jl. Pagarsih - S. Citepus	30,00	120,00	Belum Selesai
25	Jl. Cibodas - antapani	35,00	50,00	Belum Selesai
26	Persimpangan Jl. Pasirkoja - Sal. Cilimus I	35,00	60,00	Belum Selesai
27	Sal. Cilimus Jl. Sukajadi	35,00	60,00	Belum Selesai
28	Jl. Terusan Pasteur - S. Cianting(depan Hotel Topaz & BTC)	50,00	200,00	Belum Selesai
29	Jalan Naripan / Sal. Cikapayang	-	-	Belum Selesai
30	Persimpangan Jl. Soekarno Hatta - Jl. Rumah Sakit	40,00	70,00	Belum Selesai
31	Pasar Induk Gedebage Sal. Cipamulihan	80,00	200,00	Belum Selesai
32	Fly Over Kiaracondong / Sal. Cibeunying	-	-	Belum Selesai
33	Jl. Cipaganti - Jl. Setiabudi / Sal. Cikalintu	-	-	Belum Selesai
34	Jalan Cibogo / Sal. Cibogo	-	-	Belum Selesai
35	Jl. Prof. Eickman - Sal. Leuwilimus I	-	-	Belum Selesai
36	Jl. Kopo - Sal. Citarip	40,00	120,00	Belum Selesai
37	S. Citepus Jl. Arjuna	-	-	Belum Selesai
38	Pusdai Jl. Suci / Sal. Lebak Larang	-	-	Belum Selesai
39	Jl. Layang Cimindi / Gunung Batu (Sal. Ciwarga)	-	-	Belum Selesai
40	Sal. Cikapayang - Gasibu	-	-	Belum Selesai
41	Jl. Windu - Jl. Galunggung - Seskoad	-	-	Belum Selesai
42	Pasar Sederhana Sal. Cikalintu	-	-	Belum Selesai
43	S. Cikapundung Kolot - belakang BSM	-	-	Belum Selesai
44	S. Cibunut - Pasar Kosambi	-	-	Belum Selesai
45	S. Cibunut - Baranangsiang	-	-	Belum Selesai
46	Sal. Lebaklarang - UNPAD	-	-	Belum Selesai
47	Jl. Nilem	-	-	Belum Selesai
48	Sal. Ciborete - Alamanda	-	-	Belum Selesai
49	S. Cijalupang - Leger Jalan	-	-	Belum Selesai
50	Jl. Dian Molek - Sal. Cibuntu	-	-	Belum Selesai
51	Jl. Plered Sal. Antapani	-	-	Belum Selesai
52	SMA 9 - Lapangan Husen Sal. Cianting	-	-	Belum Selesai
53	Sal. Ciharalang - S. Cidurian	-	-	Belum Selesai
54	Jl. Ujung Beurung - Polresta Bandung Timur	-	-	Belum Selesai
55	Jl. Sumatra - SMPN 5 dan 2 (Sal. Melintaske Jl. Jawa)	-	-	Belum Selesai
56	Jl. Stasiun Timur Kebon Jeruk	-	-	Belum Selesai
57	Jl. Masuk FKOK UPI Sal. Ciparungpung	-	-	Belum Selesai
58	S. Cibeureum - Cigondewah / Gempolsari / Sudiplak	-	-	Belum Selesai
59	Jl. Cibaduyut - Jl. Tol	40,00	70,00	Belum Selesai
60	Sal. Irigasi Dungusema Jl. Moch. Toha	-	-	Belum Selesai
61	Sal. Crossing Jl. Soekarno Hatta - Sal. Cijagra (depan Hotel Lingga)	-	-	Belum Selesai
62	Simpang Jl. Jakarta - Jl. Kiaracondong	-	-	Belum Selesai
63	Fly Over Jl. Cimindi	-	-	Belum Selesai
64	Terusan Jl. Kiaracondong - Jl. Soekarno Hatta	-	-	Belum Selesai
65	S. Cikapundung Gg. Apandi Jl. Braga	-	-	Belum Selesai
66	Sal. Rancabolang - Pasantren Jl. Rancabolang	90,00	120,00	Belum Selesai
67	S. Cipagalo	-	-	Belum Selesai
68	S. Cipariuk	-	-	Belum Selesai

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung, yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan data dari Tabel 2.101, dari 68 titik genangan yang ada di Kota Bandung, pada tahun 2020 tercatat 22 titik genangan sudah tertangani dan 46 titik genangan belum tertangani.

c. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Sebagai tujuan wisata favorit di Jawa Barat, Kota Bandung memiliki banyak wisata kuliner mulai dari restoran berkelas hingga penyedia makan minum yang berjualan menggunakan gerobak atau keliling. Kuliner merupakan salah satu potensi sektor ekonomi kreatif yang dimiliki Kota Bandung. Berbagai jenis kuliner baru bermunculan di sepanjang tahun 2020. Selain itu, di sepanjang tahun 2020 banyak sekali kuliner dengan sistem online di Kota Bandung. Jumlah restoran di Kota Bandung setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 terdapat 1.871 restoran dan bertambah menjadi 1.909 restoran pada tahun 2020 atau mengalami peningkatan sebesar 0,98%. Perkembangan jumlah restoran dan katering di Kota Bandung selengkapnya disajikan pada Tabel 2.102.

Tabel 2.102
Jumlah Restoran dan Katering di Kota Bandung Tahun 2016-2020

NO	Jenis	2016	2017	2018	2019	2020
1	Restoran	1.635	1.762	1.826	1.871	1.909
2	Katering	504	652	725	785	813
JUMLAH		2.139	2.414	2.551	2.656	2.722

Sumber: BPPD Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

d. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Bandung sebagai salah satu kota tujuan wisata yang memiliki cukup banyak sarana akomodasi. Pada tahun 2020 jumlah hotel di Kota Bandung terdapat sebanyak 1.299 unit hotel, atau mengalami peningkatan sebesar 0,99% dibanding tahun 2019 dengan jumlah 1.285 unit hotel. Adanya peningkatan jenis hotel tersebut dikarenakan adanya hotel-hotel yang menaikkan standar bintangnya dan ada juga khususnya hotel nonbintang yang beralih fungsi menjadi kost-kostan. Jumlah rincian jenis hotel tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.103.

Tabel 2.103
Jumlah Penginapan/Hotel di Kota Bandung 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Hotel Bintang 5	11	12	12	12	12
2	Hotel Bintang 4	39	43	43	44	45
3	Hotel Bintang 3	49	52	54	55	61
4	Hotel Bintang 2	32	32	32	33	32
5	Hotel Bintang 1	6	6	6	6	6
6	Hotel Melati 3	110	114	116	119	120
7	Hotel Melati 2	65	65	66	68	69
8	Hotel Melati 1	114	129	141	151	154
9	Rumah Kos	592	696	818	797	800
Jumlah		1.018	1.149	1.288	1.285	1.299

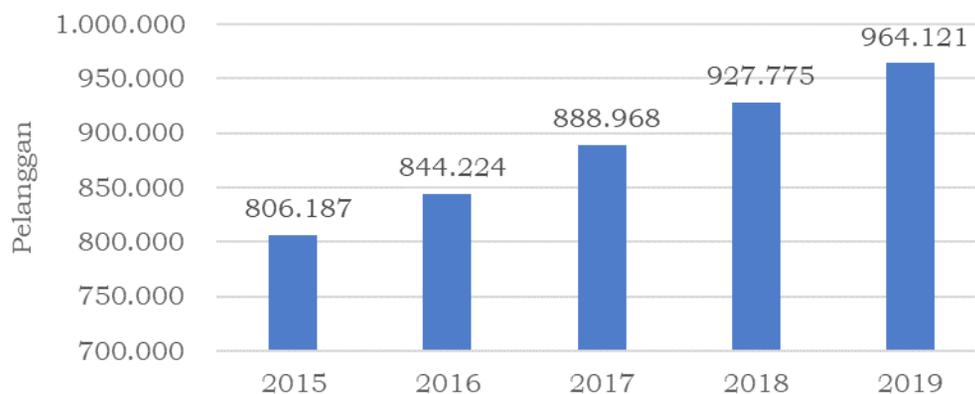
Sumber: Bapenda Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2021

e. Rumah Tangga/Pelanggan yang Menggunakan Listrik

Berdasarkan data dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat area Bandung, pada tahun 2020 persentase rumah tangga yang menggunakan Listrik PLN di Kota Bandung adalah sebesar 99,73% dan 0,27% menggunakan Listrik Non PLN. Adapun jumlah pelanggan yang menggunakan listrik pada tahun 2019 sebanyak 964.121 pelanggan. Pengguna listrik di Kota mengalami peningkatan pada setiap tahunnya dengan rata-rata peningkatan sebesar 5%. Data perkembangan jumlah pelanggan listrik di Kota Bandung dapat dilihat pada Gambar 2.38.

Gambar 2.38

Jumlah Pelanggan yang menggunakan Listrik PLN
Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

f. *Liveable City Index*

Untuk menggambarkan kondisi infrastruktur Kota Bandung dapat digunakan *Liveable City Index* (LCI). *Liveable City Index* adalah gambaran sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dan lain-lain) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dan lain-lain). *Liveable city index* Kota Bandung tahun 2017-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.104.

Tabel 2.104

Liveable City Index Tahun 2017-2019

No	Aspek	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019*
1	Utilitas	7,2	8,8	-
2	Layanan Dasar	6,3	7,0	-
3	Sosial dan Keamanan	8,5	7,9	-
4	Lingkungan dan Kesehatan	8,1	7,1	-
5	Tata Ruang	7,3	7,0	7,3
6	Transportasi	6,1	6,6	6,7
7	Ekonomi	7,5	8,0	7,5
8	Fasilitas Pendidikan	-	-	8,8
9	Fasilitas Kesehatan	-	-	8,7
10	Infrastruktur	-	-	7,9
11	Keamanan	-	-	7,4
12	Sosial	-	-	7,5
13	Lingkungan	-	-	7,4
	LCI Kota Bandung	7,3	7,5	7,7

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

* Penghitungan tahun 2019 berdasarkan pada prioritas RPJMD Kota Bandung 2018 – 2023

Berdasarkan Tabel 2.104 dapat diperoleh gambaran bahwa nilai *Liveable City Index* (LCI) Kota Bandung Tahun 2017-2019 meningkat dari 7,3-7,7. Beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan adalah aspek transportasi, tata ruang, dan layanan dasar. Pada tahun 2020 tidak diselenggarakan Survei *Liveable City Index* karena terdampak oleh pandemi Covid-19.

g. *Investasi dan Perijinan*

Pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan ditunjukkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan salah satu indikator makro yaitu pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah adanya investasi atau penanaman modal. Daerah yang menarik sebagai tujuan penanaman modal akan memiliki

kesempatan yang besar untuk semakin bertumbuh. Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk dijadikan tempat menanam modal.

Kota Bandung memiliki peluang investasi yang luas dalam berbagai sektor sesuai dengan karakteristik kota metropolitan. Penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Fokus investasi Kota Bandung didorong untuk mendukung Kota Bandung sebagai destinasi wisata dunia berdasarkan rencana umum penanaman modal Kota Bandung, selain itu investasi juga dilandaskan kepada semangat ekonomi kerakyatan sehingga pertumbuhan ekonomi tidak terjadi hanya pada skala makro, tetapi juga kepada skala mikro, sehingga pemerataan kesejahteraan warga dapat terwujud di Kota Bandung.

Kota Bandung terpilih menjadi kota nomor satu terbaik se-Indonesia dalam ajang penghargaan *Indonesia's Attractiveness Award (IAI)* pada tahun 2017. Penghargaan tersebut diperoleh dari hasil pengukuran dan observasi terhadap daya tarik setiap daerah di Indonesia di sektor investasi, layanan publik, infrastruktur dan pariwisata oleh *Frontier Consulting Group* dan *Tempo Media Group*. Penghargaan ini menunjukkan bahwa Kota Bandung masih memiliki daya tarik untuk menarik investor dan pelaku bisnis di berbagai sektor. Hal ini akan berimplikasi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan menaikkan tingkat konsumsi masyarakat sehingga dapat menggairahkan ekonomi setempat baik sektor perdagangan, transportasi, akomodasi, dan lainnya.

Sektor yang berpotensi untuk meningkatkan penanaman modal di Kota Bandung adalah: industri kreatif (seperti: *e-commerce*, iklan, fesyen dan pakaian, desain, dan lain-lain), telekomunikasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perumahan dan properti, kesehatan, barang dan jasa, sektor industrial, dan serta perdagangan.

Sesuai dengan Pasal 25 ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa untuk perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin dari instansi yang memiliki kewenangan. Pada ayat (5) disebutkan bahwa izin yang dimaksud diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan ini berarti pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk. Dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan beberapa inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan. Sejak tahun 2015, telah diresmikan aplikasi baru berbasis elektronik atau yang terkenal dengan *Online Services System*, bertajuk HAYU Bandung! sebuah aplikasi perizinan berbasis website, *full online, full paperless services*. Inovasi ini memberikan kepastian waktu, kepastian biaya, dan kepastian proses. Dengan aplikasi ini, petugas dan pemohon perizinan tidak perlu lagi untuk tatap muka. Terdapat 3 langkah mudah dalam penggunaan pelayanan ini, yaitu mendaftar, membayar untuk 3 izin yang berbayar (izin gangguan, izin mendirikan bangunan, izin mempekerjakan orang asing dan izin trayek), serta menunggu izin diantar lewat pos ke alamat tujuan pemohon.

Selain itu, Pemerintah Kota Bandung menghadirkan layanan perizinan berbasis *smartphone* dengan nama "GAMPIL" (*Gadget Mobile Application for License*), yang merupakan sistem tata kelola perizinan yang dapat diakses secara mudah di mana pun dan kapan pun sistem perizinan online. Inovasi ini bermanfaat terutama perizinan bagi UKM dengan cara mudah dan persyaratan minimal.

h. Pajak dan Retribusi Daerah

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan transfer ke daerah, merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Kebijakan *taxing power* kepada daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah adalah 16 jenis, meliputi 5 jenis yang dapat dipungut oleh provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 11 jenis.

Pemerintah Daerah Kota Bandung telah menetapkan 9 (sembilan) jenis mata pajak daerah yang menjadi bagian pendapatan asli daerah Kota Bandung, jenis-jenis pajak tersebut meliputi: pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; pajak reklame; pajak penerangan jalan; pajak parkir; Pajak Bumi Bangunan (PBB); Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan pajak air tanah. Rincian hasil pajak daerah dapat dilihat pada Tabel 2.105.

Tabel 2.105

Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2020 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Hotel	133,300,000,000.00	154,422,542,379.00	115.85%
2	Pajak Restoran dan Rumah Makan	200,000,000,000.00	212,685,094,158.00	106.34%
3	Pajak Hiburan	22,300,000,000.00	24,780,208,424.00	111.12%
4	Pajak Reklame	22,000,000,000.00	27,611,924,915.00	125.51%
5	Pajak Penerangan Jalan	190,000,000,000.00	196,089,005,182.00	103.20%
6	Pajak Parkir	19,200,000,000.00	24,299,717,312.00	126.56%
7	Pajak Air Bawah Tanah	22,500,000,000.00	24,545,337,848.00	109.09%
8	Pajak Bumi dan Bangunan	500,000,000,000.00	505,193,534,229.00	101.04%
9	BPHTB	641,931,714,893.00	459,561,116,999.00	71.59%
	Jumlah	1,751,231,714,893.00	1,629,188,481,446.00	93.03%

Sumber: Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan Tabel 2.105, terlihat bahwa dari 9 (sembilan) komponen pajak daerah, terdapat 8 (delapan) komponen pajak yang capaiannya melebihi target, sedangkan 1 (satu) komponen lainnya belum mencapai target. Realisasi pajak yang belum mencapai target pada tahun 2020, adalah pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kewenangan untuk memungut retribusi bagi pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut aturan tersebut bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi memiliki dua prinsip, yaitu sebagai sumber pendapatan (*budgetary*) dan sebagai pengatur (*regulatory*). Jenis-jenis retribusi daerah yang menjadi sumber penerimaan di Kota Bandung pada tahun 2020 sebagai berikut:

1. Retribusi pelayanan penguburan/pemakaman (Dinas Tata Ruang);
2. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum (Dinas Perhubungan);
3. Retribusi pengujian kendaraan bermotor (Dinas Perhubungan);
4. Retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran (Diskar PB);
5. Retribusi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi (Diskominfo);
6. Retribusi pelayanan tera/tera ulang (Disdagin);

7. Retribusi terminal - tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum (Dinas Perhubungan)
8. Retribusi tempat rekreasi (DPKP3);
9. Retribusi rumah potong hewan (Dispangtan);
10. Retribusi izin mendirikan bangunan (DPMPTSP);
11. Retribusi pemberian izin trayek kepada badan (DPMPTSP); dan
12. Retribusi perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing - LRA (DPMPTSP).

Rincian pendapatan dari retribusi daerah pada tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.106.

Tabel 2.106

Perincian Pendapatan Retribusi Daerah Kota Bandung
Tahun 2020 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2020	
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas (Dinkes)	2.183.634.450,00	1.345.217.276,00
2	Retribusi Pelayanan Penguburan/ Pemakaman (Distaru)	4.221.800.000,00	4.556.405.000,00
3	Retribusi Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran (Diskar PB)	350.000.000,00	1.058.835.300,00
4	Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi (Diskominfo)	2.185,000,000.00	1,471,345,000.00
5	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Disdagin)	539,063,550.00	657,555,350.00
6	Retribusi Terminal - Tempat Parkir Untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum (Dishub)	1,212,960,000.00	1,223,818,000.00
7	Retribusi Tempat Rekreasi (DPKP3)	498,800,000.00	279,505,000.00
8	Retribusi Rumah Potong Hewan (Dispangtan)	1,316,140,000.00	1,229,760,000.00
9	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Dishub)	4,443,941,700.00	4,152,570,600.00
10	Retribusi izin mendirikan bangunan (DPMPTSP)	42,148,268,016.00	34,294,668,685.00
11	Retribusi Pemberian Izin Trayek Kepada Badan (DPMPTSP)	91,000,000.00	36,400,000.00
12	Retribusi Perpanjangan IMTA Kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA (DPMPTSP)	2,851,731,984.00	2,026,232,400.00
	Jumlah	62,042,339,700.00	52,332,312,611.00

Sumber: Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa total perolehan retribusi daerah Kota Bandung pada tahun 2020 adalah sebesar Rp52.332.312.611,00 atau mencapai 84,35% dari target yang ditetapkan sebesar Rp62.042.339.700,00. Dari 12 (dua belas) jenis retribusi daerah yang menjadi sumber penerimaan di Kota Bandung pada tahun 2020, 4 (empat) jenis retribusi mampu memenuhi target yang ditetapkan, sedangkan 8 (delapan) lainnya masih belum mampu memenuhi target.

i. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka

diharapkan semakin baik kualitas SDM yang ada. Untuk rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Bandung periode 2015-2019 disajikan pada Tabel 2.107.

Tabel 2.107

Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Bandung Periode 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Lulusan S1/ S2/S3	391.328	368.896	372.191	268.421	272.251
2	Jumlah Penduduk	2.481.469	2.490.622	2.499.809	2.452.179	2.480.464
3	Rasio Lulusan S1/S2/ S3	15,77%	14,81%	14,89%	10,95%	10,98%

Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD (diolah), 2020

Data dari tabel tersebut menunjukkan rasio pendidikan sarjana dan pasca sarjana masyarakat Kota Bandung masih rendah walaupun menunjukkan kecenderungan meningkat. Implikasi kebijakan ke depan adalah mendorong masyarakat meningkatkan jenjang pendidikan hingga sarjana atau pasca sarjana, untuk mengantisipasi tuntutan kebutuhan lapangan pekerjaan formal.

j. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio*, menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.108 mengenai rasio ketergantungan di Kota Bandung periode 2016-2020.

Tabel 2.108

Rasio Ketergantungan di Kota Bandung Periode 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Ketergantungan Penduduk Laki-Laki (%)	38,9	38,07	38	37,96	N/A
2	Rasio Ketergantungan Penduduk Perempuan (%)	39,8	38,79	38,65	38,58	N/A
3	Rasio Ketergantungan Total (%)	39,4	38,43	38,32	38,27	38,24

Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD (diolah), 2020

Selama periode tahun 2016 – 2020, rasio ketergantungan penduduk Kota Bandung mengalami fluktuasi. Rasio ketergantungan mengalami penurunan pada tahun 2016-2020 dari 39,4 persen menjadi 38,24 persen. Besar kecilnya rasio ketergantungan sangat dipengaruhi oleh proporsi penduduk usia anak- anak dan proporsi penduduk usia kerja. Tabel 2.109 merupakan tabel hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Bandung Tahun 2016-2020.

Tabel 2.109

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kota Bandung Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA							Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	5	6	7	8	9			
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	PDRB Atas Harga Konstan	Rp.	161.227.831,96	172.851.960,77	185.084.175,8	197.642.705,13	193.144.954,00		Perekonomian Kota Bandung sejak tahun 2016 cenderung meningkat s/d tahun 2019 dan umumnya menurun pada tahun 2020 disebabkan pandemi Covid-19.	
2	PDRB Atas Harga Berlaku	Rp.	216.863.639,62	240.109.626,72	264.551.902,5	288.460.876	283.616.640,20			
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7,79	7,21	7,08	6,79	-2,28			
4	PDRB Perkapita Atas Harga Berlaku	Persen	87,07	96,12	105,66	115,36	112,99		Pembangunan Manusia Kota Bandung secara umum meningkat tidak signifikan dan fluktuatif pada indikator pemberdayaan gender.	
5	PDRB Perkapita Atas Harga Konstan	Persen	64,73	69,20	73,92	78,81	76,95			
6	Pengeluaran Perkapita	Rp.	15.805.000	16.033.000	16.630.000	17.254.000	16.887.000			
7	Laju Inflasi	Persen	2,93	3,46	3,76	2,78	1,75			
8	Gini Ratio	Indeks	0,44	0,43	0,42	0,44	0,40			
9	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	107,58	103,98	89,38	84,67	100,02		Pembangunan Manusia di Kota Bandung secara umum meningkat sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 selain komponen pendidikan dan kesehatan meningkat tidak signifikan juga dikarenakan dampak pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan Pengeluaran Perkapita .	
10	Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,32	4,17	3,57	3,38	3,99			
11	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Persen	0,55	0,68	0,48	0,53	0,61			
12	Indeks Keparahan Kemiskinan	Persen	0,12	0,18	0,11	0,14	0,13			
13	Garis Kemiskinan	(Rp/Kapita/Bulan)	400.541	420.579	448.902	474.448	500.452			
14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	N/A	63,11	61,98	65,98	64,71			
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,39	8,44	8,01	8,16	11,19			
16	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,89	13,90	14,18	14,19	14,20			
17	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,58	10,59	10,63	10,74	10,75			
18	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,84	73,86	74	74,19	74,28			
19	Pengeluaran per kapita	Ribu rupiah/Orang/Tahun	15.805	16.033	16.630	17.254	16.887			

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	5	6	7	8	9		
20	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	80,13	80,31	81,06	81,62	81,51	Tingkat pengangguran terbuka mengalami fluktuasi mencapai puncak penurunan pada tahun 2018 kemudian meningkat kembali pada tahun 2019 dan 2020, hal ini terjadi karena Pandemi Covid-19.	
21	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	N/A	95,03	95,11	94,82	94,68		
22	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	N/A	58,84	63,63	70,39	70,49		
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	N/A	56,26	35,20	45,22	43,90		
	B. ASPEK PELAYAN/AN UMUM								
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1.	Pendidikan								
1.1	Rasio Ketersediaan Sekolah							Pendidikan di Kota Bandung sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 secara umum meningkat dan fluktuatif pada indikator Angka Partisipasi Kasar. Angka Putus Sekolah Kota Bandung cenderung stagnan.	
	SD/MI	Persen	38,46	35,83	20,92	21,36	21,43		
	SMP/MTs	Persen	21,23	21,87	22,87	23,70	23,37		
	SMA/SMK	Persen	22,97	21,02	N/A	N/A	N/A		
1.2	Angka Putus Sekolah								
	SD/MI	Persen	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%		
	SMP/MTs	Persen	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%		
	SMA/SMK	Persen	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	N/A		
1.3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	96,00	98,00	95,03	91,88	93,75		
1.4	Angka Partisipasi Kasar								
	SD/MI	Persen	110,13	104,56	106,89	102,93	103,06		
	SMP/MTs	Persen	104,17	89,61	86,26	86,26	87,13		
	SMA/SMK/MA	Persen	102,81	109,66	93,33	94,90	95,41		
	(Khusus Kota Bandung)								
1.5	Angka Partisipasi Murni								
	SD/MI/Paket A	Persen	95,63	97,22	98,88	98,73	99,06		
	SMP/MTs/Paket B	Persen	86,57	83,53	79,58	80,00	80,66		
	SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	70,37	65,78	67,34	68,00	68,25		

II - 140

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA							Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	5	6	7	8	9			
1.6	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Persen	N/A	79,54	79,56	87,72	89,89			
1.7	Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan	Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00			
1.8	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang disertifikasi	Persen	N/A	N/A	N/A	51,77	58,44			
1.9	Persentase sekolah yang difasilitasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00			
1.10	Persentase sekolah SD yang melaporkan Penggunaan dana BOS	Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00			
1.11	Persentase sekolah SMP yang melaporkan Penggunaan dana BOS	Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00			
1.12	Presentasi Inovasi Pendidikan yang Dimanfaatkan Untuk Pelayanan Pendidikan	Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00			
1.13	Tingkat Ketepatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00			
1.14	Persentase siswa miskin SD yang mendapat bantuan Pendidikan	Persen	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00			
1.15	Persentase siswa miskin SMP yang mendapat bantuan pendidikan	Persen	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00			
1.16	Persentase peserta didik dan mahasiswa beprestasi yang mendapat bantuan pendidikan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00			
1.17	Persentase masyarakat miskin yang mendapat bantuan Pendidikan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00			

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	5	6	7	8	9		
2.	Kesehatan								
2.1	Angka Kematian Ibu (AKI)/ konversi	Per 100.000 kelahiran hidup	59,18	53,55	75,33	71,49	69,03	Kesehatan di Kota Bandung sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 secara umum meningkat pada indikator rasio posyandu per satuan balita.	
2.2	Angka Kematian Bayi (AKB) / konversi	Per 100.000 kelahiran hidup	29,23	28,91	23,80	2,8	1,9		
2.3	Persentase gizi buruk	Persen	0,57	0,39	0,38	0,36	0,31	Persentase balita gizi buruk cenderung menurun dari mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.Ratio kematian ibu menurun dari mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019 dan meningkat pada tahun 2020.	
2.4	Meningkatnya rumah sehat	Persen	N/A	N/A	N/A	68,38	72,03		
2.5	Indeks Keluarga Sehat	Angka	N/A	0,23	0,21	0,21	0,17		
2..	Cakupan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00		
2.7	Peningkatan Persentase pengelolaan sumber daya kesehatan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	77,40		
2.8	Cakupan rumah tangga dengan air minum yang memenuhi syarat - Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Berkualitas (Layak)	Persen	75,57	76,54	77,18	78,58	82,00		
2.9	Cakupan Sanitasi Dasar yang Layak - Penduduk dengan Akses Sanitasi Layak	Persen	59,41	56,24	74,80	63,89	68,02		
2.10	Cakupan Fasilitas Umum yang Memenuhi Syarat - Tempat-Tempat Umum Memenuhi Syarat	Persen	75,85	76,25	76,37	74,64	69,20		
2.11	Cakupan Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi	Persen	4,10	41,00	84,90	90,40	90,40		
2.12	Jumlah Puskesmas	Unit	73	78	78	80	80		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	5	6	7	8	9		
2.13	Persentase masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.14	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	66,59	
2.15	Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan yang Memenuhi Syarat	Persen	32,86	40,69	26,42	52,90	44,54		
2.16	Meningkatnya kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri	Persen	N/A	N/A	N/A	23,18	50,33		
2.17	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	101,26	85,02	85,04	80,89	84,19		
2.18	Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang diselesaikan	Persen	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00		
2.19	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Rasio	0,92	0,98	0,99	1,01	1,03		
2.20.	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk	Rasio	1:33.086	1:33.306	1:31.296	1:31.349	1:31.376		
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap	Persen	90,74	91,86	92,34	92,38	91,87		Pekerjaan umum dan penataan ruang sejak tahun 2016 cenderung meningkat sampai dengan tahun 2020 pada aspek persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik. Persentase pelanggaran tata ruang bangunan yang diproses untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai ketentuan cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
3.2	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	72,15	75,75	78,88	80,24	79,38		
3.3	Persentase cakupan pelayanan air limbah	Persen	72,07	79,09	N/A	N/A	N/A		
3.4	Persentase pelanggaran tata ruang dan bangunan yang diproses untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai ketentuan	Persen	67,00	72,65	78,19	77,14	77,59		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	5	6	7	8	9		
3.5	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	N/A	N/A	79,55	80,64	N/A		
3.6	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	Menit	N/A	N/A	120	63,30	60,76		
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
4.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rumah	2.993	4.978	8.266	11.386	12.355	Perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Bandung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 cenderung mengalami peningkatan, tetapi kemudian mengalami penurunan di tahun 2018 kemudian meningkat kembali di tahun 2019 dan 2020. Hal ini terjadi karena refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di Kota Bandung	
4.2	Persentase RTH yang berkualitas	Persen	37,44	44,32	44,77	47,33	47,89		
4.3	Persentase kepala keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menempati hunian yang layak.	Persen	N/A	63,16	65,97	68,63	80,73		
4.4	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	12,17	12,20	12,20	12,22	12,248		
4.5	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	Persen	9,93	9,76	5,16	4,28	2,94		
4.6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	N/A	77,85	82,53	83,48	84,40		
4.7	Tercapainya kualitas penataan bangunan dan bangun bangunan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	
4.8	Ketersediaan dokumen rencana rinci pada pusat-pusat pelayanan kota	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	
4.9	Persentase pelanggaran tata ruang dan bangunan yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan	Persen	N/A	N/A	N/A	77,14	77,59		
4.10	Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi terpelihara	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	5	6	7	8	9		
4.11	Persentase sarana prasarana kelurahan terbangun	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	
4.12	Tertatanya areal pemukiman	Persen	N/A	N/A	N/A	31,28		32,14	
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
5.1	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda	Persen	90,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	
5.3	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	Persen	128,60	119,00	118,71	117,65		-	
5.4	Persentase Siskamling tingkat RW yang aktif	Persen	N/A	N/A	63,76	67,04		67,99	
5.5	Indeks Kepuasan Masyarakat (Satpol PP)	Nilai	N/A	N/A	79,29	80,15		83,31	
5.6	Cakupan Pengembangan kemampuan dan pengetahuan PolPP dan masyarakat	Persen	N/A	N/A	N/A	73,00		76,77	
5.7	Cakupan Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	N/A	N/A	N/A	100,00		100,00	
5.8	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kesbangpol)	Nilai	N/A	83,75	83,89	84,06		87,47	

Persentase penyelesaian penegakan perda di Kota Bandung secara umum mengalami penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2016 dan cenderung stagnan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan keindahan) bersifat stangam dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	5	6	7	8	9	
5.9	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.10	Jumlah Kelurahan yang memiliki sarana pengamanan kebakaran	Kelurahan	13	15	20	15	21	
5.11	Mewujudkan Respon Waktu tanggap Darurat Kebakaran	Menit	14 menit 07 detik	14 menit 26 detik	14 menit 33 detik	14 menit 17 detik	14 menit 10 detik	
5.12	Tingkat waktu maksimum assesment tanggap darurat bencana	Persen	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	
5.13	Persentase kelurahan siaga aktif kebakaran dan Bencana	Persen	20,22	23,18	30,46	9,93	24,50	
5.14	Indeks Kepuasan Masyarakat (DKPB)	Poin	72,86	75,09	81,29	81,34	84,16	
5.15	Persentase temuan BPK yang diselesaikan	Persen	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	
6	Sosial							
6.1	Jumlah Sarana Sosial (buah)	Buah	84	86	84	84	257	Jumlah sarana <i>social</i> dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 cenderung stagnan.
6.2	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	Persen	39,22	47,41	48,85	84,61	93,45	Persentase pemerlu penyandang kesejahteraan sosial yang terpenuhi Sebagian kebutuhan dasarnya cenderung meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.
6.3	Persentase fakir miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	Persen	19,68	54,25	77,56	78,16	100,00	
6.4	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	92,46	72,56	76,66	80,77	86,37	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	5	6	7	8	9		
6.5	Cakupan korban bencana yang terlayani tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6.6	Cakupan warga miskin yang memperoleh akses terhadap program pemerintah	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6.7	Persentase pemenuhan rehabilitasi sosial dasar bagi PPKS yang terlayani	Persen	39,22	47,41	44,77	100,00	100,00	100,00	
6.8	Jumlah PPKS yang meningkat pendapatannya	Orang	N/A	N/A	231	347	420		
	Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar								
1.	Tenaga Kerja								
1.1	Jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) (orang)	Orang	1.084.956	1.084.956	1.083.637	N/A	N/A	N/A	
1.2	Jumlah Angkatan Kerja (orang)	Orang	1.192.521	1.219.936	1.219.398	1.288.260	1.314.930		
1.3	Jumlah Bekerja (orang)	Orang	1.084.956	1.084.956	1.116.529	1.183.193	1.167.849		
1.4	Jumlah Penganggur (orang)	Orang	107.532	102.532	102.869	105.067	147.081		
1.5	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja (Orang)	Orang	4.241	4.203	4.009	N/A	N/A		
1.6	Tingkat penempatan pencari kerja (%)	Persen	53,16	44,68	50,96	45,54	58,44		
1.7	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	Persen	90,98	90,98	88,86	N/A	N/A		
1.8	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar (Orang)	Orang	7.977	9.406	8.512	N/A	N/A		
1.9	Jumlah Lowongan Kerja (Loker)	Loker	11.216	13.491	13.617	12.793	5.556		
1.10	Jumlah Tenaga Kerja Asing (Orang)	Orang	132	177	89	N/A	N/A		

Jumlah penduduk usia kerja secara umum cenderung mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dan fluktuatif /d tahun 2018.

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	5	6	7	8	9		
1.11	Jumlah Pelatihan Keterampilan Kerja (pelatihan)	Pelatihan	1.520	1.060	1.122	N/A	N/A	N/A	
1.12	Jumlah Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (kasus)	Kasus	57,00	58,00	58,00	58,46	62,28		
1.13	Jumlah Kasus tercatat (kasus)	Kasus	124	100	117	N/A	N/A	N/A	
1.14	Tingkat penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (%)	Persen	66,00	58,00	58,11	58,46	62,28		
1.15	Persentase Pekerja/Buruh yang masuk jansostek (%)	Persen	76,90	79,19	82,97	N/A	N/A	N/A	
1.16	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	N/A	N/A	8,01	8,16	11,19		
1.17	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	N/A	N/A	80,29	82,19	86,25		
1.18	Temuan BPK/Inspektorat diselesaikan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	WTP		
1.19	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	626 orang		
1.20	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	58,44		
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.1	Proporsi kursi yang diduduki Perempuan di DPR	Persen	6%	6%	6%	16%	16%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bandung secara umum cenderung stagnan.	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	5	6	7	8	9		
2.2	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	Kursi	3	3	3	8	8	8	Jumlah partisipasi Angkatan kerja perempuan secara umum cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
2.3	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Kursi	50	50	50	50	50	50	
2.4	Rasio KDRT (%)	Persen	0,010%	0,006%	0,0136%	0,0151%	0,0151%	N/A	
2.5	Jumlah KDRT	Kasus	53	33	296	362	362	N/A	
2.6	Jumlah rumah tangga	Jumlah	531.111	532.433	811.685	945.704	945.704	N/A	
2.7	Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Orang	442.803	504.779	531.256	741.664	741.664	N/A	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
2.8	Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	97,2%	97,4%	91,34%	98,61%	98,61%	N/A	penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
2.9	Jumlah laporan ditindaklanjuti	Jumlah	105	147	296	362	362	N/A	
2.10	Jumlah laporan yang masuk ke unit pelayan terpadu	Jumlah	108	151	296	362	362	N/A	
2.11	Cakupan perempuan dan anak korban yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga terlatih di puskesmas mampu tata laksana KTP/A dan PPT/ PKT di rumah sakit	Persen	25	23,2	N/A	N/A	N/A	N/A	
2.12	Jumlah korban KTPA yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas	Orang	27	35	N/A	N/A	N/A	N/A	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	5	6	7	8	9		
2.13	Jumlah seluruh korban KTPA yang terdata datang ke psukesmas maupun tatalaksana kasus KTPA dan RS di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu	Orang	108	151	N/A	N/A	N/A	N/A	
2.14	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2.15	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	Persen	N/A	N/A	N/A	16.95	30.50		
2.16	Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100		
2.17	Persentase Kelurahan Layak Anak	Persen	N/A	N/A	N/A	52,98	68,87		
2.18	Persentase Ketercapaian Kriteria Kota Layak Lansia	Persen	N/A	N/A	N/A	18.75	25		
2.19	Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	Persen	N/A	N/A	N/A	41,72	56,29		
2.20	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persen	N/A	N/A	N/A	2	2		
2.21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	N/A	N/A	N/A	80,25	80,25		
3	Pangan								
3.1	Ketersediaan pangan utama	kg/ kapita/ thn	197,42 kg/ kapita/ thn	197,05 kg/ kapita/ thn	N/A	N/A	N/A	N/A	
								Pangan di Kota Bandung secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 untuk indikator ketersediaan pangan utama.	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	5	6	7	8	9		
3.2	Ketersediaan pangan/ kapita/hari X kandungan kalori	(kapita/hari X kandungan kalori)	2312,19	2048,23	N/A	N/A	N/A	N/A	
3.3	Ketersediaan pangan/ kapita/hari X kandungan protein	(kapita/hari X kandungan protein)	88,02	83,67	N/A	N/A	N/A	N/A	
3.4	Jumlah maksimum pangan segar yang tercemar		13	0	N/A	N/A	N/A	N/A	
3.5	Jumlah target kasus pangan segar yang tercemar	kasus	45	40	N/A	N/A	N/A	N/A	
3.6	Persentase Pangan Segar Yang Aman Dikonsumsi	Persen	N/A	N/A	N/A	99,77	99,93		
3.7	Jumlah Cadangan Pangan Ekuivalen Beras	Ton	N/A	N/A	89,057	103,045	122,270		
3.8	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	N/A	N/A	N/A	85,08	90,50		
3.9.	Jumlah kelompok masyarakat di bidang pangan, pertanian dan perikanan diberdayakan	Jumlah	N/A	N/A	N/A	47	48		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	5	6	7	8	9		
4.	Pertanahan								
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	10,81	14,75	17,64	20	22,78	Pertanahan di Kota Bandung secara umum mengalami penurunan dari tahun 2015 s/d tahun 2016 untuk indikator persentase luas lahan bersertifikat, tetapi kemudian mengalami peningkatan kembali dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.	
4.2	Luas lahan bersertifikat		2.046.278	2.797.263	3.336.655	3.797.510	4.308.537		
4.3	Jumlah luas wilayah		18.937.462	18.961.096	18.913.686	19.374.541	18.913.686		
4.4	Penyelesaian kasus tanah negara	Persen	100%	N/A	N/A	N/A	N/A		
4.5	Jumlah kasus yang terfasilitasi	Kasus	10 Kasus terfasilitasi	25 Kasus terfasilitasi	15 Kasus terfasilitasi	10 Kasus terfasilitasi	N/A		
4.6	Jumlah kasus yang terdaftar	kasus	10 Kasus terdaftar	45 Kasus terdaftar	30 Kasus terdaftar	10 Kasus terdaftar	N/A		
5.	Lingkungan Hidup								
5.1	Sungai yang memenuhi baku mutu Kelas IV Gol. B (dari tercemar berat menjadi tercemar ringan)	Persen/ sungai	17,00%	2 sungai utama	5 sungai	N/A	N/A	Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol B meningkat dari tahun 2017 ke tahun 2018.	
5.2	Indeks Kualitas Air	Poin	N/A	N/A	N/A	45,78	45,94	Kebutuhan air bersih domestic secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan 2020.	
5.3	Indeks Kualitas Udara	Poin	N/A	82,87	69,79	61,55	77,04		
5.4	NO ₂ rata-rata tahunan	µg/m ³	N/A	13,65	20,79	33,88	17,71		
5.5	SO ₂ rata-rata tahunan	µg/m ³	N/A	9,51	15,36	14,75	11,33		
5.6	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	N/A	29,13	29,13	29,24	29,24		
5.7	Persentase Penanganan Sampah	Persen	90,4	97,47	97,97	97,99	98,32		
5.8	Jumlah sampah yang dimanfaatkan dan di daur ulang di sumber sampah	Ton	N/A	N/A	N/A	85.110,7	95.640,95		
5.9	Persentase kawasan konservasi terpelihara	Persen	N/A	N/A	8,80	10,56	28,99		
5.10	Persentase Limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang dikelola	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	0,001		
5.11	Cakupan perlindungan kualitas lingkungan	Persen	N/A	N/A	33,38	33,41	33,43		
5.12	Cakupan pencegahan dampak lingkungan akibat kebijakan dan usaha/ kegiatan	Persen	N/A	N/A	100	100	100		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	5	6	7	8	9		
5.13	Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan"	Persen	N/A	N/A	N/A	77,91	78,13	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Bandung secara umum mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 pada indikator persentase penduduk yang memiliki KTP.	
5.14	Indeks SO ₂	Poin	N/A	0,24	0,77	0,74	0,91		
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
6.1	Cakupan layanan administrasi kependudukan	Persen	73,41	83,77	93,34	95,48	97,08		
6.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	79,5	80,67	82,89	82,92	89,80		
6.3	Cakupan layanan administrasi kependudukan	Persen	73,41	83,77	93,34	95,48	97,08		
6.4	Tingkat keserasian <i>database</i> kependudukan	Persen	N/A	97,66	98,44	N/A	N/A		
6.5	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	N/A	N/A	N/A	60	60		
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
7.1	Persentase PKK Aktif	Persen	100	100	100	100	100	P e m b e r d a y a a n masyarakat desa di Kota Bandung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2000 bersifat stagnan.	
7.2	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	100	100	100	100		
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
8.1	Cakupan Data dan Informasi Keluarga yang Akurat dan Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Bandung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 cenderung meningkat pada indikator cakupan peserta KB Aktif.	
8.2	Jumlah Kampung KB Aktif	Jumlah	1	14	15	20	31		
8.3	Persentase Peserta KB Aktif	Persen	75,07	73,35	75,28	76,00	76,24		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	5	6	7	8	9	
8.4	Persentase Kelompok Tribina Aktif	Persen	68,25	69,00	70,00	71,06	74,73	
9.	Perhubungan							
9.1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	6.496.803	5.419.322	5.954.927	5.632.465	2.506.871	Perhubungan di Kota Bandung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan untuk jumlah penumpang angkutan umum.
9.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	72,98	82,96	77,76	82,02	80,05	
9.3	Persentase Simpang tertib lalu lintas yang tertangani	Persen	-	-	-	20	40	
9.4	Rasio Pengguna kendaraan umum v s kendaraan pribadi	Persen	-	-	19,85 : 81,75	20,16 : 79,84	18,25 : 81,75	
9.5	Persentase Sarana prasarana transportasi yang tersedia	Persen	-	-	-	25,19	43,70	
9.6	Cakupan mobilitas penduduk kota dan keselamatan angkutan	Persen	-	-	-	24,02	41,59	
9.7	Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan yang terbangun	Persen	-	-	-	27,40	42,74	
9.8	Persentase jumlah kendaraan angkutan umum yg lulus uji KIR	Persen	99,06	96,35	97,93	95,08	96,22	
9.9	Persentase Simpang tertib lalu lintas yang tertangani	Persen	-	-	-	20	40	
9.10	Persentase dokumen perencanaan	Persen	100	100	100	97,44	88,89	
9.11	Persentase pengguna transportasi ramah lingkungan	Persen	-	-	-	1,03	1,29	
9.12	Persentase kinerja APILL dan parkir	Persen	-	-	-	89,09	85,33	
9.13	Cakupan pelayanan transportasi	Persen	-	-	-	100	56,25	
9.14	Cakupan pelayanan transportasi	Persen	-	-	-	-	70,65	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	5	6	7	8	9	
10.	Komunikasi dan Informatika							
10.1	Website Milik Pemerintah Kota Bandung	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10.2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan (%)	Persen	100	100	100	100	100	100
10.3	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	N/A	N/A	2,9	3,11	3,78	
10.4	Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka	Persen	N/A	N/A	25,00	38,16	45,23	
10.5	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan persandian yang terkendali	Persen	N/A	N/A	33,33	46,87	62,50	
10.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	N/A	N/A	73	79,94	84,72	
10.7	Persentase interkoneksi pengembangan infrastruktur TIK yang berfungsi	Persen	N/A	N/A	100	100	100	
10.8	Persentase layanan informasi melalui media kepada masyarakat	Persen	N/A	N/A	100	100	100	
10.9	Cakupan layanan informasi masyarakat	Persen	N/A	N/A	60,00	61,04	70,13	
10.10.	Persentase dokumen hasil kajian yang digunakan dalam rumusan kebijakan yang diimplementasikan	Persen	N/A	N/A	50	50	57,90	

Komunikasi dan Informatika Kota Bandung terkait sudah tersedianya website milik Pemerintah Kota Bandung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA							Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	5	6	7	8	9			
11.	Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah									
11.1	Persentase Koperasi Aktif (%)	Persen	84,67	86,2	88,85	29,05	29,93		Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bandung cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 untuk indikator Persentase Koperasi Aktif, namun mengalami penurunan pada tahun 2019.	
11.2	Jumlah Anggota Koperasi Aktif (orang)	Orang	553.593	553.593	555.094	119.947	142.411			
11.3	Persentase Usaha Mikro dan kecil (%)	Persen	94,76	94,48	94,98	99,63	99,78			
11.4	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	UMKM	5.365	5.362	5.840	6.238	6.377			
11.5	Jumlah Total Koperasi	Jumlah Koperasi	2.565	2.574	2.521	2.530	2.456			
11.6	Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi	2.172	2.212	2.240	735	735		Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.	
11.7	Jumlah Usaha Mikro	Jumlah	4.603	4.582	5.062	5.816	5.926			
11.8	Jumlah wirasaha baru	Orang	2.162	1.000	600	N/A	N/A			
11.9	Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya	UMKM	N/A	100	270	N/A	N/A			
11.10	Jumlah PKL yang meningkat kemampuan usahanya	Orang	N/A	252	277	N/A	N/A			
11.11	Persentase koperasi sehat	Persen	25,40	26,65	27,22	N/A	N/A			
11.12	Jumlah lapangan kerja baru per koperasi	orang	N/A	730	750	N/A	N/A			
11.13	Jumlah Koperasi berkualitas	Koperasi	N/A	N/A	N/A	30	11			
11.14	Jumlah Koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian	Koperasi	N/A	N/A	N/A	150	95			
11.15	Persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat	Persen	43,99	N/A	N/A	60	60			
11.16	Jumlah Usaha Mikro yang usahanya meningkat	Mikro Usaha	N/A	100	270	240	200			

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	5	6	7	8	9		
11.17	Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat	Persen	33,86	N/A	N/A	60	60	60	
11.18	Jumlah Usaha Non Formal yang kemampuan usahanya meningkat	Orang	N/A	N/A	N/A	365	147		
11.19	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	78,60	86,94	85,09	82,08	87,25		
11.20	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100		
12.	Penanaman Modal								
12.1	Jumlah Investor PMDN/PMA	Jumlah PMDN/PMA	1172	2596	2057	909	562	Penanaman modal di Kota Bandung secara umum cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, namun menurun dari tahun 2019 s/d tahun 2020 untuk indikator jumlah investor PMDN/PMA.	
12.2	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Miliar	11.617,5	12.700,4	14.349,4	8.436,1	18.263,47		
	Indeks Kepuasan Masyarakat/ IKM	Poin	N/A	79,38	80,15	80,30	80,43		
	Rata-rata Waktu ayanan Izin	Hari Kerja	N/A	10	8,2	5	3		
	Rata-rata Waktu Respon Pengaduan	Jam	N/A	4	4,75	2,43	1,55		
13.	Keperumudaan dan Olahraga								
13.1	Porda XIII 2018								
	Prestasi	Emas/Perak/Perunggu	-	-	131/149/139	-	-	-	
	Jumlah Atlet	Orang	-	-	949	-	-	-	
	Jumlah Ofisial	Orang	-	-	462	-	-	-	
	Jumlah Cabor	Orang	-	-	58	-	-	-	
13.2	Pon XIX 2016								
	Prestasi	Emas/Perak/Perunggu	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Atlet	Orang	-	-	-	-	-	N/A	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	5	6	7	8	9		
	Jumlah Oficial	Orang	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Cabor	Orang	-	-	-	-	-	-	
13.3	Seagames 2019								
	Prestasi	Emas/Perak/Perunggu	-	-	-	2/5/14	-	-	
	Jumlah Atlet	Orang	-	-	-	52	-	-	
	Jumlah Oficial	Orang	-	-	-	8	-	-	
	Jumlah Cabor	Orang	-	-	-	28	-	-	
13.4	Asean Games 2018								
	Prestasi	Emas/Perak/Perunggu	-	-	3/1/2	-	-	-	
	Jumlah Atlet	Orang	-	-	52	-	-	-	
	Jumlah Oficial	Orang	-	-	43	-	-	-	
	Jumlah Cabor	Orang	-	-	26	-	-	-	
13.5	Jumlah Wirausahawan baru kepemudaan yang berkembang	Orang	558	1.730	800	600	600	600	
13.6	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan SOR/ GOR dan Sarana Kepemudaan	Nilai	77.64	N/A	80	80,97	81,517		
13.7	Jumlah Pemuda yang Mendapatkan Pembinaan	Orang	N/A	300	5.512	4.944	N/A	N/A	
13.8	Jumlah Organisasi Pemuda yang Mendapatkan Pembinaan	OKP	N/A	N/A	N/A	9	N/A	N/A	
13.9	Jumlah Medali Emas yang Diperoleh Dalam Kompetisi Tingkat Provinsi Jawa Barat	Medali	N/A	N/A	131	35	N/A	N/A	
13.10	Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan Olahraga Masyarakat Secara Aktif	Kecamatan	N/A	N/A	15	30	N/A	N/A	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	5	6	7	8	9		
13.11	Persentase Tempat Kegiatan Olahraga Masyarakat	Persen	N/A	N/A	N/A	100	90		
13.12	Persentase Rata-rata Organisasi Pemuda dan Pemuda Yang Aktif Positif	Persen	N/A	N/A	N/A	0,029	0,003		
13.13	Persentase Rata-rata Pembinaan Keolahragaan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	90		
13.14	Persentase Infrastruktur Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berfungsi Baik	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	40		
14.	Statistik								
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Belum Ada Belum ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
14.2	Persentase data informasi yang berkualitas	Persen	N/A	N/A	35	38,16	45,23		
15.	Persandian								
15.1	Cakupan aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Persen	N/A	N/A	36,00	36,65	40,20	Persandian di Kota Bandung secara umum menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 untuk indikator cakupan aplikasi layanan publik dan tata Kelola pemerintahan berbasis e-government.	
15.2	Cakupan persentase pengelolaan persandian dan aplikasi yang terkendali dan aman	Persen	N/A	N/A	100	100	100		
16.	Kebudayaan								
16.1	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Buah	26	26	N/A	N/A	N/A	Kebudayaan di Kota Bandung terkait dengan penyelenggaraan festival seni dan budaya secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	5	6	7	8	9		
16.2	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	160	176	N/A	N/A	N/A	N/A	
16.3	Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	11,49	11,49	N/A	N/A	N/A	N/A	
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	99	370	N/A	N/A	N/A	N/A	
16.5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	N/A	N/A	N/A	51,83	50,74		
16.6	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	1,57		
16.7	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	1,31		
16.8	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan dimanfaatkan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	2,36		
16.9	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	93,22		
17.	Perpustakaan								
17.1	Jumlah pengunjung Perpustakaan per Tahun (Orang)	Orang	54.181	91.287	112.743	151.119	2.646	Perpustakaan di Kota Bandung secara umum cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 untuk indikator jumlah pengunjung per pustaka per tahun.	
17.2	Jumlah pustakawan (orang)	Orang	2	2	2	9	9		
17.3	Persentase Pemustaka Pertahun	Persen	N/A	N/A	N/A	6,02	2,65		
17.4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Persen	N/A	N/A	82,61	83,30	83,61		
17.5	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Buku	65.578	70.578	79.628	105.446	110.487		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA							Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	5	6	7	8	9			
18.	Kearsipan									
18.1	Jumlah Arsiparis	Arsiparis	4	3	3	4	14			
18.2	Persentase Peringkat Daerah yang Menyelenggarakan Kearsipan Secara Baku	Persen	N/A	N/A	N/A	21,67	11,66			
18.3	Cakupan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Perpustakaan dan Kearsipan	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100			
18.4	Cakupan Sistem Informasi Perpustakaan dan Kearsipan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100			
1.	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan									
1.1	Produksi Perikanan	Persen	101,16	100,02	100,02	100,38	100			
1.2	Konsumsi ikan	Persen	102,53	106,08	103,11	106,02	105,98			
1.3	Produksi Ikan Konsumsi	Ton	2965	2970,7	2.970,6	2.981,3	1.921,09		Kelautan dan Perikanan di Kota Bandung secara umum mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.	
1.4	Bertambahnya jumlah pelaku usaha bidang perikanan	Orang	N/A	N/A	N/A	85	30			
2.	Pariwisata									
2.1	Kunjungan wisata	Persen	122	102	108,98	113,14	38			
2.2	Lama kunjungan Wisata	Hari	N/A	N/A	2,21	2,21	1,7			
2.3	PAD sektor pariwisata	Persen	30	26	27,80	35,80	24			
2.4	Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100			
2.5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		N/A	N/A	N/A	N/A	83,75			
2.6	Indeks Brand Awareness		N/A	N/A	N/A	3,52	3,2			
2.7	Persentase daya tarik wisata dikembangkan	Persen	N/A	N/A	N/A	25	25			

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	5	6	7	8	9	
2.8	Persentase jasa usaha pariwisata berstandar baik	Persen	N/A	N/A	N/A	46,09	12,80	
2.9	Persentase lembaga dan SDM Pariwisata meningkat kompetensinya (kriteria kompetensi sertifikasi)	Persen	N/A	N/A	N/A	2,58	3,4	
2.10	Persentase rancangan kebijakan berbasis riset (evidence based policy)	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	80	
2.11	Persentase rumah /kampung kreatif / inkubasi / berkembang	Persen	N/A	N/A	N/A	3,33	43,33	
2.12	Persentase industri usaha jasa pariwisata mendapat stimulus	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	9,77	
3.	Pertanian							
3.1	Produktivitas padi per hektar	Ton/ha	6.805	6.808	6.808	6.808	6.823	Pertanian di Kota Bandung secara umum mengalami stagnasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 untuk indikator produksi padi per hektar, kemudian mengalami peningkatan produksi.
3.2	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	Persen	0,12	0,12	0,11	0,10	0,10	
3.3	Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Pertanian	Orang	N/A	N/A	N/A	102	45	
3.4	Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Peternakan	Orang	N/A	N/A	N/A	81	32	
3.5	Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Perikanan	Orang	N/A	N/A	80	85	30	
3.6	Jumlah Kelompok Masyarakat di Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan diberdayakan	Kelompok	554	N/A	85	47	48	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	5	6	7	8	9		
3.7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	N/A	N/A	N/A	84	90,03		
3.8	Produksi Tanaman Sayuran	Pohon	N/A	N/A	N/A	813.880	767.340		
3.9	Produksi Tanaman Hias	Pohon	N/A	N/A	198.959	412.144	163.895		
3.10	Jumlah Penanaman Pohon Buah-buahan	Pohon	N/A	N/A	N/A	53.869	20.711		
3.11	Persentase Kualitas bahan baku tembakau	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100		
3.12	Populasi Ternak Domba	Ekor	N/A	34.684	35.702	36.783	38.844		
3.13	Produksi Ikan Hias	Ekor	N/A	N/A	1.222.000	1.823.200	1.282.278		
3.14	Produksi Ikan Konsumsi	Ton	2.965	N/A	2.970	2.981,27	1.921,05		
3.15	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kapita/tahun	N/A	N/A	37,95	40,23	40,24		
4.	Perdagangan								
4.1	Nilai Ekspor	Juta US\$	609	465	465	466	321,26	Perdagangan di Kota Bandung secara umum mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan fluktuatif sampai dengan tahun 2020 untuk indikator nilai ekspor. Kondisi ini dipengaruhi oleh pandemi Covid -19.	
4.2	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	N/A	N/A	81,05	82,55	83,46		
4.3	Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	N/A	0,27	13,74	9,22	8,49		
4.4	Cakupan pembinaan e-commerce	Pelaku Usaha	N/A	100	150	150	N/A		
4.5	Meningkatnya kualitas pelaku perdagangan dalam negeri	Pelaku Usaha	N/A	385	300	255	N/A		
4.6	Meningkatnya Alat UTTP yang ditera dan ditera ulang	Alat UTTP	N/A	N/A	N/A	124.646	190.063		
4.7	Informasi mengenai barang kena cukai illegal	Merk Rokok	N/A	N/A	10	15	16		
4.8	Nilai daya saing perdagangan e-commerce	Poin	N/A	N/A	N/A	361,44	401,60		
4.9	Nilai daya saing perdagangan	Poin	N/A	N/A	N/A	360,59	460,59		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	5	6	7	8	9		
5.	Perindustrian								
5.1	Potensi Sektor Industri:								
	Industri Menengah:								
	- Unit Usaha	Unit	N/A	835	321	334	1.433		
	- Tenaga Kerja	Orang	N/A	27.263	35.063	35.507	82.073		
	Industri Kecil Formal:								
	- Unit Usaha	Unit	N/A	2.932	3.722	3.723	2.561		
	- Tenaga Kerja	Orang	N/A	46.540	70.285	70.287	21.398		
	Potensi Sektor Industri Kecil								
	Industri Kecil Pangan								
	- Unit Usaha	Unit	518	516	423	425	425		
	- Tenaga Kerja	Orang	2.214	2.210	3.227	3.258	3.258		
	Industri Kecil Sandang								
	- Unit Usaha	Unit	1.237	1.273	814	814	814		
	- Tenaga Kerja	Orang	6.253	6.253	8.770	8.770	8.770		
	Industri Kecil Kimia dan Bahan Bangunan								
	- Unit Usaha	Unit	36	36	99	100	101		
	- Tenaga Kerja	Orang	124	124	700	702	708		
	Industri Kecil Logam dan Elektronika								
	- Unit Usaha	Unit	222	222	165	165	165		
	- Tenaga Kerja	Orang	451	451	1.224	1.224	1.224		
	Industri Kecil Kerajinan								
	- Unit Usaha	Unit	711	711	11	11	11		
	- Tenaga Kerja	Orang	3.762	3.762	75	75	75		
5.2	Jumlah Industri Kecil Menengah Tersertifikasi	IKM	N/A	600	410	350	476		

Potensi sector industri di Kota Bandung meningkat dari tahun 2019 ke tahun 2020 untuk industri menengah.

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	5	6	7	8	9		
5.3	Jumlah industri Kecil Menengah yang meningkatkan daya saingnya	IKM	N/A	N/A	N/A	280	283		
5.4	Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang meningkatkan kemampuannya dalam proses produksi	Pelaku Usaha	N/A	N/A	N/A	250	150		
5.5	Jumlah Sentra Industri yang meningkatkan daya saingnya	Sentra	N/A	N/A	N/A	1	4		
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah								
1	Capaian Realisasi AKIP:								
	- Nilai Hasil Evaluasi	Nilai	80,61	80,37	80,05	78,00	78,97		
	- Kategori Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori	A	A	A	BB	BB		
2	Nilai LPPD Sekretariat Daerah	Nilai	2,9919	3,3040	3,4144	3,3019	3,4013		
3	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	100	100	100	128	147		
4	Rata-rata IKM Kota Bandung	Angka	80	82,02	82,88	N/A	N/A		
5	Nilai IKM "Baik" (minimal 83)	Angka	N/A	N/A	N/A	40,00	96,67		

Pendukung urusan pemerintah daerah di Kota Bandung secara umum mengalami penurunan nilai evaluasi dari realisasi AKIP sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	5	6	7	8	9		
6	Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Komponen Pelaporan Kinerja	Angka	11,89	12,60	12,61	11,34	11,78		
7	Rasio Berita Baik dan Berita Buruk	%	N/A	86,14	82,18	82,96 : 17,04	97,70 : 2,30		
8	Terlaksananya Penerimaan Tamu Negara, Pemerintah/Departemen /Lembaga	Persen	100	100	100	100	100		
9	Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi serta kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100		
10	Persentase Penataan Batas Daerah dan Batas Wilayah	Persen	100	100	100	100	100		
11	Persentase Kecamatan Berkinerja Baik	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	63,33		
12	Persentase pengendalian kualitas pembangunan daerah	Persen	N/A	100	100	100	100		
13	Cakupan kegiatan Bidang Sosial Keagamaan yang terfasilitasi	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100		
14	Persentase Implementasi kerja sama lingkup dalam dan luar negeri	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	111,8		
15	Persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari TJSJ dan Sumbangan Pihak Ketiga	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100		

II - 166

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	5	6	7	8	9		
16	Persentase BUMD yang tercapai kinerjanya (keterangan: masing masing bumd diberikan taget kinerja sesuai dengan tujuan dibentuknya)	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40	
17	Persentase permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Perekonomian yang diselesaikan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	
18	Persentase Rancangan Kebijakan bidang Sosial kemasyarakatan yang ditindaklanjuti dan Cakupan kegiatan Bidang Kesra yang terfasilitasi	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	
19	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung kepada Sekretariat DPRD Kota Bandung terhadap Fasilitasi Kebutuhan Kerja DPRD	Persen	80	80	80	81,5	85		
20	Rata-rata waktu Fasilitasi Penyampaian Aspirasi Masyarakat ke Anggota DPRD melalui Komisi-komisi	Menit	100	90	120	90	85		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	5	6	7	8	9	
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1.	Perencanaan							
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	1	1	1	1	1	1
1.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Dokumen	1	1	1	1	1	1
1.3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Dokumen	1	1	1	1	1	1
1.4	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100	100	100	100	100
1.5	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	24,82	25,41	25,41	25,57	25,35	25,35
1.6	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai	20,67	19,96	19,96	20,01	18,48	18,48
1.7	Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	Persen	79	66	68	80	76,19	76,19
1.8	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	Persen	100	100	100	100	100	100
1.9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	75,13	77,18	77,92	79,72	84,41	84,41

Perencanaan di Kota Bandung secara umum sudah dilaksanakan dengan baik dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Telah tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda. Telah tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perka/Perkada.

Untuk nilai SAKIP Kota dengan komponen pada Perencanaan Kinerja secara umum mengalami penurunan dan fluktuatif dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	5	6	7	8	9	
1.10	Jumlah Rancangan RKPD Tingkat Kota	Dokumen	2	2	2	2	2	2
1.11	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	2	2	2	3	2	2
1.12	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumberdaya Keuangan dan Sumber Daya Alam	Dokumen	9	7	17	4	4	4
1.13	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Dokumen	6	3	7	3	3	3
1.14	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkun Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Dokumen	7	4	14	3	3	3
1.15	Persentase Rekomendasi hasil Money yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100
1.16	Persentase Dokumen Pelaporan Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100
1.17	Capaian Penggunaan DBHCHT di Kota Bandung sesuai aturan	Persen	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	5	6	7	8	9		
2.	Keuangan								
2.1	Persentase PAD terhadap Pendapatan (Realisasi)	Persen	37,87	44,96	43,29	40	37	Keuangan di Kota Bandung secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 untuk indikator persentase PAD terhadap pendapatan (realisasi), namun mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Kondisi pandemi Covid-19 dari tahun 2019 dan 2020 merupakan faktor yang mempengaruhi persentase PAD terhadap pendapatan.	
2.2	PAD (Realisasi) Rp M	Milyar	2.1528	2.578,5	2.571,6	2.548,2	2.063,4		
2.3	Jumlah Pendapatan Daerah (realisasi)	Milyar	5.685,1	5.735,0	5.939,9	6.381,8	5.643,6		
2.4	Hasil Opini BPK	Opini	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP		
2.5	Persentase SILPA	Persen	9,13	10,86	3,82	4	4		
2.6	Total SILPA	Rp Miliar	532,1	601,8	233,8	231,20	236,35		
2.7	Total APBD (realisasi)	Rp Miliar	5.830,4	5.541,7	6.114,4	6.310,6	5.407,3		
2.8	Persentase Belanja Pendidikan (20%) (Realisasi)	Persen	28,93	21,53	23,69	29	26		
2.9	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan (Realisasi)	Rp Miliar	1.686,6	1.193,1	1.448,6	1.837,80	1.383,86		
2.10	Total APBD (Realisasi)	Rp Miliar	5.830,4	5.541,7	6.114,4	6.310,6	5.407,3		
2.11	Persentase belanja kesehatan (Realisasi)	Persen	10,82	16,10	18,93	19	21		
2.12	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan (Realisasi)	Rp Miliar	630,8	892,1	1.157,6	1.188,40	1.117,66		
2.13	Total APBD (Realisasi)	Rp Miliar	5.830,4	5.541,7	6.114,4	6.310,6	5.407,3		
2.14	Perbandingan antara belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung (Realisasi)	Persen	56,16%	51,48%	50,09%	55%	49%		
		Persen	43,84%	48,16%	49,91%	45%	51%		
2.15	Jumlah Belanja Langsung (Realisasi)	Rp Miliar	3.274,3	2.852,9	3.063	3.473,9	2.643,24		
2.16	Total APBD (Realisasi)	Rp Miliar	5.830,4	5.541,7	6.114,4	6.310,6	5.407,3		
2.17	Jumlah Belanja Tidak Langsung (Realisasi)	Rp Miliar	2.556,1	2.668,9	3.051,4	2.838,1	2.764,05		
2.18	Total APBD (Realisasi)	Rp Miliar	5.830,4	5.541,7	6.114,4	6.310,6	5.407,3		
2.19	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	5	6	7	8	9		
2.20	Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RAPPB	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	(42 HK untuk RAPBD dan 15 HK untuk RAPBDP)	(8 HK untuk RAPBD dan 15 HK untuk RAPBDP)	(26 HK untuk RAPBD dan 2 HK untuk RAPBDP)	46 Hari Kerja RAPBD dan 6 Hari Kerja		N/A	
2.21	Rata rata Penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai Perundang undangan	HK	2	2	2	2	2	2	
2.22	Laporan Keuangan Kota Bandung tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang undangan	Dokumen	N/A	N/A	14	14	14	14	
2.23	Laporan BMD Kota Bandung tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang - undangan	Dokumen	N/A	N/A	2	2	2	2	
2.24	Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang undangan	Lokasi/ Bidang	N/A	N/A	30	30	30	30	
2.25	Persentase tanah milik pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN	Persen	25,10	29	20	22,78	22,78	22,78	
2.26	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	N/A	N/A	N/A	84,19	85,26	85,26	
2.27	Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah	Nilai	N/A	N/A	89,26	91,39	91,84	91,84	
2.28	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	Rp.	1.720.491.187.627	2.175.084.126.326	2.160.181.714.001	2.154.648.077.249	1.629.188.481.446	1.629.188.481.446	
2.29	Nilai SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	98,99	98,99	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	5	6	7	8	9		
3.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan								
3.1	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100	100	
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun	Persen	N/A	N/A	N/A	81,00	61	Pendidikan di Kota Bandung dari aspek persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hal ini terkait kondisi pandemi Covid-19 dimana pengadaan pelatihan secara <i>offline</i> berkurang.	
3.3	Persentase ASN pemenuhan ASN masing- masing PD sesuai kompetensi dan beban kerja	Persen	N/A	N/A	N/A	74,17	80,59		
3.4	Persentase PD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin sedang dan berat.	Persen	86,11	73,97	80,8	91,67	90		
3.5	Persentase akurasi data kepegawaian	Persen	99,92	93,89	96,38	98,06	98,45		
3.6	Persentase penempatan dan pengembangan kompetensi sesuai hasil assessment	Persen	N/A	N/A	N/A	69,77	79,89		
3.7	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	Persen	92,59	92,38	93,5	89,00	89,09		
3.8	Persentase Peringkat Daerah yang Pegawainya Disiplin dan Berkinerja dengan Kategori Baik	Persen	N/A	N/A	N/A	95,83	95		
3.9	Indeks Survey Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persen	79,04	81,64	81,97	82,38	92,42		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	5	6	7	8	9		
4.	Penelitian dan Pengembangan								
4.1	Persentase implementasi rencana kelibangan (%)	Persen	100	100	100	100	100	100	Penelitian dan pengembangan di Kota Bandung secara umum dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan untuk indikator persentase hasil kelibangan yang ditindaklanjuti.
4.2	Persentase hasil kelibangan yang ditindaklanjuti (%)	Persen	50	70	75	100	100	100	
4.3	Jumlah kelibangan dalam renja perangkat daerah	PD	9	11	16	12	N/A	N/A	
5.	Unsur Pengawasan								
5.1	Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material	Persen	80,33	83,61	78,62	N/A	N/A	N/A	Pengawasan di Kota Bandung secara umum meningkat dari tahun 2019 ke tahun 2020.
5.2	Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP	Persen	65	80	73,53	N/A	N/A	N/A	
5.3	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	Persen	21,93	76,32	51,78	5,24	2,21	2,21	
5.4	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	Persen	19,91	39,95	51,78	11,31	3,21	3,21	
5.5	Persentase SKPD yang Tertib administrasi barang / aset daerah	Persen	60	70	N/A	N/A	N/A	N/A	
5.6	Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal B	Persen	70,49	91,80	N/A	96,83	90	90	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	5	6	7	8	9	
5.7	Persentase Aduan masyarakat atas Pelayanan publik yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	N/A	N/A	N/A	90
5.8	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Nilai	N/A	N/A	N/A	3,00	3,00	
5.9	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Yang Memiliki Standar Kompetensi	Persen	80	N/A	N/A	80	N/A	
5.10	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Perangkat Daerah yang Menyatakan Puas Atas Layanan Inspektorat Kota Bandung	Nilai	72	76	70	82	84	
5.11	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai	N/A	N/A	N/A	68	85	
2.4.	Aspek Daya Saing							
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga							
	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Rp Juta	127.374,24	141.574,75	155.559,48	171.096,86	172.169,64	
	2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	Rp Juta	1.184,50	1.287,86	1.578,26	1.771,20	1.751,87	
	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	Rp Juta	25.013,80	27.716,33	29.498,18	31.646,33	31.969,27	
	4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	Rp Juta	61.595,85	67.447,86	73.778,14	80.043,53	76.415,67	
	5. Perubahan Inventori	Rp Juta	8.696,91	9.031,19	9.902,56	10.097,82	4.737,34	
	6. Net Ekspor Impor Barang dan Jasa	Rp Juta	(7.001,66)	(6.948,37)	(5.933,53)	(6.194,86)	(3.427,15)	

Aspek daya saing di Kota Bandung secara umum terkait pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

II - 174

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	5	6	7	8	9		
	Produk Domestik Regional Bruto	Rp Juta	216.863,64	240.109,63	264.393,08	288.460,88	283.616,64		
2	Persentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam	Persen	85,29	97,06	100	N/A	N/A		
	Persentase minimal banjir terselesaikan	Persen	40	90	100	N/A	N/A		
	Lama penanganan yang tertangani pada titik genangan	Menit	N/A	N/A	N/A	63,30	60,76		
3	Jumlah Restoran	Unit	1.635	1.762	1.826	1.871	1.909		
	Jumlah Katering	Unit	504	652	725	785	813		
4	Jumlah Hotel Bintang dan Non Bintang:	Hotel	1.018	1.149	1.288	1.285	1.299		
	- Hotel Bintang 5	Hotel	11	12	12	12	12		
	- Hotel Bintang 4	Hotel	39	43	43	44	45		
	- Hotel Bintang 3	Hotel	49	52	54	55	61		
	- Hotel Bintang 2	Hotel	32	32	32	33	32		
	- Hotel Bintang 1	Hotel	6	6	6	6	6		
	- Hotel Melati 3	Hotel	110	114	116	119	120		
	- Hotel Melati 2	Hotel	65	65	66	68	69		
	- Hotel Melati 1	Hotel	114	129	141	151	154		
	- Rumah Kos	Unit	592	696	818	797	800		
5	Jumlah Pelanggan yang menggunakan Listrik PLN	Orang	844.224	888.968	927.775	964.121	N/A		
6	<i>Liveable City Index:</i>								
	- Transportasi	Indeks	-	6,1	6,6	6,7	N/A		
	- Tata Ruang	Indeks	-	7,3	7,0	7,3	N/A		
	- Sosial dan Keamanan	Indeks	-	8,5	7,9	-	N/A		
	- Lingkungan dan Kesehatan	Indeks	-	8,1	7,1	-	N/A		
	- Layanan Dasar	Indeks	-	6,3	7,0	-	N/A		
	- Utilitas	Indeks	-	7,2	8,8	-	N/A		
	- Ekonomi	Indeks	-	7,5	8,0	7,5	N/A		

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	5	6	7	8	9		
	- Fasilitas Pendidikan	Indeks	-	-	-	8,8	N/A		
	- Fasilitas Kesehatan	Indeks	-	-	-	8,7	N/A		
	- Infrastruktur	Indeks	-	-	-	7,9	N/A		
	- Keamanan	Indeks	-	-	-	7,4	N/A		
	- Sosial	Indeks	-	-	-	7,5	N/A		
	- Lingkungan	Indeks	-	-	-	7,4	N/A		
	- LCI Kota Bandung	Indeks	-	7,3	7,5	7,7	N/A		
7	Pajak Daerah	Rp	1.720.491.187.627	2.175.084.126.326	2.160.181.714.001	2.154.648.077.249	1.629.188.481.446		
8	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp	92.165.134.000	50.064.557.334	69.134.407.113	62.467.179.931	52.332.312.611		
9	Rasio Lulus S1/S2/ S3	Persen	14,81	14,89	10,95	10,98	N/A		
10	Rasio Ketergantungan Total (%)	Rasio	39,4	38,43	38,32	38,27	38,24		
11	Rasio Ketergantungan Penduduk Laki-Laki (%)	Rasio	38,9	38,07	38	37,96	N/A		
12	Rasio Ketergantungan Penduduk Perempuan (%)	Rasio	39,8	38,79	38,65	38,58	N/A		

Sumber: BPS Kota Bandung, LKPD Wali Kota Bandung, LAKIP Kota Bandung, yang dikelola dalam SIPD, 2020

2.5. Capaian Kinerja RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018

Secara umum capaian kinerja Misi RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 sampai dengan tahun 2017 yaitu sebesar 70,00%, atau dari sejumlah 40 indikator kinerja sasaran, terdapat 28 indikator sasaran tercapai, dan 12 indikator kinerja sasaran tidak tercapai. Diantara indikator sasaran yang tidak tercapai adalah tingkat cakupan air minum, luasan ruang terbuka hijau, opini BPK terhadap laporan keuangan daerah, serta wirausaha baru.

Sedangkan untuk capaian kinerja urusan serta program RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 sampai dengan tahun 2017 yaitu sebesar 92,10%, atau dari total sebanyak 329 indikator program, tercapai 303 indikator program dan tidak tercapai sebanyak 26 indikator program. Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung pada periode sebelumnya, yaitu Bandung Sehat, Bandung Resik, Bandung Nyaman, dan Bandung Sejahtera yang telah tercapai adalah 15 program prioritas, dan yang tidak tercapai adalah 7 program prioritas, diantaranya adalah Bebas Banjir, Bebas Macet, perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni, penciptaan 100.000 wirausahawan baru, penciptaan 250.000 lapangan pekerjaan baru, subsidi harga sembako dan gas 3 Kg, serta santunan kematian Rp 2 Juta/Jiwa.

Capaian kinerja misi/sasaran, serta capaian kinerja urusan dan program RPJMD 2013-2018 sampai dengan tahun 2017, tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian kinerja tahun 2014-2016, sebagai implikasi dari perubahan nomenklatur urusan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan organisasi perangkat daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, serta berdasarkan indikator kinerja pada Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Tabel 2.110 merupakan Capaian Kinerja Misi 1 RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018. Tabel 2.111 merupakan Capaian Kinerja Misi 2 RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018. Tabel 2.112 merupakan Capaian Kinerja Misi 3 RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018 serta Tabel 2.113 merupakan Capaian Kinerja Misi 4 RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018.

Tabel 2.110

Capaian Kinerja Misi 1 RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Sasaran												Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
			2014		2015		2016		2017		2018		Target	Realisasi	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
MISI 1: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan															
Sasaran 1: Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten															
1	Persentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang	Persentase	60	63,34	63	65	67	67	71	72,65	76	78,19			Tercapai
2	Tingkat implementasi tata ruang	Persentase	-	-	-	-	-	-	80	85	85	87			Tercapai
3	Tingkat keterbanguan infrastruktur PPK Gedebage	Persentase	30	34,9	40	37,1	45	46	60	51,38	70	59,89			Belum Tercapai
Sasaran 2: Terwujudnya infrastruktur jalan, sanitasi, dan air bersih yang berkualitas dan merata															
4	Rasio luas jalan dalam kondisi baik	Persentase	75	81,03	85	91,22	100	100	-	-	-	-			
5	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	Persentase	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100			Tercapai
6	Indeks aksesibilitas Jalan	Skala	7,42	7,41	65	7,42	7,45	7,43	7,47	7,47	7,48	7,48			Tercapai
7	Persentase wilayah Kota Bandung terang pada malam hari	Persentase	55	55	75	83,27	100	96,91	-	-	-	-			
8	Persentase minimal jumlah PJU terbangun berfungsi baik	Persentase	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100			Tercapai
9	Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik	Persentase	70	58,46	80	81,24	100	91,22	-	-	-	-			Tercapai
10	Persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik	Persentase	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100			Tercapai
11	Titik banjir terselesaikan	Lokasi	32 titik	30 titik	50 titik	50 titik	68 titik	58 titik	68 titik	66 titik	68 titik	68 titik			Tercapai
12	Tingkat pelayanan air limbah dengan sistem terpusat	Persentase	66	66,6	68	70,77	70	72,07	-	-	-	-			-
13	Tingkat pelayanan air limbah dengan sistem <i>offsite</i> dan <i>onsite</i>	Persentase	-	-	-	-	-	-	72	79,09	74	80,77			Tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Sasaran												Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018	
			2014		2015		2016		2017		2018		Target	Realisasi		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
14	Tingkat cakupan pelayanan air minum	Persentase	78	70,26	29	70,65	82	72,15	84	77,27	85	78,88		78,88	Belum Tercapai	
Sasaran 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan																
15	Luas kawasan permukiman kumuh	Persentase	10,76	8,50	10,5	8,71	10,27	9,93	10,03	9,76	9,27	5,16		5,16	Tercapai	
16	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	11	9	14	10	16	11	-	-	-	-		-	-	
17	Perbaikan rumah tidak layak huni	Unit	80	85	2.480	1.614	2.480	2.993	7.007	4.978	10.000	8.266		8.266	-	
Sasaran 4: Terwujudnya sistem transportasi publik yang nyaman serta terkendalinya kemacetan																
18	Persentase tersedianya fasilitas sarana dan prasarana SAUM sesuai dengan Rencana Induk Transportasi Kota	Persentase	23	16	47	32	35	32	-	-	-	-		-	-	
19	Persentase aspek penyebab kemacetan yang terkendali	Persentase	31	31,25	29	46,88	69	53	-	-	-	-		-	-	
20	Titik kemacetan yang teratasi	Lokasi	-	-	-	-	-	-	24	24	32	28		28	Belum Tercapai	
21	Rasio antara pengguna transportasi umum dengan kendaraan pribadi	Rasio	-	-	-	-	-	23,77	24,76	19,5:80,5	25 : 75	26,14 : 73,86		26,14 : 73,86	Belum Tercapai	
Sasaran 5: Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas																
22	Tingkat pengelolaan sampah kota	Persentase	88	87,23	89	87,41	90	90,4	-	-	-	-		-	-	
23	Persentase pelayanan sampah	Persentase	-	-	-	-	-	-	100	100	100	97,97		97,97	-	
24	Tingkat kualitas udara perkotaan memenuhi baku mutu udara ambien	Persentase	30	96	17	92,6	40	35	-	-	-	-		-	-	
25	Tingkat kualitas udara perkotaan pada titik pantau memenuhi baku mutu udara ambien	Persentase	-	-	-	-	-	-	45	65	86	96,27		96,27	Tercapai	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Sasaran												Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018			
			2014			2015			2016			2017				2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		Target	Realisasi	
26	Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol. B (dari tercemar berat menjadi tercemar ringan)	Persentase	12,50	0	2	12,50	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol. B (dari tercemar berat menjadi tercemar ringan)	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	2 Sungai	2 Sungai	2 Sungai	2 Sungai	2 Sungai	2 Sungai	Tercapai		
28	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Persentase	2	6,38	16	5,23	2	2,05	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota yang efektif menunjang fungsi hidrologi	Persentase	14	12,14	16	12,15	18	12,17	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	Luasan ruang terbuka hijau	Persentase	-	-	-	-	-	12,17	20	12,2	12,2	23	12,2	12,2	12,2	Belum Tercapai		
31	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persentase	45,98	45,98	45,98	45,98	68,57	68,57	80	81,17	80	80	91,96	91,96	91,96	91,96		
32	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>)	Menit	< 20	15,26	<17	14,20	<16	14,07	<15	<15	12,06	<15	<15	13,43	13,43	13,43		

Sumber: Bappelitbang Kota Bandung, 2020

Tabel 2.111

Capaian Kinerja Misi 2 RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN												Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018			
			2014			2015			2016			2017				2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		Target	Realisasi	
MISI 2: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani																		
Sasaran 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN																		
1	PD yang mendapat temuan berindikasi penyimpangan material/administrasi	Persentase	26	6,56	23	19,67	20	1,64	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	PD yang telah menerapkan SPIP level berkembang	Persentase	33	40,98	50	52,46	65	81,97	-	-	-	-	-	-	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN												Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018		
			2014		2015		2016		2017		2018		Realisasi	Target		Realisasi	Target
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan public																	
3	Perangkat daerah dengan IKM "Baik"	Persentase	-	-	-	-	49,18	75	96,67	90	100				Tercapai		
4	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	B	B	B	B									-		
Sasaran 3 : Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi																	
5	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	Persentase	73	73,56	76	75,27	79	92,59	-	-	-	-	-	-	-		
6	Tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi	Survey	Cukup	N/A	Baik	N/A	Baik	N/A	-	-	-	-	-	-	-		
7	Nilai evaluasi AKIP Kota	Kategori	CC	CC	CC	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Tercapai		
8	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Kategori	WDP	WDP	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP	N/A	Belum Tercapai		
9	Hasil dari EKPPD	Kategori	Sangat baik = 3,0550	Baik/tinggi = 2,8400	Sangat baik = 3,0992	Baik	Sangat baik = 3,1434	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi (ST)	Tercapai						
Sasaran 4 : Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government																	
10	Cakupan wilayah untuk pelayanan informasi pembangunan	Persentase	50	34,21	75	74,83	85	85	85	-	-	-	-	-	-		
11	Tingkat layanan interaksi pengaduan secara 0	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-		
Sasaran 5 : Terwujudnya Bandung Smart City																	
12	Level kematangan smart city	Kategori	-	-	-	-	-	Scattered	Integrative	Integrative	Smart	Integrative	Integrative	Integrative	Belum Tercapai		
Sasaran 6 : Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis																	
13	Indeks demokrasi	Skala	-	-	66,50-67,00	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sasaran 7 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu																	
14	Tingkat partisipasi pemilihan umum	Persentase	57	77,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sasaran 8 : Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum																	
15	Cakupan penegakan Perda	Persentase	70	70	75	84	80	90,35	100	90,5	100	100	100	100	Tercapai		

Sumber: Bappeditbang Kota Bandung, 2020

Tabel 2.112

Capaian Kinerja Misi 3 RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN												Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
MISI 3: Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing															
Sasaran 1: Mewujudkan sistem pendidikan di Kota Bandung yang merata, berkeadilan, dan berdaya saing secara global															
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	Tahun	11,07	10,51	11,37	10,52	11,15	10,58	11,8	10,59	12	10,63			Belum Tercapai
2	Angka Melek Huruf (AMH)	%	99,66	99,63	99,75	99,65	99,65	99,69	99,93	99,77	100	N/A			Belum Tercapai
Sasaran 2: Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau.															
3	Persentase pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak, remaja, dan ibu	Persentase	80	100,76	85	99,45	87	118,92	-	-	-	-	-	-	-
4	Persentase penyakit menular yang ditangani	Persentase	100	80,67	100	101,19	100	102,38	-	-	-	-	-	-	-
5	Persentase pasien miskin yang dirujuk dan dilayani oleh PPK II	Persentase	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-
6	Persentase RS memenuhi standar pelayanan	Persentase	60	66,91	65	83,48	70	100	-	-	-	-	-	-	-
Sasaran 3: Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan															
7	Angka Kematian Ibu (AKI)/ konversi	Per 100 ribu kelahiran hidup	-	-	-	-	-	53,47	53,37	52,57	53,37	75,33			Belum Tercapai
8	Angka Kematian Bayi (AKB)/ konversi	Per 1.000 kelahiran hidup	-	-	-	-	-	29,22	28,99	28,91	28,90	23,8			Tercapai
9	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	-	-	-	-	-	73,84	73,86	73,86	73,87	74			Tercapai
10	Persentase gizi buruk	Persentase	-	-	-	-	-	0,57	0,49	0,39	0,42	0,38			Tercapai
11	Jumlah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah yang memenuhi standar layanan	Unit	-	-	-	-	-	18	26	26	33	35			Tercapai
Sasaran 4: Meningkatkan kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan, dan penyesuaian lingkungan															
12	Jumlah RW siaga aktif	RW	778	714	959	1.229	1.14	1.338	-	-	-	-			-
13	Persentase kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat	Persentase	7	13,90	14	21,85	20	38,41	-	-	-	-			-

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN												Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
14	Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat	Persentase	73,80	72,47	75,80	72,97	76,3	84,48	-	-	-	-	-	-	
Sasaran 5: Terkendalinya kasus penyakit zoonosa															
15	Kasus penyakit zoonosa	Kasus	8	1	8	0	8	0	-	-	-	-	-	-	
Sasaran 6: Terwujudnya karakter/jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya															
16	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	-	-	-	-	-	N/A	-	-	52,49	N/A	-	-	
17	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	65,3	67,73	65,35	73,93	65,4	95,52	65,55	95,52	65,60	95,03	Tercapai	-	
Sasaran 7: Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan															
18	Jumlah penduduk maksimal Kota Bandung	Jiwa	2.502.808	2.470.802	2.530.122	2.481.469	2.557.636	2.490.622	-	-	-	-	-	-	
19	Angka fertilitas	Anak per wanita usia subur	1,99	1,99	1,98	1,97	1,97	1,97	1,96	1,95	-	-	Tercapai	-	
20	Indeks Pemberdayaan Gender (<i>Gender Empowerment Measurement</i>)	Skala	70,05	73,93	70,1	70,6	70,15	58,27	-	-	-	-	-	-	
21	Kelurahan layak anak per seluruh kelurahan	Persentase	10	10	20	20	40	60	-	-	-	-	-	-	
Sasaran 8: Meningkatnya pelestarian seni budaya serta prestasi kepemudaan dan olahraga															
22	Jumlah seni budaya tradisi yang dilestarikan	Unit	3 unit	3 unit	3 unit	10 unit	3	10	-	-	-	-	-	-	
23	Prestasi olah raga di tingkat provinsi dan nasional	Peringkat	Juara 1 pada POR Provinsi dan Juara 1 pada POR Pemda	Juara 2 POR Pemda	Juara 1 POR Pemda	Juara 12 POR Pemda	Kontribusi atlet kontingen PON, Juara	Juara Umum	-	-	-	-	-	-	
Sasaran 9: Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama															
24	Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing	Nilai	C	N/A	Cukup (C)	N/A	B	N/A	-	-	-	-	-	-	
25	Terwujudnya toleransi dan kerukunan umat beragama	Nilai	C	N/A	Cukup (C)	Tinggi (T)	B	N/A	-	-	-	-	-	-	
Sasaran 10: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan															
26	Peran serta swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Rupiah	150 miliar	179,206 miliar	165 miliar	191,7 miliar	181,5 miliar	201,2 miliar	-	-	-	-	-	-	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN												Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
27	Tingkat pelaksanaan inovasi pemberdayaan dan pembangunan kewilayahan	Skala	N/A	N/A	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	-	-	-	-	-	-	
Sasaran 11: Menurunnya angka kemiskinan															
28	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Jiwa	301.890	304.939	298.871	366.296	295.882	366.296	292.923	276.708	289.994	276.708	276.708	Tercapai	
29	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terlayani	Persentase	20	20,9	22	28,38	24	32,27	34	47,41	36	48,85	Tercapai		
30	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni (Akumulasi)	Unit	80	85	2.480	1.614	2.480	2.993	7.007	4.978	10.000	8.266	Belum Tercapai		
31	Daya tampung rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	KK	-	-	-	-	-	990	1.790	961	2.390	961	Belum Tercapai		
32	Luas kawasan permukiman kumuh	Persentase	10,76	8,5	10,5	8,71	10,27	9,93	10,03	9,76	9,27	5,16	Tercapai		

Sumber: Bappelitbang Kota Bandung, 2020

Tabel 2.113

Capaian Kinerja Misi 4 RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN												Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
MISI 4: Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan															
Sasaran 1: Terjaganya ketersediaan pangan															
1	Penguatan cadangan pangan ekuivalen beras	Ton	24	26,7	60	72,26	60	82,29	60	79,83	60	89,057	89,057	Tercapai	
Sasaran 2: Meningkatkan akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri															
2	Nilai ekspor Kota Bandung	Juta US \$	603	606	635	609	609	614	614	465	614	465	465	Tidak Tercapai	
Sasaran 3: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah															
3	Penerimaan pajak daerah	Juta Rupiah	1.400.000.	1.400.863	1.485.000	1.485.256	2.186.416	1.720.491	2.400.000	2.175.084	2.644.000	2.160.182	2.160.182	Tidak Tercapai	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN												Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
4	Penerimaan retribusi	Juta Rupiah	138.000	99.192	107.56	64.99	142.000	92.165	144.000	50.065	146.000	69.134		Tidak Tercapai	
Sasaran 4: Mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/ masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik															
5	Insentif pajak daerah	Jumlah kelompok sasaran	12	12	13	13	14	16	-	-	-	-	-	-	
Sasaran 5: Meningkatkan sinergitas pembiayaan pusat, provinsi, daerah															
6	Program/kegiatan yang pendanaannya melibatkan APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBD Kota Bandung	Jumlah	-	6 Program dan 14 Kegiatan pada 6 SKPD	-	-	1	21 Banprov; 20 Kegiatan DAK; 2 Kegiatan Tugas Pembantuan	-	-	-	-	-	-	
Sasaran 6: Penggunaan instrumen pembiayaan non-konvensional dalam pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta)															
7	Jumlah perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan kota setiap tahun	Jumlah	35	70	40	217	50	195	-	-	-	-	-	-	
Sasaran 7: Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi															
8	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Triliun Rupiah	3,862	3,611	4,059	12,808	4,291	7,169	4,532	12,7	4,756	14,349		Tercapai	
Sasaran 8: Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif															
9	Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif	Kategori	Cukup	N/A	Cukup	N/A	Cukup	N/A	N/A	-	-	-	-	-	
10	Aktivasi sub sektor ekonomi kreatif	Sub sektor	-	-	-	-	-	5	6	8	7	8		Tercapai	
Sasaran 9: Berkembangnya koperasi dan UMKM															
11	Pelaku usaha bernilai tambah dalam aspek HKI, paten, omzet, akses modal sertifikasi halal, kuantitas, dan kualitas produksi	Unit	155	761	420	622	450	467	-	-	-	-	-	-	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN												Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
12	Koperasi aktif	Persentase	81,76	81,77	83,34	83,5	84,41	84,67	86,24	86,24	88,82	88,85		Tercapai	
Sasaran 10: Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan															
13	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	5.367.894	5.807.564	5.480.821	6.061.094	5.877.162	6.899.582	6.960.512	6.899.582	6.947.880	7.585.346		Tercapai	
Sasaran 10: Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan															
14	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase	10,78	8,05	10,55	9,02	10,36	9,02	10,17	8,44	10	8,44		Tercapai	
15	Lapangan pekerjaan baru	Orang	30.000	9.695	40.000	11.021	50.000	11.216	60.000	14.571	250.000	62.350		Tidak Tercapai	
16	Wirausaha baru	Orang	10.000	19.925	15.000	25.970	25.000	28.995	25.000	23.890	100.000	121.811		Tercapai	

Sumber: Bappelitbang Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

2.6. Capaian Kinerja RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 sampai dengan Tahun 2020

RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023 memuat sebanyak 5 Tujuan, 5 Misi, 12 Sasaran, dan 25 Indikator yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebagai tahun pertama dan tahun kedua, dengan realisasi kinerjanya sebagaimana yang tercantum di dalam Tabel 2.114.

Tabel 2.114
Capaian Kinerja RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Sasaran Kinerja				Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2019		2020		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Misi 1: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas, dan Berdaya Saing.							
Sasaran 1.1: Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat							
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,00	14,19	14,01	14,20	Tercapai
2	Angka Kelulusan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3	Rata-rata Nilai Ujian SD	Nilai	76,74	66,70	76,76	N/A	N/A
4	Rata-rata Nilai Ujian SMP	Nilai	57,03	62,65	57,04	N/A	N/A
Sasaran 1.2: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat							
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,90	74,14	73,92	74,28	Tercapai
Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih							
Sasaran 1.1: Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi							
1	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik	Persen	60,00	40,00	70,00	96,67	Tercapai
2	Nilai Evaluasi AKIP Kota	Skala	A	BB	A	BB	Tidak Tercapai
3	Nilai LPPD Kota	Nilai	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tercapai
4	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Level	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai
5	Level Kematangan Smart City Kota Bandung	Level	Integrative	Integrative	Integrative	Integrative	Tercapai
Misi 3: Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan							
Sasaran 3.1 : Meningkatkan Perekonomian Kota							
1	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	70,73	73,38	76,95	78,81	Tercapai
2	Indeks Daya Saing Pariwisata	Nilai	3,39	3,41	3,55	3,29	Tidak Tercapai
3	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah/ Org	16,370	17,254	16,584	16,887	Tercapai
Sasaran 3.2 : Meningkatkan Kesempatan Kerja							
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,39	8,16	8,34	11,19	Tidak Tercapai
Sasaran 3.3 : Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin							
1	Angka Kemiskinan	Persen	3,83	3,38	3,66	3,99	Tidak Tercapai
Misi 4: Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan.							
Sasaran 4.1: Meningkatkan Ruang Kota yang Nyaman dan Berkelanjutan							
1	Persentase RTH	Persen	12,40	12,22	12,60	12,25	Tidak Tercapai
Sasaran 4.2: Meningkatkan Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas							
1	Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan	Menit	63,30	100,00	60,76	63,30	Tercapai
2	Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan	Aspek	11	11	10	10	Tercapai
3	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	Persen	4,55	4,28	3,96	2,94	Tidak Tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Sasaran Kinerja				Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2020
			2019		2020		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Sasaran 4.3: Meningkatkan Layanan Air Bersih							
1	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	79,00	80,24	80,00	79,38	Tidak Tercapai
Sasaran 4.4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	35,35	45,22	35,47	43,90	Tercapai
2	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota	Persen	98,00	97,99	98,30	98,32	Tercapai
Misi 5: Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi							
Sasaran 5.1 : Meningkatkan Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan							
1	Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan	Miliar Rupiah	196,86	297,90	205,92	291,62	Tercapai
Sasaran 5.2 : Meningkatkan Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas							
1	Persentase Realisasi Program/ Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari TJSJ dan Sumbangan Pihak Ketiga	Persen	71,43%	100,00%	85,71%	100,00%	Tercapai
2	Persentase Realisasi Program/ Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari Swasta (Akumulasi)	Persen	33,33%	0,00%	33,33%	100,00%	Tercapai

Hasil dan capaian dari pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung sampai dengan tahun 2020 tergambar melalui capaian kinerja 5 (lima) Misi Kota dengan jumlah indikator kinerja sasaran misi sebanyak 25 indikator, tercapai sebanyak 16 indikator, tidak tercapai sebanyak 7 indikator, dan tidak tersedia data sebanyak 2 indikator, dengan uraian sebagai berikut:

1. Misi 1: “Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas, dan Berdaya Saing” difokuskan pada Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pembangunan Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial yang Bermutu, Adil, dan Merata berlandaskan Nilai-Nilai Agama dan Budaya. terdiri dari 5 indikator kinerja sasaran dengan 3 indikator sasaran tercapai, diantaranya meliputi : indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2020 terealisasi sebesar 14,20 tahun dari target sebesar 14,01 tahun atau capaian kinerja sebesar 101,35%, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023 sebesar 14,04 tahun capaian kinerjanya telah mencapai 101,13%, Angka Kelulusan sebesar 100,00% dari target 100,00%, atau capaian kinerja sebesar 100,00%, jika dibanding dengan target akhir RPJMD tahun 2023 yang sebesar 100,00%, capaiannya telah mencapai sebesar 100%, dan Usia Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2020 terealisasi sebesar 74,28 tahun dari target sebesar 73,92 dengan capaian kinerja sebesar 100,48% atau melebihi target, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 73,98 maka capaian kinerjanya telah mencapai 100.40%.
2. Misi 2: “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih” difokuskan pada membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui *smart government* yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima. terdiri dari 5 indikator kinerja sasaran, tercapai sebanyak 4 (empat) indikator. diantaranya meliputi Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Kkm Baik sebesar 96,67% dari target 70,00%, dengan capaian kinerjanya sebesar 138,10% bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 73,98 maka capaian kinerjanya sebesar 100.40%, Nilai LPPD sebesar 3.4013 dengan Kategori Sangat Tinggi, capaian ini sesuai dengan target Tahun 2020

- atau capaian kinerjanya sebesar 100,00%, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu Sangat Tinggi, capaiannya telah mencapai 100%, Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah capaiannya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2023 yaitu WTP, kinerjanya telah mencapai 100%, dan Level Kematangan *Smart City* Kota Bandung pada kategori *integrative* dengan capaian kinerja 100%, jika dibandingkan target akhir RPJMD yang *integrative* kinerjanya telah mencapai 100%.
3. Misi 3: “Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan” difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan, terdiri dari 5 indikator kinerja sasaran. Dua indikator diantaranya tercapai melebihi target, meliputi: PDRB per Kapita sebesar 76,95 juta rupiah dari target sebesar 73,38 juta rupiah atau capaian kinerja sebesar 100,08% dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 81,33 juta rupiah capaian kinerjanya baru mencapai 94,61%, dan Pengeluaran per kapita sebesar 16.887.000 rupiah/orang dari target sebesar 16.584.000 rupiah/orang, capaian kinerjanya telah mencapai 101,83%, jika diukur dengan target akhir tahun 2023 sebesar 17.227.000 rupiah/orang, maka realisasi tahun 2020 baru mencapai 97,86%.
 4. Misi 4: “Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan” difokuskan pada pembangunan ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur kota terpadu dan berkualitas, peningkatan layanan air bersih dan kualitas lingkungan hidup Kota Bandung. Misi 4 terdiri dari 7 indikator kinerja sasaran, diantaranya 5 indikator tercapai, yaitu: indikator lama genangan yang tertangani pada titik genangan sebesar 60,76 menit dari target sebesar 80 menit atau capaian kinerjanya sebesar 124,05%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023 sebesar 30 menit maka capaian kinerjanya baru mencapai 49,37%. Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan sebanyak 10 aspek atau capaian kinerjanya sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023 sebanyak 7 aspek, capaian kinerjanya baru mencapai 70,00%, Persentase Luasan Kawasan Kumuh sebesar 2,94% dari target sebesar 3,96% atau capaian kinerjanya sebesar 125,76 % bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023 sebesar 2,16% capaian kinerjanya baru mencapai 63,89 %, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 43,90 bila dibandingkan dengan target sebesar 35,47 maka capaian kinerjanya sebesar 123,77%, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023 sebesar 35,83 capaian kinerjanya telah mencapai 122,52%, serta Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota sebesar 98,32% dari target sebesar 98,30% atau capaian kinerjanya sebesar 100,02% bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023 sebesar 99% capaian kinerjanya baru mencapai 99,31%.
 5. Misi 5: “Mengembangkan pembiayaan kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi” difokuskan pada Partisipasi dan Kolaborasi Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur Kota yang dibiayai dari anggaran non-anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Bandung, terdiri dari 3 indikator kinerja sasaran yang seluruh indikatornya tercapai, yaitu meliputi: indikator Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan sebesar Rp291,62 Miliar dari target sebesar Rp205,92 Miliar atau capaian kinerja sebesar 141,62%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar Rp 217,80 Miliar, maka capaian kinerjanya telah mencapai 133,89%, Persentase Realisasi Program/Agenda Prioritas Pembangunan yang dibiayai dari TJSL dan Sumbangan

Pihak Ketiga, serta persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari swasta (akumulasi) meliputi 7 (tujuh) bidang atau capaian sebesar 100,00% dari 6 (enam) bidang yang ditargetkan atau sebesar 85,71% dengan capaian kinerja sebesar 116,67%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2023 sebanyak 7 (tujuh) bidang, maka capaian kerjanya telah mencapai 100,00%.

Secara umum capaian kinerja Misi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2020 yaitu sebesar 69,56%, atau dari sejumlah 25 indikator kinerja sasaran, terdapat 16 indikator sasaran tercapai, 7 indikator kinerja sasaran tidak tercapai, sedangkan 2 indikator tidak dilakukan perhitungan. Diantara indikator sasaran yang tidak tercapai adalah tingkat Nilai Evaluasi AKIP Kota, Indeks Daya Saing Pariwisata, Angka Kemiskinan, Persentase RTH, Persentase Luasan Kawasan Kumuh, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Cakupan Layanan Air Bersih, sedangkan indikator yang tidak dapat dilakukan perhitungan capaian kerjanya adalah Rata-Rata Nilai Ujian SD dan Rata-Rata Nilai Ujian SMP.

2.7. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Capaian terkait implementasi TPB di Indonesia meliputi 17 tujuan dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, jumlah indikator TPB berdasarkan urusan kewarganegaraan meliputi 319 indikator dan pembagiannya terdiri atas 4 (empat) kewenangan, diantaranya:

1. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pusat: 308;
2. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan provinsi: 235;
3. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten: 220; dan
4. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota: 222.

Selain itu, beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah adalah daerah khusus yang meliputi indikator, kondisi geografis, dan ketentuan indikator berdasarkan RPJMD. Untuk Kota Bandung sendiri telah melakukan penilaian dan analisis capaian indikator TPB yang terbagi dalam 4 (empat) kategori:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS;
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB;
3. Indikator TPB tidak ada target/TT/BB; dan
4. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/N/A.

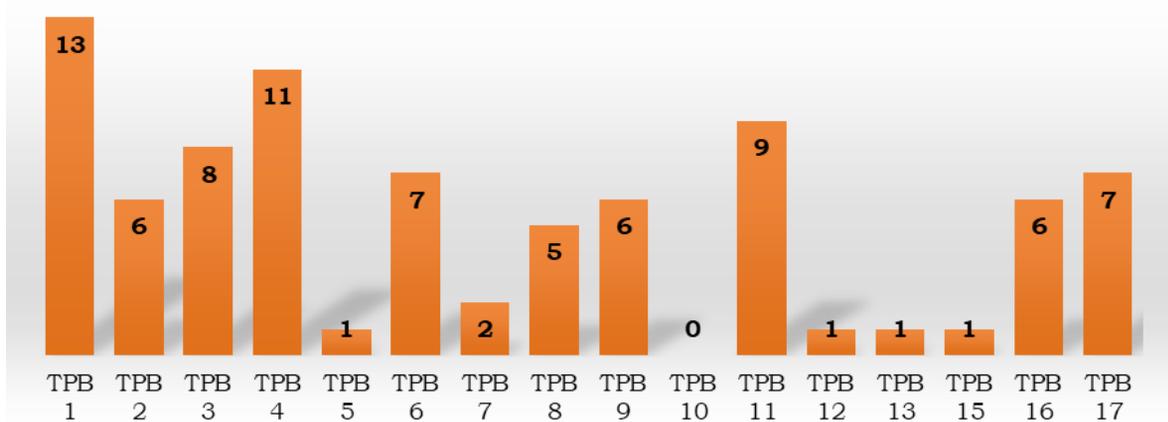
Pencapaian target tersebut adalah yang dianggarkan untuk berbagai pilar pembangunan. Adapun capaian target yang diperoleh dari Kota Bandung baru sebesar 36% dari total 214 indikator yang menjadi kewenangan, artinya bahwa indikator yang berhasil terlaksana dan mencapai target baru mencapai 80 indikator. Kategorisasi capaian tersebut bertujuan agar memetakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kota Bandung pada RPJMD periode berikutnya. Isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian utama pada umumnya adalah target-target dalam indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum tercapai, indikator yang belum dilaksanakan dan yang tidak ada datanya. Capaian tersebut terhadap target diperoleh berdasarkan masing-masing capaian indikator.

2.7.1. Indikator Target TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target (SS)

Secara keseluruhan, indikator yang masuk pada kategori ini sebanyak 83 indikator atau bila dipersentasekan menjadi 37,83% dari keseluruhan target yang dikaji pada kewenangan pemerintah. Capaian tertinggi terdapat pada tujuan 1 yaitu pada tujuan mengurangi kemiskinan (mengurangi kemiskinan segala bentuk dimanapun). Sementara pada tujuan ke – 10 yaitu berkurangnya kesenjangan belum ada satu indikator yang mencapai target. Selain itu ada pula tujuan pembangunan berkelanjutan yang masih memiliki ketercapaian rendah diantaranya tujuan pembangunan berkelanjutan 5 – kesetaraan gender, tujuan pembangunan berkelanjutan 12 – produksi yang bertanggung jawab, tujuan pembangunan berkelanjutan 13 – penanganan perubahan iklim dan tujuan pembangunan berkelanjutan 15 – ekosistem daratan. Gambar 2.39 merupakan grafik yang menunjukkan ketercapaian indikator yang sudah tercapai.

Gambar 2.39

Indikator Target yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target (SS)



Sumber : Hasil Analisis, 2020

Tabel 2.115 adalah 83 indikator yang terlaksana dan tercapai pada Kota Bandung.

Tabel 2.115

Capaian KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

Indikator	Target	Capaian Kota Bandung	Keterangan
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	3,57	Tercapai
Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%	0,20	Tercapai
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 70%	101,95	Tercapai
Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkat menjadi 63%.	101,95	Tercapai
Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Menurun	5,16	Tercapai
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	95,64	Tercapai
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	92,42	Tercapai
Persentase penduduk umur 0-17 tahundangan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%.	92,6	Tercapai
Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah	30	Tercapai

Indikator	Target	Capaian Kota Bandung	Keterangan
Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurun menjadi 118,6	174	Tercapai
Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	ada	1	Tercapai
Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat	8,6	Tercapai
Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	21,53	Tercapai
Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurun menjadi 17%	0,42	Tercapai
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	25,3	Tercapai
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28%	15	Tercapai
Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun	237,15	Tercapai
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%	100	Tercapai
Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat	110,9	Tercapai
Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun	29	Tercapai
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85 %	101,95	Tercapai
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	30	Tercapai
Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	2	Tercapai
Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Menurun	3	Tercapai
Total Fertility Rate (TFR).	Menurun	lebih tinggi	Tercapai
Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91%	lebih tinggi	Tercapai
Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan	Meningkat	862	Tercapai
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%	100	Tercapai
Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%	100	Tercapai
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	131,05	Tercapai
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	116,16	Tercapai
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/ sederajat.	Meningkat	100	Tercapai
Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	12	Tercapai
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,2%	87	Tercapai
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas	Meningkat	100	Tercapai

Indikator	Target	Capaian Kota Bandung	Keterangan
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi.	Meningkat	42,55	Tercapai
Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%	100	Tercapai
Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkat	99,95	Tercapai
Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat	88,68	Tercapai
Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	5750	Tercapai
Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	67,79%	Tercapai
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat	35	Tercapai
Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	6	Tercapai
Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	74	Tercapai
Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Meningkat	74%	Tercapai
Kualitas air permukaan sebagai air baku	Meningkat	17	Tercapai
Rasio elektrifikasi.	100%	144,07	Tercapai
Konsumsi listrik per kapita.	1120	4.452	Tercapai
PDRB per kapita. (ADHB)	Meningkat	74,46	Tercapai
Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Meningkat	86,24	Tercapai
Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat	minim sektor pertanian	Tercapai
Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan		< 25%	Tercapai
Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	13,34	Tercapai
Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat	15,01	Tercapai
Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat	1,42	Tercapai
Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat	tinggi	Tercapai
Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat	88,68	Tercapai
Proporsi individu yang menggunakan Internet.	Meningkat	61,24	Tercapai
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Meningkat	80	Tercapai
Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	Meningkat	52000	Tercapai
Persentase penduduk terlayani transportasi umum	10 Kota Besar	Ada	Tercapai
Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.		ADA	Tercapai
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun	111,99	Tercapai
Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.		ada	Tercapai
Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	Meningkat	98,00%	Tercapai

Indikator	Target	Capaian Kota Bandung	Keterangan
Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.		ada	Tercapai
Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Meningkat	12,6	Tercapai
Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Meningkat	25	Tercapai
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Ada	1	Tercapai
Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Meningkat	53,15	Tercapai
Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Berkurang	303	Tercapai
Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat	100	Tercapai
Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.		73,12	Tercapai
Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Meningkat	73,12	Tercapai
Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Ada	Ada	Tercapai
Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Tidak ada	tidak ada	Tercapai
Persentase pengguna internet	Meningkat	61,24	Tercapai
Jumlah dokumen daftar rencana proyek kpbu (drk) yang diterbitkan setiap tahun	Ada	ada	Tercapai
Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kersama pemerintah dan badan usaha	Ada	ada	Tercapai
Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Meningkat	Meningkat	Tercapai
Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).		10,39	Tercapai
Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada	ada	Tercapai
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Meningkat	2.322.304	Tercapai

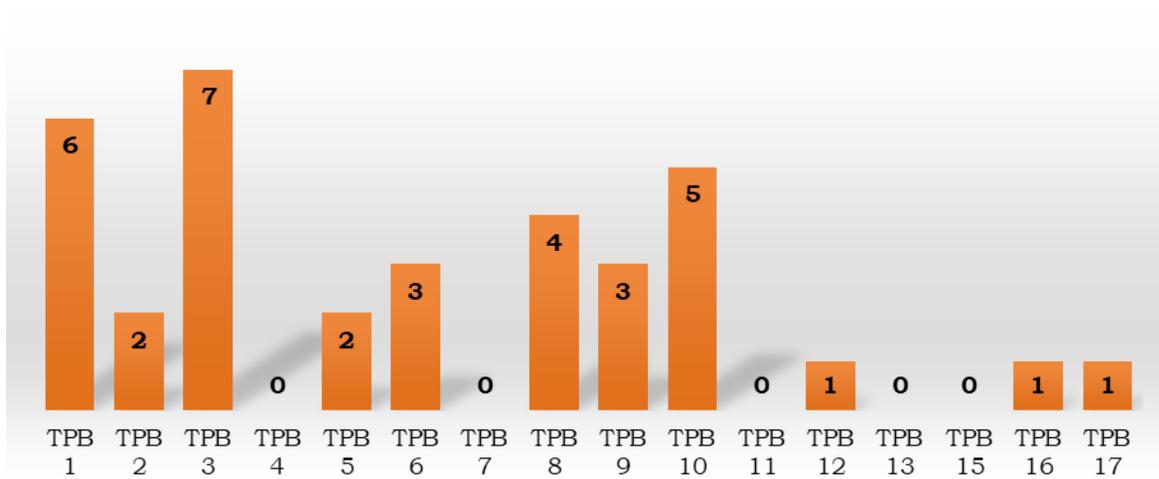
Sumber: Hasil Analisis, 2020

2.7.2. Indikator Target TPB yang Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target (BB)

Secara keseluruhan yang termasuk pada kategori ini hanya mencapai 15,76% atau sebanyak 36 indikator dari total indikator. Adapun indikator terbanyak pada kategori ini berada pada tujuan pembangunan berkelanjutan 3 - kehidupan yang sehat dan sejahtera yang mencapai 7 indikator dan tujuan lainnya yang telah terlaksana namun belum mencapai target berada pada tujuan 1 mengurangi kemiskinan (mengurangi kemiskinan segala bentuk dimanapun) dengan jumlah indikator sebanyak 6 indikator. Gambar 2.40 menunjukkan ketercapaian pada kategori indikator yang belum mencapai target.

Gambar 2.40

Indikator Target yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (BB)



Sumber: Hasil Analisis, 2020

Tabel 2.116 adalah 36 indikator yang terlaksana dan belum tercapai pada Kota Bandung.

Tabel 2.116

Capaian KLHS Revisi RPJMD Tahun 2018-2023

Indikator	Target	Capaian Kota Bandung	Keterangan
Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%	86,18	Tidak Tercapai
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	40,39	Tidak Tercapai
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Menurun	27	Tidak Tercapai
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	85	Tidak Tercapai
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	75	Tidak Tercapai
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkat menjadi 100%	95	Tidak Tercapai
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurun menjadi 8,5 %	15	Tidak Tercapai
Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	91,69	Tidak Tercapai
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	90	Tidak Tercapai
(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	2,2	Tidak Tercapai
Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi <0,5%	3	Tidak Tercapai
Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi 245	401	Tidak Tercapai
Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	54	Tidak Tercapai

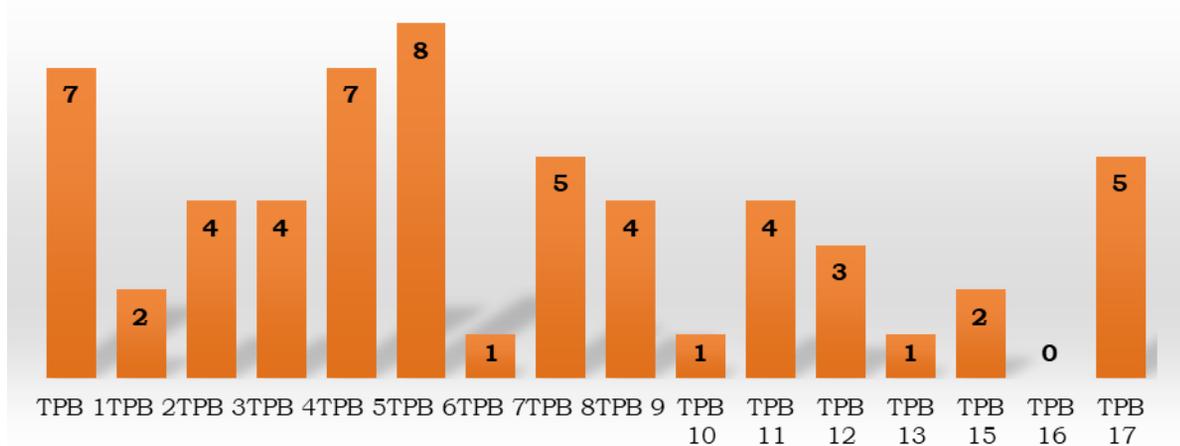
Indikator	Target	Capaian Kota Bandung	Keterangan
Jumlah penyalahgunaan napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	Menurun menjadi angka 0,02%	1,49	Tidak Tercapai
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%	40,68	Tidak Tercapai
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat	6,00	Tidak Tercapai
Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat	45,06	Tidak Tercapai
Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Meningkat menjadi 100%	85	Tidak Tercapai
Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	85	Tidak Tercapai
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	35	Tidak Tercapai
Laju pertumbuhan PDRB per kapita. (ADHK)	Meningkat	7,76	Tidak Tercapai
Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	10	Tidak Tercapai
Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB	Meningkat menjadi 8%	3,74	Tidak Tercapai
Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat	173.036	Tidak Tercapai
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	4.827.589	Tidak Tercapai
Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat	18,77	Tidak Tercapai
Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Menurun	2	Tidak Tercapai
Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri	Menurun	70	Tidak Tercapai
Rasio Gini	0,19	0,420	Tidak Tercapai
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	0,42	3,57	Tidak Tercapai
Indeks Kebebasan	Meningkat	67,64	Tidak Tercapai
Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.		0,00	Tidak Tercapai
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	48,84	4,41	Tidak Tercapai
(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/ diolah berdasarkan jenis penanganannya/pengolahannya	100	48,7	Tidak Tercapai
Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Berkurang	47	Tidak Tercapai
Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Meningkat	10,24	Tidak Tercapai

Sumber : Hasil Analisis, 2020

2.7.3. Indikator Target TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (TT)

Indikator pada kategori ini memiliki data masing-masing yang mengampu kegiatan terkait. Secara keseluruhan, indikator yang termasuk pada kategori ini terdapat pada setiap tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun ada beberapa indikator dengan jumlah terbanyak termasuk kedalam indikator dengan TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target adalah tujuan air bersih dan sanitasi layak dengan jumlah indikator 8, mengurangi kemiskinan (mengurangi kemiskinan segala bentuk dimanapun) dan kesetaraan gender dengan jumlah indikator 7. Dalam arti bahwa data yang dikumpulkan dalam pencapaian target ini belum ada meski adanya ketersediaan data dapat dilakukan. Gambar 2.41 menggambarkan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam kategori ini.

Gambar 2.41
Indikator Target yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (TT)



Sumber : Hasil Analisis, 2020

Indikator target yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target disajikan pada Tabel 2.117.

Tabel 2.117
Indikator Target yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target

No	Indikator	Target	Capaian Kota Bandung	Keterangan
1	Proporsi Penduduk/Rumah Tangga dengan akses pelayanan dasar	Tidak ada dalam target	-	TT
2	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan	Tidak ada dalam target	-	TT
3	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Tidak ada dalam target	-	TT
4	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Tidak ada dalam target	-	TT
5	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Tidak ada dalam target	-	TT
6	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Tidak ada dalam target	-	TT
7	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP	Tidak ada dalam target	-	TT

No	Indikator	Target	Capaian Kota Bandung	Keterangan
8	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Tidak ada dalam target	-	TT
9	Prevalensi wasting (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Tidak ada dalam target	-	TT
10	Angka kematian akibat keracunan.	Menurun	-	TT
11	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	Menurun	-	TT
12	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	-	TT
13	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat	-	TT
14	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Meningkat	-	TT
15	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Meningkat	-	TT
16	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Meningkat	-	TT
17	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan	Meningkat	-	TT
18	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Tidak ada dalam target	-	TT
19	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Tidak ada dalam target	-	TT
20	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Tidak ada dalam target	-	TT
21	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Tidak ada dalam target	-	TT
22	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR).	Tidak ada dalam target	-	TT
23	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Tidak ada dalam target	-	TT
24	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Tidak ada dalam target	-	TT

No	Indikator	Target	Capaian Kota Bandung	Keterangan
25	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air sabun	Tidak ada dalam target	-	TT
26	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.	-	TT
27	Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman	Tidak ada dalam target	-	TT
28	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Tidak ada dalam target	-	TT
29	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Tidak ada dalam target	-	TT
30	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Tidak ada dalam target	-	TT
31	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	Tidak ada dalam target	-	TT
32	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Tidak ada dalam target	-	TT
33	Intensitas energi primer.	Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional)	-	TT
34	Proporsi lapangan kerja informal berdasarkan sektor dan jenis kelamin.	Tidak ada dalam target	-	TT
35	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Tidak ada dalam target	-	TT
36	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Tidak ada dalam target	-	TT
37	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Tidak ada dalam target	-	TT
38	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Tidak ada dalam target	-	TT
39	Jumlah pelabuhan penyeberangan.	Tidak ada dalam target	-	TT
40	Jumlah pelabuhan strategis.	Tidak ada dalam target	-	TT
41	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Tidak ada dalam target	-	TT
42	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Tidak ada dalam target	-	TT
43	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Tidak ada dalam target	-	TT
44	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Tidak ada dalam target	-	TT
45	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Tidak ada dalam target	-	TT
46	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Tidak ada dalam target	-	TT
47	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Tidak ada dalam target	-	TT

No	Indikator	Target	Capaian Kota Bandung	Keterangan
48	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	Tidak ada dalam target	-	TT
49	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana strategi nasional penanggulangan bencana	Tidak ada dalam target	-	TT
50	(a) Indeks kehilangan makanan (Food loss index); dan (b) Indeks sampah makanan (Food waste indeks)	Tidak ada dalam target	-	TT
51	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Tidak ada dalam target	-	TT
52	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Tidak ada dalam target	-	TT
53	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	Tidak ada dalam target	-	TT
54	Kerangka kerja legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata	Tidak ada dalam target	-	TT
55	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis	Tidak ada dalam target	-	TT
56	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Tidak ada dalam target	-	TT
57	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Tidak ada dalam target	-	TT
58	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Tidak ada dalam target	-	TT
59	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Tidak ada dalam target	-	TT
60	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Tidak ada dalam target	-	TT

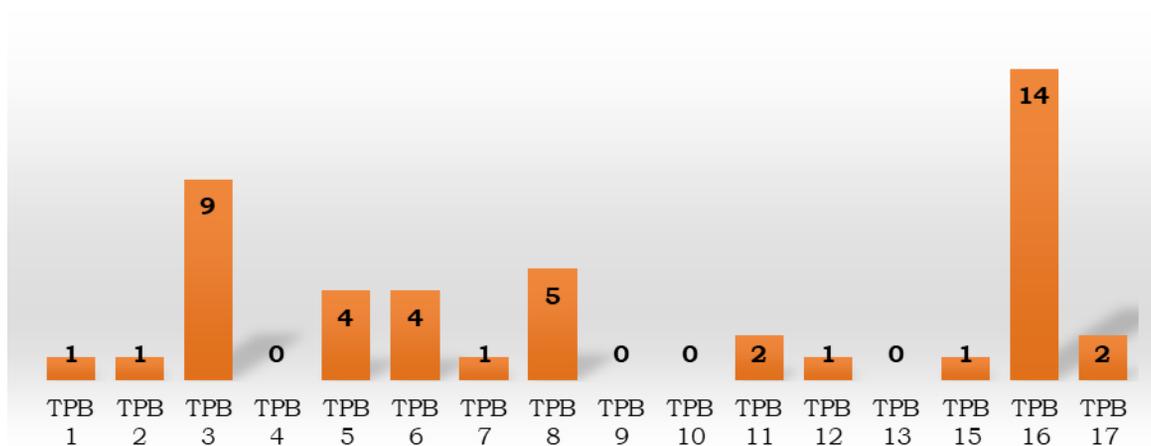
Sumber: Hasil Analisis, 2020

2.7.4. Indikator Target TPB yang Belum Memiliki Data (N/A)

Indikator pada kategori ini tidak dapat mendukung penjelasan capaiannya. Indikator yang termasuk ke dalam kategori belum memiliki data merupakan isu yang perlu ditindaklanjuti dengan adanya upaya untuk pemenuhan data pada indikator tersebut. Namun secara keseluruhan, indikator yang tidak memiliki data dan tidak memiliki target tertinggi berada pada tujuan pembangunan berkelanjutan 16 – Perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh sebanyak 14 indikator. Masih ada beberapa indikator lainnya sebanyak indikator, merupakan terbanyak kedua pada tujuan pembangunan berkelanjutan 3 – Menjamin kehidupan yang sehat. Maksudnya bahwa dari pencapaian tujuan dari kategori ini tidak menjelaskan tujuan yang akan dicapai pada KLHS RPJMD Kota Bandung. Gambar 2.42 menggambarkan capaian pada indikator yang tidak memiliki data.

Gambar 2.42

Indikator Target yang Belum Memiliki Data (N/A)



Sumber: Hasil Analisis, 2020

Indikator target yang belum memiliki data (N/A) disajikan pada Tabel 2.118.

Tabel 2.118

Indikator Target yang Belum Memiliki Data (N/A)

Indikator	Target	Capaian Kota Bandung	Keterangan
Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	N/A	Tidak Ada Data
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun	N/A	Tidak Ada Data
Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	N/A	Tidak Ada Data
Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun menjadi 5,4%	N/A	Tidak Ada Data
Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun menjadi 24,3%	N/A	Tidak Ada Data
Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun	N/A	Tidak Ada Data
Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Menurun	N/A	Tidak Ada Data
Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat menjadi 66%	N/A	Tidak Ada Data
Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	N/A	Tidak Ada Data
Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	Meningkat menjadi 23,5%	N/A	Tidak Ada Data
Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama	Menurun menjadi 38	N/A	Tidak Ada Data
Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin	bertambah sebanyak 16	N/A	Tidak Ada Data
Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	N/A	Tidak Ada Data

Indikator	Target	Capaian Kota Bandung	Keterangan
Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70%	N/A	Tidak Ada Data
Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%	N/A	Tidak Ada Data
Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	N/A	Tidak Ada Data
Kualitas air tanah sebagai air baku	Meningkat	N/A	Tidak Ada Data
Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	ada	N/A	Tidak Ada Data
Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)		N/A	Tidak Ada Data
Bauran energi terbarukan.	10-16%	N/A	Tidak Ada Data
Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat	N/A	Tidak Ada Data
Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat		Tidak Ada Data
Tingkat setengah pengangguran	Menurun	N/A	Tidak Ada Data
Jumlah devisa sektor pariwisata	Meningkat	N/A	Tidak Ada Data
Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Meningkat	N/A	Tidak Ada Data
Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Meningkat	N/A	Tidak Ada Data
Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	Berkurang	N/A	Tidak Ada Data
Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Berkurang	N/A	Tidak Ada Data
Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Berkurang	N/A	Tidak Ada Data
Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Berkurang	N/A	Tidak Ada Data
Prevelensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Berkurang	N/A	Tidak Ada Data
Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Berkurang	N/A	Tidak Ada Data
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat	N/A	Tidak Ada Data
Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	N/A	Tidak Ada Data
Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Meningkat	N/A	Tidak Ada Data
Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) \geq B	Meningkat	N/A	Tidak Ada Data
Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) \geq B	Meningkat	N/A	Tidak Ada Data
Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat	N/A	Tidak Ada Data
Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	Meningkat	N/A	Tidak Ada Data

Indikator	Target	Capaian Kota Bandung	Keterangan
Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat	N/A	Tidak Ada Data
Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	N/A	Tidak Ada Data
Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun	N/A	Tidak Ada Data
Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.		N/A	Tidak Ada Data

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Pada revisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Bandung ini terdapat beberapa perbedaan jumlah indikator dalam setiap kategori ketercapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu dikarenakan berkembangnya ketersediaan data, pembaruan data *time series*, perbedaan nilai data dan sebagainya. Secara keseluruhan perbedaan capaian indikator TPB saat penyusunan KLHS RPJMD tahun 2018 dengan capaian indikator TPB saat penyusunan KLSH Revisi RPJMD Tahun 2020 disajikan pada Tabel 2.119.

Tabel 2.119

Perbandingan Capaian KLHS RPJMD Tahun 2018 dan KLHS Revisi RPJMD Tahun 2020

Kategori	KLHS RPJMD TAHUN 2018				KLHS RPJMD TAHUN 2020 (REVISI)			
	SS	SB	TT	N/A	SS	SB	TT	N/A
TPB 1	9	7	8	1	13	6	7	1
TPB 2	3	2	5	1	6	2	2	1
TPB 3	14	6	7	7	8	7	4	9
TPB 4	7	1	4	1	11	0	4	0
TPB 5	1	2	4	7	1	2	7	4
TPB 6	0	11	5	2	7	3	8	4
TPB 7					2	0	1	1
TPB 8	2	7	9	1	4	5	5	5
TPB 9	7	0	4	2	6	3	4	0
TPB 10	2	2	1	1	0	5	1	0
TPB 11	5	10	5	0	9	0	4	2
TPB 12	0	1	3	1	1	1	3	1
TPB 13	1	0	1	0	1	0	1	0
TPB 14								
TPB 15	1	2	1	0	1	0	2	1
TPB 16	3	0	2	16	6	1	0	14
TPB 17	4	1	1	9	7	1	5	2
Total	59	53	60	50	83	36	58	45
Persen (%)	26,58%	23,87%	27,03%	22,52%	37,39%	16,22%	26,13%	20,27%

Sumber : Hasil Analisis, 2020

2.7.5. Indikator Capaian TPB Berdasarkan Pilar Pembangunan

a. Capaian TPB Pilar Sosial

Indikator TPB Pilar Sosial terdiri dari 5 (lima) tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: TPB 1 – Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun, TPB 2 – Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan, TPB 3 – Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia, TPB 4 – Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua, dan TPB 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan. Dari 5 tujuan tersebut terdiri dari 95 indikator, yaitu indikator yang berhasil dicapai oleh Kota Bandung sebanyak 39 Indikator atau 41%; yang belum berhasil dicapai akan tetapi sudah dilaksanakan sebanyak 17 indikator; yang belum memiliki target sebanyak 24 indikator, dan yang belum memiliki data capaian sebanyak 15 indikator. Capaian pilar sosial dan OPD Pemangku disajikan pada Tabel 2.120.

Tabel 2.120
Capaian Pilar Sosial dan OPD Pemangku

Kategori	KLHS RPJMD TAHUN 2020 (REVISI)				OPD Pemangku
	SS	SB	TT	N/A	
TPB 1	13	6	7	1	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Disdukcapil Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Tenaga Kerja
TPB 2	6	2	2	1	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pangan dan Pertanian Dinas Kesehatan
TPB 3	8	7	4	9	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinas Kesehatan
TPB 4	11	0	4	0	Dinas Pendidikan
TPB 5	1	2	7	4	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Total	39	17	24	15	
Persen (%)	41%	18%	25%	16%	

Sumber : Hasil Analisis, 2020

b. Capaian TPB Pilar Ekonomi

Indikator TPB Pilar ekonomi terdiri dari 5 (lima) tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu TPB 7 - Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua, TPB 8 - Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua, TPB 9 - Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi, TPB 10 - Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara, dan TPB 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan. Dari 5 tujuan tersebut yang terdiri dari 57 indikator, indikator yang berhasil dicapai oleh Kota Bandung sebanyak 19 Indikator atau 33%, 14 indikator yang belum berhasil dicapai akan tetapi sudah dilaksanakan, kemudian 16 indikator yang belum memiliki target serta 8 indikator yang belum memiliki data capaian. Untuk lebih jelasnya capaian masing-masing TPB pada pilar sosial dapat dilihat pada Tabel 2.121.

Tabel 2.121

Capaian Pilar Ekonomi dan OPD Pemangku

Kategori	KLHS RPJMD TAHUN 2020 (REVISI)				OPD Pemangku
	SS	SB	TT	N/A	
TPB 7	2	0	1	1	• Bappelitbang
TPB 8	4	5	5	5	• Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah • Dinas Penanaman Modal dan PTSP • Dinas Tenaga Kerja • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata • Bappelitbang
TPB 9	6	3	4	0	• Dinas Perdagangan dan Perindustrian • Dinas Pekerjaan Umum • Dinas Perhubungan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan • Diskominfo
TPB 10	0	5	1	0	• Bappelitbang • Badan Kesbangpol • Dinas Tenaga Kerja
TPB 17	7	1	5	2	• Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah • BPS • Bappelitbang Diskominfo
Total	19	14	16	8	
Persen (%)	33%	25%	28%	14%	

Sumber : Hasil Analisis, 2020

c. Capaian TPB Pilar Lingkungan

Indikator TPB Pilar lingkungan terdiri dari 5 (lima) tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu TPB 6 - Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan, TPB 11 - Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan, TPB 12 -Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan, TPB 13 - Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya, dan TPB 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati. Dari 5 tujuan tersebut yang terdiri dari 42 indikator, indikator yang berhasil dicapai oleh Kota Bandung sebanyak 7 Indikator atau 16,67%, 8 indikator yang belum berhasil dicapai akan tetapi sudah dilaksanakan, kemudian 20 indikator atau sebesar 47,62% yang belum dilaksanakan serta 7 indikator yang belum memiliki data capaian. Untuk lebih jelasnya capaian masing-masing TPB pada pilar sosial dapat dilihat pada Tabel 2.122.

Tabel 2.122

Capaian Pilar Lingkungan dan OPD Pemangku

Kategori	KLHS RPJMD TAHUN 2020 (REVISI)				OPD Pemangku
	SS	SB	TT	N/A	
TPB 6	7	3	8	4	• Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan • Dinas Pekerjaan Umum • Dinas Kesehatan
TPB 11	9	0	4	2	• Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Dinas Perhubungan • Bappelitbang • Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan • Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Kategori	KLHS RPJMD TAHUN 2020 (REVISI)				OPD Pemangku
	SS	SB	TT	N/A	
TPB 12	1	1	3	1	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan
TPB 13	1	0	1	0	• Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
TPB 15	1	0	2	1	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Total	19	4	18	8	
Persen (%)	39%	8%	37%	16%	

Sumber : Hasil Analisis, 2020

d. Capaian TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola

Indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola terdiri dari 1 (satu) tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu TPB 16 – Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan yang terdiri dari 21 Indikator. Adapun capaian indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola di Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.123.

Tabel 2.123

Capaian Pilar Hukum dan Tata Kelola dan OPD Pemangku

Kategori	KLHS RPJMD TAHUN 2020 (REVISI)				OPD Pemangku
	SS	SB	TT	N/A	
TPB 16	6	1	0	14	• Disdukcapil • Inspektorat • KESBANGPOL • DP3APM
Persen (%)	29%	5%	0%	67%	

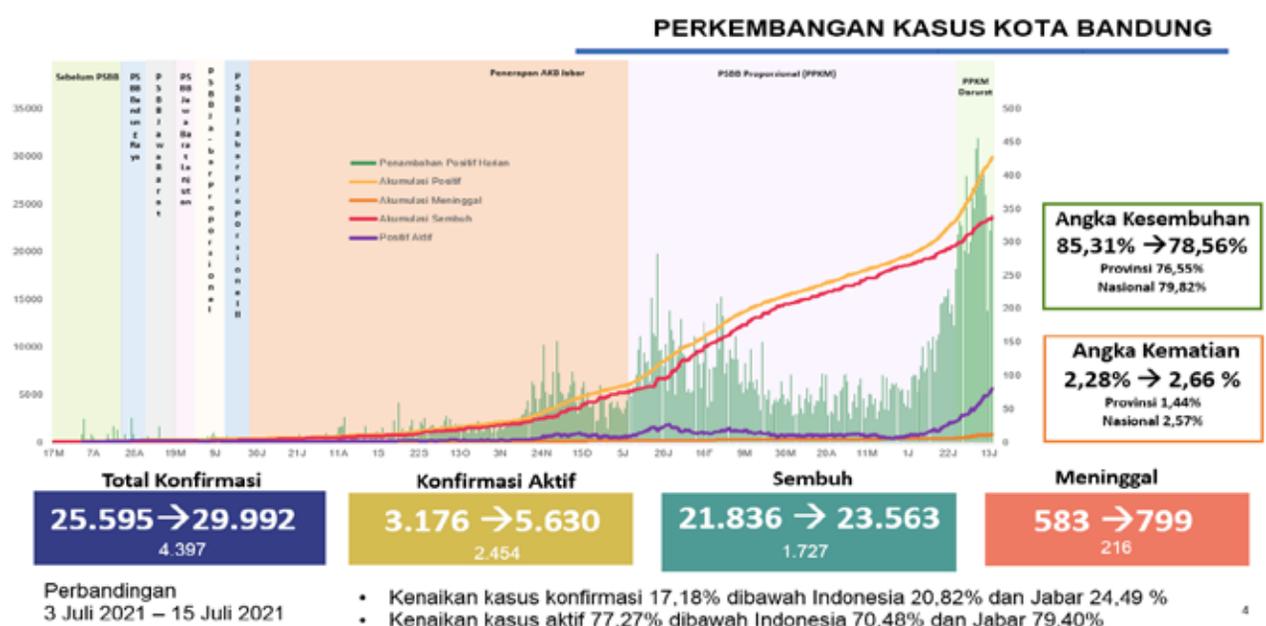
Sumber : Hasil Analisis, 2020

2.8. Kondisi Pandemi Covid-19

Kota Bandung pertama kali mengkonfirmasi kasus positif Covid-19 pada tanggal 17 Maret 2020 dan terus meningkat hingga saat ini. Perkembangan kasus Covid-19 di Kota Bandung hingga triwulan 2 Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.43.

Gambar 2.43

Perkembangan Kasus Covid-19 di Kota Bandung

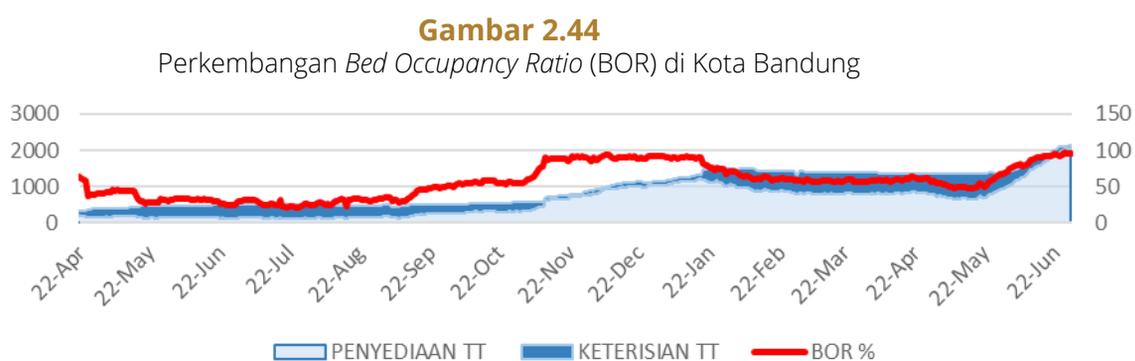


Sumber: Dinas Kesehatan yang dikelola dalam SIPD, data diolah, 2021

Dari grafik diatas dapat terlihat bahwa penambahan positif harian terus meningkat terutama pada pertengahan Juni 2021. Data hingga tanggal 30 Juni 2021 tercatat total terkonfirmasi positif sebanyak 24.613 kasus, kematian sebanyak 477 Kasus dan yang sembuh sebanyak 21.302, sementara kasus konfirmasi aktif pada tanggal tersebut sebanyak 2.834 orang, Kota Bandung menempati 5 tertinggi kasus terkonfirmasi di Jawa Barat setelah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Peningkatan kasus tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- Kenaikan kasus pada akhir triwulan II 2021 atau saat akan diberlakukannya PPKM Darurat karena adanya transmisi kontak dan dampak transmisi kontak dari 2-3 minggu sebelumnya Transmisi terjadi karena tingginya interaksi dan mobilitas masyarakat
- Kenaikan kasus dipengaruhi sasaran testing diperluas (kontak erat, suspek, gejala mirip flu dan suspek TBC), masih terjadi transmisi di masyarakat, dan ditemukan varian Delta yang menular lebih cepat.

Dengan meningkatnya kasus konfirmasi aktif terjadi peningkatan pula terhadap keterisian tempat tidur di Rumah sakit yang disediakan. Peningkatan tersebut terjadi karena meningkatnya kasus konfirmasi bergejala sedang dan berat yang memerlukan perawatan di RS. Sebanyak 29 RS di Kota Bandung menjadi RS Rujukan bagi pasien kasus Covid. Pada 30 Juni 2021 keterisian tempat tidur atau *Bed Occupancy Ratio* (BOR) mencapai 94,55% persentase tersebut melampaui standar yang ditetapkan oleh WHO yaitu dibawah 60%. BOR merupakan salah satu indikator dari sistem kesehatan dalam penanganan pandemi ini selain jumlah kasus, kematian dan kesembuhan serta jumlah *tracing* yang dilakukan. Untuk melihat perkembangan BOR dari tahun 2020 hingga 30 Juni 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.44.

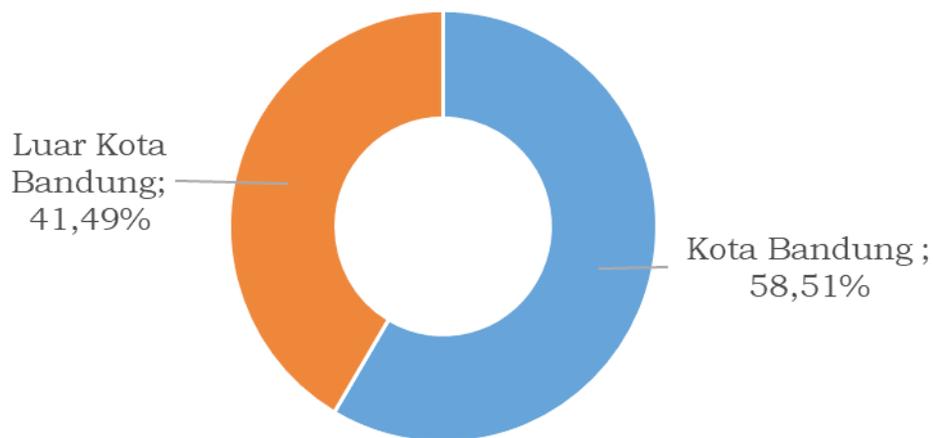


Sumber: Dinas Kesehatan yang dikelola dalam SIPD, data diolah, 2021

Dari grafik diatas dapat terlihat bahwa Kota Bandung telah mengalami dua kali peningkatan BOR diatas 90% yaitu pada bulan November 2020 dan Juni 2021. Bila dilihat dari status kependudukan dari pasien yang di rawat inap akibat Covid-19 seperti pada Gambar 2.45.

Gambar 2.45

Status Kependudukan Pasien Rawat Inap Covid-19



Sumber: Dinas Kesehatan yang dikelola dalam SIPD, data diolah, 2021

Dari grafik diatas dapat terlihat bahwa penduduk Kota Bandung yang memanfaatkan Rumah Sakit sebanyak 58,51%. Selebihnya sebanyak 41,49% berasal dari Luar Kota Bandung yang terdiri dari Kab. Bandung sebanyak 24,27%, Kab. Bandung Barat sebanyak 3,39%, Kota Cimahi sebanyak 3,80%, Kab. Sumedang sebanyak 1%, dan luar Bandung Raya sebanyak 7,04%. Dengan terbatasnya ketersediaan tempat tidur di RS maka bagi pasien dengan bergejala ringan atau tidak bergejala/asimtomatik, Pemerintah Kota Bandung dan Provinsi serta TNI menyediakan tempat Rumah Singgah Isololasi Mandiri di 3 Hotel serta RS Darurat Secapa TNI serta BPSDM Provinsi Jawa Barat.

Selain Rumah Singgah Isolasi Mandiri yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bandung, di tingkat kewilayahan pun menyediakan tempat isolasi bagi warga yang terkonfirmasi positif dan tanpa gejala. Tempat isolasi ini tersebar di 30 Kecamatan, hingga 30 Juni 2021 terdapat 132 tempat isolasi yang layak digunakan oleh masyarakat, dimana didalam pemantauan pasien dilaksanakan oleh Satgas kecamatan dan Puskesmas.

Meningkatnya kasus konfirmasi aktif di Kota Bandung tidak terlepas dari hasil *tracing* dan *testing* yang dilakukan kepada masyarakat yang dicurigai sebagai kontak erat. Upaya Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan jumlah pemeriksaan untuk mencapai standar sesuai WHO, melalui pembangunan Laboratorium *Bio Safety Level 2* pada Dinas Kesehatan Kota Bandung. Laboratorium Biomolekular ini mulai operasional pada 15 Mei 2020 dan telah mendapatkan Rekomendasi sebagai Laboratorium Pemeriksa Covid-19 dari Dinas Kesehatan Provinsi per Tanggal 12 Juni 2020 serta tercantum dalam KMK No. HK.01.07 MENKES 405 2020 sebagai Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Covid-19, dan pada tanggal 1 Juli 2020 dengan Kode Laboratorium C.89. Kapasitas pemeriksaan sejumlah 350-500 sampel per hari. Selain *Bio Safety Level 2* Kota Bandung, pemeriksaan Covid-19 juga dilakukan di Labkes Daerah Provinsi Jawa Barat dan laboratorium milik swasta yang beroperasi di wilayah Kota Bandung. Data Satgas Covid-19 Kota Bandung pada 30 Juni, telah mencatat pemeriksaan RT-PCR sebanyak 247.609 spesimen serta pemeriksaan *Rapid Dignostic Test* (RDT) sebanyak 138.055 spesimen. Walaupun sudah ditingkatkan jumlah pemeriksaan namun angka *Positivity rate* masih sebesar 12,01%. *Positivity rate* menunjukkan rasio jumlah kasus konfirmasi Covid-19 berbanding dengan total tes di suatu wilayah. Standar aman *positivity rate* WHO adalah 5% atau lebih rendah (pengertiannya dari 100 pemeriksaan lab, 5 diantaranya positif).

Salah satu upaya pencegahan penambahan kasus konfirmasi aktif, maka dengan dilakukannya vaksinasi. Target sasaran vaksinasi Kota Bandung sebanyak 1.952.358 penduduk. Hingga Juni 2021 jumlah sasaran yang sudah selesai vaksin dosis pertama sebanyak 495.451 orang dan dosis ke dua sebanyak 322.561 orang. Target vaksinasi ini dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2021 sehingga diharapkan pada Maret 2022 sudah terbentuk *Herd Immunity* di Kota Bandung.

2.9. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kesehatan, Sosial, dan Ekonomi

Pasca ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi nasional, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung melalui berbagai kebijakan yang bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat dalam penanganan pandemi Covid-19 sebagai langkah untuk mencegah semakin meluasnya pandemi serta strategi-strategi baru untuk penanganan kesehatan dan pemulihan perekonomian warga masyarakat yang terdampak. Lebih dari 30 peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandung mulai dari Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota maupun Surat Edaran yang berkenaan dengan pengaturan pencegahan dan penanganan Covid-19 di berbagai sektor yang terdampak pandemi ini.

Pandemi Covid-19 membawa dampak kepada perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat di Kota Bandung. Data dari BPS Kota Bandung menyatakan bahwa pada tahun 2020, Laju Pertumbuhan Ekonomi menurun dari 6,79% pada tahun 2019 menjadi -2,28% pada tahun 2020. Jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 15,35 ribu (dari 84,67 ribu pada tahun 2019 menjadi 100,02 ribu pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka (TPT) meningkat dari 8,16% di tahun 2019 menjadi 11,19% di tahun 2020. Kondisi tersebut semakin terpuruk di tahun 2021 dengan diberlakukannya pembatasan kegiatan di masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat dilihat pada Tabel 2.124.

Tabel 2.124
Peraturan Pandemi Covid-19 yang Berlaku di Kota Bandung

Kegiatan/ Aktivitas	Perwal 61/2021	Inmendagri 14/2021	Conference BNPB	Usulan Menko Perekonomian
	PSBB Proporsiona	PPKM Mikro	28 Juni 2021	29 Juni 2021
Perkantoran	• WFH 50%, WFO 50%	• Zona Merah: WFH 75% dan WFO 25%.	-	100% WFH untuk sector non essential
	• Tidak menerima kunjungan kerja	• Zona Lainnya: WFH 50% dan WFO 50%		
		• Prokes, waktu kerja bergilir		
		• WFH tidak mobilisasi ke daerah lain		
Kegiatan belajar mengajar	Daring	• Zona Merah: dilakukan secara Daring.	-	Daring
		• Zona Lainnya: sesuai pengaturan dari Kementerian DikbudRistek, prokes lebih ketat		
Kegiatan Sektor esensial	Beroperasi 100%	Beroperasi 100%	-	• Esensial 50% dengan prokes
				• Critical 100% dengan prokes

Kegiatan/ Aktivitas	Perwal 61/2021	Inmendagri 14/2021	Conference BNPB	Usulan Menko Perekonomian
	PSBB Proporsiona	PPKM Mikro	28 Juni 2021	29 Juni 2021
Restoran	• 10.00 – 19.00	• Jam operasional sampai 20.00	• Tutup jam 20.00	• Tutup jam 17.00
	• Take away, drive thru, pesan antar	• Makan/ minum di tempat kapasitas 25%	• Take away	• kapasitas 25%
				• Delivery/ Take away 17.00-20.00
Pusat Perbelanjaan	• 10.00 – 19.00	• Jam operasional sampai 20.00	• Tutup jam 17.00	• Tutup jam 17.00
	• Kapasitas 50%	• kapasitas 25%		• kapasitas 25%
Kegiatan Ibadah Kegiatan Ibadah	50%	• Zona Merah: ditiadakan sampai dinyatakan aman. • Zona Lainnya: sesuai pengaturan dari Kementerian Agama, prokes ketat	-	Tutup sementara
kEGIATANKegiatan Kegiatan di	Tempat wisata ditutup	• Zona Merah: ditutup sementara	-	Tutup sementara
Area publik		• Zona Lainnya: diizinkan 25% kapasitas		
di Aublik				
Kegiatan Seni Budaya, Sosial, Kemasyarakatan	• Akad nikah maksimal 50 orang,	• Zona Merah: ditutup sementara		• Tutup sementara
	• Acara khitan maksimal 50 orang	• Zona Lainnya: 25% kapasitas,		• Pernikahan maksimal 50 orang
	• Pemakaman 30 orang	• Kegiatan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% kapasitas, tidak ada hidangan makanan di tempat		
Rapat, Seminar, Luring	MICE dilarang	• Zona Merah: ditutup sementara sampai dinyatakan aman.	-	-
		• Zona Lainnya: 25% kapasitas		
Pelaku perjalanan	Perjalanan keluar daerah zona merah dan kembali harus melakukan Rapid Antigen Test	-	-	Kartu vaksin minimal 1 dosis untuk moda jarak jauh
				PCR H-2 untuk pesawat
				Antigen untuk lainnya

Sumber: Tim Data Satgas Covid-19 Kota Bandung, 2021

Dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat seperti pada tabel di atas, di mana Kota Bandung yang merupakan Kota Jasa dengan banyak mall, hotel, resto dan cafe mengalami kerugian yang sangat besar. Rata-rata okupansi hotel 7-10% perhari, toko modern/ retail yang berada di Mall kunjungan 10-20% kapasitas. Terdapat sebanyak 12.475 pegawai sudah dirumahkan dari 23 Mall/ pusat perbelanjaan di Kota Bandung. Mall mengalami kerugian Rp. 27,5 Milyar per hari, 150 resto/cafe PHK kecuali restoran multinasional.

Untuk membantu mengatasi dampak dari pandemi ini, dari tahun 2020 Pemerintah Kota Bandung merespon dengan kebijakan penganggaran yang menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan dalam penanganan Pandemi Covid-19. *Refocusing* anggaran di Kota Bandung telah dilakukan sebanyak 10 kali perubahan dan penjabaran (pergeseran APBD). Besaran anggaran untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 di Kota Bandung mencapai angka Rp210.000.000.000 yang terdiri dari:

1. Bantuan Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp100.000.000.000;
2. Bantuan Penanganan Kesehatan sebesar Rp95.000.000.000; dan
3. Operasional Gugus Tugas sebesar Rp15.000.000.000,00.

Dari total alokasi anggaran sebesar Rp210.000.000.000, sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp165.383.519.320,00 atau sekitar 78,75%, dengan rincian Rp70.140.262.000,00 (70,14%) untuk Bantuan Jaring Pengaman Sosial, Rp90.387.965.620,00 (95,15%) untuk Bantuan Penanganan Kesehatan dan Rp4.855.291.700,00 (32,37%) untuk Operasional Gugus Tugas. Untuk alokasi dan realisasi anggaran penanganan Covid-19 Kota Bandung disajikan pada Gambar 2.46.

Gambar 2.46

Alokasi dan Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 Kota Bandung



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung, 2020

Upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menangani dampak Covid-19 dilakukan melalui 6 Program Jaring Pengaman Sosial yang berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kota Bandung. Kelompok sasaran mengacu penerima bansos Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penerima bansos Data NON DTKS maupun warga lainnya yang terdampak adanya pandemi Covid-19. Dalam rangka transparansi publik, kemutakhiran dan kelengkapan data penerima bantuan sosial dapat dilihat melalui website <https://jps.bandung.go.id/>. Adapun pendistribusian Bantuan Sosial/Jaring Pengaman Sosial sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.125.

Tabel 2.125

Realisasi Bansos Covid-19 Tahun 2020 di Kota Bandung

No	Realisasi Bansos Covid-19 Tahun 2020	Jumlah DTKS (KK)	Jumlah NON-DTKS (KK)	KETERANGAN
1	BSN dan PKH s.d Desember 2020	95.156		Termasuk Penerima TOP UP BSN Kota Bandung Sebanyak 53.055 KK
2	Bantuan Sembako Presiden	10.000		-
3	BST Kemensos s.d Desember 2020	24.195	33.189	-
4	Bantuan Provinsi	-	187.885	-
5	BST Kota Bandung	7.035	3.174	-
6	BST Kota Bandung Tambahan	3.335	-	-
TOTAL		139.721	224.248	-

Sumber: Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, 2020

Sementara untuk Tahun 2021 pemerintah Kota Bandung telah menganggarkan Bantuan Sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid seperti pada Tabel 2.126.

Tabel 2.126

Realisasi Bansos Covid-19 Tahun 2021 di Kota Bandung

NO	JENIS BANTUAN SOSIAL	BESARAN BANTUAN PER KK	SUMBER	JUMLAH SASARAN	KRITERIA	FREKUENSI BANTUAN
1	Bantuan Sosial Tunai	Rp500.000	APBD Kota	41.853	Non DTKS	1 kali
2	Bantuan Pangan Non Tunai	Rp200.000	APBN	64.852	DTKS	Setiap Bulan
3	Program keluarga Harapan	Variatif	APBN	45.280	DTKS	Setiap Bulan
4	Bantuan Sosial Tunai (BST)	Rp300.000	APBN	63.617	DTKS	2 kali
5	Bantuan Sosial Beras	10 Kg	APBN	44.840	KPM Penerima PKH	1 kali
		10 Kg	APBN	63.617	KPM Penerima BST	1 kali
		5 Kg	APBN	6.000	DTKS yang belum menerima Bansos	1 kali

Sumber: Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, 2021

2.10. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya, telah memberikan penguatan kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana BUMD didirikan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karekteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki daerah yang dapat berbentuk perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah. Pemerintah Kota Bandung sampai dengan 2018 telah memiliki 5 BUMD yang terdiri atas:

- a. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 7/PD/1974 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Bandung sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 8 Tahun 1987, berubah namanya menjadi PDAM Tirtawening;
- b. Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- d. Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perusahaan daerah Pasar Bermartabat Kota Bndung; dan
- e. PT. Bandung Infra Investama yang didirikan melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama dan mendapatkan status badan hukumnya melalui Akte Pendirian PT Bandung Infra Investama Nomor 4 Tanggal 22 Desember 2017.

Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, keempat perusahaan daerah tersebut akan berubah bentuk menjadi perusahaan umum daerah melalui peraturan daerah yang akan dibahas dalam Propemperda Tahun 2019.

Adapun PT. Bandung Infra Investama merupakan BUMD yang berbentuk perusahaan perseroan daerah yang sahamnya 70% dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung sedangkan 30% nya dimiliki oleh pihak mitra. Dari modal dasar yang tertuang dalam peraturan daerah masing-masing BUMD, sampai saat ini belum sepenuhnya terpenuhi oleh pemerintah Kota Bandung sehingga akan dilakukan penyertaan modal secara bertahap melalui mekanisme peraturan daerah setelah dilakukan analisa investasi. Sampai dengan Tahun 2018, penyertaan modal dari Pemerintah Kota Bandung kepada masing masing BUMD adalah sebagai berikut.

1. PD. Pasar Bermartabat
 Modal Dasar : Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)
 Modal Disetor : RP 870.511.428.795,00 (delapan ratus tujuh puluh miliar lima ratus sebelas juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah)
2. PDAM
 Modal Dasar : Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)
 Modal Disetor : RP 647.789.602.115,00 (enam ratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua ribu seratus lima belas rupiah).
3. PD. Kebersihan
 Modal Dasar : Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)
 Modal Disetor : RP 5.675.201.611,00 (lima belas miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus satu ribu enam ratus sebelas rupiah).
4. PD. Bank Perkreditan Rakyat
 Modal Dasar : Rp 600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah)
 Modal Disetor : RP 123.040.794.540,00 (seratus dua puluh tiga miliar empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah).
5. PT. Bandung Infra Investama
 Modal Dasar : sampai dengan Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun)
 Modal Disetor : RP 5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

2.11. Kerjasama Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kerjasama daerah diartikan sebagai kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Kerjasama antar daerah diatur dalam Pasal 363 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga dan atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan. Kerjasama antar daerah ini dapat dikategorikan menjadi kerjasama wajib dan kerjasama sukarela. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kerjasama wajib adalah apabila dilaksanakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama, sedangkan kerjasama sukarela adalah kerjasama yang dilaksanakan oleh daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerjasama. Kebijakan kerjasama daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan ketentuan perda tersebut, kerjasama daerah dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber PAD. Adapun tujuan pengembangan kerjasama daerah adalah untuk: 1) meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan;

2) memaksimalkan pelaksanaan kewenangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah; 3) meningkatkan kualitas pelayanan publik; 4) mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5) meningkatkan PAD; dan 6) meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah memiliki keterbatasan baik dari aspek SDM, kemampuan keuangan, manajemen, maupun teknologi. Oleh karena itu, demi kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah dalam hal ini Kota Bandung membutuhkan dukungan dari berbagai pihak/*stakeholder* pembangunan (pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan komunitas) untuk bersama-sama dalam satu kolaborasi secara sinergis dalam rangka peningkatan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung memandang bahwa dengan kolaborasi, tujuan pembangunan akan tercapai lebih efektif. Namun demikian, kerjasamatersebut harus dilakukan sesuai dengan kemampuan daerah dan bertujuan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan dan kemajuan daerah yang dilaksanakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, dengan asas saling menguntungkan.

Selain itu, pelaksanaan kerjasama daerah di Kota Bandung harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, didalamnya memuat antara lain ruang lingkup, prinsip, objek yang dikerjasamakan, dan subjek pelaksana kerjasama. Prinsip dasar pemerintahan yang diselenggarakan di Kota Bandung mengacu pada tiga hal utama, yaitu: (1) desentralisasi: yaitu prinsip pendelegasian kewenangan pada sub kewilayahan di bawah pemerintah kota dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; (2) inovasi: yaitu prinsip menerapkan gagasan baru untuk memprakarsai atau memperbaiki proses dan hasil akhir layanan yang mengarah pada pembenahan; (3) kolaborasi: yaitu prinsip kerjasama dengan segenap *stakeholders* untuk menyelesaikan permasalahan wilayah. Perkembangan jumlah kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung selama periode 2015-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.127.

Tabel 2.127

Jumlah Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Bandung
Tahun 2015–2020

No	Bentuk Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama / Tahun						Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I	Kerja Sama Dalam Negeri	22	50	83	79	42	11	287
1	Kerja Sama antardaerah	3	37	68	47	18	2	175
2	Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Sebutan Lain	9	6	4	8	7	3	37
3	Kerja Sama dengan Badan Hukum	5	5	8	9	5	5	37
4	Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi	5	2	3	15	12	1	38
II	Kerja Sama Luar Negeri	3	4	7	15	7	5	41
	Jumlah	25	54	90	94	49	16	328

Sumber: Bagian Kerjasama Setda Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2020

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui jumlah kerja sama yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung selama periode 2015-2020 adalah sebanyak 328 kerja sama yang terdiri atas 287 kerja sama dalam negeri dan 41 kerja sama luar negeri. Kerja sama antardaerah merupakan jenis kerja sama yang paling banyak dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung yaitu sebanyak 175 kerja sama, sedangkan kerja sama yang sedikit dilaksanakan adalah kerja sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian atau Sebutan Lain serta kerja sama dengan badan hukum yaitu sebanyak 37 kerja sama. Secara umum, jumlah kerja sama yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Bandung menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2015 – 2018, selanjutnya pada tahun 2019-2020 mengalami tren penurunan.

2.12. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, meliputi: SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Sosial. Pemerintah Kota Bandung telah menerapkan keenam SPM tersebut. Adapun rincian realisasi penerapan masing-masing jenis pelayanan dasar diuraikan berikut ini.

A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

1. Realisasi

Adapun Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.128.

Tabel 2.128
Realisasi Bidang Pendidikan Tahun 2020

NO	JENIS PELAYAN/AN DASAR	TARGET	REALISASI
1	Pendidikan anak usia dini	100%	89,89%
2	Pendidikan dasar	100%	90,76%
3	Pendidikan kesetaraan	100%	100%

Sumber: LPPD Kota Bandung Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD, 2020

2. Alokasi Anggaran

Anggaran Urusan Pendidikan selama Tahun 2020 yang berkaitan dengan dukungan untuk penerapan dan pencapaian SPM telah dialokasikan sebesar Rp521.869.537.061,85 dengan rincian seperti yang terlihat pada Tabel 2.129.

Tabel 2.129
Alokasi Anggaran Bidang Pendidikan Tahun 2020

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
Program Dana BOS	207,816,922,808.85
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,477,034,450
Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar	100,799,292,943

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SD	5,672,313,000
Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP	4,900,187,000
Program Pendidikan Anak Usia Dini	2,054,252,700
Program Pendidikan Non Formal	3,337,437,360
Program Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	66,380,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	96,177,000
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	165,101,750,500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,018,789,300
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	25,529,000,000
JUMLAH	521,869,537,061.85

Sumber: LPPD Kota Bandung Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD, 2020

B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

1. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Bandung tahun 2020 merupakan kontribusi fasilitas pelayanan kesehatan Swasta dan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Adapun hasil capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.130.

Tabel 2.130
Realisasi Bidang Kesehatan Tahun 2020

NO	JENIS PELAYAN/AN DASAR	TARGET	REALISASI
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	84,73%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	84,02%
3	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	81,81%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	46,98%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	36,22%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	6,89%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	31,85%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	18,99%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%	115,35%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	92,23%
11	Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	100%	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human immunodeficiency virus</i>)	100%	100%

Sumber: LPPD Kota Bandung Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD, 2020

2. Alokasi Anggaran

Karena konsep SPM yang baru berubah dari kinerja Program Kementerian menjadi kinerja Pemda yang memiliki konsekuensi *reward* dan *punishment*, Pemerintah Daerah diharapkan untuk memastikan tersedianya sumber daya (sarana, prasarana, alat, tenaga dan uang/biaya) yang cukup agar proses penerapan SPM berjalan sesuai dengan harapan. Terkait hal tersebut maka untuk pencapaian kinerja SPM dibutuhkan perhitungan pembiayaan. Adapun perhitungan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dilihat pada Tabel 2.131.

Tabel 2.131

Alokasi Anggaran Bidang Kesehatan Tahun 2020

NO	JENIS PELAYAN/AN DASAR	ANGGARAN (Rp)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	42.800.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	353.328.900
3	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	16.200.000
4	Pelayanan Kesehatan Balita	59.000.000
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	1.800.000
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	1.800.000
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	160.718.700
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	15.000.000
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	13.052.800
11	Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	75.500.000
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human immunodeficiency virus</i>)	4.537.205.600

Sumber: LPPD Kota Bandung Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD, 2020

C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020. Adapun hasil capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.132.

Tabel 2.132

Realisasi Bidang Pekerjaan Umum

NO	JENIS PELAYAN/AN DASAR	TARGET	REALISASI
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	100%	83,01%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	100%	79,09%

Sumber: LPPD Kota Bandung Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD, 2020

2. Alokasi Anggaran

Karena konsep SPM yang baru berubah dari kinerja Program Kementerian menjadi kinerja Pemda yang memiliki konsekuensi *reward* dan *punishment*, Pemerintah Daerah diharapkan untuk memastikan tersedianya sumber daya (sarana, prasarana, alat, tenaga dan uang/biaya) yang cukup agar proses penerapan SPM berjalan sesuai dengan harapan. Terkait hal tersebut maka untuk pencapaian kinerja SPM dibutuhkan perhitungan pembiayaan. Adapun perhitungan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar standar pelayanan minimal (SPM) disajikan pada Tabel 2.133.

Tabel 2.133

Alokasi Anggaran Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020

NO	JENIS PELAYAN/AN DASAR	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penataan Kawasan Permukiman Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar realisasi	264.222.300

Sumber: LPPD Kota Bandung Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD, 2020

D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2020. Adapun hasil capaian sementara Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.134.

Tabel 2.134
Realisasi Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020

NO	JENIS PELAYAN/AN DASAR	TARGET	REALISASI	KET
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100%	100%	Penanganan rutilahu akibat bencana terlaksana sebanyak 37 unit
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	100%	100%	Penyediaan rumah (sewa rumah) bagi masyarakat terkena relokasi sebanyak 100 KK

Sumber: LPPD Kota Bandung Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD, 2020

2. Alokasi Anggaran

Karena konsep SPM yang baru berubah dari kinerja Program Kementerian menjadi kinerja Pemda yang memiliki konsekuensi *reward* dan *punishment*, Pemerintah Daerah diharapkan untuk memastikan tersedianya sumber daya (sarana, prasarana, alat, tenaga dan uang/biaya) yang cukup agar proses penerapan SPM berjalan sesuai dengan harapan. Terkait hal tersebut maka untuk pencapaian kinerja SPM dibutuhkan perhitungan pembiayaan. Adapun perhitungan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar standar pelayanan minimal (SPM) dapat dilihat pada Tabel 2.135.

Tabel 2.135
Alokasi Anggaran Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020

NO	JENIS PELAYAN/AN DASAR	ANGGARAN
1	Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	700.000.000
2	Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kegiatan Pembangunan Perumahan Sederhana Sehat	4.050.000.000

Sumber: LPPD Kota Bandung Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD, 2020

E. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Realisasi

Realisasi kinerja penerapan jenis pelayanan dasar bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat di Kota Bandung pada tahun 2020 disajikan pada Tabel 2.136.

Tabel 2.136
Realisasi Suburusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2020

NO	JENIS PELAYAN/AN DASAR	TARGET	REALISASI
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%

Sumber: LPPD Kota Bandung Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD, 2020

Selama tahun 2020, penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Penegakan Perda dan Perkada berlangsung Kondusif, tidak ada masyarakat yang terdampak atau melaporkan diri untuk memperoleh layanan sebagai akibat dari penegakan perda dan/atau perkada di Kota Bandung. Realisasi suburusan bencana dan kebakaran tahun 2020 disajikan pada Tabel 2.137.

Tabel 2.137

Realisasi Suburusan Bencana dan Kebakaran Tahun 2020

NO	JENIS PELAYAN/AN DASAR	TARGET CAPAIAN (%)	REALISASI CAPAIAN (%)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	101,55%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100,15%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	99,49%

Sumber: LPPD Kota Bandung Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD, 2020

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana: adalah capaian kinerja dari Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana yang dilaksanakan di lokasi rawan bencana untuk jenis kejadian banjir di wilayah Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiara Condong dan Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati yang pernah mengalami banjir bandang cukup parah pada 20 maret 2018. Jumlah penduduk 6.171 orang yang mendapatkan layanan informasi kebencanaan dibagi jumlah penduduk yang berada di sepanjang bantaran sungai yang berpotensi terdampak banjir yaitu sekitar 6.077 orang atau capaian kinerja 101,55%;
- b. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah akumulasi dari jumlah warga Negara dan aparatur yang ikut pelatihan 511 orang dan jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana yaitu 5.575 orang atau total jumlah 6.086 orang dibagi jumlah penduduk yang berada di sepanjang bantaran sungai yang berpotensi terdampak banjir yaitu sekitar 6.077 orang, dengan capaian kinerja dengan persentase capaian 100,15%;
- c. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi yaitu 167 orang dibagi Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana 167 orang dengan demikian dapat disampaikan persentase capaian kinerja adalah 100% dapat dijelaskan jumlah korban 167 jiwa terdiri dari luka-luka 154 orang dan meninggal 13 orang;
- d. Capaian SPM Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di Kota Bandung pada Tahun 2020 adalah 99,49%; dan
- e. Layanan penunjang berupa penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) sejumlah 586 (lima ratus delapan puluh enam) kali, sebagaimana yang terlihat pada Tabel 2.138 mengenai layanan penunjang operasi darurat nin kebakaran.

Tabel 2.138

Layanan Penunjang Operasi Darurat Non Kebakaran

NO	URAIAN	JUMLAH
ANIMAL RESCUE		
1	Evakuasi Evakuasi dan Penanganan Anjing liar	4
2	Evakuasi dan Penanganan Biawak	4
3	Evakuasi dan Penanganan Kucing liar	40

NO	URAIAN	JUMLAH
4	Evakuasi dan Penanganan Sarang Tawon / Lebah	288
5	Evakuasi dan Penanganan Ular	139
6	Evakuasi dan Penanganan Musang	3
7	Evakuasi dan Penanganan Sapi	2
8	Evakuasi dan Penanganan Burung	1
HUMAN RESCUE		
1	Evakuasi dan Penanganan jari terjepit Cincin / Engsel Susah Lepas	58
2	Evakuasi dan Penanganan Orang Terjebak dibangunan Ambruk (<i>Building Collapse</i>)	2
3	Evakuasi dan Penanganan Orang Terkunci	2
4	Evakuasi dan Penanganan Pencarian Orang Tenggelam	3
5	Evakuasi dan Penanganan Penemuan Mayat / Jenazah	4
6	Evakuasi dan Penanganan Pencarian Anak hanyut	4
7	Evakuasi dan Penanganan Orang Terjepit	1
8	Evakuasi dan Penanganan Orang Masuk Sumur	1
9	Evakuasi dan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (<i>Traffic Accident</i>)	5
10	Evakuasi dan Penanganan Pohon Tumbang	14
11	Evakuasi dan Penanganan korban Banjir	4
12	Evakuasi dan Penanganan korban Longsor	0
13	Evakuasi dan Penanganan Kabel melintang	2
14	Evakuasi dan Penanganan Tumpahan Oli	2
15	Evakuasi dan Penanganan Tiang Menghalangi Jalan	1
16	Evakuasi dan Penanganan Drone Tersangkut	1
17	Evakuasi dan Penanganan Atap Hampir Roboh	1
JUMLAH		586

Sumber: LPPD Kota Bandung Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD, 2020

Jumlah korban jiwa yang berhasil dievakuasi dan tangani adalah 167 (seratus enam puluh tujuh) orang, terdapat 13 (tiga belas) orang meninggal dunia, serta 154 (seratus lima puluh empat) orang mengalami luka bakar dan luka fisik lainnya. Jumlah aset yang berhasil diselamatkan sebesar Rp707.059.770.185,00 (tujuh ratus tujuh milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah).

2. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020, dapat dilihat pada Tabel 2.139. Sedangkan untuk alokasi anggaran suburusan bencana dan kebakaran disajikan pada Tabel 2.140.

Tabel 2.139

Alokasi Anggaran Suburusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,974,585,397.00
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	222,697,600.00
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	800,000.00
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	75,752,900.00
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	47,373,500.00
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	135,900,000.00
6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	109,795,730.00

No.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62,018,887.00
8	Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,050,000.00
9	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,118,380.00
10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	45,372,000.00
11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	239,018,000.00
12	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	300,000,000.00
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	1,729,688,400.00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,488,462,714.00
14	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	83,425,100.00
15	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	128,999,014.00
16	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	3,265,357,600.00
17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komunikasi	10,681,000.00
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	865,876,600.00
18	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	261,988,650.00
19	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	436,631,700.00
20	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	167,256,250.00
IV	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	109,114,600.00
21	Kegiatan Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah - Satuan Polisi Pamong Praja	109,114,600.00
V	Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat	2,356,408,000.00
22	Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2,203,041,000.00
23	Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	55,950,000.00
24	Kegiatan Peningkatan bina potensi masyarakat	97,417,000.00
VI	Program Pengembangan Kemampuan Polisi Pamong Praja dan Pengetahuan Masyarakat	4,361,482,726.12
25	Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal Kepada Masyarakat dan Badan Hukum	103,055,300.00
26	Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI, POLRI dan Instansi Terkait	356,520,000.00
27	Kegiatan Penanganan Perkara Pelanggaran Perda (Sekretariat PPNS) (DID)	3,901,907,426.12
VII	Program Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Dukungan Logistik	11,635,600,540.00
28	Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Trantibum Tranmas dengan TNI, POLRI dan Instansi Terkait	1,072,900,000.00
29	Kegiatan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	21,985,000.00
30	Kegiatan Dukungan Operasi Penertiban Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10,540,715,540.00
VIII	Program Penegakan Produk Hukum Daerah	834,072,000.00
31	Kegiatan Deteksi Dini dan Pencegahan Gangguan Tibum Tranmas	72,000,000.00
32	Kegiatan Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	512,072,000.00
33	Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat (DID)	250,000,000.00

Sumber: LPPD Kota Bandung Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD, 2020

Tabel 2.140

Alokasi Anggaran Sub Urusan Bencana dan Kebakaran

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.047.921.648,97
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	556.724.379,97
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	209.022.440,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	325.372.000,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	425.840.800,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	50.050.000,00
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	101.513.400,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	88.901.129,00
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	19.811.100,00
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.760.000,00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	43.450.000,00
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	122.530.400,00
Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	250.000.000,00
Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	836.946.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80.900.130,00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	29.984.130,00
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	50.916.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	319.235.000,00
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	16.500.000,00
Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	241.630.000,00
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	61.105.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16.800.000,00
Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	16.800.000,00
Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	56.867.500,00
Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	56.867.500,00
Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana	378.226.100,00
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan bahaya kebakaran dan bencana	152.251.000,00
Kegiatan Pembinaan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana	184.473.200,00
Kegiatan Penyusunan, Sosialisasi dan Pengawasan Peraturan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana	41.501.900,00
Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	11.235.299.790,00
Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Operasi Pemadaman	11.159.514.790,00
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	20.785.000,00
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	55.000.000,00

PROGRAM/KEGIATAN				ANGGARAN (Rp)
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Pra dan Tanggap Darurat Bencana				387.226.580,00
			Kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana	110.402.000,00
			Kegiatan Pelayanan Penanganan Darurat Bencana	66.000.000,00
			Kegiatan Kerjasama bantuan penanggulangan bencana	210.824.580,00
Program Peningkatan sarana dan prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana lainnya				3.182.858.400,00
			Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana lainnya	1.639.591.000,00
			Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran, penyelamatan dan bencana lainnya	781.440.000,00
			Kegiatan penataan sarana dan prasarana kawasan dan logistik	761.827.400,00
Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan				60.363.600,00
			Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Barat	60.363.600,00
Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan				67.965.200,00
			Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Utara	67.965.200,00
Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan				60.320.300,00
			Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Selatan	60.320.300,00
Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan				69.665.080,00
			Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Timur	69.665.080,00
JUMLAH				18.963.649.328,97

Sumber: LPPD Kota Bandung Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD, 2020

F. BIDANG URUSAN SOSIAL

1. Realisasi

Realisasi kinerja penerapan jenis pelayanan dasar bidang urusan sosial di Kota Bandung pada tahun 2020 disajikan pada Tabel 2.141.

Tabel 2.141
Realisasi Bidang Urusan Sosial Tahun 2020

NO	JENIS PELAYAN/AN DASAR	TARGET	REALISASI	KET
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar Panti	100%	100%	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang dijangkau dan memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti sebanyak 61 orang di UPT Puskesmas dan 268 Orang di Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti	100%	100%	Jumlah anak terlantar yang dijangkau dan memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti sebanyak 112 orang

NO	JENIS PELAYAN/AN DASAR	TARGET	REALISASI	KET
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti	100%	100%	Jumlah lanjut usia terlantar yang dijangkau dan memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti sebanyak 78 orang
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100%	100%	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang dijangkau dan memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti sebanyak 310 orang, yang terdiri dari 260 Orang yang mendapatkan layanan dasar di UPT Puskesmas dan 50 Orang yang mendapatkan bimbingan sosial dan rehabilitasi sosial dasar di Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana	100%	100%	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh dan perlindungan jaminan sosial sebanyak 5.969 orang.

Sumber: LPPD Kota Bandung Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD, 2020

2. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Tahun 2020 disajikan pada Tabel 2.142.

Tabel 2.142

Alokasi Anggaran Bidang Urusan Sosial

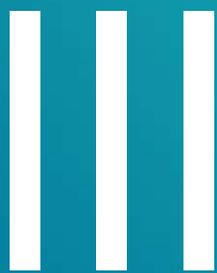
NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	7.013.965.954
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	2.216.738.092
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti	311.919.000
1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	371.925.000
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Gelandang dan Pengemis	90.786.000
	Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di Puskesmas	4.022.597.862
	Program Perlindungan Sosial Bencana	1.730.570.790
2	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	1.051.225.590
	Kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan perlengkapan Kebencanaan	679.345.200
	Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan	3.847.807.707
3	Penyelenggaraan jaminan sosial bagi fakir miskin	1.682.313.600
	Kegiatan Peningkatan Aksesibilitas Fakir Miskin dan PMKS Lainnya (DID)	2.165.494.106,72
	TOTAL ANGGARAN	12.592.344.451

Sumber: LPPD Kota Bandung Tahun 2020 yang dikelola dalam SIPD, 2020



GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB





WWW.MEMORA.ID

3.1. KINERJA KEUANGAN TAHUN 2016-2020

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Ruang lingkup keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya, sehingga dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, sehingga dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan.

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kriteria pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, pendapatan daerah diperoleh dengan mengacu pada kebijakan di bidang keuangan negara dan mempertimbangkan kondisi perekonomian, yang dicerminkan melalui asumsi indikator makro ekonomi, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah yang diupayakan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. **Pembiayaan daerah** yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

3.1.1. KINERJA PELAKSANAAN APBD TAHUN 2016 - 2020

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pengaruh dari pergerakan output sektor-sektor produksi utama dalam hal ini diindikasikan melalui pergerakan pertumbuhan ekonomi, serta pelaksanaan kebijakan pendapatan daerah, selama tahun 2016-2020 tergambar dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Realisasi Target Pendapatan Daerah Kota Bandung
Tahun 2016 s/d 2020 (Dalam Miliar Rupiah)

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	6.684,13	5.685,27	85,06
2	2017	6.345,54	5.735,69	90,39
3	2018	6.581,13	5.939,99	86,70
4	2019	7.341,97	6.381,81	86,92
5	2020	6.151,47	5,643.66	91.74

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2019 (Audited), 2020 (un-audited)

Secara lebih detail, realisasi pendapatan daerah Kota Bandung dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2016 s.d. 2020 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020*		Rata-rata Pertumbuhan Realisasi (%)
		Target	Realisasi									
1	PENDAPATAN	6,684.13	5,685.21	6,345.55	5,735.01	6,851.14	5,940.00	7,341.97	6,381.82	6,151.47	5,643.66	0.06%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	2,767.40	2,152.76	3,015.84	2,578.46	3,397.31	2,571.59	3,252.54	2,548.26	2,264.81	2,063.48	-0.08%
1.1.1.	Pajak Daerah	2,186.42	1,709.81	2,400.10	2,175.08	2,644.00	2,160.15	2,559.10	2,154.64	1,751.23	1,629.19	0.38%
1.1.2	Retribusi Daerah	204.77	92.01	262.68	50.06	230.00	69.13	140.17	62.47	62.04	52.33	-6.67%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	20.00	10.66	20.00	11.28	66.90	10.77	80.04	10.48	27.74	13.13	4.79%
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	356.22	340.28	333.06	342.03	456.41	331.54	473.24	320.68	423.80	368.82	1.84%
1.2	Dana Perimbangan	2,785.94	2,443.76	2,416.22	2,290.75	2,547.28	2,427.24	2,592.77	2,484.08	2,568.88	2,396.29	-0.30%
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	291.22	315.65	349.27	302.07	410.55	321.72	340.19	248.78	476.08	349.17	3.98%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1,672.46	1,672.46	1,643.08	1,643.08	1,643.08	1,643.08	1,748.44	1,798.10	1,601.83	1,589.63	-0.78%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	822.26	455.65	423.87	345.61	493.65	462.44	504.14	437.20	490.96	457.50	1.77%
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1,130.78	1,088.69	913.49	865.80	906.55	941.17	1,496.66	1,349.48	1,317.78	1,183.89	3.87%
1.3.1	Hibah	270.23	269.62	26.51	20.57	70.00	43.55	294.25	207.42	228.25	227.91	81.09%
1.3.2	Dana Darurat											
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	770.18	742.94	798.13	785.52	793.54	855.51	897.66	871.63	859.60	747.84	0.46%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.31	97.31	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	90.38	76.13	88.85	59.70	43.02	42.11	304.75	270.44	132.63	110.82	86.44%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2019 (Audited) dan *(2020 (un-audited))

Berdasarkan data pada Tabel 3.2 maka dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah meningkat dari tahun 2016 sampai 2019, namun menurun secara signifikan di tahun 2020 akibat pandemic COVID 19 sehingga rata-rata pertumbuhan menjadi minus. Pendapatan daerah dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,06% per tahun, dengan pertumbuhan pendapatan daerah dari PAD sebesar -0,08% per tahun, Dana Perimbangan sebesar -0,30% per tahun. Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,87% per tahun. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan daerah berdasarkan sumber-sumbernya, dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah selama periode tahun 2016–2020, memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,06% per tahun. Komponen PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah, sebagaimana pada Tabel 3.3 memperlihatkan realisasi target Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2016 sampai dengan 2020 (dalam miliar rupiah).

Tabel 3.3

Realisasi Target Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung
Tahun 2016 s.d. 2020 (Dalam Miliar Rupiah)

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	2.767,40	2.152,82	77,79
2	2017	3.015,84	2.578,46	85,52
3	2018	3.397,31	2.571,59	75,69
4	2019	3.252,54	2.548,26	78,34
5	2020	2.264,81	2.063,48	91,11

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2019 (Audited) dan 2020 (un-audited)

Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung selama periode 2016-2020 senantiasa meningkat, baik dari sisi anggaran maupun dari sisi realisasi. Namun demikian selama periode 2016-2020 tersebut, pencapaian realisasi masih di bawah target yang ditetapkan. Rata-rata pertumbuhan PAD tahun 2016-2020, yaitu -0,08% per tahun. Sumber utama PAD Kota Bandung berasal dari Pajak Daerah, yaitu rata-rata 0,38% di tahun 2016-2020.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, mendefinisikan pajak daerah sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tabel 3.4 memperlihatkan mengenai realisasi target pajak daerah Kota Bandung Tahun 2016 sampai dengan 2020 (dalam miliar rupiah).

Tabel 3.4

Realisasi Target Pajak Daerah Kota Bandung
Tahun 2016 s.d. 2020 (Dalam Miliar Rupiah)

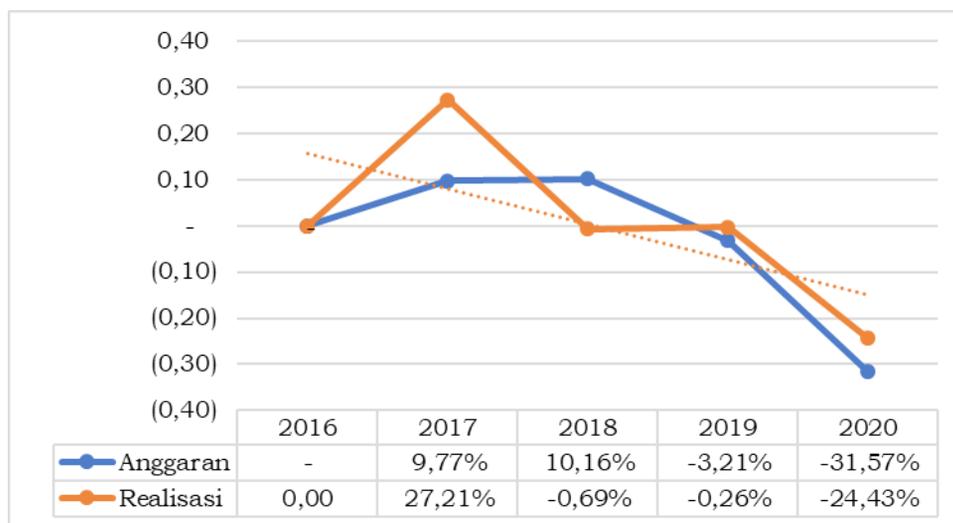
No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	2.186,42	1.709,87	78,20
2	2017	2.400,10	2.175,08	90,62
3	2018	2,644.00	2,160.15	81,70
4	2019	2,559.10	2,154.64	84,19
5	2020	1,751.23	1,629.19	93,03

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2019 (Audited) dan 2020 (un-audited)

Sampai dengan tahun 2017, Kota Bandung telah menetapkan 9 (sembilan) jenis mata pajak daerah yang menjadi bagian pendapatan asli daerah Kota Bandung, meliputi: pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; pajak reklame; pajak penerangan jalan; pajak parkir; pajak bumi dan bangunan; bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan pajak air tanah. Selama tahun 2016 hingga tahun 2020, rata-rata pertumbuhan pajak daerah sebesar 0.38% per tahun, sebagaimana Gambar 3.1.

Gambar 3.1

Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2016-2020



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2019 (audited) dan 2020 (un-audited)

Dari sisi pertumbuhan, realisasi perolehan pajak daerah dari tahun 2019-2020 tren perolehannya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tren pertumbuhan pajak daerah yang senantiasa mengalami kenaikan tiap tahunnya tersebut memiliki kecenderungan yang sama dengan pendapatan asli daerah secara total, dengan pertumbuhan per tahun dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bandung berjumlah 16 jenis retribusi, dengan rincian sebagai berikut:

1. *Retribusi Jasa Umum*, meliputi: Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
2. *Retribusi Jasa Usaha*, meliputi: Retribusi Tempat Rekreasi, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Terminal - Tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, Retribusi Trans Metro Bandung (TMB);
3. *Retribusi Perizinan Tertentu*, meliputi: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi, Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan, Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi, Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan, Retribusi Pemberian IMTA.

Retribusi daerah selama tahun 2016 hingga tahun 2020, dari sisi perbandingan realisasi dengan target terus mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 44,93% pada tahun 2016 menjadi 44,56% di 2019, naik menjadi 84,34% di 2020 karena ada penyesuaian target sebagai dampak Pandemi Covid-19, sehingga target anggaran 2020 menjadi sebesar 62,04 miliar. Penurunan dalam

hal realisasi ini berimplikasi pada sisi pertumbuhan realisasi yang juga mengalami pertumbuhan negatif, dengan rata-rata sebesar minus 6.67% per tahun. Realisasi target retribusi daerah Kota Bandung Tahun 2016 s/d 2020 (dalam miliar rupiah) disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5

Realisasi Target Retribusi Daerah Kota Bandung
Tahun 2016 s/d 2020 (Dalam Miliar Rupiah)

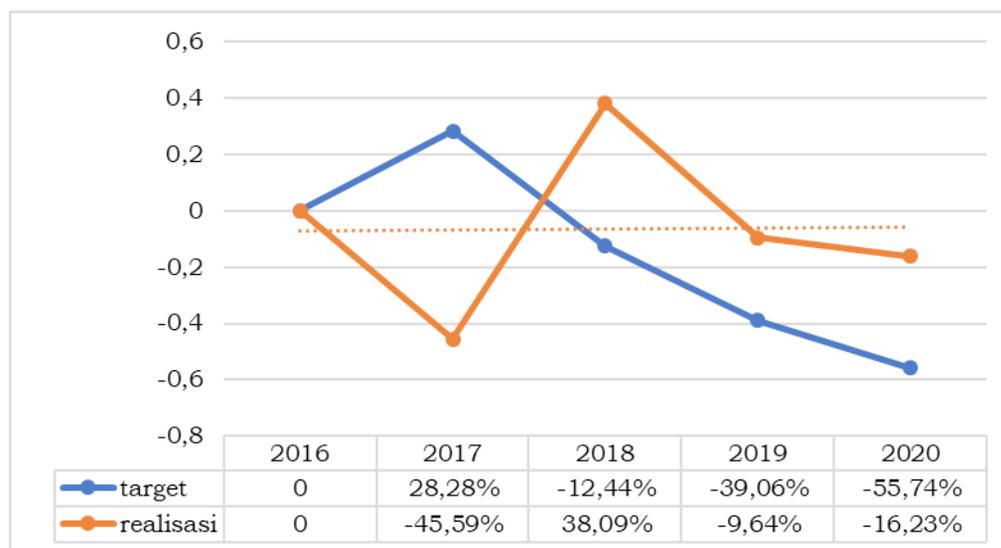
No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	204.77	92.01	44,93
2	2017	262.68	50.06	19,06
3	2018	230.00	69.13	30,06
4	2019	140.17	62.47	44,56
5	2020	62.04	52.33	84,34

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2019 (audited) dan 2020 (un-audited)

Pertumbuhan retribusi daerah cenderung tidak sejalan dengan pola pertumbuhan PAD, dimana pertumbuhan PAD kecenderungannya positif dan terus meningkat, sedangkan pertumbuhan retribusi kecenderungannya negatif dan semakin menurun, hal tersebut dikarenakan PAD yang bersumber dari retribusi daerah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor intern, yaitu bagaimana komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan aturan pemungutan retribusi daerah dan juga kepatuhan masyarakat untuk membayar retribusi daerah. Pertumbuhan realisasi retribusi daerah selama periode 2016-2020 dapat terlihat pada Gambar 3.2. Realisasi target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kota Bandung Tahun 2016 sampai dengan 2020 (Dalam miliar rupiah) disajikan pada Tabel 3.6.

Gambar 3.2

Grafik Pertumbuhan Target dan Realisasi Retribusi Daerah
Tahun 2016-2020



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2019 (audited) dan 2020 (un-audited).

Tabel 3.6

Realisasi Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Kota Bandung Tahun 2016 s.d. 2020 (Dalam Miliar Rupiah)

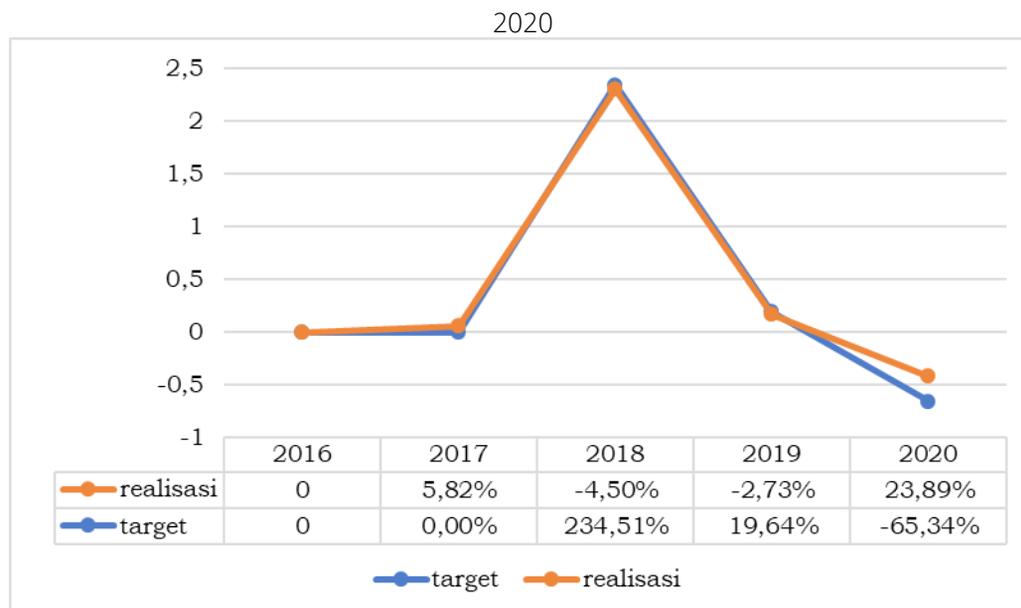
No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	20.00	10.66	53,29
2	2017	20.00	11.28	56,40
3	2018	66.90	10.77	16,10
4	2019	80.04	10.48	13,09
5	2020	27.74	13.13	47,34

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2019 (audited) dan 2020 (un-audited)

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kota Bandung pada PDAM Tirtawening, PT. Bank Jabar Banten, Bank Bandung, dan Koperasi Pegawai Kota Bandung (KPKB) Kota Bandung. Selama tahun 2016 sampai dengan 2020, rata-rata ketercapaian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 37,13%. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terbesar bersumber dari bagian laba yang diperoleh dari PT. Bank Jabar Banten. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selama tahun 2016 hingga tahun 2020 tumbuh dengan rata-rata sebesar 4,79% per tahun, dengan rincian per tahun sebagaimana disajikan pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3

Grafik Pertumbuhan Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2016-



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2019 (audited) dan 2020 (un-audited)

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memberikan kontribusi ketiga setelah pajak daerah dan retribusi daerah dalam hal pembentukan pendapatan asli daerah. Pos pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri atas: (1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; (2) Penerimaan Jasa Giro; (3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR); (4) Pendapatan Denda Pajak; (5) Pendapatan dan Pengembalian dari SKPD; (6) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum; (7) Pendapatan dan Pemanfaatan Kekayaan Daerah; (8) Penerimaan Setoran dari Lembaga lain - PT. Taspen; (9) Pendapatan Lainnya, Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Realisasi Target Lain-lain PAD Yang Sah Kota Bandung Tahun 2016 sampai dengan 2020 (dalam miliar rupiah) disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7

Realisasi Target Lain-lain PAD Yang Sah Kota Bandung

Tahun 2016 s.d. 2020 (Dalam Miliar Rupiah)

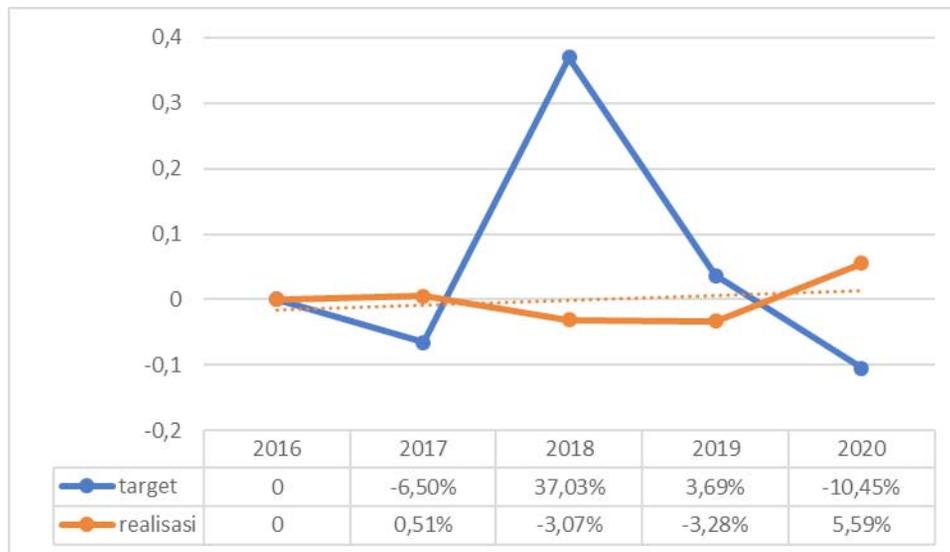
No	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	356.22	340.28	95,53
2	2017	333.06	342.03	102,69
3	2018	456.41	331.54	72,64
4	2019	473.24	320.68	67,76
5	2020	423.80	368.82	87,02

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2019 (audited) dan 2020 (un-audited)

Lain-lain PAD yang Sah selama tahun 2016 hingga tahun 2020 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 1,84% per tahun, dengan kecenderungan terjadi perlambatan pertumbuhan setiap tahunnya, sebagaimana terlihat pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4

Grafik Pertumbuhan Target dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2016-2020



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2019 (audited) dan 2020 (un-audited)

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan selama periode tahun 2016–2020, memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar minus 0,43% per tahun. Komponen dana perimbangan terdiri atas: (1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; (2) Dana Alokasi Umum (DAU); dan (3) Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Realisasi Target Dana Perimbangan Kota Bandung Tahun 2016 sampai dengan 2020 (dalam miliar rupiah) disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8

Realisasi Target Dana Perimbangan Kota Bandung
Tahun 2016 s.d. 2020 (Dalam Miliar Rupiah)

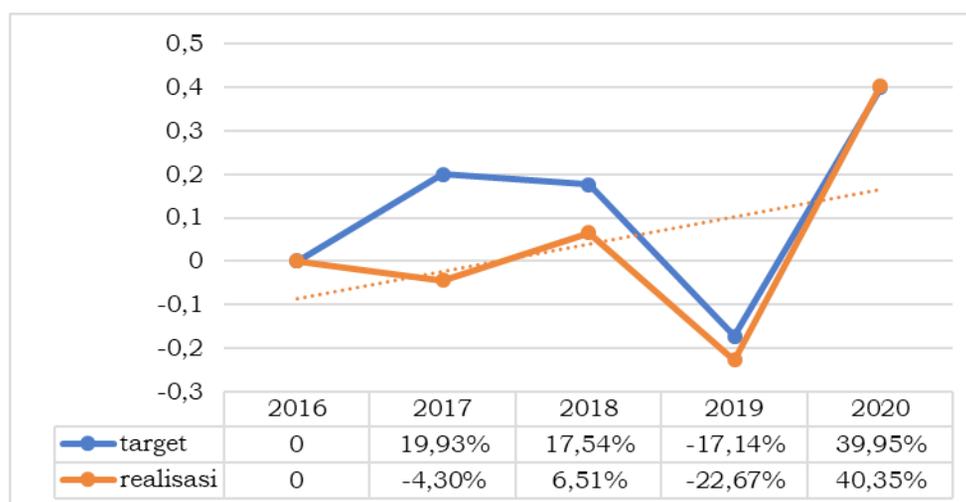
No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	(%) Capaian
1	2016	2,785.94	2,443.76	87,72
2	2017	2,416.22	2,290.75	94,81
3	2018	2,547.28	2,427.24	95,29
4	2019	2,592.77	2,484.08	95,80
5	2020	2,568.88	2,396.29	93,28

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2019 (audited) dan 2020 (un-audited)

Dilihat dari besaran realisasi Dana Perimbangan, terlihat bahwa secara umum mengalami kenaikan tiap tahunnya. Dari sisi persentase capaian pun, dana perimbangan realisasinya cenderung stabil mendekati target yang ditetapkan dikisaran 95% sampai 98%. Namun pada tahun 2016 realisasinya cukup jauh dari target yakni hanya 87,72%, hal ini dikarenakan rendahnya kemampuan merealisasikan anggaran yang berasal dari DAK. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak selama tahun 2016 hingga tahun 2020 rata-rata tumbuh sebesar 3,98% per tahun dengan rincian pertumbuhan per tahun dapat dilihat pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5

Pertumbuhan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/
Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2016-2020



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2019 (audited) dan 2020 (un-audited)

Berdasarkan Gambar 3.5 pertumbuhan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak memiliki tren yang sama dengan dana perimbangan secara total. Persentase realisasi terhadap target Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Bandung Tahun 2016 sampai dengan 2020 (dalam miliar rupiah) disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9

Persentase Realisasi Terhadap Target Dana Bagi Hasil Pajak/
Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Bandung Tahun 2016 s.d. 2020

(Dalam Miliar Rupiah)

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	(%) Capaian
1	2016	291.22	315.65	108,39
2	2017	349.27	302.07	86,48
3	2018	410.55	321.72	78,36
4	2019	340.19	248.78	73,13
5	2020	476.08	349.17	73,34

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2019 (audited) dan 2020 (un-audited)

Fluktuasi pertumbuhan realisasi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dalam kurun waktu 2016 sampai 2020 tersebut sejalan dengan persentase capaian realisasi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yang juga berfluktuasi dari tahun 2016-2020, persentase terkecil dicapai pada tahun 2019 sebesar 73,13%, sedangkan pencapaian terbesar terjadi pada tahun 2016 dengan raihan 108,55%. Kontribusi terbesar dana bagi hasil pajak diperoleh dari dana bagi hasil pajak penghasilan orang pribadi, sedangkan untuk dana bagi hasil bukan pajak, bagi hasil dari pertambangan panas bumi dan pertambangan gas bumi menjadi sektor yang paling banyak memberikan kontribusi. Hal ini sejalan masih besarnya kontribusi sektor pertambangan dalam pendapatan pemerintah pusat. DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Persentase Realisasi Terhadap Target Dana Alokasi Umum Kota Bandung Tahun 2016 sampai dengan 2020 (dalam miliar rupiah) disajikan pada Tabel 3.10.

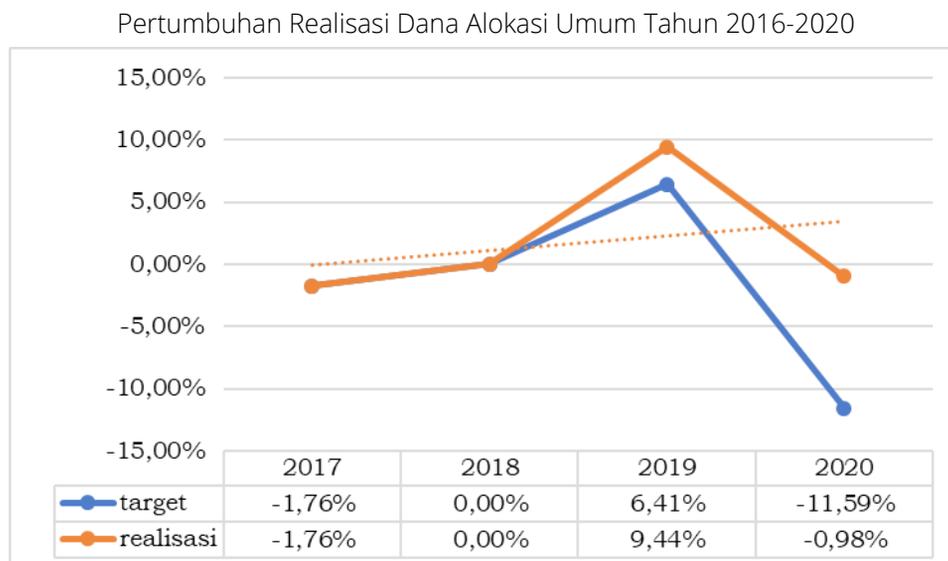
Tabel 3.10

Persentase Realisasi Terhadap Target Dana Alokasi Umum
Kota Bandung Tahun 2016 s.d. 2020 (dalam Miliar Rupiah)

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	(%) Capaian
1	2016	1,672.46	1,672.46	100
2	2017	1,643.08	1,643.08	100
3	2018	1,643.08	1,643.08	100
4	2019	1,748.44	1,798.10	102,8
5	2020	1,601.83	1,589.63	99,24

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2019 (audited) dan 2020 (un-audited)

Anggaran dan realisasi dari DAU Kota Bandung selama periode tahun 2016-2019 cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, dan mampu terealisasi 100%, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2020 terjadi *refocusing* anggaran yang difokuskan pada penanganan Covid-19, sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.10. Pertumbuhan Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2016-2020 terlihat pada Gambar 3.6.

Gambar 3.6

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2019 (audited) dan 2020 (un-audited)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke Daerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik di daerah. Persentase Realisasi Terhadap Target Dana Alokasi Khusus Kota Bandung Tahun 2016 sampai dengan 2020 (dalam miliar rupiah) disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11

Persentase Realisasi Terhadap Target Dana Alokasi Khusus Kota Bandung Tahun 2016 s.d. 2020 (Dalam Miliar Rupiah)

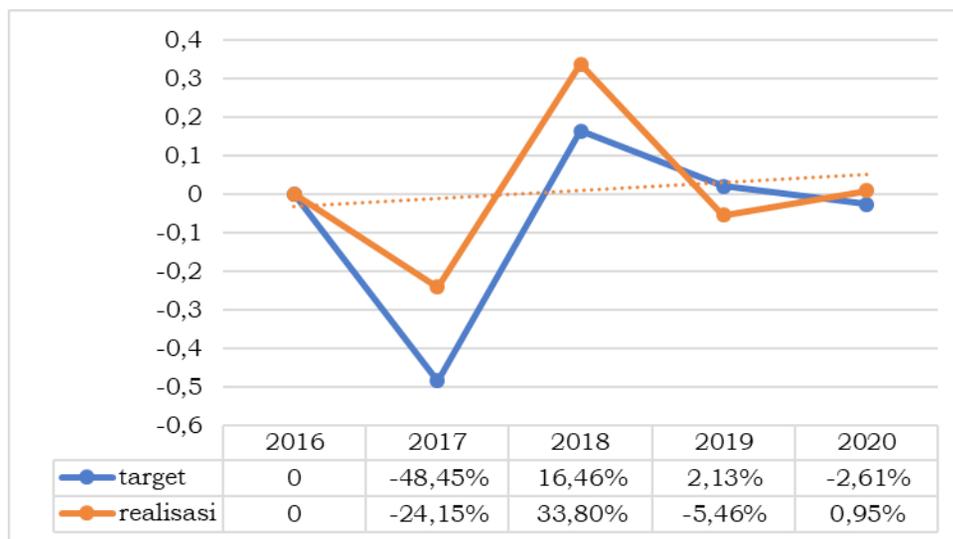
No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	(%) Capaian
1	2016	822.26	455.65	55,41
2	2017	423.87	345.61	81,54
3	2018	493.65	462.44	93,68
4	2019	504.14	437.20	86,72
5	2020	490.96	457.50	93,18

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2019 (audited) dan 2020 (un-audited)

Penerimaan Dana Alokasi Khusus terjadi fluktuasi setiap tahunnya, dari Rp822,26 miliar pada tahun 2016 menurun drastis pada tahun 2017 menjadi Rp423,87 miliar, namun kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi Rp493,65 miliar, Rp504,15 miliar pada tahun 2019 dan menurun kembali pada tahun 2020 menjadi Rp490,96 miliar. Sebagaimana halnya komponen dana perimbangan yang lain (dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dan DAU), pertumbuhan realisasi dana alokasi khusus memiliki tren yang sama dengan dana perimbangan secara total, dengan rata-rata tumbuh sebesar 1,77% per tahun dengan rincian pertumbuhan per tahun dapat dilihat pada Gambar 3.7.

Gambar 3.7

Pertumbuhan Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2016-2020



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2019 (audited) dan 2020 (un-audited)

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kota Bandung yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah selama periode tahun 2016–2020, memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 10,54% per tahun, dengan kecenderungan terjadi fluktuasi pertumbuhan setiap tahunnya. Komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah; (2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan (4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah ini relatif besar, dimana selama periode 2016-2020 dengan rata-rata capaian sebesar 94,58%. Persentase Realisasi Terhadap Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Bandung Tahun 2016 sampai dengan 2020 (dalam miliar rupiah) disajikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12

Persentase Realisasi Terhadap Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Bandung Tahun 2016 s.d. 2020 (Dalam Miliar Rupiah)

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	(%) Capaian
1	2016	1,130.78	1,088.69	96,28
2	2017	913.49	865.80	94,78
3	2018	906.55	941.17	103,82
4	2019	1,496.66	1,349.48	90,16
5	2020	1,317.78	1,183.89	93,18

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2019 (audited) dan 2020 (un-audited)

2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2016-2020, disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Analisis belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2016-2020 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian yang digambarkan melalui realisasi indikator makro ekonomi, juga pelaksanaan kebijakan Belanja Daerah, diperoleh nilai realisasi Belanja Daerah, seperti ditunjukkan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13

Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Bandung
Tahun 2016 s.d. 2020 (Dalam Miliar Rupiah)

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	7,360.85	5,830.41	72,21
2	2017	6,752.91	5,541.72	82,06
3	2018	7,418.33	6,114.45	82,42
4	2019	7,365.41	6,312.15	85,70
5	2020	6,382.75	5,407.30	84,72

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2020

Anggaran dan realisasi belanja daerah Kota Bandung selama periode 2016-2019 mengalami kenaikan setiap tahunnya dan terjadi penurunan di tahun 2020. Jika pada tahun 2016 realisasi belanja daerah sebesar Rp5,83 triliun, tahun 2017 sebesar Rp5,54 triliun, tahun 2018 sebesar 6,11 triliun, tahun 2019 sebesar Rp6,31 triliun dan tahun 2020 sebesar 5,41 triliun.

Dalam periode 2016-2020, realisasi belanja tidak langsung dibelanjakan untuk keperluan belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya termasuk pemerintah desa, serta belanja tidak terduga. Proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Kota Bandung Tahun 2016 sampai dengan 2020 (dalam miliar rupiah) disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14

Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kota Bandung Tahun 2016 s.d. 2020 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	2016			2017			2018			2019			2020			Rata-rata
		Anggaran	Realisasi	Proporsi (%)													
2	BELANJA	7,360.85	5,830.41	79.21	6,752.91	5,541.72	82.06	7,418.33	6,114.45	82.42	7,365.41	6,312.15	85.70	6,382.75	5,407.30	84.72	82.82
2.1	Belanja Tidak Langsung	2,934.43	2,556.10	87.11	2,826.04	2,688.86	95.15	3,301.93	3,051.42	92.41	3,058.99	2,838.20	92.78	3,193.13	2,764.06	86.56	90.80
2.1.1	Belanja Pegawai	2,621.39	2,275.39	86.80	2,428.08	2,337.41	96.27	2,744.97	2,537.00	92.42	2,741.59	2,535.15	92.47	2,478.56	2,169.07	87.51	91.09
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	130.34	128.53	98.62	4.59	0,00	0,00	108.83	108.83	100.00	108.83	108.83	100.00	140.15	139.15	99.29	79.58
2.1.4	Belanja Hibah	154.10	151.25	98.15	380.96	350.21	91.93	441.10	402.40	91.23	196.47	190.29	96.85	186.64	177.73	95.22	94.68
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.20	2.24	70.00	81.63	79.61	97.53	33.51
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	1.00	0.90	90.07	1.00	0.90	90.07	1.72	1.52	88.54	1.50	1.50	100.00	33.75	33.11	98.09	93.36
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	27.61	0.02	0.08	11.40	0.35	3.03	5.32	1.68	31.46	7.40	0.20	2.67	272.40	165.38	60.71	76.91
2.2	Belanja Langsung	4,426.42	3,274.32	73.97	3,926.88	2,852.86	72.65	4,116.40	3,063.03	74.41	4,306.42	3,473.95	80.67	3,189.62	2,643.25	82.87	81.92
2.2.1	Belanja Pegawai	300.79	264.96	88.09	313.36	283.73	90.54	353.52	279.92	79.18	283.05	232.48	82.13	187.73	130.75	69.65	81.92
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,130.06	1,755.34	82.41	2,193.25	1,650.25	75.24	2,238.42	1,733.41	77.44	2,617.81	2,016.09	77.01	2,334.46	1,954.02	83.70	79.16
2.2.3	Belanja Modal	1,995.57	1,254.03	62.84	1,420.26	918.88	64.70	1,524.46	1,049.70	68.86	1,405.56	1,179.44	83.91	667.42	558.48	83.68	72.80

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2020

Dari rincian realisasi belanja daerah sebagaimana disajikan pada Tabel 3.14 di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi belanja tidak langsung tahun 2016 hingga tahun 2020 sebesar 90,80%, sedangkan rata-rata realisasi belanja langsung tahun 2016 hingga tahun 2020 sebesar 76,91%. Realisasi belanja daerah dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2016 sampai dengan 2020 (dalam miliar rupiah) disajikan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Bandung
Tahun 2016 s.d. 2020 (Dalam Miliar Rupiah)

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi (%)
2	BELANJA	5,830.41	5,541.72	6,114.45	6,312.15	5,407.30	82.82
2.1	Belanja Tidak Langsung	2,556.10	2,688.86	3,051.42	2,838.20	2,764.06	90.80
2.1.1	Belanja Pegawai	2,275.39	2,337.41	2,537.00	2,535.15	2,169.07	91.09
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	128.53	-	108.83	108.83	139.15	79.58
2.1.4	Belanja Hibah	151.25	350.21	402.40	190.29	177.73	94.68
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	2.24	79.61	33.51
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	0.90	0.90	1.52	1.50	33.11	93.36
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0.02	0.35	1.68	0.20	165.38	19.59
2.2	Belanja Langsung	3,274.32	2,852.86	3,063.03	3,473.95	2,643.25	76.91
2.2.1	Belanja Pegawai	264.96	283.73	279.92	232.48	130.75	81.92
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,755.34	1,650.25	1,733.41	2,016.09	1,954.02	79.16
2.2.3	Belanja Modal	1,254.03	918.88	1,049.70	1,179.44	558.48	72.80

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2019 (audited) dan 2020 (un-audited)

Selama periode tahun 2016 sampai tahun 2020, secara proporsi realisasi terhadap anggaran, diketahui bahwa realisasi belanja langsung relatif lebih rendah dibandingkan realisasi belanja tidak langsung, hal ini dikarenakan belanja langsung tidak dapat sepenuhnya diserap diantaranya disebabkan karena adanya hambatan pada proses pengadaan barang dan jasa, serta adanya dampak perekonomian global. Dari sisi pertumbuhan realisasi, belanja daerah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar minus 1,14% per tahun. Pertumbuhan belanja daerah terbesar bersumber dari belanja langsung sebesar minus 3,20% per tahun, diikuti rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung sebesar 1,82%, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.15.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara garis besar, analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Tabel 3.16 menyajikan gambaran realisasi pembiayaan daerah tahun 2016 hingga tahun 2020. Dari data, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pembiayaan tumbuh dengan rata-rata -19,15% per tahun, sedangkan pengeluaran pembiayaan tumbuh dengan rata-rata -33,36% per tahun. Rata-rata pertumbuhan realisasi pembiayaan daerah Kota Bandung Tahun 2016 sampai dengan 2020 (dalam miliar rupiah) disajikan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Bandung
Tahun 2016 s.d. 2020 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	Tahun												Rata-rata Pertumbuhan Realisasi (%)
		2016		2017		2018		2019		2020		Realisasi		
		Target	Realisasi											
3	Pembiayaan	994.14	994.14	532.13	532.13	787.20	601.79	233.79	234.38	231.28	241.60			-18.27
3.1	Penerimaan Pembiayaan	994.14	994.14	532.13	532.13	787.20	601.79	233.79	234.38	231.28	231.28			-19.15
3.1.1	Penggunaan SILPA	317.42	316.81	124.76	123.62	220.00	193.55	210.35	72.77	0,00	0,00			-19.15
3.1.2	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.322			0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	317.42	316.81	124.76	123.62	220.00	193.55	210.35	72.77	0,00	0,00			-33.36
3.2.2	Penyeritaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	317.42	316.81	124.76	123.62	220.00	193.55	210.35	72.77	0,00	0,00			-33.36
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang Pokok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2019 (Audited) dan 2020 (Unaudited)

3.1.2. NERACA DAERAH

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (*current ratio*) dan rasio *quick* (*quick ratio*). Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan antara lain: rasio total hutang terhadap total aset (*debt to asset ratio*) dan rasio hutang terhadap modal (*debt to equity ratio*). Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Jenis rasio aktivitas yang digunakan dalam analisis antara lain: rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. Perkembangan neraca Pemerintah Kota Bandung tahun 2016-2020 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17

Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Bandung
Tahun 2016 s.d. 2020 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020 *(
	ASET						
	ASET LANCAR						
	Kas di Kas Daerah	416.34	492.04	133.77	139.74	670.99	0.82
	Kas di Bendahara Penerimaan	0.06	0.06	0.00	0.00	0.09	0,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.53	0.28	0.17	0.22	7.19	7.70
	Kas di BLUD	110.20	103.43	99.86	85.31	127.58	0.06
	Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00
	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	0,00	6,01	6,01	0,00
	Kas Lainnya	1.85	2.66	0.59	0.00	0.00	0,00
	Setara Kas	0,00	0,00	0,00	10,32	10,32	0,00
	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piutang Pendapatan	1,155.29	1,273.02	1,335.63	1,178.30	1,178.53	0.01
	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang	(638.84)	(750.59)	(792.04)	(845.50)	(845.50)	0.07
	Beban Dibayar Dimuka	0.65	0.52	4.58	4.02	4.02	1.88
	Persediaan	64.95	78.70	84.76	74.61	74.61	0.04
	JUMLAH ASET LANCAR	1,116.03	1,206.12	867.30	653.04	1,246.55	0.12
	INVESTASI JANGKA PANJANG						
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen						
	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Bergulir	0.40	0.40	4.42	0.07	0.07	2.30
	Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0.40	0.40	4.42	0.07	0.07	2.30

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020 *(
	Investasi Jangka Panjang Permanen						
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investasi Permanen Lainnya	1,074.71	1,329.60	1,551.34	2,191.91	2,191.91	0.20
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	1,074.71	1,329.60	1,551.34	2,191.91	2,191.91	0.20
	ASET TETAP						
	Tanah	15,571.81	14,559.65	33,659.38	33,643.96	33,664.82	0.31
	Peralatan dan Mesin	1,803.48	1,883.98	2,065.45	2,635.21	2,938.90	0.13
	Gedung dan Bangunan	2,932.66	2,733.35	3,068.86	3,777.48	3,836.16	0.08
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3,390.73	3,238.01	3,318.20	3,505.11	3,631.01	0.02
	Aset Tetap Lainnya	148.24	221.65	204.56	231.37	235.38	0.14
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	546.49	450.20	650.60	238.12	238.20	(0.09)
	Akumulasi Penyusutan	(2,825.38)	(2,093.11)	(3,150.30)	(3,684.02)	(3,684.02)	0.10
	JUMLAH ASET TETAP	21,568.03	20,993.72	39,816.74	40,347.24	40,860.45	0.22
	DANA CADANGAN						
	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASET LAINNYA						
	Tagihan Jangka Panjang	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.00
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	211.83	211.83	13.26	0.00	0.00	0.00
	Aset Tidak Berwujud	26.69	26.88	2.66	1.67	1.67	(0.32)
	Aset Lain-lain	21.91	194.37	359.18	331.23	331.23	2.16
	JUMLAH ASET LAINNYA	260.94	433.60	375.62	333.41	333.41	0.10
	JUMLAH ASET	24,020.10	23,963.43	42,615.43	43,525.67	44,632.39	0.21
	KEWAJIBAN						
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020 *(
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Diterima Dimuka	37.03	33.77	45.85	43.31	43.20	0.05
	Utang Beban	52.08	245.83	199.08	145.32	137.15	0.80
	Utang Jangka Pendek Lainnya	68.77	122.53	54.77	20.61	18.42	(0.13)
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	157.87	402.14	299.71	209.24	198.78	23,52
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	157.87	402.14	299.71	209.24	198.78	0.24
	EKUITAS						
	EKUITAS	23,862.22	23,561.30	42,315.71	43,316.43	43,317.18	0.20
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	24,020.10	23,963.43	42,615.43	43,525.67	43,515.96	0.20

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2019 (Audited) dan 2020 (Un-audited)

Definisi dari setiap elemen utama neraca serta sub-sub rekening yang terdapat didalam elemen utama neraca sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, adalah sebagai berikut:

1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak memenuhi kriteria tersebut, dikategorikan sebagai aset non lancar.

Aset pemerintah Kota Bandung selama periode tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,21%, dengan rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis aset antara lain, aset lancar rata-rata naik sebesar 0,12%, investasi jangka panjang terjadi peningkatan sebesar 0,20%, aset tetap rata-rata naik sebesar 0,22%, dan aset lainnya rata-rata naik sebesar 0,10%.

Adapun yang menjadi sub-sub rekening dari aset, dijelaskan berikut:

1. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah, meliputi:
 - a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening - rekening pada bank yang ditentukan oleh walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kota Bandung;
 - b. Setara kas, antara lain Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola bendahara umum daerah;
 - c. Uang tunai (uang kertas/tunai dan logam) di bendahara umum daerah.
2. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu. Kas tersebut berasal dari pungutan dan setoran yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu yang belum disetorkan ke kas daerah.
3. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bank Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu per tanggal neraca.
4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan kas yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah sebagai BLUD, yang bersumber dari pendapatan BLUD.
5. Kas Lainnya merupakan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bukan berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetor kepada pihak terkait per tanggal neraca.
6. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan dalam rangka untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

7. Investasi jangka pendek dapat berupa:
 - a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
 - b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN);
 - c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
 - d. Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
8. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
9. Penyisihan Piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
10. Beban Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Klasifikasi Beban dibayar di muka antara lain pembayaran premi asuransi dan sewa guna (*leasing*).
11. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, termasuk barang-barang yang akan dihibahkan.
12. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
13. Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen terdiri dari penyertaan modal di perusahaan daerah dan di perusahaan negara.
14. Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
15. Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
16. Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
17. Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
18. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap Lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
19. Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

20. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
21. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan maupun peruntukan Dana Cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan Dana Cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
22. Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah, sedangkan ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang diakui ketika putusan tentang kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terbit.
23. Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimiliki dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa: kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), dan Bangun Serah Guna (BSG).
24. Aset Tidak Berwujud adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.
25. Aset tak Berwujud terdiri atas: *goodwill*, hak paten atau hak cipta, royalti, *software*, lisensi, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, aset tak berwujud lainnya, aset tak berwujud dalam pengerjaan.
26. Aset Lain-lain merupakan aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah/direklasifikasi. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban yang penyelesaiannya setelah dua belas bulan dari tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Pemerintah Kota Bandung selama periode Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 131,66%, dengan rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis kewajiban antara lain kewajiban jangka pendek tumbuh positif rata-rata sebesar 131,66%, sedangkan untuk kewajiban jangka panjang tidak dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung.

Adapun sub-sub rekening dari aset, dijelaskan sebagai berikut:

1. Utang perhitungan pihak ketiga adalah hutang kepada pihak ketiga yang timbul dari pemotongan yang dilakukan oleh entitas dari kegiatan/transaksi yang dilakukan oleh entitas yang bersangkutan. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK), terdiri atas: utang taspen, utang askes, utang PPh pusat, utang PPN pusat, utang perhitungan pihak ketiga lainnya.
2. Utang Bunga Pinjaman, terdiri atas: a) Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat ; b) Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya; c) Utang Bunga kepada BUMN/BUMD; d) Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan; e) Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya; dan f) Utang Bunga Luar Negeri.
3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, terdiri dari: a) Utang Bank; b) Utang Obligasi (SUN); c) Utang Pemerintah Pusat; d) Utang Pemerintah Provinsi ; e) Utang Pemerintah Kabupaten/ Kota Lain.
4. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
5. Utang Beban adalah sejumlah kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga sebagai akibat belanja modal dan barang jasa yang sudah menjadi kewajiban sampai dengan tanggal pelaporan namun oleh pemerintah daerah belum dibayarkan, misalnya belum jatuh tempo atau baru akan dibayar.
6. Utang Jangka Pendek lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam Utang Jangka Pendek lainnya antara lain adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun, seperti biaya sewa atau bunga yang sudah menjadi kewajiban namun belum jatuh tempo.
7. Utang Dalam Negeri, terdiri dari : 1) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan; 2) Utang Dalam Negeri – Obligasi; 3) Utang kepada Pemerintah Pusat; 4) Utang kepada Pemerintah Provinsi; 5) Utang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
8. Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.

3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Perkembangan ekuitas Pemerintah Kota Bandung selama periode 2016-2020 tumbuh rata-rata sebesar 0,20%. Rasio keuangan yang dapat dianalisis berdasarkan data neraca tahun 2016 sampai dengan 2020, tersaji dalam Tabel 3.18.

Tabel 3.18

Analisis Rasio Keuangan Kota Bandung Tahun 2016 s.d. 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Lancar (%)	706,93	299,93	289,38	312,10	627,11
2	Rasio Quick (%)	665,79	280,36	261,10	276,44	589,58
3	Rasio Total Hutang Terhadap Aset (%)	0,66	1,68	0,70	0,48	0,45
4	Rasio Hutang Terhadap Modal (%)	0,66	1,71	0,71	0,48	0,46
5	Rata-rata Umur Piutang (Hari)	71	77			

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2019 (audited) dan 2020 (anudited).

Rasio likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas yang diperoleh dari neraca daerah Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.18, dapat dijelaskan:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*), yang menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Semakin besar nilai *current ratio* artinya semakin likuid, dengan nilai proporsional berada pada batas 200%. Dari Tabel 3.18 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016, setiap Rp100 hutang lancar dijamin oleh aktiva lancar tahun 2016 sebesar Rp709,93, tahun 2017 sebesar Rp299,93, tahun 2018 sebesar Rp289,38, tahun 2019 sebesar Rp312,10, serta tahun 2020 sebesar Rp627,11.
2. Rasio *Quick (Quick Ratio)*, yaitu ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, dimana nilai yang baik berada pada batas 100%. Dengan melihat pada Tabel 3.18 di atas, *quick ratio* tahun 2016 sebesar 665,79, artinya bahwa hutang lancar sebesar Rp100 dijamin dengan aktiva sebesar Rp665,79, tahun 2017 sebesar Rp280,36, tahun 2018 sebesar Rp261,10, tahun 2019 sebesar Rp276,44, dan tahun 2020 sebesar Rp589,58, hal tersebut menunjukkan kelebihan kas dan piutang untuk membayar kewajiban jangka pendek.
3. Rasio Total Hutang terhadap Total Aset (*Debt to Asset Ratio*), yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditur. Pengaruh hutang terhadap aktiva tahun 2016 sebesar 0,66%, tahun 2017 sebesar 1,68%, tahun 2018 sebesar 0,70%, tahun 2019 sebesar 0,48%, dan tahun 2020 sebesar 0,45%.
4. Rasio Hutang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*) digunakan untuk mengukur seberapa perlunya hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari kreditur. Tahun 2016 sebesar 0,66%, tahun 2017 sebesar 1,71%, tahun 2018 sebesar 0,71%, tahun 2019 sebesar 0,48%, serta tahun 2020 sebesar 0,46%.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus APBD yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2016 – 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

Dalam kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2020, arah kebijakan pendapatan daerah Kota Bandung diarahkan pada:

1. Arah Kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
 - a. Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan menerapkan sistem daring penerimaan Pajak Daerah dan membenahi manajemen data penerimaan PAD;
 - b. Memantapkan regulasi pajak yang telah diserahkan ke daerah termasuk prosedur dan mekanismenya;
 - c. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
 - d. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
 - e. Penguatan data basis pajak daerah Kota Bandung.
 - f. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
 - g. Meningkatkan dan pengembangan asset pemerintah daerah secara profesional.
2. Arah kebijakan untuk meningkatkan Dana Perimbangan
 - a. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh pasal 21;
 - b. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
 - c. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan Instansi/ lembaga terkait di tingkat kota dan provinsi;
3. Arah kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional,
 - a. Meningkatkan peluang pendanaan pihak ketiga melalui pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
 - b. Penguatan Kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
 - c. Memantapkan kelembagaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pendanaan Infrastruktur;
 - d. Mengembangkan jejaring dengan dunia usaha maupun pihak donor untuk mendapatkan bantuan pembiayaan non APBN/APBD.

Kebijakan belanja daerah Kota Bandung merupakan kebijakan yang diarahkan untuk mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang lebih efisien, efektif dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kota Bandung. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2016 sampai 2020 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas penggunaan anggaran kedalam program/kegiatan.

Kebijakan untuk belanja langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja langsung diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat meliputi urusan pendidikan dan urusan kesehatan serta peningkatan infrastruktur kota bagi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat;
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
3. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing perangkat daerah, sesuai dengan kompleksitas, besaran pagu anggaran dan jumlah personilnya.

Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai
 - a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;
 - b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD;
 - d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD;
 - e. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
2. Belanja Bunga
Bagi daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD.
3. Belanja Subsidi
Belanja Subsidi diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas.

4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.

5. Belanja Bagi Hasil Pajak

a. Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada tahun anggaran rencana.

b. Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

6. Belanja Bantuan Keuangan

a. Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD. Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah.

b. Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan.

7. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.

Kemudian, terkait pembiayaan Pemerintah Kota Bandung selama tahun 2016-2020 memiliki kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan penerimaan pembiayaan meliputi: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

a. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan

dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada PD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

- b. Penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya;
- c. Apabila akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, terlebih dahulu dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

3.2.1. PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Untuk melihat upaya pemenuhan kebutuhan aparatur selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat rincian proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, yaitu sebagaimana disajikan pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19

Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bandung
Tahun 2016 s.d. 2020 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
A	Belanja Tidak Langsung	2,275.38	2,337.70	2,537.00	2,497.30	2,405.31	0.02
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1846.17	1406.97	1,402.22	1,394.26	1,558.32	-0.03
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	346.68	849.91	1,121.77	1,089.67	834.08	0.38
3.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	7.28	9.42	12.08	12.48	11.96	0.14
4.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	71.34	69.94	0.93	0.89	0.95	-0.24
5.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	3.91	1.46	0	0	0	0.00
B	Belanja Langsung	666.41	324.58	247.28	465.89	156.04	-0.13
1.	Belanja Honorarium PNS	112.42	2.83	2.55	3.06	2.05	-0.30
2.	Belanja Uang Lembur	13.36	0.34	0.51	0.19	0.25	-0.20
3.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0.14	0.25	0.40	0.55	0.73	0.52
4.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	59.15	27.57	31.11	31.65	17.98	-0.20
5.	Belanja Premi Asuransi	76.31	0.27	0.24	0.52	0.19	-0.14

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
6.	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	4.8	2.28	2.78	1.94	3.73	0.08
7.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	10.01	6.61	6.62	5.24	2.48	-0.27
8.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	16.51	12.82	12.30	4.85	1.92	-0.37
9.	Belanja Perjalanan Dinas	98.39	78.45	70.30	81.84	43.75	-0.15
10.	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	0	0	0	0	0	0.00
11.	Belanja Pemulangan Pegawai	0	0	0	0	0	0.00
12.	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan, dll)	275.32	193.16	120.47	336.05	82.97	0.09
	TOTAL	2,941.79	2,662.28	2,784.28	2,963.19	2,561.35	-0.03

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2019 (Audited) dan 2020 (Unaudited)

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Peningkatan tersebut lebih disebabkan karena jumlah aparatur yang jumlahnya terus bertambah, juga berkenaan dengan peningkatan keahlian aparatur yang mengakibatkan lebih besar anggaran yang harus disediakan. Selanjutnya dijelaskan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 5 (lima) tahun terakhir dengan Tabel 3.20.

Tabel 3.20

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Bandung (Dalam Miliar Rupiah)

No.	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
	2016	2,941.79	6,147.22	47.86%
	2017	2,662.28	5,665.34	46.99%
	2018	2,784.28	6,308	44.14%
	2019	2,963.19	6,384.92	46.41%
	2020	2,561.35	5,149.77	49.74%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2019 (Audited) dan 2020 (Unaudited)

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari waktu ke waktu, tahun 2016 sebesar 47,86%; tahun 2017 sebesar 46,99%, tahun 2018 sebesar 44,14%, tahun 2019 sebesar 46,41%, dan tahun 2020 sebesar 49,74%.

Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan semakin besar proporsinya setiap tahun terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Selain itu, dari tahun ke tahun diupayakan efisiensi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur jika diproporsikan terhadap APBD, meskipun jumlah aparatur terus meningkat. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

3.2.2. ANALISIS PEMBIAYAAN

Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut.

A. ANALISIS SUMBER PENUTUP DEFISIT RIIL

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan, setelah dikurangi realisasi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan. Perkembangan defisit riil anggaran, dijelaskan pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21

Defisit Riil Anggaran Kota Bandung (Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	5,685.21	5,735.00	5,940.00	,381.82	5,321.06
	Dikurangi Realisasi:					
2	Belanja Daerah	5,830.41	5,541.72	6,114.45	6,312.15	5,149.77
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	316.81	123.62	193.55	72.77	0.00
	Defisit Riil	(462.01)	70.66	(368.01)	(3.10)	171.29

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2019 (Audited) dan 2020 (Unaudited)

Berdasarkan Tabel 3.21 ini selama kurun waktu 2016-2020, APBD Kota Bandung mengalami surplus artinya realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah pada tahun 2017 dan 2020. Namun demikian, tahun 2016, 2018, dan 2019 mengalami defisit, yang artinya realisasi pendapatan daerah kurang dari realisasi belanja daerah.

Selanjutnya untuk mendapatkan surplus atau defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan lanjutan tahun lalu, dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu. Sehingga diperoleh data bahwa pada tahun 2017 dan 2020 terjadi surplus riil masing-masing sebesar Rp70,66 miliar dan Rp171,29 miliar, sedangkan pada tahun 2016, 2018 dan 2019 terjadi defisit riil masing-masing sebesar Rp462,01 miliar; Rp368,01 miliar dan Rp3,01 miliar. Komposisi penutup defisit riil anggaran Kota Bandung (dalam miliar rupiah) disajikan pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Bandung

(Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	994.14	532.13	601.79	233.79	31.28
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	994.14	532.13	601.79	233.79	231.28

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2019 (Audited) dan 2020 (Unaudited)

Dengan memperhatikan data defisit riil anggaran dan komposisi penutup defisit riil anggaran selama tahun 2016 sampai dengan 2020, maka dapat diterjemahkan bahwa Pemerintah Kota Bandung mempunyai SiLPA tahun berkenaan yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus/ defisit riil anggaran ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar sebagai komposisi penutup defisit riil anggaran. Surplus riil Pemerintah Kota Bandung dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan
(Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	5,685.21	5,735.00	5,940.00	6,381.82	5,321.06
	Dikurangi Realisasi:					
2	Belanja Daerah	5,830.41	5,541.72	6,114.45	6,312.15	5,149.77
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	316.81	123.62	193.55	72.77	0.00
A	Defisit Riil	(462.01)	70.66	(368.01)	(3.10)	171.29
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan					
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	994.14	532.13	601.79	233.79	231.28
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	994.14	532.13	601.79	233.79	231.28
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	532.13	602.79	233.78	230.69	402.57

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2019 (Audited) dan 2020 (Unaudited)

Berdasarkan Tabel 3.23, didapat informasi SiLPA tahun berkenaan Pemerintah Kota Bandung selama tahun 2016-2020, berturut-turut sebesar Rp532.13 miliar tahun 2016; Rp602.79 miliar tahun 2017; Rp233.78 miliar tahun 2018; Rp230.69 miliar tahun 2019; serta Rp402.57 miliar tahun 2020. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Bandung cukup kuat untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung.

B. ANALISIS SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA)

Analisis SiLPA diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Perolehan SiLPA selama tahun 2016 hingga 2020 diperoleh dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Tabel 3.24 memberikan gambaran perolehan SiLPA selama tahun 2016 hingga 2020.

Tabel 3.24

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Bandung
(Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA								
	Jumlah SiLPA	532.13	100	602.79	100	233.78	100	230.69	100	402.57	100
	Pelampauan Penerimaan PAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA								
	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	532.13	100	602.79	100	233.78	100	230.69	100	402.57	100
	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kegiatan Lanjutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2019 (Audited) dan 2020 (Unaudited)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mendefinisikan SiLPA sebagai selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran, sehingga keberadaan SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran) tersebut dapat bermakna positif ataupun negatif. Bermakna positif jika SiLPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi overtarget dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan SiLPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada pemerintah daerah.

SiLPA yang terdapat pada APBD Kota Bandung sebagian besar berasal dari tertundanya belanja langsung program dan Kegiatan. Hasil evaluasi terhadap SiLPA tersebut diharapkan untuk rencana kedepan jumlah SiLPA Kota Bandung dapat diperkecil.

C. ANALISIS SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kota Bandung Tahun 2016-2020 (dalam miliar rupiah) disajikan pada Tabel 3.25.

Tabel 3.25

**Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Kota Bandung Tahun 2016-2020 (Dalam Miliar Rupiah)**

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Saldo Kas Neraca Daerah	532.13	602.79	233.78	230.69	402.57
	Dikurangi					
2	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kegiatan Lanjutan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	532.13	602.79	233.78	230.69	402.57

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2016-2019 (Audited) dan 2020 (Unaudited)

Analisis proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Pada akhir tahun 2019, beberapa peraturan baru yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diterbitkan pemerintah pusat, termasuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kesemuanya ini merupakan hal baru di dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus diterapkan dan diberlakukan mulai tahun anggaran 2021.

Pemerintah Kota Bandung dalam penyusunan APBD Tahun 2021 sudah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sehingga ada perbedaan dengan penyusunan APBD di Tahun Anggaran 2020. Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang salah satu butir SE tersebut berisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 terlihat pada Gambar 3.8.

Gambar 3.8

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019



Selain adanya peraturan baru yang terbit diakhir tahun 2019, pada tahun 2020 terjadi kejadian luar biasa (KLB) wabah pandemic Covid-19 yang berdampak pada aspek sosial, kesehatan dan ekonomi.

3.3.1. PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

A. PROYEKSI PENDAPATAN TAHUN 2019-2023

Proyeksi pendapatan merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Dalam melakukan proyeksi pendapatan daerah harus didapat nilai perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Dalam melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu dilakukan analisis mengenai Pendapatan Daerah yang dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan pada Gambar 3.9.



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Dengan melihat performa pendapatan daerah tahun 2018-2020, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan pada sektor pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah dan peningkatan dana perimbangan dengan kebijakan, sebagai berikut:

1. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pungutan pendapatan daerah;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;
3. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan Instansi/Lembaga terkait di tingkat Kota dan Provinsi;
5. Menyusun strategi optimalisasi pengelolaan piutang pajak daerah, melalui inventarisasi piutang pajak daerah. Piutang pajak yang terdapat unsur kesalahan administrasi dilakukan koreksi akuntansi, piutang pajak yang memenuhi syarat penghapusan piutang pajak dilakukan

- penghapusan piutang pajak, dan piutang pajak yang wajib pajaknya dapat ditelusuri dilakukan upaya penagihan;
6. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
 7. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/ lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
 8. Meningkatkan dan pengembangan aset pemerintah daerah secara profesional;
 9. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.

Proyeksi pendapatan dalam RPJMD ini berlaku untuk periode 2019 sampai dengan tahun 2023, sebagaimana tercantum pada Tabel 3.26, sedangkan proyeksi pendapatan daerah Kota Bandung Tahun 2021-2023 (struktur menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019) disajikan pada Tabel 3.27.

Tabel 3.26

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bandung
Tahun 2018-2020 (Struktur Menggunakan PP No. 58 Tahun 2005)

Uraian	Realisasi		
	2018	2019	2020
PENDAPATAN	5.939.997.423.418,00	6.332.159.385.135,00	5,643,655,477,087.00
Pendapatan Asli Daerah	2.571.591.786.199,00	2.548.258.990.275,00	2,063,476,962,364.00
Pendapatan Pajak Daerah	2.160.150.277.316,00	2.154.637.871.057,00	1,629,188,481,446.00
Retribusi Daerah	69.134.407.113,00	62.467.179.931,00	52,332,312,611.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.771.957.542,00	10.477.350.536,00	13,134,333,115.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	331.535.144.228,00	320.676.588.751,00	368,821,835,192.00
Dana Perimbangan	2.427.237.815.833,00	2.434.419.901.540,00	2,396,293,332,377.00
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	321.723.850.260,00	248.779.771.204,00	349,165,516,294.00
Dana Alokasi Umum	1.643.076.905.000,00	1.748.441.035.000,00	1,589,628,887,000.00
Dana Alokasi Khusus	462.437.060.573,00	437.199.095.336,00	457,498,929,083.00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	941.167.821.386,00	1.349.480.493.320,00	1,183,885,182,346.00
Pendapatan Hibah	43.554.000.000,00	207.419.500.499,00	227,914,134,070.00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	855.508.409.459,00	871.625.403.102,00	747,838,922,900.00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0.00	0.00	97,308,562,000.00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	42.105.411.927,00	270.435.589.719,00	110,823,563,376.00

Sumber: hasil analisis, 2021

Tabel 3.27

Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2021-2023
(Struktur Menggunakan PP No. 12 Tahun 2019)

Uraian	Target	Proyeksi	
	2021	2022	2023
PENDAPATAN	6,580,614,037,980.00	5,944,964,755,100.00	5,966,923,626,395.50
Pendapatan Asli Daerah	3,300,827,453,188.00	3,195,564,561,027.00	3,217,523,432,322.50
Pajak Daerah	2,700,000,000,000.00	2.386.800.000.000,00	2,404,223,640,000.00

Uraian	Target	Proyeksi	
	2021	2022	2023
Retribusi Daerah	69,286,809,600.00	253.400.930.000,00	66,382,006,789.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	18,885,582,468.00	18.885.582.468,00	19,023,447,220.02
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	512,655,061,120.00	536.478.048.559,00	727,894,338,313.48
Pendapatan Transfer	3,255,786,584,792.00	2.749.400.194.073,00	2,749,400,194,073.00
Transfer Pemerintah Pusat	2,418,235,485,000.00	1.924.409.282.252,67	1,924,409,282,252.67
Dana Bagi Hasil	277,924,111,000.00	306.556.379.252,67	306,556,379,252.67
Dana Transfer Umum	1,617,852,903,000.00	1.617.852.903.000,00	1,617,852,903,000.00
Dana Transfer Khusus	522,458,471,000.00	0.00	0.00
Dana Insentif Daerah	0.00	0.00	0.00
Transfer Antar Daerah	837,551,099,792.00	824,990,911,820.33	824,990,911,820.33
Pendapatan Bagi Hasil	837,551,099,792.00	824,990,911,820.33	306,556,379,252.67
Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	24,000,000,000.00	0.00	0.00
Hibah	24,000,000,000.00	0.00	0.00
Dana Darurat	0.00	0.00	0.00
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	0.00	0.00	0.00

Sumber: hasil analisis, 2021

B. PROYEKSI BELANJA TAHUN 2019-2023

Analisis mengenai belanja daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian yang digambarkan melalui serangkaian asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada kebijakan pemerintah, serta mempertimbangkan kebijakan pembiayaan daerah, yang kemudian diformulasikan sehingga diperoleh angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib, dan mengikat, serta prioritas utama. Dari rata-rata tersebut, akan diperoleh tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, yang digunakan sebagai gambaran dasar untuk mempehitungkan bagian dari belanja daerah yang harus dipenuhi di masa yang akan datang, sebagaimana Gambar 3.10.



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Proyeksi belanja daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan belanja langsung daerah. Dalam menentukan proyeksi belanja dilakukan berdasarkan metode yang berbeda untuk setiap jenis belanja, sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai berdasarkan pada akses 2,5% dengan menjadikan tahun awal pada APBD 2021, dengan memperhatikan kebijakan pusat pada tahun berjalan.
2. Belanja Hibah berdasarkan pada kebijakan tahun 2021.
3. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam bentuk bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
4. Belanja Tidak Terduga berdasarkan pada asumsi bahwa pandemic Covid-19 belum berakhir.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Wajib Mengikat, Belanja Prioritas dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Belanja Pendukung lainnya dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1. Mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang lebih efisien, efektif dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kota Bandung;
2. Penganggaran belanja langsung diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat;
3. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah;
4. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing perangkat daerah;
5. Melakukan analisis mengenai kesesuaian Program dan Kegiatan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan pertimbangan manfaat yang akan didapatkan bagi masyarakat.

Realisasi Belanja Kota Bandung Tahun 2018-2020 (Struktur Menggunakan PP No.58 Tahun 2005) disajikan pada Tabel 3.28. Untuk Proyeksi Belanja Kota Bandung Tahun 2021-2023 (Struktur Menggunakan PP No.12 Tahun 2019) disajikan pada Tabel 3.29.

Tabel 3.28

Realisasi Belanja Kota Bandung Tahun 2018-2020
(Struktur Menggunakan PP No. 58 Tahun 2005)

Uraian	Realisasi		
	2018	2019	2020 (*
BELANJA	6,114,449,093,123.40	6,312,147,268,359.67	5,407,304,136,599.00
Belanja Tidak Langsung	3,051,422,896,853.00	2,838,199,006,818.00	2,764,057,105,468.00
Belanja Pegawai	2,536,996,464,878.00	2,535,147,027,039.00	2,169,071,949,452.00
Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00
Belanja Subsidi	108,825,685,200.00	108,825,685,200.00	139,153,204,134.00
Belanja Hibah	402,404,804,575.00	190,285,964,705.00	177,728,392,762.00
Belanja Bantuan Sosial		2,242,800,000.00	79,614,039,800.00
Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	1,520,608,500.00	1,499,999,999.00	33,106,000,000.00

Uraian	Realisasi		
	2018	2019	2020 (*
Belanja Tidak Terduga	1,675,333,700.00	197,529,875.00	165,383,519,320.00
Belanja Langsung	3,063,026,196,270.40	3,473,948,261,541.67	2,643,247,031,131.00
Belanja Pegawai	279,922,868,974.00	232,477,079,763.00	130,748,420,209.00
Belanja Barang dan Jasa	1,733,407,103,673.40	2,016,091,412,063.84	1,954,018,223,304.00
Belanja Modal	1,049,696,223,623.00	1,179,438,731,295.00	558,480,387,618.00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2018-2019 (Audited) dan 2020 (Unaudited)

Tabel 3.29

Proyeksi Belanja Kota Bandung Tahun 2021-2023

(Struktur Menggunakan PP No. 12 Tahun 2019)

Uraian	Target	Proyeksi	
	2021	2022	2023
BELANJA	6,555,755,475,956.00	5.934.058.938.784,00	5,966,923,626,395.50
Belanja Operasi	5,677,081,544,918.00	5.171.263.273.376,00	5,913,173,626,395.50
Belanja Pegawai	2,724,824,499,901.00	2.616.263.666.320,00	2,681,670,257,978.00
Belanja Barang dan Jasa	2,552,332,072,172.00	2.414.197.563.121,00	2,957,339,189,482.50
Belanja Subsidi	79,943,159,300.00	0.00	5,000,000,000.00
Belanja Hibah	186,619,678,545.00	0.00	140,802,043,935.00
Belanja Bantuan Sosial	133,362,135,000.00	140.802.043.935,00	133,362,135,000.00
Belanja Modal	823,450,911,365.00	540.823.243.404,00	0.00
Belanja Modal	823,450,911,365.00	540.823.243.404,00	0.00
Belanja Tidak Terduga	21,473,019,673.00	188.222.422.004,00	15,000,000,000.00
Belanja Tidak Terduga	21,473,019,673.00	188.222.422.004,00	15,000,000,000.00
Belanja Transfer	33.750.000.000,00	33.750.000.000,00	33,750,000,000.00
Belanja Bantuan Keuangan	33.750.000.000,00	33.750.000.000,00	33,750,000,000.00

Sumber: hasil analisis, 2021

Keterangan (* Untuk proyeksi belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 termasuk dengan Belanja Modal, sehingga pada kolom Belanja Modal tidak terdapat nilai proyeksi)

C. PROYEKSI PEMBIAYAAN TAHUN 2019-2023

Dalam menganalisis pembiayaan daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian di lapangan yang ditunjukkan melalui asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada kebijakan penyelesaian kewajiban daerah. Selain itu, juga perlu memperhatikan kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan daerah, sebagai komponen pembentuk SILPA. Dari rumusan tersebut, akan diperoleh angka rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan, serta kegiatan lanjutan yang harus diselesaikan, juga dapat dilihat angka pertumbuhannya sebagai gambaran besaran kewajiban yang harus diselesaikan di masa yang akan datang.

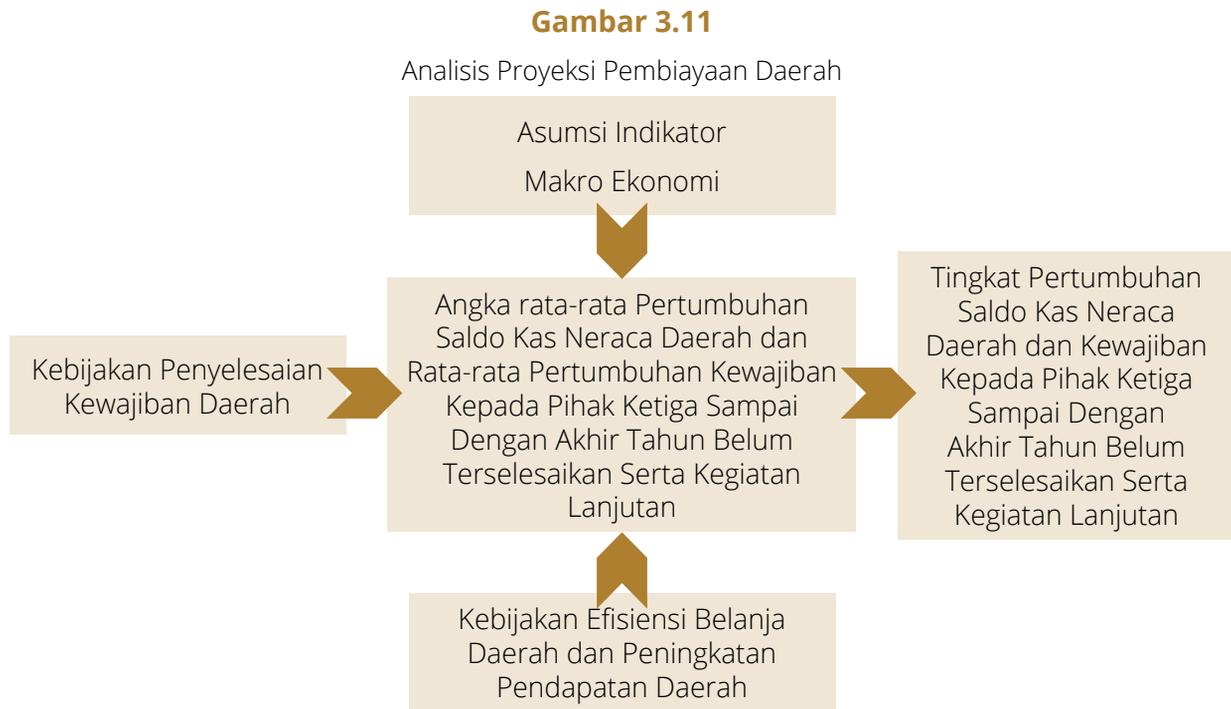
Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat.

3.3.2. PERHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

A. PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH

Proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis kemudian dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan. Sebagaimana yang tergambar dalam Gambar 3.11.



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berikut tersaji proyeksi pembiayaan daerah, sebagaimana Tabel 3.30 serta Tabel Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2023 tersaji pada Tabel 3.31.

Tabel 3.30

Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Bandung

Uraian	Realisasi		
	2018	2019	2020
Penerimaan Pembiayaan	601,794,534,714.25	234,380,008,666.70	241,601,684,943.03
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	601,794,534,714.25	234,380,008,666.70	231,278,924,143.03
Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Dana Bergulir	0.00	0.00	10,322,760,800.00
Pengeluaran Pembiayaan	193,554,000,000.00	72,772,760,800.00	0.00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	193,554,000,000.00	72,772,760,800.00	0.00
Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening (PDAM)	193,554,000,000.00	62,450,000,000.00	0.00
PT. Bank BJB	0.00	10,322,760,800.00	0.00

Sumber: hasil analisis, 2021

Tabel 3.31

Tabel Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2023

Uraian	Proyeksi		
	2021	2022	2023
PEMBIAYAAN	296,745,356,206.64	(10.905.816.316,00)	0.00
Penerimaan Pembiayaan	296,745,356,206.64	0.00	0.00
SILPA	26,849,185,812.00	0.00	0.00
Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00

Uraian	Proyeksi		
	2021	2022	2023
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00
Pengeluaran pembiayaan	51,707,747,836.00	10.905.816.316,00	0.00
Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	27,707,747,836.00	0.00	0.00
Penyertaan modal daerah	24,000,000,000.00	10.905.816.316,00	0.00
Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00
Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00
Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0.00	0.00	0.00

Sumber: hasil analisis, 2021

B. REALISASI DAN PROYEKSI KEBUTUHAN PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT

Realisasi Belanja pengeluaran wajib dan mengikat sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel 3.32 dan Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat disajikan pada Tabel 3.33.

Tabel 3.32

Realisasi Belanja Wajib dan Mengikat Kota Bandung

No	Uraian	Realisasi		
		2018	2019	2020
A	Belanja Tidak Langsung	2,538,517,073,378.00	2,536,647,027,038.00	2,171,166,804,971.00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1,402,215,600,596.00	1,431,752,628,614.00	1,322,146,720,041.00
2	Tambahan Penghasilan PNS	1,121,774,521,164.00	1,089,668,989,479.00	834,076,099,641.00
3	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	927,737,118.00	885,744,046.00	950,843,412.00
4	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00
6	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	12,078,606,000.00	12,839,664,900.00	11,958,177,250.00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1,520,608,500.00	1,499,999,999.00	2,034,964,627.00
B	Pengeluaran Pembiayaan	193,554,000,000.00	72,772,760,800.00	0.00
1	Penyertaan Modal	193,554,000,000.00	72,772,760,800.00	0.00
	Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat (a+b)	2,732,071,073,378.00	2,609,419,787,838.00	2,171,166,804,971.00

Tabel 3.33

Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat

No	Uraian	Proyeksi		
		2021	2022	2023
A	Belanja Mengikat	2,591,541,815,040.64	2,616,263,666,320.00	2,681,670,257,978.00
1	Belanja Pegawai	2,724,824,499,901.00	2,616,263,666,320.00	2,681,670,257,978.00
2	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00
B	Belanja Wajib	3,440,262,484,390.00	2,583,790,443,709.51	2,591,541,815,040.64
1	Pendidikan	1,658,743,220,329.00	1,169,719,473,658.48	1,173,228,632,079.46
2	Kesehatan	1,291,776,325,393.00	987,620,267,161.72	990,583,127,963.21
3	Peningkatan kapasitas SDM	11,562,541,886.00	9,000,000,000.00	9,027,000,000.00
4	Penguatan APIP	44,449,161,135.00	47,240,339,597.82	47,382,060,616.61
5	Kewilayahan	433,731,235,647.00	370,210,363,291.49	371,320,994,381.36

No	Uraian	Proyeksi		
		2021	2022	2023
C	Pengeluaran Pembiayaan	51,707,747,836.00	0.00	0.00
1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	27,707,747,836.00	0.00	0.00
2	Penyertaan modal daerah	24,000,000,000.00	0.00	0.00
3	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00
4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00
5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0.00	0.00	0.00
	Total Belanja Wajib Mengikat	5,964,892,225,202.00	5,244,995,324,000.61	5.273.212.073.018,64

Sumber: Hasil Analisis, 2021

C. PROYEKSI KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Kemampuan Keuangan Daerah bagi kabupaten/kota dikelompokkan sebagai berikut:

- Diatas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi;
- Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Sedang;
- Dibawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.

Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan Besaran Pendapatan Umum Daerah (Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum) dikurangi Besaran Belanja Pegawai (Belanja Gaji dan Tunjangan, dan Tambahan Penghasilan PNS), sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.34.

Tabel 3.34

Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bandung

No	Uraian	Jumlah		
		Realisasi Tahun 2019*	Realisasi Tahun 2020**	Tahun Berjalan 2021***
I	PENDAPATAN UMUM DAERAH	5.416.998.514.581,00	4.750.110.288.558,00	6.034.155.566.980,00
	Pendapatan Asli Daerah	2.548.152.305.275,00	2.063.476.962.364,00	3.300.827.453.188,00
	Dana Bagi Hasil	1.120.405.174.306,00	1.097.004.439.194,00	1.115.475.210.792,00
	Dana Alokasi Umum	1.748.441.035.000,00	1.589.628.887.000,00	1.617.852.903.000,00
II	BELANJA PEGAWAI	2.535.338.719.039,00	2.299.880.260.553,00	2.724.824.499.901,00
	Perhitungan: (I) - (II)	2.881.659.795.542,00	2.450.230.028.005,00	3.309.331.067.079,00

Sumber: * Data Realisasi APBD Tahun 2019 (Audited)

** Data Realisasi APBD Tahun 2020 (Unaudit)

*** Data Penetapan APBD 2021 (Tahun Berjalan)

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, Kemampuan Keuangan Daerah bagi Kota Bandung masuk ke dalam Kategori Tinggi (di atas Rp550.000.000.000), tetapi nilai Kemampuan Keuangan Daerah dari tahun 2019 sebesar Rp2,8 triliun, mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi Rp2,4 triliun. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19, yang mengakibatkan pendapatan daerah Kota Bandung terkontraksi dan berdampak terhadap anggaran tahun 2020, sehingga dilakukan upaya refocusing dan realokasi anggaran di tahun 2020.

Sedangkan perhitungan proyeksi pendapatan, perhitungan proyeksi SiLPA, perhitungan proyeksi belanja tidak langsung dan perhitungan proyeksi pengeluaran pembiayaan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diproyeksikan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah pada Tahun 2021-2023 untuk mendanai pembangunan Kota Bandung. Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Bandung tahun 2021-2023, sebagaimana tersajikan pada Tabel 3.35.

Tabel 3.35

Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah

Uraian	Proyeksi		
	2021	2022	2023
Pendapatan Daerah	6,580,614,037,980.00	5,944,964,755,100.00	5,966,923,626,395.50
Penerimaan Pembiayaan Daerah	26,849,185,812.00	0.00	0.00
Kapasitas Kemampuan Keuangan daerah	6,607,463,223,792.00	5,944,964,755,100.00	5,966,923,626,395.50

Sumber: Hasil Analisis, 2021

D. KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektivitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan. Prioritas belanja merupakan prioritas penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yang terdiri dari:

a) Prioritas I

Prioritas I merupakan prioritas pembangunan daerah tahun rencana dengan tema atau program unggulan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD (program pembangunan daerah) dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas pendidikan 20% (dua puluh persen) yang terangkum dalam prioritas dan sasaran pembangunan tahunan. Prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Prioritas II

Prioritas II merupakan prioritas program ditingkat perangkat daerah yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya telah mengandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan dan dengan memperhatikan prioritas I yang berhubungan dengan perangkat daerah terkait. Suatu prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan perangkat daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani.

c) Prioritas III

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung, seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga.

Proyeksi penggunaan kapasitas kemampuan keuangan daerah disajikan pada Tabel 3.36.

Tabel 3.36

Proyeksi Penggunaan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah

NO	Uraian Akun	Proyeksi		
		2021	2022	2023
5	BELANJA	6.555.755.475.956,00	5.934.058.938.784,00	5.966.923.626.395,50
5.1	Belanja Operasi	5.677.081.544.918,00	5.712.086.516.780,00	5.913.173.626.395,50
5.1.1	Belanja Pegawai	2,724,824,499,901.00	2.616.263.666.320,00	2,681,670,257,978.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2,552,332,072,172.00	2.955.020.806.525,00	2,957,339,189,482.50
5.1.3	Belanja Bunga	0.00	0,00	0.00
5.1.4	Belanja Subsidi	79,943,159,300.00	0,00	5,000,000,000.00
5.1.5	Belanja Hibah	186,619,678,545.00	140.802.043.935,00	140,802,043,935.00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	133,362,135,000.00	0,00	133,362,135,000.00
5.2	Belanja Modal	823,450,911,365,00	0,00	0,00
5.2.1	Belanja Modal	823,450,911,365.00	0.00	0.00
5.3	Belanja Tidak Terduga	21,473,019,673,00	188.222.422.004,00	15,000,000,000,00
	Belanja Tidak Terduga	21,473,019,673.00	188.222.422.004,00	15,000,000,000.00
5.4	Belanja Transfer	33,750,000,000,00	33,750,000,000,00	33,750,000,000,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	0.00	0.00	0.00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	33,750,000,000.00	33,750,000,000.00	33,750,000,000.00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	51,707,747,836,00	(10.905.816.316,00)	0,00
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	27,707,747,836.00	0.00	0.00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	24,000,000,000.00	10.905.816.316,00	0.00
6.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	0.00	0.00

Sumber: Hasil Analisis, 2021



PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

BAB

IV





4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dan masukan dari perangkat daerah.

Berdasarkan gambaran umum pembangunan Kota Bandung selama beberapa tahun terakhir, maka permasalahan pokok pembangunan adalah; (1) masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial; (2) masih belum optimalnya kualitas sumber daya manusia; (3) masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur; (4) pertumbuhan ekonomi daerah mengalami perlambatan; (5) rendahnya kualitas lingkungan; dan (6) masih belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan pokok pembangunan tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bandung memprioritaskan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Penanganan kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial
 1. Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pangan dan rutilahu bagi warga miskin.
 2. Peningkatan dan fasilitasi penyaluran bantuan sosial bagi warga miskin, disabilitas dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
 3. Peningkatan kompetensi ketenagakerjaan dan kewirausahaan masyarakat.
 4. Peningkatan kesempatan kerja.
 5. Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
 6. Peningkatan kemampuan pelaku dan kemitraan usaha mikro.
 7. Peningkatan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat pangan.
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
 1. Peningkatan infrastruktur pendidikan.
 2. Optimalisasi implementasi kurikulum pendidikan.
 3. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
 4. Peningkatan akses dan kualitas perpustakaan.
 5. Optimalisasi sumber daya kesehatan.
 6. Peningkatan kualitas sarana kesehatan lingkungan.
 7. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
 8. Peningkatan kualitas pangan dan *hygiene* sanitasi tempat pengelolaan pangan.
 9. Optimalisasi partisipasi masyarakat hidup sehat.
 10. Optimalisasi kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.
 11. Optimalisasi kebugaran fisik masyarakat.
 12. Optimalisasi kerukunan.
 13. Optimalisasi ketenteraman dan ketertiban.

14. Optimalisasi gotong royong.
 15. Optimalisasi peran pemuda dalam pembangunan.
 16. Peningkatan pelestarian cagar budaya.
 17. Optimalisasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.
 18. Optimalisasi kualitas kelembagaan seni tradisi.
 19. Optimalisasi perlindungan dan pemenuhan hak anak.
 20. Optimalisasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
 21. Optimalisasi ketahanan keluarga.
 22. Peningkatan fungsi sosial masyarakat dan perlindungan disabilitas.
- c. Peningkatan pelayanan infrastruktur.
1. Penurunan aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan dan urusan non perhubungan.
 2. Optimalisasi kemantapan jalan.
 3. Optimalisasi kualitas hunian permukiman.
 4. Peningkatan akses pelayanan limbah domestik.
 5. Optimalisasi akses air minum.
 6. Peningkatan fungsi sarana prasarana penurunan genangan.
 7. Peningkatan fungsi saluran drainase jalan.
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah mengalami perlambatan;
1. Optimalisasi kualitas objek daya tarik wisata.
 2. Optimalisasi pemasaran pariwisata.
 3. Peningkatan ekosistem ekonomi kreatif.
 4. Peningkatan investasi.
 5. Optimalisasi daya saing produk unggulan serta iklim perdagangan dan industri yang kondusif.
 6. Optimalisasi stabilitas harga barang kebutuhan pokok.
 7. Peningkatan pelaku usaha kecil dan menengah berdaya saing.
 8. Optimalisasi daya saing produk unggulan serta iklim perdagangan dan industri yang kondusif.
 9. Peningkatan kualitas pengelolaan koperasi.
- e. Meningkatkan kualitas lingkungan
1. Penurunan sumber pencemaran air dan udara.
 2. Peningkatan kuantitas RTH publik dan privat.
 3. Penurunan timbulan sampah yang ditangani.
 4. Peningkatan capaian pengurangan sampah.
- f. Optimalisasi kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat
1. Peningkatan kapasitas manajemen pengawasan dan keuangan.
 2. Peningkatan kinerja instansi pemerintah serta kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan perangkat daerah dan peraturan perundang-undangan.

3. Peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan.
4. Peningkatan kualitas manajemen ASN.
5. Peningkatan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien (PD berbasis elektronik).
6. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.
7. Mewujudkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Masalah pokok tersebut dipicu oleh berbagai permasalahan yang dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing dan aspek pelayanan umum, sebagai berikut:

4.1.1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Melambat dan Berkontraksi Akibat Pandemi Covid-19 dan Menurunnya Kontribusi Sektor Utama PDRB

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2016 cenderung melambat. Pada tahun 2016, LPE Kota Bandung sebesar 7,79 persen dan menurun drastis pada tahun 2020 menjadi -2,28 persen. Meskipun mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat drastis pada tahun 2020, tapi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung masih relatif lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang berkontraksi sebesar -2,44 persen pada tahun 2020. Terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung yang sangat drastis disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19. Adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berakibat pada terpuruknya sektor jasa pariwisata, perdagangan, dan hiburan yang menjadi penggerak utama roda pertumbuhan ekonomi Kota Bandung.

Dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, sebelum terjadi pandemi Covid-19, LPE Kota Bandung pada tahun 2018 menempati urutan ke-1 dari 9 Kota di Jawa Barat sesuai urutan peringkat terdiri atas Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, dan Kota Banjar. Namun pada tahun 2019, peringkat LPE Kota Bandung bergeser menjadi peringkat kedua, LPE peringkat pertama ditempati oleh Kota Cimahi. Sementara setelah terjadi pandemi Covid-19 dari 9 kota di Jawa Barat tersebut, LPE Kota Bandung berada pada peringkat ke-8. Urutan peringkat kota dan besaran laju pertumbuhan ekonomi masing-masing kota adalah sebagai berikut: Kota Banjar sebesar 1,53%, Kota Bogor sebesar -0,53%, Kota Cirebon sebesar -0,99%, Kota Sukabumi sebesar -1,48%, Kota Depok sebesar -1,92%, Kota Tasikmalaya sebesar -2,01%, Kota Cimahi sebesar -2,26%, Kota Bandung sebesar -2,28% dan Kota Bekasi sebesar -2,55%. Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung diperlukan adanya kebijakan dan strategi baru pembangunan ekonomi yang terintegrasi berbasis potensi lokal untuk memberdayakan ekonomi rakyat.

Ekonomi Kota Bandung tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,2%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi Covid-19. PDRB Kota Bandung atas dasar harga berlaku tahun 2020 adalah sebesar 283.616.640,2 juta rupiah berkurang sebesar 4.844.235,8 juta rupiah dibanding PDRB Kota Bandung tahun 2019 yang sebesar 288.460.876 juta rupiah. Sedangkan bila berdasarkan harga konstan, PDRB Kota Bandung tahun 2020 adalah sebesar 193.144.954 juta rupiah, berkurang 4.497.933,9 juta rupiah dibanding nilai PDRB atas harga konstan tahun 2019 yang sebesar 197.642.887,9 juta rupiah. Dengan demikian ekonomi Kota Bandung tahun 2020 menurun 2,28% dibandingkan tahun 2019.

Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor merupakan kategori dengan kontribusi terbesar pada pembentukan PDRB Kota Bandung tahun 2020 yaitu

sebesar 25,33%. Diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 19,43%. Lapangan usaha informasi dan komunikasi dan lapangan usaha konstruksi merupakan lapangan usaha ketiga dalam struktur perekonomian Kota Bandung tahun 2020 dengan kontribusi sebesar 14,22%. Secara bersamaan ketiga kategori tersebut memberikan kontribusi sebesar 58,98% pada perekonomian Kota Bandung tahun 2020.

Struktur ekonomi Kota Bandung mengalami pergeseran dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 dimana lapangan usaha transportasi dan pergudangan dan lapangan usaha jasa informasi dan komunikasi merupakan lapangan usaha dengan terbesar ketiga dan keempat pada pembentukan PDRB tahun 2019.

Pada tahun 2020, 10 (sepuluh) lapangan usaha di Kota Bandung mengalami kontraksi, 6 (enam) lapangan usaha mengalami pertumbuhan. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami penurunan kinerja ekonomi terbesar. Pada tahun 2020 lapangan usaha ini menurun 23,61% dibandingkan tahun 2019. Tiga lapangan usaha lainnya juga mengalami penurunan lebih dari 10,00% adalah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 18,25%, jasa lainnya sebesar 14,18%, dan jasa perusahaan 10,72%. Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang merupakan lapangan usaha terbesar dalam PDRB Kota Bandung menurun sebesar 9,93%. Sedangkan lapangan usaha industri yang merupakan lapangan usaha terbesar kedua di Kota Bandung tumbuh melambat sebesar 0,21%.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terbesar pada tahun 2020 adalah lapangan usaha informasi dan komunikasi. Lapangan usaha ini tumbuh 32,26% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kegiatan masyarakat dilakukan secara *daring* untuk mencegah penyebaran Covid-19. lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang meningkat 7,71%. Lapangan usaha lain yang mengalami pertumbuhan meski melambat pada tahun 2020 adalah lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 4,46%, jasa keuangan sebesar 2,27%, dan *real estate* sebesar 1,22%.

2. Distribusi Pendapatan Penduduk Belum Merata

Tingkat pemerataan dapat diukur menggunakan indeks Gini Ratio. Nilai Gini Ratio yang meningkat, mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan yang semakin besar. Suatu wilayah yang memiliki nilai Gini Ratio di atas 0,5 maka menunjukkan tingkat ketimpangan yang besar dan bila nilainya kurang dari 0,3 menunjukkan ketimpangan rendah. Nilai diantara keduanya menunjukkan ketimpangan sedang. Umumnya kawasan metropolitan yang menjadi pusat ekonomi cenderung memiliki nilai Gini Ratio yang tinggi, berbanding terbalik dengan kawasan non urban yang lebih merata.

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 berdampak pada banyaknya kerugian pada dunia usaha di Kota Bandung. Khususnya perusahaan yang bergerak di bidang jasa usaha pariwisata, perdagangan dan hiburan banyak yang menutup usahanya, akibatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) meningkat. Namun secara umum kondisi sulit berupa berkurangnya pendapatan dan kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19 dialami oleh seluruh strata masyarakat dan level kelas pekerja atas, menengah dan bawah secara merata. Sehingga berdasarkan data Gini Ratio BPS Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020, Kota Bandung mengalami sedikit penurunan kesenjangan pendapatan dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2019 walaupun relatif kecil.

Gini Ratio Kota Bandung pada tahun 2019 sebesar 0,430 sementara Gini Ratio tahun 2020 sebesar 0,402 atau turun 0,028 poin. Penurunan pertumbuhan ekonomi secara drastis pada

tahun 2020, berakibat terjadinya *multiplier effect* secara estafet dan masif. Banyak terjadi PHK mengakibatkan orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan, sehingga angka pengangguran dan angka kemiskinan bertambah. Dampak pandemi Covid-19 yang masif tersebut diprediksi akan mengurangi kesenjangan pemerataan pendapatan masyarakat Kota Bandung walaupun kecil. Pada tahun 2021, nilai Gini Ratio Kota Bandung diprediksikan tetap atau sedikit menurun, mengingat pandemi Covid-19 sampai dengan saat ini belum bisa dikendalikan sepenuhnya karena tingkat penularan Covid-19 masih fluktuatif, dan tingkat kematian masih relatif tinggi.

3. Menurunnya Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita merupakan salah satu komponen untuk menghitung IPM. Pengeluaran per kapita menjadi alat ukur dimensi standar hidup layak pada suatu daerah. Pada tahun 2020 pengeluaran per kapita Kota Bandung mengalami penurunan. Pengeluaran per kapita Kota Bandung tahun 2020 adalah sebesar 16.887.000 rupiah atau turun 2,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak Maret 2020. Pandemi telah mengakibatkan terjadinya penurunan kegiatan usaha, bahkan berimbas kepada tutupnya tempat usaha dan pemutusan hubungan kerja.

Kondisi menurunnya pengeluaran per kapita terjadi di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Meskipun demikian pengeluaran per kapita Kota Bandung lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran per kapita Jawa Barat sebesar 10.845.000 rupiah pada tahun 2020 dan merupakan pengeluaran per kapita tertinggi di antara kabupaten/kota di Jawa Barat.

4. Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal dan Angka Kemiskinan Cenderung Meningkatkan Akibat Pandemi Covid-19

Pada periode tahun 2016 sampai 2019, Pemerintah Kota Bandung berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 4,32% pada tahun 2016 menjadi 3,38% pada tahun 2019. Namun kondisi ini berubah pada saat mulai terjadi pandemi Covid-19 pada triwulan I-2020. Dalam beberapa bulan sejak pertama kali terjadi pandemi, jumlah penduduk miskin di Kota Bandung cenderung meningkat, yang menyebabkan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 menjadi 3,99% atau meningkat 0,61%.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Kota Bandung pada tahun 2020 adalah 100.020 jiwa. Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sekitar 15.350 jiwa dibandingkan keadaan pada tahun 2019 (84.670 jiwa). Meningkatnya jumlah warga miskin dimaksud selaras dengan penurunan IPM Kota Bandung pada tahun 2020, sehingga dibutuhkan strategi dan kebijakan spesifik di era pandemi Covid-19 yang dapat mengurangi atau mengendalikan angka kemiskinan.

5. Penanganan Pengangguran Belum Optimal dan Angka Pengangguran Cenderung Meningkatkan Akibat Pandemi Covid-19

Berdasarkan data BPS Kota Bandung, tingkat jumlah angkatan kerja Kota Bandung pada bulan Agustus 2020 sebanyak 1.314.930 orang, turun 11.440 orang dibanding bulan Agustus 2019. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan sebesar 1,19% dari 65,90% menjadi 64,71% pada bulan Agustus 2020. Dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah 38.573 orang sejalan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik menjadi 11,19% pada bulan Agustus 2020. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih mendominasi diantara tingkat pendidikan lainnya, yaitu sebesar 15,88%.

Penduduk yang bekerja sebanyak 1.167.849 orang, berkurang 50.013 orang dari bulan Agustus 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang

bekerja terutama pada bidang jasa sebesar 0,17%. Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan utamanya pada bidang manufaktur sebesar 0,18%. Sebanyak 487.485 orang atau 41,74% bekerja pada kegiatan informal. Selama setahun terakhir, pekerja informal naik sebesar 8,85% dibandingkan bulan Agustus 2019.

6. Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia

Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung merupakan kota metropolitan yang memanfaatkan potensi jumlah penduduk yang besar serta mengandalkan sektor jasa dan perdagangan untuk dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai modal pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk dapat mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Bandung beserta seluruh *stakeholder* dalam pembangunan manusia yang terdiri dari unsur pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Bandung selama kurun waktu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 1,49 poin menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Akan tetapi pada tahun 2020 IPM Kota Bandung sebesar 81,51 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 sebesar 81,62 poin. Penurunan 0,11 poin tersebut diasumsikan dipengaruhi oleh turunnya rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan akibat dari pandemi Covid-19 dimana pengeluaran per kapita Kota Bandung tahun 2020 adalah sebesar Rp16.887.000,00 turun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp17.254.000,00.

Di sisi lain, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai unsur pendidikan naik 0,01 poin dibandingkan tahun 2019 serta Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Bandung sebagai unsur kesehatan tahun 2020 mencapai 74,28 tahun naik 0,14 poin dari tahun 2019.

7. Harapan Lama Sekolah (HLS) Belum Optimal

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bandung pada tahun 2020 sebesar 14,20 tahun masih berada di atas Provinsi Jawa Barat (12,48 tahun). Artinya peluang anak-anak usia 7 (tujuh) tahun ke atas di Kota Bandung untuk menamatkan pendidikan sudah setara Diploma 2 (D2) dibandingkan dengan peluang anak-anak se Jawa Barat (perhitungan kumulatif 27 kabupaten/kota) yakni setara kelas 12 atau kelas 3 SMU/K.

Selama kurun waktu dari tahun 2016 sampai dengan 2020, HLS Kota Bandung mengalami kenaikan sebanyak 0,31 poin. Pandemi Covid-19 tidak menjadi penghalang untuk dapat memperbesar peluang anak-anak bersekolah sampai dengan tingkat Diploma. Hal ini diperlihatkan dari kenaikan angka HLS dari tahun 2019 (14,19) ke tahun 2020 (14,20) membuktikan bahwa pembangunan pendidikan masih menjadi prioritas. Meningkatnya HLS menunjukkan peningkatan tahun bersekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 (tujuh) tahun di masa mendatang.

8. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Belum Optimal

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Bandung meningkat dari tahun 2016 (10,58 tahun) sampai dengan tahun 2020 (10,75) sebesar 0,17 poin, memperlihatkan pertumbuhan positif pembangunan di bidang pendidikan. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia Kota Bandung yang lebih baik, meski secara rata-rata penduduk Kota Bandung usia 25 tahun ke atas telah bersekolah selama 10,75 tahun atau setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas 10 (sepuluh), menunjukkan belum mencapai wajib pendidikan 12 (dua belas) tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan atau mekanisme pendidikan di Kota Bandung masih belum optimal meningkatkan RLS penduduk Kota Bandung.

9. Derajat Kesehatan Masyarakat Belum Optimal

Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang sangat kompleks yang saling berkaitan dengan masalah lain di luar kesehatan itu sendiri. Ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan, baik kesehatan individu maupun kesehatan masyarakat, yaitu faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Keempat faktor tersebut di samping berpengaruh langsung kepada kesehatan, juga saling berpengaruh satu sama lainnya. Status kesehatan akan tercapai secara optimal, bilamana keempat faktor tersebut secara bersama-sama mempunyai kondisi yang optimal pula sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan yang optimal.

Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi beberapa indikator, diantaranya:

a. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)

Pada tahun 2020, nilai AKI di Kota Bandung masih relatif tinggi, dengan jumlah kematian ibu sebanyak 28 orang atau secara perhitungan konversi sebesar 61,03/100.000 Kelahiran Hidup (KH). Nilai rasio kematian ibu di Kota Bandung tahun 2020 adalah 85,77/100.000 KH. Dengan nilai tersebut, Kota Bandung menduduki peringkat ke-12 dengan kasus kematian ibu tertinggi di antara kabupaten/kota di Jawa Barat. Jika dibandingkan pada tahun 2019, nilai tersebut mengalami penurunan dari peringkat 10 dengan jumlah kasus sebanyak 29 kematian. Hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

b. Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi merupakan indikator yang sensitif terhadap ketersediaan kualitas dan pemanfaatan pelayanan kesehatan terutama yang berhubungan dengan perinatal yang mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Kondisi bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan kesehatan ibu, lingkungan, perilaku dan status sosial orangtua bayi. Kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang optimal akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Jumlah kematian Bayi Kota Bandung pada tahun 2020 sebanyak 82 bayi atau secara perhitungan konversi sebesar 1,95/1.000 KH. Angka kematian bayi Kota Bandung masih di bawah rata-rata Jawa Barat sebanyak 102 kasus. Meskipun demikian AKB Kota Bandung masih berada di peringkat ke 15 tertinggi jumlah kematian bayi se-Jawa Barat. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, nilai AKB Kota Bandung mengalami penurunan dengan jumlah kematian sebanyak 114 kasus (peringkat 10 kabupaten/kota).

c. Optimalisasi Gizi Masyarakat

Masyarakat Kota Bandung saat ini menghadapi permasalahan gizi *triple burden* yaitu *stunting* akibat kekurangan gizi kronis, gizi buruk (kondisi kurang gizi saat ini) dan obesitas (kelebihan gizi). *Stunting* merupakan kondisi balita gagal tumbuh, yang memberikan hambatan pada perkembangan otak, kecerdasan, kemampuan belajar dan rendahnya produktivitas serta bersifat permanen sehingga akan berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia, serta menjadi potensi kerugian ekonomi kedepannya, sehingga membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Berdasarkan data survei Status Gizi Balita Indonesia (SGBI), prevalensi *stunting* Kota Bandung pada tahun 2020 sebesar 28,12% dimana masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat sebesar 26,21%, dan masih berada di atas standar yang ditetapkan WHO yaitu kurang dari 20%.

d. Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Kota Bandung saat ini sedang menghadapi transisi epidemiologi terkait dengan penyakit yang dikenal dengan tiga beban penyakit (*triple burden of diseases*). Tiga beban penyakit tersebut adalah: pertama, telah bergesernya penyakit menular ke arah penyakit tidak menular, seperti penyakit jantung, gagal ginjal, diabetes, kanker, dan sebagainya. Kedua, muncul ancaman penyakit infeksi baru, seperti Covid-19, flu burung, ebola, dan TBC resisten obat. Ketiga, masyarakat masih dihadapkan pada masalah penyakit menular yang belum selesai, seperti Demam Berdarah (DB), Tuberkulosis (TB), dan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).

Kasus TB di tahun 2020 adalah sebanyak 8.504 kasus terdiri dari 2.596 kasus luar wilayah dan 5.908 penderita berasal dari Kota Bandung. Dari jumlah total semua kasus TB, didapat tingkat penemuan kasus TB di Kota Bandung sebesar 99,23%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 139,71%. Penyakit TB merupakan penyakit yang dapat menyebabkan kematian bila tak ditangani dengan tepat. Jumlah penderita TB yang meninggal di masa pengobatan TB di tahun 2019 sebanyak 187 (1,85%) terdiri dari 152 penderita asal Kota Bandung dan 35 lainnya dari luar wilayah Kota Bandung.

Kasus HIV-AIDS merupakan penyakit yang belum ada obat ataupun vaksin untuk mencegahnya. Kota Bandung pada tahun 2020 menjadi peringkat pertama di Jawa Barat dengan jumlah pengidap HIV-AIDS terbanyak yaitu sebanyak 5.624 orang, dengan rata-rata temuan pertahun sebanyak 300 sampai 400 kasus.

Penyakit berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang harus diwaspadai, antara lain penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), diare, keracunan makanan, campak, difteri dan rabies. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) tercatat sebanyak 2.790 Kasus di Kota Bandung pada tahun 2020 dengan jumlah Kematian akibat DBD sebanyak 13 orang. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk dari genus *Aedes*, terutama jenis *Aedes aegypti* atau *Aedes albopictus* dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang semua kelompok umur baik laki-laki maupun perempuan. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan, iklim, kepadatan penduduk, dan perilaku masyarakat.

Meningkatnya kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) secara signifikan terlihat dari selalu masuknya PTM pada 10 penyakit terbesar kasus baru yang dikumpulkan oleh Puskesmas di setiap tahun. Jenis-jenis penyakit ini memang tidak menular, akan tetapi tidak kalah mematikan dan mengakibatkan kondisi fatal yang mengakibatkan seseorang menjadi tidak produktif. Penanganannya juga memerlukan sumber daya yang besar seperti waktu, teknologi, keterampilan dan biaya. Hipertensi merupakan penyebab kematian tertinggi di Kota Bandung, dengan jumlah kasus sebanyak 111 orang pada tahun 2020, diikuti oleh stroke, gagal jantung dan diabetes melitus pada 10 terbanyak penyebab kematian di Kota Bandung berdasarkan laporan kematian dari Puskesmas. Beberapa penyakit tidak menular yang terus meningkat jumlah penderitanya antara lain penyakit hipertensi, diabetes melitus, *cancer*, Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), dan *cardio vasculer* (jantung). Sementara penyakit tidak menular yang menjadi standar pelayanan minimal adalah hipertensi, diabetes melitus, dan kesehatan jiwa.

Saat ini, prioritas utama sektor kesehatan di Kota Bandung adalah penanganan dan pencegahan penyakit yang diakibatkan oleh Virus Covid-19 yang terjadi melalui droplet orang yang terinfeksi. Penularan virus melalui droplet ini menyebabkan peningkatan jumlah kasus Covid-19, sehingga membutuhkan pengendalian yang cukup ketat.

e. Optimalisasi Mutu Pelayanan Kesehatan

Mutu Pelayanan kesehatan di Kota Bandung masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi. Pada tahun 2020, fasilitas kesehatan yang terakreditasi di Kota Bandung baru mencapai 24% dari seluruh fasilitas kesehatan yang ada, dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 100% dari 12 indikator kesehatan sebesar 66,59%. Rasio puskesmas yang merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan di garda terdepan bagi masyarakat baru berjumlah 80 puskesmas atau 1:31.376 penduduk, sementara standar minimal menurut WHO adalah 1:30.000 penduduk.

f. Peningkatan Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat yang terdiri dari 12 indikator dengan lebih menitik beratkan kepada faktor lingkungan dan perilaku keluarga terhadap upaya kesehatan. IKS diperoleh dari jumlah keluarga sehat dibagi jumlah KK yang didata di wilayah kerja. Perhitungan IKS bertujuan untuk menentukan tingkatan keluarga menurut status kesehatan yang dimiliki keluarga tersebut. Indeks Keluarga Sehat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu:

- Keluarga Sehat : > 0,80
- Keluarga Pra-Sehat : 0,50-0,80
- Keluarga Tidak Sehat : < 0,50

Berdasarkan data Aplikasi Keluarga Sehat Kementerian Kesehatan, IKS Kota Bandung pada tahun 2020 berada pada nilai 0,17 dengan kategori tidak sehat. Jumlah Kepala Keluarga (KK) sehat 66.490 KK dengan sasaran jumlah KK yang sudah diinput ke aplikasi sebanyak 397.862 KK. Angka IKS Kota Bandung masih berada di atas angka Provinsi Jawa Barat yaitu 0,14, dimana jumlah Kepala Keluarga (KK) sehat sebanyak 1.176.967 KK dengan sasaran jumlah KK yang sudah diinput ke aplikasi sebanyak 8.126.802 KK.

g. Optimalisasi Perilaku dan Lingkungan Sehat

Derajat kesehatan sebesar 70% dipengaruhi oleh lingkungan dan perilaku, karena dengan perilaku sehat masyarakat, secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap penanggulangan masalah kesehatan melalui pencegahan terjadinya kesakitan maupun kematian.

Perilaku sehat masyarakat dapat dilihat dari kesiagaan wilayah terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit, salah satunya dengan indikator kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri. Pada tahun 2020 Kelurahan siaga aktif dengan strata purnama dan mandiri baru mencapai 50,33 % dari 151 kelurahan, bila dibandingkan dengan kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Barat maka Kota Bandung masih memiliki strata pratama dan madya, sementara beberapa kabupaten/kota sudah tidak ada pratama diantaranya Kota Cimahi, Kota Cirebon dan Kota Sukabumi, Kota Banjar dan Kabupaten Kuningan.

Salah satu indikator lingkungan sehat adalah cakupan Sanitasi Dasar yang layak. Sanitasi merupakan elemen terpenting penunjang kesehatan manusia yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan. Pada tahun 2020 cakupan sanitasi dasar yang layak baru mencapai 70% Penduduk yang memiliki akses sanitasi layak apabila fasilitas sanitasi yang digunakan memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa, tanki septik/ Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) yang digunakan sendiri atau bersama. Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Barat maka Kota Bandung masuk di dalam 10 kab/kota terendah cakupannya.

h. Penanganan Covid-19

Pandemi Covid-19 mulai ditemukan di Kota Bandung pada tanggal 17 Maret 2020. Perjalanan penyebaran virus ini semakin meluas di wilayah Kota Bandung sehingga harus dirumuskan langkah-langkah untuk mencegah semakin meluasnya pandemi serta strategi-strategi baru untuk penanganan kesehatan dan pemulihan perekonomian warga masyarakat yang terdampak. Data per tanggal 29 Juni 2021 menunjukkan bahwa kasus konfirmasi Kota Bandung secara akumulasi tercatat mencapai 24.326 orang, dengan rincian konfirmasi aktif yang sedang mengalami perawatan/isolasi sejumlah 2.846 orang, sembuh sebanyak 21.028 orang (86,44%), dan meninggal sebanyak 452 orang (1,86%). Bila dibandingkan dengan angka kesembuhan dan kematian tingkat Nasional dan Jawa Barat, maka angka kesembuhan Kota Bandung berada di atas Jawa Barat (85,44%), namun masih di bawah tingkat Nasional (87,1%). Sementara angka kematian Kota Bandung lebih tinggi dari Jawa Barat (1,40%) dan di bawah Nasional (2,7%). Penyebaran kasus konfirmasi aktif tersebar di 30 kecamatan dengan jumlah kasus tertinggi pada tanggal 29 Juni sebanyak 213 kasus di kecamatan Bojongloa Kaler, dan untuk tingkat kelurahan tersebar di 128 kelurahan dengan konfirmasi aktif tertinggi di kelurahan Sukaraja sebanyak 128 Kasus.

Peningkatan kasus Covid-19 di Kota Bandung disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: mobilitas dan aktifitas masyarakat yang menyebabkan interaksi, menurunnya kepatuhan dalam melaksanakan protokol kesehatan di berbagai aktifitas, serta kemungkinan adanya varian baru yang memiliki sifat penyebaran yang lebih cepat.

Pemerintah Kota Bandung menyiapkan 29 RS untuk merawat pasien Covid-19 dengan ketersediaan 2.144 tempat tidur. Tingkat keterisian pada tanggal 29 Juni sebanyak 2.047 tempat tidur dengan *Bed Occupancy Ratio* (BOR) perawatan Covid-19 sebesar 95,48%, sementara standar WHO adalah kurang dari 60%. Apabila dilihat dari asal pasien, maka 58,51% merupakan warga Kota Bandung, 24,27% warga Kabupaten Bandung, 3,39% warga Kabupaten Bandung Barat, 3,80% warga Kota Cimahi, 1% warga Sumedang, dan 7,04% berasal dari luar Bandung Raya. Penambahan jumlah tempat tidur di RS tergantung kepada jumlah SDM kesehatan yang dapat melayani. Untuk mengatasi penuhnya perawatan di RS, maka warga yang terkonfirmasi dengan gejala ringan disediakan tempat isolasi terpusat di 3 Hotel dan RS Darurat Secapa TNI yang di khususkan untuk se-Jawa Barat, serta BPSDM Provinsi Jawa Barat yang di khususkan untuk Bandung Raya. Adapun pada 30 kecamatan baru tersedia 132 tempat isolasi yang layak.

Tingginya kasus konfirmasi tidak terlepas dari giatnya pemeriksaan test *Polymerase Chain Reaction* (PCR) dan Rapid Antigen yang dilakukan oleh laboratorium di Kota Bandung. Dalam rangka pemenuhan pemeriksaan yang sesuai dengan standar WHO, dibangun Laboratorium *Bio Safety Level 2* pada Dinas Kesehatan Kota Bandung. Laboratorium biomolekular ini mulai beroperasi pada 15 Mei 2020, dan telah mendapatkan rekomendasi sebagai Laboratorium Pemeriksa Covid-19 dari Dinas Kesehatan Provinsi per tanggal 12 Juni 2020 serta tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07 MENKES 405 2020 sebagai jejaring laboratorium pemeriksaan Covid-19 1 Juli 2020 dengan Kode Laboratorium C.89. Kapasitas pemeriksaan sejumlah 350-500 sampel per hari. Selain BSL 2 Kota Bandung, pemeriksaan Covid-19 juga dilakukan di Labkes Daerah Provinsi Jawa Barat dan laboratorium milik swasta yang beroperasi di wilayah Kota Bandung. Data pada 30 Juni 2021, telah mencatat pemeriksaan RT-PCR sebanyak 247.609 spesimen serta pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test* (RDT) sebanyak 138.055 spesimen.

Terkait dengan penanggulangan pandemi Covid-19 di Kota Bandung, pelaksanaan vaksinasi usia 12 tahun ke atas dengan sasaran sebanyak 1.952.358 orang (78,01%) dari seluruh warga penduduk yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 sebanyak 503.905 orang sudah mendapatkan vaksin dosis pertama, dan ditargetkan hingga akhir tahun 2021 dapat mencapai 100%.

10. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan mengungkapkan ketidakadilan laki-laki dan perempuan. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi (pengeluaran per kapita). Pada tahun 2020, IPG Kota Bandung sebesar 94,82 turun dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 94,68 poin. Penurunan 0,14 poin tersebut selaras dengan penurunan IPM Kota Bandung pada tahun 2020 dikarenakan penurunan pengeluaran per kapita sebagai akibat dari Pandemi Covid-19.

Adapun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi. Capaian IDG Kota Bandung pada tahun 2020 sebesar 70,49 naik 0,09 poin dari tahun 2019 (70,38), masih lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Jawa Barat (nilai kumulatif 27 kabupaten/kota) sebesar 70,24 poin. Meningkatnya IDG Kota Bandung memperlihatkan bahwa peran perempuan diakui dalam dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

4.1.2. ASPEK DAYA SAING

1. Optimalisasi Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2020 adalah 71,75 dengan kategori "BB". Berdasarkan hasil penilaian, komponen pengungkit mendapat nilai 37,65 dari bobot sebesar 60,00, sedangkan komponen hasil mendapat nilai 34,10 dari bobot sebesar 40,00. Dalam waktu 4 tahun, indeks reformasi birokrasi mengalami peningkatan dari tahun 2017 (69,81) sampai dengan tahun 2020 (71,75) sebesar 1,94. Hal tersebut menandakan terdapat kemajuan dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik.

Namun demikian terdapat penurunan nilai akuntabilitas pada komponen hasil dimana dari tahun 2017 (11,25) sampai dengan 2020 (8,46) sebesar 2,79. Hal ini mengidentifikasi bahwa kebijakan atau sistem akuntabilitas di Kota Bandung masih belum optimal. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, tingkat akuntabilitas atas kinerja pemerintah Kota Bandung pada tahun 2020 memperoleh predikat BB yang berarti belum ada peningkatan dari tahun 2019. Predikat BB ini menandakan reformasi birokrasi masih belum optimal.

Sesuai surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 382 sampai dengan 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Kongkrit Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional belum diterapkan menyeluruh. Penerapan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sudah diterapkan dengan baik pada sebagian perangkat daerah, namun keselarasan antar proses tata kelola SPBE masih menjadi kendala karena belum diterapkannya integrasi menyeluruh antar proses tata kelola SPBE.

2. Penanganan genangan dan kemacetan belum optimal

Permasalahan penanganan banjir/genangan di Kota Bandung sangat erat kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan drainase, dan sumber daya air. Penanganan permasalahan genangan di Kota Bandung saat ini masih belum optimal karena di beberapa titik lokasi banjir/genangan belum dapat terselesaikan. Berdasarkan karakteristik genangan, parameter pengukuran banjir/genangan yang digunakan adalah ketinggian 30 cm dengan waktu surut 60 menit. Dari 68 titik genangan yang ada di Kota Bandung, pada tahun 2020 tercatat 22 titik genangan sudah tertangani dan 46 titik genangan belum tertangani.

Permasalahan dari penanganan genangan yang belum optimal adalah berkurangnya kapasitas drainase primer, belum terintegrasinya saluran drainase, dan belum optimalnya kualitas saluran drainase sekunder dan tersier. Permasalahan yang terkait drainase primer adalah pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan tidak tertatanya kawasan sempadan sungai akibat pelanggaran pemanfaatan ruang, sedangkan permasalahan terkait drainase sekunder dan tersier adalah tidak optimalnya kapasitas saluran drainase sekunder dan tersier, belum optimalnya inspeksi saluran drainase, dan desain teknis drainase yang bermasalah.

Kemacetan di Kota Bandung dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Bandung yang dirasakan saat ini tidak hanya di jalan raya, melainkan juga ketika jalan di lingkungan permukiman. Hal ini menunjukkan bahwa kemacetan di Kota Bandung telah menjadi permasalahan kota yang perlu mendapatkan perhatian serius. Permasalahan kemacetan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain banyaknya jumlah wisatawan datang ke Bandung setiap akhir pekan atau di masa-masa liburan, pertambahan populasi penduduk yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan, serta meningkatnya jumlah pengguna kendaraan pribadi yang tidak diiringi dengan penambahan kapasitas jalan.

3. Indeks Daya Saing Pariwisata

Daya saing pariwisata diukur melalui kemampuan bersaing pada dimensi lingkungan bisnis, tatakelola, infrastruktur pendukung, dan potensi wisata serta adaptasi dengan permintaan pasar pariwisata, Indeks Daya Saing Pariwisata Kota Bandung pada tahun 2020 dapat direalisasikan sebesar 3,29 poin dari target 3,55 poin atau capaian kinerja sebesar 92,67%. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 sebesar 3,41 poin, maka terjadi penurunan poin sebesar 0,12 poin. Sementara tingkat ketercapaian indeks daya saing pariwisata tahun 2020 jika dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2023 sebesar 3,74 poin, maka persentase pencapaiannya sebesar 87,96%.

Indeks Daya Saing Pariwisata merupakan salah satu parameter yang diukur oleh Kementerian Pariwisata untuk menetapkan Indeks Pariwisata Indonesia (IPI). Penyusunan ranking tersebut didapat melalui survey dan mengacu pada *Travel and Tourism Competitiveness Index* (TTCI) yang dikeluarkan *World Economic Forum* (WEF) yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, dengan rentang skala index 0-5. Ada 4 (empat) aspek yang diukur untuk menentukan tingkat daya saing pariwisata yaitu: aspek lingkungan pendukung bisnis, tata kelola, potensi wisata, dan infrastruktur.

Menurunnya Indeks Daya Saing Pariwisata Kota Bandung tahun 2020 tidak terlepas dari pengaruh adanya pandemi Covid-19. Beberapa permasalahan yang menghambat capaian target kinerja indeks daya saing pariwisata Kota Bandung tahun 2020 yaitu:

- 1) Pandemi Covid-19 berdampak pada usaha jasa pariwisata konvensional yang tidak fleksibel untuk berinovasi melakukan diversifikasi usaha ketika terjadi bencana, khususnya penyakit menular.
- 2) Model bisnis pembangunan pariwisata di Kota Bandung belum dirancang agar bisa mengantisipasi, beradaptasi dan serta mampu memitigasi ketika terjadi bencana yang bersifat *extraordinary*.
- 3) Pandemi Covid-19 berdampak pada psikologi sosial masyarakat yang akan berwisata, sehingga membutuhkan standar jaminan kesehatan yang dapat memberi perlindungan keamanan, dan keselamatan dari penularan penyakit serta kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung.
- 4) Infrastruktur pendukung *tourism* 4.0 di Kota Bandung tahun 2020 belum sepenuhnya siap atau cukup memadai untuk tetap menjaga peningkatan daya saing pariwisata pada saat terjadi pandemi Covid-19.

4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Permasalahan terkait lingkungan hidup dan persampahan di Kota Bandung diantaranya mencakup: (1) menurunnya kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan IKLH pada kondisi “sangat kurang baik” dan (2) pengelolaan sampah yang masih mengandalkan pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sehingga membutuhkan biaya tinggi untuk penanganannya.

Permasalahan lingkungan hidup tersebut, secara umum diindikasikan melalui kondisi:

- a. Menurunnya kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian, dan peternakan;
- b. Menurunnya kualitas udara ambien akibat emisi kendaraan bermotor dan cerobong industri, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca terutama pada sektor transportasi, dan pengelolaan limbah domestik;
- c. Menurunnya fungsi layanan jasa ekosistem daerah aliran sungai citarum terutama pada anak-anak sungai yang mengalir di Kota Bandung, menurunnya kuantitas air akibat berkurangnya daerah resapan air, berkurangnya tutupan vegetasi, dan meningkatnya alih fungsi lahan; dan
- d. Meningkatnya resiko bencana, terutama bencana terkait perubahan iklim, akibat belum optimalnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana.

Capaian IKLH mengalami penurunan dari 45,22 poin pada tahun 2019 menjadi 43,90 poin pada tahun 2020. Capaian tersebut menggambarkan kondisi lingkungan hidup Kota Bandung pada lingkup kualitas air, tutupan lahan/vegetasi dan udara selama setahun di Kota Bandung dalam tahap waspada. Hal ini berarti upaya penanganan permasalahan lingkungan hidup belum dilaksanakan secara optimal.

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah sebesar 29,24 poin pada tahun 2020, yang berarti target untuk menambah tutupan lahan/vegetasi pada tahun 2020 belum tercapai. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah, rendahnya capaian luasan RTH di Kota Bandung. Salah satu komponen yang diperhitungkan dalam IKTL adalah luasan RTH Kota Bandung. Saat ini, luasan RTH Kota Bandung hanya sebesar 12,25%, sangat tidak memadai dengan kebutuhan ruang terbuka hijau di Kota Bandung. Hal ini mengindikasikan masih diperlukannya kebijakan yang lebih agresif untuk menambah luasan ruang terbuka hijau di Kota Bandung.

Dengan terbitnya Surat Edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/2021, Tanggal 4 April 2021, tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan maka terdapat perubahan formulasi perhitungan yang menyebabkan juga adanya perubahan target pada IKLH Kota Bandung, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan lebih lanjut.

Realisasi cakupan penanganan sampah pada tahun 2020 adalah sebesar 98,32%. Hal ini menggambarkan pengelolaan sampah kota secara konvensional mulai dari sumber sampai ke TPA melebihi target kerja yang seharusnya direduksi melalui pengurangan sampah dari sumber sebesar 22% timbulan sampah pada tahun 2020. Dapat disimpulkan bahwa upaya melayani pengelolaan sampah kota dengan melibatkan masyarakat dan *stakeholder* lainnya dengan berbagai metode dan cara mengurangi sampah dari sumber termasuk salah satunya melalui program Kurangi Pisahkan Manfaatkan (Kang Pis Man) telah menunjukkan kinerja namun masih perlu dioptimalkan.

Masalah utama yang dihadapi Kota Bandung adalah belum dimilikinya fasilitas Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS). TPPAS yang digunakan saat ini merupakan TPA yang bersifat sementara dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan usia pakainya yang akan segera berakhir. Dengan pola pengelolaan sampah Kota Bandung yang masih bertumpu pada pola Kumpul – Angkut – Buang, maka permasalahan TPA ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari apabila tidak segera diantisipasi. Oleh karena itu perubahan pola pengelolaan mutlak diperlukan, dari Kumpul – Angkut – Buang menjadi diselesaikan di sumber sampah, diantaranya dengan mengintensifkan pola pengelolaan sampah secara 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*).

Berdasarkan hasil Kajian Kinerja Pengelolaan Sampah secara 3R yang dilakukan pada tahun 2017, diperoleh informasi bahwa pengelolaan sampah secara 3R yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah sudah mencapai 14,32% dari total timbulan sampah per harinya atau sekitar 214,6 ton/hari. Jumlah tersebut didapat melalui pelaksanaan Kawasan Bebas Sampah oleh masyarakat yang didukung oleh pemerintah melalui pemberian sarana pengolahan sampah di sumber seperti biopori, komposter, takakura, bata terawang dan biodigester. Di sisi lain, pengurangan produksi sampah pun didorong melalui kebijakan pelarangan penggunaan *styrofoam* dan anjuran membawa *tumbler* dan tempat makanan ke sekolah. Salah satu keterlibatan yang tidak kalah penting adalah sektor informal, seperti pemulung – tukang rongsok – bandar rongsok yang memiliki peran sangat besar dalam proses pemilahan dan pengambilan sampah potensi daur ulang.

Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi sangat berkaitan dengan aktivitas pembangunan pada berbagai sektor yang secara tidak langsung menimbulkan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga penanganan permasalahan yang dilakukan pun harus bersifat multisektor. Saat ini penanganan permasalahan lingkungan hidup dinilai belum optimal karena dalam pelaksanaannya cenderung masih dibebankan pada perangkat daerah yang menangani urusan lingkungan hidup. Dalam hal ini komitmen berbagai *stakeholder* pembangunan untuk tetap memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam melaksanakan aktivitasnya sangat diperlukan.

5. Optimalisasi Kondusivitas Masyarakat

Masalah ketenteraman dan ketertiban umum dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kehidupan politik dan penegakan hukum. Kehidupan politik yang diarahkan untuk mewujudkan

demokrasi, masih dimaknai sebagai kebebasan semata oleh sebagian masyarakat, yang seringkali dapat mengganggu kelompok masyarakat lainnya yang mempengaruhi kondisi ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam aspek hukum, penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten mempengaruhi pula kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang besar dan heterogen, memiliki obyek vital nasional, merupakan daerah kunjungan wisata, daerah pendidikan, dan ekonomi kreatif, menjadi pemicu timbulnya berbagai permasalahan sosial.

Jumlah kejadian yang berpotensi konflik tahun 2020 di Kota Bandung sebanyak 354 kejadian yang terbagi ke enam bidang, yaitu:

1. Bidang Agama/Ideologi 36 kejadian;
2. Bidang Ekonomi 57 kejadian;
3. Bidang Sosbud 158 kejadian;
4. Bidang Politik 74 kejadian;
5. Bidang Pertahanan dan Keamanan 22 kejadian; dan
6. Bidang Perselisihan Antar Ormas, LSM atau Instansi Lainnya 7 kejadian.

Dari banyaknya kejadian yang berpotensi konflik, mengindikasikan kebijakan atau mekanisme mencegah munculnya potensi konflik belum optimal.

Kondisi Kota Bandung dengan kepadatan penduduk yang tinggi, bangunan yang belum tertata, serta masih adanya kantong-kantong kumuh menyebabkan tingginya potensi kebakaran. Selain itu, kondisi drainase yang belum optimal berpotensi menimbulkan bencana banjir. Hal tersebut salah satunya dikarenakan Kota Bandung belum memiliki dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sehingga Rencana Pengendalian Bencana (RPB) belum optimal.

Jumlah pelanggaran pada tahun 2019, tercatat sebanyak 629 pelanggaran. Sedangkan pada tahun 2020, terjadi kenaikan jumlah pelanggaran yang sangat signifikan, yaitu 5.027 pelanggaran Perda/Perwal yang dilaporkan, dimana semuanya dapat terselesaikan melalui penyerahan barang bukti, peringatan, yustisi, dan biaya paksa. Peningkatan jumlah pelanggaran disebabkan oleh pelanggaran Perwal Kota Bandung yang berkenaan dengan Pandemi Covid-19. Koordinasi antara dinas teknis Pemerintah Kota Bandung, aparat kewilayahan, dan Satpol PP merupakan hal yang harus ditingkatkan dalam hal pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan data tahun 2019 terdapat 98 organisasi kepemudaan dan yang baru terbina sekitar 30 organisasi. Sehingga masih terdapat 68 organisasi kepemudaan yang belum mendapatkan pembinaan dari pemerintah Kota Bandung, agar tercapai organisasi yang aktif positif. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya kebijakan, program, dan kegiatan dalam pembinaan organisasi kepemudaan, serta masih rendahnya peran aktif pemuda dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung.

4.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

4.1.3.1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

a. Urusan Pendidikan

Permasalahan pada urusan pendidikan di Kota Bandung, diantaranya adalah:

- 1) Belum optimalnya APM untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK yaitu sebesar 95,71% pada tahun 2019;
- 2) Menurunnya rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang SD/MI dan SMA/SMK;
- 3) Masih adanya tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal dan tersertifikasi. Pada tahun 2019 terdapat tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi S1 dan kualifikasi S2;
- 4) Masih adanya kekurangan dalam sistem Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sehingga belum sesuai dengan harapan masyarakat;
- 5) Perubahan proses pembelajaran dari belajar di sekolah menjadi belajar di rumah sebagai akibat dari pandemi Covid-19;
- 6) Penyebaran sekolah yang tidak merata;
- 7) Belum optimalnya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri;
- 8) Masih belum optimalnya pengembangan sekolah inklusif;
- 9) Masih ditemukan ketimpangan kualitas antar sekolah yang menimbulkan munculnya sekolah favorit;
- 10) Masih ada satuan Pendidikan Non Formal yang belum terdata dalam Dapodik.

b. Urusan Kesehatan

Permasalahan urusan kesehatan di Kota Bandung diantaranya:

- 1) Sebaran Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) belum merata;
- 2) Kematian ibu dan bayi merupakan masalah yang bersifat multidimensional dan masih menjadi masalah di Kota Bandung;
- 3) Meningkatnya penyakit menular (terutama adanya virus Covid-19) dan penyakit tidak menular;
- 4) Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- 5) Masalah gizi buruk dan *stunting* di masyarakat;
- 6) Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusinya tidak merata;
- 7) Masih adanya fasilitas kesehatan yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan akreditasi;

- 8) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan layanan kesehatan;
- 9) Belum optimalnya peningkatan Kesehatan keluarga.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi:

- 1) Peningkatan kemantapan jalan
Berdasarkan survey kondisi jalan yang dilaksanakan pada tahun 2020, tingkat kemantapan jalan di Kota Bandung mencapai 91,8%. Dengan demikian maka masih terdapat 8,13% panjang jalan dalam kondisi tidak mantap, sehingga masih membutuhkan peningkatan tingkat kemantapan jalan.
- 2) Permasalahan penanganan banjir/genangan di Kota Bandung sangat erat kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan drainase, dan sumber daya air. Penanganan permasalahan genangan di Kota Bandung saat ini masih belum optimal karena di beberapa titik lokasi banjir/genangan belum dapat terselesaikan. Penyebab dari banjir/genangan adalah berkurangnya kapasitas drainase primer, belum terintegrasinya saluran drainase, dan belum optimalnya kualitas saluran drainase sekunder dan tersier. Permasalahan yang terkait drainase primer adalah pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan tidak tertatanya kawasan sempadan sungai akibat pelanggaran pemanfaatan ruang, sedangkan permasalahan terkait drainase sekunder dan tersier adalah tidak optimalnya kapasitas saluran drainase sekunder dan tersier, belum optimalnya inspeksi saluran drainase, dan desain teknis drainase yang bermasalah. Hingga tahun 2020, telah teridentifikasi sebanyak 68 titik yang masih berpotensi terjadi genangan. Untuk menangani permasalahan tersebut telah dilakukan intervensi program dan kegiatan berdasarkan karakteristik genangan. Parameter pengukuran banjir/genangan yang digunakan adalah ketinggian 30 cm dengan waktu surut 60 menit, sehingga dari 68 titik genangan yang ada di Kota Bandung, pada tahun 2020 tercatat 22 titik genangan telah tertangani dan 46 titik genangan belum tertangani.
- 3) Rendahnya proporsi luasan RTH
Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud di atas disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang. Saat ini, di Kota Bandung baru terealisasi sebesar kurang lebih 12,20%. Luasan RTH ini memiliki korelasi yang cukup kuat terhadap kualitas udara ambien, kapasitas resapan air, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Sehingga usaha untuk menambah jumlah RTH dan intensifikasi RTH yang ada, harus terus ditingkatkan.

4) Pengendalian pemanfaatan ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Bandung masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya implementasi pembangunan yang belum sesuai dengan ketentuan peruntukan dan intensitas sesuai izin yang diterbitkan. Sampai dengan tahun 2020 terdapat 77,59% pelanggaran tata ruang dan bangunan yang diproses untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai ketentuan.

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dengan memperhatikan 7 kriteria kekumuhan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dalam peraturan ini disebutkan bahwa perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian, sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu:

1. bangunan gedung;
2. jalan lingkungan;
3. penyediaan air minum;
4. drainase lingkungan;
5. pengelolaan air limbah;
6. pengelolaan persampahan; dan
7. proteksi kebakaran.

Penanganan kawasan kumuh pada tahun 2020 realisasinya sebesar 2,94% dari target sebesar 3,96%. Dimana pada kawasan kumuh akan dibangun prasarana dan sarana dasar air minum, untuk menambah akses air minum menjadi 100%, sanitasi layak 100%, sehingga akan mengurangi kawasan kumuh menjadi 0%.

1) Air minum

Syarat-syarat air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, namun masih terdapat resiko tercemar oleh bakteri (misalnya, *escherichia coli*) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100°C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini. Pelayanan air minum menjadi kewenangan Perumda Tirtawening dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bertanggung jawab terhadap pengelolaan non perpipaan yang sudah mencapai 3,58%, dan sisanya yang menjadi

kewenangan Perumda Tirtawening, dengan capaian kinerja sebesar 75,80% sehingga total 79,38%, dengan realisasi penambahan sebanyak 1.468 sambungan baru, yang terdiri atas sambungan baru perpipaan sebanyak 1.278 sambungan, dan non perpipaan sebanyak 190 sambungan. Adapun yang menjadi kendala dengan tidak tercapainya target, yaitu:

- a) Konversi lahan produktif ke lahan terbangun mengakibatkan menurunnya fungsi imbuan air tanah di wilayah tangkapan air utama;
- b) Ketersediaan dan kualitas air tanah menurun, termasuk ketersediaan air bersih. Bahkan di beberapa wilayah pengembangan, kualitas air tidak layak untuk minum, mandi, dan cuci, sehingga air tanah seminimal mungkin digunakan sebagai sumber air baku.
- c) Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk. Adapun ketersediaan air baku diluar wilayah Kota Bandung memerlukan adanya intervensi dari pemerintah pusat dan provinsi.
- d) Sungai-sungai di Kota Bandung juga banyak yang tercemar, ditandai dengan beberapa sungai yang belum memenuhi baku mutu, baik kualitas, kuantitas, serta kontinuitas.
- e) Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah, dan persampahan.
- f) Belum tersedianya infrastruktur perkotaan khususnya untuk sistem penyediaan air minum yang dapat menjangkau seluruh masyarakat Kota Bandung.

2) Air Limbah Domestik

Penanganan air limbah domestik merupakan salah satu pelayanan sanitasi dasar kawasan permukiman. Sanitasi dasar yang dimaksud adalah jamban yang dilengkapi dengan saluran pembuangan air limbah domestik seperti *septic tank*, saluran air limbah Perumda Tirtawening/riol kota, sistem pengolahan air limbah yang digunakan komunal atau individual, sehingga tidak mencemari badan air.

Tingkat pelayanan air limbah dengan sistem terpusat adalah dengan dilakukannya kolaborasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan dengan Perumda Tirtawening, adapun capaian pelayanan air limbah di Kota Bandung sudah mencapai 79,43%, dengan rincian sistem *off site* sebesar 49,88% dan *on site* sebesar 29,55%.

Pelayanan sanitasi dasar sesuai Target SDGs dan Universal akses pada tahun 2019 harus mencapai 100%, oleh karena itu masih diperlukan 20,91% penambahan cakupan pelayanan air limbah se-Kota Bandung.

3) Rumah Tidak Layak Huni

Jumlah keseluruhan rumah tidak layak huni sebanyak 100.861 unit. Penanganan rutilahu dari tahun 2014-2019 sebanyak 80.445 unit. Rumah tidak layak huni yang sudah diperbaiki pada tahun 2020 sebanyak 969 unit, sehingga rutilahu yang sudah diperbaiki sebanyak 81.424 unit atau sebesar 80,73%. Beberapa permasalahan yang terjadi karena ada rutilahu yang sudah diperbaiki secara swadaya maupun sudah berpindah tangan, sehingga tidak bisa memenuhi kelengkapan administrasi kepemilikan dan mengundurkan diri. Penanganan rumah tidak layak huni dilakukan melalui sinergi program dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung dan pihak swasta (CSR), serta optimalisasi *data base* kebutuhan perumahan layak huni. Selain itu tingkat pendapatan dan daya beli yang rendah, menyebabkan sejumlah penduduk tidak dapat memiliki rumah yang layak huni dan sehat.

e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kota Bandung, diantaranya:

- 1) Menurunnya cakupan petugas perlindungan masyarakat;
- 2) Potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban

Menurut data Polrestabes Kota Bandung tahun 2017, total jumlah tindak pidana menurut jenis kriminalitas di Kota Bandung pada tahun 2016 sebanyak 3.546 kasus yang mengalami penurunan, dibandingkan tahun 2015 sebanyak 4.455 kasus dan tahun 2014 sebanyak 4.918 kasus. Sementara itu, jumlah gangguan umum kamtibmas pada tahun 2016 sebanyak 3.515 dan tahun 2015 sebanyak 4.159, meskipun trennya menurun, namun ketenteraman dan ketertiban perlu terus ditingkatkan karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat;

- 3) Peningkatan potensi ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan) terhadap stabilitas politik dan keamanan,

Hal tersebut menjadi krusial, mengingat banyaknya ancaman ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, baik yang datang dari dalam dan luar negeri. Selain itu pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang semakin menurun dipengaruhi oleh globalisasi dan kebebasan pada masa demokrasi. Kota Bandung merupakan daerah yang memiliki tingkat perkembangan pluralitas yang tinggi, yang akan berakibat pada melemahnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga kita perlu kembali pada bingkai NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, dimana kondisi perbedaan suku, agama, ras, dan kepercayaan tetap terjaga.

- 4) Meningkatnya individualisme di kalangan masyarakat

Hal ini merupakan suatu konsekuensi akibat dari banyaknya pendatang yang meningkatkan keberagaman latar belakang, sehingga terjadi percampuran budaya yang dapat memudahkan nilai-nilai budaya. Tekanan globalisasi juga memicu tingginya kompetisi sehingga masyarakat semakin jauh dari rasa kebersamaan dan empati. Kajian Bappelitbang tahun 2017 mengenai "Instrumen Indeks Kemasyarakatan Kota Bandung" dan Kajian dari Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah tahun 2016 mengenai "Rapor Warga" menunjukkan bahwa Kota Bandung memiliki karakteristik masyarakat yang kreatif dan terbuka pada perubahan, namun tidak dapat dipungkiri, dihadapkan pula pada berbagai persoalan sosial kemasyarakatan terutama degradasi moral, seperti sikap individualistik, hedonistik, intoleransi, dan sikap-sikap destruktif lainnya, seperti mudah tersinggung dan gampang marah.

- 5) Potensi terjadinya konflik horizontal, hal ini sesuai dengan data dari *Setara Institute for Democracy and Peace* yang menyebutkan bahwa pada tahun 2015, Kota Bandung menjadi kota nomor 6 paling tidak toleran se-Indonesia dan pada tahun 2017, menjadi kota nomor 12 paling tidak toleran se-Indonesia.
- 6) Adanya pandemi Covid-19 berpengaruh pada menurunnya kegiatan perekonomian masyarakat, mengakibatkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan hal tersebut bisa berdampak terhadap kondisi sosial dan meningkatnya tingkat kriminalitas di masyarakat.
- 7) Kompleksitas permasalahan gangguan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta rasio Polisi Pamong Praja dengan luas wilayah Kota Bandung dan belum optimalnya siskamling aktif di masyarakat.
- 8) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam masalah kebencanaan.

f. Urusan Sosial

Permasalahan pada urusan sosial di Kota Bandung, diantaranya adalah:

- 1) Dengan angka Gini Ratio Indeks pada tahun 2019 sebesar 0,43, menunjukkan tingkat ketimpangan berada di batas sedang menuju tinggi, maka masih dibutuhkan upaya yang lebih keras agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan.
- 2) Masih tingginya angka kemiskinan dan belum terintegrasinya program penanggulangan kemiskinan, baik dalam hal pendataan dan implementasi program. Hal ini dapat terlihat dari belum terintegrasinya data kesejahteraan sosial khususnya warga miskin penerima program bantuan (KIS, KIP, KKS), kemudian belum adanya sinkronisasi data warga miskin yang memperoleh bantuan serta validasi dan verifikasi data warga miskin, rigidnya proses yang ditempuh untuk sampai tahap verifikasi dan validasi data serta kesulitan mengelola ketersediaan data terpadu fakir miskin dan orang tidak mampu.
- 3) Adanya ancaman bencana alam yang terjadi di wilayah Kota Bandung, dikategorikan pada kelas sedang untuk tingkat kerentanan, serta potensi kerugian fisik dan ekonomi terhadap bencana gempa bumi. Dengan potensi kerugian fisik sebesar 14.171,3 miliar rupiah, dan potensi kerugian ekonomi sebesar 20,2 miliar rupiah. Studi yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN (2016) mengenai Kota Tangguh Bencana, menyebutkan bahwa Kota Bandung memiliki ancaman bahaya gempa bumi sedang, dengan sebagian kecil wilayah di bagian timur yang tergolong tinggi. Sementara itu, ancaman dan potensi bencana sosial yang terjadi di wilayah Kota Bandung, seperti maraknya kasus LGBT, kekerasan pada anak dan pornografi, merupakan hal yang perlu diwaspadai.
- 4) Adanya pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap menurunnya kegiatan perekonomian masyarakat, serta berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran, yang menyebabkan bertambahnya jumlah warga miskin baru.
- 5) Pandemi Covid-19 juga mengakibatkan pada merenggangnya interaksi sosial antar masyarakat, hal tersebut dipicu karena adanya penerapan *social distancing* dan pembatasan kegiatan masyarakat untuk beraktifitas dari rumah.
- 6) Belum adanya rumusan kebijakan kualitas penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar bagi mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar. Kerawanan sosial ekonomi, ketunasusilaan, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta kerentanan sosial masyarakat, merupakan potensi penyandang PPKS.

4.1.4. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

a. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan pada urusan tenaga kerja di Kota Bandung, antara lain:

- 1) Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi, dengan nilai 8,16% pada tahun 2019, hal tersebut merupakan dampak pandemi Covid-19, banyaknya kegiatan perekonomian yang aktifitasnya berkurang dan berhenti menyebabkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, data dari Disnaker menunjukkan selama Pandemi Covid-19 sebanyak 9.200 orang kehilangan pekerjaannya.

- 2) Meningkatnya Jumlah Pengangguran di Kota Bandung, dimana pada tahun 2018 jumlah pengangguran hanya mencapai 96.465 orang, namun mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 105.067 orang, atau sebesar 8,91%.
- 3) Terjadinya *missmatch* dan *share* sektor jasa berproduktivitas rendah
Menurut data CEDS FE Unpad, 36,08% pekerja mengalami *over education* (kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi dari kebutuhan pekerjaan), dan 27,11% mengalami *under education* (kualifikasi pendidikan yang lebih rendah dari kebutuhan pekerjaan). Konsekuensi dari *missmatch* adalah menurunnya produktivitas pekerja dan karir yang terhambat. Sementara itu, *share* dari sektor jasa meningkat dan menyerap tenaga kerja, namun bukan merupakan jasa produktif, sehingga tidak berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
- 4) Lapangan kerja belum mampu menyerap angkatan kerja dengan kualifikasi pendidikan belum setara SMA (RLS = 10,73 atau setara kelas 1 SMA).
- 5) Belum optimalnya peran serta perusahaan dalam mengatasi tenaga kerja berkualitas, dan masih belum optimalnya perusahaan untuk melaporkan lowongan dan penempatan tenaga kerja.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bandung, diantaranya adalah:

- 1) Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam ruang publik.
- 2) Masi tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bandung.
- 3) Belum optimalnya pemenuhan hak anak jika dilihat dari indikator kelurahan layak anak yang sudah terbentuk.

c. Urusan Pangan

Permasalahan pada urusan pangan Kota Bandung, diantaranya adalah:

- 1) Menurunnya Ketersediaan pangan utama
Pada tahun 2015 ketersediaan pangan utama mencapai 197,17 kg/kapita/tahun, mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 197,05 kg/kapita/tahun.
- 2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Penilaian jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan suatu daerah dilakukan dengan menggunakan metode yang dinamakan PPH. PPH digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Penghitungan skor PPH dimaksudkan untuk menganalisis pola konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal (Pola Pangan Harapan). Berdasarkan Hasil Analisis Konsumsi Pangan pada tahun 2013-2018, kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Bandung yang ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan, sudah cukup baik meskipun belum mencapai kondisi ideal. Pada tahun 2017 ketersediaan pangan di Kota Bandung sudah cukup beragam. Hal ini dapat dilihat dari jenis pangan yang sudah mencapai skor maksimum, diantaranya umbi-umbian (2,50), pangan hewani (24,00), minyak dan lemak (5,00), serta sayur dan buah (30,00), sedangkan kelompok pangan yang belum mencapai skor maksimum selama empat tahun terakhir adalah buah/biji berminyak, kacang-kacangan, dan gula.

- 3) **Penguatan Cadangan Pangan Ekuivalen Beras**
Cadangan pangan pemerintah daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk menanggulangi kekurangan pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau menghadapi keadaan darurat. Pemerintah kota dalam rangka penguatan cadangan pangan diharuskan menyediakan pangan kota ekuivalen beras minimal 80 ton setiap tahunnya. Realisasi capaian indikator kinerja tahun 2019 adalah sebanyak 103,045 ton meningkat drastis dari realisasi tahun 2014 sebanyak 26,7 ton. Namun demikian yang masih menjadi permasalahan adalah informasi distribusi bahan pangan (beras) yang belum merata atau diketahui oleh banyak pihak.
- 4) **Jumlah Maksimum Pangan Segar yang Tercemar**
Pada tahun 2018, jumlah maksimum pangan segar yang tercemar merupakan indikator baru pada urusan pangan. Ada 2 program yang mendukung target sasaran ini, yaitu Program Peningkatan Keamanan Pangan Hasil Pertanian dan Program Peningkatan Keamanan Pangan Hasil Perikanan. Target pada tahun 2018 sebanyak 35 kasus dan sampai dengan triwulan 1 tahun 2018 ditemukan 1 kasus pangan segar yang tercemar yaitu pada ikan yang mengandung bahan kimia berbahaya (formalin).
- 5) **Kota Bandung bukan Produsen Pangan**
84,18% kebutuhan pangan di Kota Bandung dari sisi energi disediakan dari wilayah lain (Penyusunan NBM (Neraca Bahan Makanan) 2017), karena Kota Bandung bukan merupakan daerah produksi pangan. Oleh sebab itu diperlukan pengawasan pangan segar yang lebih intensif. Selain itu, diperlukan adanya upaya peningkatan kemandirian pangan masyarakat dengan menanam bahan pangan menggunakan media hidroponik untuk menyalahi keterbatasan lahan.
- 6) **Pelaku usaha dan masyarakat masih kurang memahami tentang tata cara penanganan dan penyimpanan produk pangan segar, serta pengetahuan tentang resiko dari penggunaan bahan kimia berbahaya.**
- 7) **Terbatasnya SDM pengawas mutu pangan segar terutama petugas laboratorium yang memiliki pendidikan khusus (analisis kimia).**

d. Urusan Pertanahan

Permasalahan pada urusan pertanahan, diantaranya:

- 1) **Penurunan persentase luas lahan bersertifikat, pada tahun 2015 sebesar 15,45%, turun menjadi 14,75% pada tahun 2017.**
- 2) **Belum optimalnya inventarisasi data aset, dimana belum tercapainya perencanaan dari pemanfaatan dan penggunaan tanah, target 39 M, sementara baru tercapai 26,272.**
- 3) **Tingginya tuntutan BPK untuk standarisasi aset di Kota Bandung.**
- 4) **Harga sewa tanah milik pemerintah di bawah standar harga pasar, sehingga belum mendukung PAD.**
- 5) **Masih banyaknya lahan pemerintah Kota Bandung yang belum tersertifikasi bahkan sebagian digunakan secara informal oleh masyarakat, hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari DPKP3 pada Kajian Bappelitbang (2017) "Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan Milik Pemerintah Kota Bandung". Jumlah tanah milik pemerintah Kota Bandung sebanyak 11.553 bidang, yang sudah bersertifikat sebanyak 8.378 bidang dan yang belum bersertifikat sebanyak 3.175 bidang.**

e. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan terkait lingkungan hidup dan persampahan di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1) Menurunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pada tahun 2020, terjadi penurunan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 1,32 poin dari 45,22 poin (tahun 2019) menjadi 43,90 poin (tahun 2020).

2) Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Kota Bandung diukur berdasarkan penilaian terhadap kualitas air dan udara. Penilaian terhadap kualitas air dilihat dari tingkat pencemaran sungai yang terjadi di Kota Bandung. Indikator jumlah sungai utama yang kualitas airnya memenuhi baku mutu sungai kelas IV pada tahun 2017 terealisasi sebanyak 2 sungai. Baku mutu air permukaan yang saat ini berlaku adalah baku mutu yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Baku mutu kelas IV ini merupakan kualitas air permukaan paling rendah yang peruntukannya hanya bisa digunakan untuk mengairi tanaman. Klasifikasi mutu air di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas, yaitu:

- a. kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- b. kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- c. kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- d. kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Sungai utama di Kota Bandung adalah sebanyak 46 sungai dan saat ini kondisi kualitas airnya sangat buruk akibat pencemaran limbah padat, limbah cair domestik, limbah cair sejenis domestik dan limbah cair non domestik. Perbaikan pada kualitas air sungai akan menunjukkan efektifitas pengendalian pencemaran sehingga dari realisasi 2 sungai yang kualitasnya masih memenuhi baku mutu kelas IV menunjukkan bahwa proses pengendalian pencemaran belum berjalan dengan efektif.

Untuk menentukan tingkat kualitas udara perkotaan, dilakukan dengan cara mengukur kualitas udara pada beberapa titik pantau, yaitu pada daerah yang diperkirakan menerima dampak polusi udara paling buruk seperti wilayah yang terpapar polusi transportasi dan aktivitas industri. Sebagai pembanding, pengukuran dilakukan pula pada pemukiman yang diperkirakan tingkat polusinya rendah. Dari hasil pengukuran sejak tahun 2014 hingga tahun 2017, kondisinya masih memenuhi baku mutu kualitas udara ambien. Meskipun tidak dapat dijadikan acuan untuk menyimpulkan kondisi udara Kota Bandung secara keseluruhan, kualitas udara pada wilayah-wilayah yang diperkirakan kondisinya paling buruk, ternyata kualitasnya masih lebih baik, sehingga memberikan harapan bahwa hal yang sama terjadi juga diseluruh

wilayah Kota Bandung. Metode pengukuran yang dilakukan adalah metode pengukuran sesaat yang dilakukan 1 kali dalam setahun sehingga dari segi periode waktu, hasil pengukuran dianggap tidak dapat mewakili kualitas udara Kota Bandung secara keseluruhan.

Untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kualitas udara Kota Bandung dengan lebih baik, maka pada tahun 2016 diadakan alat *Air Quality Monitoring System* (AQMS). Alat ini berupa stasiun pengukuran yang akan mengukur kualitas udara secara terus menerus selama 24 jam sepanjang tahun. Dengan alat ini, diharapkan dapat diketahui kondisi udara Kota Bandung dengan lebih baik. Meskipun demikian, stasiun pemantauan udara baru tersedia sebanyak 4 unit dan ditempatkan pada wilayah yang mewakili kategori pemukiman, wilayah yang terpapar polusi transportasi, dan wilayah yang terpapar polusi industri. Untuk mendapatkan gambaran kondisi udara yang lebih baik, diharapkan stasiun pemantau udara ini dapat bertambah jumlahnya. Berdasarkan data kualitas udara hasil pemantauan pada 20 titik pantau yang ditempatkan di seluruh Kota Bandung, terdapat 13 titik yang memenuhi target baku mutu udara ambien.

3) Pelayanan Pengelolaan Sampah

Masalah utama yang dihadapi Kota Bandung adalah belum tersedianya fasilitas Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS). TPPAS yang digunakan saat ini merupakan TPA yang bersifat sementara dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang usia pakainya akan segera berakhir. Dengan pola pengelolaan sampah Kota Bandung yang masih bertumpu pada pola Kumpul – Angkut – Buang, maka permasalahan TPA ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari apabila tidak segera diantisipasi. Oleh karena itu perubahan pola pengelolaan mutlak diperlukan, dari Kumpul – Angkut – Buang menjadi diselesaikan di sumber sampah, diantaranya dengan mengintensifkan pola pengelolaan sampah secara 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*).

Berdasarkan hasil Kajian Kinerja Pengelolaan Sampah secara 3R yang dilakukan pada tahun 2017, diperoleh informasi bahwa pengelolaan sampah secara 3R yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah sudah mencapai 14,32% dari total timbulan sampah per harinya atau sekitar 214,6 ton/hari. Jumlah tersebut didapat melalui pelaksanaan Kawasan Bebas Sampah oleh masyarakat yang didukung oleh pemerintah melalui pemberian sarana pengolahan sampah di sumber seperti biopori, komposter, takakura, bata terawang, dan biodigester. Di sisi lain, pengurangan produksi sampah didorong melalui kebijakan pelarangan penggunaan *styrofoam* dan anjuran membawa *tumbler* dan tempat bekal ke sekolah. Salah satu keterlibatan yang tidak kalah penting adalah sektor informal, seperti pemulung – tukang rongsok – bandar rongsok yang memiliki peran sangat besar dalam proses pemilahan dan pengambilan sampah potensi daur ulang.

Masalah bersama yang dihadapi Kota Bandung dan kabupaten/kota lain di Jawa Barat adalah TPPAS Regional Sarimukti hanya mampu melayani suplai sampah hingga tahun 2022-2023. Oleh sebab itu TPPAS Regional direncanakan akan berpindah ke TPPAS Legok Nangka yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai upaya mengimplementasikan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka melalui skema KPBU. Proyek ini dilaksanakan oleh Pemprov Jabar sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dan memilih teknologi *Waste to Energy - Moving Grate Incineration*, sementara menurut Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik. Berdasarkan draft Perjanjian

Kerja Sama yang akan ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat dan setiap bupati/walikota kabupaten/kota setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD masing-masing, Kota Bandung direncanakan akan mengirimkan sampahnya sebesar 1.200-1303 ton/hari. Penggunaan teknologi *Waste to Energy* secara thermal memerlukan biaya yang besar sehingga beban *tipping fee* akan meningkat hingga 6 sampai dengan 8 kali lipat dari besaran *tipping fee* saat ini. Sebagai konsekuensi dari lonjakan biaya *tipping fee* tersebut akan sangat mempengaruhi belanja keuangan daerah.

Permasalahan pelayanan pengelolaan sampah lainnya adalah terkait implementasi dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Sampah. Berdasarkan Perda tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kota bertugas menjamin terselenggaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Di dalam pengelolaan sampah tersebut, Pemerintah Daerah Kota dapat menyelenggarakannya melalui:

- a) pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
- b) pendelegasian sebagian kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah kepada Kecamatan; dan/atau
- c) bekerjasama dengan perorangan dan/atau Badan Usaha.

Berdasarkan ketentuan perda tersebut, dalam pasal 32 dinyatakan bahwa apabila Pemerintah Daerah Kota belum dapat membentuk UPT atau mendelegasikan kewenangan kepada Kecamatan maka khusus pelaksanaan pengumpulan sampah dan pengangkutan sampah dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. Lebih lanjut dalam pasal 60 (ketentuan peralihan) dinyatakan bahwa terkait pengumpulan sampah, waktu yang ditetapkan untuk melakukan peralihan paling lama adalah selama 2 (dua) tahun dan untuk pengangkutan, paling lama adalah 3 (tiga) tahun.

Dari ketentuan peralihan yang ditetapkan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 tanggung jawab pengumpulan sampah menjadi tanggung jawab DLHK, sedangkan untuk pengangkutan sampah akan beralih pada tahun 2021. Konsekuensi dari implementasi perda tersebut adalah perlunya mempersiapkan sarana prasarana terkait peralihan tanggung jawab yang meliputi kesiapan pembiayaan pelaksana teknis penyapuan dan pengangkutan, penyediaan armada pengangkutan sampah dan penyediaan sarana pusat daur ulang, serta tempat pengumpulan sampah, juga diperlukan adanya perubahan struktur organisasi pada DLHK agar memungkinkan proses transformasi ini terjadi.

f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kota Bandung, diantaranya adalah:

- 1) Masih adanya warga yang belum memiliki e-KTP.
- 2) Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam hal tertib administrasi kependudukan.
- 3) Arus migrasi yang begitu tinggi ke Kota Bandung baik itu untuk bekerja maupun untuk sekolah, menjadi kendala dalam pendataan administrasi kependudukan.
- 4) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan baik secara teknis maupun non teknis.

- 5) Belum optimalnya *data base* kependudukan.
- 6) Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam pengelolaan data kependudukan.

g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pada urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung, antara lain:

- 1) Belum terdapatnya formulasi pengukuran untuk perhitungan tingkat partisipasi masyarakat (kuantitatif).
- 2) Belum tersedianya perda/perwal tentang partisipasi masyarakat secara kuantitatif.
- 3) Tidak semua partisipasi pemberdayaan masyarakat dapat tercatat.
- 4) Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong dalam bentuk interaksi secara langsung pada masyarakat desa dan perkotaan yang diindikasikan oleh mulai berubahnya bentuk partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan;
- 5) Belum optimalnya penganggaran CSR dan *crowdfunding* untuk memberikan alternatif metode penganggaran pada program-program yang mendukung pembangunan di kewilayahan.

h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kuantitas penduduk berpengaruh langsung terhadap kepadatan penduduk. Angka kepadatan penduduk menjadi dasar bagi pengelola pembangunan untuk menetapkan daya tampung wilayah, jumlah rumah hunian, tingkat kualitas lingkungan, jumlah sekolah (termasuk guru dan fasilitas infrastrukturnya), jumlah layanan kesehatan, jumlah pasokan bahan makanan pokok dan kemampuan wilayah dalam mensuplai pangan dari hasil pertaniannya.

Bandung sebagai kota metropolitan sekaligus Ibu Kota Provinsi Jawa Barat dengan jarak terdekat ke Ibu Kota Negara, memiliki daya tarik yang sangat tinggi bagi pendatang. Hal ini menjadi masalah kependudukan yang krusial. Dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Kota Bandung belum memiliki data dan informasi penduduk dan keluarga sebagai sumber pendataan dan pengendalian program KKBPK. Data tersebut dibutuhkan untuk mengukur ketercapaian target program KB, seperti laju pertumbuhan penduduk dan *total fertility rate* Kota Bandung.

i. Urusan Perhubungan

Permasalahan transportasi di Kota Bandung banyak berkaitan dengan masalah kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi (pasar, pedagang kaki lima, pusat perbelanjaan, dan lain-lain), ruas jalan yang sempit, dan persimpangan. Titik kemacetan tersebut akan bertambah pada jam sibuk dan pada hari libur. Isu dan permasalahan lainnya yaitu mengenai kenyamanan dan keamanan berlalu lintas, baik bagi penumpang yang menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Permasalahan juga disebabkan oleh ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi, seperti jalan raya, jalan tol, rel kereta api, terminal angkutan umum, bandara, stasiun kereta api, dan sebagainya.

Titik kemacetan yang teridentifikasi tahun 2020 berada pada 115 ruas jalan yang tersebar di Kota Bandung. Titik kemacetan yang telah teratasi sebanyak 87 ruas jalan atau sebesar 75,65% dalam kategori tidak macet dan belum teratasi sebanyak 28 ruas jalan atau sebesar 24,35% dalam kategori macet. Adapun 12 aspek penyebab kemacetan yang telah diidentifikasi meliputi parkir

pada badan jalan, pasar tumpah, PKL, jalur perlintasan sebidang, genangan/banjir, kualitas/kondisi infrastruktur jalan, volume penggunaan kendaraan pribadi tidak sebanding dengan penambahan aksesibilitas maupun dimensi jalan, terpusatnya kegiatan pada pusat kota, keluar masuk kendaraan pada fasilitas pendidikan, disiplin pengemudi angkutan umum, marka jalan dan rambu lalu lintas, dan kesadaran masyarakat.

Beberapa strategi penanganan permasalahan transportasi di Kota Bandung, antara lain:

- 1) Manajemen lalu lintas jalan
 - a) Pengaturan lalu lintas jalan: *Area Traffic Control System* (ATCS) perlu direvitalisasi untuk optimalisasi pengaturan lalu lintas.
 - b) *Fly over/underpass* belum terbangun seluruhnya di persimpangan sebidang dengan kereta api serta pada persimpangan jalan yang padat. Selain itu, desain jalan dan persimpangan serta pedestrian yang belum memenuhi prinsip-prinsip jalan yang berkeselamatan (*road safety*) pun harus menjadi perhatian.
 - c) Jaringan jalan primer masih terganggu oleh lalu lintas *commuter* dan perkotaan
 - d) Ruas jalan yang belum memenuhi persyaratan teknis fungsi jalan, dari sisi lebar maupun pengaturan aksesnya
 - e) Penyediaan perlengkapan jalan: penyediaan rambu, marka dan PJU belum terpenuhi seluruhnya.
 - f) Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan *non-motorized* belum tersedia dengan baik.
- 2) Pelayanan angkutan umum
 - a) Jaringan trayek angkutan umum:
Peran moda angkutan umum relatif terbatas. Belum ada pengaturan hirarki jaringan angkutan dengan baik. Sistem angkutan massal belum mampu berperan maksimal.
 - b) Angkutan tidak dalam trayek:
peningkatan efektivitas pengaturan angkutan berbasis *on-line*, taksi, ojek, dan antar jemput.
 - c) Tingkat pelayanan angkutan umum:
biaya dan waktu penggunaan angkutan umum tidak dapat bersaing dengan moda lain (khususnya sepeda motor), kenyamanan dan keselamatan menggunakan angkutan umum masih rendah.
 - d) Integrasi antar moda:
penyediaan fasilitas alih moda di simpul masih terbatas, serta biaya moda pra/purna angkutan sangat mahal. Selain itu juga belum didukung oleh sistem tiketing yang terintegrasi (*integrated-ticketing*).

j. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pada urusan komunikasi dan informatika meliputi:

- 1) Belum optimalnya pengembangan dan integrasi aplikasi, sehingga masih menjadi tantangan ke depan untuk dapat mengintegrasikan semua aplikasi yang ada untuk menuju *smart city* level "*smart*".

- 2) Kurangnya keterlibatan/peran perguruan tinggi dan relawan TIK. Sampai saat ini terdapat 16 orang yang terlibat baik dari perguruan tinggi maupun relawan TIK. Idealnya pada satu kecamatan terdapat satu relawan TIK.
- 3) Level kematangan *smart city* di Kota Bandung berdasarkan hasil survei Tim Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) bersama ITB pada tahun 2019 berada pada kategori integratif dengan nilai 63,14%. Capaian ini perlu ditingkatkan ke level *smart*. Pemanfaatan ICT (*Information and Communication Technology*) atau yang lebih dikenal dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dan menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia. Manfaat TIK diantaranya dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas suatu aktifitas kegiatan melalui jaringan internet, basis data, aplikasi, bahkan sistem informasi terhubung satu sama lainnya membentuk jaringan yang jauh lebih kompleks. Beberapa contoh sistem informasi layanan publik yang dibangun dengan basis internet, diantaranya *e-Gov*, *e-Health*, *e-Learning*. Namun demikian, pemanfaatan dari TIK belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah basis data dan aplikasi dibangun menggunakan *platform* sistem informasi dan data yang berbeda-beda. Akibatnya suatu basis data atau sistem informasi belum tentu dapat saling terhubung untuk melayani suatu kegiatan yang sifatnya terpadu.
- 4) Belum optimalnya sosialisasi informasi program pemerintah, dan masih banyaknya informasi yang menyesatkan (*hoax*) karena masih rendahnya budaya literasi di masyarakat.

k. Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)

Permasalahan yang diidentifikasi dalam bidang Koperasi dan UKM adalah:

- 1) Data koperasi kurang akurat.
Sampai dengan 2017 tercatat ada 2.212 koperasi aktif yang disebabkan belum dilakukan rekonsiliasi data dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi di mana sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keanggotaan Koperasi tidak dibatasi oleh kewilayahan sehingga Koperasi yang anggotanya berada di luar wilayah domisili koperasi masih tercatat sebagai koperasi Kota Bandung. Tahun 2019 dengan adanya program reformasi total Koperasi dari Kementerian Koperasi dan UKM RI yang lebih mengedepankan kualitas, setelah dilakukan pendataan ulang koperasi hanya terdata sebanyak 735 koperasi yang aktif, dan hal ini telah di input ke dalam Online Database System (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- 2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola koperasi yang masih rendah. Jumlah pengelola koperasi yang bersertifikat dari lembaga sertifikasi profesi sampai dengan tahun 2020 sebanyak 10,89% dari jumlah pengelola koperasi.
- 3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat Kota Bandung untuk menjadi anggota koperasi. Jumlah penduduk yang telah berkoperasi sampai dengan tahun 2020 sebanyak 8,28%.
- 4) Rendahnya akses pemasaran pelaku usaha mikro.
Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran sampai dengan tahun 2020 sebanyak 7,27% dari jumlah pelaku usaha mikro.

- 5) Rendahnya akses permodalan pelaku usaha mikro.
- 6) Lemahnya daya saing produk pelaku usaha mikro.
Jumlah pelaku usaha mikro yang berdaya saing sampai dengan tahun 2020 sebanyak 6,46% dari jumlah usaha mikro.
- 7) Rendahnya konektivitas terhadap ekosistem digital
Jumlah pelaku usaha mikro yang sudah terkoneksi dengan ekosistem digital sampai dengan tahun 2020 sebanyak 3,53% dari jumlah usaha mikro.
- 8) Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha mikro.
Jumlah SDM pelaku usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 8,94% dari jumlah Usaha Mikro

I. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan utama pada urusan penanaman modal di Kota Bandung, adalah menurunnya jumlah investor PMA. Pada tahun 2016 sebanyak 212 investor mengalami penurunan menjadi 200 investor di tahun 2017.

Terbitnya regulasi perizinan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang *Online Single Submission* (OSS) yang mengharuskan pemerintah kab/kota melakukan penyesuaian Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) perizinan, yang menyebabkan nilai investasi tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

m. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pada urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Bandung, diantaranya:

- 1) Belum optimalnya peran dan aktivitas kepemudaan di Kota Bandung dalam pembangunan.
- 2) Belum maksimalnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan.
- 3) Belum maksimalnya kerja sama pemanfaatan SOR/GOR oleh swasta/badan usaha.

n. Urusan Statistik

Permasalahan pada urusan statistik di Kota Bandung, meliputi:

- 1) Belum optimalnya ketersediaan, akurasi, dan validitas data. Ketersediaan data sebagai aset yang valid, kontinyu dan terstruktur sangat berguna sebagai landasan dalam menyusun rancangan program-program pembangunan.
- 2) Belum optimalnya pengelolaan data dan pemanfaatan teknologi informasi.
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi masih terbatas (sektoral), sehingga berbagi pakai data belum optimal.
- 4) Belum terbentuknya kelembagaan satu data Kota Bandung.

o. Urusan Persandian

Permasalahan pada urusan persandian di Kota Bandung, diantaranya:

- 1) Masih rendahnya cakupan aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis *e-government*, yaitu hanya sebesar 36,65% di tahun 2019
- 2) Kesadaran yang rendah akan pemahaman aplikasi dan pengamanan data/informasi.
- 3) Belum optimalnya keamanan sistem informasi.

p. Urusan Kebudayaan

Permasalahan pada urusan kebudayaan di Kota Bandung, diantaranya adalah:

1. Menurunnya jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.
2. Pemajuan kebudayaan di Kota Bandung belum dilakukan secara terpadu. Pembangunan kebudayaan belum mengarah pada proses pelestarian yang terpadu, yakni perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.
3. Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku seni dalam pemanfaatan budaya. Pada tahun 2017, terdapat 105 lingkung seni yang memenuhi standar usaha sanggar/lingkung seni di Kota Bandung. Namun, upaya pemanfaatan budaya selama ini baru sebatas perlindungan saja belum dikembangkan lebih luas.

q. Urusan Perpustakaan

Permasalahan pada urusan perpustakaan di Kota Bandung, meliputi:

- 1) Layanan peningkatan minat baca masyarakat belum berjalan dengan baik, sehingga minat baca masyarakat masih tergolong rendah.
- 2) Belum memadainya kualifikasi dan kompetensi pengelola perpustakaan/pustakawan di Kota Bandung. Saat ini jumlah pustakawan yang sudah memenuhi kualifikasi adalah sejumlah 2 orang.

r. Urusan Kearsipan

Permasalahan pada urusan kearsipan di Kota Bandung, sebagai berikut:

- 1) Belum seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung melaksanakan pengelolaan kearsipan sesuai standar.
- 2) Masih kurangnya arsiparis yang melakukan pengelolaan kearsipan.
- 3) Belum optimalnya dukungan TIK dalam pengelolaan kearsipan baik perangkat daerah maupun tingkat kota.
- 4) Belum tersedianya depo/tempat penyimpanan arsip yang memadai.

4.1.5. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan utama pada urusan kelautan dan perikanan di Kota Bandung, adalah cenderung menurunnya produksi perikanan. Beberapa hal yang menyebabkan kondisi ini, yaitu:

- 1) Terbatasnya lahan perikanan.
- 2) Skala usaha masih kecil.
- 3) Belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana budidaya perikanan.
- 4) Belum optimalnya penguasaan teknologi pengelolaan dan pengolahan perikanan.
- 5) Belum memadainya sumber daya manusia (SDM) perikanan.
- 6) Belum optimalnya sarana pemasaran dan pengolahan hasil perikanan.

b. Urusan Pariwisata

Permasalahan pokok pada urusan pariwisata di Kota Bandung berdasarkan data sampai dengan 2020 adalah menurunnya PAD sektor pariwisata. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah yaitu menurunnya kunjungan wisata ke Kota Bandung; diferensiasi paket wisata yang memenuhi aspek 3A (*Amenity, Attraction, dan Accessibility*) masih terbatas; dan kurangnya promosi pariwisata. Kondisi ini semakin memburuk dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020.

c. Urusan Pertanian

Permasalahan pokok pada urusan pertanian di Kota Bandung adalah menurunnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB. Dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami tren penurunan, pada tahun 2016 dan 2017 turun 0,01% menjadi sebesar 0,12% dan 2018 turun menjadi 0,11% kemudian pada tahun 2019 dan 2020 berkurang menjadi 0,10%. Penyebab utama masalah pokok ini adalah terbatasnya lahan pertanian, sehingga perlunya pengembangan pertanian dilahan sempit berbasis inovasi teknologi dan tepat guna.

d. Urusan Perdagangan

Permasalahan pokok pada urusan perdagangan di Kota Bandung adalah menurunnya ekspor bersih perdagangan, terlebih setelah pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia. Penurunan ekspor bersih perdagangan disebabkan adanya penurunan permintaan pasar. Penurunan permintaan ini bila ditelaah lebih lanjut, maka dapat diidentifikasi beberapa akar masalahnya, sebagai berikut:

- 1) Bahan baku terbatas menyebabkan dilakukan impor bahan baku yang menyebabkan harga jual lebih tinggi.
- 2) Kapasitas produksi terbatas karena kurangnya penunjang mesin produksi dan kemampuan SDM dengan berbagai permintaan desain produk dari pihak pembeli.
- 3) Naiknya upah buruh, listrik dan bahan bakar.
- 4) Faktor eksternal yang teridentifikasi antara lain lesunya perekonomian global dan jatuhnya harga komoditas. Lesunya perekonomian global menyebabkan transaksi perdagangan dunia menurun.

e. Urusan Perindustrian

Permasalahan pada urusan perindustrian di Kota Bandung adalah makin mengecilnya kontribusi industri pengolahan pada perekonomian Kota Bandung terutama akibat semakin tingginya tingkat persaingan secara nasional ataupun global yang mempengaruhi penurunan kinerja industri pengolahan lokal Kota Bandung. Kondisi ini terutama ditemui di sektor padat karya, seperti tekstil dan produk tekstil. Selain itu, adanya tekanan eksternal, seperti adanya kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN *China Free Trade Area* (ACFTA) juga turut menekan kinerja industri pengolahan Kota Bandung.

Akar permasalahan pada urusan perindustrian di Kota Bandung diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tingginya harga bahan baku produksi usaha industri.
- 2) Terbatasnya akses permodalan bagi para pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM).
- 3) Rendahnya daya saing produk, pemasaran dan kualitas produk usaha IKM.
- 4) Terbatasnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan produk.

4.1.6. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Permasalahan urusan penunjang terkait tata kelola pemerintahan di Kota Bandung, diantaranya:

- 1) Hasil pengukuran kinerja Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik (minimal 83,00) pada tahun 2019 terealisasi sebesar 40,00% atau sebanyak 24 dari 60 Perangkat Daerah. Bila diukur dari target tahun 2019 sebesar 60% maka capaian kinerjanya sebesar 66,67%. Capaian kinerja ini menurun 11,61% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 dimana persentase perangkat daerah yang memiliki nilai minimal 83,00 adalah sebesar 51,61%.

- 2) Kinerja penyelenggaraan pemerintah Kota Bandung dinilai antara lain melalui capaian nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), opini BPK terhadap laporan keuangan daerah, dan nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Adapun penjelasan masing-masing penilaian tersebut, sebagai berikut:
- a) Hasil evaluasi AKIP menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil. Capaian kinerja AKIP Kota Bandung pada tahun 2019 berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/622/AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019 adalah sebesar 78,00 atau kategori BB.
 - b) Nilai LPPD Kota Bandung pada tahun 2019 adalah sebesar 3.3019 dengan kategori "Sangat Tinggi", pada peringkat ke 11 (sebelas) nasional untuk kategori pemerintah daerah kota. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 terhadap LPPD 2016 dengan nilai 3.4110 pada peringkat 7 (tujuh) terdapat penurunan 0.1091 poin dan penurunan 4 (empat) peringkat.
 - c) Berdasarkan laporan BPK RI, bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2019 disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Bandung tanggal 31 Desember 2018 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Kemudian untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut. BPK RI juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas maka BPK RI menyampaikan hasil pemeriksaan dalam laporan Nomor 36B/LHP/XVIII.BDG/05/2019, 36B/LHP/XVIII.BDG/05/2019 dan Nomor 36C/LHP/XVIII.BDG/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

4.1.7. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

a. Perencanaan

Permasalahan pada unsur perencanaan di Pemerintah Daerah Kota Bandung, antara lain:

- 1) Adanya sistem aplikasi baru perencanaan dan penganggaran dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga memerlukan penyesuaian dalam proses serta tahapan perencanaan dan penganggaran.
- 2) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan.
- 3) Rumusan indikator kinerja pada Perangkat Daerah belum seluruhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, yakni *Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound* (SMART)

b. Keuangan

Permasalahan pada unsur keuangan di Pemerintah Daerah Kota Bandung, antara lain:

- 1) Dinamika perubahan peraturan perundang undangan yang menuntut adaptasi yang cepat baik dalam tataran regulasi maupun turunan dari regulasi.

- 2) Implementasi sistem aplikasi baru (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdapat dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)) dari Kementerian Dalam Negeri yang masih bergerak dinamis dan memerlukan adaptasi.
- 3) Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi pengelolaan dan kemampuan keuangan daerah.
- 4) Masih banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak, sehingga perlu untuk ditingkatkan sosialisasi dan kemudahan dalam membayar pajak.
- 5) Adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyaknya kegiatan ekonomi yang berhenti atau terbatas sehingga berakibat pada menurunnya PAD Kota Bandung.

c. Kepegawaian

Permasalahan pada unsur kepegawaian, antara lain:

- 1) Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
- 2) Belum tersusunnya standar kompetensi jabatan.
- 3) Pendistribusian pegawai yang belum optimal yang disebabkan belum selesainya analisa beban kerja dan analisa jabatan yang merupakan kewenangan PD lain.
- 4) Masih adanya PNS yang terlibat masalah hukum.
- 5) Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa PD.
- 6) Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang belum tepat waktu.
- 7) Masih adanya beberapa data pegawai yang belum akurat.

d. Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pada unsur pendidikan dan pelatihan, antara lain:

- 1) Belum optimalnya kompetensi ASN Kota Bandung dibandingkan dengan tuntutan kinerja yang semakin tinggi.
- 2) Belum terpenuhinya target jam diklat yang harus didapatkan oleh ASN.
- 3) Belum tersusunnya pola diklat yang terstandarisasi sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Bandung.

e. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan urusan penelitian dan pengembangan, antara lain:

- 1) Hasil Riset tidak sepenuhnya menjadi pijakan strategi pemerintahan.
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan konsep *evidence based policy*, yaitu kebijakan publik yang diinformasikan berdasarkan bukti objektif berdasarkan data yang valid dan akurat.
- 3) Belum optimalnya dukungan sumberdaya yang tepat untuk menempatkan lembaga riset/litbang sebagai pintu utama kajian strategis yang berkenaan dengan proses perencanaan pembangunan daerah, inovasi daerah, dan akselerasi kolaborasi dengan perguruan tinggi.

4.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu:

1. Permasalahan pembangunan Kota Bandung.
2. Dinamika internasional, nasional, dan provinsi yang mempengaruhi pembangunan Kota Bandung.
3. Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kota Bandung.
4. Isu strategis/kebijakan pembangunan Kota Bandung antara lain terdiri RPJPD dan RTRW Kota Bandung.
5. KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

4.2.1. PERTIMBANGAN PENENTUAN ISU STRATEGIS

Berbagai unsur yang menjadi pertimbangan dalam perumusan isu strategis daerah Kota Bandung untuk periode 2018-2023, diuraikan sebagai berikut:

4.2.1.1. TELAHAHAN ISU INTERNASIONAL

a. Penelaahan terhadap Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memiliki karakteristik utama sebagai berikut: (a) pasar tunggal dan basis produksi; (b) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; (c) kawasan pengembangan ekonomi yang merata; dan (d) kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global.

Dalam menghadapi MEA 2015, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan memberi perhatian khusus dalam meningkatkan daya saing, antara lain : a) Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009, b) Inpres No. 11/2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru masyarakat Ekonomi ASEAN, c) Keppres No. 23/2012 tentang susunan keanggotaan setnas ASEAN, d) program Pembangunan seperti MP3EI, e) Program Sislognas, f) Penyusunan Roadmap dan Inpres Daya saing, g) Policy Paper mengenai kesiapan Indonesia menghadapi AEC, h) dan pembentukan Komite Nasional AEC 2015, i) Unit Kerja Presiden di bidang Pengembangan dan Pengendalian pembangunan (UKP4) Monitoring Langkah Pemerintah.

Lebih lanjut mengenai pelaksanaan MEA 2015, telah dibuat komitmen yaitu Masyarakat ASEAN 2025. Masyarakat ASEAN 2025 telah resmi disahkan oleh Kepala Negara/Pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke- 27 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pengesahan tersebut dilakukan melalui penandatanganan *The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Community* dan *The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together* yang akan menjadi panduan ASEAN dalam meningkatkan kualitas integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun ke depan. Pendeklarasian ASEAN Community 2025 menjadi momen penting karena merupakan kelanjutan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku sejak 31 Desember 2015 lalu. ASEAN Community 2025 merupakan visi ASEAN 10 tahun ke depan. Masyarakat ASEAN 2025 meliputi ASEAN *Economic Community* (AEC) atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN Political-Security Community (APSC), dan ASEAN Socio-Culture Community (ASCC). Terdapat lima pilar dalam cetak-biru MEA 2025, yaitu: a. Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; b.

ASEAN yang kompetitif dan dinamis; c. Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; d. ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta e. ASEAN Global.

Memasuki era MEA, tentu menuntut kesiapan dari pemerintah Indonesia dan secara khusus daerah (provinsi/kabupaten/kota) baik sebagai pasar ataupun sebagai tempat berproduksi. Diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat berperan aktif dan mampu membaca peluang untuk tidak saja menjadi konsumen namun menjadi produsen. Sebab di sisi lain, Indonesia sangat membutuhkan pembukaan lapangan pekerjaan atau usaha.

4.2.1.2. TELAHAHAN ISU/KEBIJAKAN NASIONAL

a. Pandemi Covid-19

Sejak awal tahun 2020, terjadi bencana yang melanda dunia yaitu penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China menyebar ke hampir seluruh negara dan pada awal Maret 2020 terjadi kasus pertama di Indonesia. Sejak kasus pertama tersebut, virus ini telah dengan cepat menyebar keseluruh provinsi di Indonesia. Sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2021, tercatat sebanyak 1.298.608 terkonfirmasi positif Covid-19 dan dari data tersebut terdapat 158.604 kasus aktif. Jumlah yang sembuh adalah 1.104.990 orang dan meninggal sebanyak 35.014 orang yang tersebar di 34 provinsi (sumber: Pikobar, 23 Pebruari 2021). Dalam rangka menanggulangi wabah ini, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- c. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Coronavirus Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi;
- d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- e. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
- f. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;

- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil tahun Anggaran 2019 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- l. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- m. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19, maka dilakukan langkah-langkah antara lain membatasi interaksi antarmanusia. Pembatasan sosial (*social distancing*) dilakukan dalam bentuk pelarangan perjalanan (travel ban), penutupan sekolah, kantor, dan tempat ibadah. Berbagai langkah ini menyebabkan aktivitas ekonomi menurun drastis. Aktivitas ekonomi terganggu dari dua sisi sekaligus, baik dari sisi permintaan (*demand*) maupun dari sisi penawaran (*supply*). Tingkat konsumsi tertekan, tingkat produksi terkendala, rantai pasokan global terganggu. Semua ini berujung pada penurunan output global yang sangat besar. Ketika kondisi ini berlanjut, maka rambatan dampaknya juga berpotensi mengakibatkan gangguan stabilitas sistem keuangan. Kondisi ini dialami hampir seluruh negara yang terdampak pandemi Covid-19, tidak terkecuali Indonesia.

b. Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Apabila sebelumnya penyusunan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, maka Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Selanjutnya, dalam melaksanakan agenda pembangunan, maka ditetapkan beberapa sasaran makro dan target pembangunan untuk periode 2020-2024.

Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 disajikan pada Gambar 4.1 dan Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2020-2024 disajikan pada Gambar 4.2.

Gambar 4.1

Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024



Gambar 4.2

Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2020-2024



Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan.

Pada RPJMN 2020-2024 direncanakan 41 *Major Project* yang dirinci hingga proyek dengan target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, *Major Project* melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Masyarakat/Badan Usaha.

Dengan demikian telah ditetapkan dalam RPJMN lokasi prioritas pembangunan wilayah dan beberapa Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang diantaranya berlokasi di Kota Bandung. Agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional dalam Perencanaan Tahunan (RKP) harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah.

4.2.1.3. TELAAHAN ISU/KEBIJAKAN PROVINSI JAWA BARAT

Penelaahan terhadap Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2018-2023

Penelaahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 menguraikan kebijakan pembangunan di wilayah provinsi untuk periode 5 tahun.

Lima isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu: (1) Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia; (2) Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial; (3) Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; (4) Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; dan (5) Reformasi birokrasi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

- **Jabar Juara Lahir Batin:** pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin.
- **Inovasi:** pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.
- **Kolaborasi:** perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu:

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban. Konsep Jabar Juara secara “batin” sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif. Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Jawa Barat;
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah. Misi 3 dalam penjawaban visi Jabar Juara Lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan. Misi 4 membawa amanah yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Barat.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat 2018-2023, meliputi:

Religijs – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018- 2023. Terdapat 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD 2018-2023 terdiri dari:

- P1- Reformasi Sistem Kesehatan Daerah
- P2 - Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi
- P3 - Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan
- P4 - Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
- P5 - Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan
- P6 - Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Resiko Bencana
- P7 - Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah
- P8 - Gerakan Membangun Desa
- P9 - Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah
- P10 - Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- P11 - Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata

4.2.1.4. TELAAHAN ISU/KEBIJAKAN KOTA BANDUNG

a. Penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

1) Rencana Struktur Ruang

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a) perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- b) pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c) peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Untuk mendukung struktur ruang, rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 hirarki, yaitu:

- a) Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
- b) Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yang melayani Subwilayah Kota (SWK); dan
- c) Pusat Lingkungan (PL).

Sesuai Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031, arahan struktur ruang dibagi menjadi 8 (delapan) Subwilayah Kota (SWK) yang dilayani oleh 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8 (delapan) Subpusat Pelayanan Kota (SPK). Dalam RTRW Kota Bandung, PPK yang direncanakan terdiri dari PPK Alun-alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun berada di bagian barat yang melayani SWK Cibeunying, Karees, Bojonegara dan Tegalega, sedangkan PPK Gedebage bagian timur melayani SWK Arcamanik, Derwati, Kordon, dan Ujungberung.

Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/ rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi, tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya.

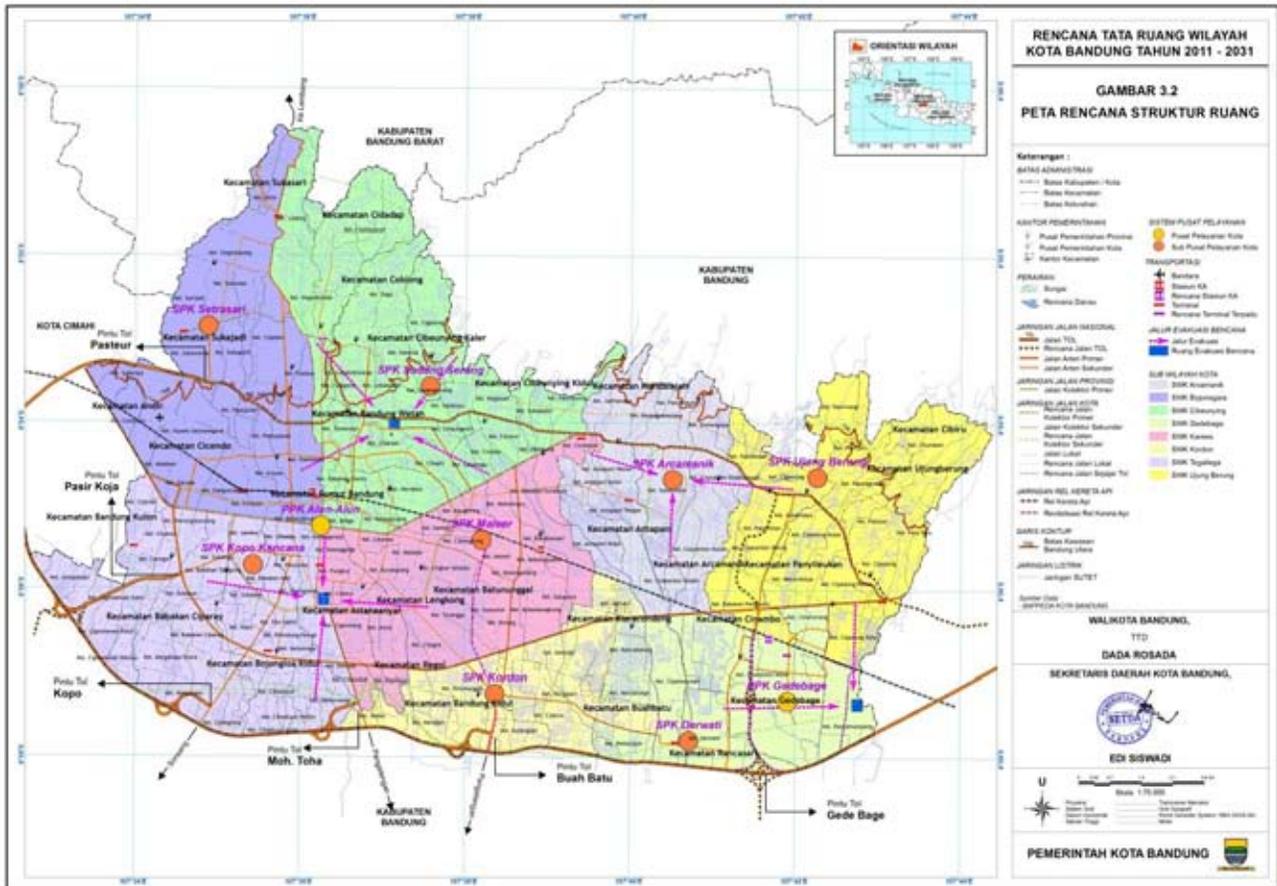
Untuk pengembangan SPK di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a) Subwilayah Kota Bojonegara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;
- b) Subwilayah Kota Cibeunying dengan Subpusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler;
- c) Subwilayah Kota Tegalega dengan Subpusat Pelayanan Kopo Kencana, meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar;
- d) Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkung, Kiaracandong, Batununggal;
- e) Subwilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani;
- f) Subwilayah Kota Ujungberung dengan Subpusat Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Cibiru, Ujungberung, Cinambo, Panyileukan;
- g) Subwilayah Kota Kordon dengan Subpusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah; dan
- h) Subwilayah Kota Gedebage dengan Subpusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, Rancasari.

SPK minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Kemudian Pusat Lingkungan terdiri dari pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan kelurahan. Secara lengkap, rencana struktur ruang Kota Bandung diuraikan dalam Gambar 4.3.

Gambar 4.3

Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung



Sumber: RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031

2) Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terdiri dari pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terdiri atas:

- perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung; dan
- optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya. Dalam rangka perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung di Kota Bandung, rencana yang dilakukan:

- menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;
- mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
- mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;

- f) melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural; dan
- g) meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

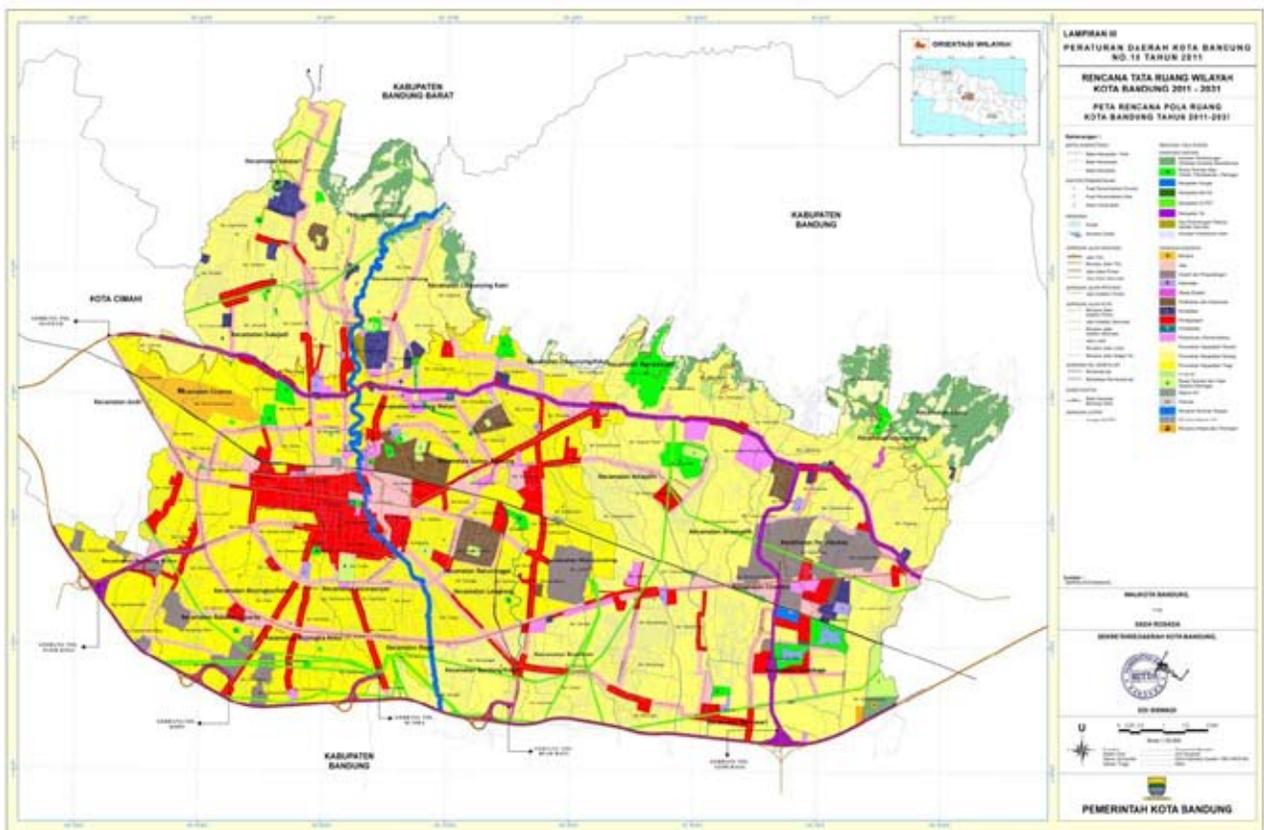
Kawasan budidaya terdiri dari atas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya. Dalam rangka pengembangan kawasan budidaya, rencana yang dilakukan meliputi:

- a) mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
- b) mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri atas SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage;
- c) mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees;
- d) membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;
- e) mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan
- f) menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya.

Secara lengkap, rencana pola ruang Kota Bandung diuraikan dalam Gambar 4.4.

Gambar 4.4

Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung



Sumber: RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031

b. Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan dalam RPJPD. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan RPJPD Kota Bandung 2005-2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD tersebut menjadi pedoman atau arahan penyusunan RPJMD, yaitu: Tahap I (2005-2008), Tahap II (2009-2013), Tahap III (2014-2018), Tahap IV (2019-2023), dan Tahap V (2024-2025).

Visi Daerah Kota Bandung pada Tahun 2025 adalah:

“KOTA BANDUNG BERMARTABAT” (*BANDUNG DIGNIFIED CITY*).

Kata “Bermartabat” tersebut yang juga merupakan bagian dari visi Kota Bandung terdahulu sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2004 yaitu “Kota Jasa yang BERMARTABAT”, masih relevan untuk dijadikan visi Kota Bandung Tahun 2005-2025 tetapi dengan pemaknaan yang lebih filosofis. Bermartabat disini merupakan kata secara harfiah, yang mempunyai arti harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena ketakwaan, kemakmuran, kebersihan, ketertiban, ketaatan, keamanan, dan berkeadilan. Jadi, kota bermartabat adalah kota yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan dan harkat kemanusiaan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2025 telah mengamanatkan target capaian pembangunan daerah Kota Bandung setiap 5 (lima) tahunan. RPJPD secara teknis telah menetapkan indikator berikut target yang harus dipenuhi pada setiap periode/tahapan. Hasil Telaahan RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 Periode Perencanaan Tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Hasil Telaahan RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 Periode Perencanaan Tahun 2018-2023

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
Misi 1 RPJPD Kota Bandung "Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Religius"						
1	Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	IPM	Poin	77,42	82,66	82,54
		Jumlah penduduk (maksimal)	Jiwa	Pertumbuhan penduduk 1,59%	Pertumbuhan penduduk < 0,50%	3.068.869
		Angka fertilitas	-	2,06	1,80	1,8
2	Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, kreatif dan kompetitif	Indeks pendidikan	Poin	89,06	94,04	93,92
		Rata-rata lama sekolah	tahun	10,34	12,38	12,33 tahun
		Sertifikasi guru	%	< 25,00	100,00	100%
		Lembaga pendidikan di Kota Bandung yang telah menerapkan SPM	%	25,00	100,00	100%
		Angka melek huruf	%	99,26	99,80	99,78 %
3	Terwujudnya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani	Indeks kesehatan	poin	79,27	82,16	81,87
		Angka harapan hidup	tahun	72,56	75,00	74,45
		Fasilitas kesehatan yang telah memenuhi SPM	%	70,00	100,00	90,00
		Angka kematian bayi	/1.000 kelahiran hidup	35,66	26,00	29,00
		Jumlah kematian ibu melahirkan	orang/tahun	14	10	11
		Pemaparan zoonosis di wilayah Kota Bandung	% di wilayah Kota Bandung	Terjadinya kasus positif flu burung di 3 kelurahan	< 5,00	< 9,00
4	Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia	Tingkat pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing- masing	-	Belum optimalnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing	Rendahnya tingkat pelanggaran terhadap norma-norma agama	Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan
		Tingkat Kerukunan umat beragama meliputi Kerukunan antar umat beragama, Kerukunan Inter Umat Beragama, Kerukunan Antara umat beragama dengan Pemerintah	-	Belum optimalnya sikap toleransi dan kerukunan umat beragama	Terpeliharanya sikap toleransi dan kerukunan umat beragama	Terwujudnya Sikap toleransi dan Kerukunan Umat Beragama

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
5	Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	Tingkat pemahaman peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan	-	Masih rendahnya peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan	Terwujudnya peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan	Terwujudnya pemahaman peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan
		Tingkat hak-hak perlindungan perempuan dan anak	-	Masih rendahnya hak-hak perlindungan perempuan dan anak	Terlindunginya hak-hak perlindungan perempuan dan anak	Terwujudnya hak-hak perlindungan perempuan dan anak
Misi 2 RPJPD Kota Bandung "Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing"						
1	Terwujudnya perekonomian kota yang tangguh, berdaya saing serta sehat dan berkeadilan	Laju pertumbuhan ekonomi	%	7,53	> 11,00	> 11,00 %
		Tingkat pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	%	13,34 (kategori sedang)	> 17,00 (kategori rendah)	≥ 17,00 % (kategori sedang)
		PDRB riil/kapita	Rp/thn	9.410.386	≥ 25.000.000	≥ 20.000.000
		Indeks daya beli	poin	63,93	71,77	70,66
		Tingkat inflasi umum	%	19,56	< 10,00	< 10,00
		Tingkat pengangguran terbuka	%	16,25	≤ 10,00	12,00
		Kesempatan kerja	%	84,32	≥ 95,00	≥ 92,00
		Nilai investasi berskala nasional	Rp	3.658.612.953.405	> 5.487.919.430.107 (meningkat > 50% dari 2005)	5.122.058.134.767 (meningkat 40 % dari 2005)
2	Terwujudnya Pariwisata yang berdaya saing	Jumlah wisatawan	orang	Wisnus: 1.928.850 Wisman: 91.350	Wisnus: ≥ 2.893.275 Wisman: ≥ 137.025)	Wisnus: ≥ 2.796.833 Wisman: ≥ 132.458 (meningkat 45% dari 2005)
3	Terwujudnya Kerjasama dan koordinasi yang menguntungkan dengan wilayah pemerintah Daerah lainnya	Sinergitas kegiatan ekonomi antar wilayah	-	Kerjasama antar daerah belum terealisasi secara optimal	Terwujudnya Kota Bandung sebagai pusat kegiatan pemasaran ekonomi di Priangan Timur	Meningkatnya kegiatan ekonomi antar daerah di Priangan Timur

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
Misi 3 RPJPD Kota Bandung "Mengembangkan Kehidupan Sosial Budaya Kota yang Kreatif, Berkesadaran Tinggi serta Berhati Nurani"						
1	Terwujudnya peningkatan mutu kerjasama di antara semua pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Bandung	akses informasi tentang pembangunan	-	Terbatasnya aksesibilitas warga terhadap informasi pembangunan; Belum tersedianya mekanisme peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi; Belum tersedianya modal sosial	Terlibatnya masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan proses Pembangunan	Meningkatnya Peran serta aktif masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan
		Tingkat kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik	-	Rendahny tingkat kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya rasa kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik
2	Terwujudnya multikulturalisme dalam lingkungan Sunda yang inklusif	Pengembangan pusat – pusat kebudayaan	-	Terbatasnya pusat-pusat kebudayaan	Terwujudnya pusat- pusat kebudayaan sebagai sarana pelestarian pembangunan budaya sunda	Meningkatnya peran pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian multikultur dalam Budaya Sunda
		Sinergitas pelestarian budaya lokal Sunda antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat	-	Kurangnya sinergitas pelestarian budaya lokal sunda antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat	Terwujudnya sinergitas pelestarian budaya lokal sunda antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat	Terpeliharanya hubungan pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian peninggalan budaya

IV - 52

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
Misi 4 RPJPD Kota Bandung "Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kota"						
1	Terwujudnya kualitas udara dan air memenuhi baku mutu	Lokasi sampel yang telah memenuhi BM kualitas udara	%	Kandungan SO ₂ dan NO _x di beberapa lokasi sampling melebihi baku mutu, sedangkan kandungan HC di semua lokasi sampling melebihi baku mutu	75,00	75% lokasi/sampel telah memenuhi BM
2	Terjamin dan tersedianya kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam)	Sungai dan anak sungai di Kota Bandung yang telah memenuhi baku mutu untuk parameter BOD dan COD	%	Kandungan BOD dan COD di seluruh sungai di Kota Bandung melebihi baku mutu	20,00	20 % sungai dan anak sungai yang ada di Kota Bandung untuk parameter BOD dan COD telah memenuhi baku mutu
		Kapasitas produksi air bersih dari sumber air baku	liter/detik	± 3.750	± 6.500	Pengembangan sumber air baku dengan kapasitas produksi sebesar ± 6.120 liter/detik
		Ruang terbuka hijau (RTH) kota yang efektif menunjang fungsi hidroorologi (dalam bentuk taman, hutan kota, sempadan sungai, kawasan konservasi dan RTH lainnya)	%	± 5,72% (1.084,41 ha)	≥ 30,00% (20% RTH publik dan 10% RTH privat)	Ruang terbuka Hijau Publik yang efektif menunjang fungsi hidroorologi sebanyak 29% (dalam bentuk taman, hutan kota, sempadan sungai, kawasan konservasi dan RTH lainnya)
3	Terwujudnya pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi	Reduksi dan Peningkatan pemanfaatan kembali limbah padat	-	80% sampah dapat dikelola, terdiri dari : 5% dengan 3R, dan 75% diangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA) (jumlah timbulan sampah 6.860 m ³ /hari)	90% sampah dapat dikelola, terdiri dari : 40% dengan 3R, dan 50% diangkut ke TPA	90% sampah dapat dikelola (35% reuse, reduce dan recycle, 55% ke pemrosesan akhir melalui pemanfaatan teknologi yang berawasan lingkungan dan ekonomis 35 % , dan Landfill 20 %).

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
4	Tersedianya Ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan	Terbentuk struktur ruang kota Pengendalian pemanfaatan ruang	- -	Terdapat 1 pusat primer (Alun-alun) dan 5 pusat wilayah pengembangan (WP) 45% bangunan tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB)	Terbentuknya 2 pusat primer (Alun-alun dan Gedebage) dan 6 wilayah pengembangan Tertibnya pemanfaatan ruang dan penggunaan bangunan	Minimum 80% Kawasan Pusat Primer Gedebage terbangun dan semua Pusat WP berfungsi efektif Terkendalinya pemanfaatan Ruang dan Penggunaan Bangunan
5	Tersedianya Sistem transportasi yang selamat, efisien, nyaman, terjangkau dan ramah lingkungan	Pengembangan (sistem) prasarana transportasi yang mendukung struktur ruang kota Indeks aksesibilitas	- km/km2 area	Luas jalan 2,32% dari luas wilayah kota, dan 72,10% berkondisi baik 5,575 (indeks mobilitas 0,435 km/1.000 penduduk)	Luas jalan minimum 5% dari luas wilayah kota ≥ 10	Luas jalan min 5 % dari wilayah kota dan 100% berkondisi baik Indeks aksesibilitas minimum 10 km/km2 area
6	Terwujudnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar teknis / standar pelayanan minimal	Terwujudnya prasarana SAUM sesuai dengan rencana induk transportasi umum kota Teratasinya aspek-aspek penyebab kemacetan (dari 32 aspek) Penduduk kota yang dilayani air bersih dengan pengaliran kontinu 24 jam Penataan sistem drainase Kota yang tertata	% aspek %	Pelayanan angkutan umum massal belum optimal Teridentifikasinya aspek-aspek penyebab kemacetan 53,00	100,00 32 90,00 (standar pengaliran air 120 liter/orang/hari)	75% dari rencana prasarana SAUM terbangun, sesuai dengan rencana induk transportasi kota Teratasinya Aspek-aspek penyebab kemacetan sebanyak 10 Aspek* 90% penduduk dilayani Air bersih dengan standar 120 liter/orang / hari dengan pengaliran air 24 jam Seluruh jaringan drainase kota terpadu

IV - 54 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
		Kawasan kota yang terlayani oleh sistem penanganan air limbah yang terpadu dengan IPAL	%	Belum terintegrasinya sistem air limbah kota dengan IPAL yang memadai	100,00 (IPAL terdesentralisasi)	100% kawasan kota terlayani oleh sistem penanganan air limbah yang terpadu dengan IPAL
7	Terwujudnya mitigasi Bencana yang handal	Peningkatan pengelolaan bencana	-	Fungsi organisasi yang menangani kebencanaan belum berjalan secara optimal	Terkendalinya bencana di Kota Bandung	Tertanggulangnya bencana secara dini dan komperhensif
Misi 5 RPJPD Kota Bandung "Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan"						
1	Terwujudnya Peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan yang aspiratif, antispatif, aplikatif, akuntabel dan berdasarkan data base	Tingkat kualitas aparatur perencana dan pengelola data	-	Perencanaan yang ada belum sepenuhnya aspiratif, antispatif, aplikatif, akuntabel dan berbasis data yang akurat; Belum tersedia database secara optimal yang dapat diakses dan diakses oleh instansi terkait	Terwujudnya perencanaan sesuai dengan aspirasi masyarakat, bersifat antispatif, aplikatif, akuntabel berdasarkan basis data yang akurat	Terwujudnya Perencanaan sesuai dengan aspirasi masyarakat, bersifat: antispatif, aplikatif, akuntabel berdasarkan basis data yang akurat.
2	Terwujudnya masyarakat dan aparat yang sadar hukum dan HAM	Tingkat kualitas produk hukum yang Produktif dan Implementatif	-	Peraturan yang ada belum sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat	Produk hukum daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah	Semakin mantapnya kualitas produk hukum yang sinergi dengan kebutuhan masyarakat serta peraturan yang berlaku.
3	Tersedianya Prasarana dan sarana aparatur pemerintah kota yang berkualitas	Mengintervarisir secara sistematis terhadap sarana dan prasarana yang ada	-	Belum optimalnya kuantitas, Kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana kerja aparatur pemerintah kota.	Terwujudnya Aparatur yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual.	Meningkatnya jumlah SDM Aparatur yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual.

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
4	Tersedianya Aparatur yang profesional	Terwujudnya pelayanan publik yang prima.	-	Baru 1 SKPD yang bersertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2000.	Seluruh SKPD bersertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2001, dengan Indeks Kepuasan Masyarakat = A.	meningkatnya jumlah SKPD bersertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2001, dengan Indeks Kepuasan Masyarakat = A.
5	Terwujudnya Organisasi pemerintah daerah yang dapat meningkatkan kinerja aparatur	Meningkatnya jumlah SDM Aparatur yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual.	-	Organisasi dan Pengorganisasian belum mencerminkan tuntutan reformasi birokrasi.	Terwujudnya Good Government dan Clean Governance.	Organisasi pemerintah kota sesuai dengan Urusan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6	Terwujudnya Kemampuan teknis dan administratif aparatur pengawasan yang profesional	Organisasi pemerintah kota sesuai dengan Urusan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundangan	-	Pola pengawasan yang ada belum optimal.	Rendahnya tingkat pelanggaran teknis dan administratif aparatur.	Rendahnya tingkat pelanggaran teknis dan administratif aparatur.
7	Terwujudnya Pelayanan publik yang prima	Melakukan pendidikan politik bagi semua lapisan masyarakat	-	Rendahnya tingkat pelanggaran teknis dan administratif aparatur	Tersosialisasinya pendidikan politik terhadap seluruh masyarakat secara sistematis.	Terwujudnya masyarakat yang demokratis.
8	Terwujudnya Kehidupan masyarakat yang demokratis	Melakukan pendidikan politik bagi semua lapisan masyarakat	-	Perilaku masyarakat dalam berpolitik masih banyak melanggar nilai-nilai demokrasi dan etika politik.	Meningkatnya ketertiban dan keamanan.	Terwujudnya stabilitas keamanan daerah.
9	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban serta terciptanya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan stabilitas keamanan daerah	Menjadikan ketertiban dan keamanan kebutuhan bersama yang harus ditangani bersama antara pemerintah dan masyarakat	-	Peran masyarakat dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan lingkungan belum memadai.	Terwujudnya stabilitas keamanan daerah.	Terwujudnya stabilitas keamanan daerah.

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
Misi 6 RPJPD Kota Bandung "Mengembangkan Sistem Pembiayaan Kota Terpadu (melalui Pembiayaan Pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta dan Masyarakat)"						
1	Terwujudnya anggaran pemerintah yang optimal	Meningkatkan Pendapatan Daerah Menguatkan sinergitas APBN, APBD Propinsi & APBD Kota (Fiskal antar pemerintahan) Mengembangkan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional	Persen - -	Rata-rata Peningkatan Pendapatan 10% APBN, APBD Prov & APBD Kota tidak duplikatif Alternatif instrumen pembiayaan <i>non-konvensional</i> diperkenalkan	Rata-rata Peningkatan Pendapatan 20% APBN, APBD Prov & APBD Kota terintegrasi dan sinergi sepenuhnya. Penggunaan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional mulai signifikan	Rata-rata Peningkatan Pendapatan 19% APBN, APBD Prov & APBD Kota terintegrasi dan sinergi sepenuhnya. Penggunaan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional mulai signifikan
2	Terwujudnya masyarakat dan sektor swasta berperan besar dalam pembiayaan pembangunan kota	Mengembangkan sistem insentif yang menarik dan fasilitas untuk sektor swasta dalam pembiayaan penyediaan barang dan jasa publik Mengembangkan sistem pembiayaan dengan kemitraan pemerintah dan swasta	- -	Pajak dan retribusi daerah sebagai insentif fiskal ke swasta Studi-studi kelayakan dan legal kemitraan pemerintah dan swasta untuk beberapa layanan jasa umum dan barang publik	Insentif fiskal ke swasta melembaga Berkontribusinya perusahaan patungan untuk layanan jasa dan penyediaan barang publik terhadap PAD	Insentif fiskal ke swasta melembaga Berkontribusinya perusahaan patungan untuk layanan jasa dan penyediaan barang publik terhadap PAD
		Mengembangkan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional,		Belum siap menggunakan instrumen pembiayaan seperti obligasi daerah, road funds, dll	Penggunaan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional, terutama obligasi daerah menjadi sumber pembiayaan yang signifikan	Penggunaan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional sebagai sumber pembiayaan signifikan

Sumber: RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025, LKPI AMJ Wali Kota Bandung Tahun 2013-2018

4.2.1.5. TELAAHAN RPJMD DAERAH LAINNYA

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, luas wilayah Kota Bandung adalah seluas 16.729,65 ha. Secara administratif berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya, antara lain Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung.

Kota Cimahi sebagai daerah penyangga (pendukung) Kota Bandung, maka potensi terbesar Kota Cimahi adalah terjadi pergerakan regional yang melintasi Kota Cimahi dan tumbuhnya *second home* akibat pesatnya perkembangan Kota Bandung yang memerlukan tempat hunian dengan memanfaatkan lahan di sekitar Kota Cimahi. Dari hal tersebut mempengaruhi Kota Cimahi dengan tingginya permintaan tempat hunian, melihat dari terbatasnya ruang di Kota Cimahi maka untuk kebutuhan hunian diarahkan pembangunan hunian vertikal, seperti apartement, rumah susun, dan lain sebagainya.

Selain itu, aktivitas ekonomi dengan munculnya PKL di wilayah perbatasan juga menjadi hal yang perlu ditemukan solusi bersama. Telaahan dilakukan pada Dokumen Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Kabupaten Bandung, merupakan salah satu daerah pemasok komoditas pertanian dan peternakan bagi Kota Bandung. Pada sektor perhubungan, dalam konteks transportasi sebagai alat pemenuh kebutuhan wilayah, serta adanya Rencana pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung yang memiliki Stasiun di Tegalluar Kabupaten Bandung, penyediaan sarana transportasi massal antar wilayah menjadi hal krusial. Hal tersebut juga diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan kemacetan pada segmen-segmen jalan yang berbatasan dengan Kota Bandung. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan antara lain, Pengembangan infrastruktur perkotaan, yang mencakup kebinamargaan, keciptakarya, dan sumber daya air, khususnya persampahan dan banjir; penataan ruang, pemukiman, pertanian/ketahanan pangan; Permukiman, Transportasi dan perhubungan; Pengembangan ekonomi kreatif. Telaahan dilakukan pada Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2017-2021.

Kabupaten Bandung Barat sebagai kawasan belakang Kota Bandung, sama seperti Kabupaten Bandung, KBB juga merupakan salah satu daerah pemasok komoditas pertanian dan peternakan bagi Kota Bandung. Hal tersebut perlu ditunjang oleh ketersediaan fasilitas yang mencukupi baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sesuai dengan strategi penataan ruang mikro wilayah kabupaten Bandung Barat. Pengembangan PKN Metropolitan Bandung dapat dilakukan di Kota Bandung dengan strategi mengarahkan perkembangan ke Kabupaten Bandung Barat. Sesuai dengan tujuan pembangunan Kabupaten Bandung Barat. Kebijakan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Bandung Barat yaitu dengan Pembatasan pengembangan kawasan, yaitu Kawasan di sekitar Kota Bandung sebagai Kawasan penyangga (bukan lagi sebagai Kawasan konservasi). Pesatnya permintaan perkembangan Kawasan terbangun dikendalikan dengan strategi pengembangan Kawasan terbangun vertical. Telaahan dilakukan pada Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023. Identifikasi RPJMD Daerah Lain disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2

Identifikasi RPJMD Daerah Lain

No	Daerah Lain	Peroide RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
1	Kota Cimahi	2017-2022	<p>Visi: "Mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamis, dan Berbudaya"</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul. 2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik. 3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan. 4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan. 5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan. 	Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kota Cimahi Tahun 2017-2022
2	Kabupaten Bandung	2016-2021	<p>Visi: "Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan"</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. 2. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing. 3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar terpadu Tata Ruang Wilayah. 4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. 	Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
3	Kabupaten Bandung Barat	2018-2023	<p>Visi: "Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), dan berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia"</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui jaminan akses dan pemerataan terhadap layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan keagamaan; 2. Memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar sebagai penunjang mobilitas masyarakat dan pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya; 3. Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal dan kreativitas; 4. Melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam dan budaya untuk pengembangan pariwisata ramah lingkungan; 5. Memperkuat keunggulan pertanian, peternakan, dan industri yang merata melalui optimalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi; 6. Mengurangi kesenjangan masyarakat dengan kebijakan yang pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment; 7. Mengembangkan sistem pemerintahan yang bersih, aspiratif, inovatif dan melayani berbasis inovasi dan teknologi. 	Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun C

4.2.1.6. TELAAHAN KLHS PERUBAHAN RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah menyusun RPJMD adalah dengan memperhatikan prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yaitu untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Maka dalam penyusunan RPJMD dibutuhkan KLHS sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dan sebagai bahan masukan bagi Kebijakan, Rencana, Program (KRP) dalam penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, sehingga dampak dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/ atau resiko negatif terhadap lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Aspek pembangunan berkelanjutan mengusung 4 pilar yaitu: aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan hukum serta tata kelola. Keempat pilar pembangunan tersebut dijelaskan kedalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, yang mencakup 17 aspek kehidupan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015.

Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 319 indikator, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Analisis yang dilakukan terhadap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan data di Kota Bandung yang telah didapatkan dihasilkan masih ada beberapa indikator yang tidak tercapai, tidak ada target, dan tidak ada data, yaitu sebanyak 6 indikator yang kemudian menjadi arahan untuk Kebijakan, Rencana dan Program RPJMD Kota Bandung.

1. TPB 3 – Menjamin Kehidupan yang Sehat

Kajian yang dilakukan terhadap capaian TPB 3 yaitu Menjamin Kehidupan yang Sehat terdapat beberapa *gap* atau masalah yang belum mencapai target sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka Angka Kematian Balita (AKBa); dan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup;
2. Masih tingginya angka Prevalensi HIV pada populasi dewasa;
3. Masih tingginya Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk;
4. Masih tingginya Kejadian Malaria per 1000 orang;
5. Masih tingginya jumlah penyalahgunaan napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis;
6. Masih rendahnya Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Beberapa hambatan dan tantangan akan dihadapi dalam proses penyelesaiannya yang tertuang di dalam program pembangunan RPJMD Kota Bandung. Beberapa kompleksitas hambatan yang perlu dihadapi sebagai berikut:

- a. Daya dukung air sebagian besar sudah terlampaui;
- b. Daya dukung pangan sudah terlampaui, hanya 10% wilayah Kota Bandung yang memiliki daya dukung pangan belum terlampaui yaitu wilayah yang berada pada bagian timur Kota Bandung yaitu Kecamatan Gedebage, Kecamatan Panyileukan dan Kecamatan Cibiru. Sementara itu untuk mencapai penurunan tingkat kemiskinan dapat diukur melalui kecukupan pangan yang sudah mandiri;
- c. Beberapa sungai sudah tercemar berat;
- d. Rendahnya indeks kapasitas daerah terhadap bencana;
- e. Pembiayaan masih mampu untuk memenuhi belanja daerah dalam pembiayaan pembangunan, kecenderungan pendapatan lebih tinggi dibandingkan belanja serta *surplus* masih tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, berikut ini merupakan arahan kebijakan dan program untuk mewujudkan TPB 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat.

Tabel 4.3

Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 3 – Menjamin Kehidupan yang Sehat

OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PIHAK YANG TERLIBAT
Menurunkan angka kematian bayi dan balita	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat; • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 	<p>a. Disarankan untuk sudah menentukan program untuk penanganan limbah rumah sakit secara terpadu.</p> <p>b. Disarankan untuk tidak membangun rumah sakit baru di kecamatan dengan daya tampung penduduk tinggi, pembangunan rumah sakit dapat dibangun di kecamatan daya tampung penduduk masih tinggi antara lain Kecamatan Rancasari, Gedebage, Cidadak, Sukasari dan Cinambo. Namun untuk kecamatan Gedebage, Cidadak, Sukasari dan Cinambo harus hati-hati terkait pembuangan limbah, dikarenakan sungai-sungai di kecamatan tersebut sudah tercemar berat.</p> <p>c. Selain pelayanan kesehatan yang ditingkatkan berdasarkan akses dan jangkauan pelayanan, tenaga kesehatan, dan jaminan kesehatan. Adanya langkah – langkah preventif yang disarankan yaitu menciptakan ruang yang bersih, sehat dan nyaman di Kota Bandung. Penciptaan ruang yang sehat dapat dilakukan melalui cara penyediaan ruang terbuka hijau, mengurangi pencemaran sungai, menyediakan permukiman yang sehat</p> <p>d. Peningkatan akses layanan darurat melahirkan skala lingkungan terutama layanan penjemputan dan penanganan pertama</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; • Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; • Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan • Penciptaan ruang yang sehat dapat dilakukan melalui cara penyediaan ruang terbuka hijau, mengurangi pencemaran sungai, menyediakan permukiman yang sehat • Peningkatan akses layanan darurat melahirkan skala lingkungan terutama layanan penjemputan dan penanganan pertama • Bidan siaga di setiap kelurahan dengan jangkauan call 24 jam • Biaya subsidi penanganan melahirkan untuk masyarakat MB • Pendidikan menjaga kebersihan dan pencegahan penyakit menular • Pengawasan obat dan makanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan • Dinas Kesehatan • Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • RSUD Kota Bandung • Unit Puskesmas Kota Bandung • Pemerintah Kecamatan • LSM Bidang Kesehatan

OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PIHAK YANG TERLIBAT
Menurunkan prevalensi HIV pada populasi dewasa.	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> e. Bidan siaga di setiap kelurahan dengan jangkauan <i>call center</i> 24 jam f. Biaya subsidi penanganan melahirkan untuk masyarakat MBR g. Peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan termasuk tenaga kesehatan setempat h. Pendidikan menjaga kebersihan dan pencegahan penyakit menular i. Penyuluhan kesehatan balita j. Pengawasan obat dan makanan 		
Menurunkan angka Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 			
Menurunkan Kejadian Malaria per 1.000 orang.	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 			

OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PIHAK YANG TERLIBAT
Menurunkan Jumlah penyalahgunaan napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat; • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 			
Meningkatkan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat ; • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 			

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

2. TPB 1 – Mengentaskan Kemiskinan

Kajian yang dilakukan terhadap capaian TPB 1 yaitu mengentaskan kemiskinan terdapat beberapa *gap* atau masalah yang belum mencapai target sebagai berikut:

1. Masih rendahnya proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
2. Masih rendahnya proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
3. Masih tingginya jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.
4. Masih rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.

Beberapa hambatan dan tantangan akan dihadapi dalam proses penyelesaiannya yang tertuang di dalam program pembangunan RPJMD Kota Bandung. Beberapa kompleksitas hambatan yang perlu dihadapi sebagai berikut:

- a. Daya dukung air sebagian besar sudah terlampaui;
- b. Daya dukung pangan sudah terlampaui, hanya 10% wilayah kota bandung yang memiliki daya dukung pangan belum terlampaui yaitu wilayah yang berada pada bagian timur Kota Bandung yaitu Kecamatan Gedebage, Kecamatan Panyileukan dan Kecamatan Cibiru. Sementara itu untuk mencapai penurunan tingkat kemiskinan dapat diukur melalui kecukupan pangan yang sudah mandiri;
- c. Beberapa sungai sudah tercemar berat;
- d. Rendahnya indeks kapasitas daerah terhadap bencana;
- e. Pembiayaan masih mampu untuk memenuhi belanja daerah dalam pembiayaan pembangunan, kecenderungan pendapatan lebih tinggi dibandingkan belanja serta *surplus* masih tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, berikut ini merupakan arahan kebijakan dan program untuk mewujudkan TPB 1 Mengentaskan Kemiskinan.

Tabel 4.4

Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 1 - Mengentaskan Kemiskinan

OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PIHAH YANG TERLIBAT
<p>Meningkatkan proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat ; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 	<p>Arahan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan kemiskinan melalui indikator jaminan kesehatan dapat dilaksanakan sebagai program prioritas tetapi tidak hanya melalui program-program penanganan perbaikan pelayanan kesehatan saja melainkan dapat dilakukan arahan-arahan penciptaan ruang yang bersih dan sehat sehingga yang masuk ke dalam tubuh terjamin bebas dari penyakit. Dengan tingkat pencemaran sungai tinggi, daya dukung air di beberapa tempat deficit, pencemaran udara akan sangat memungkinkan peningkatan penyakit di masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pemerataan pemasangan jaringan air minum. Menerapkan subsidi silang untuk penyediaan air minum bagi masyarakat miskin. Mengurangi tingkat kebocoran air sehingga perusahaan air tidak merugi Meningkatkan kualitas sumber air baku Sosialisasi untuk kepemilikan akta kelahiran Sistem onsite pembuatan akta langsung diurus terintegrasi dari pemerintah terbawah Pembuatan inovasi energi murah untuk penerangan listrik 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Tenaga Kerja Dinas Kesehatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Dinas Sosial Perumda Tirtawening Pemerintah Kecamatan LSM Bidang Sosial

OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PIHAK YANG TERLIBAT
<p>Meningkatkan proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja; • Program Penempatan Tenaga Kerja; • Program Hubungan Industrial; • Program Pengawasan Ketenagakerjaan 	<p>Arahan untuk penyelesaian indikator jaminan sosial tenaga kerja memerlukan usaha lebih untuk dapat mencapai target pembangunannya, bidang ketenagakerjaan menjadi permasalahan jika tidak adanya pemerataan dikarenakan, pekerjaan sanat berpengaruh terhadap angka pendapatan masyarakat dan terhadap tingkat kemiskinan. Upaya pertama yang dapat dilakukan adalah mendorong pelatihan dan pengembangan penduduk usia produktif, mendorong peningkatan kewirausahaan dan bantuan modal, peningkatan pendidikan, diversifikasi pekerjaan dan peningkatan UMK merupakan rekomendasi yang diberikan. Berdasarkan analisis 6 muatan bahwa efisiensi pemanfaatan SDA masih belum optimal, salah satu yang dapat dilakukan yaitu memanfaatkan SDA contohnya bidang perkebunan, pertanian, peternakan dan budidaya perikanan untuk dapat dikembangkan menjadi lebih inovatif dan penggunaan teknologi hal ini dapat menjadi lapangan pekerjaan baru. Arahan lain yang dapat dilaksanakan untuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan adalah melalui skema CSR dari sector swasta, sector bertumbuh pesat di Kota Bandung adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan disusul oleh sektor Industri Pengolahan. Melalui tahapan perijinan, berdasarkan peraturan zonasi di dalam RDTTR dapat didorong untuk penyediaan atau pengembangan lapangan pekerjaan baik melalui pemodal atau penyerapan tenaga kerja sebagai insentif jika terjadi permohonan ijin yang pembangunannya melebihi ketentuan tata masa bangunan di Kota Bandung.</p>		

OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PIHAK YANG TERLIBAT
Meningkatkan proporsi jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	<ul style="list-style-type: none"> Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial; Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (PKS) 	Arahan untuk penyelesaian bantuan tunai tidak ada batasan-batasan lingkungan yang harus dijaga. Kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan melalui bantuan tunai dapat ditambahkan dengan peningkatan sumber daya manusia agar menjadi lebih produktif dan pendataan tepat sasaran, disarankan adanya parameter penilaian dalam hal pendataan kriteria masyarakat yang layak mendapatkan bantuan, data terintegrasi terkomputerisasi di dinas kependudukan selain itu adanya laporan dari aparat setempat terkait masyarakat yang jika ada pendatang atau keluar dengan status finansialnya.		
Meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda); Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 	Arahan untuk menambah jaringan perpipaan air minum layak dan berkelanjutan arahan yang dapat dilakukan dalam upaya menambah jaringan perpipaan air minum adalah tidak disarankan. Hal ini dikarenakan dibelit air pada sumber air baku saat ini sangat sedikit. Disarankan untuk mencari sumber air baku lain di daerah sekitar Kota Bandung dikarenakan sumber air baku di Kota Bandung sudah menipis dan tercemar. Disarankan untuk melakukan kajian pemanfaatan sungai Cipamokolan dan Sungai Cibiru pertimbangannya adalah karena daya tampung di rancasari masih memungkinkan, dan ketersediaan air yang masih banyak. Sementara itu sungai cibiru masih dapat dilakukan inovasi dalam meminimalkan cemar karena masih dalam kategori cemar ringan. Selain itu jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kota Bandung didominasi kategori rendah; Kebijakan yang dapat dilakukan untuk penyediaan air minum disarankan pada tahap awal sebagai prioritas yaitu penyediaan air minum berbasis masyarakat atau melalui inovasi yaitu Total Water Utility Integrated Network Command Center (TCC).		

IV - 68**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023**

OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PIHAK YANG TERLIBAT
Meningkatkan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Arahan untuk menyediakan akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan diarahkan untuk memprioritaskan pada tahun pertama perencanaan, dikarenakan penyediaan akses terhadap sanitasi akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas lingkungan. Pengembangan sanitasi diarahkan untuk dilaksanakan pada daerah-daerah yang terhubung dengan jaringan sungai untuk menghindari tingkat pencemaran semakin tinggi.		

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

3. TPB 6 – Menjamin Air Bersih Berkelanjutan

Kajian yang dilakukan terhadap capaian TPB 6 yaitu Menjamin Air Bersih Berkelanjutan terdapat indikator yang belum tercapai adalah masih rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.

Beberapa hambatan dan tantangan akan dihadapi dalam proses penyelesaiannya yang tertuang di dalam program pembangunan RPJMD Kota Bandung. Beberapa kompleksitas hambatan yang perlu dihadapi sebagai berikut:

- a. Daya dukung air sebagian besar sudah terlampaui;
- b. Daya dukung pangan sudah terlampaui, hanya 10% wilayah kota bandung yang memiliki daya dukung pangan belum terlampaui yaitu wilayah yang berada pada bagian timur Kota Bandung yaitu Kecamatan Gedebage, Kecamatan Panyileukan dan Kecamatan Cibiru. Sementara itu untuk mencapai penurunan tingkat kemiskinan dapat diukur melalui kecukupan pangan yang sudah mandiri;
- c. Beberapa sungai sudah tercemar berat;
- d. Rendahnya indeks kapasitas daerah terhadap bencana;
- e. Pembiayaan masih mampu untuk memenuhi belanja daerah dalam pembiayaan pembangunan, kecenderungan pendapatan lebih tinggi dibandingkan belanja serta *surplus* masih tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, berikut ini merupakan arahan kebijakan dan program untuk mewujudkan TPB 6 yaitu Menjamin Air Bersih Berkelanjutan.

Tabel 4.5

Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 6 - Menjamin Air Bersih Berkelanjutan

OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PARA PIHAK TERLIBAT
Meningkatkan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 	<p>a. Arahan untuk menambah jaringan perpipaan air minum layak dan berkelanjutan arahan yang dapat dilakukan dalam upaya menambah jaringan perpipaan air minum adalah tidak disarankan. Hal ini dikarenakan debit air pada sumber air baku saat ini sangat sedikit. Disarankan untuk mencari sumber air baku lain di daerah sekitar Kota Bandung dikarenakan sumber air baku di Kota Bandung sudah menipis dan tercemar. Disarankan untuk melakukan kajian pemanfaatan sungai Cipamokolan dan Sungai Cibiru pertimbangannya adalah karena daya tampung di rancasari masih memungkinkan, dan ketersediaan air yang masih banyak. Sementara itu sungai cibiru masih dapat dilakukan inovasi dalam meminimalkan cemaran karena masih dalam kategori cemar ringan. Selain itu jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kota Bandung didominasi kategori rendah; Kebijakan yang dapat dilakukan untuk penyediaan air minum disarankan pada tahap awal sebagai prioritas yaitu penyediaan air minum berbasis masyarakat atau melalui inovasi yaitu Total Water Utility Integrated Network Command Center (TCC).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan sumber daya air (sda); Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Tidak disarankan untuk membuka jaringan air minum dengan sumber air tanah untuk air baku; Penyediaan embung dan bendungan baru dengan sumber air baku dari daerah lain; Penyediaan air minum berbasis masyarakat atau melalui inovasi yaitu Total Water Utility Integrated Network Command Center (TCC). 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum Perumda Tirtawening Pemerintah Kecamatan LSM Bidang Sosial dan Lingkungan

OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PARA PIHAK TERLIBAT
		<p>b. Arahkan untuk menyediakan akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan diarahkan untuk memprioritaskan pada tahun pertama perencanaan, dikarenakan penyediaan akses terhadap sanitasi akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas lingkungan. Pengembangan sanitasi diarahkan untuk dilaksanakan pada daerah-daerah yang terhubung dengan dengan jaringan sungai untuk menghindari tingkat pencemaran semakin tinggi.</p> <p>c. Memenuhi kebutuhan air melalui kerjasama dengan daerah lain yang memiliki kelebihan ketersediaan air, seperti Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung</p> <p>d. Mengefisiensikan penggunaan air untuk kebutuhan domestik, irigasi lahan pertanian, dan industry</p> <p>e. Meningkatkan akses merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau</p> <p>f. Mengurangi polusi air untuk meningkatkan kualitas air</p> <p>g. Kerjasama perlindungan dan konservasi sumber air antar wilayah.</p> <p>h. Optimalisasi penggunaan air permukaan dalam rangka mengurangi kelangkaan air</p> <p>i. Pengembangan teknologi pengolahan air permukaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sanitasi diarahkan untuk dilaksanakan pada daerah-daerah yang terhubung dengan dengan jaringan sungai untuk menghindari tingkat pencemaran semakin tinggi. Diarahkan prioritas di Kecamatan Gedebage, Ujungberung, Cinambo, Arcamanik, Babakan Ciparay, Kiaracondong, Antapani, Batununggal, dan Astanaanyar. 	

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

4. TPB 8 - Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Kajian yang dilakukan terhadap capaian TPB 8 yaitu Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif terdapat beberapa *gap* atau masalah yang belum mencapai target sebagai berikut:

1. Masih rendahnya Laju pertumbuhan PDRB per Kapita. (ADHK)
2. Masih tingginya Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.
3. Masih rendahnya Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB
4. Jumlah wisatawan mancanegara.
5. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.

Beberapa hambatan dan tantangan akan dihadapi dalam proses penyelesaiannya yang tertuang di dalam program pembangunan RPJMD Kota Bandung. Beberapa kompleksitas hambatan yang perlu dihadapi sebagai berikut:

- a. Daya dukung air sebagian besar sudah terlampaui, sebanyak 61% wilayah Kota Bandung memiliki daya dukung air yang terlampaui;
- b. Daya dukung pangan sudah terlampaui, hanya 10% wilayah kota bandung yang memiliki daya dukung pangan belum terlampaui yaitu wilayah yang berada pada bagian timur Kota Bandung yaitu Kecamatan Gedebage, Kecamatan Panyileukan dan Kecamatan Cibiru. Sementara itu untuk mencapai penurunan tingkat kemiskinan dapat diukur melalui kecukupan pangan yang sudah mandiri;
- c. Beberapa sungai sudah tercemar berat;
- e. Rendahnya indeks kapasitas daerah terhadap bencana;
- f. Pembiayaan masih mampu untuk memenuhi belanja daerah dalam pembiayaan pembangunan, kecenderungan pendapatan lebih tinggi dibandingkan belanja serta *surplus* masih tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, berikut ini merupakan arahan kebijakan dan program untuk

mewujudkan TPB 8 yaitu Pertumbuhan Ekonomi.

Tabel 4.6

Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 8 - Pertumbuhan Ekonomi

OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PARA PIHAK YANG TERLIBAT
Meningkatnya Laju pertumbuhan PDRB per Kapita. (ADHK)	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Program Promosi Penanaman Modal; Program Pelayanan Penanaman Modal; Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 	<p>a. Peningkatan jumlah wisatawan diiringi dengan penyediaan sarana prasarana untuk mencegah pencemaran, dan sampah</p> <p>b. Disarankan sebaran tempat wisata merata, sehingga wisatawan dapat tersebar.</p> <p>c. Pengendalian lingkungan terhadap tempat-tempat wisata terpusat</p> <p>d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti kesehatan, makanan, air, sehingga produktivitas dari manusia sebagai faktor produksi ekonomi meningkat.</p> <p>e. Mengawasi setiap kegiatan manusia khususnya ekonomi yang terhadap dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan</p> <p>f. Edukasi terhadap peran masyarakat terhadap kegiatan ekonomi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan iklim penanaman modal; Pelayanan penanaman modal; Pengendalian pelaksanaan penanaman modal; Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; Peningkatan perekonomian dan pembangunan ; Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja; Penempatan tenaga kerja; Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata; Pemasaran pariwisata; Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual; Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; 	<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat Daerah Badan Keuangan Daerah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Tenaga Kerja LSM Pariwisata dan UMKM

OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PARA PIHAK YANG TERLIBAT
<p>Penurunan Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perekonomian Dan Pembangunan ; • Program Perencanaan Tenaga Kerja; • Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja; • Program Penemptana Tenaga Kerja 	<p>g. Penerapan economy berkelanjutan di Jawa Barat dan melakukan edukasi mengenainya, sehingga menghasilkan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan lingkungan.</p> <p>h. Meningkatkan jiwa kewirausahaan berbasis skala terkecil</p>		
<p>Meningkatnya Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; • Program Promosi Penanaman Modal; • Program Pelayanan Penanaman Modal; • Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; • Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal; • Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 	<p>i. Meningkatkan potensi ekonomi dengan membangun infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar manusiaseperti pendidikan dan sanitasi untuk meningkatkan ekonomi.</p> <p>j. Meningkatkan akses jangkauan ke lokasi wisata menjadi lebih mudah dan singkat</p>		
<p>Meningkatnya Jumlah wisatawan mancanegara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; • Program Pemasaran Pariwisata; • Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; 			

OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PARA PIHAK YANG TERLIBAT
<p>Meningkatnya Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif • Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; • Program Pemasaran Pariwisata; • Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; • Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 			

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

5. TPB 5 - Kesetaraan Gender

Kajian yang dilakukan terhadap capaian TPB 5 yaitu Kesetaraan Gender terdapat beberapa *gap* atau masalah yang belum mencapai target sebagai berikut:

1. Masih rendahnya proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.
2. Masih rendahnya proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.

Beberapa hambatan dan tantangan akan dihadapi dalam proses penyelesaiannya yang tertuang di dalam program pembangunan RPJMD Kota Bandung. Beberapa kompleksitas hambatan yang perlu dihadapi sebagai berikut:

- a. Daya dukung air sebagian besar sudah terlampaui, sebanyak 61% wilayah Kota Bandung memiliki daya dukung air yang terlampaui;
- b. Daya dukung pangan sudah terlampaui, hanya 10% wilayah kota bandung yang memiliki daya dukung pangan belum terlampaui yaitu wilayah yang berada pada bagian timur Kota Bandung yaitu Kecamatan Gedebage, Kecamatan Panyileukan dan Kecamatan Cibiru. Sementara itu untuk mencapai penurunan tingkat kemiskinan dapat diukur melalui kecukupan pangan yang sudah mandiri;
- c. Beberapa sungai sudah tercemar berat;
- d. Rendahnya indeks kapasitas daerah terhadap bencana;
- e. Pembiayaan masih mampu untuk memenuhi belanja daerah dalam pembiayaan pembangunan, kecenderungan pendapatan lebih tinggi dibandingkan belanja serta *surplus* masih tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, berikut ini merupakan arahan kebijakan dan program untuk mewujudkan TPB 5 yaitu Kesetaraan Gender.

Tabel 4.7

Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 5 - Kesenjangan Gender

OUTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PIHAK YANG TERLIBAT
<p>Peningkatan proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 	<p>a. Pendidikan dan pelatihan terhadap perempuan-perempuan produktif di Kota Bandung dapat menjadi program untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di Kota Bandung.</p> <p>b. Pendidikan dini setara SMA/ SMK terkait tindak kekerasan dan kejahatan</p> <p>c. Layanan berbasis online call help untuk perempuan yang terkena kekerasan dan kejahatan</p> <p>d. Sosialisasi tindakan berani mengadu setiap terjadi kekerasan.</p> <p>e. Pelatihan pemberdayaan perempuan</p>	<p>Rekomendasi yang dapat diberikan untuk pencapaian TPB 5 Kesenjangan Gender adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan Disarankan untuk menjadi program prioritas dalam pembangunan RPJMD Disarankan untuk memberdayakan perempuan dalam penciptaan ruang bersih, hijau, nyaman untuk pembangunan berkelanjutan Disarankan untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan perempuan di Kota Bandung 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat DKP LSM Pemberdayaan Wanita
<p>Peningkatan proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 			

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

6. TPB 11 – Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Kajian yang dilakukan terhadap capaian TPB 11 yaitu Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan terdapat 1 (satu) *gap*/masalah dalam pencapaian target yaitu masih rendahnya proporsi RTH perkotaan. Beberapa hambatan dan tantangan akan dihadapi dalam proses penyelesaiannya yang tertuang di dalam program pembangunan RPJMD Kota Bandung. Beberapa kompleksitas hambatan yang perlu dihadapi sebagai berikut:

- Daya dukung air sebagian besar sudah terlampaui, sebanyak 61% wilayah Kota Bandung memiliki daya dukung air yang terlampaui;
- Daya dukung pangan sudah terlampaui, hanya 10% wilayah kota bandung yang memiliki daya dukung pangan belum terlampaui yaitu wilayah yang berada pada bagian timur Kota Bandung yaitu Kecamatan Gede Bage, Kecamatan Panyileukan dan Kecamatan Cibiru. Sementara itu untuk mencapai penurunan tingkat kemiskinan dapat diukur melalui kecukupan pangan yang sudah mandiri;
- Beberapa sungai sudah tercemar berat;
- Rendahnya indeks kapasitas daerah terhadap bencana.

Berdasarkan hal tersebut, berikut ini merupakan arahan kebijakan dan program untuk mewujudkan TPB 11 yaitu Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.

Tabel 4.8

Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 11 - Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

UTCOMES	ARAHAN PROGRAM	REKOMENDASI ARAHAN KEBIJAKAN	REKOMENDASI KEBIJAKAN/ PROGRAM/ RENCANA	PIHAK YANG TERLIBAT
Meningkatnya proporsi RTH di Kota Bandung	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi/ gerakan penyediaan RTH Vertikal pada perkantoran dan kawasan komersil. Disarankan untuk meningkatkan kerjasama CSR dengan pihak swasta dalam hal penyediaan lahan RTH di Kota Bandung Penyediaan RTH Skala Lingkungan. Arahan lokasi prioritas terhadap penciptaan ruang yang sehat berada di Kec. Bojongloa kaler, Kec. Sukajadi, Kec. Cicendo, Kec. Andir, Kec. Coblong, Kec. Antapani, Kec. Kiaracondong dan Kec. Buahbatu. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Penyediaan RTH Skala Lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintahan Kecamatan LSM/ Ormas bidang lingkungan

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

Berdasarkan rekomendasi KLHS sebagaimana diuraikan di atas, maka dilakukan integrasi ke dalam Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023. Hasil analisis dan rekomendasi KLHS terhadap Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 pada umumnya telah diakomodir dan diintegrasikan ke dalam dokumen Perubahan RPJMD. Adapun beberapa catatan terkait proses pengintegrasian dari hasil analisis dan rekomendasi KLHS ke dokumen Perubahan RPJMD, sebagai berikut:

- a. Dasar hukum dan penjelasan pentingnya KLHS ditelaah pada saat penyusunan RPJMD telah dimuat dalam Bab I Perubahan RPJMD;
- b. Analisis daya dukung dan daya tampung di dokumen KLHS sebagian besar telah diadaptasi masuk ke Bab II Perubahan RPJMD;
- c. Permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah telah diintegrasikan dengan isu terkait TPB;
- d. Penjabaran visi dan misi ke dalam tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan telah memperhatikan prinsip pelaksanaan TPB dan dimuat dalam Bab V dan Bab VI Perubahan RPJMD. Hal ini sejalan dengan hasil analisis KLHS yang diuraikan di atas;
- e. Program pembangunan daerah dan program perangkat daerah mulai tahun 2019 sampai dengan 2023 telah diupayakan merespon seluruh TPB. Sedangkan untuk kegiatan yang mendukungnya terdapat di Perubahan Renstra Perangkat Daerah terkait (kegiatan tidak dimuat dalam dokumen RPJMD);
- f. Indikator Kinerja Utama (IKU);
- g. Indikator Kinerja Kunci (IKK) telah mengadaptasi indikator TPB pada Bab VIII Perubahan RPJMD; dan
- h. Beberapa indikator KLHS yang direkomendasikan tidak diintegrasikan ke RPJMD sebab akan ditindaklanjuti ke dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah terkait.

4.2.2. ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA BANDUNG

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu global, isu nasional, isu regional, SDGs, capaian kinerja RPJMD tahun lalu dan prediksi permasalahan yang akan datang, diidentifikasi terdapat 8 isu strategis jangka menengah Kota Bandung. Isu-isu tersebut pada beberapa hal saling berkaitan atau mempengaruhi satu dengan lainnya. Oleh karena itu upaya-upaya penganganan isu tersebut, akan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi lebih lanjut antar berbagai *stakeholder* pembangunan. Isu-isu dalam skema keterkaitan, dapat dilihat pada Gambar 4.5.

Gambar 4.5

Isu Strategis Jangka Menengah Kota Bandung



Sumber: Bappelitbang, 2021

a. Pemulihan Ekonomi

Walaupun mengalami kecenderungan penurunan, namun pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Bandung selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan Indonesia. Akan tetapi, pada tahun 2020 baik Kota Bandung, Jawa Barat dan Indonesia mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Kota Bandung tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,28 persen. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi Covid-19. Kontraksi Kota Bandung tahun 2020 sedikit lebih dalam dari kondisi nasional yang sebesar -2,07 persen, namun berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang sebesar -2,44 persen. Indikator lain yang menunjukkan perekonomian Kota Bandung mengalami penurunan yaitu pengeluaran per Kapita. Pengeluaran per Kapita sebagai salah satu variabel pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami penurunan dari Rp17.254 ribu rupiah/ orang/tahun pada tahun 2019 menjadi Rp16.887 ribu rupiah/ orang/tahun pada 2020.

Selain menghadapi perekonomian yang lesu akibat pandemi Covid-19 yang menyasar berbagai sektor, masalah ketimpangan pendapatan juga masih merupakan isu penting pembangunan di Kota Bandung. Gini ratio Kota Bandung pada tahun 2019 sebesar 0,39. Walau lebih rendah daripada Provinsi Jawa Barat (0,40), namun gini ratio Kota Bandung sedikit diatas dari nasional (0,38). Salah satu pendekatan mengatasi masalah perekonomian yang telah dan tetap akan diterapkan di Kota Bandung adalah konsep *pro poor, pro job, pro growth, pro environment* dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat sebagai penggerak utamanya.

Pemerintah terus berupaya untuk menekan dampak pandemi Covid-19 kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat berpendapatan rendah. Dalam rangka pemulihan perekonomian, sejak tahun 2020, Pemerintah dan pemerintah daerah telah menerapkan berbagai kebijakan antara lain pemberian berbagai insentif untuk menggairahkan sektor swasta dan UMKM, bantuan sosial, keringanan pajak, dan sebagainya. Kebijakan untuk pemulihan ekonomi masih tetap perlu diprioritaskan sampai akhir periode pembangunan jangka menengah Kota Bandung untuk menghidupkan kembali kondisi kota yang dinamis dengan masyarakat yang sejahtera.

b. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Kesehatan yang holistik dan komprehensif mencakup kesehatan secara fisik, mental, sosial dan spiritual dengan pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Derajat kesehatan masyarakat yang holistik dan komprehensif merupakan tujuan utama dari pembangunan kesehatan di Kota Bandung, dengan sasaran kesehatan secara *continuum of care* (dari lahir hingga lansia). Bukan hanya AKI AKB dan *stunting* masih tinggi, tetapi penyakit dengan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) cenderung meningkat. Selain penyakit menular terjadi fenomena meningkatnya penyakit tidak menular, terjadi pula masalah gizi di satu sisi penderita gizi buruk masih dijumpai tetapi penderita obesitas meningkat (*the double burden of diseases*). Ketersediaan layanan kesehatan di Kota Bandung yang meliputi layanan puskesmas terdiri atas 80 puskesmas, yang di dalamnya terdapat 7 puskesmas rawat inap sehingga jumlah sarana kesehatan tersebut belum memadai, berdasarkan rasio menurut WHO bahwa satu puskesmas maksimal melayani 30.000/penduduk di Kota Bandung.

c. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan mandat yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota, yang meliputi pendidikan anak usia dini hingga setingkat pendidikan menengah pertama. Sampai dengan saat ini sebagian besar penyelenggara pendidikan anak usia dini oleh masyarakat

sementara, sedangkan yang disediakan oleh Pemerintah Kota dalam bentuk Taman Kanak-Kanak sebanyak 3 TK Negeri. Sementara itu layanan Pendidikan Dasar (SD dan SMP/Sederajat) belum optimal karena rasio rombongan belajar (rombel) belum memenuhi standar nasional. Bila standar rasio rombel tingkat SD = 1: 28, saat ini pada SDN di Kota Bandung adalah 1:31 dengan rombel 7.424 dan jumlah kelas hanya 2.952. Pada tingkat SMP rasio rombel di Kota Bandung adalah 1:33, sedangkan standar nasional 1:32 dengan jumlah rombel 3.361 dan ruang kelas 2.994. Selain itu kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pengajar pada sekolah negeri belum merata. Terminologi sekolah favorit menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih sekolah yang berlokasi jauh dari rumah.

d. Penanggulangan Kemiskinan dan PPKS

Kota Bandung sebagai salah kota yang sibuk di Jawa Barat dengan berbagai aktivitas masyarakatnya, tidak terlepas dari masalah kemiskinan, pengangguran dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kemiskinan di Kota Bandung terdiri dari dimensi kurangnya kesempatan, rendahnya kemampuan, kurangnya jaminan, dan ketidakberdayaan.

Pemerintah Kota Bandung dari tahun ke tahun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dengan tren penurunan jumlah penduduk miskin selama kurun waktu 2015-2019. Jumlah penduduk miskin di Kota Bandung pada tahun 2019 mencapai 84.670 jiwa atau mencapai 3,38% dari jumlah warga Kota Bandung. Namun kondisi tersebut berbalik di tahun 2020, dimana jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 100.020 jiwa atau mencapai 3,99%. Peningkatan ini merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19.

Peningkatan kemiskinan pada tahun 2020 diikuti juga dengan peningkatan tingkat pengangguran terbuka (TPT). TPT Kota Bandung pada bulan Agustus 2020 adalah sebesar 11,19 persen. Berdasarkan data BPS, TPT Kota Bandung ini lebih tinggi dibandingkan TPT Jawa Barat sebesar 10,46% dan nasional yang mencapai 7,07%. Peningkatan tingkat pengangguran baik di Kota Bandung, maupun provinsi dan nasional merupakan dampak dari terjadinya pandemi Covid-19.

e. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Optimalisasi Pengelolaan Sampah

Permasalahan pengelolaan lingkungan hidup meliputi berbagai aspek. Aspek lingkungan hidup di Kota Bandung yaitu:

- 1) Ketersediaan air tanah yang semakin berkurang, kualitas air permukaan yang semakin menurun, pelayanan air bersih yang belum mencukupi. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari indeks pencemaran air, udara dan tutupan hutan. Nilai IKLH Kota Bandung saat ini berada pada tingkat "waspada" yang menunjukkan buruknya kualitas lingkungan Kota Bandung. Penyebab terbesar buruknya nilai IKLH berasal dari rendahnya indeks kualitas air, yang menunjukkan kadar BOD5 pada seluruh sampel air sungai berada jauh di atas baku mutu yang dipersyaratkan. Kondisi fisik air sungai terlihat keruh, menghitam, dan berbau busuk, sebagai akibat pencemaran air limbah domestik yang cukup dominan.
- 2) Peta kontur muka air tanah yang merupakan hasil Kajian Pengukuran Tinggi Muka Air Tanah Kota Bandung pada tahun 2017. Pada peta kontur tersebut dapat dilihat terbentuknya kerucut-kerucut permukaan air tanah yang menunjukkan terjadinya eksploitasi air tanah dalam jumlah besar di beberapa tempat sehingga mengakibatkan kekritisian air tanah di tempat-tempat tersebut. Menurunnya resapan air, berpengaruh pula pada cakupan pelayanan air bersih. Cakupan pelayanan air bersih di Kota Bandung baru mencapai 72,15%

dengan sumber air baku untuk pengolahan air bersih berasal dari air permukaan (sungai dan danau) di luar wilayah Kota Bandung.

- 3) Polusi udara yang semakin bertambah meskipun nilai Indeks Kualitas Udara Kota Bandung masih cukup baik, yaitu pada angka 69,79 poin, tetapi dari hasil pengukuran kualitas udara ambien pada roadside terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan pada parameter PM_{2,5} terutama di daerah sekitar terminal. Hal ini menunjukkan bahwa pencemaran dari sektor transportasi sudah demikian besar karena parameter PM_{2,5} ini biasanya dihasilkan dari residu sisa pembakaran bahan bakar kendaraan.
- 4) Timbulan sampah di kota metropolitan seperti Bandung mencapai 1.500 – 1.600 ton setiap hari. Walaupun penghargaan Adipura sering didapat Kota Bandung beserta sederet penghargaan bergengsi lainnya, namun permasalahan sampah masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya dapat teratasi. Sumber sampah utama, yaitu dari rumah tangga (70%). Komposisi sampah umumnya organik yang mudah membusuk (45%), anorganik (24%) dan residu (31%). Pengelolaan sampah saat ini dilakukan dengan pola Kumpul – Angkut – Buang, dan 73,74% sampah diangkut ke TPPAS Sarimukti. Pengurangan sampah pola 3R mencapai 14,32%. Sekitar 12,21% sampah belum tertangani, yang dibuang ke TPS – TPS Liar, selokan dan sungai. Sejak tahun 2005, Kota Bandung tidak memiliki TPA, sehingga pembuangan akhir sampah dilakukan ke TPPAS Sarimukti, di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan dibawah pengelolaan Pemerintah Propinsi Jawa Barat, yang akan ditutup dan dipindah ke TPPAS Legok Nangka tahun 2019. Dana kompensasi ke TPPAS Sarimukti saat ini sebesar Rp. 61.250,00/ton sampah, dengan jarak angkut 42 km. Direncanakan biaya pengolahan sampah di TPPAS Legok Nangka meningkat mencapai 6-7 kali lipat saat ini, karena menggunakan teknologi thermal yang berbiaya cukup mahal. Dengan demikian maka beban biaya pengelolaan sampah akan mengalami lonjakan yang cukup signifikan.
- 5) Selama 3 tahun terakhir, jumlah kejadian bencana di Kota Bandung mencapai 2.671 kejadian, dengan 256 orang meninggal dunia. Salah satunya adalah kejadian banjir bandang di Jatihandap. Bencana ini terjadi bukan hanya akibat faktor hujan deras, tetapi faktor lain yang juga sangat penting adalah akibat terjadinya alih fungsi lahan di Kawasan Bandung Utara (KBU).

Permasalahan tersebut berkaitan dengan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum memenuhi mandat undang-undang yaitu sebesar 30%. Kawasan Bandung Utara (KBU) yang merupakan kawasan resapan air. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) atas eksploitasi lahan diantaranya menjadi akar penyebab terjadinya banjir bandang di Kota Bandung. Berkurangnya luas kawasan berakibat pula pada ketersediaan air tanah yang semakin kritis.

f. Optimalisasi Infrastruktur dan Penataan Ruang

Infrastruktur kota merupakan layanan dasar penting Pemerintah Kota Bandung, sehingga menjadi isu strategis. Layanan infrastruktur tersebut berkaitan dengan kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga pada akhirnya turut membentuk struktur ruang wilayah yang kemudian memiliki dampak lanjutan pada kehidupan dan penghidupan masyarakat. Karena itu pengelolaan infrastruktur sangat berkaitan erat dengan pengendalian ruang wilayah.

Beberapa fokus terkait infrastruktur untuk masa lima tahun mendatang yaitu:

- 1) Peningkatan sarana prasarana penurunan genangan untuk mengatasi 68 titik genangan yang tersebar di Kota Bandung dan membutuhkan koordinasi lintas sektor.
- 2) Pengendalian kemacetan lalu lintas pada 8 titik yang semakin kompleks sebab dan akibatnya pada polusi udara, gangguan kejiwaan, pemborosan dan lain sebagainya. Beberapa gagasan

telah dibahas, seperti (1) Transportasi massal yang representatif serta pembangunan jalan simpang tidak sebidang di 5 (lima) titik (2) Pembangunan jalan layang (*flyover*) atau bahkan jalan bawah tanah (*underpass*) dan lain sebagainya.

- 3) Kebutuhan peningkatan akses wisatawan seperti: bandara internasional yang representatif, jalan berbayar/tol, stasiun kereta api dan terminal antar kota yang memadai guna mewujudkan fasilitas kota yang berkelas dunia (*world class city*).

g. Tata Kelola Pemerintahan (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)

Melakukan reformasi birokrasi berarti melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan, terutama pada tatakelola sumberdaya aparatur dan keuangan daerah. Layanan publik didasarkan pada kejelasan prosedur dan persyaratan, waktu penyelesaian dan biaya secara transparan. Esensi terwujudnya reformasi birokrasi adalah kepuasan layanan publik yang merupakan hak-hak masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat ialah tolok ukur tingkat kesesuaian layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam merespon kebutuhan masyarakat. Hasil survei ombudsman terhadap layanan perangkat daerah di Kota Bandung, menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam peningkatan layanan dan termasuk kategori hijau (baik). Namun demikian kualitas, kecepatan dan ketepatan layanan masih perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang menggambarkan Kota Bandung sebagai Kota Cerdas (*smart city*). Dalam hal tata kelola, bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Bandung dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Opini BPK menjadi salah satu indikator tingkat ketaatan terhadap pengelolaan keuangan dan asset sesuai standar yang berlaku.

h. Sinergitas Pembiayaan Pembangunan

Pelayanan dan pembangunan daerah memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit dan berkesinambungan. Kota Bandung membutuhkan biaya triliunan rupiah untuk melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah saat ini yaitu dana dari pemerintah pusat (dana alokasi umum dan dana alokasi khusus), dan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, dana tersebut belum mencukupi untuk memenuhi dapat memberikan tingkat layanan dasar maupun layanan prima menuju kota yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis. Karena itu, pemerintah daerah dituntut menggali pendapatan dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif.

Untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan tersebut, pemerintah daerah perlu bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholders. Sumber-sumber tersebut antara lain APBN, APBD Provinsi, KPBU, PINA, Obligasi Daerah, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Sumbangan Pihak Ketiga dan Swadaya Masyarakat.

Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan hingga tahun 2019 mencapai Rp297,9 miliar. Instrumen pembiayaan lain yang telah dimanfaatkan adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dimana selama tahun 2015-2019, kontribusi CSR cukup signifikan yaitu mencapai Rp116.298.907.600,00. Selain itu, instrumen pembiayaan lainnya adalah Sumbangan Pihak Ketiga dimana pada tahun 2015-2019 mencapai Rp26.869.525.127,00. Indikasi ini menunjukkan adanya suatu potensi yang perlu terus dikembangkan untuk bersinergi dalam pembiayaan pembangunan di Kota Bandung.

Adapun ketentuannya mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 1010 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 354 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kota yang diturunkan pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 067 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan dan Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kota.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan rumusan isu strategis pembangunan jangka menengah Kota Bandung Tahun 2018-2023 secara umum memiliki keterkaitan dengan isu strategis nasional, isu strategis Provinsi Jawa Barat, dan isu strategis TPB dalam KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung, dengan tetap mempertimbangkan asas demokrasi bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program prioritas kepala daerah terpilih. Persandingan tersebut disajikan pada tabel berikut. Sinergi Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Barat, KLHS dan Kota Bandung disajikan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9

Sinergi Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Barat, KLHS dan Kota Bandung

Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Kota Bandung
<ol style="list-style-type: none"> Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial Reformasi Birokrasi 	<ol style="list-style-type: none"> Kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran Penataan ruang Iklim usaha, pariwisata dan industri kreatif Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan Penanganan penyakit menular Covid - 19 Permasalahan banjir, sampah dan penurunan kualitas udara Kemacetan yang semakin sering terjadi dan meluas Peningkatan kualitas layanan publik dan pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi komunikasi dan informasi Belum optimalnya pola kemitraan pembiayaan pembangunan Infrastruktur 	<ol style="list-style-type: none"> Pemulihan ekonomi Peningkatan derajat masyarakat Peningkatan kualitas pendidikan Penanggulangan kemiskinan dan PPKS Lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan Optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang Tata kelola pemerintahan (peningkatan kualitas pelayanan publik) Sinergi pembiayaan pembangunan

Sumber: Bappelitbang, 2021

Pada tabel tersebut dapat dilihat keterhubungan antara isu strategis nasional, isu strategis provinsi, isu strategis KLHS dan isu strategis Kota Bandung secara sinergis. Isu strategis Kota Bandung didasarkan pada isu strategis nasional dan provinsi yang bersifat umum dan isu strategis

KLHS menurut daya dukung daya tampung lingkungan (DDTL). Berikut adalah keterhubungan dari isu strategis Kota Bandung, yaitu:

1. Isu pertama adalah terkait dengan pemulihan ekonomi yaitu mengacu pada isu strategis nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dan isu strategis propinsi yaitu produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan serta iklim usaha, pariwisata dan industri kreatif dan penanganan penyakit menular Covid-19 sebagai isu strategis KLHS. Dapat diartikan bahwa pemulihan ekonomi yang dilakukan pasca pandemi adalah dengan penguatan ketahanan ekonomi, peningkatan produktivitas iklim usaha, pariwisata dan industri kreatif.
2. Isu kedua adalah peningkatan derajat masyarakat yaitu mengacu pada isu strategis nasional adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dan isu strategis propinsi yaitu kualitas nilai kehidupan dan peningkatan kualitas layanan publik sebagai isu strategis KLHS. Dapat diartikan bahwa derajat masyarakat Kota Bandung dapat ditingkatkan melalui revolusi mental masyarakatnya, kualitas nilai kehidupan dan layanan publik.
3. Isu ketiga adalah peningkatan kualitas pendidikan yaitu mengacu pada isu strategis nasional adalah meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, dan isu strategis propinsi yaitu daya saing sumber daya manusia, serta Peningkatan kualitas layanan pendidikan sebagai isu strategis KLHS. Dapat diartikan bahwa kualitas pendidikan masyarakat Kota Bandung ditingkatkan melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi.
4. Isu keempat adalah penanggulangan kemiskinan dan PPKS yaitu mengacu pada isu strategis nasional adalah memperkuat pelayanan dasar, dan isu strategis propinsi yaitu kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial, serta kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran sebagai isu strategis KLHS. Dapat diartikan bahwa penanggulangan kemiskinan dan PPKS di Kota Bandung ditingkatkan melalui pelayanan dasar yang kuat meliputi aspek pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial yang diterapkan melalui SPM (Standar Pelayanan Minimal).
5. Isu kelima adalah lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan yaitu mengacu pada isu strategis nasional adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dan isu strategis propinsi yaitu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta permasalahan banjir dan sampah sebagai isu strategis KLHS. Dapat diartikan bahwa lingkungan hidup yang berkualitas dan pengelolaan sampah yang optimal di Kota Bandung dapat diperkuat dengan infrastruktur pelayanan dasar yang sesuai dengan daya dukung daya tampung lingkungan (DDTL).
6. Isu keenam adalah optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang yaitu mengacu pada isu strategis nasional adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dan isu strategis propinsi yaitu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta penataan ruang, permasalahan banjir, sampah dan penurunan kualitas udara, kemacetan yang semakin sering terjadi dan meluas sebagai isu strategis KLHS. Dapat diartikan bahwa infrastruktur dan penataan ruang dioptimalkan untuk menangani permasalahan fisik seperti banjir, sampah dan penurunan kualitas udara, kemacetan di Kota Bandung.

7. Isu ketujuh adalah Tata kelola pemerintahan (peningkatan kualitas pelayanan publik) yaitu mengacu pada isu strategis nasional adalah memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, dan isu strategis propinsi yaitu Reformasi Birokrasi, serta pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi komunikasi dan informasi sebagai isu strategis KLHS. Dapat diartikan bahwa tata kelola pemerintahan atau kualitas pelayanan publik Pemerintah Kota Bandung ditingkatkan melalui Reformasi Birokrasi berbasis teknologi komunikasi dan informasi sehingga dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat Kota Bandung terhadap pelayanan publik Pemerintah Kota Bandung.
8. Isu kedelapan adalah sinergi pembiayaan pembangunan yaitu mengacu pada semua isu strategis nasional yang perlu dibiayai oleh APBN dalam hal penanganannya dan semua isu strategis propinsi yang perlu dibiayai oleh APBD Propinsi, serta Belum optimalnya pola kemitraan pembiayaan pembangunan infrastruktur sebagai isu strategis KLHS. Dapat diartikan bahwa diharapkan adanya sinergi pembiayaan pembangunan Kota Bandung yang diperoleh dari APBN, APBD Propinsi Jawa Barat melalui DAK atau kemitraan pembiayaan melalui KPBU.



VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

BAB
V





5.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kota Bandung tahun 2018- 2023, yaitu:

“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis”

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bandung** : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang.
- Unggul** : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik di setiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.
- Nyaman** : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan.
- Sejahtera** : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga, dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi rohani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil, dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.
- Agamis** : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari

kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023.

Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan.

Dengan demikian visi *Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis* bermakna "layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat".

5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

a. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas, dan Berdaya Saing

Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil, dan merata.

b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui *smart government* yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima.

c. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan

Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal.

d. Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

e. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta.

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1

Keselarasn Misi pada RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 dengan Misi Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

MISI RPJPD KOTA BANDUNG TAHUN 2005-2025	MISI PERUBAHAN RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023
Misi 1: Meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan religius.	Misi 1: Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing.
Misi 3: Mengembangkan kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi, serta berhati nurani.	
Misi 5: Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.	Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien, dan bersih.
Misi 2: Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing.	Misi 3: Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan.
Misi 4: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota.	Misi 4: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
Misi 6: Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu (melalui pembiayaan pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat).	Misi 5: Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, maka ditetapkan indikator kinerja dan target setiap tahun. Penentuan target indikator dalam Perubahan RPJMD Kota Bandung mulai tahun 2021 sampai dengan 2023 mempertimbangkan capaian pembangunan tahun 2020 dengan kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan memburuknya kondisi berbagai aspek kehidupan. Memburuknya keadaan yang dirasakan hampir seluruh negara sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang berkepanjangan dan masih berlangsung sampai tahun 2021 ini, menyebabkan pemerintah pusat bersama seluruh pemerintah daerah mengambil berbagai kebijakan untuk percepatan pemulihan dampak pandemi.

Keselarasn hubungan antara misi, tujuan, dan sasaran serta indikator kinerja pada RPJMD sebelum dilakukan perubahan dimuat pada Tabel 5.2, sedangkan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam Tabel 5.3. Pada umumnya indikator kinerja tujuan dan sasaran sebelum dan sesudah perubahan RPJMD masih sama, namun terdapat penyesuaian atau perubahan pada beberapa indikator kinerja. Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal Tahun 2018	Target Sebelum Perubahan					Target Akhir RPJMD			
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023				
Misi 1: Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas, dan berdaya saing															
1	Membangun masyarakat Kota Bandung yang mandiri dengan jaminan pendidikan, kesehatan yang bermutu, adil dan merata berlandaskan nilai agama dan budaya	1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	80,31	-	-	-	-	-	81,20	81,20		
							1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,90	14,01	14,02	14,03	14,04	14,04
							2	Angka Kelulusan	persen	100	100	100	100	100	100
							3	Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD	Angka	76,72	76,76	76,78	76,80	76,82	76,82
							4	Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP	Angka	57,02	57,04	57,05	57,06	57,07	57,07
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,86	73,92	73,94	73,96	73,98	73,98	73,98				
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih															
2	Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	2	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	69,81	-	-	-	-	-	70,13	70,13			
						3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase	51,61	70	80	90	100	100	
						6	Perangkat Daerah dengan Nilai Indeks Kepuasan "Baik"	Persentase	60	70	80	90	100	100	
						7	Nilai Evaluasi AKIP Kota	Predikat	A	A	A	A	A	A	
						8	Nilai LPPD Kota	Predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
						9	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
						10	Level Kematangan Smart City Kota Bandung	Tingkat	Integrative	Integrative	Smart	Smart	Smart	Smart	
						10	Level Kematangan Smart City Kota Bandung	Tingkat	Integrative	Integrative	Smart	Smart	Smart	Smart	
						10	Level Kematangan Smart City Kota Bandung	Tingkat	Integrative	Integrative	Smart	Smart	Smart	Smart	
						10	Level Kematangan Smart City Kota Bandung	Tingkat	Integrative	Integrative	Smart	Smart	Smart	Smart	

V - 8 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal Tahun 2018	Target Sebelum Perubahan					Target Akhir RPJMD
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
Misi 3: Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan												
3	Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan, dan berkeadilan	3 Laju Pertumbuhan Ekonomi 4 Indeks Gini	4 Meningkatkan perekonomian kota	11 PDRB Per Kapita 12 Indeks Daya Saing Pariwisata 13 Pengeluaran Per Kapita	Persen Poin Juta Rp Poin Ribu rupiah/org/tahun	7,21	-	-	-	-	-	7,98
							70,73	73,38	76,03	78,68	81,33	81,33
							3,39	3,55	3,65	3,69	3,74	3,74
							16.370	16.584	16.798	17.013	17.227	17.227
5	Menurunnya jumlah penduduk miskin	5	14	Angka Kemiskinan	persen	4,17	3,83	3,66	3,49	3,32	3,14	3,14
							8,39	8,34	8,29	8,25	8,22	8,22
							8,44	8,34	8,29	8,25	8,22	8,22
4	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	5 Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	7 Meningkatkan ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan 8 Meningkatkan infrastruktur kota terpadu dan berkualitas 18 Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan 19 Persentase Luasan Kawasan Kumuh 20 Meningkatkan layanan air bersih	16 Persentase RTH 17 Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan 18 Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan 19 Persentase Luasan Kawasan Kumuh 20 Cakupan Layanan Air Bersih	Poin persen Menit Aspek persen persen	7,375	-	-	-	-	-	8,00
							12,4	12,6	12,8	13,0	13,2	13,2
							100	80	60	40	30	30
							11	10	9	8	7	7
							4,55	3,96	3,36	2,76	2,16	2,16
							79	80	81	82	83	83
							79,27	77,27	77,27	77,27	77,27	77,27
							79,27	77,27	77,27	77,27	77,27	77,27
							79,27	77,27	77,27	77,27	77,27	77,27
							79,27	77,27	77,27	77,27	77,27	77,27

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal Tahun 2018	Target Sebelum Perubahan					Target Akhir RPJMD
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
			10 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	35,23	35,35	35,47	35,59	35,71	35,83	35,83
				22	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota	97,97	98	98,3	98,5	98,7	99	99
Misi 5: Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi												
5	Optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan	6	Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan			5	-	-	-	-	100	100
		11	Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan	23	Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan	193 Miliar	Meningkat 2% dari tahun 2018	Meningkat 4% dari tahun 2018	Meningkat 6% dari tahun 2018	Meningkat 8% dari tahun 2018	Meningkat 10% dari tahun 2018	Meningkat 10% dari tahun 2018
		12	Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan	24	Persentase Realisasi Program/ Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai Dari TJSL dan Sumbangan Pihak Ketiga	71,43	71,43	85,71	85,71	100	100	100
		25		25	Persentase Realisasi Program/ Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari Swasta (akumulasi)	0	33,33	33,33	66,67	66,67	100	100

Sumber: RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

Berdasarkan latar belakang Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, antara lain: dari Naskah Akademik, Konsultasi Publik, Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Rekomendasi Kemenpan RB, Rekomendasi DPRD Kota Bandung, dan KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Bandung dan masukan dari para Akademisi, terdapat perubahan indikator dan target pada tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Penambahan Indikator Level Kematangan *Smart City*, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Gini Ratio diusulkan menjadi indikator tujuan, sebelumnya indikator sasaran dengan maksud menyesuaikan level indikator tersebut untuk melengkapi pengukuran tujuan.
2. Penurunan target Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Gini Ratio, merupakan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19.
3. Perubahan kalimat tujuan menjadi “terwujudnya partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan” untuk menggambarkan hasil dengan membandingkan anggaran pembangunan non APBD dengan pendapatan dalam APBD, untuk menggambarkan peningkatan kinerja, maka dilakukan perubahan formulasi pengukuran indikator kinerja yang awalnya mengakumulasi bobot pada 3 indikator sasaran menjadi persentase anggaran pembangunan non APBD terhadap pendapatan dalam APBD.
4. Sasaran baru “meningkatnya masyarakat kota yang humanis” diukur dengan indikator Indeks *Liveable City* Aspek Sosial Budaya dengan kriteria terciptanya rasa nyaman, aman, tertib dengan semangat gotong royong, dan melestarikan nilai-nilai budaya sebagai ciri khas warga Kota Bandung.
5. Peningkatan target indikator nilai SAKIP dari BB menjadi A dengan mempertimbangkan proses pembentukan budaya kinerja Pemerintah Kota Bandung membutuhkan waktu dan upaya yang besar serta kerjasama dari seluruh perangkat daerah.
6. Penambahan indikator dan target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk melengkapi sasaran meningkatnya kapasitas kinerja birokrasi.
7. Penurunan target indikator Indeks Daya Saing Pariwisata karena adanya perubahan parameter daya saing yang lebih berorientasi pada standar kesehatan terkait pandemi Covid-19 yang berkaitan dengan penyediaan sarana prasarana kesehatan, kebersihan lingkungan, keselamatan dan keamanan dari penularan Covid-19, kesinambungan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan infrastruktur untuk pelayanan para turis, yang relatif masih perlu waktu bagi Kota Bandung untuk berbenah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas faktor-faktor parameter Indeks Daya Saing Pariwisata tersebut.
8. Peningkatan target indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan asumsi pandemi Covid-19 pada tahun-tahun yang akan datang masih memerlukan penanganan pada aspek sosial ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
9. Peningkatan target indikator IKLH disebabkan adanya perubahan metode perhitungan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat yang disampaikan pada kab/kota/Pemerintah Provinsi nomor 5.BIR/PPKL/SAT/REN.O/12/2020, tanggal 4 Desember 2020.
10. Perubahan indikator Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan menjadi Persentase Penurunan Kemacetan agar lebih berorientasi hasil/*outcome* dan/atau lebih dirasakan oleh masyarakat.
11. Perubahan Indikator Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan menjadi Persentase Penurunan Titik Genangan agar lebih berorientasi hasil/*outcome* dan/atau lebih dirasakan oleh masyarakat.

Perubahan tujuan dan sasaran serta indikator dan target Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Periode RPJMD		Realisasi			Target Perubahan RPJMD			Kondisi Akhir Periode RPJMD
						2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Misi 1: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing														
1	Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang bermutu, Adil dan Merata Berdasarkan Nilai-Nilai Agama dan Budaya	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		poin	81,06	81,62	81,51	81,00	81,10	81,20	81,20	81,20	81,20
						14,18	14,19	14,20	14,21	14,22	14,23	14,23		
						10,63	10,74	10,75	10,76	10,77	10,78	10,78		
						74,00	74,14	74,28	73,94	73,96	73,98	73,98		
						N/A	7,49	6,5	6,6	6,7	6,8	6,8	6,8	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Periode RPJMD		Realisasi			Target Perubahan RPJMD			Kondisi Akhir Periode RPJMD	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih															
2	Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien	2 Indeks Reformasi Birokrasi			predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
						3 Level Kematangan Smart City	Integratif	Integratif	B	B	B	B	B		
	4 Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	5 Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	persen	51,61	40	96,67	80	90	100	100					
	6 Nilai AKIP	predikat	predikat	A	BB	BB	A	A	A	A					
	7 Opini BPK	predikat	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP					
	8 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	poin	poin	3,11	3,72	3,20	3,25	3,30	3,35	3,35					
	9 Nilai EPPD	skor	skor	3,4144	3,3019	3,4013	3,4023	3,4033	3,4044	3,4044					
	Misi 3: Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan														
	3	Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Berkelanjutan, dan Berkeadilan	4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)			persen	7,08	6,79	-2,28	3,92	4,32	5,05	5,05	5,05	
5 Gini Ratio					poin	0,42	0,39	0,402	0,401	0,400	0,399	0,399	0,399		
6 PDRB Per Kapita				juta rupiah/orang	73,92	78,81	76,95	76,03	78,68	81,33	81,33	81,33			
7 Pengeluaran Per Kapita				ribu rupiah/orang	16.630	17.254	16.887	16.798	17.013	17.227	17.227	17.227			
5 Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota		10 Indeks Daya Saing Pariwisata	poin	3,34	3,41	3,29	3,29	3,30	3,31	3,31					
		11 Angka Kemiskinan	poin	3,57	3,38	3,99	3,49	3,32	3,14	3,14					
		12 Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	8,05	8,18	11,19	11,08	10,86	10,26	10,26					

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Periode RPJMD			Target Perubahan RPJMD			Kondisi Akhir Periode RPJMD						
						2018	2019	2020	2021	2022	2023							
Misi 4: Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan																		
4	Terwujudnya Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	8	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	7,48	7,66	N/A	7,775	7,875	8,00				
									35,20	45,22	48,54	51,63	51,71	51,79				
									12,21	12,22	12,25	12,75	13,26	13,77				
									98,00	97,99	98,30	98,50	98,70	99,00				
7	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	16	Persentase Penurunan Kemacetan	persen	N/A	24,35	20,87	14,78	7,83	2,80	2,76	2,16						
													5,16	4,28	2,94	2,80	2,76	2,16
													77,27	80,24	79,38	81,00	82,00	83,00
19	Persentase Penurunan Titik Genangan	persen	N/A	N/A	N/A	67,65	58,82	50,00	41,18	83,00	41,18							
												83,00	41,18					

V - 14

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Periode RPJMD		Realisasi			Target Perubahan RPJMD			Kondisi Akhir Periode RPJMD
						2018	N/A	2019	2020	2021	2022	2023		
Misi 5: Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi														
5	Terwujudnya Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan	9 Persentase Kolaborasi Pembiayaan terhadap Pendapatan	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan	20 Persentase Kolaborasi Pembiayaan terhadap Pendapatan	persen	N/A	N/A	N/A	7,13	5,98	6,48	6,69	6,69	6,69
		8			persen	N/A	N/A	N/A	7,13	5,98	6,48	6,69	6,69	6,69



STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VI





Berdasarkan permasalahan daerah serta isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target pembangunan yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sebagai cara atau upaya yang ditempuh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik dan Integratif

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan.

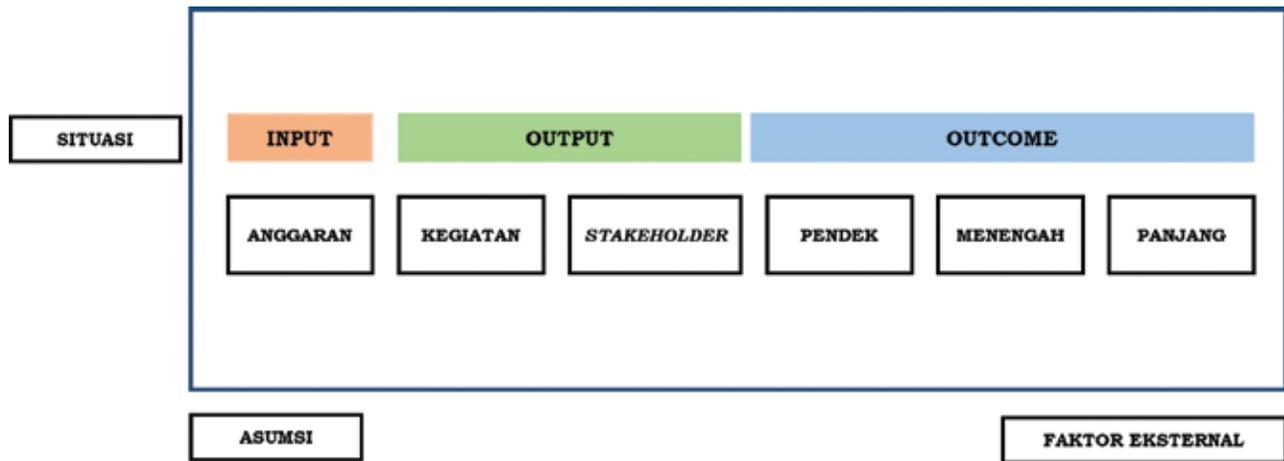
Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional sebagai upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Bandung tahun 2018-2023 yaitu analisis *logic model* atau model logika. *Logic model* adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. *Logic model* ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. *Logic model* adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak.

Dalam melaksanakan analisis perencanaan kinerja, teori yang digunakan adalah teori *logic model* dari Knowlton dan Phillips (2013) sebagai metode analisisnya. Secara umum, teori *logic model* dari Knowlton dan Phillips digunakan untuk menjelaskan ide, menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau menilai kemajuan dari suatu program. Melalui *logic model* juga dapat dijelaskan mengenai hubungan yang kompleks antar unsur-unsur atau bagian, serta menjelaskan tentang tindakan-tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan.

Logic model menawarkan sebuah cara untuk dapat mengungkapkan dan secara bersama-sama memahami hubungan antara elemen-elemen yang diperlukan untuk menjalankan sebuah program atau upaya-upaya perubahan. *Logic model* menjelaskan batasan-batasan mengenai rancangan apa yang telah direncanakan dan hasil apa yang diharapkan. Konsep *logic model* menyediakan sebuah *road map* yang spesifik dan terukur mulai dari awal hingga akhir. Secara sederhana, melalui *logic model* digambarkan sebuah alur mulai dari aksi-aksi atau kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan hasil yang diharapkan.

Logic model membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, *output* pada urusan teknis atau perangkat daerah. Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi pemerintah maupun pada perangkat daerah. Visualisasi *logic model* dapat dilihat pada Gambar 6.1.

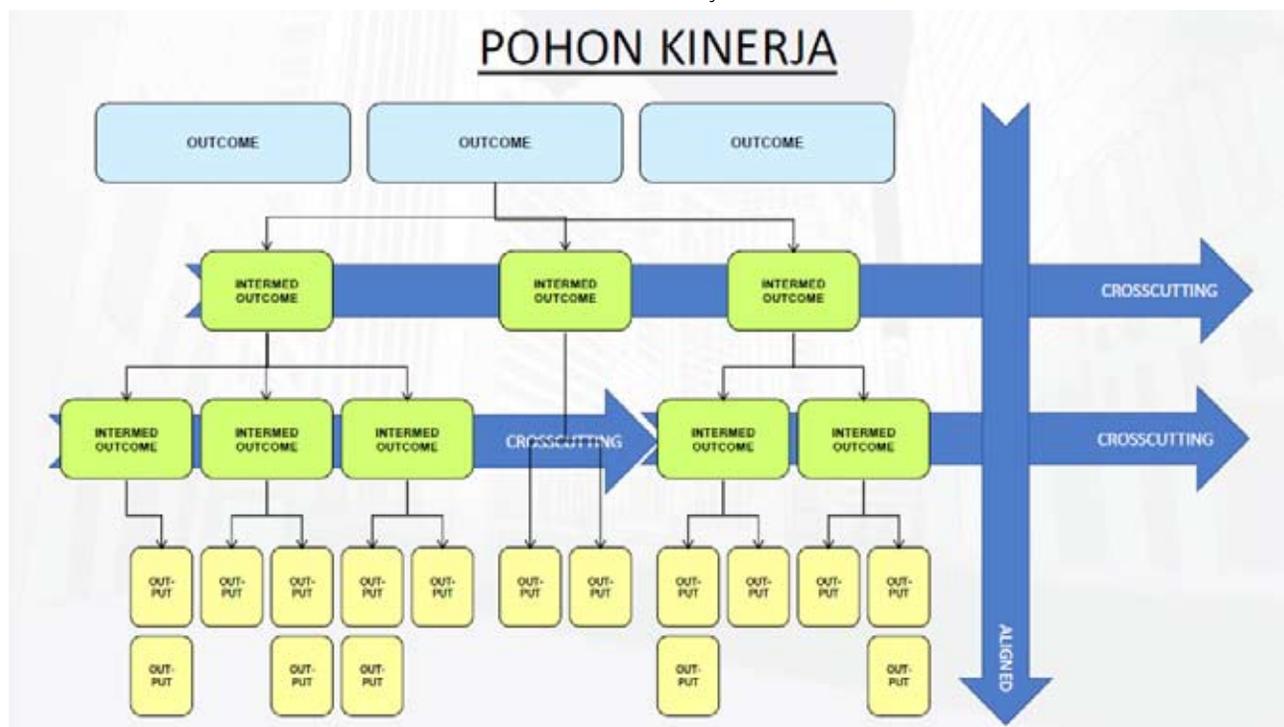
Gambar 6.1
Basic Logic Model



Pada penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi panduan Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, dirumuskan dengan memformulasikan *short term outcome* untuk strategi dan *intermediate term outcome* untuk arah kebijakan dan menjadi dasar bagi penentuan program prioritas. Melalui penerapan instrumen ini dapat dilihat kehandalan suatu program untuk mewujudkan sasaran daerah yang telah direncanakan dengan perumusan strategi berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan *logic model*.

Sejalan dengan konsep *logic model* yang digunakan sebagai dasar analisis, maka desain program yang direncanakan diharapkan mampu menunjukkan hubungan kelogisannya mulai dari aktivitas apa yang dilakukan, *output* yang dihasilkan, serta *outcome* apa yang diharapkan pada perangkat daerah untuk mencapai tujuan akhir dalam hal ini adalah visi Wali Kota Bandung yang harus dicapai dalam waktu lima tahun. Jabaran model kerangka logis mulai dari input, aktivitas, *output* serta *outcome* dalam rangka pencapaian dampak (*impact*) dituangkan dalam sebuah bagan pohon kinerja atau disebut pula dengan *cascading kinerja*, sebagaimana gambaran pohon kinerja pada Gambar 6.2 berikut.

Gambar 6.2
Pohon Kinerja



Pohon kinerja merupakan penjabaran kinerja dan indikator kinerja ke dalam kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya, dengan menggunakan kerangka logis. Pohon kinerja digunakan untuk merumuskan kinerja apa yang harus dilakukan di tingkat di bawahnya atau merumuskan kegiatan apa yang harus dilakukan, dengan prinsip umum penyusunan sebagai berikut:

1. Logis atau terdapat hubungan sebab akibat;
2. Empiris, berdasarkan kondisi yang ada;
3. Antisipatif atau berdasarkan hipotesa bukan untuk dipakai dalam jangka pendek;
4. Dinamis, atau mengikuti perubahan lingkungan;
5. *Wholistic* atau *crosscutting* dengan organisasi lain;
6. *Out of the box* yaitu untuk mencari yang terbaik bukan mempertahankan kondisi eksisting;
7. Materialisme yaitu memperhatikan tingkat kepentingan, bobot tinggi, dan strategis.

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka strategi dan arah kebijakan yang dipilih dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah Kota Bandung dapat sekaligus menjawab isu strategis pembangunan. Lebih lanjut, melalui penerapan instrumen ini dapat dilihat kehandalan suatu program untuk mewujudkan sasaran daerah yang telah direncanakan. Tujuan, sasaran, dan strategi setiap misi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 disajikan dalam Tabel 6.1, sedangkan untuk tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan setiap misi Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 disajikan dalam Tabel 6.2.

Tabel 6.1

Tujuan, Sasaran, dan Strategi Setiap Misi
RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang Bermutu, Adil dan Merata Berlandaskan Nilai-nilai Agama dan Budaya	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan mutu infrastruktur pendidikan Meningkatkan mutu proses pembelajaran Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendidikan Meningkatkan budaya baca	Meningkatkan jaminan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas lingkungan sehat Meningkatkan budaya hidup sehat Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	
2.	Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>Meningkatkan integritas aparatur sebagai pelayan masyarakat</p> <p>Meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan</p> <p>Penguatan kelembagaan tepat ukuran dan tepat fungsi</p> <p>Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan</p> <p>Meningkatkan kinerja instansi pemerintah</p> <p>Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien</p> <p>Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas</p>	
3.	Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan	<p>Meningkatnya perekonomian kota</p> <p>Meningkatkan kesempatan kerja</p>	<p>Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif</p> <p>Meningkatkan produk unggulan daerah berbasis pemberdayaan masyarakat</p> <p>Meningkatkan daya saing industri unggulan dan iklim perdagangan yang kondusif</p> <p>Mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan</p> <p>Meningkatkan pengembangan perdagangan pasar tradisional</p> <p>Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi yang kondusif</p> <p>Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi</p> <p>Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha atas izin yang diterbitkan</p> <p>Meningkatkan daya saing pariwisata, lingkungan bisnis pariwisata, tata kelola, dan infrastruktur pariwisata Kota Bandung</p> <p>Peningkatan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja</p>	Meningkatkan perekonomian kota yang mandiri dan adil melalui kemudahan investasi dan pengelolaan pariwisata serta penguatan pada usaha kecil dan menengah

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru berbasis padat karya	
			Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif	
		Menurunnya jumlah penduduk miskin	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan bantuan/jaminan sosial bagi warga miskin	
			Mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan	
			Membangun rusun untuk seluruh lapisan masyarakat dengan memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup	
4.	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya ruang kota yang aman, nyaman, tertib dan berkelanjutan	Meningkatkan ketersediaan lahan	Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, infrastruktur kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
			Menurunkan pelanggaran perijinan tata ruang	
			Meningkatkan kualitas RTH	
			Meningkatkan peran serta masyarakat/ swasta	
	Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas		Meningkatkan kapasitas saluran drainase	
			Meningkatkan fungsi lahan pada wilayah hulu/ wilayah perbatasan kota/kabupaten	
			Meningkatkan resapan air hujan	
			Meningkatkan peran serta masyarakat/ swasta	
			Meningkatkan sarana dan prasarana mobilitas penduduk kota	
			Meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana jalan	
			Meningkatkan manajemen kebutuhan lalu lintas	
			Meningkatkan keselamatan berlalu lintas	
			Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan kota dengan memperhatikan prinsip jalan yang berkeselamatan	
			Mengembangkan sistem jaringan angkutan umum massal yang terintegrasi dan transportasi ramah lingkungan	

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Mengendalikan ketertiban dan keselamatan lalu lintas	
			Meningkatkan kualitas kawasan permukiman	
			Meningkatkan akses sanitasi dan air minum	
			Meningkatkan pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat kawasan kumuh	
			Meningkatkan akses air bersih	
			Meningkatkan ketersediaan dan pasokan sumber air baku	
			Mengurangi tingkat kehilangan air	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	Meningkatkan indeks kualitas air	
			Meningkatkan indeks kualitas udara	
			Meningkatkan penanganan sampah	
			Mengurangi sampah dari sumber	
5.	Optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan	Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam berpartisipasi dan berkolaborasi pada pembangunan kota	Mengoptimalkan pembangunan Kota melalui partisipasi, kolaborasi masyarakat dan swasta dengan pemerintah kota.
		Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan	Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan melalui kerjasama daerah (Kerjasama Daerah, PINA, KPBU, Penugasan BUMD, Obligasi Daerah, TJSJ, Sumbangan Pihak Ketiga, dll)	

Tabel 6.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Setiap Misi Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing				
1.1	Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang Bermutu, Adil dan Merata Berdasarkan Nilai Nilai Agama dan Budaya	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Terwujudnya Aksesibilitas Siswa PAUD

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Terwujudnya Aksesibilitas Siswa SD
				Meningkatnya Aksesibilitas Siswa SMP Negeri
			Terwujudnya Mutu Pembelajaran	Terimplementasinya Kurikulum Pendidikan
				Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Meningkatnya Budaya Baca	Meningkatnya Pemanfaatan Bahan Bacaan dan Sumber Informasi
				Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Membaca dan Sumber Informasi
				Meningkatnya Kebiasaan Membaca Masyarakat
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat, Budaya Sehat, dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Kesehatan Lingkungan
				Meningkatnya Kualitas Pangan dan Hygiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Hidup Sehat dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
				Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat
				Meningkatnya Kebugaran Fisik Masyarakat
		Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis	Meningkatnya Budaya Masyarakat Kota yang Rukun, Tertib, dan Tenteram	Terwujudnya Kerukunan
				Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban
			Meningkatnya Budaya Gotong Royong Masyarakat dan Peran Pemuda Dalam Pembangunan	Meningkatnya Gotong Royong
				Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan
			Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya
				Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
				Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Seni Tradisi
			Meningkatnya Kesejahteraan Sosial, Ketahanan Keluarga, Perlindungan Perempuan, dan Anak	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
				Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
				Meningkatnya Ketahanan Keluarga
				Meningkatnya Fungsi Sosial Masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih				
2.1	Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Pengawasan
				Meningkatnya Kapasitas Manajemen Keuangan
				Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pemerintah Daerah
			Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Meningkatnya Manajemen Kepegawaian Daerah
				Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Meningkatnya Pengelolaan Data dan Statistik
				Meningkatnya Pengelolaan Persandian
				Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika
				Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kota Bandung
				Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kewilayahan
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan			
	Terwujudnya Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Berkualitas			
Misi 3: Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan				
3.1	Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Berkelanjutan, dan Berkeadilan	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata	Meningkatnya Kualitas Objek Daya Tarik Wisata
				Meningkatnya Pemasaran Pariwisata
			Meningkatnya Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing	Meningkatnya Ekosistem Ekonomi Kreatif
				Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Meningkatnya Investasi
			Meningkatnya Promosi Penanaman Modal	
			Meningkatnya Pengendalian Penanaman Modal	
			Meningkatnya Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian	Meningkatnya Daya Saing Produk Unggulan serta Iklim Perdagangan dan Industri yang Kondusif
				Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok
			Meningkatnya Kualitas Koperasi	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Koperasi
				Meningkatnya Kepatuhan Koperasi
				Meningkatnya Fasilitas Perijinan Usaha Simpan Pinjam
				Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Terwujudnya Masyarakat Miskin	Terwujudnya Kecukupan Pangan Masyarakat Miskin Meningkatnya Rumah Masyarakat Miskin Layak Huni Terwujudnya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Terwujudnya Pelayanan Pendidikan bagi Masyarakat Miskin Terwujudnya Bantuan Sosial
			Meningkatnya Kualitas Ketenagakerjaan	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja Meningkatnya Kesempatan Kerja Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial
			Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro
			Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pangan	Meningkatnya Pelaku Usaha Pangan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pangan
Misi 4: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan				
4.1	Terwujudnya Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Menurunnya Sumber Pencemaran Air Menurunnya Pencemar Air Sumber Limbah Industri Menurunnya Pencemar Air Sumber Limbah Domestik Menurunnya Sumber Pencemaran Udara Menurunnya Pencemar Udara Sumber Tidak Bergerak Menurunnya Pencemar Udara Sumber Bergerak
			Meningkatnya Luasan dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya Kuantitas RTH Publik Meningkatnya RTH dari Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan Meningkatnya RTH dari Pengadaan Lahan Meningkatnya RTH Alih Fungsi Ekologis

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Meningkatnya Kuantitas RTH Privat
				Meningkatnya Kepatuhan Penyediaan RTH Privat
				Meningkatnya Verifikasi dan Validasi Data RTH Privat
				Meningkatnya Kualitas RTH Publik
				Meningkatnya Penataan Pemakaman
				Meningkatnya Pemeliharaan Taman, Median, Jalur Hijau Jalan, dan Hutan Kota
			Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Sampah	Menurunnya Timbulan Sampah yang Ditangani
				Meningkatnya Capaian Pengurangan Sampah
		Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Meningkatnya Pelayanan Jalan	Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan
				Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Non Perhubungan
				Meningkatnya Kemantapan Jalan
			Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh	Meningkatnya Kualitas Hunian Permukiman Kriteria Bangunan Gedung
				Meningkatnya Kualitas Hunian Permukiman Kriteria Penyediaan Air Minum
				Meningkatnya Kualitas Hunian Permukiman Kriteria Pengelolaan Air Limbah
				Meningkatnya Kualitas Hunian Permukiman Kriteria Jalan Lingkungan
				Meningkatnya Kualitas Hunian Permukiman Kriteria Drainase Lingkungan
				Meningkatnya Kualitas Hunian Permukiman Kriteria Pengelolaan Persampahan
				Meningkatnya Kualitas Hunian Permukiman Kriteria Proteksi Kebakaran
			Meningkatnya Pelayanan Air Minum	Meningkatnya Akses Air Minum Perpipaan
				Meningkatnya Akses Air Minum Non Perpipaan
			Menurunnya Genangan	Meningkatnya Kapasitas Resapan Air
				Meningkatnya Kapasitas Aliran Sungai
				Meningkatnya Kapasitas Parkir Air
				Meningkatnya Kapasitas Saluran Drainase Jalan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatnya Kepatuhan Pembangunan Terhadap Ketentuan Tata Ruang dan Bangunan Gedung	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang
Misi 5: Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi				
5.1	Terwujudnya Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Meningkatnya Inovasi Skema Pembiayaan Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Meningkatnya Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Sumbangan Pihak Ketiga Meningkatnya Skema Pembiayaan Lainnya

6.2. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial

6.2.1. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota dikelompokkan ke dalam: (1) kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang; (2) kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang; dan (3) kebijakan dan strategi pengendalian pemanfaatan ruang.

6.2.2.1. Kebijakan dan Strategi Perencanaan Ruang

Kebijakan dan strategi perencanaan ruang Kota Bandung diarahkan bagi terwujudnya rencana tata ruang Kota Bandung yang handal dan berkualitas sehingga dapat mewujudkan tujuan penataan ruang yang ditetapkan. Kebijakan dan strategi perencanaan ruang Kota Bandung terdiri atas: (a) kebijakan dan strategi struktur ruang; (b) kebijakan dan strategi pola ruang; serta (c) kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

A. Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang

Kebijakan pengembangan struktur ruang Kota Bandung adalah perwujudan struktur ruang yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di kawasan perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Kebijakan umum tersebut diturunkan menjadi 3 (tiga) kebijakan khusus yaitu:

1. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung ekonomi kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
2. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
3. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Kebijakan mewujudkan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai perdagangan dan jasa yang didukung ekonomi kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional dilakukan melalui strategi:

1. Mengembangkan 2 (dua) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur;

2. Membagi kota menjadi 8 (delapan) Sub Wilayah Kota (SWK), masing-masing dilayani oleh 1 (satu) Subpusat Pelayanan Kota (SPK);
3. Mengembangkan kawasan berorientasi transit yang terintegrasi dengan pusat-pusat pelayanan;
4. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;
5. Menyediakan fasilitas yang memadai pada setiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan
6. Menyeraskan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan.

Kebijakan pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali dilakukan melalui strategi membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi. Kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali dilakukan melalui strategi:

1. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;
2. mengawasi fungsi dan hirarki jalan;
3. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan;
4. memprioritaskan pengembangan sistem angkutan umum massal yang terpadu;
5. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan;
6. mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan pemerintah daerah yang berbatasan; dan
7. mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota.

Kebijakan peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional dilakukan melalui strategi:

1. menjaga keseimbangan ketersediaan air baku;
2. mempertahankan kualitas air permukaan dan air tanah dangkal;
3. mewajibkan penyediaan sumur resapan dalam setiap kegiatan pembangunan;
4. mengupayakan ketersediaan sumber air baku melalui kerjasama antardaerah;
5. mengurangi tingkat kebocoran air minum;
6. memperluas jaringan prasarana air limbah;
7. mewajibkan penyediaan instalasi pengelolaan limbah khusus pada setiap kegiatan yang menghasilkan limbah;
8. meningkatkan pelayanan prasarana drainase dalam rangka mengatasi permasalahan banjir dan genangan;
9. mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dengan cara pengolahan setempat per wilayah dengan teknik-teknik yang ramah lingkungan;
10. meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
11. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum di pusat-pusat pelayanan kota dan lingkungan sesuai dengan skala pelayanannya;
12. mempertahankan serta memelihara fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada;

13. mengarahkan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum baru skala kota dan wilayah ke Wilayah Bandung Timur;
14. melengkapi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang kurang di seluruh wilayah kota;
15. menyebarkan dan pemeratakan fasilitas sosial dan fasilitas umum dan membatasi fasilitas yang sudah jenuh;
16. mengendalikan dampak negatif dari berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
17. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

B. Kebijakan dan Strategi Pola Ruang

Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Bandung yang produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan ekonomi kreatif bertaraf nasional, maka kebijakan pengembangan pola ruang Kota Bandung meliputi:

1. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung; dan
2. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Kebijakan ini meliputi upaya mewujudkan keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Bandung Utara dan kawasan budidaya dengan mengembangkan pola ruang daerah yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi dan mengoptimalkan pembangunan wilayah terbangun.

Konsep pola ruang Kota Bandung di masa mendatang akan diarahkan menuju kota yang kompak (*compact city*). Pengembangan *compact city* dilakukan dengan menekankan kota dan lansekap, menambahkan pembangunan pada struktur yang sudah ada, mengkombinasikan fungsi-fungsi dalam tingkat bagian wilayah kota, menyebarkan fasilitas dalam rangka membatasi lalu lintas dan meningkatkan aksesibilitas bagi penduduk pembangunan dengan kepadatan tinggi, dan menekankan pada transportasi umum. Dengan demikian, konsep perancangan kota yang dapat diterapkan antara lain, meliputi: *green city*, intensifikasi (*infill* dan *vertical development, redevelopment*), *transit oriented development* dan *mixed-use development*. Selain itu, badan air yang ada di Kota Bandung juga potensial untuk dikembangkan dengan konsep *waterfront development*.

Pola ruang diwujudkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kebijakan yang menyangkut tentang pola ruang meliputi kebijakan pola ruang kawasan lindung, kawasan budidaya serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dengan melihat karakteristik geografis dan kebijakan pola ruang diatas maka strategi pengembangan pola ruang Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung, meliputi:
 - a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;
 - b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
 - c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
 - d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
 - e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke

- fungsi lain di dalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
 - f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
 - g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.
2. Strategi pola ruang kota untuk optimalisasi pembangunan wilayah terbangun, meliputi:
- a. mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
 - b. mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri atas SWK Arcamanik, SWK Ujungberung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage;
 - c. mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegalega, dan SWK Karees;
 - d. membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;
 - e. mempertahankan fungsi dan menata Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
 - f. menata, mengendalikan, dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya; dan
 - g. menata kawasan permukiman kumuh dengan pendekatan fisik, sosial, dan ekonomi.

C. Kebijakan dan Strategi Kawasan Strategis Kota

Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kebijakan tersebut dijabarkan menjadi beberapa strategi yaitu:

1. menjalin kemitraan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat serta menyediakan insentif pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; dan
2. memanfaatkan mekanisme perizinan, penilaian permohonan pembangunan, serta insentif dan disinsentif untuk mengendalikan dan/atau membatasi pembangunan yang berdampak negatif terhadap fungsi kawasan strategis.

6.2.2.2. Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang

Kebijakan pemanfaatan ruang diwujudkan berdasarkan kebijakan struktur tata ruang dan pola tata ruang, yaitu pengembangan program perwujudan tata ruang yang dalam pelaksanaannya dapat mendorong kemitraan dan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Strategi penerapannya adalah:

1. menjabarkan dan menyusun tahapan dan prioritas program berdasarkan persoalan mendesak yang harus ditangani, serta antisipasi dan arahan pengembangan masa mendatang; dan
2. mendorong kemitraan dan kerjasama dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan kota dan pembangunan kota.

6.2.2.3. Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Kota Bandung disusun dengan merujuk pada ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan umum mekanisme perizinan pemanfaatan ruang, ketentuan umum pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan penerapan sanksi bagi pelanggaran tata ruang.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Kota Bandung, ditetapkan strategi pengendalian pemanfaatan ruang sebagai berikut:

1. menyusun peraturan zonasi, ketentuan teknis, standar teknis, kualitas ruang, dan standar kinerja sebagai rujukan bagi penerbitan izin yang lebih efisien, efektif dan akuntabel;
2. menyusun proses pengkajian rancangan dalam proses penerbitan perizinan bagi permohonan perubahan pemanfaatan ruang dan kegiatan yang berdampak penting;
3. menyusun mekanisme dan perangkat insentif dan disinsentif untuk mendorong pengembangan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan mencegah terjadinya penyimpangan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
4. menyusun tata cara mengidentifikasi dan menghitung dampak penting;
5. menyusun tata cara pengenaan dan penghitungan denda dan dampak pembiayaan pembangunan;
6. menyusun tata cara pengawasan dan pengendalian pembangunan yang melibatkan semua pemangku kepentingan; dan
7. menyusun tata cara untuk pengajuan keberatan terhadap rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan perizinan yang diterbitkan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan daerah khususnya mengenai fokus atau tema pembangunan tahunan dalam satu periode RPJMD perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya pencapaian indikator sasaran yang termuat dalam tiap misi. Hal ini penting, sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator sasaran misi dimaksud, sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya. Berikut penjelasan mengenai langkah dalam menentukan fokus atau tema pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, yang tertuang dalam Tabel 6.3 berikut.

Tabel 6.3
Capaian Kinerja Misi 1

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA (%)
Membangun masyarakat Kota Bandung yang mandiri dengan jaminan pendidikan, kesehatan yang bermutu, adil dan merata berlandaskan nilai agama dan budaya	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,01	14,20	101,36
		Angka Kelulusan	Persen	100	100	100
		Rata-rata Nilai Ujian SD	Angka	76,76	N/A	N/A
		Rata-rata Nilai Ujian SMP	Angka	57,04	N/A	N/A
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,92	74,28	100,49

Sumber: LKPJ Wali Kota Bandung Tahun 2020

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran misi 1 dapat digambarkan bahwa pencapaian misi 1 dikategorikan baik terlihat dari capaian umur harapan hidup yang mencapai 74,28 tahun, dan harapan lama sekolah sebesar 14,20 tahun. Berdasarkan capaian tersebut dan disesuaikan dengan

strategi yang harus dilakukan, maka dalam rangka memenuhi atau mencapai target misi 1 maka terkait pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas atau fokus pembangunan sampai dengan akhir periode RPJMD. Capaian kinerja Misi 2 disajikan dalam Tabel 6.4.

Tabel 6.4
Capaian Kinerja Misi 2

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA (%)
Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	Persen	70,00%	96,67%	138,10%
		Nilai Evaluasi AKIP Kota	Predikat	A	BB	97,49%
		Nilai LPPD Kota	Predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100%
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WTP	WTP	100%
		Level Kematangan Smart City Kota Bandung	Tingkat	Integratif	Integratif	100%

Sumber: LKPJ Wali Kota Bandung Tahun 2020

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran misi 2 dapat digambarkan bahwa pencapaian misi 2 dikategorikan baik terlihat dari capaian nilai LPPD Kota yang mendapat predikat Sangat Tinggi (ST), opini BPK terhadap LKPD berada pada predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), level kematangan *smart city* yang mencapai level integratif, dan persentase perangkat daerah dengan nilai IKM "Baik" mencapai 96,67% dari target 70%.

Melihat capaian tersebut dan disesuaikan dengan strategi yang harus dilakukan, maka dalam rangka memenuhi atau mencapai target misi 2 terkait tata kelola pemerintahan, perlu mendapat dukungan khususnya terkait pencapaian nilai evaluasi AKIP sehingga hal ini menjadi prioritas atau fokus pembangunan sampai dengan akhir periode RPJMD. Capaian kinerja Misi 3 disajikan dalam Tabel 6.5.

Tabel 6.5
Capaian Kinerja Misi 3

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA (%)
Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan	Meningkatnya perekonomian kota	PDRB Per Kapita	Juta Rp	73,38	76,95	104,87
		Indeks Daya Saing Pariwisata	Poin	3,55	3,29	92,68
		Pengeluaran Per Kapita	Ribu rupiah/ org	16.584	16.887	101,83
	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Angka Kemiskinan	Persen	3,66	3,99	90,98
	Meningkatkan kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,34	11,19	65,83

Sumber: LKPJ Wali Kota Bandung Tahun 2020

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran misi 3 dapat dilihat bahwa capaian PDRB per Kapita kota yang mencapai 76,95 juta rupiah, indeks daya saing pariwisata yang mencapai 3,29 poin, pengeluaran per kapita sebesar Rp16.887ribu rupiah/orang, tingkat pengangguran terbuka yang berada pada angka 11,19%, serta angka kemiskinan yang mencapai 3,99%.

Berdasarkan capaian tersebut dan disesuaikan dengan strategi yang harus dilakukan, maka dalam rangka memenuhi atau mencapai target misi 3 terkait peningkatan perekonomian kota, kesempatan kerja dan kemiskinan, perlu mendapat dukungan penuh khususnya terkait peningkatan perekonomian dan pengentasan kemiskinan terutama akibat dampak pandemi Covid-19 sehingga hal ini harus menjadi prioritas atau fokus pembangunan sampai dengan akhir periode RPJMD. Capaian kinerja Misi 4 disajikan dalam Tabel 6.6.

Tabel 6.6
Capaian Kinerja Misi 4

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA (%)	
Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya ruang kota yang nyaman, dan berkelanjutan	Persentase RTH	Persen	12,60	12,25	97,22	
		Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas	Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan	Menit	80,00	60,76	124,05
			Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan	Aspek	10	10	100
			Persentase Luasan Kawasan Kumuh	Persen	3,96	2,94	125,76
			Meningkatnya layanan air bersih	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	80,00	79,38
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	35,47	43,90	123,77
			Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota	Persen	98,30	98,32	100,02

Sumber: LKPJ Wali Kota Bandung Tahun 2020

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran misi 4 dapat digambarkan bahwa pencapaian misi 4 dikategorikan sangat baik terlihat dari capaian lama genangan yang tertangani pada titik genangan mencapai 60,76 menit, jumlah aspek penyebab kemacetan sebanyak 10 aspek, persentase luasan kawasan kumuh sebesar 2,94%, cakupan layanan air bersih mencapai 79,38%, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang berada pada angka 43,90 poin, cakupan layanan pengelolaan sampah kota yang mencapai 98,32%, sedangkan persentase RTH mencapai 12,25% dari target sebesar 12,60%.

Berdasarkan capaian tersebut dan disesuaikan dengan strategi yang harus dilakukan, maka dalam rangka memenuhi atau mencapai target misi 4 terkait permasalahan RTH, macet, banjir, kawasan kumuh, sampah dan kualitas lingkungan perlu mendapat dukungan, terutama pada permasalahan RTH sehingga hal ini harus menjadi prioritas atau fokus pembangunan sampai dengan akhir periode RPJMD. Capaian kinerja Misi 5 disajikan dalam bentuk Tabel 6.7.

Tabel 6.7
Capaian Kinerja Misi 5

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA (%)
Optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan kepentingan lainnya	Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan (Meningkat 2% dari tahun 2018 sebesar 193 Miliar Rupiah)	Miliar	205,92	291,62	141,62

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA (%)
	Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan	Persentase Realisasi Program/ Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari TJSL dan Sumbangan Pihak Ketiga	Persen	85,71	100	116,67
		Persentase Realisasi Program/Agenda Prioritas Pembangunan yang Sebagian Dibiayai dari Swasta	Persen	33,33	100	300,03

Sumber: LKPJ Wali Kota Bandung Tahun 2020

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran misi 5 dapat digambarkan bahwa pencapaian misi 5 dikategorikan baik terlihat dari capaian tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan sebanyak 291,62 miliar dan persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebesar 100%, sedangkan persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang sebagian dibiayai dari swasta (Kerjasama Daerah, KPBU, Penugasan BUMD, Obligasi Daerah TJSL dan Sumbangan Pihak Ketiga) tercapai sebesar 100%. Dalam rangka memenuhi atau mencapai target misi 5 maka terkait permasalahan pembiayaan pembangunan, perlu mendapat dukungan penuh sehingga hal ini harus menjadi prioritas atau fokus pembangunan sampai dengan akhir periode RPJMD.

Pembangunan Kota Bandung yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2020 serta 3 (tiga) tahun sisa periode RPJMD sampai dengan tahun 2023 diarahkan pada beberapa fokus pembangunan. Fokus tahunan pembangunan tersebut diharapkan dapat menjawab isu strategis pembangunan dan mempercepat pencapaian target sasaran pembangunan. Adapun fokus pembangunan per tahun selama 5 (lima) tahun digambarkan sebagaimana pada Tabel 6.8.

Tabel 6.8

Fokus Pembangunan Kota Bandung

FOKUS PEMBANGUNAN				
TAHUN I (2019)	TAHUN II (2020)	TAHUN III (2021)	TAHUN IV (2022)	TAHUN V (2023)
1. Ketenteraman dan Kenyamanan	1. Pendidikan	1. Pendidikan	1. Pendidikan	1. Pendidikan
2. Pendidikan	2. Kesehatan	2. Kesehatan	2. Kesehatan	2. Kesehatan
3. Kesehatan	3. Tata Kelola Pemerintahan	3. Tata Kelola Pemerintahan	3. Peningkatan Perekonomian	3. Peningkatan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan	4. Peningkatan Perekonomian	4. Peningkatan Perekonomian	4. Pengangguran	4. Pengangguran
5. Peningkatan Perekonomian	5. Pengangguran	5. Pengangguran	5. Kemiskinan	5. Kemiskinan
6. Pengangguran	6. Kemiskinan	6. Kemiskinan	6. RTH	6. RTH
7. Kemiskinan	7. RTH	7. RTH	7. Banjir	7. Banjir
8. RTH	8. Banjir	8. Banjir	8. Macet	8. Macet
9. Banjir	9. Macet	9. Macet	9. Kawasan Kumuh	9. Kawasan Kumuh
10. Macet	10. Kawasan Kumuh	10. Kawasan Kumuh	10. Sampah	10. Sampah
11. Kawasan Kumuh	11. Sampah	11. Sampah	11. Kualitas Lingkungan Hidup	11. Kualitas Lingkungan Hidup
12. Sampah	12. Kualitas Lingkungan Hidup	12. Kualitas Lingkungan Hidup	12. Pembiayaan Pembangunan	12. Pembiayaan Pembangunan
13. Kualitas Lingkungan Hidup	13. Pembiayaan Pembangunan	13. Pembiayaan Pembangunan		
14. Pembiayaan Pembangunan				

Berdasarkan fokus pembangunan tahunan di atas, maka tema pembangunan tahunan Pemerintah Kota Bandung selama kurun waktu 5 (lima) tahun mulai 2019 sampai dengan 2023 disajikan pada Tabel 6.9.

Tabel 6.9
Tema Pembangunan Kota Bandung

TAHUN	RPJMD	PERUBAHAN RPJMD
2019	Mewujudkan kehidupan Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis melalui peningkatan pelayanan dasar, perekonomian kota dan kualitas Infrastruktur yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Mewujudkan kehidupan Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis melalui peningkatan pelayanan dasar, perekonomian kota dan kualitas infrastruktur yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
2020	Meningkatkan kehidupan Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis melalui peningkatan pelayanan dasar, perekonomian kota dan kualitas infrastruktur yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatkan kehidupan Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis melalui peningkatan pelayanan dasar, perekonomian kota dan kualitas infrastruktur yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
2021	Memantapkan kualitas infrastruktur dan lingkungan dalam mendukung perekonomian kota menuju Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis	Percepatan pemulihan ekonomi, dampak sosial dan penguatan sistem kesehatan daerah.
2022	Memantapkan kualitas pelayanan dasar, peningkatan perekonomian kota dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan menuju Kota Bandung yang nyaman, sejahtera dan berdaya saing	Meningkatkan ketahanan kota, mempercepat pemulihan ekonomi, dan reformasi sosial menuju Kota Bandung yang nyaman, sejahtera, dan berdaya saing.
2023	Memantapkan kualitas infrastruktur dan lingkungan dalam mendukung perekonomian kota menuju Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis	Memantapkan kualitas infrastruktur dan lingkungan dalam mendukung perekonomian kota menuju Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis.

6.3. Program Pembangunan Daerah

Perencanaan strategis yang dituangkan dalam RPJMD harus dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan operasional. Visi dan misi kepala daerah yang telah dijabarkan ke tujuan dan sasaran untuk jangka waktu 5 (lima) tahun diwujudkan dengan serangkaian strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

Program pembangunan daerah selain diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, juga untuk menjawab isu strategis Kota Bandung dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kota. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah terkait diwujudkan dalam program dan kegiatan (serta subkegiatan). Pencapaian dan rencana penerapan SPM di Kota Bandung disajikan pada Tabel 6.10.

Tabel 6.10

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2021-2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program	Penanggung Jawab Urusan	
SPM PENDIDIKAN					
1	Pendidikan anak usia dini	Program Pengelolaan Pendidikan	1	Rasio siswa PAUD terhadap ketersediaan Rombongan Belajar	Dinas Pendidikan
2	Pendidikan kesetaraan		2	Rasio siswa SD terhadap ketersediaan ruang kelas	
3	Pendidikan dasar		3	Rasio penduduk usia SMP terhadap ketersediaan Rombongan Belajar	
			4	Jumlah Unit SMP Negeri yang dibangun dan dilengkapi	
			5	Cakupan Kurikulum Pendidikan yang Memenuhi Standar	
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	
SPM KESEHATAN					
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		2	Cakupan Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		3	Jumlah Relokasi Puskesmas	
4	Pelayanan Kesehatan Balita		4	Cakupan Masyarakat yang Memiliki Jaminan Pelayanan Kesehatan	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		5	Capaian SPM Bidang kesehatan	
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		6	Cakupan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat	
7	Pelayanan kesehatan pada usia produktif;		7	Cakupan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Cakupan sumber daya manusia kesehatan yang terstandarisasi	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;				
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;				
11	Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis;				
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja Program	Penanggung Jawab Urusan
SPM PEKERJAAN UMUM					
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	Persentase Cakupan Layanan Air Bersih	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah	
SPM PERUMAHAN RAKYAT					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Pengembangan Perumahan	1	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/ kota				
SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT					
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Per Tahun	Satpol PP
			2	Persentase Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Aktif	
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	1	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana Pratama	Diskar PB
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program		Penanggung Jawab Urusan
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	Persentase Kelurahan Siaga Kebakaran	Diskar PB
			2	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	
			3	Persentase Sarana Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Kondisi Baik	
			4	Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Ketidakterersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	
			5	Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Ketidakterersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	
SPM SOSIAL					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	1	Cakupan PPKS Terlantar yang Memperoleh Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti				
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti				
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti				
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	Program Penanganan Bencana	1	Cakupan Capaian SPM Kebencanaan Bidang Sosial	

Sumber: Hasil analisis, 2021

Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk menjawab program prioritas kepala daerah yang telah disampaikan pada saat kampanye. Adapun capaian program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung disajikan pada Tabel 6.11.

VI - 26

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023**

Tabel 6.11

Program Prioritas Kepala Daerah Tahun 2018-2023

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan	Program	Indikator Janji Wali Kota	Satuan	Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
1	PIPPK Plus	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Wilayah yang selanjutnya ditingkat PIPPK adalah program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan. Besarannya PIPPK sebesar Rp100 Juta/LKK dan dapat bertambah sesuai dengan kemampuan anggaran. Capaian kinerja PIPPK Plus diukur dari jumlah LKK dan RW se-Kota Bandung yang menerima dan menjalankan program PIPPK. Ruang lingkup PIPPK diatur dalam Peraturan Wali Kota.	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Persentase pemanfaatan atas alokasi anggaran	Persen	100	Bagian Tata Pemerintahan Setda, Kewilayahan
2	Satu Pusat Kreativitas Pemuda Per Wilayah	Pusat Kreativitas Pemuda adalah ruang publik yang dipergunakan para pemuda sebagai pusat kreasi berkaitan dengan kegiatan pemuda baik secara individu maupun bersama / berkelompok seperti kegiatan diskusi, temu ilmiah kepemudaan, ekonomi, olahraga dan minat bakat pada lingkup wilayah (daerah pemilihan)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pusat Kreativitas Pemuda Aktif	Lokasi	6	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Youthspace per Kecamatan	<i>Youthspace</i> (Ruang kepemudaan) adalah ruang atau forum yang dipergunakan para pemuda sebagai pusat kreasi untuk melatih hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pemuda baik secara individu maupun bersama / berkelompok seperti kegiatan diskusi, temu ilmiah kepemudaan, ekonomi, olahraga dan minat bakat pada lingkup kecamatan.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah <i>Youthspace</i> Aktif	Lokasi	30	Dinas Pemuda dan Olahraga
4	Satu Perpustakaan Keililing Per Kecamatan	Perpustakaan Keililing merupakan sebuah layanan fasilitas membaca di tempat yang koleksi bacaannya berada di dalam kendaraan / sarana bergerak yang jangkauannya meliputi area pendidikan dan area publik dan bergerak (<i>mobile</i>) fleksibel menjangkau pada 30 kecamatan berdasarkan jadwal pelayanan.	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Keililing Aktif	Unit	6	Dinas Arsip dan Perpustakaan

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan	Program	Indikator Janji Wali Kota	Satuan	Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
5	Beasiswa Pendidikan bagi Siswa, Guru dan ASN Berprestasi	<p>Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa, Guru, dan ASN Berprestasi, diarahkan untuk bantuan beasiswa yang diberikan kepada siswa, guru, dan ASN Kota Bandung yang memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik dengan kriteria tertentu setiap tahun.</p> <p>1. Guru (ASN) berprestasi berdasarkan urutan nilai tertinggi dengan kriteria sebagai berikut : a. Nilai PKG Minimal Baik b. Nilai Supervisi Akademik Minimal Baik c. Rata-Rata Nilai Siswa</p> <p>2. Beasiswa untuk siswa SD dan SMP Negeri tidak berdasarkan pada prestasi siswa dikarenakan telah disediakan program pendidikan gratis, sedangkan untuk siswa SD dan SMP swasta kriteria pemberian beasiswa diprioritaskan atas kerawanan melanjutkan pendidikan.</p> <p>3. Aparatur Sipil Negara (ASN) Berprestasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan kategori: a. Pegawai ASN Inovatif b. Pegawai ASN Inspiratif c. <i>The Future Leader</i> d. Camat Terbaik e. Lurah Terbaik</p>	<p>Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>Program Pengelolaan Pendidikan</p> <p>Program Kepegawaian Daerah</p>	<p>Jumlah Guru (ASN) Berprestasi Sesuai dengan Kriteria</p> <p>Persentase siswa SD dan SMP mendapatkan beasiswa</p> <p>Jumlah ASN berprestasi sesuai dengan kriteria</p>	<p>Orang</p> <p>Persen</p> <p>Orang</p> <p>Persen</p>	<p>450</p> <p>100</p> <p>78</p>	<p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas Pendidikan</p> <p>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>
6	Pusat Pelayanan & Pemberdayaan Perempuan per Kelurahan	<p>Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan adalah lembaga partisipatif yang dibentuk secara formal oleh kelurahan untuk melaksanakan pendampingan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.</p>	<p>Program Perlindungan Perempuan</p>	<p>Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif</p>	<p>Persen</p>	<p>72,85</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan	Program	Indikator Janji Wali Kota	Satuan	Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
7	Pusat Pelayanan dan Kreativitas Anak per Kelurahan	Pusat Pelayanan dan Kreativitas Anak per Kelurahan adalah model pemenuhan atas perlindungan dan hak anak terutama kreatifitas anak oleh Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak sebagai komponen utama dan secara bertahap didukung oleh komponen Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, Forum Anak, dan Pusat Kreativitas Anak pada tingkat kelurahan secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan melibatkan sumber daya pemerintah kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang ada di kelurahan dengan mengacu pada Permen PPPA No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak	Kelurahan Layak Anak	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Kampung Wisata di Setiap Wilayah	Kampung Wisata adalah suatu wilayah di kawasan perkotaan dengan luasan tertentu dan memiliki potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dengan komunitas masyarakat yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan (Perwal 1454 Tahun 2018)	1. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kampung Wisata terbentuk	Wilayah	9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9	Flyover/ underpass	Jalan Layang adalah jalan yang dibangun tidak sebidang melayang menghindari daerah/kawasan yang selalu menghadapi permasalahan kemacetan lalu lintas, melewati perlintasan kereta api untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi. Sedangkan <i>underpass</i> adalah jalan yang dibuat di bawah tanah dan fungsinya sama dengan flyover yaitu untuk mengurai kemacetan.	1. Program Penye-lenggaraan Jalan 2. Bantuan APBD Provinsi/ APBN	Jumlah Flyover/ Underpass Terbangun	Unit	5	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan	Program	Indikator Janji Wali Kota	Satuan	Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
10	Kolam/saluran retensi	Kolam Retensi adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Jumlah Kolam/Saluran Retensi Terbangun	Kolam	7	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
11	Fasilitas Disabilitas di semua Ruang Publik	Fasilitas Disabilitas adalah akses bagi penyandang cacat pada sarana dan prasarana umum. Fasilitas disabilitas berupa sarana prasarana, diantaranya jalan dan taman. 1. Fasilitas disabilitas pada jalan, berupa fasilitas pejalan kaki/trotoar, diantaranya penyediaan <i>ramp on/off</i> (jalur khusus), ubin pemandu untuk aksesibilitas kaum difabel. 2. Fasilitas disabilitas pada taman berupa ramp, railing, sirkulasi kursi roda	Program Penyelenggaraan Jalan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Program Kawasan Permukiman	Jumlah Ruas Jalan yang Ada Fasilitas Disabilitas Jumlah Taman yang Ada Fasilitas Disabilitas Jumlah Sambungan Air Bersih Baru yang Tersambung	Ruas Jalan Taman SR	72 42 25.000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumda Tirtawening, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
12	25.000 Sambungan Air Bersih Baru	25.000 Sambungan Air Bersih Baru, adalah pelayanan Perumda Tirtawening dan DPKP (perpipaan dan non perpipaan) dalam rangka memenuhi permohonan masyarakat yang mengajukan kebutuhan air bersih	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Sarana Olahraga Kecamatan yang Terehabilitasi	Kecamatan	30	Dinas Pemuda dan Olahraga
13	Rehabilitasi Sarana Olahraga per Kecamatan	Rehabilitasi sarana olahraga pada kecamatan, yang diarahkan untuk memperbaiki sarana prasarana olahraga.					

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan	Program	Indikator Janji Wali Kota	Satuan	Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
14	Bank Sampah per Kecamatan	Bank Sampah per Kecamatan (30 bank sampah), adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pengumpul sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Penyeter adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti menabung di bank.	Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah Bank Sampah per Kecamatan	Kecamatan	30	Dinas Lingkungan Hidup
15	Rehabilitasi Pasar Tradisional	Rehabilitasi Pasar Tradisional yang diarahkan untuk memperbaiki sarana prasarana pasar tradisional.	-	Jumlah Pasar Tradisional Terehabilitasi	Unit	10	PD Pasar Bermartabat
16	Pusat Perdayaan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (Co-Working Space, CWS) per Kecamatan	Ruang Kerja Bersama (Co-Working Space) yang selanjutnya disebut Co-Working Space adalah ruang kerja dimana pengguna dapat bekerja dengan orang lain dari berbagai perusahaan, organisasi, komunitas, pemerintahan, dan/ atau individu yang berbeda disatu tempat guna menghasilkan karya secara bersama maupun individual baik yang bersifat digital dan/atau non-digital yang dapat dinilai dengan ekonomi maupun non-ekonomi (Raperwal tentang Pelaksanaan Percepatan Pembangunan, Pengembangan dan Aktivitas Ruang Kerja Bersama (Co-Working Space))	<ol style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Perdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 	Jumlah Pusat Perdayaan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (Co-Working Space, CWS) Aktif	Unit	30	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perdayaan dan Perlindungan Anak, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan	Program	Indikator Janji Wali Kota	Satuan	Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
17	UMK untuk Guru Honoror	Upah Minimum Kota (UMK) untuk Guru Honoror, adalah upah minimum kota bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku di daerah Kabupaten/Kota dan diperuntukan bagi guru Non-Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS). Pengertian mengenai UMK menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER-01/MEN/1999 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-226/MEN/2000 Tahun 2000 tentang Upah Minimum. Sedangkan peraturan mengenai pemberian Honor bagi PTK Non ASN diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta Peraturan Wali Kota (Perwal) Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Honoror ber-penghasilan sesuai UMK	Persen	100	Dinas Pendidikan
18	Gratis Biaya Pemakaman bagi Warga Tidak Mampu	Gratis Biaya Pemakaman bagi Warga Tidak Mampu, adalah pelayanan pemakaman dengan fasilitas penyediaan dan penggalan lahan bagi warga miskin tanpa dipungut biaya.	- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) - Program Pengembangan Permukiman	Jumlah Warga Tidak Mampu yang mendapat layanan pemakaman gratis	orang	2000	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan	Program	Indikator Janji Wali Kota	Satuan	Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
19	Insentif RT dan RW	Insentif RT dan RW, adalah pemberian kompensasi khusus yang diberikan Pemerintah Kota Bandung kepada Ketua RT dan Ketua RW dalam rangka untuk membantu memotivasi atau mendorong kinerja.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah RT dan RW yang mendapatkan insentif	RW RT	1591 9897	Bagian Tata Pemerintahan Setda
20	Subsidi Harga Sembako	Subsidi yang diberikan kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan bantuan dan atau barang kebutuhan pokok masyarakat agar lebih terjangkau. Anggaran subsidi bersumber dari APBD Kota Bandung dan atau APBD Provinsi Jawa Barat.	Program Stabilisasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah sembako yang disubsidi	RTS Ton	400	Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Sosial Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
21	Kartu Bandung Sejahtera (KBS)	Kartu Bandung Sejahtera adalah kartu akses dan atau daftar nominatif berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima manfaat layanan perlindungan bidang sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan rumah tidak layak huni.	1. Program Kawasan Permukiman 2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	-			Dinas Sosial, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bappelitbang

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan	Program	Indikator Janji Wali Kota	Satuan	Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
22	Menciptakan 1 Koperasi Juara Setiap Kecamatan	Koperasi Juara adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat, dengan kriteria: a. Memiliki Badan Hukum Koperasi b. Melaksanakan RAT 3 (tiga) tahun berturut turut c. Memiliki sertifikat NIK (Nomor Induk koperasi) d. Peningkatan jumlah anggota e. Menyalurkan dana sosial dan pembangunan daerah kerja di lingkungan tempat koperasi berada f. Koperasi Juara minimal satu koperasi pada setiap kecamatan	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi Juara	Koperasi per Kecamatan	30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
23	Satu (1) Koperasi di Tempat Ibadah di Setiap Kecamatan	Koperasi di Tempat Ibadah adalah koperasi yang didirikan di tempat ibadah yang memiliki peranan dalam upaya mendorong peranan tempat ibadah untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat (<i>community base economic empowerment</i>). Target koperasi yang dibentuk di tempat ibadah minimal satu pada tiap kecamatan.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi di Tempat Ibadah	Koperasi per Kecamatan	30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
24	Insentif untuk Guru Keagamaan	Insentif untuk Guru Keagamaan, adalah pemberian insentif bagi guru keagamaan yang telah memenuhi kriteria. Kriteria tersebut mengacu pada keputusan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Insentif Bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Insentif bagi Guru Keagamaan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Masyarakat pada Kementerian Agama. Mekanisme pemberian insentif melalui hibah dari Pemerintah Kota Bandung kepada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Guru Keagamaan yang Diberi Insentif	Orang	11.733	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan	Program	Indikator Janji Wali Kota	Satuan	Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
25	Gratis Sertifikasi Tanah Tempat Ibadah	Fasilitasi Sertifikasi Tanah Tempat Ibadah, adalah fasilitas yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam proses pembuatan sertifikat tanah/sertifikat lahan tempat peribadatan di Kota Bandung sesuai peraturan yang berlaku diukur dari dimulainya proses fasilitasi/verifikasi setelah syarat dan ketentuan dipenuhi.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Tanah Tempat Ibadah bersertifikat	Sertifikat	500	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
26	Gerakan Menye- marakkan Tempat Ibadah	Gerakan Menyemarakkan/ Memakmurkan Tempat Ibadah, adalah gerakan untuk meningkatkan ketataan umat beragama melalui aktifitas keagamaan/ peribadatan di tempat-tempat ibadah dengan melakukan kegiatan, antara lain: 1. Gerakan Maghrib Mengaji, 2. Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah, 3. Gerakan Shalat Tepat Waktu (Bersatu), 4. Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (Ahlan Qur'an), 5. Pengajian untuk ASN, 6. Pengajian Ba'da Dzuhur setiap hari Senin sampai dengan Kamis, 7. Safari Jum'at, 8. Safari Minggu, 9. Protestan: Pembinaan Kategorial Anak, Pemuda, Perempuan dan Lansia, 10. Katolik: Misa Ekaristi, 11. Hindu: Brahma Murhuta Bersama, 12. Khonghucu: Kebaktian Minggu, 13. Budha: Puja Bhakti. Bisa dilaksanakan seluruh atau sebagian sesuai dengan keadaan pandemi Covid-19.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Gerakan Menye- marakkan Tempat Ibadah Rutin	Gerakan	8	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda didukung oleh seluruh perangkat daerah

Dari 26 prioritas Wali Kota Bandung, sebanyak 4 (empat) program tidak secara langsung dikerjakan melalui program perangkat daerah, yaitu Gerakan Menyemarakkan Tempat Ibadah yang tidak membutuhkan anggaran khusus, Gratis Sertifikasi Tanah Tempat Ibadah yang dilakukan dengan mekanisme hibah, Penambahan 25.000 Sambungan Air Bersih Baru yang diampu oleh Perumda Tirtawening, serta Menuntaskan Revitalisasi Pasar Tradisional yang menjadi kewenangan PD. Pasar Bermartabat.

Nomenklatur program pembangunan daerah Kota Bandung tahun 2019 dan tahun 2020 berbeda dengan nomenklatur program pembangunan daerah tahun 2021-2023. Hal ini disebabkan oleh penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, yang dimulai dari APBD tahun 2021 sampai dengan saat ini. Adapun program pembangunan daerah Kota Bandung dalam rangka mendukung pencapaian setiap misi berdasarkan sasaran pembangunan disajikan pada Tabel 6.12.

Tabel 6.12

Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kota Bandung

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD					
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp		
Misi 1: Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing																				
1.1	Tujuan: Membangun masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan yang Bermutu, Adil dan Merata dan berlandaskan Nilai- nilai Agama dan Budaya	Indeks Pembangunan Manusia	80,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah Angka Kelulusan Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP	13,90 100% 76,72 57,02	14,00 100% 76,74 57,03	14,01 100% 76,76 57,04	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -										
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD	56%	80,36%	89,89%	1.645.892.490	4.039.568.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,89%	5.685.460.910	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SD	Angka Partisipasi Kasar SD	102,12%	102,14%	100.904.329.746	103,13%	5.517.716.700	-	-	-	-	-	-	-	103,13%	106.422.046.446	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP	Angka Partisipasi Kasar SMP	103,10%	103,13%	92.713.362.464	102,65	4.865.099.154	-	-	-	-	-	-	-	102,65	97.578.461.618	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
4	Program Inovasi Pendidikan	Persentasi inovasi pendidikan yang dimanfaatkan untuk pelayanan pendidikan	100%	100%	2.381.952.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	2.381.952.800	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Tingkat ketepatan manajemen pelayanan pendidikan	100%	100%	2.514.116.985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	2.514.116.985	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	102,12%	-	103,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	103,13%	92.564.100.498	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
			103,10%	-	102,65%	-	-	-	-	-	-	-	-	102,65%		
			100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		
			100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		
7	Program Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan	100%	7.416.678.687	100%	1.377.741.343	-	-	-	-	-	-	100%	8.794.420.030	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan	
			100%	167.311.000	100%	52.621.818	-	-	-	-	-	-	-	100%	219.932.818	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
9	Program Bantuan Pendidikan	Angka Putus Sekolah SD	-	0,01%	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan	
		Persentase siswa miskin SD yang mendapatkan bantuan pendidikan	-	N/A	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		Angka Putus Sekolah SMP	-	0,02%	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		Persentase siswa miskin SMP yang mendapatkan bantuan pendidikan	-	N/A	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		Persentase peserta didik dan mahasiswa berprestasi yang mendapat bantuan pendidikan	-	N/A	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan pendidikan	-	N/A	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
10	Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD	Angka putus sekolah SD pendidikan gratis	0,01%	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01%	5.084.603.029	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan	
		Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi pendidikannya	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	5.084.603.029		
11	Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP	Angka Putus Sekolah SMP	0,02%	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02%	17.887.862.218	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan	
		Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi pendidikannya	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	17.887.862.218		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp			
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase tingkat kesehatan keluarga	-	30.311.977.998	55,48%	43.962.818.161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Pengampu Urusan Kesehatan	
		Persentase masalah gizi ditangani sesuai standar	-		100%														
		Persentase penanganan masalah gizi buruk	80,1%																
2	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu, dan lansia	83,46%																
		Cakupan kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri	7,95 %	768.773.102	50,33 %	568.672.447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Pengampu Urusan Kesehatan	
		Cakupan peningkatan PHBS tatanan rumah tangga	67,8 %		61,83 %														1.337.445.549

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
3	Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Upaya Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	Persentase akses penduduk terhadap sanitasi dasar	64,02%	594.337.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594.337.170	PD Pengampu Urusan Kesehatan
		Persentase sarana kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat	48,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase rekomendasi IKL yang ditindaklanjuti	N/A	-	100%	2.250.312.705	-	-	-	-	-	-	-	-	2.250.312.705	PD Pengampu Urusan Kesehatan
5	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	37%	7.432.437.412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,96%	7.432.437.412	PD Pengampu Urusan Kesehatan
6	Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Cakupan pelayanan laboratorium kesehatan	100%	-	100%	16.454.568.740	-	-	-	-	-	-	-	100%	16.454.568.740	PD Pengampu Urusan Kesehatan
7	Program Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	Persentase warga yang mendapat pelayanan gawat	N/A	-	1,60%	3.941.405.492	-	-	-	-	-	-	-	1,60%	3.941.405.492	PD Pengampu Urusan Kesehatan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Rp
8	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	Persentase unit pelayanan kesehatan milik pemerintah yang memenuhi standar pelayanan	N/A	-	100%	79.417.956.495	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	79.417.956.495	PD Pengampu Urusan Kesehatan
9	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase sarana prasarana kesehatan dalam kondisi baik	N/A	-	100%	1.704.130.465	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.704.130.465	PD Pengampu Urusan Kesehatan
10	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	Cakupan pelayanan BLUD	40,30%	-	74,71%	243.285.566.587	-	-	-	-	-	-	-	-	74,71%	243.285.566.587	PD Pengampu Urusan Kesehatan
11	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	Persentase kecamatan dengan puskesmas dibandingkan rasio jumlah puskesmas dan jumlah penduduk sesuai WHO (1:30.000 penduduk)	N/A	-	100%	11.683.297.818	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	11.683.297.818	PD Pengampu Urusan Kesehatan
12	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase penyakit menular yang ditangani sesuai standar	100%	-	100%	8.395.984.424	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	8.395.984.424	PD Pengampu Urusan Kesehatan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
16	Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan	Persentase peningkatan pengelolaan sumber daya kesehatan	N/A	-	-	77,40%	9.050.441.570	-	-	-	-	-	-	-	-	77,40%	9.050.441.570	PD Pengampu Urusan Kesehatan
17	Program Pengadaan dan Pengawasan Obat, Perbekalan Kesehatan, Pangan dan Bahan Berbahaya	Persentase fasilitas kesehatan melaksanakan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	80.859.550	PD Pengampu Urusan Kesehatan
18	Program Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Kesehatan	Persentase dokumentasi rancangan kebijakan dan peraturan yang tersusun	20%	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	634.779.994	PD Pengampu Urusan Kesehatan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
19	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	100%	29.767.408.833	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	29.767.408.833	PD Pengampu Urusan Kesehatan	
			100%		-		-		-		-		100%			
20	Program Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan	9%	2.308.994.900	-	-	-	-	-	-	-	-	15,14%	2.308.994.900	PD Pengampu Urusan Kesehatan	
					-		-		-		-					
21	Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim	Indeks SO ₂	1,17 poin	-	0,91 poin	410.406.983	-	-	-	-	-	-	0,91 poin	410.406.983	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup	
					-		-		-		-					
22	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	58,61 poin	923.752.003	-	-	-	-	-	-	-	-	69,79 poin	923.752.003	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup	
					-		-		-		-					

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Realisasi Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Target Rp	Target	Target Rp	Target	Target Rp	Target		Target Rp	Target	
23	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	20 poin	49,70 poin	792.478.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,70 poin	792.478.420	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
24	Program Pengendalian Pencemaran dan Rehabilitasi Kerusakan Air	Persentase sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan"	39,13%	-	-	78,13%	292.372.100	-	-	-	-	-	-	-	78,13%	292.372.100	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
25	Program Pencegahan Dampak Lingkungan	Cakupan pencegahan dampak lingkungan akibat kebijakan dan usaha/ kegiatan	100%	-	-	100%	750.334.480	-	-	-	-	-	-	-	100%	750.334.480	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
26	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan akibat Limbah B3	Persentase limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang dikelola	0%	0,10%	649.528.928	0,001%	190.588.920	-	-	-	-	-	-	-	0,001%	825.604.103	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang dimanfaatkan dan didaur ulang di sumber sampah	103.601 ton	85.110 ton	72.841.733.386	95.640,95 ton	58.269.847.197	-	-	-	-	-	-	-	95.640,95 ton	131.111.580.583	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi Rp	Realisasi %	Rp	Realisasi %	Target Rp	Target %	Target Rp	Target %	Target Rp	Target %		Target Rp	Target %
28	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kawasan konservasi terpelihara	8,8%	17,61%	3.671.786,750	28,99%	1.629.963,065	-	-	-	-	-	-	28,99%	5.301.749,815	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
29	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	120 menit	80 menit	-	60 menit	45.616.645,376	-	-	-	-	-	-	60 menit	45.616.645,376	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase sarana dan prasarana pekerjaan umum terbangun	100%	88%	81.723.117,817	-	-	-	-	-	-	-	-	88%	81.723.117,817	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
31	Program Penataan Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan pemukiman kumuh	9,76%	4,28%	24.444,433,947	2,94%	10.692.139,492	-	-	-	-	-	-	2,16%	35.136.573,439	PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
32	Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase kepala keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak	64,23%	68,63%	36.150.023,179	80,73%	14.461.864,154	-	-	-	-	-	-	83,31%	50.611.887,333	PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target
33	Program Keluarga Berencana	Persentase peserta KB aktif	N/A	75,28%	3.350.140.800	76,24%	3.752.590.530	-	-	-	-	-	-	-	75,28%	7.102.731.330	PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
34	Program Ketahanan Keluarga	Persentase kelompok tribina aktif	N/A	71,07%	787.699.000	74,73%	448.384.704	-	-	-	-	-	-	-	71,07%	1.236.083.704	PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
35	Program Promosi Keluarga Berencana	Jumlah peserta KB baru	2.000 pasangan akseptor	3.062 pasangan akseptor	783.682.980	-	2.326.421.340	-	-	-	-	-	-	-	3.062 pasangan akseptor	3.110.104.320	PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah Kampung KB Aktif	15	20		31								31			
36	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Kelurahan Layak Anak	47,68%	52,28%	1.521.570.787	68,87%	524.063.250	-	-	-	-	-	-	-	68,87%	2.045.634.037	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
37	Peningkatan Pelayanan bagi Lansia	Persentase lansia mendapat layanan	18,75%	18,75%	1.370.485.310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,75%	1.370.485.310	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
38	Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Pemenuhan Hak Lanjut Usia	Persentase ketercapaian kriteria Kota Layak Lansia	N/A	-	25%	414.727.000	-	-	-	-	-	-	-	25%	414.727.000	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
39	Program Perlindungan dan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Persentase penanganan perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	100%	593.040.100	-	-	-	-	-	-	100%	1.317.981.850	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
40	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Tingkat partisipasi organisasi perempuan dalam ruang publik	N/A	16,95%	30,50%	183.924.300	-	-	-	-	-	-	30,50%	1.943.098.850	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
41	Program Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang aman dikonsumsi	91%	99,97%	99,93%	1.597.913.650	-	-	-	-	-	-	99,93%	4.299.253.000	PD Pengampu Urusan Pangan dan Pertanian	
42	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Ternak	Jumlah maksimum kasus penyakit zoonosa	7 kasus	0 kasus	0 kasus	720.941.720	-	-	-	-	-	-	0 kasus	1.758.029.389	PD Pengampu Urusan Pangan dan Pertanian	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
43	Program Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	85,08	2.069.213.378	90,5	1.337.061.580	-	-	-	-	-	-	90,5	3.406.274.958	PD Pengampu Urusan Pangan dan Pertanian	
		Jumlah cadangan pangan ekuivalen besar	103,045 ton		122,27 ton		-		-		-		-			122,27 ton
44	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi ikan konsumsi	2.970 ton	1.150.720.712	1.921,05 ton	961.245.945	-	-	-	-	-	-	1.921,05 ton	2.111.966.657	PD Pengampu Urusan Pangan dan Pertanian	
		Produksi ikan hias	1.222.000 ekor		1.282.278 ekor		-		-		-		-			1.282.278 ekor
		Tingkat konsumsi ikan	37,95 kg/kap/th		40,23 kg/kap/th		40,24 kg/kap/th		-		-		-			40,24 kg/kap/th
45	Program Pembinaan Pembudayaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase kegiatan pembudayaan dan pemasyarakatan olahraga masyarakat secara rutin	100%	6.133.753.780	-	-	-	-	-	-	-	-	103%	6.133.753.780	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga	
46	Program Pembinaan Keolahragaan	Persentase rata-rata pembinaan keolahragaan	100%	57.702.634.529	90%	1.122.976.400	-	-	-	-	-	-	90%	58.825.610.929	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.2.1	Sasaran: Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,19		14,20		14,21		14,22		14,23		14,23			Dinas Pendidikan
		Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,74		10,75		10,76		10,77		10,78		10,78			
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Rasio siswa PAUD terhadap ketersediaan rombongan belajar	N/A		12,27		11,36		11,65		11,94		11,94			Dinas Pendidikan
		Rasio siswa SD terhadap ketersediaan ruang kelas	N/A		36,5		35,82		35,67		35,52		35,52			
		Rasio penduduk usia SMP terhadap ketersediaan rombongan belajar	N/A		34,21		34,3		34,07		33,84		33,84			
		Jumlah unit SMP negeri yang dibangun dan dilengkapi	N/A		59 Unit		61 Unit		63 Unit		65 Unit		65 Unit			
2	Program Pengembangan Kurikulum	Cakupan kurikulum pendidikan yang memenuhi standar	N/A		100%		100%		100%		100%		100%			
		Cakupan kurikulum lokal yang diimplementasikan	N/A		N/A		100%		100%		100%		100%			
														2.175.581.830		
														669.551.830		
														666.705.000		
														839.325.000		
														274.265.390.444		
														101.323.699.141		
														99.119.958.826		
														474.709.048.411		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Realisasi Rp		Realisasi Rp	Target %	Target Rp	Target %	Target Rp	Target %	Target Rp	Target %		Target Rp	Target %	
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten	N/A	71,12%	.	71,46%	71,81%	72,15%	71,81%	72,15%	72,15%	72,15%	11.548.684.211	11.499.581.000	11.548.684.211	175.477.028.111	Dinas Pendidikan
4	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai rata-rata aspek pemanfaatan bahan bacaan dan sumber informasi	N/A	71,54	.	71,73	72,02	72,30	72,02	72,30	72,30	72,30	1.201.391.326	1.201.391.326	1.206.521.267	3.709.701.653	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Nilai rata-rata aspek ketersediaan fasilitas membaca dan sumber informasi	N/A	86,33	.	86,33	86,33	86,33	86,33	86,33	86,33	86,33					
		Nilai rata-rata aspek kebiasaan membaca masyarakat	N/A	66,41	.	67,02	69,78	72,42	69,78	72,42	72,42	72,42					
5	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Nilai sub aspek pemanfaatan koleksi	N/A	96,30	.	96,30	96,30	96,30	96,30	96,30	96,30	96,30	281.730.506	281.730.506	282.933.495	674.666.751	Dinas arsip dan Perpustakaan
1.2.2	Sasaran: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)		74,28		73,94	73,96	73,98	73,96	73,98	73,98	73,98					

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan sumber daya manusia kesehatan yang terstandarisasi	N/A	.	35,79%	.	33,95%	1.126.703.000	40,74%	7.453.891.312	48,01%	7.485.719.428	48,01%	16.066.313.740	Dinas Kesehatan	
7	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan IRTP sesuai standar	N/A	.	30,75%	.	37,21%	639.701.000	40,34%	102.250.265	42,02%	102.686.874	42,02%	844.638.139	Dinas Kesehatan	
8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan lingkungan Cakupan fasilitas kesehatan yang terakreditasi Jumlah relokasi puskesmas Cakupan masyarakat yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan Capaian SPM bidang kesehatan Cakupan pengendalian penyakit dan pengelolaan keaduratan kesehatan masyarakat Cakupan sistem informasi kesehatan terintegrasi	N/A	.	52,20%	63,60%	392.658.716.576	67,60%	111.384.271.723	73,20%	112.312.727.111	73,20%	616.355.715.410	Dinas kesehatan		
			N/A	.	23,72%	23,72%		30,47%		33,13%	33,13%					
			N/A	.	0	1 Unit		5 Unit		4 Unit	10 Unit					
			N/A	.	95,00%	100%		100%		100%	100%					
			N/A	.	89,03%	88,97%		89,99%		90,92%	90,92%					
			N/A	.	100%	100%		100%		100%	100%					
			N/A	.	16,81%	16,81%		37,61%		58,40%	58,40%					

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi Rp	Realisasi	Realisasi Rp	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target		Target	Rp
9	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan penanganan kasus penyakit zoonosa	N/A	N/A	N/A	-	-	100%	100%	3.475.743,416	100%	100%	3.748.156,985	100%	10.956.120,806	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				99,93%	99,10%			99,20%	99,30%		99,30%	99,30%				
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	790.012.273,117	100%	100%	892.106.067,926	100%	2.571.924.014,941	Dinas Kesehatan
				99,93%	99,10%			99,20%	99,30%		99,30%	99,30%				
11	Program Pembudayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan keamanan dan mutu pangan segar hasil perikanan	N/A	-	23,17%	-	-	99,10%	58,29%	486.655.000	99,20%	64,90%	527.751,480	99,30%	1.499.665,379	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				99,93%	53,64%			99,20%	64,90%		99,30%	64,90%				

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
12	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Kriteria kampung keluarga berkualitas lingkup penyuluhan dan penggerakan	N/A	N/A	79,56%	.	80,56%	10.382.118.001	81,56%	3.230.156.347	82,56%	3.236.979.862	82,56%	16.849.254.210	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					89,23%		90,23%		91,23%		92,23%		92,23%			
					76,24%		76,27%		76,92%		77,57%		77,57%			
					13,19%		13,00%		12,00%		11,00%		11,00%			
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Kriteria kampung keluarga berkualitas lingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga	N/A	N/A	87,69%	88,69%	89,69%	90,69%	90,69%	90,69%	90,69%	90,69%	2.680.170.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
						

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
13	Program Pengendalian Penduduk	Rumah Dataku Aktif Sekolah Siaga Kependudukan Aktif Cakupan laporan kependudukan dan keluarga melalui aplikasi SR BKKBN yang akurat dan tepat waktu	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	24,62% 10,91% 70,00%	· · ·	24,62% 16,36% 80,00%	591.936,600	30,77% 23,64% 90,00%	599.123.920	36,92% 30,91% 100%	601.682.179	36,92% 30,91% 100%	2.324.009.500	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
14	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan ambang batas +/- 10% Angka Kecukupan Protein (AKP) dengan ambang batas +/- 10%	N/A	2148,30 kkal/kap/hari	·	2100,00 kkal/ kap/hari	5.862.728.270	2100,00 kkal/ kap/hari	7.371.361.986	2100,00 kkal/ kap/hari	2100,00 kkal/ kap/hari	7.402.837.701	2100,00 kkal/ kap/hari	20.636.927.957	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
15	Program Pembangunan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Angka Pembangunan Olah Raga Aspek Sarana dan Prasarana	N/A	-		0,120		0,127	0,133	0,140	0,140	0,140	0,140			Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				-		0,519		0,526	0,532	0,539	0,539	0,539	0,539			
1.2.3	Sasaran: Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	N/A	7,49		6,5		6,6	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8			
16	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup ideologi	100%	-		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
																5.648.261.476
																1.115.753.008
																1.111.009.000
																3.421.499.468
																61.169.975.463
																61.431.171.258

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
17	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup politik	100%	-	100%	.	100%	3.833.684.500	100%	3.160.701.500	100%	3.174.197.695	100%	10.168.583.695	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
18	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup sosial kemasyarakatan	100%	-	100%	.	100%	1.050.216.000	100%	698.609.300	100%	701.592.362	100%	2.450.417.662	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
19	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup ekonomi, sosial, dan budaya	100%	-	100%	.	100%	1.490.643.332	100%	1.194.764.000	100%	1.199.865.642	100%	3.885.272.974	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
20	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup kewaspadaan nasional	100%	-	100%	.	100%	14.171.052.000	100%	15.284.674.400	100%	15.349.939.960	100%	44.805.666.360	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
21	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran perda per tahun	N/A	N/A	6,00%	.	11,25%	21.550.556.430	5,00%	15.362.964.231	4,00%	15.428.564.088	4,00%	52.342.084.749	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Persentase satuan perlindungan masyarakat kelurahan aktif	N/A	N/A	.	.	22,50%		33,75%							

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi Rp		Realisasi Rp		Target %	Rp	Target %	Rp	Target %	Rp		Target %	Rp
22	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase siskamling RW aktif	N/A	N/A	N/A	.	.	66,07%		70,96%	32.755.088.262	77,43%	32.172.146.848	77,43%	64.927.235.110	Pada 30 Kecamatan
23	Program Penanggulangan Bencana	Persentase kelurahan tangguh bencana pratama	N/A	N/A	N/A	.	.	19,87%	1.667.153.033	59,60%	865.362.640	100%	869.057.738	100%	3.401.573.411	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
24	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kelurahan siaga kebakaran Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase sarana prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana kondisi baik	N/A	N/A	24,50%		44,37%		70,20%	100%	19.358.205.538	100%	19.438.581.984	100%	57.959.648.472	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
25	Program Penanganan Bencana	Cakupan capaian SPM kebencanaan bidang sosial	N/A	100%		.		81,41%	19.162.860.950	81,83%	1.714.460.400	82,11%	1.721.781.146	82,11%	5.674.310.546	Dinas Sosial

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
26	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	N/A	N/A	.	N/A	.	73,67%		77,84%	206.747.515,527	81,21%	203.055.559.794	81,21%	409.803.075,321	Pada 30 Kecamatan
27	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	N/A	N/A	.	.	73,51%	1.504.707.500	-	-	.	73,51%	-	1.504.707.500	73,51%	Sekretariat Daerah
28	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif positif	N/A	30,60%	.	.	51,02%	18.408.759.550	75,51%	13.143.252.000	100%	100%	13.199.373.686	100%	44.751.385.235	Dinas Pemuda dan Olah Raga
29	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase pengembangan kapasitas organisasi kepramukaan	N/A	N/A	.	.	60,00%	3.494.702.000	70,00%	3.545.100.137	80,00%	80,00%	3.560.237.714	80,00%	10.600.039.851	Dinas Pemuda dan Olah Raga
30	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	N/A	50,50%	.	.	51,06%	2.044.677.000	51,61%	1.048.550.745	52,17%	52,17%	1.053.028.056	52,17%	4.146.255.801	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
31	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	69,04%	69,04%	.	.	70,88%	6.560.660.000	72,73%	3.515.832.090	74,83%	74,83%	3.530.844.693	74,83%	13.607.336.782	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
32	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase lembaga seni memenuhi standar sanggar seni	1,60%	-	1,60%	.	4,35%	1.863.362.500	5,75%	3.030.797.980	8,42%	3.043.739.487	8,42%	7.937.899.967	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
33	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase kriteria pemenuhan hak anak	N/A	52,28%	68,87%	.	79,47%	756.078.000	90,62%	998.619.757	100%	1.002.883.863	100%	2.757.581.620	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
34	Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio kekerasan terhadap anak	N/A	-	0,021	.	0,019	501.750.000	0,017	544.487.436	0,015	546.812.398	0,015	1.593.049.834	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
35	Program Perlindungan Perempuan	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) aktif	N/A	-	N/A	.	3,31%	1.687.011.230	23,18%	1.249.033.647	46,36%	1.254.367.021	46,36%	4.190.411.898	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
36	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Capaian partisipasi organisasi perempuan di ruang publik	N/A	16,95%	30,50%	.	38,98%	844.948.250	47,45%	1.697.653.587	55,93%	1.704.902.567	55,93%	4.247.504.404	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi Rp		Realisasi Rp		Target %	Rp	Target %	Rp	Target %	Rp		Target %	Rp
37	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan keluarga bermasalah terbina	N/A	-	N/A	.	N/A	50%	1.389.633,750	60%	1.625.752,914	70%	1.632.694,879	70%	4.648.081,543	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
38	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan data terpilah gender dan anak <i>update</i>	N/A	-	N/A	.	N/A	5,00%	183.947,750	10,47%	499.309,779	15,70%	501.441,831	15,70%	1.184.699,360	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
39	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Nilai variabel ibangga lingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga	N/A	N/A	.	N/A	-	1.259.836,899	53,09	711.443,616	54,07	668.522,830	54,07	2.639.803,345	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Nilai variabel ibangga lingkup penyuluhan dan penggerakan	N/A	N/A	.	N/A	-	0	48,13	152.400,000	48,58	160.020,000	48,58	312.420,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
40	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan PPKS terlantar yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial	N/A	N/A	.	N/A	78%	9.395.729,150	80%	6.140.345,120	82%	6.166.564,394	82%	21.702.638,664	Dinas Sosial	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi Rp	Target Rp	Realisasi Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp		Target Rp	Target Rp
41	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	N/A	N/A	N/A	N/A	1.708.050.000	0,4%	1.805.196.800	0,5%	1.812.904.990	0,5%	5.326.151.790	Dinas Sosial		
42	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah taman makam pahlawan dalam kondisi baik	N/A	N/A	2	2	.	Dinas Sosial		
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih																
2.1	Tujuan: Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	68,99	70,01	71,75	70		70,07	70,13	70,13	70,13	70,13				
2.1.1	Sasaran: Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP Kota	A	BB	BB	A		A			A		A			
1	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung (komponen pelaporan kinerja) pada skala 15	12,60	12,60	11,78	-	.	-	.	.	.	11,78	1.148.547.144	PD Penanggung Jawab Urusan Penunjang Lainnya		
2	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi hasil money yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	-	.	-	.	.	.	100%	625.540.350	PD Penanggung Jawab Urusan Perencanaan		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
7	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase lahan milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat	17,64%	20%	977.880.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	977.880.550	PD Penanggung Jawab Urusan Keuangan
8	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	-	PD Penanggung Jawab Urusan Keuangan
		Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang-undangan	350 lokasi per bidang tanah	-	-	30 lokasi per bidang tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	30 lokasi per bidang tanah	4.572.240.053	
		Persentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN	17,64%	-	-	21%	-	-	-	-	-	-	-	-	21%	-	
9	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota	Persentase dokumen pengelolaan keuangan disusun tepat waktu	100%	100%	497.85.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	497.85.500	PD Penanggung Jawab Urusan Keuangan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Rp
10	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang-undangan	2 Dokumen 350 lokasi per bidang tanah	7.886.433,601	2 Dokumen 30 lokasi per bidang tanah	4.031.024,150	- -	2 Dokumen 30 lokasi per bidang tanah	2 Dokumen 30 lokasi per bidang tanah	11.917.457,751	PD Penanggung Jawab Urusan Keuangan						
		Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP	60 Hari Kerja RAPBD dan 30 Hari Kerja RAPBDP											Tepat waktu	Tepat waktu		
		Rata rata penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai peraturan perundang undangan	2 hari kerja											2 hari kerja	2 hari kerja		
		Laporan keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang undangan	14 Dokumen											14 Dokumen	14 Dokumen		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase PD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material	77,78%	572.276,912	-	374.892,005	-	-	-	-	-	-	-	-	947.168,917	PD Penanggung Jawab Urusan Penunjang Lainnya (Pengawasan)
			-		100%									100%		
12	Program Dukungan Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi	Persentase capaian pelaksanaan pengawasan yang efektif	80%	265.120,451	78%	325.371,550	-	-	-	-	-	-	-	-	590.492,001	PD Penanggung Jawab Urusan Penunjang Lainnya (Pengawasan)
13	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Pemerintah Daerah	Persentase capaian sistem pengawasan /pengendalian internal	100%	985.598,000	-	1.065.737,598	-	-	-	-	-	-	-	-	2.051.335,598	PD Penanggung Jawab Urusan Penunjang Lainnya (Pengawasan)
			Level 2													
		Capaian pemanfaatan sarana pengawasan oleh aparatur pengawasan	N/A		50%											
		Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	51,61		96,67			80		90			100		100	

VI - 70

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023**

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
14	Program Pengembangan Kebijakan Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (komponen penataan dan penguatan organisasi) pada skala 6	4	1.067.923.764	-	921.136.740	-	-	-	-	-	-	-	-	1.989.060.504	PD Penanggung Jawab Urusan Penunjang Lainnya
			3,9		-		-		-		-		-			
15	Program Pelayanan Perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	1.404.125.000	80,19	1.169.196.841	-	-	-	-	-	-	80,19	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Penanaman Modal
16	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Bidang Kependudukan	Cakupan pendayagunaan data kependudukan	100%	122.025.500	-	7.058.075.585	-	-	-	-	-	-	-	-	7.180.101.085	PD Penanggung Jawab Urusan Disdukcapil
			N/A		60%		-		-		60%					
17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentasi pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	342.442.600	100%	483.913.250	-	-	-	-	-	-	100%	-	826.355.850	PD Penanggung Jawab Urusan Kepegawaian

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target		
18	Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase akurasi data kepegawaian	96,38%	98,06%	437.211.000	98,45%	485.657.500	-	-	-	-	-	-	-	-	98,45%	922.868.500	PD Penanggung Jawab Urusan Kepegawaian	
19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun	42,08%	-	-	61,00%	3.026.953.870	-	-	-	-	-	-	-	-	61,00%	3.026.953.870	PD Penanggung Jawab Urusan Kepegawaian	
20	Program Layanan Informasi Publik	Persentase layanan informasi melalui media kepada masyarakat	100%	100%	926.582.000	100%	671.720.100	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.598.302.100	PD Penanggung Jawab Urusan Kominfo	
21	Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan Informasi Perpuustakaan dan Sistem Administrasi Kearsipan	Cakupan pengembangan kualitas sumber daya perpuustakaan dan kearsipan Peningkatan persentase perangkat daerah yang menyelenggarakan kearsipan secara baku	100%	100%	528.421.150	-	169.268.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,66%	697.689.150	PD Penanggung Jawab Urusan Kearsipan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Realisasi Rp	80%	Realisasi Rp	85%	Target Rp	-	Target Rp	-	Target Rp	-		Target Rp	-	Target Rp
22	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD kepada pimpinan dan anggota DPRD	85%	35.810.793.724	35.515.040.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.325.834.674	PD Penanggung Jawab Urusan Penunjang Lainnya
23	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	79,6	1.124.324.600	1.100.284.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,42		Pada 30 Kecamatan
24	Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Level Kematangan Smart City Kota Bandung	Integrative	Integrative	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		PD Penanggung Jawab Urusan Kominfo
25	Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase interkoneksi pengembangan infrastruktur TIK yang berfungsi	100%	10.980.704.988	7.941.446.225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	18.922.151.213	PD Penanggung Jawab Urusan Kominfo

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
2.2	Tujuan: Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB			
		Level Kematangan <i>Smart City</i>	Integratif		B		B		B		B		B		B			
2.2.1	Sasaran: Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	51,61 %		96,67%		80 %		90 %		100 %		100 %		100 %			
		Nilai AKIP	A		BB		A		A		A		A		A			
		Opini BPK	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP			
		Indeks Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik (SPBE)	3,11		3,20		3,25		3,30		3,35		3,35		3,35			
		Nilai LPPD	3,4144		3,4013		3,4023		3,4033		3,4044		3,4044		3,4044			
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan pelaksanaan pengawasan yang efektif	N/A		86%		100%		100%		100%		100%		100%		Inspektorat	
		Persentase pengaduan kinerja perangkat daerah ditindaklanjuti	N/A		N/A		100%		100%		100%		100%		100%			4.275.741.351,21

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP minimal 2.50	N/A	93,75%	-	100%	689.168.000,00	100%	304.100.687,00	100%	305.399.197,00	100%	1.298.667.884,00	Inspektorat		
				87,16%		87,50		90,00		94,00		94,00				
3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP	N/A	100%	59.154.545.223	100%	225.549.667.203,56	100%	226.512.764.282,52	100%	226.512.764.282,52	100%	511.216.976.709,08	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
		Ketepatan waktu pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah	N/A	100%		100%		100%		100%						
		Laporan keuangan Kota Bandung tepat waktu	N/A	100%		100%		100%		100%						
4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN	N/A	19%	1.950.590.819	24%	2.092.770.489,43	27%	2.101.706.619,42	30%	2.101.706.619,42	30%	6.145.067.927,85	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
		Laporan BMD tepat waktu	N/A	100%		100%		100%		100%						
		Tertib pengamanan BMD Kota Bandung	N/A	20%		60%		80%		100%						

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
5	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah yang perencanaannya kinerjanya terukur	-	-	50%	-	-	66,67%	5.187.412.932	83,33%	4.701.743.258,43	100%	4.721.819.702,14	100%	14.610.975.892,58	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
		Persentase rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Renja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	-	-	100%	100%	-	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	
6	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase sasaran RPJMD yang di <i>breakdown</i> (cascading)	-	-	50%	-	66,67%	2.649.466.800	83,33%	2.539.892.485,37	100%	2.550.737.826,29	100%	7.740.097.111,66	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	
		Persentase rekomendasi hasil Pengendalian dan Evaluasi (Dalev) pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	100%	-	100%	-	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%		-
7	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan sebagai dasar perumusan Kebijakan	-	-	100%	-	100%	1.338.409.530	100%	1.872.412.044	100%	1.880.407.243	100%	5.091.228.818	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	

VI - 76
**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023**

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
8	Program Kepegawaian Daerah	Nilai penerapan Sistem Merit lingkup pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian	N/A	-	-	97,50	-	100,00	104,00	112,00	8.901.737,759	112,00	112,00	112,00	112,00	29.726.627,533,07	Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia
				-	-	85,00	-	95,00	100,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	
				-	-	112,00	-	117,00	122,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	
9	Program Pembangunan Sumber Daya Manusia	Nilai penerapan Sistem Merit lingkup penilaian kinerja aparatur dan penghargaan	N/A	-	-	38,00	-	40,50	45,50	55,50	8.032.357,300	55,50	55,50	55,50	55,50	27.661.554,652	Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Nilai penerapan SPBE lingkup data dan statistik	N/A	-	-	N/A	-	3,30	3,50	3,90	445.381,715	3,50	3,90	3,90	3,90	447.283,495	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
11	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Nilai penerapan SPBE lingkup persandian	N/A	N/A	-	N/A	-	1,20	105.700.000	1,25	305.278.060	1,37	306.581.597	1,37	717.981.597	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Program Aplikasi Informatika	Nilai penerapan SPBE Lingkup aplikasi	N/A	-	N/A	-	31,35	24.770.161.074	31,50	13.844.046.674,00	31,55	13.578.398.371	31,55	52.458.254.422	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Nilai penerapan SPBE lingkup perencanaan, evaluasi dan pengembangan	N/A	-	N/A	22,40		22,50		22,60		22,60				
		Nilai penerapan SPBE lingkup infrastruktur	N/A	-	N/A	4,50		4,60		4,70		4,70				

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi Rp		Realisasi Rp		Target Rp		Target Rp		Target Rp			Target Rp	
13	Program Pengelolaan Arsip	Nilai pengawasan Kearsipan pada aspek kebijakan, pengelolaan arsip, sumber daya kearsipan	N/A	N/A		N/A		19,50	20,10	21,00	21,00	21,00	21,00			Dinas Arsip dan Perpustakaan
								37,60	39,30	41,40	41,40	41,40	41,40	3,017.486,832		
14	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Nilai pengawasan kearsipan pada aspek sosialisasi kebijakan, pembinaan dan pengawasan kearsipan	N/A					8,10	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40			Dinas Arsip dan Perpustakaan
														711.859,620		
15	Program Perijinan Penggunaan Arsip	Persentase pelayanan arsip sesuai prosedur	N/A					100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dinas Arsip dan Perpustakaan
														245.095,526		
16	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	N/A					61,59%	66,89%	82,12%	82,12%	82,12%	94,70%			Pada 30 Kecamatan
														116.619.798.726	235.365.431.260	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
17	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan layanan administrasi pendaftaran penduduk	N/A	-	99,81%	-	64.218.000	98,50%	99,00%	175.435.741	99,00%	99,00%	176.184.852	99,00%	415.838.593	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18	Program Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi pencatatan sipil	N/A	-	94,35%	-	68.805.000	92,50%	93,00%	264.314.677	94,00%	94,00%	265.443.301	94,00%	598.562.978	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan perangkat daerah yang melakukan kerja sama aktif Maksimum deviasi data	N/A	-	60,00%	-	2.040.896.000	65,00%	70,00%	2.336.318.455	75,00%	75,00%	2.346.294.535	75,00%	6.723.508.991	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
22	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rata-rata waktu layanan perizinan	N/A	N/A	3,00 hari		7,00 hari		7,00 hari		7,00 hari		7,00 hari				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Rata-rata waktu respon pengaduan	N/A	N/A	0,86 jam		3,00 jam		3,00 jam		3,00 jam		3,00 jam				
		Persentase penanganan advokasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	100%	.	100%		100%		100%		100%		100%		
23	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Nilai SKM lingkup pelayanan penanaman modal	N/A	N/A	80,43		82,00		83,50		85,00		85,00				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Cakupan laporan pengelolaan data dan sistem informasi tepat waktu	N/A	N/A	N/A		100%		100%		100%		100%				
			N/A	N/A	-		-		1.805.701.049		1.813.411.392		2.240.069.905		2.249.635.004		
						2.508.550.000											

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan kepegawaian tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Persentase temuan BPK/ Inspektorat lingkup keuangan ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Cakupan layanan sarana prasarana kegiatan pimpinan	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Persentase temuan BPK/ Inspektorat lingkup aset ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		IKM Bagian Umum	N/A	N/A	N/A	87,70	87,80	87,90	87,90	87,90	87,90	87,90	87,90	87,90		
		Persentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang administrasi umum dan kepegawaian ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		IKM Layanan Bagian Umum terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD	N/A	N/A	N/A	87,00	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	Sekretariat Dewan	
		IKM Layanan Bagian Program dan Keuangan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD	N/A	N/A	N/A	87,00	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		IKM Bagian Perekonomian	N/A	N/A	N/A	N/A	87,7	87,8	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9			
		Cakupan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		Persentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang PBJ ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		Cakupan layanan PBJ sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		IKM Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	N/A	N/A	N/A	87,7	87,8	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9			
		Dokumen LPPD terverifikasi dan tepat waktu	-	-	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		Cakupan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang tata pemerintahan sesuai prosedur	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
26	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat															212.867.400.767,34
																70.155.692.936,58
																69.857.401.830,76
																72.854.306.000

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
		Persentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kerjasama ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		IKM Bagian Kerjasama	N/A	N/A	N/A	N/A	87,7	87,8	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9		
		Cakupan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang kesra sesuai prosedur	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Persentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kesra ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		IKM Bagian Kesra	N/A	N/A	N/A	87,7	87,8	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	Program Pemberdayaan UMKM	Jumlah usaha mikro yang skala usahanya meningkat	N/A	240 UMKM	3.130.220.000	240 UMKM	2.788.184.177	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah koperasi berkualitas	N/A	30 Koperasi	2.976.840.687	30 Koperasi	2.591.605.934	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Jumlah sentra industri yang meningkat daya saingnya	1 Sentra	1 Sentra	158.348.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Perindustrian
4	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Unggulan	Jumlah sentra industri yang meningkat daya saingnya	-	-	-	4 sentra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Perindustrian
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor Kota Bandung	US\$ 466 jt	US\$ 466,159 jt	1.075.716.550	US\$321,26 juta	2.819.706.050	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Perdagangan

VI - 90

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023**

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Rp
6	Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	Nilai daya saing perdagangan	N/A	360,59 Poin	1.306.672.200	460,59 Poin	858.697.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Perdagangan
7	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi ikan konsumsi	2.970 ton	2.970 ton	1.349.982.965	2.970.5 ton	1.239.757.190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Kelautan dan Perikanan
8	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Produktivitas tanaman padi	68.08 kw/ha	68.08 kw/ha	2.073.211.203	68.22 kw/ha	1.903.934.021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Pertanian
9	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Populasi ternak domba	36.756 ekor	36.756 ekor	787.240.176	37.829 ekor	655.524.777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Pertanian
10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor (PMDN/PMA) Persentase perusahaan yang menindaklanjuti promosi investasi	400 investor NA	500 investor 100%	2.299.997.270	550 investor 100%	1.915.178.167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Penanaman Modal

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				2019		2020		2021		2022			2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp
11	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	4,756 Triliun	5,23 Triliun	1.149.885,616	5,65 Triliun	957.494,974	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Penanaman Modal
12	Program Pembangunan dan Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase daya tarik wisata dikembangkan	N/A	20%	2.859.209,998	24,00%	3.629.858,141	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Pariwisata
13	Program Pengembangan Industri Pariwisata	Persentase jasa usaha pariwisata berstandar baik / tersertifikasi jasa usaha	N/A	5,39%	1.789.990,000	10,78%	1.765.288,427	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Pariwisata
14	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Indeks <i>brand awareness</i> pariwisata Kota Bandung	N/A	3,46	2.781.741,718	3,80	2.611.615,588	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Pariwisata
15	Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Persentase lembaga dan SDM pariwisata meningkat kompetensinya	N/A	0,97%	1.291.701,884	1,94%	532.530,128	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Pariwisata

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
16	Program Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	N/A	0,26%	330.040.000	0,52%	274.820.066	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
17	Program Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	N/A	0,26%	1.166.117.000	0,52%	971.010.639	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
18	Program Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan dimanfaatkan	N/A	0,26%	12.349.000.000	0,52%	9.380.220.722	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
19	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta pelatihan yang meningkat kompetensinya	180 orang	200 orang	1.978.833.493	220 orang	1.647.749.418	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja
20	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	45,30%	45,30%	5.134.153.733	45,56%	4.275.143.829	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
21	Program Padat Karya	Jumlah pekerja padat karya	300 orang	-	600 orang	635.531.552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja
22	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase kasus selesai melalui perjanjian bersama	58%	58%	58%	2.803.215.305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja
23	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100%	100%	100%	9.622.978.391	4.017.782.332	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Pengampu Urusan Keuangan
24	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase lahan milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat	17.64%	19%	-	1.263.222.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Keuangan

VI - 94

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
25	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN	17.64%	-	-	21%	4.572.240.053	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Keuangan
26	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah pendapatan pajak daerah	2.436.311.729.898	2.436.311.729.898	2.541.188.850	2.522.552.659.693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Penunjang Lainnya
27	Program Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	120 menit	-	-	80 menit	66.465.587.428	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
28	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase sarana dan prasarana pekerjaan umum terbangun	100%	100%	128.334.964.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
29	Program Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	Jumlah PJU dalam kondisi baik	44.000 Ttk	-	-	2.500 Ttk	39.680.947.718	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
30	Program Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	92%	-	94%	335.568.132.636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
31	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase penumpang sarana angkutan umum	19.5%	20%	20,25%	28.414.070.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Perhubungan
32	Program Penataan Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh	9.76%	4.55%	3.96%	51.835.399.507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan PDAM
3.2	Tujuan: Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan	Indeks Gini	0.44	0.44	0.43											

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
				Realisasi Rp	8.39	Realisasi Rp	8.34	Target Rp	-	Target Rp	-	Target Rp	-		Target Rp	-	Target Rp	-	
3.2.1	Sasaran: Meningkatkan kesempatan kerja	Tingkat Pengguguran Terbuka	8.44	8.39	8.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta pelatihan yang meningkat kompetensinya	180 orang	200 orang	626 orang	626 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626 orang	6.618.027.155	PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	43,30%	45,54%	58,44%	58,44%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,44%	6.251.312.978	PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja
3	Program Padat Karya	Calon wirausaha baru yang dilatih	700 orang	880 orang	540 orang	540 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540 orang	4.324.546.978	PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja
4	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah peserta kegiatan pemberian kerja sementara (padat karya)	300 orang	300 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 orang	359.211.200	PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja
4	Program Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	8.794.420.030	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
5	Program Pengembangan Ekosistem Kreatif	Aktivasi sub sektor ekonomi kreatif	25%	50%	2.127.699.505	70,58%	421.794.745	-	-	-	-	-	-	-	70,58%	2.549.494.250	PD Penanggung Jawab Urusan Pariwisata
6	Program Pengembangan Infrastruktur Terpadu Ekonomi Kreatif	Persentase rumah / kampung kreatif / inkubasi / berkembang	N/A	3,33%	821.473.870	43,33%	275.545.800	-	-	-	-	-	-	-	43,33%	1.097.019.670	PD Penanggung Jawab Urusan Pariwisata
7	Program Pengembangan Usaha Kecil	Persentase SDM Usaha Mikro yang meningkat kualitasnya	60%	60%	727.947.930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60%	727.947.930	PD Penanggung Jawab Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
8	Program Pengembangan Usaha Mikro	Persentase SDM usaha mikro yang kualitasnya meningkat	N/A	60%	-	60%	156.127.900	-	-	-	-	-	-	-	60%	156.127.900	PD Penanggung Jawab Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

VI - 98

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023**

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi Rp	Target Rp	Realisasi Rp	Target Rp		Target Rp							
9	Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Pemuda	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan pengembangan kepemudaan	100%	3.915.805.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	3.915.805.420	PD Penanggung Jawab Urusan Kepemudaan dan Olahraga
10	Program Pembinaan Kepemudaan	Persentase rata-rata organisasi pemuda dan pemuda yang aktif positif	0,029%	4.951.685.125	0,003%	516.150.400	-	-	-	-	-	-	-	0,003%	5.467.835.525	PD Pengampu urusan Kepemudaan dan Olahraga
11	Program Pembinaan Kebudayaan dan Pemasarakatan Olahraga	Persentase kegiatan kebudayaan dan pemsarakatan olahraga masyarakat secara rutin	100%	6.133.753.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103%	6.133.753.780	PD Pengampu urusan Kepemudaan dan Olahraga
12	Program Pembinaan Keolahragaan	Persentase rata-rata pembinaan keolahragaan	100%	57.702.634.529	90%	1.122.976.400	-	-	-	-	-	-	-	90%	58.825.610.929	PD Pengampu urusan Kepemudaan dan Olahraga
13	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Bertambahnya jumlah pelaku usaha bidang peternakan	80 orang	317.087.129	32 orang	78.303.280	-	-	-	-	-	-	-	32 orang	395.390.409	PD Penanggung Jawab Urusan Pertanian
14	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bertambahnya jumlah pelaku usaha bidang perikanan	80 orang	307.072.820	30 orang	64.861.950	-	-	-	-	-	-	-	30 orang	371.934.770	PD Penanggung Jawab Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
15	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Bertambahnya jumlah pelaku usaha bidang pertanian	80 orang	1.702.821,678	45 orang	1.251.844,425	-	-	-	-	-	-	-	45 orang	2.954.666,103	PD Penanggung Jawab Urusan Pertanian
16	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	Jumlah kelompok masyarakat di bidang pangan, pertanian dan perikanan diberdayakan	45 kelompok	1.920.677,903	48 Kelompok	944.185,100	-	-	-	-	-	-	-	48 Kelompok	2.864.863,003	PD Penanggung Jawab Urusan Pertanian
17	Program Pengembangan dan Infrastruktur Kepemudaan	Persentase infrastruktur kepemudaan yang memenuhi standar	100%	126.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	126.000,000	PD Pengampu urusan Kepemudaan dan Olahraga
18	Program Pengembangan Infrastruktur Kepemudaan dan Keolahragaan	Persentase infrastruktur kepemudaan dan keolahragaan yang berfungsi dengan baik	N/A	-	39,4%	1.659.704,970	-	-	-	-	-	-	-	39,4%	1.659.704,970	PD Pengampu urusan Kepemudaan dan Olahraga
3.2.2	Sasaran : Menurunnya jumlah penduduk miskin	Angka Kemiskinan	4.17		3.66									-		
1	Program Penanganan Fakir Miskin	Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	62.000 KK	1.959.535,785	137.607 KK	2.241.780,387	-	-	-	-	-	-	-	137.607 KK	4.201.316,172	PD Penanggung Jawab Urusan Sosial

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Realisasi Rp	Target Rp	Realisasi Rp	Target Rp		Target Rp								
2	Program Pemberdayaan PMKS	Jumlah PMKS yang meningkat pendapatannya	N/A	347 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347 orang	1.075.920.250	1.075.920.250	PD Penanggung Jawab Urusan Sosial
3	Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan	Cakupan warga miskin yang memperoleh akses terhadap program pemerintah	100%	100%	100%	4.480.520.200	-	-	-	-	-	-	-	100%	5.109.930.250	5.109.930.250	PD Penanggung Jawab Urusan Sosial
4	Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar	Persentase anak dan lansia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	843.056.000	843.056.000	PD Penanggung Jawab Urusan Sosial
5	Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	72%	80,77%	-	266.310.500	-	-	-	-	-	-	-	80,77%	1.503.450.350	1.503.450.350	PD Penanggung Jawab Urusan Sosial
		Persentase partisipasi potensi sumber kesejahteraan sosial	N/A	-	85%	-	-	-	-	-	-	-	-	85%			

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi Rp	100%	Realisasi Rp	100%	Target Rp	Target	Target Rp	Target	Target Rp	Target		Target Rp	Target
6	Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase pemenuhan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS	100%	7.371.541,475	100%	5.886.727,140	-	-	-	-	-	-	-	100%	13.258.268,615	PD Penanggung Jawab Urusan Sosial
7	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks- Trauma	Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh pemenuhan rehabilitasi sosial dasar	100%	1.749.197,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.749.197,750	PD Pengampu Urusan Sosial
8	Program Identifikasi dan Inventarisasi Data PMKS	Cakupan data warga miskin yang terverifikasi dan valid	200 Orang	935.502,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	935.502,000	PD Pengampu Urusan Sosia
9	Program Perlindungan Sosial Bencana	Cakupan korban bencana yang terlayani tepat waktu Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan tanggap darurat tepat waktu	100%	1.385.516,750	-	1.651.068,285	-	-	-	-	-	-	-	100%	3.036.585,035	PD Pengampu Urusan Sosial
10	Program Ketahanan Pangan	Jumlah cadangan pangan ekuivalen beras Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	60 Ton	2.069,213,378	122,27 Ton	1.337,061,580	-	-	-	-	-	-	-	122,27 Ton	3.406,274,958	PD Penanggung Jawab Urusan Pangan
			84,25	85,08	90,50	90,50								90,50		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi Rp	240 UMKM	Realisasi Rp	200 UMKM	Target Rp	Target	Target Rp	Target	Target Rp	Target		Target Rp	Target
11	Program Pemberdayaan UMKM	Jumlah usaha mikro yang usahanya meningkat	240 UMKM	2.567.854.806	200 UMKM	516.359.684	-	-	-	-	-	-	200 UMKM	3.084.214.490	PD Penanggung Jawab Urusan Koperasi dan Usaha Kecil	
12	Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak	64,23 %	36.150.023.179	80,73%	14.461.864.154	-	-	-	-	-	-	83,01%	50.611.887.333	PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
13	Program Bantuan Pendidikan	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan pendidikan	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan	
14	Program Padat Karya	Jumlah orang yang mendapatkan pekerjaan sementara (padat karya)	300 orang	359.211.200	-	-	-	-	-	-	-	-	300 orang	359.211.200	PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja	
15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Calon transmigrasi diseleksi	300 orang	75.526.800	-	-	-	-	-	-	-	-	120 orang	75.526.800	PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja	
16	Program Peningkatan Distribusi Perdagangan dan Stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase tingkat lonjakan harga kebutuhan pokok	N/A	-	8,49%	82.896.700	-	-	-	-	-	-	8,49%	65.296.700	PD Penanggung Jawab Urusan Perdagangan	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
17	Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	95%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	122.031.827,450	PD Penanggung Jawab Urusan Kesehatan	
			100%	122.031.827,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		122.031.827,450
18	Program Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi	Persentase kelurahan klasifikasi swasembada	24.50%	41,72%	56,29%	281.820.000	-	-	-	-	-	-	56,29%	56,29%	1.531.102.837	PD Penanggung Jawab Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			56,29%	1.249.282.837	56,29%	281.820.000	-	-	-	-	-	-	-	56,29%	1.531.102.837		
3.3	Tujuan: Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Berkelanjutan, dan Berkeadilan	LPE	7,08%	6,79%	-2,28%		3,92%		4,32%		5,05%		5,05%				
		Gini Ratio	0,42 poin	0,39 poin	0,402 poin		0,401 poin		0,400 poin		0,399 poin		0,399 poin		0,399 poin		
		PDRB Per Kapita	73,92 Juta Rp/Org	78,81 Juta Rp/Org	76,95 Juta Rp/Org		76,03 Juta Rp/Org		78,68 Juta Rp/Org		81,33 Juta Rp/Org		81,33 Juta Rp/Org		81,33 Juta Rp/Org		
		Pengeluaran Per Kapita	16.630 Ribu rupiah	17.254 Ribu rupiah	16.887 Ribu rupiah		16.798 Ribu rupiah		17.013 Ribu rupiah		17.227 Ribu rupiah		17.227 Ribu rupiah		17.227 Ribu rupiah		
3.3.1	Sasaran: Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	Indeks Daya Saing Pariwisata	3,34 Poin	3,41 Poin	3,29 Poin		3,29 Poin		3,30 Poin		3,31 Poin		3,31 Poin		3,31 Poin		
		Angka Kemiskinan	3,57 Poin	3,38 Poin	3,99 Poin		3,49 Poin		3,32 Poin		3,14 Poin		3,14 Poin		3,14 Poin		
		Tingkat Pengangguran Terbuka	8,05%	8,18%	11,19%		11,08%		10,86%		10,26%		10,26%		10,26%		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase objek daya tarik wisata yang berkelanjutan	N/A	N/A	62,28%	.	64,04%	5.720.772.000	65,79%	1.708.518.570	67,54%	1.715.813.944	67,54%	9.145.104.513	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tersertifikasi profesi	N/A	2,62%	8,10%	7.219.386.500	9,30%	6.943.855.409	10,00%	6.973.505.672	10,00%		10,00%	21.136.747.581	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
3	Program Pemasaran Pariwisata	Tingkat Citra Pariwisata Kota Bandung	N/A	3,25	3,41	4.100.000.000	3,61	3.499.001.362	3,81	3.513.942.098	3,81		3,81	11.112.943.460	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Ruang Kreatif Aktif	N/A	43,33%	65,42%	3.446.886.200	80,65%	2.653.182.901	100%	2.664.511.992	100%		100%	8.764.581.093	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
5	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rancangan kebijakan pengembangan penanaman modal yang terverifikasi/tervalidasi	N/A	N/A	1 dokumen	321.750.000	2 dokumen	513.490.279	3 dokumen	515.682.882	3 dokumen		3 dokumen	1.350.923.161	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
6	Program Promosi Penanaman Modal	Realisasi investasi baru promosi penanaman modal	N/A	-	N/A	.	1,5 Rp. Triliun	744.417,300	1,65 Rp. Triliun	1.288.457,058	1,815 Rp. Triliun	1.293.958,770	1,815 Rp. Triliun	3.326.833,128	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
7	Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan ketaatan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	N/A	-	-	.	30%	438.853,000	45%	532.007,935	50%	534.279,609	50%	1.505.140,543	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
8	Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan nilai ekspor	N/A	-	N/A	.	0,3%	4.448.979,700	0,3%	1.184.040,427	0,3%	1.189.096,280	0,3%	6.822.116,408	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
9	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha perdagangan yang meningkat daya saingnya	N/A	-	N/A	.	75,79%	2.041.913,790	79,56%	1.439.923,558	83,33%	1.446.072,032	83,33%	4.927.909,380	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
10	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pelaku IKM non sentra industri yang meningkat daya saingnya	N/A	-	N/A	.	55,00%	6.484.786,530	60,00%	3.378.791,840	68,49%	3.393.219,281	68,49%	13.256.797,651	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Persentase pelaku IKM padat sentra industri yang meningkat daya saingnya	N/A	-	N/A	.	30,00%		40,00%		50,00%		50,00%			

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha perdagangan yang memiliki perizinan	N/A	-	N/A	.	100%	52.140.000	100%	24.266.460	100%	24.370.078	100%	100.766.538	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
12	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang melakukan pemasaran online	N/A	-	N/A	.	4,52%	433.975.000	-	.	-	.	4,52%	433.975.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
13	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok	15%	-	8,49%	.	15%	6.789.810.380	15%	1.267.140.790	15%	1.272.551.481	15%	9.329.502.652	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
14	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase tera/tera ulang sesuai prosedur	N/A	N/A	.	100%	1.238.806.830	100%	936.253.287	100%	940.251.088	100%	3.115.311.205	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
15	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang meningkat omzetnya	N/A	-	11,11%	.	12,29%	2.642.174.990	13,47%	1.255.988.450	15,13%	1.255.988.450	15,13%	5.154.151.890	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
		Jumlah kemitraan usaha koperasi	N/A	-	.	.	1 kemitraan	2 kemitraan	2 kemitraan	2 kemitraan	2 kemitraan	2 kemitraan				
16	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang mematuhi peraturan perundang-undangan	N/A	-	N/A	.	14,30%	1.331.608.200	15,00%	1.442.789.400	15,60%	1.442.789.400	15,60%	4.217.187.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
17	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah KSP/USP yang dilakukan penilaian kesehatan	-	-	-	-	110 koperasi	-	386.709.400	-	-	-	-	-	110 koperasi	386.709.400	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
18	Program Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam	Cakupan fasilitas ijin usaha simpan pinjam sesuai prosedur	-	N/A	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.014.985.640	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
19	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat	-	60%	-	60%	593.080.450	-	-	65%	70%	70%	70%	70%	70%	521.910.600	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (Crosscutting)	Cakupan masyarakat miskin yang pangannya tercukupi	-	0,98%	-	1,31%	523.045.000	-	-	1,63%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1.399.427.375	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
20	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Cakupan informasi daerah rentan rawan pangan	-	N/A	-	100%	166.622.500	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	170.434.597	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Kawasan Permukiman (Crosscutting)	Jumlah Rumah Masyarakat Miskin Layak Huni	-	-	1.376 unit	-	1.876 unit	2.626 unit	3.426 unit	17.408.317.000	17.408.317.000	3.426 unit	17.850.000.000	3.426 unit	42.802.886.750	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Crosscutting)	Cakupan Masyarakat Miskin yang Terlayani Kesehatannya	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	103.888.649.200	106.052.587.200	100%	106.052.587.200	100%	315.993.823.600	Dinas Kesehatan
	Program Pengelolaan Pendidikan (Crosscutting)	Cakupan Masyarakat Miskin yang Terlayani Pendidikannya	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	55.613.500.000	81.669.975.000	100%	84.658.410.000	100%	221.941.885.000	Dinas Pendidikan
21	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan warga miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial Persentase DTKS terpilih yang dimanfaatkan dalam penanganan kemiskinan Cakupan anak terlantar dalam panti yang memperoleh layanan asuh sesuai NSPK	N/A	-	58,38%	69,04%	76,82%	84,6%	84,6%	2.685.387.600	4.039.789.290	100%	4.057.039.190	84,6%	10.782.216.080	Dinas Sosial

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
22	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	N/A	-	.	N/A%	.	60%	4.188.323,405	60%	5.411.912,357	60%	5.435.021,222	60%	15.035.256,984	Dinas Ketenagakerjaan
				-	.	N/A%	.	60%	2.091.500,000	60%	5.435.021,222	60%	2.091.500,000	60%	2.091.500,000	
23	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah dokumen ketenagakerjaan	-	.	.	N/A	.	2 Dokumen	127.340,000	2 Dokumen	.	2 Dokumen	.	8 Dokumen	127.340,000	Dinas Ketenagakerjaan
				-	.	N/A	.	2 Dokumen	1.010.187,075	40,00%	4.750.316,000	40,00%	4.770.599,849	40,00%	10.531.102,924	
24	Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	N/A	-	.	58,44%	.	45,65%	1.010.187,075	40,00%	4.750.316,000	40,00%	4.770.599,849	40,00%	10.531.102,924	Dinas Ketenagakerjaan
				-	.	5,556 orang	.	10.100 orang	1.010.187,075	10.300 orang	4.750.316,000	10.500 orang	4.770.599,849	10.500 orang	10.531.102,924	
		Jumlah peserta kegiatan pemberi kerja (padat karya)	N/A	-	.	600 orang	.	600 orang	1.010.187,075	700 orang	4.750.316,000	800 orang	4.770.599,849	800 orang		

VI - 110

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023**

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Rp
25	Program Hubungan Industrial	Cakupan kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	N/A	-		62,28%		50%		50%		50%		50%		2.729.653.967	Dinas Ketenagakerjaan
				-	.	N/A		N/A		50%		50%		50%		669.295.742	
26	Program Pengembangan UMIKM	Persentase usaha mikro yang omsetnya meningkat	-	-		4,05%		4,22%		4,39%		4,64%		4,64%		2.454.301.550	Dinas KUKM
				-	.	.		5,06%		10,12%		11,14%		11,14%		2.454.301.550	
27	Program Pemberdayaan UMIKM	Persentase usaha mikro yang meningkat keberdayaan usahanya	-	-		4,05%		5,06%		10,12%		11,14%		11,14%		4.564.978.550	Dinas KUKM
				-	.	3,42%		3,59%		3,76%		3,93%		3,93%		4.564.978.550	
				-	.					4 kemitraan		8 kemitraan		8 kemitraan		8 kemitraan	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
28	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase binaan yang menjadi pelaku usaha pangan olahan hasil perikanan	N/A	-	-	N/A	-	5,00%	524.834.483	7,00%	524.834.483	9,00%	488.655.000	9,00%	1.538.323.966	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
29	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase binaan yang menjadi pelaku usaha pangan olahan hasil peternakan	N/A	-	-	N/A	-	5,00%	3.475.743.416	7,00%	3.732.220.404	9,00%	3.748.156.985	9,00%	10.956.120.806	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
30	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang perikanan	N/A	-	-	N/A	-	42,43%	1.817.971.978	45,26%	1.640.416.107	48,10%	1.647.420.684	48,10%	5.105.808.770	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
31	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang pertanian dan peternakan	N/A	-	-	N/A	-	65%	2.870.672.172	75%	2.897.241.461	85%	2.909.612.682	85%	8.677.526.315	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
32	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase petani yang mengikuti asuransi usaha tani padi	N/A	-	-	N/A	-	5%	169.422.380	10%	213.713.116	15%	214.625.671	15%	597.761.167	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD							
				Realisasi Rp	-	Realisasi Rp	N/A	Target Rp	100%	Target Rp	387.976.200	Target Rp	100%		Target Rp	435.289.604	Target Rp	100%	Target Rp	437.148.291	Target Rp	100%
33	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase kejadian bencana pertanian ditindaklanjuti	N/A	-	N/A	-	100%	387.976.200	100%	435.289.604	100%	437.148.291	100%	1.260.414.095	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian							
34	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani minimal kategori kelas lanjut	N/A	-	N/A	10,80%	160.848.070	13,40%	584.535.081	15,90%	587.031.046	15,90%	1.332.414.197	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian								
Misi 4: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berawasan lingkungan																						
4.1	Tujuan: Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berawasan lingkungan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	7.375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	Sasaran: Meningkatnya ruang Kota yang nyaman dan berkelanjutan	Persentase RTH	12,2%	12,4%	12,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pelanggaran tata ruang dan bangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	77,14%	77,59%	213.374.275	-	-	-	-	-	-	-	1.066.970.275	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
2	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH yang berkualitas	44,73%	47,33%	24.839.099,217	50,34%	36.145.412,132	-	-	-	-	-	-	50,34%	60.984.511,349	PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3	Program penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas	Persentase PSU milik pemerintah Kota Bandung dalam kondisi baik	100%	100%	6.949.865,370	100%	6.742.296,257	-	-	-	-	-	-	100%	13.692.161,627	PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	Program Penegakan Produk Hukum Daerah	Cakupan penyelesaian penegakan Perda Persentase penegakan Perda	100%	100%	1.779.201,244	-	716.028,008	-	-	-	-	-	-	100%	2.495.229,252	PD Pengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
5	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Persentase lahan milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat Persentase luasan RTH	17,64%	19%	57.732.049,070	-	25.899.179,950	-	-	-	-	-	-	19%	83.631.229,020	PD Penanggung Jawab Urusan Keuangan
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN	17,64%	-	-	21%	4.572.240,053	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Keuangan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
7	Program Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	1.404.125.000	82,02	1.169.196.842	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Penanaman Modal	
		Pemenuhan standar pelayanan perizinan	100%		100%											
8	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase bangunan gedung umum yang memenuhi RTH privat sesuai peraturan yang berlaku	N/A	4.125.168.067	5%	14.712.652.118	-	-	-	-	-	5%	18.837.820.185		PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
9	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah ketersediaan dokumen rencana rinci pada pusat- pusat pelayanan kota	2 Dokumen	1.577.994.000	2 Dokumen	1.402.719.500	-	-	-	-	-	2 Dokumen	2.980.713.500		PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
10	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase areal pemakaman ditata	N/A	11.516.558.560	32,14%	9.960.798.731	-	-	-	-	-	32,14%	21.477.357.291		PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
11	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kawasan konservasi terpelihara	8,8%	3.671.786.750	28,99%	1.629.963.065	-	-	-	-	-	28,99	5.301.749.815		PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Realisasi Rp	Realisasi	Realisasi Rp	Realisasi	Target Rp	Target	Target Rp	Target	Target Rp	Target	Target Rp	Target	
12	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Produktivitas padi	68,08 kw/ha	68,083 kw/ha	68,24 kw/ha	-	-	-	-	-	-	-	68,24 kw/ha	2.954.666.103	PD Penanggung Jawab Urusan Pertanian	
				813.880 Pohon	767.340 pohon	-	-	-	-	-	-	767.340 pohon				
				412.144 Pohon	163.895 Pohon	-	-	-	-	-	-	163.895 Pohon				
				53.869 Pohon	20.717 Pohon	-	-	-	-	-	-	20.717 Pohon				
				80	45	-	-	-	-	-	-	45				
13	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	64-100%	64%-100%	65%-100%	-	-	-	-	-	-	-	-	Pada 30 Kecamatan		
				203.166.700.229	221.722.100.014	-	-	-	-	-	-	-				
4.1.2	Sasaran: Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan	120 Menit	100 Menit	80 Menit	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase sarana dan prasarana pekerjaan umum terbangun	100%	88%	-	-	-	-	-	-	-	-	88%	81.723.117.817	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
2	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Lama penanganan yang tertangani pada titik genangan	120 mnt	80 mnt	-	60 mnt	45.616,645,376	-	-	-	-	-	60 mnt	45.616,645,376	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang memanfaatkan dan didaur ulang di sumber sampah	103.601 ton	85.110 ton	72.841.733,386	95.640,95 ton	58.269,847,197	-	-	-	-	-	85.110 ton	131.111,580,583	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup	
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rata- rata penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	100%	100%	4.105,194,889	85%	3.629,014,463	-	-	-	-	-	85%	7.734,209,352	PD Penanggung Jawab Urusan Penunjang	
5	Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pelanggaran tata ruang dan bangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	77,14%	853,596,000	77,59%	213,374,275	-	-	-	-	-	77,59	1.066,970,275	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
6	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kawasan konservasi terpelihara	8,8%	17,61%	28,99%	1.629.963.065	-	-	-	-	-	-	-	-	28,99%	5.301.749.815	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
7	Program Pembinaan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	2.889.171.200	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
		Persentase pelaku usaha yang menaati peraturan pengelolaan lingkungan hidup	12,5%	12,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,34%		
8	Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup	Cakupan perlindungan kualitas lingkungan	33,38%	-	33,43%	713.586.500	-	-	-	-	-	-	-	-	33,43%	713.586.500	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
		Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan	12 Aspek	11 Aspek	10 Aspek										-		
9	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase sarana dan prasarana pekerjaan umum terbangun	100%	88%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88%	1.723.117.817	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
10	Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	92%	-	91,87%	-	-	-	-	-	-	-	183,87	91.208.302.338	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			3	-	2	-	-	-	-	-	-	5,00				
			397.535 m ²	-	1.329,5m ²	-	-	-	-	-	-	604.763,50				
			602.402 m	-	2.792,63 m	-	-	-	-	-	-	410.144,63				
11	Program Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	Jumlah PJU dalam kondisi baik	44.000 Ttk	1.613 titik	16.548.187.591	-	-	-	-	-	-	46.790 titik	16.548.187.591	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
12	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase penumpang sarana angkutan umum	19,5%	20,14%	16.002.518.813	-	-	-	-	-	-	20,14%	33.872.925.785	PD Penanggung Jawab Urusan Perhubungan		
13	Program Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase ketercapaian tertib dan keselamatan lalu lintas	1%	5%	14.288.346.200	17.870.406.972	-	-	-	-	-	5%	14.288.346.200	PD Penanggung Jawab Urusan Perhubungan		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi Rp	100%	Realisasi Rp	100%	Target Rp	Target	Target Rp	Target	Target Rp	Target		Target Rp	Target
14	Program Penegakan Produk Hukum daerah	Persentase penegakan Perda	100%	1.779.201.244	100%	716.028.008	-	-	-	-	-	-	100%	2.495.229.252	PD Pengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	
		Persentase Luasan Kawasan Kumuh	9,76%		3,96%		-	-	-	-	-	-	-			
15	Program Penataan Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh Cakupan layanan air bersih	9,76%	24.444.433.947	2,94%	10.692.139.492	-	-	-	-	-	-	2,16%	35.136.573.439	PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan PDAM	
16	Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak	64,23%	36.150.023.179	80,73%	14.461.864.154	-	-	-	-	-	-	83,01%	50.611.887.333	PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
17	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Pra dan Tanggap Darurat Bencana	Rata-rata tingkat waktu maksimum assessment tanggap darurat bencana	N/A	853.187.200	24 jam	340.906.120	-	-	-	-	-	-	24 jam	1.194.093.320	PD Pengampu Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
18	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	Tingkat waktu maksimum tanggap (<i>response time rate</i>)	15 menit	580.885.067	14,22 menit	240.959.854	-	-	-	-	-	-	14,22 menit	1.529.196.900	PD Pengampu Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Realisasi Rp	Target Rp	Realisasi Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp		Target Rp		
19	Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pelanggaran tata ruang dan bangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	77,14%	853.596.000	77,59%	213.374.275	-	-	-	-	-	-	-	77,59	1.066.970.275	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang dimanfaatkan dan didaur ulang di sumber sampah	103.601 ton	85.110	72.841.733.386	95.640,95	58.269.847.197	-	-	-	-	-	-	-	85.110 ton	131.111.580.583	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
21	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peningkatan PHBS tatanan rumah tangga	67,8 %	67,88	768.773.102	61,83 %	568.672.447	-	-	-	-	-	-	-	61,83 %	1.337.445.549	PD Pengampu Urusan Kesehatan
22	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase akses penduduk terhadap sanitasi dasar	70%	-	-	77%	618.661.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Pengampu Urusan Kesehatan
4.1.3	Sasaran: Meningkatnya Layanan Air Bersih	Cakupan Layanan Air Bersih	77,27%	79%		80%											
1	Program Penataan Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh	9,76%	4,28%	24.444.433.947	2,94%	10.692.139.492	-	-	-	-	-	-	-	2,16%	35.136.573.439	PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan PDAM
		Cakupan layanan air bersih	77,27%	79%		80%									80%		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
2	Program Peningkatan Cakupan Pelayanan	Jumlah penambahan Sambungan Rumah (SR) perpipaan air bersih	15.000 SR	21.000 SR	10.000 SR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PDAM
3	Program Peningkatan Kapasitas Produksi	Kapasitas produksi air baku	3.042 ltr/det	3.742 ltr/det	3.862 ltr/det	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PDAM
4	Program Penurunan Tingkat Kehilangan Air	Persentase pengurangan kebocoran air	42%	40%	37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PDAM
4.1.4	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	35,23	35,35	35,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	20 poin	49,70 poin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,70 poin	792.478.420	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Rehabilitasi Kerusakan Air	Persentase sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan"	39,13%	-	78,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	78,13 %	292.372.100	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
				Realisasi Rp	69,79 poin	Realisasi Rp	-	Target Rp	-	Target Rp	-	Target Rp	-		Target Rp	-	Target Rp	69,79 poin
3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	58,61	69,79 poin	923.752.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,79 poin	923.752.003	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
4	Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim	Indeks SO2	1,17 poin	-	589.778.400	1,50 poin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50 poin	589.778.400	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
5	Program Pembinaan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	2.889.171.200	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
		Persentase pelaku usaha yang menaati peraturan pengelolaan lingkungan hidup	10%	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,34%		
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup	Cakupan perlindungan kualitas lingkungan	33,38%	-	713.586.500	33,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,43%	713.586.500	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
7	Program Pencegahan Dampak Lingkungan	Cakupan pencegahan dampak kerusakan lingkungan akibat kebijakan dan usaha/kegiatan	100%	-	750.334.480	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	750.334.480	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Target	Rp
8	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan akibat Limbah B3	Persentase limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang terkelola	0,00%	-	0,001	190.588,920	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	635.015,183	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
9	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kawasan konservasi terpelihara	8,8%	17,61%	28,99%	4.079.615,976	-	-	-	-	-	-	-	-	17,61%	5.301.749,815	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
10	Program Penataan Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh	9,76%	4,28%	2,94%	10.692.139,492	-	-	-	-	-	-	-	-	2,16%	35.136.573,439	PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase sarana dan prasarana pekerjaan umum terbangun	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88%	81.723.117,817	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Program Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Lama penanganan yang tertangani pada titik genangan	120 mnt	80 mnt	60 mnt	45.616.645,376	-	-	-	-	-	-	-	-	60 mnt	45.616.645,376	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Realisasi Rp	46,99%	Realisasi Rp	50,34%	Target Rp	-	Target Rp	-	Target Rp	-		Target Rp	-	Target Rp
13	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH yang berkualitas	44,73%	24.715.554.518	36.145.412.132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
14	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase sarana kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat	N/A	-	618.661.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45%	618.661.570	PD Pengampu Urusan Kesehatan
15	Program Penegakan Produk Hukum daerah	Persentase Penegakan Perda	100%	1.779.201.244	716.028.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	2.495.229.252	PD Pengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
16	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota Jumlah sampah yang memanfaatkan dan didaur ulang di sumber sampah	97,97%	72.841.733.386	58.269.847.197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.110 ton	131.111.580.583	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
17	Program Penegakan Produk Hukum daerah	Persentase penegakan perda	100%	1.779.201.244	716.028.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	2.495.229.252	PD Pengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Rp	
18	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	64-100%	64%-100%	203.166.700,229	65%-100%	221.722.100,014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pada 30 Kecamatan	
4.2	Tujuan: Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota lingkungan hidup, yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks <i>Liveable City</i> Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	N/A	N/A		N/A		7,775	7,875	8,00	8,00	8,00	8,00					
4.2.1	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	35,20	45,22		48,54		51,63	51,71	51,79	51,79	51,79	51,79					
		Persentase Luasan RTH	12,21%	12,22%		12,25%		12,75%	13,26%	13,77%	13,77%	13,77%	13,77%					
		Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	98,00%	97,99%		98,30%		98,50%	98,70%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%					
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen kebijakan lingkungan	N/A	N/A		2 Dokumen		2 Dokumen	8 Dokumen	1.443.630,010	1.437.491,919	1.064.911,880	Dinas Lingkungan Hidup					
																		3.946.033,809

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks SO2	-		0,74 poin		0,72 poin	0,7 poin	3.003.058.260	0,7 poin	0,68 poin	3.015.881.319	0,68 poin	7.756.960.560	Dinas Lingkungan Hidup	
		Persentase sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan"	-		78,91%	79,69%	80,47%		81,25%	81,25%		81,25%				
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan kawasan konservasi terpelihara	N/A		N/A		100%	5.314.175.608	100%	100%	5.336.867.137	100%	11.932.711.815	Dinas Lingkungan Hidup		
4	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat	N/A		19,94%		20,94%	1.499.296.856	21,94%	22,94%	1.505.698.853	22,94%	4.286.255.669	Dinas Lingkungan Hidup		
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Cakupan penyuluhan lingkungan hidup	10%		N/A		-	499.297.096	44%	100%	501.429.095	100%	1.000.726.191	Dinas Lingkungan Hidup		
6	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat sesuai kriteria	N/A		N/A		5 Jenis	1.999.187.000	5 Jenis	5 Jenis	2.004.952.382	5 Jenis	4.878.421.018	Dinas Lingkungan Hidup		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
7	Program Peningkatan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan pengaduan yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	100%	-	100%	564.252.000	100%	798.887.866	100%	802.299.118	100%	2.165.438.984	Dinas Lingkungan Hidup	
8	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase luas RTH dari serah terima PSU perumahan	6,47%	6,49%	6,52%	.	6,53%	76.843.855.179	6,55%	44.954.665.065	6,57%	45.160.436.559	6,57%	166.958.956.803	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan	
9	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase masalah pertanahan ditindaklanjuti	N/A	N/A	100%	.	100%	1.496.700.000	100%	2.817.429.407	100%	2.829.459.831	100%	7.143.589.239	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan,	
10	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Wilayah pelayanan pemanfaatan tanah sesuai prosedur	N/A	N/A	100%	.	100%	3.455.753.140	100%	1.995.908.593	100%	2.004.431.123	100%	7.456.092.856	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan	
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya (Crosscutting)	Persentase Wilayah Kota Bandung yang terdata RTH privat Tersusunnya dokumen RDTR dan dokumen perencanaan lainnya	N/A	5,73%	N/A	.	18%	888.627.300	27%	498.606.900	41%	660.000.000	41%	2.047.234.200	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Realisasi Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target	
		Persentase pelanggaran tata ruang dan bangunan yang ditindaklanjuti yang sesuai dengan ketentuan	N/A	77%		78%		79%		80%		80%					
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase areal pemukiman yang tertata	N/A	32%		33%	N/A					N/A		N/A		Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	
11	Program Pengembangan Permukiman	Persentase areal pemukiman yang tertata	N/A	N/A		N/A	34,00%	35,00%	35,00%	35,00%		35,00%				Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase luasan RTH publik taman, median, jalur hijau jalan, dan hutan kota terpelihara	N/A	25,10%		25,54%	25,78%	26,02%	26,02%	26,02%		26,02%				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
12	Program Pengelolaan Persampahan	Capaian penanganan sampah	N/A	488.661,35 ton		447.090 ton	446.642 ton	464.150 ton	464.150 ton	464.150 ton		464.150 ton				Dinas Lingkungan Hidup	
		Capaian pengurangan sampah	N/A	95.640,95 ton		148.023 ton	159.734 ton	174.056 ton	174.056 ton	174.056 ton		174.056 ton					
						239.373.404.588	446.642 ton	464.150 ton	311.106.199.420	464.150 ton	312.419.796.062	464.150 ton	312.419.796.062	464.150 ton	862.899.400.070		
						49.809.833.453	446.642 ton	464.150 ton	51.425.425.905	464.150 ton	51.631.197.399	464.150 ton	51.631.197.399	152.866.456.757			
						-	446.642 ton	464.150 ton	8.621.965.533	464.150 ton	8.658.781.326	464.150 ton	8.658.781.326	17.280.746.859			
							446.642 ton	464.150 ton	-	464.150 ton	-	464.150 ton	152.866.456.757	7.503.409.781			
							446.642 ton	464.150 ton		464.150 ton		464.150 ton	152.866.456.757				

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
13	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan penanganan limbah B3	N/A	.	17,45%	.	17,45%	293.008.520	17,95%	299.076.381	18,45%	300.353.437	18,45%	892.438.339	Dinas Lingkungan Hidup	
4.2.2	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Persentase Penurunan Kemacetan	N/A		24,35%		20,87%		14,78%		7,83%		7,83%			
		Persentase Luasan Kawasan Kumuh	5,16	4,28	2,94%	.	2,80%		2,76%		2,16%		2,16%			
		Cakupan Pelayanan Air Minum	77,27	80,24	79,38%	.	81%		82%		83%		83%			
		Persentase Penurunan Titik Genangan	N/A	N/A	67,65%		58,82%		50,00%		41,18%		41,18%			
14	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan	N/A		10,81%		9,57%		7,33%		3,85%		3,85%		Dinas Perhubungan	
		Persentase penurunan aspek penyebab kemacetan urusan non perhubungan	N/A	.	12,72%	.	11,20%		7,72%		4,24%		4,24%			
		Cakupan PJU nyata	N/A		90,96%		91%		-		-		91%			
15	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Jumlah dokumen perencanaan perkeretaapian dalam kota	N/A	.	N/A	.	N/A	.	1 Dokumen	291.966.758	1 Dokumen	293.213.456	1 Dokumen	585.180.214	Dinas Perhubungan	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
16	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemtapan jalan	N/A	N/A	91,87%		93,00%	94,00%	95,00%	95,00%	106.913.466,119	95,00 %	306.018.439,429	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		
		Luas trotoar dalam kondisi baik	N/A	410,145 m ²	420,145 m ²	435,845 m ²	451,545 m ²	451,545 m ²	106.286.766,540	451,545 m ²	451,545 m ²	106.913.466,119	451,545 m ²		306.018.439,429	
17	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak	64,23 %	N/A	80,73 %		80,93 %	82,02 %	83,01 %	83,01 %	64.664.866,967	83,01 %	233.655.653,557	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
18	Program Kawasan Permukiman	Persentase penurunan kumuh kriteria bangunan gedung	-		12,75%		7,65%	4,59%	2,75%	2,75%	64.664.866,967	2,75%	104.200.472,983	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
		Persentase penurunan kumuh kriteria akses aman air minum tidak tersedia	-		30,56%		18,34%	11%	6,60%	6,60%	64.664.866,967	6,60%	104.200.472,983			
		Persentase penurunan kumuh kriteria kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi	-		55,56%		33,33%	20%	12%	12%	50.370.379,218	12%	104.200.472,983			
		Persentase cakupan layanan air bersih non perpipaan	-		3,58%		3,68%	3,78%	3,88%	3,88%	50.521.999,765	3,88%	104.200.472,983			
		Persentase penurunan kumuh kriteria sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku	-		10,24%		6,15%	3,69%	2,21%	50.521.999,765	2,21%	104.200.472,983				

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD								
				Realisasi Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp				
		Persentase penurunan kumuh kriteria prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	-	62,68%		37,61%	22,56%	13,54%		13,54%			13,54%									
																-	79,1%	79,37%	79,73%	80,09%	80,09%	80,09%
																	-	37,26%	22,35%	13,41%	8,05%	8,05%
																-	52,71%	31,62%	18,97%	11,38%	11,38%	
19	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luasan kawasan kumuh	9,76%	2,94%		2,80%	-	-		-		-	-		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman							
		Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak diluar kawasan kumuh	N/A	N/A	N/A	81,24%	81,95%		81,95%													
20	Program Pengembangan Permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh	9,76%	2,94%		2,80%	-	-		-		-	-		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman							
															3.282.286.350							

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Crosscutting)	Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	41,89%	-	25,14%	110.135.000	15,08%	9,05%	9,05%	112.887.977,81	9,05%	333.157.590,31	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana		
				77,87%	-	46,72%	110.134.612,5	28,03%	16,82%	16,82%	16,82%	16,82%	16,82%			
23	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase cakupan layanan air bersih	-	3,58%	-	3,68%	22.231.577.880	-	-	-	-	-	22.231.577.880	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
24	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase kebutuhan sumur imbuhan	N/A	0,73%	-	1,60%	59.267.241.080	2,33%	3,06%	3,06%	59.716.119.163	3,06%	178.362.845.729	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		
		Persentase penurunan titik genangan	N/A	67,65%	-	58,82%	59.379.485.485,49	50,00%	41,18%	41,18%	41,18%	41,18%				
		Panjang sungai dalam kondisi baik	N/A	N/A	-	125 km	250 km	265,05 km	265,05 km	265,05 km	265,05 km	265,05 km				
		Persentase kapasitas parkir air (kolam retensi)	N/A	26,69%	-	31,13%	51,88%	72,01%	72,01%	72,01%	72,01%	72,01%				

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Panjang drainase dalam kondisi baik	N/A	N/A	63,02%	.	63,85%	42,783,389,193	64,68%	29,926,289,679	65,52%	29,006,366,286	65,52%	101,716,045,158	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
25	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase dokumen penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis	N/A	100%	100%	.	100%	3,680,527,300	100%	3,232,477,400	100%	3,246,280,078	100%	10,159,284,778	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	
26	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Wilayah Kota Bandung yang terdata RTH privat	N/A	N/A	5,73%	.	18%	2,427,750,200	27%	2,423,648,655	41%	2,274,733,586	41%	7,126,132,441	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	
27	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase kenaikan tenaga terampil jasa konstruksi yang kompeten	80	N/A	N/A	.	20%	-	52%	281,279,680	84%	282,480,744	84%	563,760,424	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD							
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp						
28	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya dokumen RDTR dan dokumen perencanaan lainnya Persentase pelanggaran tata ruang dan bangunan yang ditindaklanjuti yang sesuai dengan ketentuan	N/A		N/A		77%		1 Dokumen		78%		1 Dokumen		79%		1 Dokumen		80%		1.837.628.856	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
Misi 5: Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi																						
5.1	Tujuan: Optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan	Tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan	17,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1	Sasaran: Meningkatkan partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan (Bobot 50%)	193 Miliar	Meningkat 2% dari tahun 2018	Meningkat 4% dari tahun 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan	N/A	30 lembaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pada 30 Kecamatan
				4.098.592.850																		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
3	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor (PMDN/PMA) Presentase perusahaan yang menindaklanjuti promosi investasi	400 -	539 100%	1.986.107,445	721 100%	1.907.972,610	- -	3.894.080,055	PD Penanggung Jawab Urusan Penanaman Modal						
4	Program Pelayanan Perijinan	Pemenuhan standar pelayanan perizinan	N/A	100%	1.404.125.000	100%	1.169.196,842	- -	- -	PD Penanggung Jawab Urusan Penanaman Modal						
5.2	Tujuan: Terwujudnya Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan	Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan	N/A	N/A		7,13		5,98	6,48	6,69	6,69	6,69	6,69	6,69		
5.2.1	Sasaran: Meningkatkan Partisipasi Kolaborasi Pembangunan	Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan	N/A	N/A		7,13		5,98	6,48	6,69	6,69	6,69	6,69	6,69		

Selain program pembangunan daerah yang dibiayai oleh APBD kota, berikut merupakan program strategis lain yang sumber pendanaannya di luar APBD kota, antara lain yang bersumber dari APBD provinsi, APBN, KPBU, dan Swasta. Rencana Proyek Strategis Kota Bandung disajikan pada Tabel 6.13.

Tabel 6.13

Rencana Proyek Strategis Kota Bandung Tahun 2018-2023

No	Kegiatan	SUMBER ANGGARAN				TARGET
		APBD Provinsi	APBN	KPBU	SWASTA	
I	Proyek Strategis Nasional					
1.1	Infrastruktur Ketenagalistrikan					
1	Pembangkit, Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Nasional		√		√	2023
II	Infrastruktur Strategis Provinsi					
2.1	Jalan Tol					
1	Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) (27,3km)	√	√			2023
2	Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (184km)		√	√	√	2023
3	Tol NS-Link Kota Bandung (14,3km)				√	2023
2.2	Jalan Strategis					
1	Jalan Sukasari-Lembang (18,3 km)	√				2021
2	Pembangunan Fly Over:					
	a. Kopo (1,3 km)	√	√			2021
	b. Buah Batu- Kiaracondong (1,96 km)	√	√			2022
2.3	Kereta Api					
1	Reaktivasi Jalur KA Bandung-Ciwidey	√	√			2022
2	Double Track lintas Padalarang-Bandung-Cicalengka		√			2023
2.4	Prasarana dan Sarana Kereta Api dalam kota					
1	LRT Bandung Raya	√		√	√	2022
2.5	Infrastruktur Perumahan dan Permukiman					
1	Penyediaan Perumahan bagi MBR (buruh industri) dan ASN	√	√	√		2023
2.6	Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman					
1	Pembangunan Alun-Alun	√				2020-2022
2	Pembangunan <i>Creative Centre</i>	√				2020-2022
3	Pembangunan Pusat Budaya	√				2020-2022
4	Pembangunan Masjid Raya Al Jabar	√				2021
2.7	Sistem Air Limbah					
1	SPALD-T (Komunal-DAS Citarum)	√	√			2021

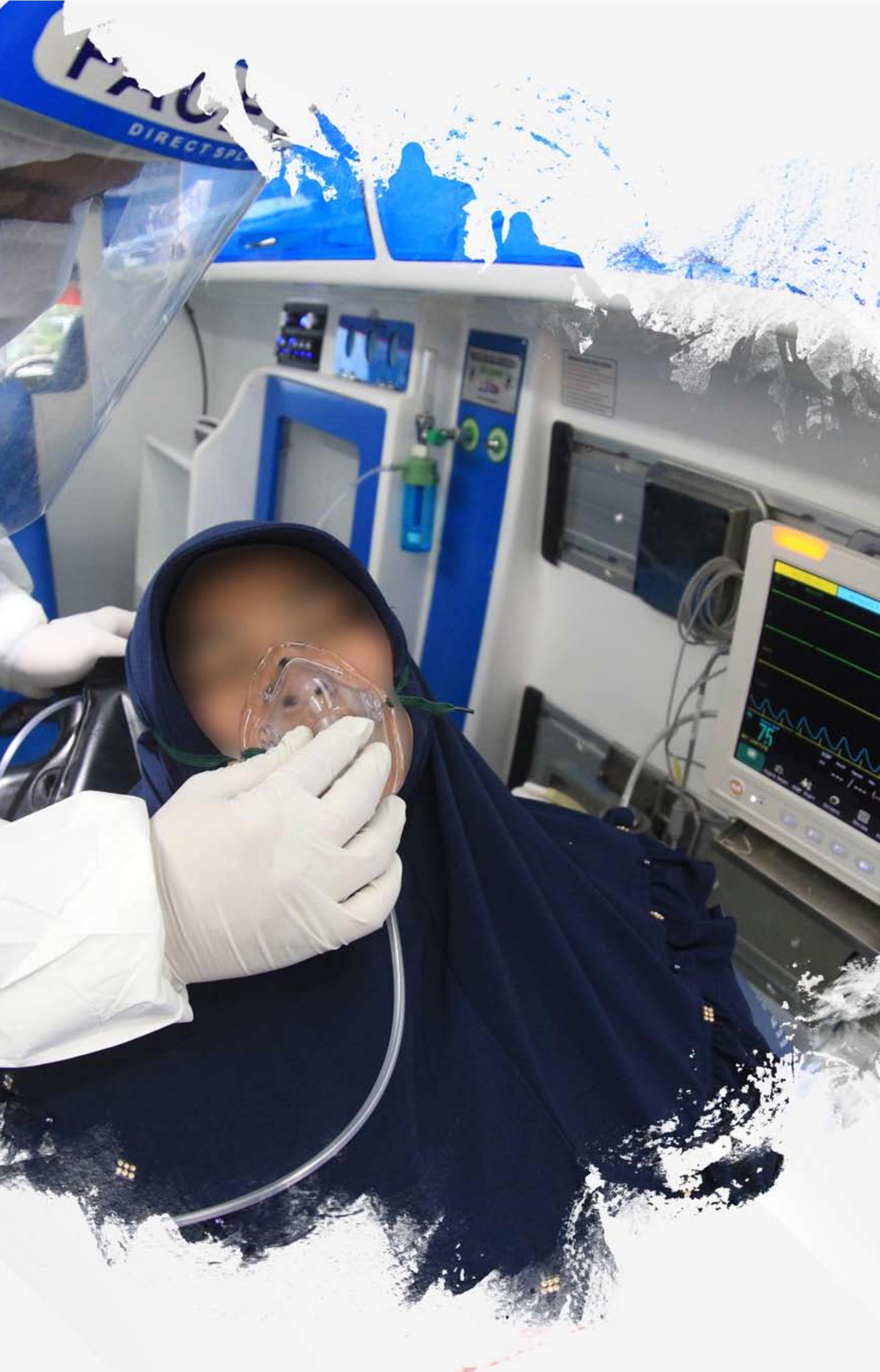
Sumber: Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023



KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH



BAB VII



Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam perencanaan kinerja program, korelasi antara aspek strategis dan operasional menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Aspek strategis dituangkan dalam tujuan dan sasaran daerah. pada aspek operasional kinerja diimplementasikan dalam program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Program dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung (*supporting*).

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah. Pemerintah Kota Bandung menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat Perundang-undangan dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Demikian juga peraturan yang sifatnya mandatory sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa alokasi urusan pendidikan minimal 20% dari belanja daerah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa urusan kesehatan minimal 10% dari belanja langsung. Kemudian berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 893.5/9039/SJ perihal Program Kompetensi SDM ASN Tahun Anggaran 2019 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan (pengembangan kompetensi) Aparatur Sipil Negara dalam APBD sekurang-kurangnya 0,16% dari total belanja daerah.

Program perangkat daerah yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan indikatif selanjutnya dijabarkan lebih rinci kedalam kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pendanaan program disusun menggunakan prediksi kebutuhan belanja berdasarkan target kinerja yang harus diwujudkan untuk mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah. Untuk itu perlu disusun kerangka pendanaan untuk membiayai belanja pemerintah daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam hal ini pola pengeluaran per perangkat daerah untuk 5 tahun kedepan harus bisa menyesuaikan dengan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang sudah diperhitungkan untuk kebutuhannya selama 5 tahun. Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel 7.1.

Tabel 7.1

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung
Tahun 2018-2023

NO	Uraian Akun	Proyeksi		
		2021	2022	2023
	Pendapatan Daerah	6.580.614.037.980,00	5.944.964.755.100,00	5.966.923.626.395,50
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	26.849.185.812,00	0,00	0,00
	Kapasitas Kemampuan Keuangan daerah	6.607.463.223.792,00	5.944.964.755.100,00	5.966.923.626.395,50
5	BELANJA	6.555.755.475.956,00	5.934.058.938.784,00	5.966.923.626.395,50
5.1	Belanja operasi	5.677.081.544.918,00	5.712.086.516.780,00	5.913.173.626.395,50

NO	Uraian Akun	Proyeksi		
		2021	2022	2023
5.1.1	Belanja pegawai	2.724.824.499.901,00	2.616.263.666.320,00	2.681.670.257.978,00
5.1.2	Belanja barang dan jasa	2.552.332.072.172,00	2.955.020.806.525,00	2.957.339.189.482,50
5.1.3	Belanja bunga	0,00	0,00	
5.1.4	Belanja subsidi	79.943.159.300,00	0,00	5.000.000.000,00
5.1.5	Belanja hibah	186.619.678.545,00	140.802.043.935,00	140.802.043.935,00
5.1.6	Belanja bantuan sosial	133.362.135.000,00	0,00	133.362.135.000,00
5.2	Belanja modal	823.450.911.365,00	-	-
5.2.1	Belanja Modal	823.450.911.365,00	-	-
5.3	Belanja tidak terduga	21.473.019.673,00	188.222.422.004,00	15.000.000.000,00
	Belanja tidak terduga	21.473.019.673,00	188.222.422.004,00	15.000.000.000,00
5.4	Belanja transfer	33.750.000.000,00	33.750.000.000,00	33.750.000.000,00
5.4.1	Belanja bagi Hasil	-	-	-
5.4.2	Belanja bantuan Keuangan	33.750.000.000,00	33.750.000.000,00	33.750.000.000,00
6.2	Pengeluaran pembiayaan	51.707.747.836,00	(10.905.816.316,00)	-
6.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	27.707.747.836,00	-	-
6.2.2	Penyertaan modal daerah	24.000.000.000,00	10.905.816.316,00	-
6.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Program perangkat daerah Kota Bandung periode tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dikelompokkan menjadi 2. Hal ini terjadi sebab adanya perbedaan klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur program pada 2 (dua) tahun pertama RPJMD yang meliputi tahun 2019 dan tahun 2020, dan 3 (tiga) tahun sisanya yaitu tahun 2021 sampai dengan 2023. Program tahun 2019 dan tahun 2020 merupakan program yang telah direalisasikan dalam APBD, sedangkan nomenklatur program pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Perubahan nomenklatur program (serta kegiatan dan sub kegiatan di dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah), membawa konsekuensi adanya perubahan atau penyesuaian indikator kinerja program dan targetnya per tahun. Program perangkat daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kota, disajikan dengan pada Tabel 7.2 berikut.

VII - 6

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Tabel 7.2

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Kota Bandung Tahun 2019-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penerimaan Anggaran
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	URUSAN PEMERINTAHAN RINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.364.097.617.530		1.496.486.804.286		3.831.226.879.218		2.987.321.665.117		2.998.837.702.484		12.676.122.733.207	
1	01	PENDIDIKAN				118.425.216.138		437.063.079.924		1.658.743.220.329		1.101.923.520.356		1.106.632.045.484		4.639.588.508.453	
1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	2.882.670.360	100	2.708.060.191	-	-	-	-	-	-	100	5.590.730.551	Dinas Pendidikan
1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Persen	100	100	2.981.507.023	100	2.542.044.256	-	-	-	-	-	-	100	5.523.551.279	Dinas Pendidikan
1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100	100	89.588.573.508	100	-	-	-	-	-	-	-	100	89.588.573.508	Dinas Pendidikan
1	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	56	80,36	4.039.568.420	89,89	1.645.892.490	-	-	-	-	-	-	87,91	5.685.460.910	Dinas Pendidikan
1	18	Program Pendidikan Non Formal	Persen	100	100	7.416.678.687	100	1.377.741.343	-	-	-	-	-	-	100	8.794.420.030	Dinas Pendidikan
1	20	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persen	50,59	51,83	6.664.106.120	58,44	124.530.913.262	-	-	-	-	-	-	58,44	131.195.019.382	Dinas Pendidikan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pe-nanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1	22	Persen	100	100	2.514.116.985		-	-	-	-	-	-	-	100	2.514.116.985	Dinas Pendidikan
1	1	28	Persen	100	100	2.381.952.800		-	-	-	-	-	-	-	100	2.381.952.800	Dinas Pendidikan
1	1	29	Persen	102,12	102,14	100.904.329.746	103,13	5.517.716.700	-	-	-	-	-	-	103,13	106.422.046.446	Dinas Pendidikan
1	1	30	Persen	103,10	103,13	92.713.362.464	102,65	4.865.099.154	-	-	-	-	-	-	102,65	97.578.461.618	Dinas Pendidikan
1	1	32	Persen	100	103,93	167.311.000	100	52.621.818	-	-	-	-	-	-	100	219.932.818	Dinas Pendidikan
1	1	33	Persen	0,01	0,01	5.084.603.029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.084.603.029	Dinas Pendidikan
1	1	34	Persen	0,02	0,02	17.887.862.218	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	17.887.862.218	Dinas Pendidikan

VII - 8

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 01 36	Program Bantuan Pendidikan	Persentase masyarakat miskin yg mendapatkan bantuan Pendidikan	Persen	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	Dinas Pendidikan
1 01 36	Program Dana BOS	Jumlah Laporan Bulanan BOS	Laporan	12	-	-	12	201.258.890.212	-	-	-	-	-	-	-	201.258.890.212	Dinas Pendidikan
1 01 37	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar	1 Angka Partisipasi Kasar SD	Persen	102,12	-	-	103,13	92.564.100.498	-	-	-	-	-	-	-	92.564.100.498	Dinas Pendidikan
		2 Angka Partisipasi Kasar SMP	Persen	103,10	-	-	102,65		-	-	-	-	-	-	103,13		Dinas Pendidikan
		3 Persentase inovasi pendidikan yang dimanfaatkan untuk pelayanan pendidikan	Persen	100	-	-	100		-	-	-	-	-	-	102,65		Dinas Pendidikan
		4 Persentase manajemen pelayanan pendidikan yang dimanfaatkan	Persen	100	-	-	100		-	-	-	-	-	-	100		Dinas Pendidikan
1 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	-	100	-	100	1.175.596.241.985	100	906.763.560.215	100	910.635.440.617	100	2.992.995.242.817	Dinas Pendidikan
1 01 02	Program Pengelolaan Pendidikan	1 Rasio siswa PAUD terhadap ketersediaan Rombongan Belajar	Persen	N/A	N/A	-	12,27	-	11,36	329.878.890.444	11,65	182.993.674.141	11,94	183.778.368.826	11,94	696.650.933.411	Dinas Pendidikan
		2 Rasio siswa SD terhadap ketersediaan ruang kelas	Persen	N/A	N/A		36,50		35,82		35,67		35,52		35,52		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	Persen	N/A	N/A		34,21		34,30		34,07		33,84		33,84		
		4	Persen	N/A	N/A		59		2		2		2		65		
		5	Persen	N/A	N/A		100		100		100		100		100		
		6	Persen	N/A	N/A		100		100		100		100		100		
1	03	Program Pengembangan Kurikulum	Persen	N/A	N/A	-	N/A	-	100	839.325.000	100	666.705.000	100	669.551.830	100	2.175.581.830	Dinas Pendidikan
1	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persen	N/A	N/A	-	71,12	-	71,46	152.428.762.900	71,81	11.499.581.000	72,15	11.548.684.211	72,15	175.477.028.111	Dinas Pendidikan
1	02	KESEHATAN															
	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	816.029.924.912	100	745.966.134.000	-	1.290.803.620.893	-	1.115.157.025.941	-	1.118.419.670.243	100	5.086.376.375.989	Dinas Kesehatan
	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	26.354.952.306	100	29.756.905.377	-	-	-	-	-	-	100	56.111.857.683	Dinas Kesehatan
1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	6.462.073.575	100	1.820.118.206	-	-	-	-	-	-	100	8.282.191.781	Dinas Kesehatan

VII - 10

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pe-nanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	Persen	100	100	1.472.295.718	100	413.750	-	-	-	-	-	-	100	1.472.709.468	Dinas Kesehatan
1	2	5	Persen	100	100	620.193.808	-	-	-	-	-	-	-	-	100	620.193.808	Dinas Kesehatan
1	2	46	Persen	N/A	100	63.729.632.746	-	-	-	-	-	-	-	-	100	63.729.632.746	Dinas Kesehatan
1	2	16	Persen	N/A	80,1	30.311.977.998	-	43.962.818.161	-	-	-	-	-	-	80,1	74.274.796.159	Dinas Kesehatan
		2	Persen	N/A	83,46		-		-	-	-	-	-	-	83,46		
		3	Persen	N/A	-		55,48		-	-	-	-	-	-	55,48		
		4	Persen	100	-		100		-	-	-	-	-	-	100		
1	2	19	Persen	7,95	23,18	768.773.102	50,33	568.672.447	-	-	-	-	-	-	50,33	1.337.445.549	Dinas Kesehatan
		2	Persen	67,8	67,88		61,83		-	-	-	-	-	-	61,83		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1 02 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Dinas Kesehatan
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar		-	-	-	38,59	2.579.907.790	-	-	-	-	-	-	38,59	2.579.907.790		
1 2 30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia		Persen	100	100	54.806.400	-	-	-	-	-	-	-	-	100	54.806.400		Dinas Kesehatan
1 2 41	Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Upaya Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	1	Persen	70	64,02	594.337.170	-	-	-	-	-	-	-	-	64,02	594.337.170		Dinas Kesehatan
		Akses Penduduk Terhadap Sanitasi Dasar		30	48,07		-	-	-	-	-	-	-	-	48,07			
1 2 57	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1	Persen	100	100	3.879.785.819	-	-	-	-	-	-	-	-	100	3.879.785.819		Dinas Kesehatan
		Persentase balita gizi buruk yang ditangani		N/A	58,93		-	-	-	-	-	-	-	-	58,93			
1 2 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2	Persen	37	38,96	7.432.437.412	-	-	-	-	-	-	-	-	38,96	7.432.437.412		Dinas Kesehatan
		Siaga Aktif					-	-	-	-	-	-	-	-				
1 2 50	Program Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan	1	Persen	65	65,2	531.294.450	-	-	-	-	-	-	-	-	65,2	531.294.450		Dinas Kesehatan
		Cakupan Fasilitas Kesehatan primer yang Dibina		75	80		-	-	-	-	-	-	-	-	80			
1 2 55	Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	2	Persen	100	100	206.523.375	-	-	-	-	-	-	-	-	100	206.523.375		Dinas Kesehatan
		Cakupan Fasilitas Kesehatan rujukan yang Dibina					-	-	-	-	-	-	-	-				
1 2 56	Program Pelayanan Gawat Darurat Terpadu		Persen	N/A	1,32	261.911.366	-	-	-	-	-	-	-	-	1,32	261.911.366		Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Laboratorium Kesehatan					-	-	-	-	-	-	-	-				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1 2 36	Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan	3 1 Cakupan pengembangan Smart City pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 2 Cakupan pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan	4 Persen	5 100	6 100	7 7.193.892.774	8 -	9 -	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 100	17 7.193.892.774	18 Dinas Kesehatan
1 2 47	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	persentase kecamatan dengan puskesmas dibandingkan rasio jumlah puskesmas dan jumlah penduduk sesuai WHO (1:30.000 penduduk)	Persen	N/A	100	26.758.023.105	-	-	-	-	-	-	-	-	100	26.758.023.105	Dinas Kesehatan
1 2 48	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	1 Persentase penanganan penderita penyakit menular 2 Universal Child Immunization (UCI) 3 Persentase Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) < 24 jam	Persen	100	100	2.416.435.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2.416.435.000	Dinas Kesehatan
1 2 49	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase penanganan penderita penyakit tidak menular	Persen	100	100	1.999.787.050	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.999.787.050	Dinas Kesehatan

VII - 14

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1 2 51	Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	1 Persentase masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Dinas Kesehatan
		2 Persentase masyarakat miskin yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	Persen	95	100	122.031.827.450	-	-	-	-	-	-	-	-	100	122.031.827.450		
1 2 40	Program Pengadaan Dan Pengawasan Obat, Perbekalan Kesehatan, Pangan Dan Bahan Berbahaya	1 Persentase Fasilitas Kesehatan melaksanakan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Dinas Kesehatan
		2 Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang melaksanakan produksi sesuai standar Kesehatan	Persen	100	100	80.859.550	-	-	-	-	-	-	-	-	100	80.859.550		
1 2 52	Program Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Kesehatan	Persentase dokumen rancangan kebijakan dan peraturan yang tersusun	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Dinas Kesehatan
			Persen	20	50	634.779.994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634.779.994		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1 2 53	Program Kefarmasian dan Alat kesehatan	1 Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan 2 Persentase Instalasi RS yang memenuhi standar kefarmasian dan alat kesehatan	Persen	100	6 100 29.767.408.833	7 29.767.408.833	8 -	9 -	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 100 29.767.408.833	17 17	Dinas Kesehatan
1 2 54	Program Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan	Persen	9	15,14	2.308.994.900	-	-	-	-	-	-	-	-	15,14	2.308.994.900	Dinas Kesehatan
1 2 58	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pegawai kesehatan	Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai kesehatan	Persen	N/A	100	71.887.840	-	-	-	-	-	-	-	-	100	71.887.840	Dinas Kesehatan
1 2 45	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	1 Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial 2 Persentase Lingkungan Sosial yang Memenuhi Standar Alat Kesehatan	Persen	N/A	100	3.202.060.370	-	-	-	-	-	-	-	-	100	3.202.060.370	Dinas Kesehatan
1 02 26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Unit Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang memenuhi standar pelayanan	Persen	N/A	-	-	100	79.417.956.495	-	-	-	-	-	-	100	79.417.956.495	Dinas Kesehatan

VII - 16

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pe-nanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1 02 27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata	3 Persentase sarana prasarana kesehatan dalam kondisi baik	4 Persen	5 N/A	6 -	7 -	8 100	9 1.704.130.465	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 100	17 1.704.130.465	18 Dinas Kesehatan
1 02 36	Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan	1 Cakupan pengembangan Smart City pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	Persen	100	-	-	100	4.304.153.885	-	-	-	-	-	-	100	4.304.153.885	Dinas Kesehatan
		2 Cakupan pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan	Persen	100	-	-	100		-	-	-	-	-	-	100		
1 02 47	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	Persentase kecamatan dengan puskesmas dibandingkan rasio jumlah puskesmas dan jumlah penduduk sesuai WHO (1:30.000 penduduk)	Persen	N/A	-	-	100	11.683.297.818	-	-	-	-	-	-	100	11.683.297.818	Dinas Kesehatan
1 02 51	Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	1 Persentase masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	Persen	100	-	-	100	231.541.924.070	-	-	-	-	-	-	100	231.541.924.070	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2	Persen	100	-	-	100		-	-	-	-	-	-	100		
		2	Persen	100	-	-	100	16.454.568.740	-	-	-	-	-	-	100	16.454.568.740	
1	02	55	Persen	100	-	-	100	16.454.568.740	-	-	-	-	-	-	100	16.454.568.740	Dinas Kesehatan
1	02	56	Persen	NA	-	-	1,6	3.941.405.492	-	-	-	-	-	-	1,6	3.941.405.492	Dinas Kesehatan
1	02	58	Persen	100	-	-	100	8.395.984.424	-	-	-	-	-	-	100	8.395.984.424	Dinas Kesehatan
1	02	59	Persen	N/A	-	-	77,40	9.050.441.570	-	-	-	-	-	-	77,40	9.050.441.570	Dinas Kesehatan
1	02	60	Persen	N/A	-	-	100	2.250.312.705	-	-	-	-	-	-	100	2.250.312.705	Dinas Kesehatan
1	02	61	Persen		-	-	74,71	243.285.566.587	-	-	-	-	-	-	74,71	243.285.566.587	Dinas Kesehatan
1	02	62	Persen	N/A	-	-	100	55.247.556.018	-	-	-	-	-	-	100	55.247.556.018	Dinas Kesehatan

VII - 18

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (Non Akumulasi)	Persen	100	100	-	100	-	100	790.012.273.117	100	889.805.673.898	100	892.106.067.926	100	2.571.924.014.941	Dinas Kesehatan
1 02 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persen	NA	NA	-	52,20	-	63,60	496.547.365.776	67,60	217.436.858.923	73,20	218.365.314.311	73,20	932.349.539.010	Dinas Kesehatan
		2 Cakupan Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi	Persen	NA	NA		23,72		23,72		30,47		33,13		33,13		
		3 Jumlah Relokasi Puskesmas	Unit	NA	NA		0		1,00		5,00		4,00		4,00		
		4 Cakupan Masyarakat yang Memiliki Jaminan Pelayanan Kesehatan	Persen	NA	NA		95,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		5 Capaian SPM Bidang kesehatan	Persen	NA	NA		89,03		88,97		89,99		90,92		90,92		
		6 Cakupan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat	Persen	NA	NA		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		7 Cakupan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Persen	NA	NA		16,81		16,81		37,61		58,40		58,40		
		8 Cakupan Masyarakat Miskin yang Terlayani Kesehatannya	Persen	NA	NA		100		100		100		100		100		
1 02 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan sumber daya manusia kesehatan yang terstandarisasi	Persen	NA	-		35,79		33,95	1.126.703.000	40,74	7.453.891.312	48,01	7.485.719.428	48,01	16.066.313.740	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pengananggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1 02	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	3	Persen	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	3	Persen	NA	-	-	30,75	-	37,21	639.701.000	40,34	102.250.265	42,02	102.686.874	42,02	844.638.139	Dinas Kesehatan
1 02	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3	Persen	NA	NA	-	23,17	-	53,64	2.477.578.000	58,29	358.351.543	64,90	359.881.704	64,90	3.195.811.247	Dinas Kesehatan
1 03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
1 3 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persen	100	98,89	8.591.688.072	-	-	-	-	-	-	-	-	98,89	8.591.688.072	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persen	100	99,2	7.582.485.193	-	-	-	-	-	-	-	-	99,2	7.582.485.193	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persen	100	100	1.181.719.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.181.719.000	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum		Persen	78	99,46	137.345.049.598	-	-	-	-	-	-	-	-	99,46	137.345.049.598	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 43	Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum		Persen	100	100	6.047.029.389	-	-	-	-	-	-	-	-	100	6.047.029.389	Dinas Pekerjaan Umum
1.547.673.996.018																	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pe-nanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1 3 44	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	3 Persentase Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum terbangun	4 Persen	5 100	6 88,00	7 81.723.117.817	8 -	9 -	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 88,00	17 81.723.117.817	18 Dinas Pekerjaan Umum
1 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	4 Persen	5 100	6 0	7 -	8 93,85	9 7.747.074.893	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 93,85	17 7.747.074.893	Dinas Pekerjaan Umum
1 03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3 Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	4 Persen	5 100	6 0	7 -	8 86,47	9 5.712.373.625	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 86,47	17 5.712.373.625	Dinas Pekerjaan Umum
1 03 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3 Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	4 Persen	5 100	6 0	7 -	8 118,8	9 68.200.000	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 118,8	17 68.200.000	Dinas Pekerjaan Umum
1 03 44	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebina-margaan	1 Jumlah simpang tak sebidang yang terbangun (fly over / under pass)	4 Buah	5 3	6 0	7 -	8 2	9 91.208.302.338	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 5	17 91.208.302.338	Dinas Pekerjaan Umum
		2 Panjang drainase jalan dalam kondisi baik	m	602402	1032		1329,5		-		-		-		604763,5		
		3 Luas trotoar dalam kondisi baik	m2	397535	9817		2792,63		-		-		-		410144,63		
		4 Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	Persen	92			91,87		-		-		-		183,87		
1 03 48	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	3 Jumlah PJU dalam kondisi baik	Titik	44000	1613		1177	16.548.187.591	-	-	-	-	-	-	46790	16.548.187.591	Dinas Pekerjaan Umum

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pe-nanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1 03 49	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	3 Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	4 Menit	5 120	6 80	7 -	8 60	9 45.616.645.376	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 60	17 45.616.645.376	18 Dinas Pekerjaan Umum
1 03 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	98,89	-	0	-	100,00	61.743.556.703,00	0,00	63.513.796.528,00	0,00	63.785.000.439	100	189.042.353.670	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1 03 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1 Persentase penurunan titik genangan 2 Persentase Kebutuhan Sumur Imbunan 3 Panjang sungai dalam kondisi baik 4 Psersentase Kapasitas Parkir Air (Kolam Retensi)	Persen Persen Km Persen	N/A N/A N/A N/A	N/A N/A N/A N/A	- - - -	67,65 0,73 NA 26,69	- - - -	58,82 1,60 125,00 31,13	59.267.241.080,00 - - -	50,00 2,33 250,00 51,88	59.379.485.485,49 - - -	41,18 3,06 265,05 72,01	59.716.119.163	178.362.845.729	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
1 03 06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persen	N/A	N/A	-	63,02	-	63,85	42.783.389.193,00	64,68	29.926.289.679,00	65,52	30.054.074.936	65,52	102.763.753.808	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1 03 10	Program Penyelenggaraan Jalan	1 Tingkat Kematapan Jalan 2 Luas trotoar dalam kondisi baik	Persen m2	N/A N/A	N/A N/A	- -	91,87 410.145	- -	93,00 420.145	92.818.206.770,00	94,00 435.845	106.286.766.540,00	95,00 451.545	106.913.466.119	95,00 451.545	306.018.439.429	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1 03 10	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLA)	3 Cakupan PJU menyala	4 Persen	5 N/A	6 N/A	7 -	8 90,96	9 -	10 91,00	11 41.156.660.782,00	12 -	13 -	14 -	15 -	16 0	17 41.156.660.782	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (2021) Dinas Perhubungan (2022-2023)
1 3 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	4 Persen	5 100	6 100	7 6.127.692.274	8 100	9 4.345.440.654	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 100	17 10.473.132.928	Dinas Penataan Ruang
1 3 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3 Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	4 Persen	5 100	6 100	7 2.686.528.982	8 100	9 1.854.806.881	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 100	17 4.541.335.863	Dinas Penataan Ruang
1 3 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3 Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	4 Persen	5 100	6 100	7 194.037.250	8 100	9 198.299.200	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 100	17 392.336.450	Dinas Penataan Ruang
1 3 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3 Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	4 Persen	5 100	6 100	7 -	8 100	9 1.400.000	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 100	17 1.400.000	Dinas Penataan Ruang
1 4 19	Program Pengelolaan Areal Pemukiman	3 Persentase Areal Pemukiman ditata	4 Persen	5 N/A	6 31,28	7 11.516.558.560	8 32,14	9 9.960.798.731	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 32,14	17 21.477.357.291	Dinas Penataan Ruang
1 3 33	Program Perencanaan Tata Ruang	3 Jumlah Ketersediaan Dokumen Rencana Rinci Pada Pusat-Pusat Pelayanan Kota	4 Dokumen	5 2	6 2	7 1.577.994.000	8 2	9 1.402.719.500	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 2	17 2.980.713.500	Dinas Penataan Ruang
1 3 40	Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota	3 Persentase pelanggaran tata ruang dan bangunan yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan	4 Persen	5 75	6 77,14	7 853.596.000	8 77,59	9 213.374.275	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 77,59	17 1.066.970.275	Dinas Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD															
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.														
1 3 45	Program Pemanfaatan Ruang Kota	Persentase Bangunan Gedung Umum Yang Memenuhi RTH Privat Sesuai Peraturan Yang Berlaku	Persen	N/A	5	N/A	6	N/A	7	4.125.168.067	8	N/A	9	14.712.652.118	10	-	11	-	12	-	13	14	-	15	-	16	5	17	18.837.820.185	Dinas Penataan Ruang
1 03 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (non akumulasi)	Persen	100	100	100	100	-	50.422.233.976	100	51.164.244.502	100	51.382.715.826	100	152.969.194.305	100	152.969.194.305	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang												
1 04 05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Areal Pemakaman yang Tertata (Non akumulasi)	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	-	7.503.409.781	33,00	7.503.409.781	32,14	7.503.409.781	33,00	7.503.409.781	33,00	7.503.409.781	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang												
1 03 7	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Areal Pemakaman yang Tertata	Persen	N/A	N/A	31,28	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.658.781.326	34	8.621.965.533	35	8.658.781.326	35	17.280.746.859	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang					
1 03 08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Dokumen Penyele-anggaran Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	-	3.680.527.300	100	3.232.477.400	100	3.246.280.078	100	10.159.284.778	100	10.159.284.778	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang												
1 03 09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Wilayah Kota Bandung yang Terdata RTH Privat	Persen	N/A	N/A	5,73	N/A	-	3.316.377.500	18	2.922.255.555	27	2.934.733.586	41	9.173.366.641	41	9.173.366.641	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang												
1 03 11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Kenaikan Tenaga Terampil Jasa Konstruksi yang Kompeten	Persen	80	80	N/A	N/A	-	-	20	281.279.680	52	282.480.744	84	563.760.424	84	563.760.424	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang												

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penerimaan Tugas Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 03 12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Tersusunnya Dokumen RDTR dan Dokumen Perencanaan lainnya 2 Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan yang ditindaklanjuti yang sesuai dengan ketentuan	Do-kumen Persen	N/A 80	N/A N/A	- -	N/A 77	- -	1,00 78	4.572.227.010	1 79	3.624.961.630	1 80	3.640.440.216	3 80	11.837.628.856	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
1 03 03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase cakupan layanan air bersih	Persen	N/A	N/A	-	3,58	-	3,68	22.231.577.880	-	-	-	-	-	22.231.577.880	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah	Persen	N/A	N/A	-	79,10	-	79,37	7.302.933.380	-	-	-	-	79,37	7.302.933.380	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	Persen	9,76	N/A	-	2,94	-	2,80	7.133.516.960	-	-	-	-	2,6	7.133.516.960	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	Persen	9,76	N/A	-	2,94	-	2,80	3.282.286.350	-	-	-	-	2,6	3.282.286.350	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	Persen	9,76	N/A	-	2,94	-	2,80	11.749.297.001	-	-	-	-	2,6	11.749.297.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 04	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					84.395.987.007		45.717.592.419		290.564.373.514		278.582.115.416		279.771.661.049		979.031.729.405	
1 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	6.994.377.805	100	5.445.532.767	-	-	-	-	-	-	100	12.439.910.572	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertambangan
1 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Persen	100	100	6.900.303.767	100	4.448.810.249	-	-	-	-	-	-	100	11.349.114.016	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertambangan
1 04 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 2 Tingkat disiplin aparatur	Persen	100	100	124.023.900	-	107.217.000	-	-	-	-	-	-	100	231.240.900	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertambangan
1 04 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana pembinaan kinerja pegawai	Persen	100	-	-	100	162.277.500	-	-	-	-	-	-	100	162.277.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertambangan

VII - 26

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1 04 08	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	3 Persentase layanan data dan informasi	4 Persen	5 100	6 100	7 47.998.500	8 -	9 -	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 100	17 47.998.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertambangan
1 04 15	Program Pengembangan Perumahan	3 Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MKBR) menempati hunian yang layak	4 Persen	5 64,23	6 68,63	7 46.593.250	8 80,73	9 3.657.455.000	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 68,63	17 3.704.048.250	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertambangan
1 04 20	Program Penataan Kawasan Permukiman	3 Persentase luasan kawasan permukiman kumuh	4 Persen	5 9,76	6 4,28	7 24.444.433.947	8 2,94	9 10.692.139.492	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 2,16	17 35.136.573.439	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertambangan
1 04 25	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	3 Persentase luasan kawasan permukiman kumuh	4 Persen	5 9,76	6 4,28	7 2.738.367.289	8 -	9 -	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 2,16	17 2.738.367.289	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertambangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD														
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.													
1 04 26	Program Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas	1 Persentase PSU milik Pemerintah Kota Bandung dalam kondisi Baik 2 Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	100	6	100	7	6.949.865.370	8	100	9	6.742.296.257	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-	16	100	17	13.692.161.627	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertambangan
1 04 27	Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MKBR) menempati hunian yang layak	Persen	64,23	6	68,63	36.150.023.179	8	80,73	9	14.461.864.154	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-	16	83,01	17	50.611.887.333	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertambangan	
1 04 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Urusan Administrasi Perkantoran	Persen	100	6	100	-	7	-	8	100	9	-	10	48.457.156.542	11	100	12	100	13	49.881.785.681	14	100	15	100	16	148.433.723.129	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertambangan	
1 04 02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MKBR) menempati hunian yang layak	Persen	64,23	6	N/A	-	7	-	8	80,73	9	-	10	104.600.864.590	11	80,93	12	82,02	13	64.389.922.000	14	83,01	15	83,01	16	233.655.653.557	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertambangan	
1 04 03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Bangunan Gedung	Persen	N/A	6	N/A	-	7	-	8	80,73	9	-	10	10.852.663.750	11	7,65	12	4,59	13	67.930.316.765	14	2,75	15	2,75	16	147.003.359.733	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2	Persen	N/A	N/A	N/A	30,56	18,34	11,00	6,60	11,00	6,60	6,60	6,60	6,60		
		3	Persen	N/A	N/A	N/A	55,56	33,33	20,00	12,00	20,00	12,00	12,00	12,00	12,00		
		4	Persen	N/A	N/A	N/A	3,58	3,68	3,78	3,88	3,78	3,88	3,88	3,88	3,88		
		5	Persen	N/A	N/A	N/A	10,24	6,15	3,69	2,21	3,69	2,21	2,21	2,21	2,21		
		6	Persen	N/A	N/A	N/A	62,68	37,61	22,56	13,54	22,56	13,54	13,54	13,54	13,54		
		7	Persen	N/A	N/A	N/A	79,1	79,37	79,73	80,09	79,73	80,09	80,09	80,09	80,09		
		8	Persen	N/A	N/A	N/A	37,26	22,35	13,41	8,05	13,41	8,05	8,05	8,05	8,05		
		9	Persen	N/A	N/A	N/A	52,71	31,62	18,97	11,38	31,62	18,97	11,38	11,38	11,38		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1 Persentase Luasan Kawasan Kumuh	Persen	N/A	N/A		2,94		2,80		-		-		-		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2 Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Menempati Hunian yang Layak Diluar Kawasan Kumuh	Persen	N/A	N/A		-		-		81,24		81,95		81,95		
1 04	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1 Persentase luasan RTH dari serah terima PSU perumahan	Persen	N/A	N/A		6,52		6,53	126.653.688.632	6,55	96.380.090.970	6,57	96.791.633.958	6,57	319.825.413.560	
		2 Persentase luasan RTH Publik Taman, median, jalur hijau jalan, dan hutan kota terpelihara	Persen	N/A	N/A		25,1		25,54		25,78		26,02		26,02		
1 05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
1 5 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	58.507.005.361		44.054.466.970	-	128.335.457.790	-	125.237.152.659	-	125.771.915.301	-	481.905.998.081	Satuan Polisi Pamong Praja
							100	2.881.347.596	-	-	-	-	-	-	100	6.402.325.513	
1 5 2	Program Peningkatan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Persen	75	75	4.086.705.323	75	3.060.736.732	-	-	-	-	-	-	75	7.147.442.055	Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	Persen	90	92,80	610.533.550	91,64	863.956.630	-	-	-	-	-	-	91,64	1.474.490.180	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	5	8	Persen	N/A	80	145.843.500	82	109.068.000	-	-	-	-	-	-	82	254.911.500	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	26	Persen	N/A	100	501.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	501.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	15	Persen	63,76	67,04	2.740.007.800	-	-	-	-	-	-	-	-	67,04	2.740.007.800	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	32	Persen	N/A	104,97	1.876.599.700	76,77	4.001.744.861	-	-	-	-	-	-	76,77	5.878.344.561	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	33	Persen	N/A	100,27	10.139.663.900	-	-	-	-	-	-	-	-	100,27	10.139.663.900	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	34	Persen	100	100	1.779.201.244	-	716.028.008	-	-	-	-	-	-	100	2.495.229.252	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	35	Persen	N/A	-	-	67,99	2.345.296.420	-	-	-	-	-	-	67,99	2.345.296.420	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 5 36	Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	-	-	105	11.541.998.800	-	-	-	-	-	-	105	11.541.998.800	Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	-	100	-	100	56.936.109.477	100	59.263.757.522	100	59.516.813.767	100	175.716.680.766	Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Pertahun 2 Persentase Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Aktif	Persen	N/A	N/A	-	N/A	-	6	21.550.556.430	5	15.362.964.231	4	15.428.564.088	4	52.342.084.749	Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	4.902.500.805	100	2.800.214.610	-	-	-	-	-	-	100	7.702.715.415	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
1 5 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Persen	100	100	430.001.440	100	79.907.960	-	-	-	-	-	-	100	509.909.400	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
1 5 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	Persen	100	100	914.984.040	100	315.845.200	-	-	-	-	-	-	100	1.230.829.240	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
1 5 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	100	30.800.000	100	11.700.000	-	-	-	-	-	-	100	42.500.000	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1 5 8	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	3 Persentase layanan data dan informasi	4 Persen	5 100	6 100	7 302.100.616	8 100	9 55.181.045	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 100	17 357.281.661	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
1 5 27	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana	3 Presentase kelurahan siaga aktif kebakaran dan bencana	4 Persen	5 0	6 9,93	7 1.191.738.100	8 13,25	9 365.072.540	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 13,25	17 1.556.810.640	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
1 5 28	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	3 Tingkat waktu maksimum tanggap (response time rate)	4 menit	5 15	6 14,17	7 10.331.757.400	8 14,22	9 11.197.439.500	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 14,22	17 21.529.196.900	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
1 5 29	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Darurat Bencana	3 Rata-rata tingkat waktu maksimum assesment tanggap darurat bencana	4 jam	5 N/A	6 24	7 853.187.200	8 24	9 340.906.120	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 24	17 1.194.093.320	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
1 5 30	Program Peningkatan sarana dan prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana	3 Persentase tersedianya sarana pengamanan kebakaran di kelurahan	4 Persen	5 N/A	6 100	7 13.568.517.759	8 100	9 3.127.063.094	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 100	17 16.695.580.853	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
1 5 31	Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pelayanan, Pencegahan, serta Penanganan Kebakaran dan Bencana	3 Response Time Rate ≤ 15 menit	4 menit	5 15	6 14,17	7 580.885.067	8 14,22	9 240.959.854	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 14,22	17 821.844.921	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1 05 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3 Persentase pelayanan administrasi perkantoran	4 Persen	5 100	6 100	7 -	8 100	9 -	10 100	11 28.908.642.900	12 100	13 30.276.728.116	14 100	15 30.406.009.745	16 100	17 89.591.380.761	18 Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
1 05 03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana Pratama	Persen	N/A	N/A	-	N/A	-	19,87	1.667.153.033	59,6	865.362.640	100	869.057.738	100	3.401.573.411	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
1 05 04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Persentase Kelurahan Siaga Kebakaran	Persen	N/A	N/A	-	24,5	-	44,37	19.272.995.950	70,2	19.468.340.150	100	19.551.469.962	100	58.292.806.062	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
		2 Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	N/A	N/A	-	99,49	-	100		100				100		
		3 Persentase sarana prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana kondisi baik	Persen	N/A	N/A	-	80,67	-	81,41		81,83				82,11		
		4 Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Persen	N/A	N/A	-	41,89	-	25,14		15,08				9,05		
		5 Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Persen	N/A	N/A	-	77,87	-	46,72		28,03				16,82		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 06	SOSIAL																
1 6 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	-	17.186.819.910	100	24.095.255.791 8.951.798.429	-	43.816.765.026	-	37.468.328.212	-	37.628.317.973	100	160.195.486.912	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
1 6 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Persen	100	-	-	100	617.050.850	-	-	-	-	-	-	100	617.050.850	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
1 6 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	Persen	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
1 6 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
1 6 24	Program Perlindungan Sosial Bencana	1 Cakupan korban bencana yang terlayani tepat waktu 2 Prosentase korban bencana yang memperoleh bantuan tanggap darurat tepat waktu	Persen	100	100	1.385.516.750	-	1.651.068.285	-	-	-	-	-	-	100	3.036.585.035	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
1 6 25	Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang meningkat pendapatannya	Orang	N/A	347	1.075.920.250	-	-	-	-	-	-	-	-	347	1.075.920.250	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
1 6 26	Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan	Cakupan warga miskin yang memperoleh akses terhadap program pemerintah	Persen	100	100	629.410.050	100	4.480.520.200	-	-	-	-	-	-	100	5.109.930.250	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	27	Persen	100	100	935.502.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	935.502.000	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
1	6	28	KK	62000	90.584	1.959.535.785	137.607	2.241.780.387	-	-	-	-	-	-	90.584	4.201.316.172	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
1	6	29	Persen	100	100	7.371.541.475	100	5.886.727.140	-	-	-	-	-	-	100	13.258.268.615	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
1	6	30	Persen	100	100	843.056.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	843.056.000	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
1	6	31	Persen	100	100	1.749.197.750	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.749.197.750	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
1	6	32	Persen	72	80,77	1.237.139.850	-	266.310.500	-	-	-	-	-	-	80,77	1.503.450.350	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
		1	Persen	N/A	-		85		-	-	-	-	-	-	85		
		2	Persen		-												

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	06	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	06	Program Penanganan Bencana	Persen	N/A	N/A	-	100	-	100	2.238.069.000	100	1.714.460.400,00	100	1.721.781.146	100	5.674.310.546	Dinas Sosial
1	06	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Unit	N/A	N/A	-	N/A	-	2	-	-	-	-	-	2	-	Dinas Sosial
2		URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				586.631.080.783		325.630.738.647		898.264.264.611		937.005.974.243		940.751.051.393		3.673.398.773.195	
2	07	TENAGA KERJA				27.244.985.848		12.405.147.515		33.133.602.413		28.641.173.710		28.763.471.521		130.188.381.007	
2	1	1	Persen	100	83,14	2.817.530.752	74,91	1.845.776.253	-	-	-	-	-	-	83,14	4.663.307.005	Dinas Tenaga Kerja
2	1	2	Persen	100	78,95	13.020.234.584	83,39	713.668.492	-	-	-	-	-	-	45,55	13.733.903.076	Dinas Tenaga Kerja
2	1	3	Persen	100	84,53	106.932.100	-	-	-	-	-	-	-	-	84,53	106.932.100	Dinas Tenaga Kerja
2	1	15	Orang	180	200	1.848.483.075	626	4.769.544.080	-	-	-	-	-	-	200	6.618.027.155	Dinas Tenaga Kerja
2	1	16	Persen	43,3	45,54	4.053.247.003	58,44	2.198.065.975	-	-	-	-	-	-	45,55	6.251.312.978	Dinas Tenaga Kerja
			Orang	700	880	2.656.026.803	540	1.668.520.175	-	-	-	-	-	-	880	4.324.546.978	Dinas Tenaga Kerja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	1	17	Persen	58	58,46	2.383.320.331	62,28	1.209.572.540	-	-	-	-	-	-	58,46	3.592.892.871	Dinas Tenaga Kerja
2	01	1	Orang	300	300	359.211.200	-	-	-	-	-	-	-	-	300	359.211.200	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	Persen	100	100	-	100	-	100	24.322.343.708	100	17.812.495.353	100	17.888.554.708	100	60.023.393.769	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	02	Dokumen	N/A	N/A	-	N/A	-	2	127.340.000	2	-	2	-	2	127.340.000	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	03	Persen	N/A	N/A	-	N/A	-	60	4.188.323.405	60	5.411.912.357	60	5.435.021.222	60	15.035.256.984	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	04	Persen	N/A	N/A	-	N/A	-	60	2.091.500.000	60	-	60	-	60	2.091.500.000	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	04	Persen	N/A	N/A	-	58,44	-	45,65	1.010.187.075	40,00	4.750.316.000	40,00	4.770.599.849	40,00	10.531.102.924	Dinas Ketenagakerjaan
			Orang	N/A	N/A	-	5.556	-	10.100	-	10.300	-	10.500	-	10.500	-	
			Orang	N/A	N/A	-	600	-	600	-	700	-	800	-	800	-	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2 07	Program Hubungan Industrial	1 Cakupan kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama 2 Cakupan Pekerja/Buruh yang menjadi peserta jamsostek aktif	Persen	N/A	N/A	-	62,28	-	50	1.393.908.225	50	666.450.000	50	669.295.742	50	2.729.653.967	Dinas Ketenagakerjaan
2 08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					8.770.139.816		5.991.063.069		22.881.358.742		22.092.646.333		22.186.981.933		81.922.189.894	
2 2 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	3.808.691.362	100	4.460.436.419	-	-	-	-	-	-	100	8.269.127.781	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2 2 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Persen	100	100	830.724.367	100	98.934.000	-	-	-	-	-	-	100	929.658.367	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	2	3	Persen	100	100	34.386.000	100	37.290.000	-	-	-	-	-	-	100	71.676.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	2	5	Persen	100	100	90.651.000	100	93.375.000	-	-	-	-	-	-	100	184.026.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	2	19	Persen	47,68	59,6	1.521.570.787	68,87	524.063.250	-	-	-	-	-	-	59,6	2.045.634.037	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	2	20	Persen	N/A	16,95	1.759.174.550	30,50	183.924.300	-	-	-	-	-	-	16,95	1.943.098.850	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penerimaan Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Perindungan dan penangan Perempuan dan anak Korban kekerasan	Persentase Penanganan Perempuan dan Anak korban kekerasan	Persen	100	100	724.941.750	100,00	593.040.100	-	-	-	-	-	-	100	1.317.981.850	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	08	01	Persen	100	100	-	100	-	17.517.989.762	100,00	100,00	15.477.789.214	100,00	15.543.879.374	100	48.539.658.350	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
2	08	02	Persen	N/A	16,95	-	30,50	-	844.948.250	47,45	47,45	1.697.653.587	55,93	1.704.902.567	55,93	4.247.504.404	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
2	08	03	Persen	N/A	-	-	N/A	-	1.687.011.230	3,31	23,18	1.249.033.647	46,36	1.254.367.021	46,36	4.190.411.898	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
2	08	04	Persen	N/A	-	-	N/A	-	1.389.633.750	50,00	60,00	1.625.752.914	70,00	1.632.694.879	70,00	4.648.081.543	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
2	08	05	Persen	N/A	-	-	N/A	-	183.947.750	5,00	10,47	499.309.779	15,70	501.441.831	15,70	1.184.699.360	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

VII - 42

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2 08 06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kriteria Pemenuhan Hak Anak	Persen	N/A	-	-	68,87	-	79,47	756.078.000	90,62	998.619.757	100,00	1.002.883.863	100	2.757.581.620	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
2 08 07	Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio Kekerasan terhadap Anak	Rasio	N/A	-	-	0.021	-	0,019	501.750.000	0,017	544.487.436	0,015	546.812.398	0,015	1.593.049.834	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penerima Anggaran Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2 09	PANGAN					26.897.024.797		10.653.967.963		41.482.898.822		42.136.239.698		42.316.161.442		163.486.292.722	
2 3 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	3.662.816.965	100	3.001.118.519	-	-	-	-	-	-	100	6.663.935.484	Dinas Pangan dan Pertanian
2 3 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Persen	100	100	15.850.845.621	100	3.580.444.114	-	-	-	-	-	-	100	19.431.289.735	Dinas Pangan dan Pertanian
2 3 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	Persen	100	100	103.785.000	100	56.045.000	-	-	-	-	-	-	100	159.830.000	Dinas Pangan dan Pertanian
2 3 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidang	Persen	75	75	120.382.500	76	137.200.000	-	-	-	-	-	-	76	257.582.500	Dinas Pangan dan Pertanian
2 3 15	Program Ketahanan Pangan	1 Skor Pola Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	84,25	85,08	2.069.213.378	90,5	1.337.061.580	-	-	-	-	-	-	90,5	3.406.274.958	Dinas Pangan dan Pertanian
		2 Jumlah cadangan pangan ekuivalen beras	Ton	60	103,045		122,27		-	-	-	-	-	-	122,27	-	
2 3 19	Program Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang aman dikonsumsi	Persen	91	99,77	2.701.339.350	99,93	1.597.913.650	-	-	-	-	-	-	99,93	4.299.253.000	Dinas Pangan dan Pertanian
2 3 20	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	Jumlah kelompok masyarakat di bidang pangan, pertanian dan perikanan diberkdayakan	Kelompok	45	47	1.920.677.903	48	944.185.100	-	-	-	-	-	-	48	2.864.863.003	Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penerima Anggaran
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	3	21	Persen	100	100	467.964.080	-	-	-	-	-	-	-	-	100	467.964.080	Dinas Pangan dan Pertanian
2	09	01	Persen	100	100	-	100	-	100	34.972.046.052	100	34.114.330.258	100	34.259.998.448	100	103.346.374.757	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	03	kkal/kap/hari	N/A	-	-	2148,30	-	2100	5.862.728.270	2100	7.371.361.986	2100	7.402.837.701	2100	20.636.927.957	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			gr/kap/hari	N/A	-	-	66,70	-	57	-	57	-	57	-	57	-	
			Persen	N/A	-	-	0,98	-	1,31	-	1,63	-	1,96	-	1,96	-	
2	09	04	Persen	N/A	-	-	N/A	-	100,00	166.622.500	100,00	169.709.935	100,00	170.434.597	100,00	506.767.032	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	05	Persen	N/A	-	-	99,93	-	99,10	481.502.000	99,20	480.837.520	99,30	482.890.696	99,30	1.445.230.216	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2 10	PERTANAHAN																
2 04 16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase luasan RTH	Persen	12,20	12,22	82.571.148.287	12,25	62.044.592.082	-	4.952.453.140	-	4.813.338.001	-	4.833.890.954	12,31	159.215.422.464	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,
2 05 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH yang berkualitas	Persen	44,73	47,33	24.839.099.217	50,34	36.145.412.132	-	-	-	-	-	-	50,34	60.984.511.349	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Per-tamanan
2 10 04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase masalah pertanahan ditindaklanjuti	Persen	N/A	-	-	100	-	100,00	1.496.700.000	100,00	2.817.429.407	100,00	2.829.459.831	100,00	7.143.589.239	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2 10 09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase pelayanan pemanfaatan tanah sesuai prosedur	Persen	N/A	-	-	100	-	100,00	3.455.753.140	100,00	1.995.908.593	100,00	2.004.431.123	100,00	7.456.092.856	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2 11	LINGKUNGAN HIDUP																
2 5 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	88.345.682.044	100,00	68.907.255.269	-	268.575.119.955	-	350.178.363.375	-	351.673.624.986	100,00	1.127.680.045.629	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 5 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Persen	100,00	100,00	827.740.889	100,00	3.198.494.733	-	-	-	-	-	-	100,00	4.026.235.622	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 5 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai 2 Tingkat disiplin aparatur	Persen	100,00	100,00	48.514.400	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	48.514.400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Persen	100	-	-	100,00	38.500.000	-	-	-	-	-	-	-	38.500.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penerima Anggaran
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	188.117.000	100,00	70.400.000	-	-	-	-	-	-	100,00	258.517.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	5	Program pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	48.054.000	100,00	157.990.000	-	-	-	-	-	-	100,00	206.044.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	tonase	103.601	85.110	72.841.733.386	95.640,95	58.269.847.197	-	-	-	-	-	-	85.110	131.111.580.583	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	5	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persen	8,80	17,61	3.671.786.750	28,99	1.629.963.065	-	-	-	-	-	-	28,99	5.301.749.815	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	5	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persen	0,00	0,00	433.462.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	433.462.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	5	Program Pembinaan Lingkungan Hidup	Persen	100,00	100,00	2.889.171.200	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	2.889.171.200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Persen	12,50	40,34		-		-		-		-		40,34	-	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	5	28	Persen	30,00	30,00	1.430.132.036	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	1.430.132.036	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		1															
		2		70,00	89,84		-	-	-	-	-	-	-	-	89,84		
2	5	29	Persen	0,00	1,50	589.778.400	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	589.778.400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	5	30	Poin	20,0	49,70	792.478.420	-	-	-	-	-	-	-	-	49,70	792.478.420	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	5	31	Poin	58,61	69,79	923.752.003	-	-	-	-	-	-	-	-	69,79	923.752.003	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	5	32	Persen	0,00	0,10	635.015.183	0,001	190.588.920	-	-	-	-	-	-	0,001	825.604.103	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	05	33	Persen	33,38	-	-	33,43	713.586.500	-	-	-	-	-	-	33,43	713.586.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Peningkat nanggung jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2 05 34	Program Pencegahan dampak lingkungan	Cakupan pencegahan dampak lingkungan kebijakan dan usaha/ kegiatan	Persen	100	-	-	100,00	750.334.480	-	-	-	-	-	-	100,00	750.334.480	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 05 36	Program Pengendalian Pencemaran dan Rehabilitasi Kerusakan Air	Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemerlang"	Persen	39,13	-	-	78,13	292.372.100	-	-	-	-	-	-	78,13	292.372.100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 05 37	Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim	Indeks SO2	Poin	1,17	-	-	0,91	410.406.983	-	-	-	-	-	-	0,91	410.406.983	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	-	100,00	-	100	21.500.953.712	100	23.509.216.932	100	23.609.601.288	100	68.619.771.933	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen kebijakan lingkungan	Dokumen	N/A	N/A	-	2	-	2	1.064.911.880	2	1.437.491.919	2	1.443.630.010	2	3.946.033.809	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Indeks SO2 2 Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemerlang"	Poin	1,17	-	-	0,74	-	0,72	1.738.020.980	0,7	3.003.058.260	0,68	3.015.881.319	0,68	7.756.960.560	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 04	Program Pengelolaan Keaneke-ragaman Hayati (Kehati)	Cakupan kawasan konservasi terpelihara	Persen	8,80	-	-	N/A	-	100,00	1.281.669.070	100,00	5.314.175.608	100,00	5.336.867.137	100,00	11.932.711.815	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	11	05	Persen	0,00	-	-	17,45	-	17,45	293.008.520	17,95	299.076.381	18,45	300.353.437	18,45	892.438.339	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	06	Persen	N/A	N/A	-	19,94	-	20,94	1.281.259.960	21,94	1.499.296.856	22,94	1.505.698.853	22,94	4.286.255.669	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	08	Persen	10,00	-	-	N/A	-	-	-	44,00	499.297.096	100,00	501.429.095	100,00	1.000.726.191	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	09	Jenis	0,00	-	-	N/A	-	5	877.041.000	5	1.996.427.636	5	2.004.952.382	5	4.878.421.018	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	10	Persen	N/A	N/A	-	100,00	-	100	564.252.000	100	798.887.866	100	802.299.118	100	2.165.438.984	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023			
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	1	1	Ton	N/A	N/A	-	488661,35	-	447.090	239.974.002.833	446.642	311.821.434.820	464.150	313.152.912.347	464.150	864.948.350.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	2	2	Ton	N/A	N/A	-	95.641	-	148.023	-	159.734	-	174.056	-	174.056	-	-
		3	Persen	N/A	N/A	-	26,77	-	16,06	-	9,64	-	5,78	-	5,78	-	-
		4	Persen	N/A	N/A	-	12,35	-	7,41	-	4,45	-	2,67	-	2,67	-	-
2	12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				18.999.338.835		15.542.640.563		30.925.639.560		27.849.509.332		27.968.426.737		121.285.555.028	
2	6	1	Persen	100	100	9.322.706.024	100	6.905.493.461	-	-	-	-	-	-	100	16.228.199.485	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	6	2	Persen	100	100	1.370.535.010	100	-	-	-	-	-	-	-	100	1.370.535.010	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	Persen	-	-	-	-	856.493.674	-	-	-	-	-	-	-	856.493.674	-

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	6	3	Persen	100	58.080.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	58.080.000	Dinas Keper- dudukan dan Pencatatan Sipil
2	6	2	Persen	-	-	100	50.160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.160.000	
2	6	1	Persen	100	235.048.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	235.048.000	Dinas Keper- dudukan dan Pencatatan Sipil
2	6	2	Persen	-	-	100	11.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	11.600.000	
2	6	1	Persen	98,07	6.898.710.426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,07	6.898.710.426	Dinas Keper- dudukan dan Pencatatan Sipil
2	6	2	Persen	100	122.025.500	-	7.058.075.585	-	-	-	-	-	-	-	100	7.180.101.085	Dinas Keper- dudukan dan Pencatatan Sipil
2	6	1	Persen	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	
2	6	2	Persen	92,34	836.391.375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,34	836.391.375	Dinas Keper- dudukan dan Pencatatan Sipil
2	6	1	Persen	98,62	155.842.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,62	155.842.500	Dinas Keper- dudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penerima Anggaran
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2 06 22	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	-	-	-	97,08	660.817.843	-	-	-	-	-	-	97,08	660.817.843	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (non akumulasi)	Persen	100	100	-	100	-	100	28.751.720.560	100	25.073.440.458	100	25.180.504.049	100	79.005.665.067	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 02	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Layanan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Persen	N/A	-	-	99,81	-	98,50	64.218.000	99,00	175.435.741	99,00	176.184.852	99,00	415.838.593	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 03	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Layanan Administrasi Pencatatan Sipil	Persen	N/A	-	-	94,35	-	92,50	68.805.000	93,00	264.314.677	94,00	265.443.301	94,00	598.562.978	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Cakupan perangkat daerah yang melakukan kerja sama aktif 2 Maksimum deviasi data	Persen	N/A	-	-	60,00	-	65,00	2.040.896.000	70	2.336.318.455	75	2.346.294.535	75	6.723.508.991	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13	PEMBER-DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							1.433.658.500		1.504.707.500		-		-		8.678.929.851	
2 2 23	Peningkatan Pelayanan Bagi Lansia	Persentase Lansia mendapat layanan	Persen	18,75	18,75	1.370.485.310	-	-	-	-	-	-	-	-	18,75	1.370.485.310	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	24	Persentase Keluruhan Klasifikasi Swasembada	Persen	24,5	41,72	1.249.282.837	56,29	281.820.000	-	-	-	-	-	-	16	1.531.102.837	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Per- lindungan Anak, dan Pember- dayaan Masyarakat
2	25	1 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persen	18	20	3.120.795.704	-	737.111.500	-	-	-	-	-	-	20	3.857.907.204	Dinas Pember- dayaan Perempuan, Per- lindungan Anak, dan Pember- dayaan Masyarakat
		2 Laporan partisipasi swadaya masyarakat	Lembaga	-	30		-		-		-		-		30		
		3 Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, melalui swadaya murni masyarakat	Persen	-	-		22		-		-		-				
2	07	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Pemenuhan Hak Lanjut Usia	Persen	-	-	-	25	414.727.000	-	-	-	-	-	-	25	414.727.000	Dinas Pember- dayaan Perempuan, Per- lindungan Anak, dan Pember- dayaan Masyarakat
2	13	05 Program Pem- berdayaan Lembaga Kemasya- rakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persen	-	-	0	-	0	73,51	1.504.707.500	77,69	-	81,08	-	81,08	1.504.707.500	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penerima Anggaran
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
2	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	3.748.377.774	100	1.840.876.555	-	-	-	19.221.597.494	-	19.303.673.715	100	5.589.254.329	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	912.375.650	100	701.371.970	-	-	-	-	-	-	100	1.613.747.620	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100	100	127.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	127.480.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	100	136.450.000	100	115.660.900	-	-	-	-	-	-	100	252.110.900	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persen	100	100	130.052.967	100	48.051.680	-	-	-	-	-	-	100	178.104.647	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	Program Keluarga Berencana	Persen	N/A	75,28	3.350.140.800	76,24	3.752.590.530	-	-	-	-	-	-	75,28	7.102.731.330	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penganggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1 8 29	Program Ketahanan Keluarga	3 Persentase Kelompok Tribina Aktif	4 Persen	5 N/A	6 71,07	7 787.699.000	8 74,73	9 448.384.704	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 71,07	17 1.236.083.704	18 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 8 27	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Data dan informasi kependudukan yang akurat dan tepat waktu	Persen	100	100	505.392.800	100	25.874.000	100	-	100	-	100	-	100	531.266.800	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 8 28	Program Promosi Keluarga Berencana	1 Jumlah Peserta KB Baru	Pesangan Akseptor	200	3.062	783.682.980	-	2.326.421.340	-	-	-	-	-	-	3.062	3.110.104.320	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2 Jumlah Kampung KB Aktif	kampung	15	20		31		-	-	-	-	-	-	20		
2 14 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	-	-	-	100	12.966.346.794	100	13.523.473.611	100	13.581.218.843	100	40.071.039.248	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1 Angka Pemakaian Kontrasepsi/mCPR	Persen	N/A	75,28	-	76,24	-	76,27	10.382.118.001	76,92	3.382.556.347	77,57	3.396.999.862	77,57	17.161.674.210	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2 Cakupan Kebutuhan KB yang Belum Terpenuhi (Unmeet Need)	Persen	N/A	N/A		13,19		13,00		12,00		11,00		11,00		
		3 Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Penyuluhan dan Penggerakan	Persen	N/A	N/A		79,56		80,56		81,56		82,56		82,56		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penerimaan Jawab			
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	Target
1	2	4	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	Persen	N/A	N/A	N/A	89,23	90,23		91,23		92,23		92,23		
		4														
		5	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	-		48,13		48,58		48,58		
2	14	04	Persen	N/A	-	87,69	-	88,69	1.879.756.899	90,00	1.716.443.616	90,69	1.723.772.830	90,69	5.319.973.345	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1														
		2	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	-		53,09		54,07		54,07		
2	14		Persen	N/A	-	24,62	-	24,62	591.936.600	30,77	599.123.920	36,92	601.682.179	36,92	2.324.009.500	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1														
		2	Persen	N/A	N/A	10,91		16,36		23,64		30,91		30,91		
		3	Persen	N/A	N/A	70,00		80,00		90,00		100,00		100,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	15	PERHUBUNGAN															
2	9	1	Persen	100	100	85.982.836.545	74.906.741.164	187.642.842.382	178.850.315.483					179.614.006.330	100	706.996.741.903	Dinas Perhubungan
2	9	2	Persen	100	100	6.561.526.300	6.514.069.808									13.075.596.108	Dinas Perhubungan
2	9	1	Persen	100	100	6.861.429.538	-								100	6.861.429.538	Dinas Perhubungan
2	9	2	Persen	100	-	-	5.639.202.320									5.639.202.320	Dinas Perhubungan
2	9	1	Persen	100	100	837.496.500	-								100	837.496.500	Dinas Perhubungan
2	9	2	Persen	100	-	-	404.151.000									404.151.000	Dinas Perhubungan
2	9	5	Persen	15	8	166.400.000	24.000.000								8	190.400.000	Dinas Perhubungan
2	9	1	Persen	100	100	98.960.375	-								100	98.960.375	Dinas Perhubungan
2	9	2	Persen	100	-	-	0									-	
2	9	1	Persen	100	100	147.543.550	-								100	147.543.550	Dinas Perhubungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	9	17	Persentase penumpang sarana angkutan umum	Persen	19,5	17.870.406.972	18,25	16.002.518.813	-	-	-	-	-	-	20,14	33.872.925.785	Dinas Perhubungan
2	9	18	Persentase sarana prasarana perhubungan yang terbangun	Persen	20	6.753.492.053	43,7	5.490.157.782	-	-	-	-	-	-	20,74	12.243.649.835	Dinas Perhubungan
2	9	19	Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terbangun	Persen	20	8.432.844.008	42,74	5.409.587.206	-	-	-	-	-	-	27,4	13.842.431.214	Dinas Perhubungan
2	9	20	Persentase jumlah kendaraan angkutan umum yg lulus uji KIR	Persen	90	2.253.384.200	-	-	-	-	-	-	-	-	85,57	2.253.384.200	Dinas Perhubungan
2	9	22	Persentase kendaraan umum yang lulus uji	Persen	1	14.288.346.200	-	4.188.627.600	-	-	-	-	-	-	5	4.188.627.600	Dinas Perhubungan
2	9	1	Persentase ketercapaian tertib dan keselamatan lalu lintas	Persen	100	60.830.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	60.830.000	Dinas Perhubungan
2	9	24	Persentase dokumen perencanaan ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan	Persen	100	3.649.712.496	92,44	2.336.231.400	-	-	-	-	-	-	97,44	5.985.943.896	Dinas Perhubungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pe-nanggung jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	9	25	Persen	0,8	1,03	686.301.800	1,29	8.778.663.760	-	-	-	-	-	-	1,03	9.464.965.560	Dinas Per-hubungan
2	9	26	Persen	70	89,09	11.839.885.903	85,33	410.645.600	-	-	-	-	-	-	89,09	12.250.531.503	Dinas Per-hubungan
2	9	1	Persen	100	100	5.474.276.650	100	8.061.908.875	-	-	-	-	-	-	100	13.536.185.525	Dinas Per-hubungan
2	15	01	Persen	100	100	-	100	-	100	94.029.570.772	100	96.372.442.941	100	96.783.953.273	100	287.185.966.986	Dinas Per-hubungan
2	15	02	Persen	N/A	N/A	-	10,81	-	9,57	93.613.271.610	7,33	82.185.905.783	3,85	82.536.839.601	3,85	258.336.016.994	Dinas Per-hubungan
2	15	05	Persen	N/A	N/A	-	12,72	-	11,2	-	7,72	-	4,24	-	4,24	-	Dinas Per-hubungan
2	16	1	Dokumen	N/A	N/A	-	N/A	-	-	-	1	291.966.758	1	293.213.456	2	585.180.214	Dinas Per-hubungan
2	10	1	Persen	100	100	3.832.949.979	100	1.836.276.664	-	-	-	-	-	-	100	5.669.226.643	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	KOMUNIKASI DAN INFORMASI				18.439.047.877		13.416.607.999		42.938.617.037		34.586.857.859		34.586.857.859		143.967.988.631	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penerima Anggaran
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	10	2	Persen	100	100	257.365.100	-	337.656.110	-	-	-	-	-	-	100	595.021.210	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1	Persen	100	100												
		2	Persen	100	-		100								100		
2	10	3	Persen	100	100	105.567.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	105.567.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	10	19	Persen	100	100	10.980.704.988	-	7.941.446.225	-	-	-	-	-	-	100	18.922.151.213	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1	Persen	100	-		100										
		2	Persen	100	-										100		
2	10	21	Persen	100	100	926.582.000	-	671.720.100	-	-	-	-	-	-	100	1.598.302.100	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1	Persen	100	100												
		2	Persen	100	-		100								100		
2	10	23	Persen	60	61,04	1.867.916.420	-	1.241.292.900	-	-	-	-	-	-	61,04	3.109.209.320	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1	Persen	60	61,04												
		2	Persen		-		70,13								70,13		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1 2 10 24	Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 3 Cakupan Persentase dokumen hasil kajian yang digunakan dalam rumusan kebijakan yang di implementasikan	4 Persen	5 50	6 50	7 467.962.390	8 -	9 279.515.000	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 50	17 747.477.390	18 Dinas Komunikasi dan Informatika
		2 Meningkatnya Dokumen Hasil Kajian yang digunakan dalam Rumusan Kebijakan yang Di implementasikan	Persen		-		57,90		-		-		-		57,90		
1 10 24	Program Perlindungan Sosial Bencana	Tersosialisasinya informasi covid melalui media dan Belanja Bandwidth	Bulan		-	-	5	1.053.151.000	-	-	-	-	-	-	5	1.053.151.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 10 08	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Dinas	Persen		-	-	100	55.550.000	-	-	-	-	-	-	100	55.550.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	-	100	-	100	16.402.941.163	100	17.111.696.385	100	17.111.696.385	100	50.626.333.933	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023			
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1	Nilai	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2 16 02		1	Nilai	N/A	-	-	N/A	-	2,00	1.765.514.800	2,10	3.631.114.800	2,20	3.631.114.800	2,20	9.027.744.400	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	Persen	N/A	-	-	100	-	100	-	-	100	-	100	-	100	
		3	Nilai	N/A	-	-	N/A	-	0,4	-	0,5	-	0,6	-	0,6	-	
		4	Nilai	N/A	-	-	82,72	-	82,00	-	85,00	-	88,31	-	88,31	-	
2 16 03	Program Aplikasi Informatika	1	Nilai	N/A	-	-	N/A	-	31,35	24.770.161.074	31,50	13.844.046.674	31,55	13.844.046.674	31,55	52.458.254.422	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	Nilai	N/A	-	-	N/A	-	22,40	-	22,50	-	22,60	-	22,60	-	
		3	Nilai	N/A	-	-	N/A	-	4,50	-	4,60	-	4,70	-	4,70	-	
2 17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																
2 11 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persen	100	100	1.949.205.794	100	1.314.562.124	-	-	-	-	-	-	100	3.263.767.918	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2 11 2			Persen	100	100	764.605.340	100	337.518.265	-	-	-	-	-	-	100	1.102.123.605	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2 17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																
2 11 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persen	100	100	1.949.205.794	100	1.314.562.124	-	-	-	-	-	-	100	3.263.767.918	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2 11 2			Persen	100	100	764.605.340	100	337.518.265	-	-	-	-	-	-	100	1.102.123.605	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Pe- nanggung jawab		
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	11	3	Persen	100	100	23.474.000	-	0	-	-	-	-	-	-	100	23.474.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2	11	5	Persen	75	75	123.461.000	-	0	-	-	-	-	-	-	75	123.461.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2	11	8	Persen	100	100	148.910.000	100	40.200.000	-	-	-	-	-	-	100	189.110.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2	11	16	Persen	60	60	424.330.170	60	441.928.050	-	-	-	-	-	-	60	866.258.220	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2	11	22	Orang	200	365	1.941.313.639	147	361.089.500	-	-	-	-	-	-	147	2.302.403.139	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2	11	23	Koperasi	150	150	1.489.656.000	95	515.802.200	-	-	-	-	-	-	95	2.005.458.200	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2	11	24	Usaha Mikro	240	240	2.567.854.806	200	516.359.684	-	-	-	-	-	-	200	3.084.214.490	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Pe-nanggung jawab		
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2 11 26	Program Pengembangan Usaha Kecil	Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat	Persen	60	60	727.947.930	0	-	-	-	-	-	-	-	60	727.947.930	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2 11 27	Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi	Persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat	Persen	60	60	528.921.850	0	-	-	-	-	-	-	-	60	528.921.850	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2 11 28	Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi berkualitas	Koperasi	30	30	2.673.193.350	11	594.150.000	-	-	-	-	-	-	11	3.267.343.350	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2 11 29	Program Pengembangan Usaha Mikro	Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat	Persen	0	0	-	60	156.127.900	-	-	-	-	-	-	60	156.127.900	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2 17 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	-	100	-	100	14.273.758.495	100	14.096.914.051	100	14.096.914.051	100	42.467.586.597	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Cakupan Fasilitas Ijin Usaha Simpan Pinjam Sesuai Prosedur	Persen	N/A	N/A	-	N/A	-	-	-	100	1.014.985.640	100	1.014.985.640	100	2.029.971.280	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang mematuhi peraturan perundang-undangan	Persen	N/A	N/A	-	N/A	-	14,30	1.331.608.200	15,00	1.442.789.400	15,60	1.442.789.400	15,60	4.217.187.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah KSP/ USP yang dilakukan penilaian kesehatan	Koperasi	N/A	N/A	-	-	-	110	386.709.400	-	-	-	-	-	386.709.400	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Peningkat Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	17	05	Persen	N/A	N/A	-	60	-	60	593.080.450	65	521.910.600	70	521.910.600	70	1.636.901.650	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	06	Persen	N/A	N/A	-	11,11	-	12,29	2.642.174.990	13,47	1.255.988.450	15,13	1.255.988.450	15,13	5.154.151.890	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	07	Persen	N/A	N/A	-	4,05	-	5,06	3.019.043.100	10,12	4.564.978.550	11,14	4.564.978.550	11,14	12.149.000.200	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	08	Persen	N/A	N/A	-	4,05	-	4,22	5.069.867.650	4,39	2.454.301.550	4,64	2.454.301.550	4,64	9.978.470.750	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	18	MODAL				9.017.832.629		13.012.082.938		29.430.202.715		32.048.062.849		32.184.908.077		115.693.089.208	
2	12	1	Persen	100	100	3.224.249.968	100	2.993.677.008	-	-	-	-	-	-	-	6.217.926.976	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	12	2	Persen	100	100	831.647.606	100	2.304.867.008	-	-	-	-	-	-	-	3.136.514.614	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023			
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2 18 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	-	100	-	100	24.464.647.415	100	25.668.336.623	100	25.777.940.420	100	75.910.924.458	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rancangan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal yang Terverifikasi/Tervalidasi	Dokumen	N/A	N/A	-	N/A	-	1	321.750.000	2	513.490.279	3	515.682.882	3	1.350.923.161	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 03	Program Promosi Penanaman Modal	Realisasi Investasi Baru Promosi Penanaman Modal	Triliun Rupiah	N/A	N/A	-	N/A	-	1,5	744.417.300	1,65	1.288.457.058	1,815	1.293.958.770	1,815	3.326.833.128	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04	Program Pelayanan Penanaman Modal	1 Rata-rata waktu layanan perizinan 2 Rata-rata waktu respon pengaduan 3 Persentase penanganan advokasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti 4 Nilai SKM lingkup pelayanan penanaman modal	Hari Jam Persen Nilai	N/A N/A N/A N/A	N/A N/A N/A N/A	- - - -	3,00 0,86 100,00 80,43	- - - -	7,00 3,00 100,00 82,00	2.508.550.000	7,00 3,00 100,00 83,50	2.240.069.905	7,00 3,00 100,00 85,00	2.249.635.004	7,00 3,00 100,00 85,00	6.998.254.909	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan ketataan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	Persen	N/A	N/A	-	N/A	-	30	438.853.000	45	532.007.935	50	534.279.609	50	1.505.140.543	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2 18 06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan laporan pengelolaan data dan sistem informasi tepat waktu	Persen	N/A	N/A	-	N/A	-	100,00	951.985.000	100,00	1.805.701.049	100,00	1.813.411.392	100,00	4.571.097.441	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					147.073.988.530		9.783.672.838		122.874.248.795		111.362.133.278		111.837.649.587		502.931.693.028	
2 13 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	12.516.321.252	100	6.335.131.068	-	-	-	-	-	-	100	18.851.452.320	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 13 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Persen	100	100	57.843.984.529	100	149.710.000	-	-	-	-	-	-	100	57.993.694.529	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 13 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	Persen	100	100	141.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	141.350.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 13 23	Program Pembinaan Keolahragaan	Persentase rata-rata pembinaan keolahragaan	Persen	100	97,46	57.702.634.529	90	1.122.976.400	-	-	-	-	-	-	97,46	58.825.610.929	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 13 24	Program Pembinaan Kebudayaan dan Masyarakat-an Olahrag	Persentase kegiatan kebudayaan dan masyarakat-an olahraga masyarakat secara rutin	Persen	100	103	6.133.753.780	-	-	-	-	-	-	-	-	103	6.133.753.780	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 13 26	Program Pembinaan Kepemudaan	Persentase Rata-rata Organisasi Pemuda dan Pemuda yang Aktif Positif	Persen	na	0,029	4.951.685.125	0,003	516.150.400	-	-	-	-	-	-	0,029	5.467.835.525	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2 13 27	Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Pemuda	Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan Kepemudaan	Persen	100	100	3.915.805.420	-	-	-	-	-	-	-	-	100	3.915.805.420	Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	13	25	Persen	90	104	3.742.453.895	-	-	-	-	-	-	-	-	104	3.742.453.895	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	13	28	Persen	100	100	126.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	126.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	13	01	Persen	-	-	-	39,4	1.659.704.970	-	-	-	-	-	-	39,4	1.659.704.970	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	01	Persen	100	100	-	100	-	100	33.434.584.738	100	33.503.805.679	100	33.646.866.929	100	100.585.257.345	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	02	Persen	N/A	-	-	30,60	-	51,02	18.408.759.550	75,51	13.143.252.000	100,00	13.199.373.686	100,00	44.751.385.235	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	03	Indeks	N/A	-	-	0,120	-	0,127	67.536.202.507	0,133	61.169.975.463	0,140	61.431.171.258	0,140	190.137.349.228	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	04	Persen	N/A	-	-	N/A	-	60,00	3.494.702.000	70,00	3.545.100.137	80,00	3.560.237.714	80,00	10.600.039.851	Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
2	20	STATISTIK																				
2	14	15	Persen		38,16	1.636.735.950	-	540.001.500		445.997.300		445.381.715		447.283.495	38,16	2.975.398.460	Dinas Komunikasi dan Informatika					
2	20	02	Nilai	N/A	-	1.636.735.950	45,23	540.001.500		445.997.300	3,50	445.381.715	3,90	447.283.495		1.636.735.950	Dinas Komunikasi dan Informatika					
2	20		Nilai	N/A	-		N/A		3,30	445.997.300	3,50	445.381.715	3,90	447.283.495		1.338.662.510	Dinas Komunikasi dan Informatika					
2	21	PERSANDIAAN																				
2	15	18	Persen	36	36,65	1.776.296.179	-	3.014.120.778		105.700.000		305.278.060		306.581.597		5.508.398.554	Dinas Komunikasi dan Informatika					
2	15		Persen			1.385.688.822	-	2.917.390.520		-		-		-	36,65	4.303.079.342	Dinas Komunikasi dan Informatika					
2	15	19	Persen	100	100	390.607.357	40,20	96.730.258		-		-		-	40,20		Dinas Komunikasi dan Informatika					
2	15		Persen							-		-		-	100	487.337.615	Dinas Komunikasi dan Informatika					
2	21	02	Nilai	N/A	N/A	-	N/A		1,20	105.700.000	1,25	305.278.060	1,37	306.581.597		717.981.597	Dinas Komunikasi dan Informatika					
2	21		Nilai	N/A	N/A												Dinas Komunikasi dan Informatika					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	22	KEBUDAYAAN															
2	16	1	Persen	100	100	31.016.824.701	100	14.148.023.455	-	37.021.016.698	-	37.282.861.550	-	37.442.059.369	-	111.745.937.617	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	16	2	Persen	80	95	10.733.600.838	96	8.042.486.602	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	16	3	Persen	100	100	2.769.144.480	100	1.426.704.650	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	16	5	Persen	N/A	100	122.056.000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	16	8	Persen	28,13	37,5	95.636.250	100	50.847.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	16	19	Persen	N/A	1,18	1.547.962.452	46,87	944.338.803	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	16	20	Persen	N/A	1,05	382.995.000	1,57	181.820.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	16	21	Persen	N/A	1,57	1.310.392.500	2,36	199.980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	16	22	Persen	N/A	0,56	12.742.540.166	0,621	2.784.751.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
						1.312.497.015		517.094.900	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2 22 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	26.179.977.198	100,00	29.129.340.546	100,00	29.253.722.831	100,00	84.563.040.575	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase sub Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Persen	69,04	69,04	-	69,04	-	70,88	6.560.660.000	72,73	3.515.832.090	74,83	3.530.844.693	74,83	13.607.336.782	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Lembaga Seni Memenuhi Standar Sanggar Seni	Persen	1,60	1,60	-	1,60	-	4,35	1.863.362.500	5,75	3.030.797.980	8,42	3.043.739.487	8,42	7.937.899.967	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas (wajib KTP) yang mengunjungi peninggalan sejarah (dari 1.830.185 data disdukkcapil)	Persen	N/A	-	-	-	-	3,00	372.340.000	5,00	558.340.190	7,00	560.724.302	7,00	1.491.404.492	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	50,50	50,50	-	50,50	-	51,06	2.044.677.000	51,61	1.048.550.745	52,17	1.053.028.056	52,17	4.146.255.801	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 23	PERPUSTAKAAN					7.590.942.664		5.903.888.182		19.876.010.263		20.524.659.625		20.612.299.921		74.507.800.655	
2 17 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	5.178.152.645	100	4.464.684.465	-	-	-	-	-	-	100	9.642.837.110	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 17 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 2 Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	825.630.239	-	1.166.255.667	-	-	-	-	-	-	100	1.991.885.906	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	17	3	Persen	100	100	191.114.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	191.114.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	17	5	Persen	100	100	180.313.000	50	26.667.800	-	-	-	-	-	-	100	206.980.800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	17	8	Persen	100	100	190.127.900	100	57.420.000	-	-	-	-	-	-	100	247.547.900	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	17	18	Persen	4,475	6,02	1.025.604.880	-	188.860.250	-	-	-	-	-	-	6,02	1.214.465.130	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	Persen	100	100	-	100	-	71,73	18.464.218,453	100	19.041.537.793	100	19.122.845.159	100	56.628.601.405	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	Nilai	N/A	N/A	-	2,65	-	71,73	1.301.789.060	72,02	1.201.391.326	72,30	1.206.521.267	72,30	3.709.701.653	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Nilai	N/A	N/A		N/A		86,33		86,33		86,33		86,33		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023			
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
1	Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan dan Kearsipan	3	Persen	5	178.234.950	8	81.447.180	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1		Persentase smart library yang berfungsi dengan baik di Kota Bandung	1,54	2,13	-	81.447.180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259.682.130	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2		Persentase perangkat daerah yang menyelenggarakan sistem kearsipan secara baku	28,12	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Program Pengelolaan Arsip	3	Persen			11,66											
1		Nilai Pengawasan Kearsipan pada aspek kebijakan, pengelolaan arsip, sumber daya kearsipan	N/A	N/A	N/A		19,50	931.307.980	20,10	1.040.867.175	21,00	1.045.311.677	21,00	3.017.486.832	21,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2		Nilai pengawasan kearsipan pada aspek Sosialisasi Kebijakan, pembinaan dan pengawasan Kearsipan	N/A	N/A	N/A		37,60		39,30		41,40		41,40				
2	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		Nilai	N/A	-	N/A	-	8,10	270.684.930	8,40	220.117.395	8,40	221.057.296	8,40	711.859.620		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

VII - 76

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Nilai	N/A	N/A	-	N/A	-	100	135.455.800	100	54.703.072	100	54.936.654	100	245.095.526	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				34.860.081.763		22.817.125.084		70.308.648.037		53.384.454.060		53.612.405.679		235.056.499.993	
3	25	KELAUTAN DAN PERIKANAN				1.457.793.532		1.026.107.895		2.829.461.461		2.650.509.489		2.661.827.165		10.625.699.541	
3	1	Program Pengembangan Budaya Perikanan	Ton	2970	2.981,27	1.150.720.712	1921,05	961.245.945	-	-	-	-	-	-	-	2.111.966.657	Dinas Pangan dan Pertanian
3	1	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	ekor	1222000	1.823.200	307.072.820	30	64.861.950	-	-	-	-	-	-	-	371.934.770	Dinas Pangan dan Pertanian
3	1	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	kg/kap/th	37,95	40,23		40,24										
3	26	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Orang	80	85												
3	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persen	N/A	N/A	-	N/A	-	42,43	1.817.971.978	45,26	1.640.416.107	48,10	1.647.420.684	48,10	5.105.808.770	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persen	N/A	N/A	-	N/A	-	5,00	1.011.489.483	7,00	1.010.093.382	9,00	1.014.406.480	9,00	3.035.989.345	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	26	PARIWISATA				11.407.924.303		3.757.056.555		20.487.044.700		14.804.558.242		14.867.773.706		65.324.357.505	
3	2	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Poin	N/A	3,52	2.612.615.750	3,25	1.130.553.650	-	-	-	-	-	-	3,25	3.743.169.400	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	2	Program pembangunan destinasi wisata	Persen	N/A	25	2.441.485.600	25	178.802.500	-	-	-	-	-	-	25	2.620.288.100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

VII - 78

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Pe- nanggung Jawab				
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target		Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	26	05	Persen	N/A	N/A	-	2,62	-	8,1	7.219.386.500	9,3	6.943.855.409	10	6.973.505.672	10	21.136.747.581	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	27																
3	3	19	kw/ha	68,08	68,083	4.055.238.307	68,23	2.726.021.138	-	7.064.662.238	-	7.862.999.667	-	7.896.574.676	-	29.605.496.026	Dinas Pangan dan Pertanian
3	3	3	Pohon	237000	813.880	1.702.821.678	767340	1.251.844.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	3	Pohon	155485	412.144		163895		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	3	Pohon	10000	53.869		20717		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	25	Orang	80	102		45		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
3	3	3	Persen	100	100	341.918.936	-	160.174.613	-	-	-	-	-	-	-	502.093.549	Dinas Pangan dan Pertanian
3	3	27	Persen	-	-		100										
3	3	27	ekor	36756	36.793	656.322.895	37844	514.757.100	-	-	-	-	-	-	-	1.171.079.995	Dinas Pangan dan Pertanian
3	3	28	Orang	80	81	317.087.129	32	78.303.280	-	-	-	-	-	-	-	395.390.409	Dinas Pangan dan Pertanian
3	3	29	kasus	7	0	1.037.087.669	0	720.941.720	-	-	-	-	-	-	-	1.758.029.389	Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023			
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3 27 02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian dan Peternakan	Persen	N/A	N/A	-	N/A	-	65	2.870.672.172	75	2.897.241.461	85	2.909.612.682	85	8.677.526.315	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Petani yang Mengikuti Asuransi Usaha Tani Padi	Persen	N/A	N/A	-	N/A	5	169.422.380	213.713.116	10	213.713.116	15	214.625.671	15	597.761.167	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Hasil peternakan	Persen	N/A	N/A	-	99,93	99,10	99,10	3.475.743.416	99,20	3.732.220.404	99,30	3.748.156.985	99,30	10.956.120.806	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2 Cakupan Penanganan Kasus Penyakit Zoonosa	Persen	N/A	N/A	-	N/A	100	100		100,00		100,00		100		
		3 Persentase Binaan yang menjadi Pelaku Usaha Pangan Olahan Hasil Peternakan	Persen	N/A	N/A	-	N/A	5	5		7		9		9		
3 27 05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Kejadian Bencana Pertanian Ditindaklanjuti	Persen	N/A	N/A	-	N/A	100	387.976.200	435.289.604	100	437.148.291	100	437.148.291	100	1.260.414.095	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 27 07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani Minimal Kategori Kelas Lanjut	Persen	N/A	N/A	-	N/A	10,80	160.848.070	584.535.081	13,40	587.031.046	15,90	587.031.046	15,90	1.332.414.197	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 30	PERDAGANGAN																
3 06 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	2.703.549.999	100	-	33.442.693.108	24.687.594.822	-	24.687.594.822	-	24.793.010.852	100	103.958.939.589	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

VII - 80

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Pe- nanggung Jawab				
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3 06 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Persen	100	100	3.939.903.438	100	1.285.631.683	-	-	-	-	-	-	100	5.225.535.121	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 06 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	Persen	100	100	147.136.100	100	4.400.000	-	-	-	-	-	-	100	151.536.100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 06 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	100	229.397.000	100	160.745.200	-	-	-	-	-	-	100	390.142.200	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 06 01 08	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentase layanan data dan informasi	Persen	100	100	64.278.000	100	23.340.250	-	-	-	-	-	-	100	87.618.250	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 06 001 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Kota Bandung	US\$ (juta)	466	466,159	1.075.716.550	321,26	2.819.706.050	-	-	-	-	-	-	321,26	3.895.422.600	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 06 001 21	Program Pembinaan Distribusi Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting	Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persen	15	9,22	1.335.336.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.335.336.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 06 001 22	Program Pengembangan E-Commerce	Nilai daya saing perdagangan e-commerce	point	N/A	361,44	194.909.000	401,60	479.543.500	-	-	-	-	-	-	401,60	674.452.500	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 06 001 23	Program Perdagangan Dalam Negeri	Nilai daya saing perdagangan	point	N/A	360,59	1.306.672.200	460,59	858.697.100	-	-	-	-	-	-	460,59	2.165.369.300	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 06 001 24	Program Standardisasi Kemetretrologian	1 Jumlah alat UTP yang terstandarisasi 2 Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	alat UTP Nilai	N/A 82	124,646 82,55	1.101.635.477	190,063 83,46	867.389.272	-	-	-	-	-	-	190,063 83,46	1.969.024.749	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	25	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3 06 001	Program Peningkatan Distribusi Perdagangan dan Stabilitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persen	N/A	-	-	8,49	65.296.700	-	-	-	-	-	-	8,49	65.296.700	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 06 001	Pemberantasan Barang Kena Cukai illegal	Informasi mengenai barang kena cukai illegal	merk rokok	15	15	187.614.504	16	120.781.989	-	-	-	-	-	-	16	308.396.493	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	N/A	-	-	-	-	100	18.437.067.408	100	19.835.970.299	100	19.920.669.892	100	58.193.707.600	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha perdagangan yang memiliki perizinan	Persen	N/A	-	-	-	-	100	52.140.000	100	24.266.460	100	24.370.078	100	100.776.538	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang melakukan pemasaran online	Persen	N/A	-	-	-	-	4,52	433.975.000	-	-	-	-	-	433.975.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 04	Program Stabilitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok	Persen	N/A	-	-	8,49	-	15	6.789.810.380	15	1.267.140.790	15	1.272.551.481	15	9.329.502.652	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 05	Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan nilai ekspor	Persen	N/A	-	-	N/A	-	0,3	4.448.979.700	0,3	1.184.040.427	0,3	1.189.096.280	0,3	6.822.116.408	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase tera/tera ulang sesuai prosedur	Persen	N/A	-	-	-	-	100	1.238.806.830	100	936.253.287	100	940.251.088	100	3.115.311.205	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3 30 07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha perdagangan yang meningkatkan daya saingnya	Persen	N/A	-	-	N/A	-	75,79	2.041.913.790	79,56	1.439.923.558	83,33	1.446.072.032	83,33	4.927.909.380	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 31	PERINDUSTRIAN																
3 07 01 15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Jumlah industri kecil menengah tersertifikasi	IKM	350	350	853.017.000	476	6.558.446.957	-	6.484.786.530	-	3.378.791.840	-	3.393.219.281	476	25.392.695.161	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 07 01 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang meningkatkan daya saingnya	IKM	280	280	3.210.755.967	283	5.144.234.105	-	-	-	-	-	-	283	8.354.990.072	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 07 01 17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	1 Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang meningkatkan kemampuannya dalam proses produksi	Pelaku usaha	150	250	1.354.328.986	150	742.085.852	-	-	-	-	-	-	150	2.096.414.838	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		2 Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai	82	82,55		83,46								83,46		
3 07 01 19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri	Jumlah sentra industri yang meningkatkan daya saingnya	Sentra	1	1	159.348.600		-	-	-	-	-	-	-	1	159.348.600	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 07 01 22	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Unggulan	Jumlah sentra industri yang meningkatkan daya saingnya	Sentra	N/A			4	-	-	-	-	-	-	-	4		Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3 31	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1 Persentase pelaku IKM non sentra industri yang meningkat daya saingnya 2 Persentase pelaku IKM pada sentra industri yang meningkat daya saingnya	Persen	N/A	N/A	-	N/A	-	55	6.484.786.530	60	3.378.791.840	68,49	3.393.219.281	68,49	13.256.797.651	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 32	TRANSMIGRASI					75.526.800		-		-		-		-		75.526.800	
3 8	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	1 Calon transmigrasi diseleksi 2 Terlaksananya Program Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi yang diikuti oleh Masyarakat	Orang	300	120	75.526.800		-		-		-		-	120	75.526.800	Dinas Tenaga Kerja
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					164.575.442.226		163.994.663.469		268.616.727.896		468.137.165.622		470.136.111.319		1.461.736.019.378	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH					88.742.330.784		90.636.854.281		110.722.537.210		279.925.152.028		281.120.432.428		851.147.306.731	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 Sekretariat Daerah
1		Persentase Terpenuhiya kebutuhan Sarana Aparatur Bagian Layanan Pengadaan	Persen	100	27.160.660.268	100	36.353.266.931	-	-	-	-	-	-	-	-	63.513.927.199	
2		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Persen	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Nilai	34110	3.4144	403.927.500	-	195.666.000	-	-	-	-	-	-	-	599.593.500	Sekretariat Daerah
2		Nilai LPPD	Predikat	Sangat Tinggi	-	-	Sangat Tinggi (3.4013)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	1	Persentase fasilitas penyelenggaraan Pilpres dan Pilleg dan Pilkada	Persen	100	50.693.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.693.500	Sekretariat Daerah
2		Penataan Batas Daerah dan Batas Wilayah	Persen	100	213.301.520	100	201.487.250	-	-	-	-	-	-	-	-	414.788.770	
4	Program Penye- lenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah	1	Persentase Terfasilitasnya penyelenggara otonomi daerah, pemerintahan daerah dan pemerintahan wilayah	Persen	100	2.440.524.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.440.524.400	Sekretariat Daerah
2		Persentase Kecamatan Berkinerja Baik	Persen	33,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

VII - 86

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 05	02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Laporan	4	4	846.120.826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846.120.826	Sekretariat Daerah
4 05	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan	1	1	37.360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.360.000	Sekretariat Daerah
4 5	47	Program Sosial Keagamaan	Persen	100	100	1.735.510.558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.735.510.558	Sekretariat Daerah
4 5	48	Program koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Lingkup Kesehatan Masyarakat, Pendidikan dan Sosial budaya	kegiatan	2	2	205.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.920.000	Sekretariat Daerah
4 5	56	Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Lingkup Kesejahteraan Sosial, Ke-masyarakatan dan Penang-gulangan Kemiskinan	Persen	100	100	432.334.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432.334.420	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1 4 05 60	Program Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	3 Persentase Rancangan Kebijakan bidang Sosial kemasyarakatan ditindaklanjuti	4 Persen	5 25	6 -	7 -	8 25	9 97.166.000	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 -	17 97.166.000	18 Sekretariat Daerah
4 5 24	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1 Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron	Persen	100	100	77.178.500	-	472.031.950	-	-	-	-	-	-	-	549.210.450	Sekretariat Daerah
		2 Terwujudnya produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi serta kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100	-		147		-		-		-				
4 5 50	Program Pembangunan Produk Hukum Daerah	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Persen	100	128	994.020.563	147	472.031.950	-	-	-	-	-	-	-	1.466.052.513	Sekretariat Daerah
4 5 57	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Persentase Implementasi Kerja Sama Lingkup Dalam dan Luar Negeri	Persen	100	150,45	4.367.022.262	111,8	1.579.904.963	-	-	-	-	-	-	-	5.946.927.225	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	5	45	Persentase Pengendalian Kualitas Pembangunan Daerah	100	100	980.738.900	100	453.468.082	-	-	-	-	-	-	-	1.434.206.982	Sekretariat Daerah
4	5	37	Nilai Hasil kepuasan pelayanan Barang,Jasa Barang dan Jasa	100	100	2.305.147.600	100	1.081.921.408	-	-	-	-	-	-	-	3.387.069.008	Sekretariat Daerah
4	5	38	1 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (Komponen Penataan dan Penguatan Organisasi) pada Skala 6	4	4	1.067.923.764	-	921.136.740	-	-	-	-	-	-	-	1.989.060.504	Sekretariat Daerah
4	5	39	2 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (Komponen Penataan Tata Laksana) pada Skala 5	3,9	3,9	357.028.300	-	791.518.844	-	-	-	-	-	-	-	1.148.547.144	Sekretariat Daerah
4	5	16	1 Nilai Indeks Layanan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah	100	100	1.641.071.061	100	453.935.900	-	-	-	-	-	-	-	2.095.006.961	Sekretariat Daerah
4	5	46	2 Terlaksananya Penerimaan Tamu Negara, Pemerintah/ Departemen / Lembaga Rasio berita Baik dan Berita Buruk	71,00 dan 29,00	82,96 : 17,04	9.303.314.534	97,70 : 2,30	12.409.890.791	-	-	-	-	-	-	-	21.713.205.325	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2019			Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Pe- nanggung Jawab
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 Sekretariat Daerah	
4		1	Persen	100	100	-	100	-	100	28.451.883.800	100	205.656.674.921	100	206.534.828.923	100	440.643.387.645		
		2	Nilai	N/A	12,60		11,78		12,00			12,50		12,75				
		3	Nilai	N/A	N/A	N/A		N/A	87,70			87,80		87,9				
		4	Persen	N/A	N/A		N/A		100,00			100,00		100				
		5	Persen	N/A	N/A		N/A		100,00			100,00		100				
		6	Persen	N/A	N/A		N/A		100,00			100,00		100				
		7	Persen	N/A	N/A		N/A		100,00			100,00		100				
		8	Nilai	N/A	N/A		N/A		87,70			87,80		87,9				
	9	Nilai	N/A	N/A		N/A		87,70			87,80		87,9				Perkapeg	

Kode	Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab																	
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																			
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		10	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan kepegawainan tepat waktu	N/A		N/A		100,00		100,00		100,00		100,00		100		
																		11	Persentase temuan BPK/Inspektorat lingkup keuangan ditindaklanjuti	N/A		N/A		100,00		100,00		100,00		100,00		100		
																		12	Cakupan layanan sarana prasarana kegiatan pimpinan	N/A		N/A		100,00		100,00		100,00		100,00		100		Bagum
																		13	Persentase temuan BPK/Inspektorat lingkup aset ditindaklanjuti	N/A		N/A		100,00		100,00		100,00		100,00		100		
4	01	02	Nilai	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																
																			14	IKM Bagian Umum	N/A		N/A		87,70		87,80		87,9		87,9		87,9	
4	01	02	Persen	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29																
																			15	Persentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang administrasi umum dan kepegawainan ditindaklanjuti	N/A		N/A		100,00		100,00		100,00		100,00		100	
4	01	02	Persen	-	-	-	N/A	-	100	72.854.306.000	100	69.857.401.831	100	70.155.692.937	100	212.867.400.767	-	-																
																			1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
																		10	Persentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kerjasama ditindaklanjuti
		11	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	87,7	87,7	87,8	87,8	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9
		12	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		13	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		14	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	87,7	87,7	87,8	87,8	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9
		4	1	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persen	N/A	N/A	N/A	-	100	100	9.416.347.410	100	4.411.075.276	100	4.429.910.568	100	18.257.333.254	18
		4	2	Persentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi pembangunan ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode	Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	02	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				75.833.111.442		73.357.809.188		157.894.190.686		188.212.013.593		189.015.678.891		684.312.803.801	
4	5	1	Persen	100	100	17.181.931.910	100	17.513.686.035	-	-	-	-	-	-	100	34.695.617.945	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	5	2	Persen	100	100	20.271.311.156	100	18.879.133.903	-	-	-	-	-	-	100	39.150.445.059	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	5	3	Persen	100	100	910.610.250	100	780.230.000	-	-	-	-	-	-	100	1.690.840.250	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	5	5	Persen	100	100	1.658.464.402	100	669.718.300	-	-	-	-	-	-	100	2.328.182.702	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	5	15	Persen	85	80	35.810.793.724	85	35.515.040.950	-	-	-	-	-	-	85	71.325.834.674	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	Persen	NA	-	-	100	-	100	109.723.205.209	100	131.772.905.995	100	132.335.576.304	100	373.831.687.508	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	Persen	85	80	-	85	-	87	48.170.985.477	90	56.439.107.598	95	56.680.102.587	95	161.290.195.662	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

VII - 96

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	RUNGSU PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					64.282.905.278	41.567.304.023	463.750.095.303	639.189.141.155	641.918.478.787	1.851.591.380.378						
5	01	Perencanaan				10.619.652.092	8.090.914.141	31.422.133.548	32.740.504.477	32.880.306.431	115.753.510.689						
4	1	1	Persen	100	100	3.387.079.364	2.521.421.827	-	-	-	-	-	-	-	100	5.908.501.191	Badan Perencanaan, Pem- bangunan, Penelitian dan Pengem- bangan
4	1	2	Persen	100	100	1.559.324.847	856.630.301	-	-	-	-	-	-	-	100	2.415.955.148	Badan Perencanaan, Pem- bangunan, Penelitian dan Pengem- bangan
4	1	3	Persen	100	100	194.860.000	5.400.000	-	-	-	-	-	-	-	100	200.260.000	Badan Perencanaan, Pem- bangunan, Penelitian dan Pengem- bangan
4	1	19	Persen	100	100	4.105.194.889	3.629.014.463	-	-	-	-	-	-	-	85	7.734.209.352	Badan Perencanaan, Pem- bangunan, Penelitian dan Pengem- bangan
4	1	28	Persen	100	100	361.373.750	264.166.600	-	-	-	-	-	-	-	100	625.540.350	Badan Perencanaan, Pem- bangunan, Penelitian dan Pengem- bangan
4	1	29	Persen	100	100	546.576.450	466.700.050	-	-	-	-	-	-	-	100	1.013.276.500	Badan Perencanaan, Pem- bangunan, Penelitian dan Pengem- bangan

Kode	Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	4	3	Persen	5	N/A	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Realisasi Kinerja						Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1 30		Capaian Penggunaan DBHCHT di Kota Bandung sesuai aturan				100	370.749.792	100	269.872.500	-	-	-	-	-	-	100	640.622.292	
4 01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100		-	-	100	77.708.400	-	-	-	-	-	-	100	77.708.400	
4 01	15	Program Kerjasama Pembangunan (Banprov)	Persen	N/A		100	94.493.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	94.493.000	
5 01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	100		100	-	100	-	23.585.253.816	25.498.868.733	100	25.498.868.733	100	25.607.748.903	100	74.691.871.452	
5 01	02	1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	50		-	-	50	-	2.649.466.800	2.539.892.485	66,33	2.539.892.485	100	2.550.737.826	100	7.740.097.112	
		2 Rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi (Money) Renja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	Persen	100		100		100				100				100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pe- nanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	01	03	Persen	50	-	-	50	-	66,67	5.187.412.932	83,33	4.701.743.258	100	4.721.819.702	100	14.610.975.893	Badan Per- encanaan, Pembangu- nan, Pene- litian dan Pengem- bangan
		1	Persen	100	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	100	-	
		2	Persen	100	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	100	-	
5	02																
4	2	1	Persen	100	100	37.971.000.434	100	20.984.011.877	-	191.173.916.706	-	363.398.265.861	100	364.949.976.456	100	978.489.523.213	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
4	2	2	Persen	100	100	3.075.461.686,00	100	2.336.278.467,00	-	-	-	-	-	-	100	5.411.740.153	
4	2	2	Persen	100	100	1.246.106.139,00	100	854.754.064,00	-	-	-	-	-	-	100	2.100.860.203	
4	2	3	Persen	100	100	115.896.000,00	100	285.762.000,00	-	-	-	-	-	-	100	401.658.000	
4	2	8	Persen	100	100	45.540.000,00	100	9.570.000,00	-	-	-	-	-	-	100	55.110.000	
4	2	15	Dokumen	2	2	7.886.433.601	2	4.031.024.150	-	-	-	-	-	-	2	11.917.457.751	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	18		
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					30		30		-		-		-		-			30		
					Tepat waktu		Tepat waktu		-		-		-		-			Tepat waktu		
					2		2		-		-		-		-			2		
					14		14		-		-		-		-			14		
4	2	16	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota	100	49.785.500	100		-	-	-	-	-	-	100	49.785.500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset				
5	02	01	1	100	100	-	100	-	100	24.371.043.395	100	31.932.632.483	100	32.068.984.824	100	88.372.660.702	Badan Keuangan dan Aset Daerah			
					-		-		90		95		100							
					-		100		100		100		100							
5	02	01	2	N/A	persen		persen		persen		persen		persen		persen					
					Keuangan Tepat Waktu Sesuai Perundang-undangan		Keuangan Tepat Waktu Sesuai Perundang-undangan		Keuangan Tepat Waktu Sesuai Perundang-undangan		Keuangan Tepat Waktu Sesuai Perundang-undangan		Keuangan Tepat Waktu Sesuai Perundang-undangan		Keuangan Tepat Waktu Sesuai Perundang-undangan					
					3		3		persen		persen		persen		persen			persen		

VII - 100

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023			
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 Badan Keuangan dan Aset Daerah
5		1	persen	N/A	-	-	100	-	100	59.154.545.223	100	225.549.667.204	100	226.512.764.283	100	511.216.976.709	
		2	persen	N/A	-	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
		3	persen	N/A	-	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	persen	N/A	19	-	19	-	24	1.950.590.819	27	2.092.770.489	30	2.101.706.619	30	6.145.067.928	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		2	persen	N/A	-	-	100	-	100	-	100	-	100	100	100	-	
		3	persen	N/A	-	-	20	-	60	-	80	-	100	100	100	-	
4	2	1	Persen	100	100	10.541.321.984,00	100	6.206.808.324	-	-	-	-	-	-	100	16.748.130.308	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4		2	Persen	100	100	2.301.032.528,00	100	671.846.264	-	-	-	-	-	-	100	2.972.878.792	
4	2	3	Persen	100	100	399.498.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399.498.000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4		2	Persen	100	100	583.736.500,00	100	244.800.000	-	-	-	-	-	-	100	828.536.500	

Kode	Bidang Urusan dan Program dan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	2	18	Rp.	2.436.311.729.898	2.154.648.077.249	2.010.858.795	1.629.188.446	1.532.934.300	-	-	-	-	-	-	1.629.188.446	3.543.793.095	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4	2	20	Persen	75	93,29	4.983.976.300,00	88,58	1.787.332.000	-	-	-	-	-	-	88,58	6.771.308.300	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4	2	21	Nilai	88,31	91,39	4.686.038.401,00	91,84	3.003.287.808	-	-	-	-	-	-	91,84	7.689.326.209	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4	2	22	Nilai	88,31	81,71	45.315.000	98,99	19.614.500	-	-	-	-	-	-	98,99	64.929.500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	Persen	100	100	-	100	-	100	91.350.433.969	100	94.886.487.564	100	95.291.652.866	100	281.528.574.399	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	Rp.	2.436.311.729.898	-	-	1.629.188.446	-	2.700.000.000	14.347.303.300	2.088.000.000	8.936.708.121	2.054.000.000	8.974.867.865	2.054.000.000	32.271.231.165	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	03					13.316.331.242		12.149.038.005		239.815.635.519		241.177.958.773		242.207.788.657		748.666.752.195	
4	3	1	Persen	100	100,00		100,00	2.353.972.574	-	-	-	-	-	-	100	2.353.972.574	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

VII - 102

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	3	2	Persen	100			100,00	911.563.467	-	-	-	911.563.467	-	-	100	911.563.467	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4	3	3	Persen	100			100,00	52.800.000	-	-	-	52.800.000	-	-	100	52.800.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4	3	4	Persen	100		69.291.650	100,00	126.986.500	-	-	-	126.986.500	-	-	100	196.278.150	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4	3	5	Persen	100		11.043.382.290	100,00	389.761.200	-	-	-	389.761.200	-	-	100	11.433.143.490	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4	3	15	Persen	100	100	342.442.600	100,00	483.913.250	-	-	-	483.913.250	-	-	100	826.355.850	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4	3	19	Persen	55	74,17	753.919.870	80,59	2.110.251.392	-	-	-	2.110.251.392	-	-	74,17	2.864.171.262	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4	3	20	Persen	77,78	91,67	445.346.100	90,00	2.043.078.252	-	-	-	2.043.078.252	-	-	91,67	2.488.424.352	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4	3	22	Persen	96,38	98,06	437.211.000	98,45	485.657.500	-	-	-	485.657.500	-	-	98,06	922.868.500	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4	3	23	Persen	50	69,77	224.737.732	79,89	164.100.000	-	-	-	164.100.000	-	-	69,77	388.837.732	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Daerah	3	Persen	42,08	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		
-					-	61,00	3.026.953.870	-	-	-	-	-	-	-	-	-		61,00	3.026.953.870
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Persen	100	-	-	100	-	100	216.343.326.449	100	224.256.150.276	100	225.213.724.038	100	665.813.200.763	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5					03	01	02	03	02	03	02	03	02	03	02	03		02	03
5	Program Kepegawaian Daerah	2	Nilai	N/A	-	-	97,50	-	100,00	11.909.767.184	104,00	8.889.451.196	104,00	8.927.409.153	112,00	29.726.627.533	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5					03	02	03	02	03	02	03	02	03	02	03	02		03	02
5					04	02	03	02	03	02	03	02	03	02	03	02		03	02
5	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	Nilai	N/A	-	-	112,00	-	117,00	-	122,00	-	127,00	105,00	127,00	27.661.554.652	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5					04	02	03	02	03	02	03	02	03	02	03	02		03	02
5	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	Nilai	N/A	2.375.921.510	-	343.340.000	-	40,50	11.562.541.886	45,50	8.032.357.300	55,50	8.066.655.466	47,50	27.661.554.652	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5					05	04	02	03	02	03	02	03	02	03	02	03		02	03
5	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	Persen	100	2.375.921.510	2.375.921.510	343.340.000	-	-	1.338.409.530	-	1.872.412.044	-	1.880.407.243	100	2.719.261.510	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan		
5					05	04	02	03	02	03	02	03	02	03	02	03		02	03

VII - 104

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Kode	Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	02	3	Persen	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	05	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		100	-	-	100	-	100	1.338.409.530	100	1.872.412.044	100	1.880.407.243	100	5.091.228.818	Badan Perencanaan, Pembinaan, Penelitian dan Pengembangan
6	01	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				11.102.984.252		4.865.969.302		44.449.161.135		46.599.556.463		46.798.536.569		153.816.207.721	
4	5	1	Persen	100	100	6.361.143.404	100	2.097.557.549	-	-	-	-	-	-	100	8.458.700.953	Inspektorat
4	5	2	Persen	100	100	2.467.375.635	100	1.002.410.600	-	-	-	-	-	-	100	3.469.786.235	Inspektorat
4	5	3	Persen	100	100	242.060.500	-	-	-	-	-	-	-	-	100	242.060.500	Inspektorat
4	5	5	Persen	100	100	209.409.350	-	-	-	-	-	-	-	-	100	209.409.350	Inspektorat
4	5	53	Persen	80	77,78	572.276.912	-	374.892.005	-	-	-	-	-	-	77,78	947.168.917	Inspektorat
		1															
		2					100		-		-		-		100		

Kode	Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD													
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.									
1	Program dukungan Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi	3	Persen	5	80	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
4																			265.120.451	78	325.371.550	-	-	-	-	-	-	590.492.001
4																			985.598.000	100	1.065.737.598	-	-	-	-	-	-	2.051.335.598
4	Program peningkatan sistem pengawasan pemerintah daerah	1	Persen	100	100	2	NA	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
2																			2	-	-	-	-	-	-	-		
3																			3	-	-	-	-	-	-	-	50	
06 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (non akumulasi)	Persen	100	100	100	-	100	-	42.346.053.985	100	100	44.867.603.141	100	45.059.187.806	100	132.272.844.932	Inspektorat										
06 01 02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1 Cakupan pelaksanaan pengawasan yang efektif 2 Persentase Pengaduan Kinerja Perangkat daerah ditindaklanjuti	Persen	N/A	N/A	N/A	-	86	-	1.413.939.150	100	100	1.427.852.635	100	1.433.949.566	100	4.275.741.351	Inspektorat										
06 01 03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP minimal 2,50	Persen	N/A	N/A	N/A	-	93,75	-	689.168.000	100	100	304.100.687	100	305.399.197	100	1.298.667.884	Inspektorat										

VII - 106

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Kode	Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	01	UNSUR KEMILAYAHAN				453.563.121.453	343.779.407.284	756.160.765.285	780.500.625.780	3.092.179.029.357							
4	5	1	Persen	100	100	1.399.538.445	958.376.659	-	-	-	-	-	-	-	100	2.357.915.104	Kecamatan Sukasari
4	5	2	Persen	100	100	536.253.458	616.919.959	-	-	-	-	-	-	-	100	1.153.173.417	Kecamatan Sukasari
4	05	03	Persen	100	-	-	25.797.200	-	-	-	-	-	-	-	100	25.797.200	Kecamatan Sukasari
4	05	05	Persen	100	-	-	44.044.000	-	-	-	-	-	-	-	100	44.044.000	Kecamatan Sukasari
1	3	42	Persen	100	100	1.799.724.250	1.873.761.850	-	-	-	-	-	-	-	100	3.673.486.100	Kecamatan Sukasari
1	5	15	Persen	70	100	925.733.450	-	-	-	-	-	-	-	-	100	925.733.450	Kecamatan Sukasari
1	6	33	Persen	100	100	239.310.770	-	-	-	-	-	-	-	-	100	239.310.770	Kecamatan Sukasari

Kode	Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	Program Pengadministrasian Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	3 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	4 Poin	5 79,64	6 80,6	7 1.124.324.600	8 82,42	9 1.100.284.400	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 82,42	17 2.224.609.000	18 Kecamatan Sukasari	
2																		25
2	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat	1 Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persen	100	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2																		
2	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	80,2	100	4.224.527.986	97,25	2.647.498.362	-	-	-	-	-	-	-	97,25	6.872.026.348	Kecamatan Sukasari
2	Program Pemberdayaan UKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	Persen	86,15	90	40.552.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	40.552.650	Kecamatan Sukasari
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	Persen	60	100	23.724.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	23.724.250	Kecamatan Sukasari
2	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peran Kelembagaan, Masyarakat Dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	N/A	N/A	-	-	100	1.535.782.800	-	-	-	-	-	-	-	100	1.535.782.800	Kecamatan Sukasari
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	Persen	100	100	-	100	-	100	11.107.741.581	100	11.702.177.461	100	11.752.145.759	100	34.562.064.801	Kecamatan Sukasari	

VII - 108

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pe- nanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7 01 02	Program Pe-nyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Keluruhan Unggul	Persen	N/A	50	-	50	-	50	2.618.605.949	75	2.415.222.394	100	2.425.535.394	100	7.459.363.737	Kecamatan Sukasari
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat unggul	Persen	N/A	-	-	-	-	80	4.499.963.700	82	4.524.713.114	85	4.544.033.639	85	13.568.710.453	Kecamatan Sukasari
7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	N/A	-	-	-	-	75	894.493.263	80	840.124.399	85	843.711.731	85	2.578.329.393	Kecamatan Sukasari
4 5 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	868.574.094	100	984.855.995	-	-	-	-	-	-	100	1.853.430.089	Kecamatan Cidadak
4 5 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	100	80	801.817.066	80	880.339.140	-	-	-	-	-	-	80	1.682.156.206	Kecamatan Cidadak
4 5 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	Orang	100	100	59.867.500	100	35.607.000	-	-	-	-	-	-	-	95.474.500	Kecamatan Cidadak
1 3 42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	Persen	100	100	892.260.820	100	810.329.000	-	-	-	-	-	-	100	1.702.589.820	Kecamatan Cidadak
1 5 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketertarikan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	Persen	100	100	699.453.880	100	-	-	-	-	-	-	-	100	699.453.880	Kecamatan Cidadak
1 6 33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	91,66	100	62.571.000	100	-	-	-	-	-	-	-	100	62.571.000	Kecamatan Cidadak

Kode	Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	6	20	Poin	78	82,6	872.173.150	84,16	857.207.000	-	-	-	-	-	-	84,16	1.729.380.150	Kecamatan Cidadap
2	7	25	100	100	100	390.271.019			-	-	-	-	-	-	100	390.271.019	Kecamatan Cidadap
2	7	26	Persen	65	100	3.676.838.378	68,87	1.623.085.170	-	-	-	-	-	-	68,87	5.299.923.548	Kecamatan Cidadap
2	11	25	Persen	86,15	89,19	23.187.500			-	-	-	-	-	-	89,19	23.187.500	Kecamatan Cidadap
4	1	19	Persen	100	100	49.868.000			-	-	-	-	-	-	100	49.868.000	Kecamatan Cidadap
2	7	28	Persen				100	1.149.811.000	-	-	-	-	-	-	100	1.149.811.000	Kecamatan Cidadap
7	01	01	Persen	100			100		81,21	9.825.480.333	82	10.348.940.675	83	10.393.130.651	83	30.567.551.659	Kecamatan Cidadap
7	01	02	Persen	N/A	33,33		66,67		66,67	2.256.323.280	100	2.083.193.862	100	2.092.089.100	100	6.431.606.241	Kecamatan Cidadap

VII - 110

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD															
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.														
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3	Persen	5	-	7	-	8	-	9	-	10	40,95	11	3.898.335.340	12	66,66	13	3.845.279.881	14	77,77	15	3.861.699.226	16	77,77	17	11.605.314.447	18	Kecamatan Cidadap	
7 01 03		Persentase lembaga masyarakat unggul		N/A																										
7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3	Persen	N/A	-	-	-	-	-	-	-	48,27	724.379.327	51,72	743.888.504	58,62	747.064.908	58,62	2.215.332.739	58,62	2.215.332.739	58,62	2.215.332.739	58,62	2.215.332.739	58,62	2.215.332.739	58,62	Kecamatan Cidadap	
4 5 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3	Persen	100	100	1.269.577.888	100	1.227.384.168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	Kecamatan Sukajadi
4 5 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	Persen	100	100	570.113.577	100	985.542.366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	Kecamatan Sukajadi
4 5 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3	Persen	100	100	25.850.000	100	40.986.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	Kecamatan Sukajadi
1 3 42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	3	Persen	70	100	178.310.200	100	1.451.779.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	Kecamatan Sukajadi
1 5 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3	Persen	40	67,35	354.969.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,35	Kecamatan Sukajadi
1 6 33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	3	Persen	70	100	58.498.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	Kecamatan Sukajadi

Kode	Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	6	20	Poin	76	78,77	21.216.000	83,25	1.501.644.050	-	-	-	-	-	-	83,25	1.522.860.050	Kecamatan Sukajadi
2	7	25	Persen	54,54	100	151.580.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151.580.000	Kecamatan Sukajadi
2	7	26	Persen	70	95,52	996.732.100	78,33	3.736.135.790	-	-	-	-	-	-	78,33	4.732.867.890	Kecamatan Sukajadi
2	11	25	Persen	20	100	21.530.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.530.000	Kecamatan Sukajadi
4	1	19	Persen	25	100	8.088.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.088.000	Kecamatan Sukajadi
2	7	28	Persen	-	-	-	100	1.774.646.460,00	-	-	-	-	-	-	100	1.774.646.460	Kecamatan Sukajadi
7	01	01	Persen	100	100	-	100	-	100	12.949.585.955,60	100	13.311.273.096	100	13.368.112.232	100	39.628.971.284	Kecamatan Sukajadi
7	01	02	Persen	N/A	20	-	40	-	60	2.134.033.652,00	80	3.652.716.285	100	3.668.313.384	100	9.455.063.321	Kecamatan Sukajadi
7	01	03	Persen	N/A	-	-	-	-	78,50	6.548.438.000,00	79,00	6.550.588.099	79,50	6.578.559.110	79,5	19.677.585.209	Kecamatan Sukajadi

VII - 112

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pe- nanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1 7 01 04	Program Koordinasi Ketentrman dan Ketertiban Umum	3 Persentase Siskaming RW Aktif	4 Persen	5 N/A	6 -	7 -	8 -	9 -	10 63,27	11 2.658.468.200,00	12 73,47	13 1.170.200.806	14 83,67	15 1.175.197.563	16 83,67	17 5.003.866.569	18 Kecamatan Sukajadi
4 5 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	3.091.993.193	100	1.299.981.795	-	-	-	-	-	-	100	4.391.974.988	Kecamatan Cicendo
4 5 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	100	100	1.334.806.168	100	620.963.600	-	-	-	-	-	-	100	1.955.769.768	Kecamatan Cicendo
4 5 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	Persen	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	Kecamatan Cicendo
4 5 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bdadangnya	Persen	100	100	108.424.857	-	-	-	-	-	-	-	-	100	108.424.857	Kecamatan Cicendo
1 3 42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	Persen	70	100	5.207.912.051	100	1.530.268.020	-	-	-	-	-	-	100	6.738.180.071	Kecamatan Cicendo
1 5 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	Persen	45,9	100	2.689.804.170	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2.689.804.170	Kecamatan Cicendo
1 6 33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	91,66	100	195.491.200	-	-	-	-	-	-	-	-	100	195.491.200	Kecamatan Cicendo

Kode	Bidang Urusan dan Program dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	6	20	Poin	78	85,84	3.823.219.850	86,53	2.005.002.495	-	-	-	-	-	-	86,53	5.828.222.345	Kecamatan Cicendo
2	7	25	Persen	54,54	100	1.313.249.850	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.313.249.850	Kecamatan Cicendo
2	7	26	Persen	64	91,07	14.347.249.897	80,07	3.614.479.375	-	-	-	-	-	-	80,07	17.961.729.272	Kecamatan Cicendo
2	11	25	Persen	86,15	93,1	1.062.309.433	-	-	-	-	-	-	-	-	93,1	1.062.309.433	Kecamatan Cicendo
4	1	19	Persen	100	100	49.106.750	-	-	-	-	-	-	-	-	100	49.106.750	Kecamatan Cicendo
2	7	28	Persen	45,9	-	0	100	1.863.881.975	-	-	-	-	-	-	100	1.863.881.975	Kecamatan Cicendo
7	01	01	Persen	100	100	-	100	-	100	14.929.174.617	100	15.157.032.779	100	15.221.753.309	100	45.307.960.705	Kecamatan Cicendo

Kode	Bidang Urusan dan Program dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	N/A	83,33	0	83,33	0	100	4.994.800.482	100	4.516.471.415	100	4.535.756.748	100	14.047.028.645	Kecamatan Cicendo
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	N/A	-	0	-	0	81,6	7.287.719.380	81,65	7.978.330.583	81,7	8.012.398.055	81,7	23.278.448.018	Kecamatan Cicendo
7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	N/A	-	0	-	0	69,64	1.179.939.550	71,43	1.188.671.866	73,21	1.193.747.495	73,21	3.562.358.911	Kecamatan Cicendo
4 5 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	1.819.826.359	100,00	1.446.917.233	-	-	-	-	-	-	100	3.266.743.592	Kecamatan Andir
4 5 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Persen	100,00	100,00	702.595.450	100,00	700.351.660	-	-	-	-	-	-	100	1.402.947.110	Kecamatan Andir
4 5 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	Persen	100,00	100,00	51.282.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	51.282.000	Kecamatan Andir
4 5 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya	Persen	100,00	100,00	89.364.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	89.364.000	Kecamatan Andir
1 5 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	Persen	100,00	100,00	1.297.007.500	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.297.007.500	Kecamatan Andir

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
1 6 33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	3 Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	4 Persen	5 91,66	6 94,74	7 73.355.000	8 -	9 -	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 94,74	17 73.355.000	18 Kecamatan Andir	
2 6 20	Program Peng-administrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	3 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Poin	4 82,54	5 84,08	6 1.785.062.100	7 83,84	8 1.784.431.500	9 -	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 83,84	17 3.569.493.600	Kecamatan Andir
2 7 25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	1 Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persen	2 50,00	3 100,00	4 697.246.750	5 -	6 -	7 -	8 -	9 -	10 -	11 -	12 -	13 -	14 100	15 697.246.750	Kecamatan Andir
		2 Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	unit	1 1	2 4											4		
2 7 26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	1 79,04	2 65,83	3 6.882.769.000	4 57,93	5 3.664.928.385	6 -	7 -	8 -	9 -	10 -	11 -	12 -	13 57,93	14 10.547.697.385	Kecamatan Andir
2 11 25	Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	Persen	1 86,15	2 96,17	3 80.245.000	4 -	5 -	6 -	7 -	8 -	9 -	10 -	11 -	12 96,17	13 80.245.000	Kecamatan Andir	
4 1 19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	Persen	1 100,00	2 100,00	3 85.276.000	4 -	5 -	6 -	7 -	8 -	9 -	10 -	11 -	12 100	13 85.276.000	Kecamatan Andir	
1 3 42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik	Persen	1 100,00	2 100,00	3 2.418.820.250	4 100,00	5 1.823.826.330	6 -	7 -	8 -	9 -	10 -	11 -	12 100	13 4.242.646.580	Kecamatan Andir	

VII - 116

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Kode	Bidang Urusan dan Program dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penerimaan Tugas Jawab	
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	7 28	Peran Kelembagaan, Masyarakat Dalam Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persen	-	-	-	38,46	2.063.642.840	-	-	-	-	-	-	-	38,46	2.063.642.840	Kecamatan Andir
7	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	100	100	-	100	-	100,00	14.220.620.944	100	15.009.008.550	100	15.073.097.016	100,00	44.302.726.510	Kecamatan Andir	
7	01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	N/A	-	-	33,33	-	33,33	4.391.160.506	50,00	4.337.237.174	66,67	4.355.757.177	66,67	13.084.154.856	Kecamatan Andir	
7	01	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	N/A	-	-	-	-	56,36	7.347.786.101	59,15	7.068.477.797	61,92	7.098.660.197	61,92	21.514.924.096	Kecamatan Andir	
7	01	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	N/A	-	-	-	-	50,00	1.298.740.000	61,11	1.291.957.320	72,22	1.297.473.978	72,22	3.888.171.298	Kecamatan Andir	
4	5	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	1.906.208.778	100	1.410.182.467,00	-	-	-	-	-	-	100	3.316.391.245	Kecamatan Coblong	
4	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	936.293.075	100	697.518.500	-	-	-	-	-	-	100	1.633.811.575	Kecamatan Coblong	
4	5	Program peningkatan disiplin aparatur	Persen	100	100	20.592.000	100	-	-	-	-	-	-	-	100	20.592.000	Kecamatan Coblong	
1	3	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persen	100	100	2.530.979.537	100	2.262.137.400	-	-	-	-	-	-	75	4.793.116.937	Kecamatan Coblong	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD													
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.												
1	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	3	Persen	5	100	100	1.647.722.250	8	100	383.000.000	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-	16	100	17	2.030.722.250	18	Kecamatan Coblong
2	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Poin	80	80,14	87,89	3.022.821.250	87,89	3.001.822.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,67	6.024.644.000			Kecamatan Coblong	
2	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	1 Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persen	100	100	188.065.400	100	212.068.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	400.134.050			Kecamatan Coblong	
		2 Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/ Kecamatan	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-		
1	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	100	100	1.018.098.380	100	1.100.870.700	100	1.100.870.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2.118.969.080			Kecamatan Coblong	
2	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	100	89,4	11.096.261.229	92,58	7.725.351.165	92,58	7.725.351.165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,98	18.821.612.394			Kecamatan Coblong	
2	Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	Persen	100	100	21.677.000	100	8.544.750	100	8.544.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,15	30.221.750			Kecamatan Coblong	
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	Persen	100	100	50.468.500	100	51.893.600	100	51.893.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	102.362.100			Kecamatan Coblong	

VII - 118

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	persen	100	100	-	100	-	84,95	14.349.297.219	84,97	15.053.296.342	87	15.117.573.918	87	44.520.167.479	Kecamatan Coblong
7 01 02	Program Penyeng-enggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	N/A	50,00	-	66,67	-	83,33	10.002.077.570	100,00	6.630.063.003	100,00	6.658.373.372	100,00	23.290.513.944	Kecamatan Coblong
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	N/A	-	-	-	-	91,97	6.818.620.408	93,71	9.083.370.031	95,46	9.122.156.021	95,46	25.024.146.460	Kecamatan Coblong
7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	N/A	-	-	-	-	100	410.700.000	100	404.990.242	100	406.719.551	100	1.222.409.793	Kecamatan Coblong
4 5 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	2.093.218.036	100	1.290.747.925	-	-	-	-	-	-	100	3.383.965.961	Kecamatan Bandung Wetan
4 5 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Persen	100	100	700.806.646	100	397.877.229	-	-	-	-	-	-	100	1.098.683.875	Kecamatan Bandung Wetan
4 5 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	Persen	100	100	51.823.750	100	22.990.000	-	-	-	-	-	-	100	74.813.750	Kecamatan Bandung Wetan
1 3 42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	Persen	0	100	1.549.607.485	100	1.464.640.030	-	-	-	-	-	-	100	3.014.247.515	Kecamatan Bandung Wetan
1 5 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	Persen	100	100	2.061.792.052	0	-	-	-	-	-	-	-	100	2.061.792.052	Kecamatan Bandung Wetan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1 6 33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	3 Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	5 0	7 304.903.650	8 0	9 -	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 100	17 304.903.650	18 Kecamatan Bandung Wetan	
2 6 20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Poin	75	1.016.839.500	82,66	956.970.500	-	-	-	-	-	-	82,66	1.973.810.000	Kecamatan Bandung Wetan	
2 7 25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persen	60	192.959.300	0	-	-	-	-	-	-	-	100	192.959.300	Kecamatan Bandung Wetan	
4 5 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	41.665.900	0	-	-	-	-	-	-	-	100	41.665.900	Kecamatan Bandung Wetan	
2 7 26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	65	3.435.668.239	57,22	1.973.218.713	-	-	-	-	-	-	57,22	5.408.886.952	Kecamatan Bandung Wetan	
2 11 25	Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	Persen	20	-	0	-	-	-	-	-	-	-	100	-	Kecamatan Bandung Wetan	
4 1 19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	Persen	100	13.304.500	0	-	-	-	-	-	-	-	100	13.304.500	Kecamatan Bandung Wetan	
2 7 28	Program Peningkatan Peran masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peran Kelembagaan, Masyarakat Dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persen	-	-	100	1.359.685.640	-	-	-	-	-	-	100	1.359.685.640	Kecamatan Bandung Wetan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	7 01 01	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	Persen	100	100	-	100	-	100	10.467.368.835	100	11.541.013.757	100	11.590.293.885	100	22.057.662.720	Kecamatan Bandung Wetan
	Program Penyeng-enggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	N/A	33.33	-	66.67	-	66.67	2.943.331.759	66.67	1.997.283.719	100	5.567.243.548	100	11.748.240.242	Kecamatan Bandung Wetan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat unggul	Persen	N/A	-	-	0	-	73,15	4.441.716.303	76,08	4.608.652.063	79,12	10.002.807.733	79,12	19.330.411.970	Kecamatan Bandung Wetan
	Program Koordinasi ketentrman dan Keteriban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	N/A	-	-	0	-	72,22	67.283.901	75	78.175.850	77,78	164.621.952	77,78	310.189.754	Kecamatan Bandung Wetan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi	Persen	100	100	917.140.805	100	830.343.262	-	-	-	-	-	-	100	1.747.484.067	Kecamatan Sumur Bandung
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik (non akumulasi)	Persen	100	100	556.800.403	100	575.615.330	-	-	-	-	-	-	100	1.132.415.733	Kecamatan Sumur Bandung
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	Persen	100	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	Kecamatan Sumur Bandung
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangny	Persen	100	100	46.200.000	0	-	-	-	-	-	-	-	100	46.200.000	Kecamatan Sumur Bandung
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	Persen	100	100	1.220.273.650	100	1.507.473.230	-	-	-	-	-	-	100	2.727.746.880	Kecamatan Sumur Bandung

Kode	Bidang Urusan dan Program dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD														
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.													
1	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	4	5	3	100	100	7	0	8	0	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-	16	100	17	2.440.547.300	18	Kecamatan Sumur Bandung
1	6	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persen	91,66	100	100	76.300.500	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	76.300.500	-	Kecamatan Sumur Bandung		
2	6	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Poin	78	78,64	78,64	1.070.610.000	83,58	1.062.334.628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,58	2.132.944.628	-	Kecamatan Sumur Bandung		
2	7	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Persen	100	100	100	344.596.050	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	344.596.050	-	Kecamatan Sumur Bandung		
2	7	2 Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	Unit	1	4	4	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	Kecamatan Sumur Bandung		
2	7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Persen	78,5	97,86	97,86	4.333.364.019	79,28	1.976.474.210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,28	6.309.838.229	-	Kecamatan Sumur Bandung		
2	11	Program Pemberdayaan KUMKM	Persen	86,15	100	100	12.626.150	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	12.626.150	-	Kecamatan Sumur Bandung		
4	1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	9.265.750	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	9.265.750	-	Kecamatan Sumur Bandung		

VII - 122

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pe- nanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	7	28	Persen	-	-	-	100	1.350.438.200	-	-	-	-	-	-	100	1.350.438.200	Kecamatan Sumur Bandung
7	01	01	Persen	100	100	-	100	-	100,00	10.805.256.515	100	11.550.647.283	100	11.599.968.547	100	33.955.872.344	Kecamatan Sumur Bandung
7	01	02	Persen	N/A	100,00	-	100,00	-	75,00	3.117.269.335	75,00	2.773.299.132	100	2.785.141.119	100	8.675.709.587	Kecamatan Sumur Bandung
7	01	03	Persen	N/A	-	-	-	-	75,00	5.024.262.600	77,5	4.922.114.495	80	4.943.131.924	80	14.889.509.019	Kecamatan Sumur Bandung
7	01	04	Persen	N/A	-	-	-	-	51,35	1.025.693.060	56,76	1.070.978.182	62,16	1.075.551.258	62,16	3.172.222.500	Kecamatan Sumur Bandung
4	5	1	Persen	100	100	1.233.447.765	100	1.078.773.655	-	-	-	-	-	-	100	2.312.221.420	Kecamatan Cibeunying Kidul
4	5	2	Persen	100	100	2.196.828.783	100	664.863.225	-	-	-	-	-	-	100	2.861.692.008	Kecamatan Cibeunying Kidul
1	3	42	Persen	100	100	2.912.909.827	100	2.078.842.518	-	-	-	-	-	-	100	4.991.752.345	Kecamatan Cibeunying Kidul

Kode	Bidang Urusan dan Program dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3 Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	4 Persen	5 100	6 90,32	7 1.761.748.000	8 -	9 -	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 90,32	17 1.761.748.000	18 Kecamatan Cibeunying Kidul
1	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	3 Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	4 Persen	5 91,66	6 100	7 303.484.500	8 -	9 -	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 100	17 303.484.500	18 Kecamatan Cibeunying Kidul
2	Program Pengadministrasian Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	3 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	4 Poin	5 78	6 79,4	7 2.643.914.600	8 84,49	9 2.589.704.450	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 84,37	17 5.233.619.050	18 Kecamatan Cibeunying Kidul
2	Program Pemberdayaan kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	3 Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	4 Persen	5 100	6 93,94	7 628.950.900	8 -	9 -	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 93,94	17 628.950.900	18 Kecamatan Cibeunying Kidul
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3 Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bdangnya	4 Persen	5 100	6 100	7 75.075.000	8 100	9 89.416.800	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 100	17 164.491.800	18 Kecamatan Cibeunying Kidul
2	Program Pemberdayaan Kewilayahan	3 Tingkat pemberdayaan lembaga kesejahteraan masyarakat	4 Persen	5 65	6 77,64	7 10.286.621.930	8 46,55	9 5.156.293.229	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 46,55	17 15.442.915.159	18 Kecamatan Cibeunying Kidul
2	Program Pemberdayaan KUMKM	3 Persentase Koperasi dan UKM Aktif	4 Persen	5 86,15	6 25	7 27.560.500	8 -	9 -	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 25	17 27.560.500	18 Kecamatan Cibeunying Kidul
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	4 Persen	5 100	6 100	7 37.621.800	8 -	9 -	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 100	17 37.621.800	18 Kecamatan Cibeunying Kidul

Kode	Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pe- nanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat Dalam Keamanan dan kenyamanan lingkungan	3 Peran Kelembagaan, Masyarakat Dalam Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	4 Persen	5 N/A	6 -	7 -	8 33,33	9 2.449.155.520	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 33,33	17 2.449.155.520	18 Kecamatan Cibeunying Kidul
2 7 28	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3 Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	Persen	100	100	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	42.958.659.352	Kecamatan Cibeunying Kidul
7 01 02	Program Penye- lenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3 Persentase Kelurahan Unggul	Persen	N/A	16,67	-	33,33	-	50	6.178.934.417	66,67	6.015.123.841	66,67	6.040.808.420	66,67	18.234.866.678	Kecamatan Cibeunying Kidul
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	N/A	-	-	-	-	80,95	10.716.200.000	82,86	10.717.961.061	83,81	10.763.726.754	83,81	32.197.887.815	Kecamatan Cibeunying Kidul
7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Urmum	3 Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	N/A	-	-	-	-	45,98	1.930.176.610	48,28	1.867.291.082	50,57	1.875.264.415	50,57	5.672.732.107	Kecamatan Cibeunying Kidul
4 5 1	Program pelayanan administrasi perkantoran	3 Cakupan Pelayanan Administrasi	Persen	100	100	1.685.862.023	100	1.053.578.013,00	-	-	-	-	-	-	100	2.739.440.036	Kecamatan Cibeunying Kaler
4 5 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3 Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	Persen	100	100	908.356.016	100	467.981.237	-	-	-	-	-	-	100	1.376.337.253	Kecamatan Cibeunying Kaler
4 5 3	Program peningkatan disiplin aparatur	3 Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	Persen	100	100	55.390.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	55.390.000	Kecamatan Cibeunying Kaler

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	3 Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnyanya	4 Persen	5 100	6 100	7 92.620.000	8 -	9 -	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 100	17 92.620.000	18 Kecamatan Cibeunying Kaler
4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	3	42 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persen	100	100	4.177.334.230	75	3.602.644.795	-	-	-	-	-	-	75	7.779.979.025	Kecamatan Cibeunying Kaler
1	5	15 Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persen	100	100	1.749.813.580	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.749.813.580	Kecamatan Cibeunying Kaler
2	6	20 Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Poin	80	86,56	1.721.268.220	87,67	1.777.629.900	-	-	-	-	-	-	87,67	3.498.898.120	Kecamatan Cibeunying Kaler
2	7	25 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Persen	78	100	575.324.822	-	-	-	-	-	-	-	-	100	575.324.822	Kecamatan Cibeunying Kaler
1	6	33 Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Persen	100	100	374.701.993	-	-	-	-	-	-	-	-	100	374.701.993	Kecamatan Cibeunying Kaler

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	7	26	Persen	80	80	5.203.044.768	15,98	2.507.591.576	-	-	-	-	-	-	15,98	7.710.636.344	Kecamatan Cibeunying Kaler
2	11	25	Persen	86,15	86,15	40.394.000	-	-	-	-	-	-	-	-	86,15	40.394.000	Kecamatan Cibeunying Kaler
4	1	19	Persen	100	100	44.827.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	44.827.000	Kecamatan Cibeunying Kaler
2	7	28	persen	-	-	-	50	1.645.942.361	-	-	-	-	-	-	50	1.645.942.361	Kecamatan Cibeunying Kaler
7	01	01	persen	100	100	-	100	-	100	11.513.654.075	100	13.202.266.773	100	13.258.640.453	100	37.974.561.301	Kecamatan Cibeunying Kaler
7	01	02	Persen	N/A	50,00	-	50	-	50	6.097.218.116	75	4.217.941.215	75	4.235.951.824	75	14.551.111.155	Kecamatan Cibeunying Kaler
7	01	03	Persen	N/A	-	-	-	-	79,30	5.541.323.960	82,76	5.945.461.732	86,21	5.970.848.853	86,21	17.457.634.545	Kecamatan Cibeunying Kaler
7	01	04	Persen	N/A	-	-	-	-	50	1.030.196.350	54,35	1.167.338.430	65,22	1.172.322.965	65,22	3.369.857.745	Kecamatan Cibeunying Kaler
4	5	1	Persen	100	100	1.859.902.641	100	1.552.521.784	-	-	-	-	-	-	100	3.412.424.425	Kecamatan Astanaanyar

Kode	Bidang Urusan dan Program dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	Persen	100	100	2.640.345.994	100	472.225.072	-	-	-	-	-	-	100	3.112.571.066	Kecamatan Astanaanyar
4	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	Persen	100	100	89.163.250	-	-	-	-	-	-	-	-	100	89.163.250	Kecamatan Astanaanyar
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidangny	Persen	100	100	99.640.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	99.640.000	Kecamatan Astanaanyar
1	3	42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	100	100	2.095.759.200	100	1.910.913.700	-	-	-	-	-	-	75	4.006.672.900	Kecamatan Astanaanyar
1	5	15	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	100	100	1.402.751.080	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.402.751.080	Kecamatan Astanaanyar
2	6	20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	82		1.398.510.050		48.042.500	-	-	-	-	-	-	87,67	1.446.552.550	Kecamatan Astanaanyar
2	7	25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	78	100	252.936.900	-	-	-	-	-	-	-	-	100	252.936.900	Kecamatan Astanaanyar
				1	4										4		

Kode	Bidang Urusan dan Program dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab														
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.												
1	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan	3	Persen	5	100	6	100	7	502.228.000	8	-	9	-	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-	16	100	17	502.228.000	18	Kecamatan Astanaanyar
2	Program Pemberdayaan Kewilayahan	3	Persen	75					5.173.254.806	15,98		2.468.158.250		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,98	7.641.413.056		Kecamatan Astanaanyar		
2	Program Pemberdayaan KUMKM	3	Persen	86,15	86,15				21.274.500	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,15	21.274.500		Kecamatan Astanaanyar			
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Persen	100	100				31.981.250	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	31.981.250		Kecamatan Astanaanyar			
2	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	3	persen	-					-	50		1.360.864.900		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	1.360.864.900		Kecamatan Astanaanyar			
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3	persen	100	100				-	100		-		100	12.441.182.791			100		13.478.015.243			100		13.535.566.368	39.454.764.403		Kecamatan Astanaanyar			
7	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3	Persen	N/A	50,00				-	83,33		-		83,33	3.927.220.591			100,00		3.643.632.750			100,00		3.659.191.062	11.230.044.402		Kecamatan Astanaanyar			
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3	Persen	N/A					-	-		-		71	6.759.858.000			75		6.640.177.273			78		6.668.530.830	20.068.566.103		Kecamatan Astanaanyar			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1 7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3 Persentase Siskamling RW Aktif	4 Persen	5 N/A	6 -	7 -	8 -	9 -	10 51	11 1.389.944.000	12 64	13 1.143.985.611	14 77	15 -	16 77	17 3.673.051.173	18 Kecamatan Astanaanyar
4 5 1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi	Persen	100	100	1.655.481.469	100	1.139.087.843	-	-	-	-	-	-	100	2.794.569.312	Kecamatan Bojongloa Kaler
4 5 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	Persen	100	100	600.485.810	100	632.993.960	-	-	-	-	-	-	100	1.233.479.770	Kecamatan Bojongloa Kaler
4 5 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	Persen	100	-	-	100	27.500.000	-	-	-	-	-	-	100	27.500.000	Kecamatan Bojongloa Kaler
4 5 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi Sesuai Bidang	Persen	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Bojongloa Kaler
1 3 42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik	Persen	100	100	1.768.487.900	100	1.708.628.400	-	-	-	-	-	-	100	3.477.116.300	Kecamatan Bojongloa Kaler
1 5 15	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	Persen	100	100	1.030.171.500	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.030.171.500	Kecamatan Bojongloa Kaler
2 6 20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Poin	78	81	1.803.187.200	83.83	1.722.074.000	-	-	-	-	-	-	83.83	3.525.261.200	Kecamatan Bojongloa Kaler

VII - 130

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	7	25	Persen	N/A	50	535.868.900	-	-	-	-	-	-	-	-	50	535.868.900	Kecamatan Bojongloa Kaler
			unit	1	1		-		-		-		-		1		
1	6	33	Persen	91,66	80	161.771.000	-	-	-	-	-	-	-	-	80	161.771.000	Kecamatan Bojongloa Kaler
2	7	26	Persen	84	64,79	5.819.313.100	73,15	3.651.860.290	-	-	-	-	-	-	73,15	9.471.173.390	Kecamatan Bojongloa Kaler
2	11	25	Persen	86,15	70	26.614.775	-	-	-	-	-	-	-	-	70	26.614.775	Kecamatan Bojongloa Kaler
4	1	19	Persen	25	100	39.003.500	-	-	-	-	-	-	-	-	100	39.003.500	Kecamatan Bojongloa Kaler
2	7	28	persen	N/A	-	-	50	1.877.925.000	-	-	-	-	-	-	50	1.877.925.000	Kecamatan Bojongloa Kaler

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3 Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	4 persen	5 100	6 100	7 -	8 100	9 -	10 100	11 12.133.343.030	12 100	13 12.838.902.438	14 100	15 12.893.724.551	16 100	17 37.865.970.019	18 Kecamatan Bojongloa Kaler
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3 Persentase Kelurahan Unggul	Persen	N/A	100,00	-	100,00	-	100	3.826.770.631	100	4.073.051.396	100	4.090.443.326	100	11.990.265.353	Kecamatan Bojongloa Kaler
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	N/A	-	-	-	-	60	6.630.117.806	80	6.332.041.389	100	6.359.079.206	100	19.321.238.402	Kecamatan Bojongloa Kaler
7 01 04	Program Koordinasi Ketentrangan dan Ketertiban Umum	3 Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	N/A	-	-	-	-	100	1.318.290.000	100	1.041.868.980	100	1.046.317.760	100	3.406.476.740	Kecamatan Bojongloa Kaler
4 5 1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	3 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	1.734.254.784	100	1.931.038.212	-	-	-	-	-	-	100	3.665.292.996	Kecamatan Bojongloa Kidul
4 5 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3 Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	Persen	100	100	816.970.825	100	1.364.901.623	-	-	-	-	-	-	100	2.181.872.448	Kecamatan Bojongloa Kidul
4 5 3	Program peningkatan disiplin aparatur	3 Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	Persen	100	100	-	100	43.489.027	-	-	-	-	-	-	100	43.489.027	Kecamatan Bojongloa Kidul
4 5 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	3 Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidang	Persen	100	100	101.354.000	100	85.481.980	-	-	-	-	-	-	100	186.835.980	Kecamatan Bojongloa Kidul
1 3 42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	3 Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik	Persen	100	100	1.958.297.530	100	2.377.614.745	-	-	-	-	-	-	100	4.335.912.275	Kecamatan Bojongloa Kidul

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketertarikan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	Persen	100	100	1.383.047.100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.383.047.100	Kecamatan Bojongloa Kidul
2	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Poin	80	82,71	901.480.540	83	491.533.995	-	-	-	-	-	-	83	1.393.014.535	Kecamatan Bojongloa Kidul
2	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	1 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	Persen	na	100	466.306.478	-	-	-	-	-	-	-	-	100	466.306.478	Kecamatan Bojongloa Kidul
		2 Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	unit	1	4		-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
1	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	91,66	91,66	264.782.525	-	-	-	-	-	-	-	-	91,66	264.782.525	Kecamatan Bojongloa Kidul
2	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	90	32,59	5.976.438.078	60	3.351.363.697	-	-	-	-	-	-	60	9.327.801.775	Kecamatan Bojongloa Kidul
2	Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	Persen	86,15	86,15	19.975.000	-	-	-	-	-	-	-	-	86,15	19.975.000	Kecamatan Bojongloa Kidul
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	Persen	25	25	66.254.600	-	-	-	-	-	-	-	-	25	66.254.600	Kecamatan Bojongloa Kidul

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	7	28	Persentase Peran Kelembagaan, Masyarakata Dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	-	-	80	2.108.994.872	-	-	-	-	-	-	80	2.108.994.872	Kecamatan Bojongloa Kidul
7	01	01	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	100	100	100	100	-	100	14.796.758.162	100	16.242.207.005	100	16.311.561.229	100	47.350.526.397	Kecamatan Bojongloa Kidul
7	01	02	Persentase Kelurahan Unggul	N/A	50,00	-	66,67	-	66,67	4.578.946.675	83,33	3.695.878.803	100,00	3.711.660.205	100,00	11.986.485.683	Kecamatan Bojongloa Kidul
7	01	03	Persentase lembaga masyarakat Desa dan Kelurahan	N/A	-	-	-	-	76,36	6.318.204.000	78	6.386.173.345	80	6.413.442.305	80	19.117.819.650	Kecamatan Bojongloa Kidul
7	01	04	Persentase Siskamling RW Aktif	N/A	-	-	-	-	56,82	1.398.372.470	65,91	1.251.254.038	72,73	1.256.596.893	72,73	3.906.223.401	Kecamatan Bojongloa Kidul
4	5	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	1.893.923.963	100	1.712.834.131	-	-	-	-	-	-	100	3.606.758.094	Kecamatan Babakan Ciparay
4	5	2	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100	100	1.061.419.980	100	696.915.352	-	-	-	-	-	-	100	1.758.335.332	Kecamatan Babakan Ciparay
4	5	3	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100	100	29.964.000	100	37.510.000	-	-	-	-	-	-	100	67.474.000	Kecamatan Babakan Ciparay

VII - 134

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	5		Persen	100	100	71.016.000	100	68.750.000	-	-	-	-	-	-	100	139.766.000	Kecamatan Babakan Ciparay
1	3	42	Persen	100	100	2.485.943.700	100	2.307.435.220	-	-	-	-	-	-	100	4.793.378.920	Kecamatan Babakan Ciparay
1	5	15	Persen	N/A	75,44	1.260.001.600	-	-	-	-	-	-	-	-	75,44	1.260.001.600	Kecamatan Babakan Ciparay
1	6	33	Persen	N/A	100	499.613.250	-	-	-	-	-	-	-	-	100	499.613.250	Kecamatan Babakan Ciparay
2	6	20	Poin	100	81,83	1.731.156.000	83	1.725.118.200	-	-	-	-	-	-	83	3.456.274.200	Kecamatan Babakan Ciparay
2	7	25	Persen	76	100	308.502.500	-	-	-	-	-	-	-	-	100	308.502.500	Kecamatan Babakan Ciparay
2	7	26	Nilai	77,85	82,4	6.164.348.613	81	3.198.831.370	-	-	-	-	-	-	81	9.363.179.983	Kecamatan Babakan Ciparay
2	11	25	Persen	100	100	141.663.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	141.663.000	Kecamatan Babakan Ciparay

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4 1 19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	4 Persen	5 100	6 100	7 101.967.500	8 -	9 -	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 100	17 101.967.500	18 Kecamatan Babakan Ciparay
2 7 28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Peran Masyarakat Dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persen		50	2.311.747.850	50	2.365.009.250	-	-	-	-	-	-	50	4.676.757.100	Kecamatan Babakan Ciparay
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	Persen	100	100	-	100	-	100	14.078.013.356	100	14.573.029.110	100	14.635.255.944	100	43.286.298.410	Kecamatan Babakan Ciparay
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	N/A	50	-	50,00	-	50,00	4.680.295.077	83,33	4.675.847.373	100,00	4.695.813.242	100,00	14.051.955.692	Kecamatan Babakan Ciparay
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	N/A	-	-	-	-	80	7.608.862.898	82	7.544.902.603	82,5	7.577.119.337	82,5	22.730.884.839	Kecamatan Babakan Ciparay
7 01 04	Program Koordinasi Ketentrangan dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	N/A	-	-	-	-	50,8	1.192.983.900	52,6	1.194.089.588	61,4	1.199.188.351	61,4	3.586.261.839	Kecamatan Babakan Ciparay
4 5 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	1.903.103.124	100	1.752.645.485	-	-	-	-	-	-	100	3.655.748.609	Kecamatan Bandung Kulon
4 5 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	100	100	1.232.655.300	100	1.047.510.998	-	-	-	-	-	-	100	2.280.166.298	Kecamatan Bandung Kulon
4 5 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	Persen	100	100	49.997.750	100	62.832.000	-	-	-	-	-	-	100	112.829.750	Kecamatan Bandung Kulon

VII - 136

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	5	5	Persen	100	100	103.352.500	100	85.533.525	-	-	-	-	-	-	100	188.886.025	Kecamatan Bandung Kulon
1	3	42	Persen	100	100	2.114.580.204	100	1.879.259.700	-	-	-	-	-	-	100	3.993.839.904	Kecamatan Bandung Kulon
2	6	20	nilai	82,15	80,62	2.232.524.266	83,16	2.338.579.750	-	-	-	-	-	-	83,16	4.571.104.016	Kecamatan Bandung Kulon
1	5	15	Persen	100	100	1.781.389.124	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.781.389.124	Kecamatan Bandung Kulon
1	6	33	Persen	84,01	100	710.427.387	-	-	-	-	-	-	-	-	100	710.427.387	Kecamatan Bandung Kulon
2	7	25	Persen	N/A	100	163.865.471	-	-	-	-	-	-	-	-	100	163.865.471	Kecamatan Bandung Kulon
2	7	26	Persen	90,13	100	6.524.459.311	100	5.029.498.598	-	-	-	-	-	-	100	11.553.957.909	Kecamatan Bandung Kulon
2	11	25	Persen	80	100	59.803.468	-	-	-	-	-	-	-	-	100	59.803.468	Kecamatan Bandung Kulon

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	19	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	25.256.550	-	-	-	-	-	-	-	-	100	25.256.550	Kecamatan Bandung Kulon
2	7	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat Dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persen	-	-	-	100	2.369.846.501	-	-	-	-	-	-	100	2.369.846.501	Kecamatan Bandung Kulon
7	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	100	100	-	100	-	100	19.475.355.775	100	20.218.135.924	100	20.304.467.364	100	59.997.959.063	Kecamatan Bandung Kulon
7	01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	N/A	25,00	-	50,00	-	62,50	5.464.934.718	75,00	5.141.691.245	100,00	5.163.646.267	100,00	15.770.272.229	Kecamatan Bandung Kulon
7	01	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	N/A	-	-	-	-	84	9.358.805.713	84,5	9.495.800.111	85	9.536.347.177	85	28.390.953.001	Kecamatan Bandung Kulon
7	01	Program Koordinasi Ketentrangan dan Ketertiban Umum	Persen	N/A	-	-	-	-	70,75	1.776.203.960	72,70	1.782.094.377	72,85	1.789.703.920	72,85	5.348.002.256	Kecamatan Bandung Kulon
4	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	-	100	1.319.633.637	-	-	-	-	-	-	100	1.319.633.637	Kecamatan Regol
4	5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	-	100	947.228.428	-	-	-	-	-	-	100	947.228.428	Kecamatan Regol

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab																	
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																			
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.															
1	3	42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	3	Persentase minimal ruas jalan/saluran dan RTH dalam kondisi terpelihara	4	Persen	5	100	82,89	2.703.750.550	8	75	2.735.953.100	9	-	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-	16	75	5.439.703.650	17	18	Kecamatan Regol
1	5	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	4	Persen	5	100	100	1.493.311.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.493.311.080	-	Kecamatan Regol
1	6	33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	3	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	4	Persen	5	100	100	446.667.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	446.667.500	-	Kecamatan Regol	
2	6	20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	4	Poin	5	79,45	83,48	1.752.709.000	84,51	1.893.000.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,51	3.645.709.500	-	Kecamatan Regol	
2	7	25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	4	Persen	5	N/A	100	90.985.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	90.985.000	-	Kecamatan Regol		
2	7	26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	3	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	4	Persen	5	75	93,83	7.548.928.721	77	3.842.655.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	11.391.584.161	-	Kecamatan Regol		
2	11	25	Program Pemberdayaan UKM	3	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	4	Persen	5	-	100	35.359.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	35.359.200	-	Kecamatan Regol		
4	1	19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	4	Persen	5	100	100	54.181.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	54.181.000	-	Kecamatan Regol		

Kode	Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	7 28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persen	-	-	-	19	1.748.853.000	-	-	-	-	-	-	19	1.748.853.000	Kecamatan Regol
7 01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	100	100	-	100	-	100	14.011.040.522	100	15.535.346.453	100	15.601.682.383	100	45.148.069.358	Kecamatan Regol
7 01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai	N/A	14,29	-	28,57	-	42,86	5.890.586.646	57,14	4.897.938.444	71,43	4.918.852.641	71,43	15.707.377.731	Kecamatan Regol
7 01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	N/A	-	-	-	-	66,67	8.106.691.000	67,9	8.281.783.326	69,14	8.317.146.541	69,14	24.705.620.867	Kecamatan Regol
7 01	04	Program Koordinasi Ketentrangan dan Ketertiban Umum	Persen	N/A	-	-	-	-	76,67	1.876.103.800	85	1.602.941.793	91,67	1.609.786.354	91,67	5.088.831.947	Kecamatan Regol
4 5	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	7.687.572.678	100	5.863.698.559	-	-	-	-	-	-	100	13.551.271.237	Kecamatan Lengkong
4 5	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	5.003.481.086	100	4.655.521.338	-	-	-	-	-	-	100	9.659.002.424	Kecamatan Lengkong
4 5	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	100	203.900.486	-	-	-	-	-	-	-	-	100	203.900.486	Kecamatan Lengkong

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab																	
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																			
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.															
1	3	42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	3	Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	4	Persen	5	100	80,17	2.772.454.430	8	100	7.536.446.480	9	-	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-	16	100	10.308.900.910	17	18	Kecamatan Lengkong
1	5	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	4	Persen	5	100	100	1.391.513.250	8	100	2.131.812.000	9	-	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-	16	100	3.523.325.250	17	18	Kecamatan Lengkong
1	6	33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	3	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	4	Persen	5	91,66	100	539.851.700	8	100	1.432.117.000	9	-	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-	16	100	1.971.968.700	17	18	Kecamatan Lengkong
2	6	20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	4	Poin	5	78	82,11	2.087.001.960	8	82,96	3.684.723.200	9	-	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-	16	82,96	5.771.725.160	17	18	Kecamatan Lengkong
2	7	25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	4	Persen	5	50	100	236.028.414	8	100	110.180.500	9	-	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-	16	100	346.208.914	17	18	Kecamatan Lengkong
2	7	26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	3	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	4	Persen	5	54,54	70,11	8.064.563.952	8	84,38	7.868.997.242	9	-	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-	16	84,38	15.933.561.194	17	18	Kecamatan Lengkong
2	11	25	Program Pemberdayaan KUMKM	3	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	4	Persen	5	86,15	58,48	19.922.700	8	100	23.431.500	9	-	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-	16	100	43.354.200	17	18	Kecamatan Lengkong

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 1 19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	Persen	100	100	58.060.200	100	121.848.000	-	-	-	-	-	-	100	179.908.200	Kecamatan Lengkong
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	Persen	100	100	-	100	-	100	16.495.172.971	100	18.121.313.947	100	18.198.691.958	100	52.815.178.876	Kecamatan Lengkong
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	N/A	71,43	-	71,43	-	85,71	5.044.681.801	100,00	5.473.200.311	100,00	5.496.570.877	100,00	16.014.452.989	Kecamatan Lengkong
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	N/A	-	-	-	-	67,78	8.607.058.327	69,75	8.003.435.368	70,58	8.037.610.037	70,58	24.648.103.732	Kecamatan Lengkong
7 01 04	Program Koordinasi Ketentrangan dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	N/A	-	-	-	-	55,92	2.123.996.592	59,87	1.254.545.679	64,03	1.259.902.589	64,03	4.638.444.859	Kecamatan Lengkong
4 5 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	2.050.965.483	88,34	2.216.249.717	-	-	-	-	-	-	88,34	4.267.215.200	Kecamatan Batununggal
4 5 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Persen	100	100	531.397.619	79,67	609.860.452	-	-	-	-	-	-	79,67	1.141.258.071	Kecamatan Batununggal
4 5 3	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	Persen	100	100	3.412.574.176	-	-	-	-	-	-	-	-	100	3.412.574.176	Kecamatan Batununggal

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pe- nanggung jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1 5 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3 Cakupan pemeliharaan ketertarikan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	4 Persen	5 100	6 100	7 1.856.913.000	8 -	9 -	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 -	16 100	17 1.856.913.000	18 Kecamatan Batununggal
1 6 33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	80 Persen	80 Persen	86,33	591.174.443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,33	591.174.443	Kecamatan Batununggal
2 6 20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	81 Poin	81 Poin	82,33	2.586.110.942	84,3	2.565.571.800	-	-	-	-	-	-	-	84,3	5.151.682.742	Kecamatan Batununggal
2 7 26	Program Pemberdayaan kewilayahan	78 Persen	78 Persen	82,33	10.162.400.484	68,9	5.479.208.420	-	-	-	-	-	-	-	68,9	15.641.608.904	Kecamatan Batununggal
2 7 25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	90 Persen	90 Persen	na	235.388.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	235.388.000	Kecamatan Batununggal
2 11 25	Program Pemberdayaan KUMKM	50 Persen	50 Persen	100	48.102.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	48.102.000	Kecamatan Batununggal
4 1 19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	50 Persen	50 Persen	100	60.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	60.150.000	Kecamatan Batununggal

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	4 05	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	Persen	-	-	-	98,89	98.890.000	-	-	-	-	-	-	98,89	98.890.000	Kecamatan Batununggal
1	03	42	Persen	-	-	-	96,63	2.740.499.900	-	-	-	-	-	-	96,63	2.740.499.900	Kecamatan Batununggal
2	7	28	N/A	-	-	-	86,08	1.883.659.000	-	-	-	-	-	-	86,08	1.883.659.000	Kecamatan Batununggal
	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat Dalam Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Presentase Peran Kelembagaan, Masyarakat Dalam Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Bulan	-	-	-	5	410.300.000	-	-	-	-	-	-	5	410.300.000	Kecamatan Batununggal
7	01	01	Persen	100	-	-	88,34	-	100	18.137.780.936	100	18.801.985.755	100	18.882.270.234	100	55.822.036.925	Kecamatan Batununggal
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	Persen	100	-	-	100	-	100	18.137.780.936	100	18.801.985.755	100	18.882.270.234	100	55.822.036.925	Kecamatan Batununggal
7	01	02	Persen	N/A	25,00	-	50,00	-	62,50	6.494.222.741	75,00	6.450.445.811	100,00	6.477.989.214	100,00	19.422.657.766	Kecamatan Batununggal
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	N/A	25,00	-	50,00	-	62,50	6.494.222.741	75,00	6.450.445.811	100,00	6.477.989.214	100,00	19.422.657.766	Kecamatan Batununggal
7	01	03	Persen	N/A	-	-	-	-	72,24	10.956.846.109	82,38	10.890.113.905	87,15	10.936.614.691	87,15	32.783.574.704	Kecamatan Batununggal
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	N/A	-	-	-	-	72,24	10.956.846.109	82,38	10.890.113.905	87,15	10.936.614.691	87,15	32.783.574.704	Kecamatan Batununggal
7	01	04	Persen	N/A	-	-	-	-	72,28	1.505.870.350	79,52	1.492.702.360	81,93	1.499.076.199	81,93	4.497.648.909	Kecamatan Batununggal
	Program Koordinasi Ketentrangan dan Keteriban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	N/A	-	-	-	-	72,28	1.505.870.350	79,52	1.492.702.360	81,93	1.499.076.199	81,93	4.497.648.909	Kecamatan Batununggal

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	5	1	Persn	100			100	1.185.222.771	-	-	-	-	-	-	100	1.185.222.771	Kecamatan Ujung-berung
4	5	2	Persn	100			100	895.216.267	-	-	-	-	-	-	100	895.216.267	Kecamatan Ujung-berung
4	5	3	Persn	100			100	83.737.500	-	-	-	-	-	-	100	83.737.500	Kecamatan Ujung-berung
4	5	5	Persn	100			100	91.080.000	-	-	-	-	-	-	100	91.080.000	Kecamatan Ujung-berung
1	5	15	Persn	70	100	1.071.784.200	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.071.784.200	Kecamatan Ujung-berung
4	1	19	Persn	25	100	34.721.750	-	-	-	-	-	-	-	-	100	34.721.750	Kecamatan Ujung-berung
2	6	20	Poin	83	85,96	1.511.922.500	85,68	1.513.387.550	-	-	-	-	-	-	85,68	3.025.310.050	Kecamatan Ujung-berung
2	7	25	Persn	75	120	70.965.000	-	-	-	-	-	-	-	-	120	70.965.000	Kecamatan Ujung-berung
			Unit	15	18		-		-	-	-	-	-	-	18		

Kode	Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah nanggung jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	25	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	11	Program Pemberdayaan KUMKM	Persen	86,15	86,32	8.684.000	-	-	-	-	-	-	-	-	86,32	8.684.000	Kecamatan Ujung-berung
2	7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Persen	75	98,9	6.940.069.938	61,16	2.041.132.505	-	-	-	-	-	-	61,16	8.981.202.443	Kecamatan Ujung-berung
1	6	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Persen	91,66	100	409.013.585	-	-	-	-	-	-	-	-	100	409.013.585	Kecamatan Ujung-berung
		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persen	100	100	2.150.211.100	100	2.286.716.050	-	-	-	-	-	-	100	4.436.927.150	Kecamatan Ujung-berung
2	7	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Dalam masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persen	-	-	-	89,83	1.488.808.730	-	-	-	-	-	-	89,83	1.488.808.730	Kecamatan Ujung-berung
7	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	100		-	100	-	100	13.879.403.835	100	14.931.680.112	100	14.995.438.386	100	43.806.522.333,5	Kecamatan Ujung-berung
7	01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	N/A	40,00	-	40,00	-	60	4.930.440.287	80	4.346.280.175	100	4.364.838.791	100	13.641.559.253,4	Kecamatan Ujung-berung
7	01	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	N/A	-	-	-	-	60,12	7.481.331.800	70	7.502.248.760	80	7.534.283.362	80	22.517.863.922,8	Kecamatan Ujung-berung

VII - 146

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1 7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3 Persentase Siskamling RW Aktif	4 Persen	5 N/A	6 -	7 -	8 -	9 -	10 91.525 42373	11 981.390.250	12 94,92	13 949.282.398	14 100	15 953.335.834	16 100	17 2.884.008.482,8	18 Kecamatan Ujung-berung
4 5 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	86,07	1.374.749.547	83	1.498.719.418	-	-	-	-	-	-	83	2.873.468.965	Kecamatan Ujung-berung
4 5 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana aparaturnya dalam kondisi baik	Persen	100	77,14	650.663.130	83	579.608.150	-	-	-	-	-	-	83	1.230.271.280	Kecamatan Ujung-berung
4 5 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	Persen	100	0	-	83	29.645.000	-	-	-	-	-	-	83	29.645.000	Kecamatan Ujung-berung
4 5 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparaturnya memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	99,37	59.620.000	83	74.521.700	-	-	-	-	-	-	83	134.141.700	Kecamatan Ujung-berung
1 3 42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	Persen	53,23	53,23	2.093.525.350	83	1.939.301.020	-	-	-	-	-	-	83	4.032.826.370	Kecamatan Ujung-berung
1 5 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	Persen	82	84,71	1.321.516.200	-	-	-	-	-	-	-	-	84,71	1.321.516.200	Kecamatan Ujung-berung
1 6 33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	50	50	579.753.320	-	-	-	-	-	-	-	-	50	579.753.320	Kecamatan Ujung-berung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah nanggung jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	6	20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Poin	81,14	2.742.961.259	83	2.703.935.500	-	-	-	-	-	5.446.896.759	Kecamatan Ujung-berung
2	7	25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	1	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persen	50	374.484.880	-	-	-	-	-	-	50	374.484.880	Kecamatan Kiara-condong
				2	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/kecamatan	Unit	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
2	7	26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	80	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	100	9.451.046.253	43	5.319.582.485	-	-	-	-	43	14.770.628.738	Kecamatan Kiara-condong
2	11	25	Program Pemberdayaan KUMKM	50	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	Persen	50	41.074.690	-	-	-	-	-	-	50	41.074.690	Kecamatan Kiara-condong
2	7	28	Program Peningkatan Peran masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	-	-	50	2.507.403.260	-	-	-	-	50	2.507.403.260	Kecamatan Kiara-condong
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	Persen	86,07	-	83,23	-	90	13.502.338.766	90	14.631.734.322	90	42.703.595.548	Kecamatan Kiara-condong
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	N/A	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	33,33	-	50,00	-	66,67	6.394.676.889	83,33	5.956.245.393	100	18.281.842.645	Kecamatan Kiara-condong

VII - 148

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	N/A	-	-	-	-	74	10.419.403.066	75	10.471.059.861	76	10.515.771.287	76	31.406.234.214	Kecamatan Kiara-condong
7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	N/A	-	-	-	-	95,29	1.921.299.221	96,47	1.669.567.306	98,82	1.676.696.358	98,82	5.267.562.886	Kecamatan Kiara-condong
4 5 1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi	Persen	100	100	1.526.977.783	94,14	1.249.225.147,00	-	-	-	-	-	-	100	2.776.202.930	Kecamatan Arcamanik
4 5 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	Persen	100	100	878.209.912	92,88	690.498.035	-	-	-	-	-	-	100	1.568.707.947	Kecamatan Arcamanik
4 5 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	Persen	100	100	-	100	46.722.000	-	-	-	-	-	-	100	46.722.000	Kecamatan Arcamanik
4 5 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	Persen	100	100	45.375.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	45.375.000	Kecamatan Arcamanik
1 3 42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase pemeliharaan minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik	Persen	100	100	1.767.029.250	100	1.788.493.500	-	-	-	-	-	-	75	3.555.522.750	Kecamatan Arcamanik
1 5 15	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	Persen	100	100	1.100.760.250	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.100.760.250	Kecamatan Arcamanik
2 6 20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Poin	80	86,56	1.376.457.618	80,87	1.373.077.000	-	-	-	-	-	-	87,67	2.749.534.618	Kecamatan Arcamanik

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah nanggung jawab	
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
1	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	3	4	5	78	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		100				154.534.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat	2	unit	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	Kecamatan Arcamanik
2		100				404.049.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan		Persen	100		100	404.049.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	404.049.000	Kecamatan Arcamanik
2	Program Pemberdayaan Kewilayahan		Persen	100		94,82	6.073.122.723	63,68	3.188.963.982	-	-	-	-	-	-	15,98	9.262.086.705	Kecamatan Arcamanik
2	Program Pemberdayaan KUMKM		Persen	86,15		86,15	48.625.000	-	-	-	-	-	-	-	-	86,15	48.625.000	Kecamatan Arcamanik
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Persen	100		100	12.790.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	12.790.000	Kecamatan Arcamanik
2	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan		persen	-		-	-	97,65	1.707.266.725	-	-	-	-	-	-	50	1.707.266.725	Kecamatan Arcamanik
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		persen	100		100	-	94,14	-	100	111.669.153.207	100	12.192.430.489	100	12.244.492.167	100	36.106.075.862	Kecamatan Arcamanik

VII - 150

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	N/A	50,00	-	50,00	-	50,00	3.293.329.395	75	3.316.519.969	100,00	3.330.681.509	100,00	9.940.530.873	Kecamatan Arcamanik
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	N/A	-	-	-	-	69,98	6.589.781.612	75,69	6.565.844.046	81,4	6.593.880.200	81,4	19.749.505.858	Kecamatan Arcamanik
7 01 04	Program Koordinasi Ketentrangan dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	N/A	-	-	-	-	50	1.200.552.500	54,35	1.055.964.697	65,22	1.060.473.667	65,22	3.316.990.864	Kecamatan Arcamanik
4 5 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	1.331.420.123	100	1.262.303.724	-	-	-	-	-	-	100	2.593.723.847	Kecamatan Cibiru
4 5 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	100	100	465.126.746	100	366.288.750	-	-	-	-	-	-	100	831.415.496	Kecamatan Cibiru
4 5 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bdnangnya	Persen	100	100	81.804.000	100	39.676.000	-	-	-	-	-	-	100	121.480.000	Kecamatan Cibiru
1 3 42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	Persen	100	100	1.764.054.313	100	1.777.809.050	-	-	-	-	-	-	100	3.541.863.363	Kecamatan Cibiru
1 5 15	Program Peningkatan Keamanan dan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	Persen	100	100	1.617.342.700	100	-	-	-	-	-	-	-	100	1.617.342.700	Kecamatan Cibiru

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab																				
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																						
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.																		
1	6	33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	3	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	4	Persen	5	91,66	6	100	7	88.785.000	8	-	9	-	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-	16	100	17	88.785.000	18	Kecamatan Cibiru		
2	6	20	Program Peng-administrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	2	Poin	78	81,77	3	83,9	4	1.436.684.000	5	83,9	6	1.448.338.000	7	-	8	-	9	-	10	-	11	-	12	-	13	-	14	83,9	15	2.885.022.000	16	Kecamatan Cibiru
2	7	25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	2	1. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 2. Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	3	Persen	50	83,33	4	5	5	496.099.300	6	83,33	7	-	8	-	9	-	10	-	11	-	12	-	13	-	14	83,33	15	496.099.300	16	Kecamatan Cibiru		
2	7	26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	1	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	2	Persen	54,54	62,12	3	62,12	4	6.391.785.978	5	94,70	6	2.648.636.370	7	-	8	-	9	-	10	-	11	-	12	-	13	-	14	94,70	15	9.040.422.348	16	Kecamatan Cibiru
2	11	25	Pemberdayaan KUMKM	1	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	2	Persen	86,15	98,14	3	98,14	4	21.012.000	5	-	6	-	7	-	8	-	9	-	10	-	11	-	12	-	13	-	14	98,14	15	21.012.000	16	Kecamatan Cibiru
4	1	19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	2	Persen	100	100	3	100	4	31.639.763	5	-	6	-	7	-	8	-	9	-	10	-	11	-	12	-	13	-	14	100	15	31.639.763	16	Kecamatan Cibiru
2	7	28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	1	Persentase Peran Kelembagaan, Masyarakat Dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2	Persen	-	-	3	-	4	-	5	75	6	2.109.319.800	7	-	8	-	9	-	10	-	11	-	12	-	13	-	14	75	15	2.109.319.800	16	Kecamatan Cibiru

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	persen	100	100	-	100	-	100,00	11.931.674.181	100	12.126.843.365	100,00	12.178.624.986	100,00	36.237.142.532	Kecamatan Cibiru
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	N/A	50,00	-	50,00	-	50,00	2.971.959.798	75	3.111.736.780	100,00	3.125.023.896	100,00	9.208.720.475	Kecamatan Cibiru
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat kemasyarakatan unggul	Persen	N/A	-	-	-	-	80,50	6.717.293.500	82	6.698.069.757	83,50	6.726.670.515	83,50	20.142.033.772	Kecamatan Cibiru
7 01 04	Program Koordinasi Ketentrangan dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	N/A	-	-	-	-	50,94	1.075.211.050	58.490 56604	1.129.821.716	66,04	1.134.646.055	66,04	3.339.678.821	Kecamatan Cibiru
4 5 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	1.420.519.335	100	1.526.600.152	-	-	-	-	-	-	100	2.947.119.487	Kecamatan Antapani
4 5 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Persen	100	100	576.974.980	100	710.843.410	-	-	-	-	-	-	100	1.287.818.390	Kecamatan Antapani
4 5 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	Persen	100	100	-	100	31.706.994	-	-	-	-	-	-	100	31.706.994	Kecamatan Antapani
4 05 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-	-	-	-	100	49.115.000	-	-	-	-	-	-	100	49.115.000	Kecamatan Antapani

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah nanggung jawab																			
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																					
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.																	
1	3	42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	3	Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	4	Persen	5	100	6	100	7	1.227.720.769	8	100	9	1.232.000.940	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-	16	100	17	2.459.721.709	18	Kecamatan Antapani	
1	5	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	4	Persen	5	100	6	100	7	972.749.901	8	100	9	1.148.100.530	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-	16	100	17	2.120.850.431	18	Kecamatan Antapani	
1	6	33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	3	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	4	Persen	5	100	6	100	7	49.081.350	8	100	9	351.167.500	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-	16	100	17	400.248.850	18	Kecamatan Antapani	
2	6	20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	4	Poin	5	91,66	6	83,61	7	1.687.525.000	8	86,08	9	1.616.897.400	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-	16	86,08	17	3.304.422.400	18	Kecamatan Antapani	
2	7	25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	3	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/ Kecamatan	4	Unit	5	1	6	4	445.595.600	7	100	8	40.411.200	9	-	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-	16	100	17	486.006.800	18	Kecamatan Antapani
2	7	26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	3	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	4	Persen	5	78,5	6	88,49	7	7.249.848.745	8	75,24	9	3.823.118.297	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-	16	75,24	17	11.072.967.042	18	Kecamatan Antapani	
2	11	25	Program Pemberdayaan KUMKM	3	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	4	Persen	5	86,15	6	100	7	34.899.000	8	100	9	875.000	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-	16	100	17	35.774.000	18	Kecamatan Antapani	
4	1	19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Persentase dokumen pembangunan yang disusun tepat waktu	4	Persen	5	25	6	100	7	50.596.000	8	100	9	48.299.500	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-	16	100	17	98.895.500	18	Kecamatan Antapani	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	Persen	100	100	-	100	-	100	10.814.323.460	100	11.635.941.823	100	11.685.627.294	100	34.135.892.577	Kecamatan Antapani
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	N/A	50,00	-	75,00	-	50	3.842.182.405	75	3.789.999.035	100	3.806.182.330	100	11.438.363.770	Kecamatan Antapani
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan unggul	Persen	N/A	-	-	-	-	80,50	7.468.246.000	81,00	7.583.144.950	81,50	7.615.524.978	81,50	22.666.915.928	Kecamatan Antapani
7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	N/A	-	-	-	-	76,00	2.147.104.748	78,00	1.600.149.552	80,00	1.606.982.190	80,00	5.354.236.490	Kecamatan Antapani
4 5 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	1.589.275.393	100	1.792.963.657	-	-	-	-	-	-	100	3.382.239.050	Kecamatan Rancasari
4 5 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	100	100	380.127.230	100	461.525.200	-	-	-	-	-	-	100	841.652.430	Kecamatan Rancasari
4 5 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	Persen	100	100	30.745.000	100	-	-	-	-	-	-	-	100	30.745.000	Kecamatan Rancasari
4 5 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	100	62.480.000	100	64.979.200	-	-	-	-	-	-	100	127.459.200	Kecamatan Rancasari
1 3 42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	Persen	100	100	1.419.674.030	100	1.173.138.431	-	-	-	-	-	-	100	2.592.812.461	Kecamatan Rancasari

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah bertanggung jawab						
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD								
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.				
1	15	Program Peningkatan ketenteraman dan kenyamanan Lingkungan	4	5	100	100	954.948.800	100	1.057.365.480	-	-	-	-	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Kecamatan Rancasari
1	33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persen	91,66	100	383.788.685	88,47	336.763.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,47	720.551.785	Kecamatan Rancasari
2	6	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Poin	78	84,8	1.884.390.200	89,59	1.773.152.190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,59	3.657.542.390	Kecamatan Rancasari
2	7	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Persen	N/A	94,3	101.639.025	100	115.941.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	217.580.375	Kecamatan Rancasari
2	7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Persen	70	86,04	6.320.946.634	85,03	3.910.579.897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,03	10.231.526.531	Kecamatan Rancasari
2	11	Program Pemberdayaan KUMKM	Persen	86,15	100	7.779.200		5.599.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13.378.200	Kecamatan Rancasari
4	1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	32.195.000	100	27.780.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	59.975.220	Kecamatan Rancasari

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 05 01	Program Perlindungan Sosial Bencana	Tersampainya informasi penanganan Covid-19	Persen	N/A	0	-	98,61	556.862.700	-	-	-	-	-	-	98,61	556.862.700	Kecamatan Rancasari
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	Persen	100	100	-	100	-	100	11.664.215.352	100	12.450.591.790	100	12.503.755.817	100	36.618.562.959	Kecamatan Rancasari
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	N/A	75,00	-	75,00	-	75	3.941.980.498	100,00	3.521.656.380	100,00	3.536.693.853	100,00	11.000.330.731	Kecamatan Rancasari
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	N/A	-	-	-	-	77	6.484.810.000	78	6.611.426.100	79	6.639.656.889	79	19.735.892.989	Kecamatan Rancasari
7 01 04	Program Koordinasi Ketentrangan dan Keteriban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	N/A	-	-	-	-	70	1.263.461.471	75	1.175.631.100	80	1.180.651.045	80	3.619.743.616	Kecamatan Rancasari
4 5 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	96,5	1.860.105.627	91,72	1.431.640.719	-	-	-	-	-	-	91,72	3.291.746.346	Kecamatan Buahbatu
4 5 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	100	99,02	569.842.773	95,24	668.787.536	-	-	-	-	-	-	95,24	1.238.630.309	Kecamatan Buahbatu
4 5 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	Persen	100	0	-	100	22.500.000	-	-	-	-	-	-	100	22.500.000	Kecamatan Buahbatu
4 5 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	99,92	119.900.000	100	75.000.000	-	-	-	-	-	-	100	194.900.000	Kecamatan Buahbatu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD										
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.						
1	3	42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	3	Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	Persen	4	5	100	98,38	1.915.374.841	99,54	2.195.454.130	-	-	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Kecamatan Buahbatu
1	5	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	Persen	4	100	99,04	983.659.200	100	983.659.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Buahbatu
1	6	33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	3	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	4	100	97,23	54.450.000	0	148.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202.450.000	-	Kecamatan Buahbatu
2	6	20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Poin	4	78	79,41	1.704.154.617	83,42	1.718.227.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.422.382.217	-	Kecamatan Buahbatu
2	7	26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	3	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	4	50	47,03	6.489.563.027	100	3.202.191.889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.691.754.916	-	Kecamatan Buahbatu
2	7	25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan Kecamatan	Persen	4	50	66	321.948.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321.948.500	-	Kecamatan Buahbatu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	33	Persen	100	100	54.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	54.450.000	Kecamatan Buahbatu
2	11	25	Persen	100	98,73	23.224.750	-	-	-	-	-	-	-	-	98,73	23.224.750	Kecamatan Buahbatu
2	7	28	Persen	50	-	-	50	2.033.196.000	-	-	-	-	-	-	50	2.033.196.000	Kecamatan Buahbatu
7	01	01	Persen	100	96,5	-	91,72	-	90,00	11.474.290.946	90	12.067.521.817	90,00	12.119.050.135	90,00	35.660.862.898	Kecamatan Buahbatu
7	01	02	Persen	N/A	50,00	-	50,00	-	75,00	4.412.358.172	75	4.344.365.605	100,00	4.362.916.046	100,00	13.119.639.823	Kecamatan Buahbatu
7	01	03	Persen	N/A	-	-	-	-	73,13	6.776.699.840	74,62	6.778.699.904	76,12	6.807.644.953	76,12	20.363.044.697	Kecamatan Buahbatu
7	01	04	Persen	N/A	-	-	-	-	78	1.314.797.000	79	1.176.165.000	80	1.181.187.225	80	3.672.149.225	Kecamatan Buahbatu
4	5	1	Persen	100	100	1.194.442.134	12 Laporan	1.773.709.950	-	-	-	-	-	-	100	2.968.152.064	Kecamatan Bandung Kidul

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah nanggung jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	5	2	Persen	100	100	1.007.670.046	12 Laporan	767.740.307	-	-	-	-	-	-	100	1.775.410.353	Kecamatan Bandung Kidul
4	5	3	Persen	100	100	64.949.500	100	190.626.000	-	-	-	-	-	-	100	255.575.500	Kecamatan Bandung Kidul
4	5	5	Persen	100	100	53.130.000	100	79.849.000	-	-	-	-	-	-	100	132.979.000	Kecamatan Bandung Kidul
1	3	42	Persen	100	100	888.884.600	500 M	1.588.876.300	-	-	-	-	-	-	75	2.477.760.900	Kecamatan Bandung Kidul
1	5	15	Persen	100	100	1.012.696.975	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.012.696.975	Kecamatan Bandung Kidul
2	6	20	Poin	85	86,96	137.787.300	-	-	-	-	-	-	-	-	87,67	137.787.300	Kecamatan Bandung Kidul
2	7	25	Persen	80	88,78	998.205.000	12 Laporan	974.165.000	-	-	-	-	-	-	100	1.972.370.000	Kecamatan Bandung Kidul
			unit	N/A	80				-	-	-	-	-	-	4		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah nanggung jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	33	Persen	1	13	353.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	353.250.000	Kecamatan Bandung Kidul
2	7	26	Persen	78,5	80	4.366.068.779	12	2.159.448.750	-	-	-	-	-	-	15,98	6.525.517.529	Kecamatan Bandung Kidul
2	11	25	Persen	86,15	80	23.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	86,15	23.300.000	Kecamatan Bandung Kidul
4	1	19	Persen	25	100	36.662.500	-	-	-	-	-	-	-	-	100	36.662.500	Kecamatan Bandung Kidul
2	7	28	persen	-	-	-	50 Orang	1.473.911.100	-	-	-	-	-	-	50	1.473.911.100	Kecamatan Bandung Kidul
7	01	01	persen	100	100	-	12 Laporan	-	100	11.115.404.412	100	11.527.260.482	100	11.576.481.884	100	34.219.146.778	Kecamatan Bandung Kidul
7	01	02	Persen	N/A	25,00	-	50,00	-	75,00	2.604.343.278	100,00	2.620.797.000	100,00	2.631.987.803	100,00	7.857.128.081	Kecamatan Bandung Kidul
7	01	03	Persen	N/A	-	-	-	-	65	4.111.490.063	77	4.629.429.260	86	4.649.196.923	86	13.390.116.246	Kecamatan Bandung Kidul

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1 7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3 Persentase Siskamling RW Aktif	4 Persen	5 N/A	6 -	7 -	8 -	9 -	10 59	11 836.080.000	12 65	13 827.760.000	14 70	15 831.294.535	16 70	17 2.495.134.535	18 Kecamatan Bandung Kidul
4 5 1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi	Persen	100	2.074.799.714	100	1.156.888.989,00	-	-	-	-	-	100	-	100	3.231.688.703	Kecamatan Gedebage
4 5 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	Persen	100	798.935,151	100	372.115.000	-	-	-	-	-	100	-	100	1.171.050.151	Kecamatan Gedebage
4 5 3	Program peningkatan disiplin aparat	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	Persen	100	33.385.800	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	33.385.800	Kecamatan Gedebage
4 5 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi Sesuai Bidangnya	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	Kecamatan Gedebage
1 3 42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik	Persen	100	1.736.005.195	75	1.660.500.130	-	-	-	-	-	100	-	100	3.396.505.325	Kecamatan Gedebage
1 5 15	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	Persen	100	837.346.860	-	-	-	-	-	-	-	75	-	75	837.346.860	Kecamatan Gedebage
2 6 20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Poin	83	1.744.212.400	85,39	1.609.910.750	-	-	-	-	-	-	-	84,1	3.354.123.150	Kecamatan Gedebage

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Perlindungan Sosial Bencana	Persentase penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	persen	-	-	-	90,48	153.874.000	-	-	-	-	-	-	-	153.874.000	Kecamatan Gedebage
7 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	persen	100	100	-	100	-	100	11.456.996.588	100	11.820.099.715	100	11.870.571.541	100	35.147.667.844	Kecamatan Gedebage
7 01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	N/A	100,00	-	100,00	-	75,00	3.806.948.782	75,00	3.612.358.278	100,00	3.627.783.048	100,00	11.047.090.108	Kecamatan Gedebage
7 01	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	N/A	-	-	-	-	60	5.303.468.085	70	5.462.135.600	80	5.485.458.919	80	16.251.062.604	Kecamatan Gedebage
7 01	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	N/A	-	-	-	-	70	210.312.869	80	205.000.000	90	205.875.350	90	621.188.219	Kecamatan Gedebage
4 5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	1.259.429.815	100	908.283.523	-	-	-	-	-	-	100	2.167.713.338	Kecamatan Panyileukan
4 5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Persen	100	100	478.734.175	100	498.995.700	-	-	-	-	-	-	100	977.729.875	Kecamatan Panyileukan
4 5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	Persen	100	100	100.300.750	100	41.610.800	-	-	-	-	-	-	100	141.911.550	Kecamatan Panyileukan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	3	42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persen	100	1.669.116.100	100	1.651.444.750	-	-	-	-	-	-	100	3.320.560.850	Kecamatan Panyileukan
1	5	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persen	100	1.209.374.200	0	-	-	-	-	-	-	-	100	1.209.374.200	Kecamatan Panyileukan
1	6	33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persen	91,66	47.855.000	0	-	-	-	-	-	-	-	100	47.855.000	Kecamatan Panyileukan
2	6	20	Program Peng-administrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Poin	78	961.551.700	84,88	917.303.000	-	-	-	-	-	-	84,88	1.878.854.700	Kecamatan Panyileukan
2	7	25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Persen	na	273.644.000	100	-	-	-	-	-	-	-	100	273.644.000	Kecamatan Panyileukan
2	7	26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Persen	84	4.622.127.893	35,31	2.151.461.360	-	-	-	-	-	-	35,31	6.773.589.253	Kecamatan Panyileukan
2	11	25	Program Pemberdayaan UKM	Persen	86,15	2.463.000	99,69	-	-	-	-	-	-	-	99,69	2.463.000	Kecamatan Panyileukan
4	1	19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	25	19.027.500	100	-	-	-	-	-	-	-	100	19.027.500	Kecamatan Panyileukan

Kode	Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	7	28	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	-	-	100	1.515.583.000	-	-	-	-	-	-	100	1.515.583.000	Kecamatan Panyileukan
7	01	01	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	100	100	-	100	-	100	11.894.127.570	100	12.427.023.926	100	12.480.087.318	100	36.801.238.814	Kecamatan Panyileukan
7	01	02	Persentase Kelurahan Unggul	N/A	50,00	-	100,00	-	100	2.459.970.750	100	2.388.197.995	100	2.398.395.600	100	7.246.564.345	Kecamatan Panyileukan
7	01	03	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	N/A	-	-	-	-	60	4.971.604.000	70	4.973.417.000	80	4.994.653.491	80	14.939.674.491	Kecamatan Panyileukan
7	01	04	Persentase Siskamling RW Aktif	N/A	-	-	-	-	48,65	1.051.978.903	56,76	1.002.463.100	64,86	1.006.743.617	64,86	3.061.185.620	Kecamatan Panyileukan
4	5	1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	1.412.176.172	100	961.042.709	-	-	-	-	-	-	100	2.373.218.881	Kecamatan Cinambo
4	5	2	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100	100	637.783.800	100	524.258.700	-	-	-	-	-	-	100	1.162.042.500	Kecamatan Cinambo
4	5	3	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100	100	28.567.000	100	-	-	-	-	-	-	-	100	28.567.000	Kecamatan Cinambo

VII - 166

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah nanggung jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	5	5	Persen	100	100	71.475.000	100	61.732.000	-	-	-	-	-	-	100	133.207.000	Kecamatan Cinambo
1	3	42	Persen	100	100	1.031.684.801	100	1.064.479.117	-	-	-	-	-	-	100	2.096.163.918	Kecamatan Cinambo
1	5	15	Persen	100	100	736.871.250	100	649.080.900	-	-	-	-	-	-	100	1.385.952.150	Kecamatan Cinambo
1	6	33	Persen	91,66	100	75.613.750	100	34.920.750	-	-	-	-	-	-	100	110.534.500	Kecamatan Cinambo
2	6	20	Poin	78	84,16	564.278.500	85,8	420.014.750	-	-	-	-	-	-	85,8	984.293.250	Kecamatan Cinambo
2	7	25	Unit	1	1	358.150.414	1	207.877.500	-	-	-	-	-	-	1	566.027.914	Kecamatan Cinambo
2	7	26	Persen	78,5	88,93	3.309.337.740	82,5	2.683.007.880	-	-	-	-	-	-	82,5	5.992.345.620	Kecamatan Cinambo
2	11	25	Persen	86,15	100	31.335.000	86,15	1.785.000	-	-	-	-	-	-	86,15	33.120.000	Kecamatan Cinambo

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah nanggung jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	4 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	Persen	25	100	45.053.750	100	47.208.000	-	-	-	-	-	-	100	92.261.750	Kecamatan Cinambo
7	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	persen	100	100	-	100	-	100	10.915.923.677	100	11.933.199.384	100	11.984.154.145	100	34.833.277.206	Kecamatan Cinambo
7	01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persen	N/A	50,00	-	100,00	-	100,00	2.174.474.240	100,00	2.019.243.312	100,00	2.027.865.481	100,00	6.221.583.033	Kecamatan Cinambo
7	01	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	N/A	-	-	-	-	82,84	3.869.306.700	86,21	3.757.767.500	87,25	3.773.813.167	87,25	11.400.887.367	Kecamatan Cinambo
7	01	Program Koordinasi Ketentrangan dan Ketertiban Umum	Persen	N/A	-	-	-	-	91,25	960.637.976	91,3	594.774.600	91,38	597.314.288	91,38	2.152.726.864	Kecamatan Cinambo
4	5	1	Persen	100	100	2.227.124.998,00	100	1.395.349.443	-	-	-	-	-	-	100	3.622.474.441	Kecamatan Mandalajati
4	5	2	Persen	100	100	1.187.931.818,00	100	663.384.700	-	-	-	-	-	-	100	1.851.316.518	Kecamatan Mandalajati
4	5	3	Persen	100	100	77.102.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100	77.102.000	Kecamatan Mandalajati

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab																		
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																				
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.																			
1	3	42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	3	4	Persen	100	5	100	6	100	7	1.513.456.100	8	100	9	2.460.362.771	10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-	16	100	17	3.973.818.871	18	Kecamatan Mandalajati
1	5	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3	4	Persen	64	64	79,25	79,25	944.382.545,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,25	944.382.545	-	Kecamatan Mandalajati		
1	6	33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	3	4	Persen	N/A	N/A	60	60	195.957.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	195.957.400	-	Kecamatan Mandalajati				
2	6	20	Program Peng-administrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1	2	Poin	84,53	84,53	80,05	80,05	1.688.852.050	1.662.220.000	1.688.852.050	81,86	81,86	1.662.220.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,86	3.351.072.050	-	Kecamatan Mandalajati		
2	7	25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	1	2	Persen	N/A	N/A	63,21	63,21	728.485.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,21	728.485.800	-	Kecamatan Mandalajati				
2	7	26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	1	2	Persen	85,28	85,28	26,9	26,9	6.302.035.712,00	3.333.490.120	6.302.035.712,00	70,98	70,98	3.333.490.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,98	9.635.525.832	-	Kecamatan Mandalajati			
2	11	25	Program Pemberdayaan KUMKM	1	2	Persen	N/A	N/A	100	100	172.083.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	172.083.900	-	Kecamatan Mandalajati					

Kode	Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang disusun tepat waktu	Persen	N/A	100	37.084.250	-	-	-	-	-	-	-	-	100	37.084.250	Kecamatan Mandalajati
2 7	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat Dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peran Kelembagaan, Masyarakat Dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persen	N/A	-	-	75	1.383.774.120,00	-	-	-	-	-	-	75	1.383.774.120	Kecamatan Mandalajati
7 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	persen	100	100	-	100	-	100	11.338.852.109	100	11.428.016.975	100	11.476.814.607	100	34.243.683.691	Kecamatan Mandalajati
7 01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	N/A	75	-	75,00	-	50	2.736.036.383	75	2.918.994.176	75	2.931.458.281	75	8.586.488.840	Kecamatan Mandalajati
7 01	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat unggul	Persen	N/A	-	-	-	-	78	6.641.620.767	78	6.663.193.195	80	6.691.645.030	80	19.996.458.992	Kecamatan Mandalajati
7 01	Program Koordinasi Ketentrangan dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	N/A	-	-	-	-	56	707.630.456	62	748.973.600	68	752.171.717	68	2.208.775.773	Kecamatan Mandalajati
8 01	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					9.638.622.225		4.617.547.360		36.621.864.507		34.222.583.950		34.368.714.383		119.469.332.425	
4 5 1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran	Persen	100	100	-	100	2.356.974.408,00	-	-	-	-	-	-	100	2.356.974.408	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

VII - 170

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah nanggung jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	5	2	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	100	-	-	100	1.040.234.802,00	-	-	-	-	-	-	100	1.040.234.802	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	5	3	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	100	-	-	100	31.460.000,00	-	-	-	-	-	-	100	31.460.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	5	30	Persentase Potensi Konflik tidak menjadi konflik lingkup Ekonomi Sosial Budaya	100	1.032.073.940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.032.073.940	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	5	33	Persentase Potensi Konflik tidak menjadi konflik lingkup Wawasan Kebangsaan	100	4.328.036.285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	4.328.036.285	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	5	1	Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilihnya	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,61	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	5	51	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	100	2.708.774.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2.708.774.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah nanggung jawab	
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
1	Program Penyuluhan Politik Masyarakat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1		87,14																1.569.738.000
4	Program Peningkatan Kesatuan Bangsa	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2		86,07																-
4	Program Peningkatan Kesatuan Bangsa	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres	Persen	100	-	-	100	1.188.878.150,00	-	-	-	-	-	-	-	100	1.188.878.150	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (Non Akumulasi)	Persen	100	-	12.654.769.207	100	-	100	12.772.825.750	100	12.827.365.716	100	12.827.365.716	100	38.254.960.673	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Ideologi	Persen	100	-	3.421.499.468	100	-	100	1.111.009.000	100	1.115.753.008	100	1.115.753.008	100	5.648.261.476	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Politik	Persen	100	-	3.833.684.500	100	-	100	3.160.701.500	100	3.174.197.695	100	3.174.197.695	100	10.168.583.695	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Ke-masyarakatan	Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Sosial Kemasyarakatan	Persen	100	-	1.050.216.000	100	-	100	698.609.300	100	701.592.362	100	701.592.362	100	2.450.417.662	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

VII - 172

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Pe- nanggung jawab
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8 01 05	Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persen	100	-	-	100	-	100	1.490.643.332	100	1.194.764.000	100	1.199.865.642	100	3.885.272.974	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Kewaspadaan Nasional	Persen	100	-	-	100	-	100	14.171.052.000	100	15.284.674.400	100	15.349.939.960	100	44.805.666.360	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
JUMLAH										6.369.398.405.992		5.934.058.938.784		5.966.923.626.396		23.263.369.975.656	



KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB

VIII





Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri atas unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Guna menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah, Pemerintah Kota Bandung menetapkan indikator makro pembangunan yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, dan Pendapatan Per Kapita. Indikator kinerja makro tersebut menjadi parameter keberhasilan pembangunan Kota Bandung, sekaligus memberi dukungan bagi pencapaian indikator kinerja makro pembangunan Provinsi Jawa Barat. Proyeksi indikator kinerja makro mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1

Proyeksi Indikator Makro Kota Bandung Tahun 2021-2023

Indikator	Satuan	Kondisi Awal Periode RPJMD	Realisasi			Target Perubahan RPJMD			Kondisi Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	81,06	81,62	81,51	81,00	81,10	81,20	81,20	
2 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	persen	1,65	1,15	0,82	0,80**	0,80**	0,80**	0,80**	
3 Persentase Penduduk Miskin	persen	3,57	3,38	3,99	3,49	3,32	3,14	3,14	
4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	8,05	8,18	11,19	11,08	10,86	10,26	10,26	
5 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	persen	7,08	6,79	-2,28	3,92	4,32	5,05	5,05	
6 Gini Ratio	poin	0,42	0,39	0,402	0,401	0,400	0,399	0,399	
7 PDRB Per Kapita	juta rupiah/orang	73,92	78,81	76,95	76,03	78,68	81,33	81,33	

Ket: ** angka sangat sementara

Penyesuaian target indikator makro dilakukan mulai Tahun 2021 sampai dengan 2023 sebagai respon terhadap perkembangan keadaan akibat pandemi Covid-19. Selain itu, ditambahkan indikator Pendapatan Per Kapita (PDRB ADHB Per Kapita) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja

program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Adapun pemetaan indikator tujuan dan targetnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun periode RPJMD Kota Bandung disajikan pada Tabel 8.2 berikut.

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Daerah/Tujuan Pembangunan Kota Bandung Tahun 2018-2023

Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal Periode RPJMD		Realisasi	Target Perubahan RPJMD			Kondisi Akhir Periode RPJMD	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	81,06	81,62	81,51	81,00	81,10	81,20	81,20
2	Indeks Reformasi Birokrasi	predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
3	Level Kematangan <i>Smart City</i>	predikat	Integratif	Integratif	B	B	B	B	B
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	persen	7,08	6,79	-2,28	3,92	4,32	5,05	5,05
5	Gini Ratio	poin	0,42	0,39	0,402	0,401	0,400	0,399	0,399
6	PDRB Per Kapita	juta rupiah/orang	73,92	78,81	76,95	76,03	78,68	81,33	81,33
7	Pengeluaran Per Kapita	ribu rupiah/orang	16.630	17.254	16.887	16.798	17.013	17.227	17.227
8	Indeks <i>Liveable City</i> Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	poin	7,48	7,66	N/A	7,775	7,875	8,00	8,00
9	Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan	persen	N/A	N/A	7,13	5,98	6,48	6,69	6,69

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

- a. Umur panjang dan hidup sehat
- b. Pengetahuan
- c. Standar hidup layak

Dasar perubahan metodologi penghitungan IPM, yaitu:

- a. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah

dengan baik. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

- b. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

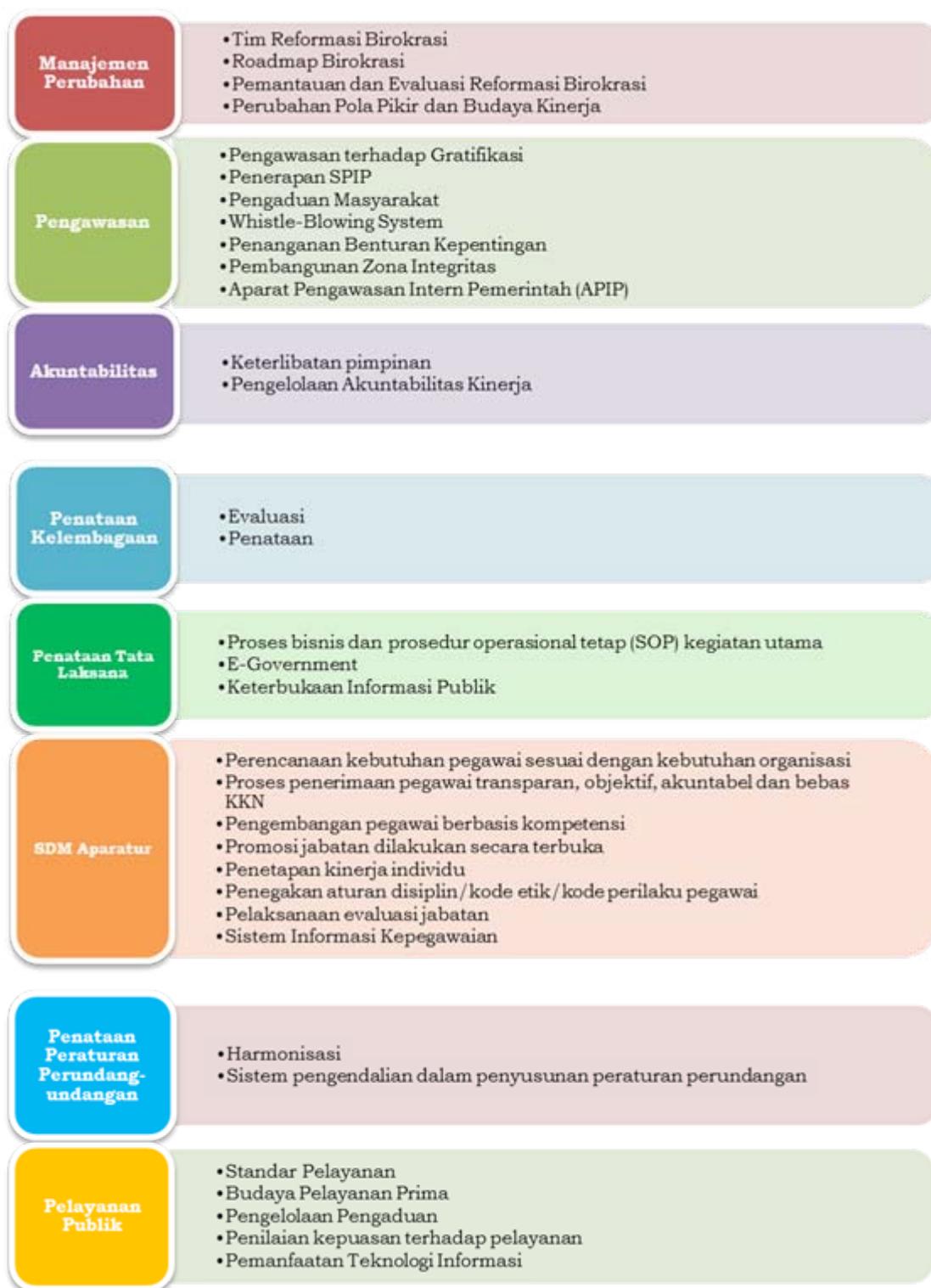
2. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Indikator Reformasi Birokrasi adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), indeks kemudahan berusaha, Survei Kepuasan Masyarakat.

Implementasi Reformasi Birokrasi sangat penting dan merupakan suatu keharusan di era milenial saat ini, mengingat perubahan tatanan kehidupan yang terjadi di tengah masyarakat sangat cepat sehingga harus diimbangi oleh kinerja birokrasi yang cepat, efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan atau keadaan yang ingin dicapai terkait peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari pencapaian kinerja beberapa variabel atau area perubahan dalam komponen Indeks Reformasi Birokrasi sebagai berikut:



Penghitungan indeks reformasi birokrasi dapat dilihat dari pencapaian kinerja masing-masing variabel atau area perubahan berdasarkan pemenuhan, kualitas dan implementasinya. Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi di bagi menjadi 2 (dua) komponen yaitu komponen proses (pengungkit) dengan bobot penilaian sebesar 60% dan komponen hasil dengan bobot penilaian sebesar 40%, yang kemudian nilai reformasi birokrasi didapat dari penjumlahan pencapaian kinerja kedua komponen tersebut. Adapun beberapa sub variable dalam komponen proses (pengungkit) dapat dilihat sebagai berikut:



Sedangkan untuk pencapaian kinerja komponen hasil dapat dilihat dari beberapa sub variabel sebagai berikut:

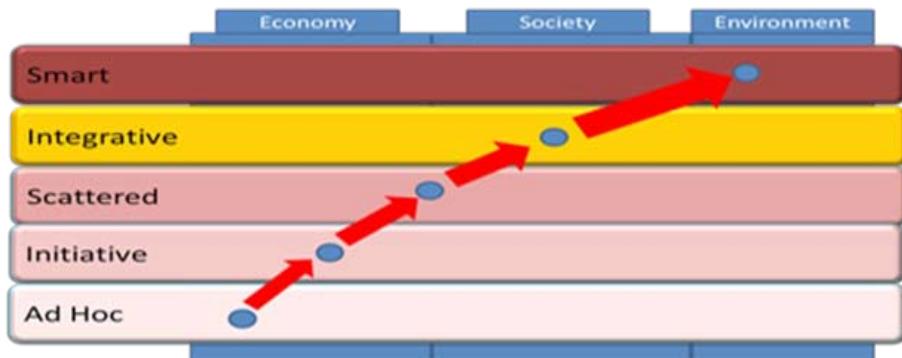


3. Level Kematangan *Smart City*

Smart City dapat diartikan sebagai kota yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintegrasikan seluruh infrastruktur dan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat, seperti administrasi, pendidikan, kesehatan, transportasi, perekonomian, sumber daya energi, pemukiman dan keselamatan publik sehingga dengan bersinerginya seluruh aspek tersebut bersama masyarakat akan dapat meningkatkan pembangunan dan pengelolaan kota. Konsep *Smart City* dapat dirumuskan ke dalam 6 dimensi yaitu:

- a. *Smart Economy*
- b. *Smart Mobility*
- c. *Smart Environment*
- d. *Smart People*
- e. *Smart Living*
- f. *Smart Governance*

Sedangkan untuk *Maturity Level Smart City* dapat dibedakan ke dalam 5 level menurut *Ganesha Smart City Maturity Model*, diantaranya:



No	Level	Definition
1.	<i>Ad hoc</i>	<i>Low economic level, uncomfortable environment, minimum ICT, governance, and human resource support.</i>
2.	<i>Initiative</i>	<i>Low economic growth, less comfortable environment, ICT based services partially initiated.</i>
3.	<i>Scattered</i>	<i>Better environment, ICT-based service. are well planned.</i>
4.	<i>Integrative</i>	<i>Confortable environment, integrated ICT-based services.</i>
5.	<i>Smart</i>	<i>Very comfortable environment, ubiquitous ICT-based services.</i>

4. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

LPE merupakan proses terjadinya kenaikan produk nasional bruto atau pendapatan nasional riil. Uraian tentang LPE ini akan terkait dengan PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. Hal ini terjadi karena konsep-konsep yang ada saling berkaitan. PDRB atas dasar harga berlaku adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun dasar, yang digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi (LPE) atau dengan bahasa teknis perhitungan LPE berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun beriringan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses terjadinya kenaikan produk nasional bruto atau pendapatan nasional riil. Dengan kata lain, perekonomian mengalami perkembangan jika terjadi pertumbuhan output riil. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan

suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa meningkat.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah diantaranya:

- a. Tanah dan Kekayaan Alam
- b. Mutu Tenaga Kerja dan Penduduk
- c. Barang Modal dan Tingkat Teknologi
- d. Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat

5. Gini Ratio

Gini ratio atau koefisien Gini merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila Gini ratio bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Nilai Gini ratio lebih dari 0 sampai dengan kurang dari 0,4 berarti ketimpangan rendah. Nilai Gini ratio antara 0,4 sampai dengan 0,5 berarti ketimpangan sedang. Nilai Gini ratio lebih dari 0,5 sampai dengan kurang dari 1 berarti ketimpangan tinggi.

Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).

Suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gini nya makin mendekati satu. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

NILAI KOEFISIEN	DISTRIBUSI PENDAPATAN
<0,4	Tingkat Ketimpangan Rendah
0,4 – 0,5	Tingkat Ketimpangan Sedang
>0,5	Tingkat Ketimpangan Tinggi

6. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB per kapita tersebut sangat dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut.

7. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

8. Indeks *Liveable City* Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur

Indeks *Liveable City* Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur merupakan indikator yang menggambarkan sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan tempat beraktifitas yang dilihat dari aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dan lain sebagainya) maupun aspek non fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dan lain sebagainya).

Pengukuran Indeks *Liveable City* disusun berdasarkan sejumlah indikator data objektif dan subyektif yang tergabung ke dalam tujuh aspek yaitu transportasi, tata ruang, sosial dan keamanan, lingkungan dan kesehatan, layanan dasar, utilitas, serta ekonomi, yang selanjutnya distandarisasi sesuai bobot. Data subjektif diperoleh dari survei persepsi masyarakat Kota Bandung sebagai responden, berbentuk data ordinal dengan skala Likert. Sementara data objektif didapat melalui data sekunder dan observasi yg berbentuk interval-rasio. Selanjutnya, data dihitung per aspek dalam 30 kecamatan di Kota Bandung dan dirata-ratakan untuk mendapatkan Indeks *Liveable City* skala Kota.

9. Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan

Persentase kolaborasi pembiayaan pembangunan terhadap pendapatan merupakan indikator yang digunakan untuk membandingkan swadaya masyarakat dalam pembangunan serta besaran pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan sumbangan pihak ketiga, terhadap total pendapatan dalam satuan rupiah.

Selain indikator kinerja tujuan RPJMD sebagai alat ukur pencapaian masing-masing misi, indikator sasaran RPJMD juga merupakan instrumen yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian visi dan misi. Indikator kinerja sasaran RPJMD juga merupakan indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Daerah Kota Bandung. Target IKU Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2019-2023 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah tahun beberapa tahun terakhir. Melalui perubahan RPJMD ini, maka dilakukan penyesuaian IKU maupun targetnya untuk tahun 2022 dan 2023. Pertimbangan yang sangat mempengaruhi penentuan target yaitu kondisi tahun 2020. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada memburuknya berbagai kinerja pembangunan daerah yang ditunjukkan dengan berbagai indikator. Hal ini merupakan salah satu latar belakang dilakukannya perubahan RPJMD, yang diharapkan dapat memberikan pijakan yang realistis sesuai kondisi riil Kota Bandung, yang tentu tidak terlepas dari pengaruh eksternal baik kondisi Provinsi Jawa Barat, daerah sekitar Kota Bandung, dan nasional.

Penyesuaian kembali target-target indikator kinerja pembangunan daerah Kota Bandung dilakukan menyusul kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat yang juga melakukan perubahan atau penyesuaian target indikator kinerja sebagai dampak pandemi Covid-19. Penyesuaian target kinerja dilakukan dengan tetap mempertahankan semangat untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat, mendukung prioritas nasional dan provinsi, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penentuan target IKU Pemerintah Daerah Kota Bandung pada tahun 2022 dan 2023 ditetapkan dengan memperhatikan peluang dan tantangan sampai akhir periode RPJMD. Adapun realisasi dan target IKU Pemerintah Daerah Kota Bandung selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2019 sampai dengan 2023 dicantumkan pada Tabel 8.3 berikut.

Tabel 8.3

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2019-2023

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Periode RPJMD		Realisasi	Target Perubahan RPJMD			Kondisi Akhir Periode RPJMD	
		2018	2019		2020	2021	2022		2023
1	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	14,18	14,19	14,2	14,21	14,22	14,23	14,23
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	10,63	10,74	10,75	10,76	10,77	10,78	10,78
3	Umur Harapan Hidup (UHH)	tahun	74	74,14	74,28	73,94	73,96	73,98	73,98
4	Indeks <i>Liveable City</i> Aspek Sosial Budaya	poin	N/A	7,49	6,5	6,6	6,7	6,8	6,8
5	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	persen	51,61	40	96,67	80	90	100	100
6	Nilai AKIP	predikat	A	A	BB	A	A	A	A
7	Opini BPK	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	poin	3,11	3,72	3,2	3,25	3,30	3,35	3,35
9	Nilai EPPD	skor	3,4144	3,3019	3,4013	3,4023	3,4033	3,4044	3,4044
10	Indeks Daya Saing Pariwisata	poin	3,34	3,41	3,29	3,29	3,30	3,31	3,31
11	Angka Kemiskinan	poin	3,57	3,38	3,99	3,49	3,32	3,14	3,14
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	8,05	8,18	11,19	11,08	10,86	10,26	10,26
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	35,2	45,22	48,54	51,63	51,71	51,79	51,79
14	Persentase Luasan RTH	persen	12,21	12,22	12,25	12,75	13,26	13,77	13,77
15	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	persen	98	97,99	98,30	98,50	98,70	99,00	99,00
16	Persentase Penurunan Kemacetan	persen	N/A	N/A	24,35	20,87	14,78	7,83	7,83
17	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	persen	5,16	4,28	2,94	2,80	2,76	2,16	2,16
18	Cakupan Pelayanan Air Minum	persen	77,27	80,24	79,38	81,00	82,00	83,00	83,00
19	Persentase Penurunan Titik Genangan	Persen	N/A	N/A	67,65	58,82	50,00	41,18	41,18
20	Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan	persen	N/A	N/A	7,13	5,98	6,48	6,69	6,69

1. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

HLS Kota Bandung pada tahun 2020 sebesar 14,20 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,72 tahun.

2. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ *Mean Years School* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS Kota Bandung pada tahun 2020 sebesar 10,75 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,75 tahun.

3. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Umur harapan hidup (UHH), dijadikan indikator dalam mengukur kesehatan suatu individu di suatu daerah. UHH adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. UHH diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada waktu tertentu. UHH di hitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Ada dua jenis data yang digunakan dalam perhitungan UHH yaitu anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH).

Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk perhitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun (standar UNDP). Umur Harapan Hidup dapat panjang jika status kesehatan, gizi dan lingkungannya yang baik.

4. Indeks *Liveable City* Aspek Sosial Budaya

Liveable city index mengukur tingkat kenyamanan kota didasarkan atas persepsi warga kota terhadap kotanya, mengenai kelayakhunian kota tempat tinggalnya. Indeks ini dimaksudkan untuk mengukur kualitas kehidupan warga kota. Beberapa aspek yang digunakan untuk mengukur kelayakhunian kota, yaitu: aspek transportasi, aspek tata ruang, aspek lingkungan, aspek kesehatan, aspek sosial dan demokrasi, aspek ekonomi dan pekerjaan, dan aspek pendidikan. *Liveable city index* Kota Bandung tahun 2019 ditargetkan sebesar 7,5 poin, sedangkan realisasi adalah 7,69 berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung bekerjasama dengan perguruan tinggi. Pada tahun 2023, *liveable city index* ditargetkan sebesar 8,00. *Liveable city* adalah kota yang layak huni dimana masyarakat kota dapat mencari pekerjaan, melayani kebutuhan dasar termasuk air bersih dan sanitasi, memiliki akses untuk mendapatkan

pendidikan dan kesehatan yang layak, hidup dalam komunitas yang aman dan lingkungan yang bersih. Dapat dikatakan bahwa *liveable city* merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktifitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dan lain-lain) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dan lain-lain). Jadi indeks *liveable city* adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kenyamanan dan ketenangan hidup masyarakat dalam suatu kota.

Beberapa aspek yang mempengaruhi *liveable city*, diantaranya:

1. Aspek Tata Ruang (Tata Kota, RTH)
2. Aspek Lingkungan (Kebersihan, Polusi)
3. Aspek Transportasi (Jalan, Angkutan)
4. Aspek Fasilitas Kesehatan
5. Aspek Fasilitas Pendidikan
6. Aspek Infrastruktur-Utilitas (Listrik, Air, Telekomunikasi)
7. Aspek Ekonomi (Lapangan Kerja, Lokasi Kerja)
8. Aspek Keamanan
9. Aspek Sosial (Kebudayaan, Interaksi Warga)

Untuk Misi 1 Sasaran 3 yaitu Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis indikatornya adalah Indeks *Liveable City* Aspek Sosial Budaya. Sehingga dari 9 aspek *liveable city* hanya diambil 2 aspek saja, yaitu aspek keamanan dan aspek sosial (kebudayaan, interaksi warga).

5. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM “Baik”

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menjelaskan definisi dan beberapa unsur penilaian SKM diantaranya:

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Unsur SKM dalam peraturan ini meliputi:

- 1) Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- 3) Waktu Penyelesaian
Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- 4) Biaya/Tarif
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/ atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

- 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- 6) Kompetensi Pelaksana
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
- 7) Perilaku Pelaksana
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- 9) Sarana dan prasarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
- 10) Standar Pelayanan Publik
Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi pelayanan dan/atau penerima pelayanan. Standar Pelayanan Publik, menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, sekurang-kurangnya meliputi:

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu:

- a) Persyaratan
- b) Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- c) Jangka Waktu Pelayanan
- d) Tarif/Biaya
- e) Produk Pelayanan
- f) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu:

- a) Dasar Hukum
- b) Sarana dan Prasarana/Fasilitas
- c) Kompetensi Pelaksana
- d) Pengawasan Internal
- e) Jumlah Pelaksana
- f) Jaminan Pelayanan
- g) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
- h) Evaluasi Kinerja Pelaksana

Jumlah populasi Perangkat Daerah di Kota Bandung sebanyak 60 Perangkat Daerah dan nilai minimal pelayanan Perangkat Daerah dengan kriteria “baik” adalah sebesar 85 (Delapan Puluh Lima).

6. Nilai AKIP

Auntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Komponen pengukuran kinerja AKIP dengan rincian dan bobot penilaian sebagai berikut:

- a) Perencanaan Kinerja, dengan bobot sebesar 30%;
- b) Pengukuran Kinerja, dengan bobot sebesar 25%;
- c) Pelaporan Kinerja, dengan bobot sebesar 15%;
- d) Evaluasi Kinerja, dengan bobot sebesar 10%;
- e) Capaian Kinerja, dengan bobot sebesar 20%.

7. Opini BPK

Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pencapaian indikator kinerja terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di dapat dari pemenuhan beberapa kriteria penilaian seperti kesesuaian standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

Kriteria Opini:

1) Pembatasan lingkup

Pembatasan terhadap lingkup audit terdiri atas:

a) Pembatasan oleh *auditee*.

Hal ini terjadi karena *auditee* benar-benar tidak memberikan data/informasi yang dibutuhkan. Hal ini juga didukung oleh bukti-bukti secara tertulis dan disadari oleh kedua belah pihak.

b) Pembatasan oleh keadaan (keterbatasan waktu, dana, dll).

Hal ini terjadi pada saat auditor tidak mampu meyakini diri mereka sendiri terhadap kewajaran LK dengan keterbatasan yang di luar kontrol pihak auditor maupun *auditee*.

2) Materialitas

Tingkat materialitas diukur terhadap:

a) Suatu akun tertentu tetapi tidak terhadap LK secara keseluruhan.

Tingkat materialitas terhadap suatu akun hanya mempunyai konsekuensi maksimal pengecualian terhadap akun tertentu tersebut (apabila tidak dilakukan koreksi). Akan tetapi, hal ini tidak berpengaruh terhadap penyajian LK secara keseluruhan.

b) Suatu akun dan terhadap LK secara keseluruhan

Tingkat materialitas ini dapat menghasilkan pendapat tidak wajar (tingkat maksimal, apabila tidak dapat dilakukan koreksi).

3) SPI yang memadai

Pengukuran tingkat pengendalian intern dilakukan dengan membandingkan tingkat kesesuaian peng-aplikasi-an penyusunan dan pelaporan LK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (dalam hal-hal yang menjadi referensi SPKN).

Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara:

a) Pengukuran kuantitas tertentu

Keadaan ini dapat dihitung dengan persentase tertentu, misalnya dengan persentase atas sampling jumlah BAST yang diotorisasi oleh pihak yang berwenang.

Pengukuran kualitas yang memerlukan “*judgement*”.

Tingkat pengendalian ini misalnya terjadi pada tingkat kompetensi personil pelaksana.

4) Kesesuaian dengan SAP

Tingkat kesesuaian terhadap SAP dilakukan dengan memahami laporan-laporan yang wajib disusun dan volunteer Kriteria yang menjadi pertimbangan dalam penentuan opini:

- a) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
- b) Efektivitas pengendalian intern
- c) Kepatuhan terhadap ketentuan per-UU
- d) Pengungkapan yang memadai

5) *Unqualified Opinion* (Pendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian) diberikan dengan kondisi:

- a) Keempat kriteria yang menjadi kriteria dalam penentuan opini dapat dipenuhi.
- b) Semua koreksi yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian LK sudah dilakukan oleh *auditee*.
- c) Dapat melakukan review atas auditor lain yang melaksanakan pemeriksaan atas LK entitas lain yang menjadi bagian LK yang kita periksa. Atau, tidak dapat mereview pekerjaan auditor lain tersebut, tetapi dapat meyakini bahwa bagian tersebut tidak material terhadap LK yang kita diperiksa.

6) *Unqualified Opinion with Modified Wording* (Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan)

- a) Keempat kriteria kecuali pembatasan lingkup audit telah dipenuhi.
- b) Terdapat koreksi material yang tidak dilaksanakan.
- c) Tidak dapat mereview pekerjaan auditor lain yang melakukan pemeriksaan atas LK yang merupakan bagian dari LK yang kita periksa, akan tetapi jumlahnya material (bukan tidak material, dan bukan sangat material).

7) *Qualified Opinion* (Pendapat Wajar Dengan Pengecualian)

- a) Pembatasan lingkup audit atas beberapa akun yang cukup material (bukan tidak material dan bukan sangat material).
- b) Tidak semua koreksi telah dilakukan oleh *auditee*.
- c) Tidak dapat mereview pekerjaan auditor lain yang melakukan pemeriksaan atas LK yang merupakan bagian dari LK yang kita periksa, akan tetapi jumlahnya sangat material.

8) *Adverse Opinion* (Pendapat Tidak Wajar)

Pada dasarnya, Pendapat Tidak Wajar diberikan apabila auditor dapat meyakini bahwa penyajian LK tidak wajar, dengan kondisi:

- a) Terdapat 2 kriteria yang tidak dipenuhi, yaitu “kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan” dan “Konsistensi pelaksanaan SAP”.
- b) Terdapat koreksi yang sangat material yang tidak dilaksanakan oleh *auditee*.

9) *Disclaimer*

Pendapat Tidak Memberi Pendapat diberikan pada saat auditor tidak dapat menyimpulkan bahwa penyajian LK wajar atau tidak wajar, dengan kondisi-kondisi:

- a) Keempat kriteria tersebut tidak dilaksanakan.
- b) Terdapat pembatasan lingkup audit atas akun-akun yang sangat material terhadap penyajian LK.
- c) Prosedur alternatif untuk meyakini kewajaran penyajian LK tidak dapat dilaksanakan.

Tidak dapat mereview pekerjaan auditor lain yang melakukan pemeriksaan atas LK yang merupakan bagian dari LK yang kita periksa, akan tetapi jumlahnya sangat material.

8. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Toral Bobot
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE	17	17%
Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2 – Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	7	28%
Aspek 3 – Kelembagaan	2	8%
Aspek 4 – Strategi dan Perencanaan	2	8%
Aspek 5 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%
Domain 3 – Layanan SPBE	11	55%
Aspek 6 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35%
Aspek 7 – Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20%

No	Nilai Indeks	Predikat
1.	4,2 – 5,0	Memuaskan
2.	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3.	2,6 – < 3,5	Baik
4.	1,8 – < 2,6	Cukup
5.	< 1,8	Kurang

9. Nilai EPPD

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah yang baru dibentuk.

Pemerintah melakukan EPPD yang meliputi EKPPD, EKPOD, dan EDOB.

1. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. EKPPD dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.
2. Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat EKPOD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. EKPOD dilakukan untuk menilai kemampuan daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum, dan kemampuan daya saing daerah.
3. Evaluasi Daerah Otonom Baru yang selanjutnya disingkat EDOB adalah evaluasi terhadap perkembangan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah pada daerah yang baru dibentuk. EDOB dilakukan untuk memantau perkembangan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah pada daerah yang baru dibentuk.

4. Indeks Daya Saing Pariwisata

Indeks Daya Saing Pariwisata adalah penilaian terhadap upaya peningkatan dan pengembangan kepariwisataan pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan ranking didapat melalui survey dan mengacu pada *Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI)* yang dikeluarkan *World Economic Forum (WEF)* yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Penggunaan global standard, dimaksudkan agar kita bisa berkompetisi di level global. Standar penilaiannya menggunakan TTCI – WEF yang sudah diakui dunia, dan dipotret dengan analisa indikator dan kriteria yang sudah ditentukan. Pengukuran Indeks Pariwisata berbasis data sekunder (data statistik) untuk menentukan skor indeks daya saing pariwisata. Empat aspek penopang pariwisata diantaranya:

- 1) aspek lingkungan pendukung bisnis,
- 2) tata kelola,
- 3) potensi wisata, dan
- 4) infrastruktur

Keempat aspek inilah yang disusun sebagai basis konsep pengukuran indeks pariwisata. Dalam uraiannya terdapat 78 indikator data yang dikelompokkan menjadi 14 pilar penilaian. Tiap pilar dikelompokkan lagi menjadi empat aspek pengukuran utama.

Parameter daya saing lebih berorientasi pada standar kesehatan terkait pandemi Covid-19 yang berkaitan dengan penyediaan sarana prasarana kesehatan, kebersihan lingkungan, keselamatan dan keamanan dari penularan Covid-19.

5. Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Secara kuantitatif, kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana taraf hidup manusia serba kekurangan atau “tidak memiliki harta beda. Sedangkan secara kualitatif, pengertian kemiskinan adalah keadaan hidup manusia yang tidak layak.

Kemiskinan sangat berhubungan dengan masalah kesejahteraan masyarakat dan menjadi tingkat minimum yang didapatkan berdasarkan standar hidup masyarakat di suatu negara. Kemiskinan sudah menjadi masalah global, dimana setiap negara memiliki anggota masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Angka Kemiskinan merupakan persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah situasi dimana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka bisa disebabkan karena lapangan kerja yang tidak tersedia, ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan dan tidak mau bekerja. Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan tahun tertentu. Tujuan digunakannya indikator ini adalah sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada publik terkait pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Perhitungan dilakukan dengan formulasi baru, sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK RI Nomor S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020.

Formulasi perhitungan IKLH sebelumnya adalah:

$$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKL)$$

Sedangkan formulasi baru adalah sebagai berikut:

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

Keterangan:

IKA = Indeks Kualitas Air

IKU = Indeks Kualitas Udara

IKL = Indeks Kualitas Lahan

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

8. Persentase Luasan RTH

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut di atas terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud di atas disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

9. Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah

Cakupan pelayanan persampahan adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dibuang ke TPA dan dikurangi sejak dari sumber dengan metode *Reuse, Reduce, Recycle* (3R) pada suatu kurun waktu tertentu. Cakupan layanan pengelolaan sampah diukur sebagai berikut:

- a. capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung atau Pengurangan sampah dari sumber (rumus peningkatan) (ton/tahun), dan
- b. capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung atau Cakupan penanganan sampah Kota dari TPS ke TPA (rumus penurunan) (ton/tahun).

Formulasi perhitungan cakupan layanan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Cakupan layanan pengelolaan sampah} \\ & = \text{capaian pengurangan sampah} + \text{capaian penanganan sampah} \end{aligned}$$

Cakupan layanan pengelolaan sampah ini menunjukkan apakah seluruh sampah yang dihasilkan di Kota Bandung telah ditangani dengan baik sehingga tidak ada lagi sampah yang ditimbun di pinggir jalan atau dibuang ke sungai. Semakin tinggi cakupan layanan pengelolaan sampah harus ditunjukkan dengan kondisi bersih tanpa cecceran sampah di seluruh wilayah Kota Bandung.

10. Persentase Penurunan Kemacetan

Kemacetan adalah kondisi dimana arus lalu lintas yang lewat pada ruas jalan yang ditinjau melebihi kapasitas rencana jalan tersebut yang mengakibatkan kecepatan bebas ruas jalan tersebut mendekati 0 km/jam sehingga menyebabkan terjadinya antrian.

Kriteria keberhasilan diukur dengan Level Off Service (LOS) minimal pada level C dengan komponen pengukuran berdasarkan VCR maksimum 0,8 dan kecepatan rata-rata minimum 11 km/jam pada pagi, siang, dan sore hari.

11. Persentase Luasan Kawasan Kumuh

Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Indikator permukiman kumuh telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian, sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kriteria perumahan dan permukiman kumuh ditinjau dari:

1. Bangunan gedung
2. Jalan lingkungan
3. Penyediaan air minum
4. Drainase lingkungan
5. Pengelolaan air limbah
6. Pengelolaan persampahan
7. Proteksi kebakaran

Masing-masing aspek di atas memiliki tolak ukurnya masing masing

- a. Pemberian skor setiap sub kriteria, berdasarkan parameter penilaian:

Kualitas Baik (0% – 25%)	: Skor 0
Kualitas Cukup Baik (26% – 50%)	: Skor 1
Kualitas Buruk (51% – 75%)	: Skor 3
Kualitas Baik (76% – 100%)	: Skor 5

- b. Perhitungan total penilaian setiap indikator didekati dengan menggunakan rumus:

Total Skor = Skor Sub Kriteria/Jumlah Sub Kriteria

- c. Klasifikasi Tingkat Kekumuhan

Berikut merupakan rentang nilai tingkat klasifikasi yang didapatkan untuk setiap kelas yaitu:

- 1) Bukan Kawasan Kumuh : 0 – 8,75
- 2) Kawasan Kumuh Ringan : 8,76 – 17,50
- 3) Kawasan Kumuh Sedang : 17,51 – 26,25
- 4) Kawasan Kumuh Berat : 26,26

12. Cakupan Pelayanan Air Minum

Cakupan Pelayanan air minum merupakan Persentase konversi golongan konsumen air minum terhadap jumlah penduduk Kota Bandung. Golongan konsumen air minum terdiri atas: a) sosial biasa, b) sosial khusus, c) rumah tangga, dan d) niaga/komersil.

13. Persentase Penurunan Titik Genangan

Titik genangan merupakan kelebihan air yang berasal dari air hujan yang berlebihan pada suatu kawasan tertentu. Berdasarkan karakteristik genangan, parameter pengukuran banjir/genangan yang digunakan sebagai kriteria keberhasilan adalah ketinggian maksimal 30 cm dengan waktu surut maksimal 60 menit pada 68 titik genangan yang ada di Kota Bandung. Pada tahun 2020 tercatat 22 titik genangan sudah memenuhi kriteria tertangani dan 46 titik genangan belum memenuhi kriteria tertangani.

14. Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan

Merupakan indikator yang digunakan untuk membandingkan swadaya masyarakat dalam pembangunan serta besaran pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan sumbangan pihak ketiga, terhadap total pendapatan dalam satuan rupiah.

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bandung menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan targetnya untuk memberi komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah. Indikator kinerja kunci atau yang lebih dikenal dengan *key performance indicator* (KPI) membantu daerah dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai target pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan kota.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Bandung terdiri atas indikator kinerja pada tingkat dampak (*impact*) dan tingkat hasil (*outcome*). Kinerja hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sedangkan kinerja dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Pencapaian target indikator ini didukung secara berjenjang (*cascade*) oleh capaian indikator di bawahnya. Pencapaian indikator kinerja impact daerah didukung oleh pencapaian indikator kinerja *impact* perangkat daerah, dan selanjutnya dipicu oleh capaian indikator *outcome*. Lebih lanjut, di dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah, capaian indikator program didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan, dan pada akhirnya indikator kinerja kegiatan didukung oleh pencapaian indikator sub kegiatan.

Capaian indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan terdiri atas indikator kinerja tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program. Sama halnya dengan IKU yang telah ditetapkan pada bagian sebelumnya, penentuan target IKK juga mengalami penyesuaian sebab adanya Covid-19 yang menyebabkan berbagai sektor mengalami stagnasi bahkan mengalami penurunan kinerja yang sangat drastis. Capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tahun 2019 dan 2020 serta target indikator tahun 2021 sampai 2023 disajikan pada Tabel 8.4.

Tabel 8.4

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Bandung

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode RPJMD		Realisasi	Target Perubahan RPJMD			Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2018	2019		2020	2021	2022	
I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	81,06	81,62	81,51	81,00	81,10	81,20	81,20
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	persen	7,08	6,79	-2,28	3,92	4,32	5,05	5,05
3	Gini Ratio	poin	0,42	0,39	0,402	0,401	0,400	0,399	0,399
4	PDRB Per Kapita	juta rupiah/ orang	73,92	78,81	76,95	76,03	78,68	81,33	81,33
5	Pengeluaran Per Kapita	ribu rupiah/ orang	16.630	17.254	16.887	16.798	17.013	17.227	17.227
6	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	14,18	14,19	14,20	14,21	14,22	14,23	14,23
7	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	10,63	10,74	10,75	10,76	10,77	10,78	10,78
8	Umur Harapan Hidup (UHH)	tahun	74	74,14	74,28	73,94	73,96	73,98	73,98
9	Angka Kemiskinan	poin	3,57	3,38	3,99	3,49	3,32	3,14	3,14
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	8,05	8,18	11,19	11,08	10,86	10,26	10,26
II ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
2	Level Kematangan <i>Smart City</i>	predikat	Integratif	Integratif	B	B	B	B	B
3	Indeks <i>Liveable City</i> Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	poin	7,48	7,66	N/A	7,775	7,875	8,00	8,00
4	Indeks <i>Liveable City</i> Aspek Sosial Budaya	poin	N/A	7,49	6,5	6,6	6,7	6,8	6,8
5	Nilai AKIP	predikat	A	A	BB	A	A	A	A
6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	poin	3,11	3,72	3,20	3,25	3,30	3,35	3,35
7	Nilai EPPD	skor	3,4144	3,3019	3,4013	3,4023	3,4033	3,4044	3,4044

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode RPJMD		Realisasi	Target Perubahan RPJMD			Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2018	2019		2020	2021	2022	
8	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	persen	51,61	40	96,67	80,00	90,00	100,00	100,00
9	Opini BPK	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Indeks Daya Saing Pariwisata	point	3,34	3,41	3,29	3,29	3,30	3,31	3,31
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	point	35,2	45,22	48,54	51,63	51,71	51,79	51,79
12	Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan	persen	N/A	N/A	7,13	5,98	6,48	6,69	6,69
III ASPEK PELAYANAN UMUM									
A FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1 PENDIDIKAN									
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar	persen	N/A	N/A	98,55	92,70	92,77	92,86	92,86
2	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	persen	N/A	N/A	90,04	90,10	90,17	90,23	90,23
3	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Rasio siswa PAUD terhadap ketersediaan Rombongan Belajar	rasio	N/A	N/A	12,27	11,36	11,65	11,94	11,94
5	Rasio siswa SD terhadap ketersediaan Ruang Kelas	rasio	N/A	N/A	36,5	35,82	35,67	35,52	35,52
6	Rasio penduduk usia SMP terhadap ketersediaan Rombongan Belajar	rasio	N/A	N/A	34,21	34,3	34,07	33,84	33,84
7	Jumlah Unit SMP Negeri yang dibangun dan dilengkapi	unit	N/A	N/A	59	2	2	2	65
8	Cakupan Kurikulum Pendidikan yang Memenuhi Standar	persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100
9	Cakupan Kurikulum Lokal yang Diimplementasikan	persen	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100
10	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	persen	N/A	N/A	71,12	71,46	71,81	72,15	72,15
11	Cakupan Masyarakat Miskin yang Terlayani Pendidikannya	persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode RPJMD		Realisasi	Target Perubahan RPJMD			Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2018	2019		2020	2021	2022	
2	KESEHATAN								
1	Angka Kematian Ibu (Konversi)	per 100000 kelahiran hidup	71,81	71,49	69,03	90,90	88,68	86,46	86,46
2	Angka Kematian Bayi (Konversi)	per 1000 kelahiran hidup	2,8	2,8	1,95	3,37	3,30	3,23	3,23
3	Cakupan Rumah Sehat	persen	N/A	N/A	72,03	74	76	78	78
4	Indeks Keluarga Sehat	indeks	N/A	N/A	0,17	0,19	0,20	0,21	0,21
5	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	N/A	N/A	5,74	5,32	5,25	5,20	5,20
6	Cakupan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100
	Indeks Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kategori Baik	persen	N/A	N/A	N/A	80,00	90,00	100	100
7	Prevalensi Stunting	persen	N/A	N/A	28,12	26,12	23,12	19,01	19,01
8	Cakupan Sumber Daya Kesehatan yang Terstandarisasi	persen	N/A	N/A	33,27	35,58	40,54	45,02	45,02
9	Cakupan Kualitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	persen	N/A	N/A	53,82	56,30	61,52	65,66	65,66
10	Nilai Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	persen	N/A	N/A	84,19	85,00	86,00	87,00	87,00
11	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri	persen	N/A	N/A	50,33	53,64	58,29	64,90	64,90
12	Cakupan Masyarakat Miskin yang Terlayani kesehatannya	persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Persentase Luasan RTH	persen	12,2	12,22	12,25	12,75	13,26	13,77	13,77
2	Persentase luasan RTH publik terpelihara	persen	N/A	N/A	27,96	28,57	29,12	29,67	29,67
3	Persentase Tingkat Pelayanan Jalan	persen	N/A	N/A	75,65	79,13	85,22	92,17	92,17
4	Tingkat Kemantapan Jalan	persen	92,34	92,38	91,87	93,00	94,00	95,00	95,00
5	Cakupan Pelayanan Air Minum	persen	77,27	80,24	79,38	81,00	82,00	83,00	83,00
6	Persentase Penurunan Titik Genangan	persen	N/A	N/A	67,65	58,82	50,00	41,18	41,18

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode RPJMD		Realisasi	Target Perubahan RPJMD			Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2018	2019		2020	2021	2022	
7	Tingkat Kepatuhan Pembangunan Terhadap Ketentuan Tata Ruang dan Bangunan Gedung	persen	N/A	N/A	N/A	-	60,00	65,00	65,00
8	Persentase luasan RTH publik	persen	N/A	N/A	6,52	6,53	6,55	6,57	6,57
9	Persentase luasan RTH Privat	persen	N/A	N/A	5,73	6,22	6,71	7,20	7,20
10	Luas trotoar dalam kondisi baik	m ²	N/A	N/A	410.145	420.145	435.845	451.545	451.545
11	Cakupan pelayanan air minum perpipaan	persen	N/A	N/A	79,38	81,00	82,00	83,00	83,00
12	Cakupan pelayanan air minum non perpipaan	persen	N/A	N/A	3,58	3,68	3,78	3,88	3,88
13	Persentase Kebutuhan Sumur Imbuhan	Persen	N/A	N/A	0,73	1,60	2,33	3,06	3,06
14	Panjang sungai dalam kondisi baik	Km	N/A	N/A	N/A	125	250	265,05	265,05
15	Persentase Kapasitas Parkir Air (Kolam Retensi)	Persen	N/A	N/A	26,69	31,13	51,88	72,01	72,01
16	Persentase drainase dalam kondisi baik	persen	N/A	N/A	63,02	63,85	64,68	65,52	65,52
17	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100
18	Persentase Wilayah Kota Bandung yang terdata RTH privat	Persen	N/A	N/A	N/A	18	27	41	41
19	Persentase Kenaikan Tenaga Terampil Jasa Konstruksi yang Kompeten	Persen	N/A	N/A	N/A	20	52	84	84
20	Tersusunnya Dokumen RDTR dan Dokumen Perencanaan lainnya	Dokumen	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1
21	Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan yang ditindaklanjuti yang sesuai dengan ketentuan	Persen	N/A	N/A	77	78	79	80	80

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode RPJMD		Realisasi	Target Perubahan RPJMD			Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2018	2019		2020	2021	2022	
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	persen	5,16	4,28	2,94	2,80	2,76	2,16	2,16
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	persen	N/A	N/A	1,95	2,66	3,72	4,86	4,86
3	Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Bangunan Gedung	persen	N/A	N/A	12,75	7,65	4,59	2,75	2,75
4	Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Akses Aman Air Minum Tidak Tersedia	persen	N/A	N/A	30,56	18,34	11,00	6,60	6,60
5	Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Kebutuhan Air Minum Minimal Setiap Individu Tidak Terpenuhi	persen	N/A	N/A	55,56	33,33	20,00	12,00	12,00
6	Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Standar Teknis yang Berlaku	persen	N/A	N/A	10,24	6,15	3,69	2,21	2,21
7	Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis	persen	N/A	N/A	62,68	37,61	22,56	13,54	13,54
8	Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Jalan Lingkungan	persen	N/A	N/A	37,26	22,35	13,41	8,05	8,05
9	Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Drainase Lingkungan	persen	N/A	N/A	52,71	31,62	18,97	11,38	11,38
10	Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	persen	N/A	N/A	26,77	16,06	9,64	5,78	5,78
11	Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis	persen	N/A	N/A	12,35	7,41	4,45	2,67	2,67
12	Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Ketidakterdiseaian Prasarana Proteksi Kebakaran	persen	N/A	N/A	41,89	25,14	15,08	9,05	9,05

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode RPJMD		Realisasi	Target Perubahan RPJMD			Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2018	2019		2020	2021	2022	
13	Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Ketidakterdediaan Sarana Proteksi Kebakaran	persen	N/A	N/A	77,87	46,72	28,03	16,82	16,82
5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Persentase potensi konflik yang tidak menjadi konflik	persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100
2	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Per Tahun	persen	N/A	N/A	N/A	6,00	5,00	4,00	4,00
3	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana dan Kebakaran	persen	N/A	N/A	N/A	19,87	59,60	100	100
4	Persentase Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Aktif	persen	N/A	N/A	N/A	11,25	22,50	33,75	33,75
5	Persentase Siskamling RW Aktif	persen	N/A	67,04	N/A	66,07	70,96	77,43	77,43
6	SOSIAL								
1	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar	persen	N/A	N/A	93,45	80	-	-	-
2	Indeks Kesejahteraan Sosial	indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	0,40	0,50	0,50
3	Cakupan PPKS terlantar yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	persen	N/A	N/A	100	100	-	-	100
4	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	persen	N/A	N/A	75	78	80	82	82
5	Cakupan Masyarakat Miskin yang Memperoleh Perlindungan	persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100
6	Cakupan Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Sosial	persen	N/A	N/A	58,38	69,04	76,82	84,60	84,60

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode RPJMD		Realisasi	Target Perubahan RPJMD			Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2018	2019		2020	2021	2022	
7	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar	persen	N/A	N/A	93,45	80	-	-	-
8	Persentase PPKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	persen	N/A	N/A	100	100	-	-	-
B	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NONPELAYANAN DASAR								
1	TENAGA KERJA								
1	Persentase Tenaga Kerja Ditempatkan	persen	N/A	N/A	45,56	45,65	45,90	46,15	46,15
2	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	persen	44,88	46	58,44	45,65	40,00	40,00	40,00
3	Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	persen	58	58,46	62,28	50,00	50,00	50,00	50,00
4	Persentase tenaga kerja dan wirausaha yang kompeten	persen	N/A	N/A	N/A	60,00	60,00	60,00	60,00
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Kelurahan Layak Anak	persen	47,68	52,28	68,87	79,47	90,62	100	100
2	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	persen	N/A	N/A	N/A	3,31	23,18	46,36	46,36
3	PANGAN								
1	Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan ambang batas +/- 10%	kkal/kap/hari	N/A	N/A	2148,30	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00
2	Angka Kecukupan Protein (AKP) dengan ambang batas +/- 10%	gr/kap/hari	N/A	66,4	66,70	57,00	57,00	57,00	57,00
3	Skor Pola Pangan Harapan	angka	84,25	85,08	90,50	84,28	85,00	85,80	85,80
4	Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan	persen	N/A	N/A	99,93	99,10	99,20	99,30	99,30
5	Cakupan Masyarakat Miskin yang Pangannya Tercukupi	persen	N/A	N/A	0,98	1,31	1,63	1,96	1,96
6	Persentase Binaan yang menjadi Pelaku Usaha Pangan Olahan	persen	N/A	N/A	N/A	5,00	7,00	9,00	9,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode RPJMD		Realisasi	Target Perubahan RPJMD			Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2018	2019		2020	2021	2022	
7	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Pangan	persen	N/A	N/A	N/A	2,50	2,55	2,60	2,60
4	PERTANAHAN								
1	Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/bersertifikat dari BPN	persen	17,64	20,00	22,78	24,00	27,00	30,00	30,00
5	LINGKUNGAN HIDUP								
1	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	persen	98	97,99	98,30	98,50	98,70	99,00	99,00
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	20	41,97	45,78	45,88	45,98	46,08	46,08
3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	58,61	69,79	61,55	71,00	71,10	71,20	71,20
4	Persentase Penurunan sumber penyebab pencemaran air	persen	N/A	N/A	N/A	1,5	3,00	3,00	3,00
5	Persentase Penurunan sumber penyebab pencemaran udara	Persen	N/A	N/A	N/A	2,00	3,00	3,00	3,00
6	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis rumah tangga	persen	N/A	N/A	82,23	74,00	72,70	72,00	72,00
7	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis rumah tangga	persen	N/A	N/A	16,09	24,50	26,00	27,00	27,00
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	persen	N/A	95,48	97,08	97,10	97,12	97,15	97,15
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	persen	N/A	N/A	N/A	73,67	77,84	81,21	81,21
2	Persentase Kelurahan Unggul	persen	N/A	50	61,59	66,89	82,12	94,70	94,70
3	Swadaya Partisipasi Masyarakat	Rupiah	N/A	297.900.435.058,00	291.616.065.634,00	297.448.386.946,68	303.397.354.685,61	309.465.301.779,33	309.465.301.779,33
4	Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	Miliar Rupiah	193,58	297,9	291,6	297,4	303,4	309,5	309,5
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	Indeks Pembangunan Keluarga	indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	55,84	56,84	56,84

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode RPJMD		Realisasi	Target Perubahan RPJMD			Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2018	2019		2020	2021	2022	
2	Nilai Variabel Ibangga lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	persen	N/A	N/A	N/A	-	53,09	54,07	54,07
3	Nilai Variabel Ibangga lingkup Penyuluhan dan Penggerakan	persen	N/A	N/A	N/A	-	48,13	48,58	48,58
4	Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas, Paripurna, Mandiri, dan Berkebang	persen	N/A	N/A	33,33	35,38	38,10	39,68	39,68
5	Total Fertility Rate (TFR) Maksimum 2	persen	N/A	N/A	1,97	2,00	2,00	2,00	2,00
6	Cakupan Keluruhan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri	persen	N/A	N/A	50,33	53,64	58,29	64,90	64,90
7	Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR	persen	N/A	N/A	76,24	76,27	76,92	77,57	77,57
8	Cakupan Kebutuhan KB yang Belum Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	persen	N/A	N/A	13,19	13,00	12,00	11,00	11,00
9	Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	persen	N/A	N/A	87,69	88,69	89,69	90,69	90,69
10	Rumah Dataku Aktif	persen	N/A	N/A	24,62	24,62	30,77	36,92	36,92
11	Sekolah Siaga Kependudukan Aktif	persen	N/A	N/A	10,91	16,36	23,64	30,91	30,91
12	Cakupan laporan kependudukan dan keluarga melalui aplikasi SR BKKBN yang akurat dan tepat waktu	persen	N/A	N/A	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
13	Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Penyuluhan dan Penggerakan	persen	N/A	N/A	79,56	80,56	81,56	82,56	82,56
14	Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Keluarga Berencana	persen	N/A	N/A	N/A	90,23	91,23	92,23	92,23
9	PERHUBUNGAN								
1	Persentase Tingkat Pelayanan Jalan	persen	N/A	N/A	75,65	79,13	85,22	92,17	92,17
2	Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	persen	N/A	N/A	10,81	9,57	7,33	3,85	3,85

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode RPJMD		Realisasi	Target Perubahan RPJMD			Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2018	2019		2020	2021	2022	
3	Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Non Perhubungan	persen	N/A	N/A	12,72	11,20	7,72	4,24	4,24
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Nilai Penerapan SPBE Lingkup Aplikasi	Nilai	N/A	N/A	N/A	31,35	31,50	31,55	31,55
2	Nilai Penerapan SPBE lingkup Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan	Nilai	N/A	N/A	N/A	22,40	22,50	22,60	22,60
3	Nilai Penerapan SPBE lingkup Infrastruktur	Nilai	N/A	N/A	N/A	4,50	4,60	4,70	4,70
4	Rata-rata Respon Pengaduan	persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100
11	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
1	Persentase Koperasi Berkualitas	persen	N/A	N/A	7,09	9,46	9,93	10,64	10,64
2	Persentase Usaha Mikro yang Omset dan/atau Kemampuan Usahanya Meningkatkan	persen	N/A	N/A	3,74	3,91	4,08	4,29	4,29
3	Jumlah Kemitraan Usaha Koperasi	Kemitraan	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	2
4	Persentase koperasi yang mematuhi peraturan perundang-undangan	Persen	N/A	N/A	N/A	14,30	15,00	15,60	15,60
5	Cakupan fasilitasi ijin usaha simpan pinjam sesuai prosedur	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100
6	Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat	Persen	N/A	N/A	60	60	65	70	70
7	Persentase Koperasi yang Meningkatkan Omzetnya	persen	N/A	N/A	11,11	12,29	13,47	15,13	15,13
8	Jumlah Kemitraan Usaha Mikro	Kemitraan	N/A	N/A	N/A	N/A	4	8	8
9	Persentase Usaha Mikro yang meningkatkan keberdayaan usahanya	Persen	N/A	N/A	4,05	5,06	10,12	11,14	11,14
10	Persentase Usaha Non Formal yang meningkatkan kemampuan usahanya	Persen	N/A	N/A	3,42	3,59	3,76	3,93	3,93

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode RPJMD		Realisasi	Target Perubahan RPJMD			Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2018	2019		2020	2021	2022	
11	Persentase Usaha Mikro yang omsetnya meningkat	Persen	N/A	N/A	4,05	4,22	4,39	4,64	4,64
12	PENANAMAN MODAL								
1	Realisasi Investasi PMDN/PMA (LKPM)	Rp. Triliun	14,349	8,43	10,63	6,10	6,65	7,25	7,25
2	Rancangan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal yang Terverifikasi/Tervalidasi	Dokumen	N/A	N/A	N/A	1	2	3	3
3	Realisasi Investasi Baru Promosi Penanaman Modal	Triliun Rupiah	N/A	N/A	N/A	1,5	1,65	1,815	1,815
4	Persentase peningkatan ketataan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	Persen	N/A	N/A	N/A	30	45	50	50
13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								
1	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Indeks	N/A	N/A	0,355	0,364	0,373	0,382	0,382
2	Persentase Organisasi Pemuda Aktif Positif	persen	N/A	N/A	30,60	51,02	75,51	100	100
14	STATISTIK								
1	Nilai Penerapan SPBE Lingkup Data dan Statistik	Nilai	N/A	N/A	N/A	3,30	3,50	3,90	3,90
15	PERSANDIAN								
1	Nilai Penerapan SPBE lingkup Persandian	Nilai	N/A	N/A	N/A	1,20	1,25	1,37	1,37
16	KEBUDAYAAN								
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	tahun	N/A	N/A	50,74	50,80	51,2	51,53	51,53
2	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	persen	N/A	N/A	91,54	93,22	94,91	97,19	97,19
3	Persentase Sub Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan, dan Dimanfaatkan	persen	N/A	N/A	54,21	54,94	55,67	56,41	4,22

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode RPJMD		Realisasi 2020	Target Perubahan RPJMD			Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2018	2019		2021	2022	2023	
4	Persentase Lembaga Seni Memenuhi Standar Sanggar Seni	persen	N/A	N/A	1,60	4,35	5,75	8,42	8,42
17	PERPUSTAKAAN								
1	Indeks Baca masyarakat	Nilai	N/A	N/A	74,76	75,03	76,04	77,02	77,02
2	Nilai rata-rata aspek pemanfaatan bahan bacaan dan sumber informasi	nilai	N/A	N/A	71,54	71,73	72,02	72,30	72,30
3	Nilai rata-rata aspek ketersediaan fasilitas membaca dan sumber informasi	nilai	N/A	N/A	86,33	86,33	86,33	86,33	86,33
4	Nilai rata-rata aspek kebiasaan membaca masyarakat	nilai	N/A	N/A	66,41	67,02	69,78	72,42	72,42
18	KEARSIPAN								
1	Nilai Pengawasan kearsipan pemerintah Kota Bandung dengan kategori Baik	Nilai	N/A	N/A	N/A	65,20	67,80	70,80	70,80
2	Nilai aspek pengawasan kearsipan lingkup pengelolaan kearsipan	Nilai	N/A	N/A	N/A	27,60	28,50	29,40	29,40
3	Nilai aspek pengawasan lingkup pembinaan dan pengawasan kearsipan	Nilai	N/A	N/A	N/A	37,60	39,30	41,40	41,40
C	URUSAN PILIHAN								
1	PARIWISATA								
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	N/A	N/A	3.299.090	3.661.656	3.792.239	3.939.489	3.939.489
2	Indeks Ekosistem Ekonomi Kreatif	Indeks	N/A	N/A	55,90	55,90	56,40	57,00	57,00
3	Persentase Objek Daya Tarik Wisata yang Berkelanjutan	persen	N/A	N/A	62,28	64,04	65,79	67,54	67,54
4	Tingkat Citra Pariwisata Kota Bandung	Poin	N/A	N/A	3,25	3,41	3,61	3,81	3,81
5	Ruang Kreatif Aktif	persen	N/A	N/A	45,16	64,52	80,65	100	100
6	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tersertifikasi Profesi	Persen	N/A	N/A	2,62	8,1	9,3	10	10

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode RPJMD		Realisasi	Target Perubahan RPJMD			Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2018	2019		2020	2021	2022	
2	PERTANIAN								
1	Persentase Pelaku Usaha di Sektor Pertanian dan Perikanan Aktif	persen	N/A	N/A	N/A	70,00	75,00	80,00	80,00
2	Cakupan Penanganan Kasus Penyakit Zoonosa	persen	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100
3	PERDAGANGAN								
1	Pertumbuhan Nilai Ekspor	Persen	N/A	N/A	N/A	0,3	0,3	0,3	0,3
2	Tingkat Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	persen	13,74	9,22	8,49	15,00	15,00	15,00	15,00
3	Persentase Pelaku Usaha Perdagangan Berdaya Saing	persen	N/A	N/A	N/A	75,79	79,56	83,33	83,33
4	Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok	persen	13,74	9,22	8,49	15,00	15,00	15,00	15,00
4	PERINDUSTRIAN								
1	Persentase Pelaku Industri Kecil Menengah Berdaya Saing	persen	N/A	N/A	N/A	43,92	51,61	60,14	60,14
2	Persentase pelaku IKM non sentra industri yang memiliki daya saing	persen	N/A	N/A	N/A	55,00	60,00	68,49	68,49
3	Persentase pelaku IKM sentra industri yang memiliki daya saing	persen	N/A	N/A	N/A	30,00	40,00	50,00	50,00
D	FOKUS PENUNJANG URUSAN								
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN								
1	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan, Pengukuran, dan Pelaporan	Nilai	N/A	N/A	NA	56,05	56,52	56,95	56,95
2	Nilai AKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	Nilai	N/A	N/A	N/A	44,05	44,12	44,20	44,20
2	KEUANGAN								
1	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode RPJMD		Realisasi	Target Perubahan RPJMD			Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2018	2019		2020	2021	2022	
2	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Aset Daerah	Persen	N/A	N/A	22,78	24	27	30	30
3	Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RAPBDP	persen	N/A	100	100	100	100	100	100
4	Ketepatan Waktu Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100
5	Laporan Keuangan Kota Bandung Tepat Waktu	persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100
6	Laporan BMD Tepat Waktu	persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100
7	Tertib Pengamanan BMD Kota Bandung	persen	N/A	N/A	20	60	80	100	100
8	Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan (TJSL, Sumbangan Pihak Ketiga, dan Skema lainnya)	Rupiah	N/A	196.574.889.241,00	597.208.939.402,00	655.032.245.625,00	671.876.320.079,00	708.037.037.918,00	708.037.037.918,00
9	Besaran Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Sumbangan Pihak Ketiga	Miliar Rupiah	N/A	N/A	23,19	23,42	23,66	23,89	23,89
10	Jumlah (akumulasi) Proyek Agenda Prioritas Pembangunan (Non APBD)	Proyek	N/A	N/A	2	3	4	5	5
3	KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT								
1	Indeks Penerapan Sistem Merit	indeks	N/A	N/A	0,81	0,85	0,9	0,95	0,95
2	Nilai Penerapan Sistem Merit Lingkup Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Nilai	N/A	N/A	97,50	100,00	104,00	104,00	104,00
3	Nilai Penerapan Sistem Merit Lingkup Mutasi dan Promosi	Nilai	N/A	N/A	85,00	95,00	100,00	105,00	105,00
4	Nilai Penerapan Sistem Merit Lingkup Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	Nilai	N/A	N/A	112,00	117,00	122,00	127,00	127,00
5	Nilai Penerapan Sistem Merit Lingkup Pengembangan Kompetensi Aparatur	Nilai	N/A	N/A	38,00	40,50	45,50	55,50	55,50

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode RPJMD		Realisasi	Target Perubahan RPJMD			Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2018	2019		2020	2021	2022	
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Persentase Hasil Kajian yang Dimanfaatkan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan	persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100
5	PENGAWASAN								
1	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level	N/A	N/A	3	3	3	3	3
2	Level Kapabilitas APIP	Level	N/A	N/A	2	3	3	3	3
3	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP Minimal 2,50	persen	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100
4	Cakupan pelaksanaan pengawasan yang efektif	Persen	N/A	N/A	NA	100	100	100	100
5	Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP)	Persen	N/A	N/A	87,16	87,5	90	94	94
6	Persentase Pengaduan Kinerja Perangkat daerah ditindaklanjuti	Persen	N/A	N/A	NA	100	100	100	100
7	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Strategi Pencegahan Korupsi	Persen	N/A	N/A	NA	100	100	100	100
6	SEKRETARIAT DAERAH								
1	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal 81,00	persen	N/A	N/A	78,33	78,33	83,33	88,33	88,33
2	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kategori Baik	persen	N/A	66,67	96,67	90,00	95,00	100,00	100,00

Tabel 8.5

Penetapan Indikator Kinerja Daerah
 Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/Outcome Kota Bandung
 Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target 4	Target 5	Target 6		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	PENDIDIKAN						
	1	Persen	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	2	Persen	11,36	11,65	11,94	11,94	Dinas Pendidikan
	3	Persen	35,82	35,67	35,52	35,52	Dinas Pendidikan
	4	Persen	34,30	34,07	33,84	33,84	Dinas Pendidikan
	5	Persen	61	63	65	65	Dinas Pendidikan
	6	Persen	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	7	Persen	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	8	Persen	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	9	Persen	71,46	71,81	72,15	72,15	Dinas Pendidikan
2	KESEHATAN						
	1	Persen	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	2	Persen	63,60	67,60	73,20	73,20	Dinas Kesehatan
	3	Persen	23,72	30,47	33,13	33,13	Dinas Kesehatan
	2	Unit	1,00	5,00	4,00	4,00	Dinas Kesehatan
	4	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target 4	Target 5	Target 6		
1	2	3	Target 7	Target 8			
5	Capaian SPM Bidang kesehatan	Persen	88,97	89,99	90,92	Dinas Kesehatan	
3	Cakupan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan	
6	Cakupan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Persen	16,81	37,61	58,40	Dinas Kesehatan	
7	Cakupan Masyarakat Miskin yang Terlayani Kesehatannya	Persen	100	100	100	Dinas Kesehatan	
4	Cakupan sumber daya manusia kesehatan yang terstandarisasi	Persen	33,95	40,74	48,01	Dinas Kesehatan	
8	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan IRTP sesuai standar kesehatan	Persen	37,21	40,34	42,02	Dinas Kesehatan	
9	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri	Persen	53,64	58,29	64,90	Dinas Kesehatan	
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	0,00	0,00	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
2	Persentase penurunan titik genangan	Persen	58,82	50,00	41,18	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
3	Persentase Kebutuhan Sumur Imbuhan	Persen	1,60	2,33	3,06	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
4	Panjang sungai dalam kondisi baik	Km	125,00	250,00	265,05	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
5	Persentase Kapasitas Parkir Air (Kolam Retensi)	Persen	31,13	51,88	72,01	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
6	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persen	63,85	64,68	65,52	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
7	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	93,00	94,00	95,00	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
8	Luas trotoar dalam kondisi baik	m2	420.145	435.845	451.545	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
9	Cakupan PJU menyala	Persen	91,00	-	0	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (2021) Dinas Perhubungan (2022-2023)	

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target 4	Target 5	Target 6		
1	2	3	Target 4	Target 5	Target 6	Target 7	8
10	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (non akumulasi)	Persen	100	100	100	100	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
11	Persentase Areal Pemakaman yang Tertata (Non akumulasi)	Persen	33	-	-	33	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
12	Persentase Areal Pemakaman yang Tertata	Persen	-	34	35	35	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
13	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis	Persen	100	100	100	100	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
14	Persentase Wilayah Kota Bandung yang Terdata RTH Privat	Persen	18	27	41	41	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
15	Persentase Kenaikan Tenaga Terampil Jasa Konstruksi yang Kompeten	Persen	20	52	84	84	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
16	Tersusunnya Dokumen RDTR dan Dokumen Perencanaan lainnya	Dokumen	1,00	1	1	3	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
17	Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan yang ditindaklanjuti yang sesuai dengan ketentuan	Persen	78	79	80	80	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
18	Persentase cakupan layanan air bersih	Persen	3,68	-	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
19	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah	Persen	79,37	-	-	79,37	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
20	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	Persen	2,60	-	-	2,6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
21	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	Persen	2,60	-	-	2,6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
22	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	Persen	2,60	-	-	2,6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target 4	Target 5	Target 6		
1	2	3	Target 4	Target 5	Target 6	Target 7	8
2	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak	Persen	80,93	82,02	83,01	83,01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Bangunan Gedung	Persen	7,65	4,59	2,75	2,75	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Akses Aman Air Minum Tidak Tersedia	Persen	18,34	11,00	6,60	6,60	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Kebutuhan Air Minum Minimal Setiap Individu Tidak Terpenuhi	Persen	33,33	20,00	12,00	12,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Persentase cakupan layanan air bersih non perpipaan	Persen	3,68	3,78	3,88	3,88	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Standar Teknis yang Berlaku	Persen	6,15	3,69	2,21	2,21	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis	Persen	37,61	22,56	13,54	13,54	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah	Persen	79,37	79,73	80,09	80,09	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Jalan Lingkungan	Persen	22,35	13,41	8,05	8,05	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Drainase Lingkungan	Persen	31,62	18,97	11,38	11,38	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
12	Persentase luasan RTH dari serah terima PSU perumahan	Persen	6,53	6,55	6,57	6,57	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Pertahun	Persen	6	5	4	4	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Persentase Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Aktif	Persen	11,25	22,50	33,75	33,75	

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target 4	Target 5	Target 6		
1	2	3	Target 4	Target 5	Target 6	Target 7	8
4	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	100	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
5	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana Pratama	Persen	19,87	59,6	100	100	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
6	Persentase Kelurahan Siaga Kebakaran	Persen	44,37	70,2	100	100	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
7	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
8	Persentase sarana prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana kondisi baik	Persen	81,41	81,83	82,11	82,11	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
9	Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Persen	25,14	15,08	9,05	9,05	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
10	Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Persen	46,72	28,03	16,82	16,82	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
6	SOSIAL						
1	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	persen	85	85	85	85	Dinas Sosial
2	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	N/A	0,4	0,5	0,5	Dinas Sosial
3	Cakupan PPKS terlantar yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Persen	78	80	82	82	Dinas Sosial
4	Cakupan Warga miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen	69,04	76,82	84,6	84,6	Dinas Sosial

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target 4	Target 5	Target 6		
1	2 Persentase DTKS terpilih yang dimanfaatkan dalam penanganan kemiskinan	3	4	5	6	7	8
5	Cakupan anak terlantar dalam panti yang memperoleh layanan asuh sesuai NSPK	Persen	100	100	100	100	Dinas Sosial
6	Cakupan capaian SPM kebencanaan Bidang Sosial	Persen	100	100	100	100	Dinas Sosial
7	Jumlah Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	Unit	2	-	-	2	Dinas Sosial
II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1 TENAGA KERJA							
1	Persentase pelayanan Administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	100	Dinas Ketenagakerjaan
2	Jumlah dokumen ketenagakerjaan	Dokumen	2	2	2	2	Dinas Ketenagakerjaan
3	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	60	60	60	60	Dinas Ketenagakerjaan
4	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	60	60	60	60	Dinas Ketenagakerjaan
5	Cakupan Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan	Persen	45,65	40,00	40,00	40,00	Dinas Ketenagakerjaan
6	Jumlah lowongan pekerjaan baru	Orang	10.100	10.300	10.500	10.500	Dinas Ketenagakerjaan
7	Jumlah peserta kegiatan pemberi kerja (padat karya)	Orang	600	700	800	800	Dinas Ketenagakerjaan
8	Cakupan kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	Persen	50	50	50	50	Dinas Ketenagakerjaan
9	Cakupan Pekerja/Buruh yang menjadi peserta jamsostek aktif	Persen	N/A	50	50	50	Dinas Ketenagakerjaan
2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
2	Capaian Partisipasi Organisasi Perempuan di Ruang Publik	Persen	38,98	47,45	55,93	55,93	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target 4	Target 5	Target 6		
1	2	3	Target 4	Target 5	Target 6	Target 7	8
3	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	Persen	3,31	23,18	46,36	46,36	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
4	Cakupan Keluarga Bermasalah Terbina	Persen	50,00	60,00	70,00	70,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
5	Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak Update	Persen	5,00	10,47	15,70	15,70	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
6	Presentase Kriteria Pemenuhan Hak Anak	Persen	79,47	90,62	100,00	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
7	Rasio Kekerasan terhadap Anak	Rasio	0,019	0,017	0,015	0,015	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
3	PANGAN						
1	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan ambang batas +/- 10%	kkal/kap/hari	2100	2100	2100	2100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Angka Kecukupan Protein (AKP) dengan ambang batas +/- 10%	gr/kap/hari	57	57	57	57	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Cakupan Masyarakat Miskin yang Pangannya Tercukupi	Persen	1,31	1,63	1,96	1,96	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Cakupan Informasi Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6	Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persen	99,10	99,20	99,30	99,30	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	PERTANAHAN						
1	Persentase masalah pertanahan ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Persentase pelayanan pemanfaatan tanah sesuai prosedur	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8
5	LINGKUNGAN HIDUP						
1	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	Jumlah dokumen kebijakan lingkungan	Dokumen	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
3	Indeks SO2	Poin	0,72	0,7	0,68	0,68	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
4	Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemerlang"	Persen	79,69	80,47	81,25	81,25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
5	Cakupan kawasan konservasi terpelihara	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
6	Cakupan penanganan limbah B3	Persen	17,45	17,95	18,45	18,45	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
7	Persentase pelaku usaha yang taat	Persen	20,94	21,94	22,94	22,94	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
8	Cakupan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Persen	-	44,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
9	Cakupan penghargaan sesuai kriteria	Jenis	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
10	Cakupan Pengaduan yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
11	Capaian penanganan sampah	Ton	447.090	446.642	464.150	464.150	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
12	Capaian pengurangan sampah	Ton	148.023	159.734	174.056	174.056	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
13	Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Persen	16,06	9,64	5,78	5,78	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
14	Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis	Persen	7,41	4,45	2,67	2,67	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
1	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (non akumulasi)	Persen	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target 4	Target 5	Target 6		
1	2	3	Target 4	Target 5	Target 6	Target 7	8
2	Cakupan Layanan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Persen	98,50	99,00	99,00	99,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Cakupan Layanan Administrasi Pencatatan Sipil	Persen	92,50	93,00	94,00	94,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Cakupan perangkat daerah yang melakukan kerja sama aktif	Persen	65,00	70	75	75	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Maksimum deviasi data	Persen	2,00	2,00	2,00	2,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
1	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	73,51	77,69	81,08	81,08	Sekretariat Daerah
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
1	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Angka Pemakaian Kontrasepsi/mCPR	Persen	76,27	76,92	77,57	77,57	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Cakupan Kebutuhan KB yang Belum Terpenuhi (Unmeet Need)	Persen	13,00	12,00	11,00	11,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Penyuluhan dan Penggerakan	Persen	80,56	81,56	82,56	82,56	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Keluarga Berencana	Persen	90,23	91,23	92,23	92,23	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Nilai Variabel Ibangga lingkup Penyuluhan dan Penggerakan	Persen	-	48,13	48,58	48,58	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persen	88,69	90,00	90,69	90,69	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Nilai Variabel Ibangga lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persen	-	53,09	54,07	54,07	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Rumah Dataku Aktif	Persen	24,62	30,77	36,92	36,92	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target 4	Target 5	Target 6		
1	2	3	Target 4	Target 5	Target 6	Target 7	8
10	Sekolah Siaga Kependudukan Aktif	Persen	16,36	23,64	30,91	30,91	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11	Cakupan laporan kependudukan dan keluarga melalui aplikasi SR BKBN yang akurat dan tepat waktu	Persen	80,00	90,00	100,00	100,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	PERHUBUNGAN						
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
2	Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	Persen	9,57	7,33	3,85	3,85	Dinas Perhubungan
3	Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Non Perhubungan	Persen	11,2	7,72	4,24	4,24	Dinas Perhubungan
4	Jumlah Dokumen Perencanaan Perkeretaapian Dalam Kota	Dokumen	-	1	1	2	Dinas Perhubungan
10	KOMUNIKASI DAN INFORMASI						
1	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Nilai penerapan SPBE lingkup Layanan Informasi	Nilai	2,00	2,10	2,20	2,20	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Cakupan pengaduan masyarakat melalui LAPOR ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Nilai layanan informasi masyarakat melalui radio	Nilai	0,4	0,5	0,6	0,6	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Nilai IKM Radio Sonata	Nilai	82,00	85,00	88,31	88,31	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Nilai Penerapan SPBE Lingkup Aplikasi	Nilai	31,35	31,50	31,55	31,55	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Nilai Penerapan SPBE lingkup Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan	Nilai	22,40	22,50	22,60	22,60	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Nilai Penerapan SPBE lingkup Infrastruktur	Nilai	4,50	4,60	4,70	4,70	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
1	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	100	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target 4	Target 5	Target 6		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Cakupan Fasilitas Ijin Usaha Simpan Pinjam Sesuai Prosedur	Persen	-	100	100	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase koperasi yang mematuhi peraturan perundang-undangan	Persen	14,30	15,00	15,60	15,60	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Jumlah KSP/USP yang dilakukan penilaian kesehatan	Koperasi	110	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat	Persen	60	65	70	70	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase Koperasi yang Meningkatkan Omsetnya	Persen	12,29	13,47	15,13	15,13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Jumlah kemitraan usaha koperasi	Kemitraan	-	1	2	2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase Usaha Mikro yang meningkatkan keberdayaan usahanya	Persen	5,06	10,12	11,14	11,14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase Usaha Non Formal yang meningkatkan kemampuan usahanya	Persen	3,59	3,76	3,93	3,93	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Jumlah Kemitraan Usaha Mikro	Kemitraan	N/A	4	8	8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase Usaha Mikro yang omsetnya meningkat	Persen	4,22	4,39	4,64	4,64	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12	PENANAMAN MODAL						
	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Rancangan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal yang Terverifikasi/ Tervalidasi	Dokumen	1	2	3	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Realisasi Investasi Baru Promosi Penanaman Modal	Triliun Rupiah	1,5	1,65	1,815	1,815	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Rata-rata waktu layanan perizinan	Hari	7,00	7,00	7,00	7,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Rata-rata waktu respon pengaduan	Jam	3,00	3,00	3,00	3,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target 4	Target 5	Target 6		
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Persentase penanaman advokasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	Nilai SKM lingkup pelayanan penanaman modal	Nilai	82,00	83,50	85,00	85,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	Persentase peningkatan ketaatan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	Persen	30	45	50	50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9	Cakupan laporan pengelolaan data dan sistem informasi tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
1	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran(non Akumulasi)	Persen	100	100	100	100	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	Persentase organisasi pemuda yang aktif Positif	Persen	51,02	75,51	100,00	100,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
3	Angka Pembangunan Olahraga aspek sarana dan prasarana	Indeks	0,526	0,532	0,539	0,539	Dinas Pemuda dan Olah Raga
4	Angka Pembangunan Olahraga aspek SDM, partisipasi, dan kebugaran jasmani	Indeks	0,127	0,133	0,140	0,140	Dinas Pemuda dan Olah Raga
5	Persentase Pengembangan Kapasitas Organisasi Kepramukaan	Persen	60,00	70,00	80,00	80,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
14	STATISTIK						
1	Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	Nilai	3,30	3,50	3,90	3,90	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	PERSANDIAAN						
1	Nilai Penerapan SPBE lingkup Persandian	Nilai	1,20	1,25	1,37	1,37	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	KEBUDAYAAN						
1	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Persentase sub Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Persen	70,88	72,73	74,83	74,83	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Persentase Lembaga Seni Memenuhi Standar Sanggar Seni	Persen	4,35	5,75	8,42	8,42	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas (wajib KTP) yang mengunjungi peninggalan sejarah (dari 1.830.185 data disdukcapil))	Persen	3,00	5,00	7,00	7,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target 4	Target 5	Target 6		
1	2 Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	3 Persen	51,06	51,61	52,17	7 52,17	8 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17	PERPUSTAKAAN						
1	Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran	Persen	71,73	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Nilai rata-rata aspek pemanfaatan bahan bacaan dan sumber informasi	Nilai	71,73	72,02	72,30	72,30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Nilai rata-rata aspek ketersediaan fasilitas membaca dan sumber informasi	Nilai	86,33	86,33	86,33	86,33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Nilai rata-rata aspek kebiasaan membaca masyarakat	Nilai	67,02	69,78	72,42	72,42	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Nilai sub aspek pemanfaatan koleksi	Nilai	96,30	96,30	96,30	96,30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	KEARSIPAN						
1	Nilai Pengawasan Kearsipan pada aspek kebijakan, pengelolaan arsip, sumber daya kearsipan	Nilai	19,50	20,10	21,00	21,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Nilai pengawasan kearsipan pada aspek Sosialisasi Kebijakan, pembinaan dan pengawasan Kearsipan	Nilai	37,60	39,30	41,40	41,40	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Nilai pengawasan kearsipan pada aspek pengelolaan arsip	Nilai	8,10	8,40	8,40	8,40	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Persentase Pelayanan Arsip Sesuai Prosedur	Nilai	100	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Perikanan	Persen	42,43	45,26	48,10	48,10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Persentase Binaan yang menjadi Pelaku Usaha Pangan Olahan Hasil Perikanan	Persen	5,00	7,00	9,00	9,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Hasil Perikanan	Persen	99,10	99,20	99,30	99,30	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target 4	Target 5	Target 6		
1	2	3	4	5	6	7	8
2 PARIWISATA							
1	Persentase objek daya tarik wisata yang berkelanjutan	Persen	64,04	65,79	67,54	67,54	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Tingkat Citra Pariwisata Kota Bandung	Poin	3,41	3,61	3,81	3,81	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Ruang kreatif aktif	Persen	65,42	80,65	100	100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tersertifikasi profesi	Persen	8,1	9,3	10	10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3 PERTANIAN							
1	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian dan Peternakan	Persen	65	75	85	85	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Persentase Petani yang Mengikuti Asuransi Usaha Tani Padi	Persen	5	10	15	15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Cakupan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Hasil peternakan	Persen	99,10	99,20	99,30	99,30	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Cakupan Penanganan Kasus Penyakit Zoonosa	Persen	100	100,00	100,00	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Persentase Binaan yang menjadi Pelaku Usaha Pangan Olahan Hasil Peternakan	Persen	5	7	9	9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6	Persentase Kejadian Bencana Pertanian Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Persentase Kelompok Tani Minimal Kategori Kelas Lanjut	Persen	10,80	13,40	15,90	15,90	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4 PERDAGANGAN							
1	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2	Persentase pelaku usaha perdagangan yang memiliki perizinan	Persen	100	100	100	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	Persentase pelaku usaha yang melakukan pemasaran online	Persen	4,52	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4	Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok	Persen	15	15	15	15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
5	Pertumbuhan nilai ekspor	Persen	0,3	0,3	0,3	0,3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target 4	Target 5	Target 6		
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Persentase tera/tera ulang sesuai prosedur	Persen	100	100	100	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
7	Persentase pelaku usaha perdagangan yang meningkatkan daya saingnya	Persen	75,79	79,56	83,33	83,33	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
5	PERINDUSTRIAN						
1	Persentase pelaku IKM non sentra industri yang meningkat daya saingnya	Persen	55	60	68,49	68,49	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2	Persentase pelaku IKM pada sentra industri yang meningkat daya saingnya	Persen	30	40	50,00	50,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
1	SEKRETARIAT DAERAH						
1	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
2	Nilai AKIP Komponen Pelaporan	Nilai	12,00	12,50	12,75	12,75	Sekretariat Daerah
3	IKM Bagian Organisasi	Nilai	87,70	87,80	87,9	87,9	Sekretariat Daerah
4	Cakupan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang organisasi sesuai prosedur	Persen	100,00	100,00	100	100	Sekretariat Daerah
5	Persentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang organisasi ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100	100	Sekretariat Daerah
6	Cakupan Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai prosedur	Persen	100,00	100,00	100	100	Sekretariat Daerah
7	Cakupan layanan keprotokolan dan dokumentasi kegiatan pimpinan	Persen	100,00	100,00	100	100	Sekretariat Daerah
8	IKM Bagian keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Nilai	87,70	87,80	87,9	87,9	Sekretariat Daerah
9	IKM Bagian perencanaan , keuangan dan kepegawaian	Nilai	87,70	87,80	87,9	87,9	Sekretariat Daerah
10	Persentase dokumen perencanaan , keuangan dan kepegawaian tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100	100	Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target 4	Target 5	Target 6		
1	2	3	Target 4	Target 5	Target 6	Target 7	8
11	Persentase temuan BPK/Inspektorat lingkup keuangan ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100	100	Sekretariat Daerah
12	Cakupan layanan sarana prasarana kegiatan pimpinan	Persen	100,00	100,00	100	100	Sekretariat Daerah
13	Persentase temuan BPK/Inspektorat lingkup aset ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100	100	Sekretariat Daerah
14	IKM Bagian Umum	Nilai	87,70	87,80	87,9	87,9	Sekretariat Daerah
15	Persentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang administrasi umum dan kepegawaian ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100	100	Sekretariat Daerah
16	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron	Persen	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
17	Dokumen LPPD terverifikasi dan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
18	Cakupan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang tata pemerintahan sesuai prosedur	Persen	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
19	Persentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang tata pemerintahan ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
20	IKM bagian tata pemerintahan	Nilai	87,7	87,8	87,9	87,9	Sekretariat Daerah
21	Cakupan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang hukum sesuai prosedur	Persen	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
22	Persentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang hukum ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
23	IKM Bagian Hukum	Nilai	87,7	87,8	87,9	87,9	Sekretariat Daerah
24	Persentase dokumen kerjasama dan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang kerjasama sesuai prosedur	Persen	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
25	Persentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kerjasama ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8
26	IKM Bagian Kerjasama Cakupan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang kesra sesuai prosedur	Nilai	87,7	87,8	87,9	87,9	Sekretariat Daerah
27	Persentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kesra ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
28	IKM Bagian Kesra Cakupan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang administrasi pembangunan sesuai prosedur	Nilai	87,7	87,8	87,9	87,9	Sekretariat Daerah
30	Persentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi pembangunan	Persen	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
31	IKM Bagian Administrasi Pembangunan Cakupan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang perekonomian sesuai prosedur	Nilai	87,7	87,8	87,9	87,9	Sekretariat Daerah
32	Persentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi pembangunan ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
33	IKM Bagian Administrasi Pembangunan Cakupan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang perekonomian sesuai prosedur	Nilai	87,7	87,8	87,9	87,9	Sekretariat Daerah
33	Persentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perekonomian ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
34	IKM Bagian Perekonomian Cakupan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang Pengadaan Barang dan Jasa sesuai prosedur	Nilai	87,7	87,8	87,9	87,9	Sekretariat Daerah
36	Persentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang PBJ ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
37	Cakupan Layanan PBJ sesuai Prosedur	Persen	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
38		Persen	100	100	100	100	Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Target	Target		
1	2 IKM Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	3 Nilai	4 87,7	5 87,8	6 87,9	7 87,9	8 Sekretariat Daerah
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH						
1	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2	Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD kepada pimpinan dan anggota DPRD	Persen	87	90	95	95	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
V 1	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN						
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	100	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
2	Persentase Sasaran RPJMD yang di Breakdown (Cascading)	Persen	66,67	83,33	100	100	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
3	Persentase Rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Renja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
4	Persentase Perangkat Daerah yang Perencanaan Kinerjanya terukur;	Persen	66,67	83,33	100	100	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
5	Persentase Rekomendasi hasil Pengendalian dan Evaluasi (Dalev) Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
2	KEUANGAN						
1	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (non akumulasi)	persen	100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Sesuai Perundang-undangan	persen	90	95	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3	Persentase Laporan BMD Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	persen	100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target 4	Target 5	Target 6		
1	2	3	Target 4	Target 5	Target 6	Target 7	8
4	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP	persen	100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	Ketepatan Waktu Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	persen	100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6	Laporan keuangan Kota Bandung tepat waktu	persen	100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
7	Persentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/bersertifikat dari BPN	persen	24	27	30	30	Badan Keuangan dan Aset Daerah
8	Laporan BMD tepat waktu	persen	100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
9	Tertib pengamanan BMD Kota Bandung	persen	60	80	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
10	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (non akumulasi)	Persen	100	100	100	100	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
11	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	Rp.	2.700.000.000	2.088.000.000.000	2.054.000.000.000	2.054.000.000.000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
1	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (non akumulasi)	Persen	100	100	100	100	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Nilai Penerapan Sistem Merit Lingkup Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Nilai	100,00	104,00	104,00	112,00	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Nilai Penerapan Sistem Merit Lingkup Mutasi dan Promosi	Nilai	95,00	100,00	105,00	105,00	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Nilai Penerapan Sistem Merit Lingkup Penilaian Kinerja Apartur dan Penghargaan	Nilai	117,00	122,00	127,00	127,00	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Nilai Penerapan Sistem Merit Lingkup Pengembangan Kompetensi Aparatur	Nilai	40,50	45,50	55,50	47,50	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
1	Persentase Hasil Kajian yang dimanfaatkan sebagai dasar Perumusan Kebijakan	Persen	100	100	100	100	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target 4	Target 5	Target 6		
1	2	3	4	5	6	7	8
VI UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
1	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (non akumulasi)	Persen	100	100	100	100	Inspektorat
2	Cakupan pelaksanaan pengawasan yang efektif	Persen	100	100	100	100	Inspektorat
3	Persentase Pengaduan Kinerja Perangkat daerah ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	Inspektorat
4	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP minimal 2.50	Persen	100	100	100	100	Inspektorat
VII UNSUR KEWILAYAHAN							
1	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Sukasari
2	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	50	75	100	100	Kecamatan Sukasari
3	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	80	82	85	85	Kecamatan Sukasari
4	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	75	80	85	85	Kecamatan Sukasari
5	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	Persen	81,21	82	83	83	Kecamatan Cidadap
6	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	66,67	100	100	100	Kecamatan Cidadap
7	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	40,95	66,66	77,77	77,77	Kecamatan Cidadap
8	Persentase Siskamling RW aktif	Persen	48,27	51,72	58,62	58,62	Kecamatan Cidadap
9	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Sukajadi
10	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	60	80	100	100	Kecamatan Sukajadi
11	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	78,50	79,00	79,50	79,5	Kecamatan Sukajadi
12	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	63,27	73,47	83,67	83,67	Kecamatan Sukajadi
13	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Cicendo
14	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Cicendo

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target 4	Target 5	Target 6		
1	2	3	Target 4	Target 5	Target 6	Target 7	8
15	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	81,6	81,65	81,7	81,7	Kecamatan Cicendo
16	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	69,64	71,43	73,21	73,21	Kecamatan Cicendo
17	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	Persen	100,00	100	100	100,00	Kecamatan Andir
18	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	33,33	50,00	66,67	66,67	Kecamatan Andir
19	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	56,36	59,15	61,92	61,92	Kecamatan Andir
20	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	50,00	61,11	72,22	72,22	Kecamatan Andir
21	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	persen	84,95	84,97	87	87	Kecamatan Coblong
22	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	83,33	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Coblong
23	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	91,97	93,71	95,46	95,46	Kecamatan Coblong
24	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Coblong
25	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Bandung Wetan
26	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	66,67	66,67	100	100	Kecamatan Bandung Wetan
27	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	73,15	76,08	79,12	79,12	Kecamatan Bandung Wetan
28	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	72,22	75	77,78	77,78	Kecamatan Bandung Wetan
29	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	Persen	100,00	100	100	100	Kecamatan Sumur Bandung
30	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	75,00	75,00	100	100	Kecamatan Sumur Bandung
31	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	75,00	77,5	80	80	Kecamatan Sumur Bandung
32	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	51,35	56,76	62,16	62,16	Kecamatan Sumur Bandung
33	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Cibeunying Kidul

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target		
			Target 4	Target 5	Target 6			
1	2	3	Target 4	Target 5	Target 6	Target 7	8	
34	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	50	66,67	66,67	66,67	Kecamatan Cibeunying Kidul	
35	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	80,95	82,86	83,81	83,81	Kecamatan Cibeunying Kidul	
36	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	45,98	48,28	50,57	50,57	Kecamatan Cibeunying Kidul	
37	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	persen	100	100	100	100	Kecamatan Cibeunying Kaler	
38	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	50	75	75	75	Kecamatan Cibeunying Kaler	
39	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	79,30	82,76	86,21	86,21	Kecamatan Cibeunying Kaler	
40	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	50	54,35	65,22	65,22	Kecamatan Cibeunying Kaler	
41	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	persen	100	100	100	100	Kecamatan Astanaanyar	
42	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	83,33	100,00	100,00	100	Kecamatan Astanaanyar	
43	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	71	75	78	78	Kecamatan Astanaanyar	
44	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	51	64	77	77	Kecamatan Astanaanyar	
45	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	persen	100	100	100	100	Kecamatan Bojongloa Kaler	
46	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Bojongloa Kaler	
47	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	60	80	100	100	Kecamatan Bojongloa Kaler	
48	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Bojongloa Kaler	
49	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	persen	100	100	100	100	Kecamatan Bojongloa Kidul	
50	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	66,67	83,33	100,00	100,00	Kecamatan Bojongloa Kidul	
51	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	76,36	78	80	80	Kecamatan Bojongloa Kidul	

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target 4	Target 5	Target 6		
1	2	3	Target 4	Target 5	Target 6	Target 7	8
52	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	56,82	65,91	72,73	72,73	Kecamatan Bojongloa Kidul
53	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Babakan Ciparay
54	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	50,00	83,33	100,00	100,00	Kecamatan Babakan Ciparay
55	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	80	82	82,5	82,5	Kecamatan Babakan Ciparay
56	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	50,8	52,6	61,4	61,4	Kecamatan Babakan Ciparay
57	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Bandung Kulon
58	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	62,50	75,00	100,00	100,00	Kecamatan Bandung Kulon
59	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	84	84,5	85	85	Kecamatan Bandung Kulon
60	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	70,75	72,70	72,85	72,85	Kecamatan Bandung Kulon
61	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Regol
62	Persentase Kelurahan Unggul	Nilai	42,86	57,14	71,43	71,43	Kecamatan Regol
63	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	66,67	67,9	69,14	69,14	Kecamatan Regol
64	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	76,67	85	91,67	91,67	Kecamatan Regol
65	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Lengkong
66	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	85,71	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Lengkong
67	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	67,78	69,75	70,58	70,58	Kecamatan Lengkong
68	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	55,92	59,87	64,03	64,03	Kecamatan Lengkong
69	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Batununggal
70	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	62,50	75,00	100,00	100,00	Kecamatan Batununggal

VIII - 60

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1	2	3	Target 4	Target 5	Target 6	Target 7	8
71	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	72,24	82,38	87,15	87,15	Kecamatan Batununggal
72	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	72,28	79,52	81,93	81,93	Kecamatan Batununggal
73	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Ujungberung
74	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	60	80	100	100	Kecamatan Ujungberung
75	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	60,12	70	80	80	Kecamatan Ujungberung
76	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	91,52542373	94,92	100	100	Kecamatan Ujungberung
77	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	Persen	90	90	90	90	Kecamatan Kiaracondong
78	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	66,67	83,33	100	100	Kecamatan Kiaracondong
79	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	74	75	76	76	Kecamatan Kiaracondong
80	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	95,29	96,47	98,82	98,82	Kecamatan Kiaracondong
81	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	persen	100	100	100	100	Kecamatan Arcamanik
82	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	50,00	75	100,00	100,00	Kecamatan Arcamanik
83	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	69,98	75,69	81,4	81,4	Kecamatan Arcamanik
84	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	50	54,35	65,22	65,22	Kecamatan Arcamanik
85	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	persen	100,00	100	100,00	100,00	Kecamatan Cibiru
86	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	50,00	75	100,00	100,00	Kecamatan Cibiru
87	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	80,50	82	83,50	83,50	Kecamatan Cibiru
88	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	50,94	58,49056604	66,04	66,04	Kecamatan Cibiru
89	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Antapani
90	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	50	75	100	100	Kecamatan Antapani
91	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	80,50	81,00	81,50	81,50	Kecamatan Antapani

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target 4	Target 5	Target 6		
1	2	3	Target 4	Target 5	Target 6	Target 7	8
92	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	76,00	78,00	80,00	80,00	Kecamatan Antapani
93	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Rancasari
94	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	75	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Rancasari
95	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	77	78	79	79	Kecamatan Rancasari
96	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	70	75	80	80	Kecamatan Rancasari
97	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	Persen	90,00	90	90,00	90,00	Kecamatan Buahbatu
98	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	75,00	75	100,00	100,00	Kecamatan Buahbatu
99	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	73,13	74,62	76,12	76,12	Kecamatan Buahbatu
100	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	78	79	80	80	Kecamatan Buahbatu
101	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	persen	100	100	100	100	Kecamatan Bandung Kidul
102	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	75,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Bandung Kidul
103	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	65	77	86	86	Kecamatan Bandung Kidul
104	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	59	65	70	70	Kecamatan Bandung Kidul
105	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	persen	100	100	100	100	Kecamatan Gedebage
106	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	75,00	75,00	100,00	100,00	Kecamatan Gedebage
107	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	60	70	80	80	Kecamatan Gedebage
108	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	70	80	90	90	Kecamatan Gedebage
109	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	persen	100	100	100	100	Kecamatan Panyileukan
110	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Panyileukan
111	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	60	70	80	80	Kecamatan Panyileukan
112	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	48,65	56,76	64,86	64,86	Kecamatan Panyileukan
113	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	persen	100	100	100	100	Kecamatan Cinambo
114	Persentase Kelurahan Unggul	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Cinambo

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target 4	Target 5	Target 6		
1	2	3	Target 4	Target 5	Target 6	Target 7	8
115	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	82,84	86,21	87,25	87,25	Kecamatan Cinambo
116	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	91,25	91,3	91,38	91,38	Kecamatan Cinambo
117	Persentase pelayanan administrasi perkantoran (non akumulasi)	persen	100	100	100	100	Kecamatan Mandalajati
118	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	50	75	75	75	Kecamatan Mandalajati
119	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen	78	79	80	80	Kecamatan Mandalajati
120	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen	56	62	68	68	Kecamatan Mandalajati
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
1	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (Non Akumulasi)	Persen	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Ideologi	Persen	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Politik	Persen	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Sosial Kemasyarakatan	Persen	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persen	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Kewaspadaan Nasional	Persen	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



PENUTUP

BAB

IX





9.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan yang berisi isu-isu/program-program strategis yang dilaksanakan dan dicapai dalam 5 tahun mendatang, cara mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan. Dokumen Perubahan RPJMD ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk pembangunan Kota Bandung periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dalam mewujudkan rencana yang dimuat dalam dokumen ini, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a) Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kota Bandung. Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Perubahan Renstra perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Bandung harus mendukung dan sinergi dengan dokumen Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang mengatur perencanaan pembangunan lima tahunan perangkat daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
- b) Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan di Kota Bandung yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung tahun 2022 dan 2023. Selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2022 dan 2023.
- c) Perubahan RPJMD harus benar-benar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintah kota dalam melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, karena setiap ketidaksesuaian, baik yang menyangkut kebijakan maupun pelaksanaannya dapat dinyatakan sebagai ketidakpatuhan bahkan pelanggaran.
- d) Dalam pelaksanaan pembangunan, selain menggunakan APBD Pemerintah Daerah Kota Bandung, diupayakan sumber-sumber pendanaan lainnya yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Corporate Social Responsibility* (CSR), hibah/bantuan dalam dan luar negeri, serta swadaya masyarakat dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- e) Bappelitbang melakukan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah secara periodik untuk mengukur/mengendalikan pelaksanaan rencana jangka menengah ke tahunan dan mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan.

9.2. Pedoman Transisi

Masa jabatan Wali Kota/Wakil Wali Kota Bandung periode 2018 – 2023 akan berakhir pada September 2023, dengan demikian RPJMD juga akan berakhir pada kurun waktu yang sama, sementara RPJMD periode yang baru belum disusun/ditetapkan. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Bandung, penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2024 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025, penyelesaian target kinerja RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang belum tercapai, berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Rancangan RKP Tahun 2024 untuk menjaga keselarasan pembangunan daerah dengan nasional. Selain itu, pembangunan 2024 diarahkan juga untuk mengantisipasi perkembangan pembangunan yang akan mempengaruhi kinerja Pemerintah Kota Bandung. Selanjutnya RKPD Kota Bandung Tahun 2024 menjadi bagian dari RPJMD periode berikutnya.

WALI KOTA BANDUNG,

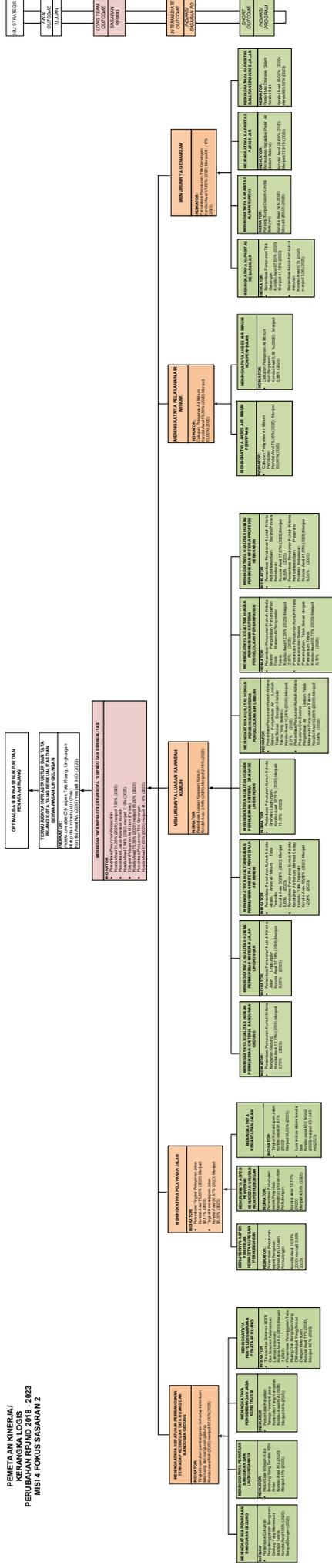
TTD

ODED MOHAMAD DANIAL



LAMPIRAN

**PEMETAAN KINERJA/
KERANGKA LOGIS
PERUBAHAN SASARAN 2
MISI 4 FOKUS SASARAN 2**



**PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS
PERUBAHAN RPJMD 2018 - 2023
MISI 5**

